BUPATI SIGI

PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG :

PERTANGGUNGAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2026

SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas;dan
g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a.	pendapatan	Rp	1.189.888.414.789,98
b.	belanja	Rp	1.205.322.078.915,00
	defisit	Rp	(15.433.664.125,02)
c.	pembiayaan		
	- penerimaan	Rp	39.112.019.642,74
	- pengeluaran	Rp	0,00
d.	pembiayaan netto	Rp	39.112.019.642,74

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

1. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp85.515.100.882,02 dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.275.403.515.672,00
b.	realisasi	Rp	1.189.888.414.789,98
c.	selisih	Rp	85.515.100.882,02

2. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp109.182.316.748,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.314.504.395.663,00
b.	realisasi	Rp	1.205.322.078.915,00
c.	selisih	Rp	109.182.316.748,00

3. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(23.667.215.865,98) dengan rincian sebagai berikut :

a.	surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(39.100.879.991,00)
b.	realisasi	Rp	(15.433.664.125,02)
c.	selisih	Rp	(23.667.215.865,98)

4. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp11.139.651,74 dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	39.100.879.991,00
b.	realisasi	Rp	39.112.019.642,74
c.	selisih	Rp	11.139.651,74

5. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. Nihil dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b.	realisasi	Rp	0,00
c.	selisih	Rp	Nihil

6. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp11.139.651,74 dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	39.100.879.991,00
b.	realisasi	Rp	39.112.019.642,74
c.	selisih	Rp	11.139.651,74

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	39.100.879.990,74
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	39.112.019.642,74
c.	sub total (a – b)	Rp	(11.139.652,00)
d.	sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	23.678.355.517,72
e.	sub total (c + d)	Rp	23.667.215.865,72
f.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	11.139.652,00
g.	lain-lain	Rp	0,00
h.	saldo anggaran lebih akhir	Rp	23.678.355.517,72

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp	1.941.604.945.187,53
b.	jumlah kewajiban	Rp	20.289.017.376,96
c.	ekuitas dana	Rp	1.921.315.927.810,57
d.	jumlah kewajiban dan ekuitas dana	Rp	1.941.604.945.187,53

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	pendapatan – LO	Rp	1.103.972.439.744,82
b.	beban	Rp	1.133.257.413.463,21
c.	surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(67.321.480,00)
d.	beban luar biasa	Rp	0,00
e.	surplus/(defisit) – LO (a - b + c - d)	Rp	(29.352.295.198,39)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2025	Rp	39.587.850.026,74
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	50.317.096.374,48
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(65.750.760.499,50)
d.	arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	(486.970.036,00)
e.	koreksi SiLPA	Rp	11.139.652,00
f.	saldo kas akhir per 31 Desember 2025	Rp	23.678.355.517,72

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp	1.969.786.578.201,86
b.	surplus laporan operasional	Rp	(29.352.295.198,39)
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	(19.118.355.192,90)
	- koreksi ekuitas - aset lancar	Rp	765.370.934,14
	- koreksi ekuitas - aset tetap	Rp	(22.345.294.254,19)
	- koreksi ekuitas - aset lainnya	Rp	(1.027.646.165,85)
	- koreksi ekuitas - kewajiban jangka pendek	Rp	3.489.214.293,00
d.	ekuitas akhir (a + b + c)	Rp	1.921.315.927.810,57

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2025 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : LRA terdiri atas:
   Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III : Laporan operasional;
d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah.
   Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Perusahaan Perseroan Daerah;
   Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi) Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 24 Agustus 2026

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 35,04/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat.

Sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, setiap tahun anggaran wajib disampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran, yang selanjutnya menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, maka siklus pengelolaan keuangan daerah dapat diselesaikan secara utuh dan sah menurut hukum, sehingga menjamin adanya kepastian, keteraturan, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 163

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. SIGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.275.403.515.672,00**	**1.189.888.414.789,98**	**93,29**	**1.410.150.504.679,44**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**103.756.606.200,00**	**100.945.078.154,38**	**97,29**	**84.824.192.278,39**
4.1.01	Pajak Daerah	47.352.244.583,00	44.393.219.166,00	93,75	35.118.053.979,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.422.050.000,00	2.022.512.540,00	83,50	3.039.618.382,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.337.214.390,00	2.337.214.390,00	100,00	2.092.871.872,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.645.097.227,00	52.192.132.058,38	101,05	44.573.648.045,39
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**103.756.606.200,00**	**100.945.078.154,38**	**97,29**	**84.824.192.278,39**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.151.046.082.875,00**	**1.068.727.289.084,60**	**92,84**	**1.309.724.872.946,00**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.070.498.098.163,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	117.419.602.500,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	655.819.930.339,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	144.946.300.321,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	152.312.265.003,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	79.162.852.000,00	62.560.154.084,00	79,02	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	646.984.503.276,00	633.151.507.541,00	97,86	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	182.941.497.152,00	172.291.869.085,00	94,17	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**909.088.852.428,00**	**868.003.530.710,00**	**95,48**	**1.070.498.098.163,00**
4.2.01.05	Dana Desa	147.925.538.000,00	119.034.921.766,00	80,46	154.494.636.326,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	21.514.135.000,00	21.514.135.000,00	100,00	31.841.897.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**169.439.673.000,00**	**140.549.056.766,00**	**82,94**	**186.336.533.326,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.517.557.447,00	60.174.701.608,60	82,97	52.890.241.457,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	72.317.557.447,00	59.974.701.608,60	82,93	52.790.241.457,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**72.517.557.447,00**	**60.174.701.608,60**	**82,97**	**52.890.241.457,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1.151.046.082.875,00**	**1.068.727.289.084,60**	**92,84**	**1.309.724.872.946,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**20.600.826.597,00**	**20.216.047.551,00**	**98,13**	**15.601.439.455,05**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.600.826.597,00	20.216.047.551,00	98,13	15.601.439.455,05
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**20.600.826.597,00**	**20.216.047.551,00**	**98,13**	**15.601.439.455,05**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.275.403.515.672,00**	**1.189.888.414.789,98**	**93,29**	**1.410.150.504.679,44**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.314.504.395.663,00**	**1.205.322.078.915,00**	**91,69**	**1.441.015.456.141,16**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.018.338.924.612,40**	**941.434.290.727,50**	**92,44**	**1.005.345.704.315,16**
5.1.01	Belanja Pegawai	644.783.534.944,00	580.775.450.926,00	90,07	547.590.556.019,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.028.858.468,40	331.752.728.828,50	96,71	380.749.475.902,16
5.1.04	Belanja Subsidi	2.200.000.000,00	2.199.945.127,00	99,99	2.450.817.950,00
5.1.05	Belanja Hibah	28.135.531.200,00	26.547.165.846,00	94,35	69.417.912.244,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	191.000.000,00	159.000.000,00	83,24	5.136.942.200,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.018.338.924.612,40**	**941.434.290.727,50**	**92,44**	**1.005.345.704.315,16**
5.2	**BELANJA MODAL**	**68.109.141.486,60**	**65.925.778.299,50**	**96,79**	**203.993.787.011,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	982.534.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.783.663.799,00	21.994.787.775,00	96,53	31.566.114.816,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.140.627.912,60	18.544.762.808,50	96,88	67.896.098.558,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.711.622.895,00	19.453.774.146,00	98,69	98.114.695.523,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.183.226.880,00	5.743.677.970,00	92,89	5.170.359.809,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	290.000.000,00	188.775.600,00	65,09	263.984.305,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**68.109.141.486,60**	**65.925.778.299,50**	**96,79**	**203.993.787.011,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.650.000.000,00**	**4.944.688.400,00**	**87,51**	**3.912.745.909,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	87,51	3.912.745.909,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.650.000.000,00**	**4.944.688.400,00**	**87,51**	**3.912.745.909,00**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**222.406.329.564,00**	**193.017.321.488,00**	**86,78**	**227.763.218.906,00**
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.645.979.559,00	4.645.979.559,00	100,00	2.835.557.175,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	331.513.205,00	331.513.205,00	100,00	289.127.805,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	217.428.836.800,00	188.039.828.724,00	86,48	224.638.533.926,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**222.406.329.564,00**	**193.017.321.488,00**	**86,78**	**227.763.218.906,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.314.504.395.663,00**	**1.205.322.078.915,00**	**91,69**	**1.441.015.456.141,16**
	SURPLUS/DEFISIT	**(39.100.879.991,00)**	**(15.433.664.125,02)**	**39,47**	**(30.864.951.461,72)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**39.100.879.991,00**	**39.112.019.642,74**	**100,02**	**69.965.831.452,46**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**39.100.879.991,00**	**39.112.019.642,74**	**100,02**	**69.965.831.452,46**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.100.879.991,00	39.112.019.642,74	100,02	69.965.831.452,46
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**39.100.879.991,00**	**39.112.019.642,74**	**100,02**	**69.965.831.452,46**
	PEMBIAYAAN NETTO	**39.100.879.991,00**	**39.112.019.642,74**	**100,02**	**69.965.831.452,46**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**23.678.355.517,72**	**0,00**	**39.100.879.990,74**

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

KABUPATEN SIGI

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	**Pendapatan**	**1.275.403.515.672,00**	**1.189.888.414.789,98**	**(85.515.100.882,02)**	**93,29**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**49.994.588.976,00**	**50.678.012.900,00**	**683.423.924,00**	**101,36**
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**49.194.588.976,00**	**50.075.949.401,00**	**881.360.425,00**	**101,79**
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Kesehatan**	**7.194.588.976,00**	**6.893.575.300,00**	**(301.013.676,00)**	**95,81**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	7.194.588.976,00	6.893.575.300,00	(301.013.676,00)	95,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.194.588.976,00	6.893.575.300,00	(301.013.676,00)	95,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.194.588.976,00	6.893.575.300,00	(301.013.676,00)	95,81
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0001**		**RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI**	**42.000.000.000,00**	**43.180.716.152,00**	**1.180.716.152,00**	**102,81**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	42.000.000.000,00	43.180.716.152,00	1.180.716.152,00	102,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42.000.000.000,00	43.180.716.152,00	1.180.716.152,00	102,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.000.000.000,00	43.180.716.152,00	1.180.716.152,00	102,81
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0002**		**Puskesmas Biromaru**	**0,00**	**82.211,00**	**82.211,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	82.211,00	82.211,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	82.211,00	82.211,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	82.211,00	82.211,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0003**		**Puskesmas Dolo**	**0,00**	**88.666,00**	**88.666,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	88.666,00	88.666,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	88.666,00	88.666,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	88.666,00	88.666,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0004**		**Puskesmas Tinggede**	**0,00**	**49.065,00**	**49.065,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	49.065,00	49.065,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	49.065,00	49.065,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	49.065,00	49.065,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0005**		**Puskesmas Marawola**	**0,00**	**66.310,00**	**66.310,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	66.310,00	66.310,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	66.310,00	66.310,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	66.310,00	66.310,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0007**		**Puskesmas Baluase**	**0,00**	**214.165,00**	**214.165,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	214.165,00	214.165,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	214.165,00	214.165,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	214.165,00	214.165,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0008**		**Puskesmas Kinovaro**	**0,00**	**70.474,00**	**70.474,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	70.474,00	70.474,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	70.474,00	70.474,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	70.474,00	70.474,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0009**		**Puskesmas Dombusoi**	**0,00**	**76.662,00**	**76.662,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	76.662,00	76.662,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	76.662,00	76.662,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	76.662,00	76.662,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0010**		**Puskesmas Kamaipura**	**0,00**	**71.811,00**	**71.811,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	71.811,00	71.811,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	71.811,00	71.811,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	71.811,00	71.811,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0011**		**Puskesmas Panderee**	**0,00**	**113.595,00**	**113.595,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	113.595,00	113.595,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	113.595,00	113.595,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	113.595,00	113.595,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0012**		**Puskesmas Kulawi**	**0,00**	**11.684,00**	**11.684,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	11.684,00	11.684,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	11.684,00	11.684,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	11.684,00	11.684,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0013**		**Puskesmas Gimpu**	**0,00**	**177.425,00**	**177.425,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	177.425,00	177.425,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	177.425,00	177.425,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	177.425,00	177.425,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0014**		**Puskesmas Lindu**	**0,00**	**53.673,00**	**53.673,00**	**0,00**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	53.673,00	53.673,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	53.673,00	53.673,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	53.673,00	53.673,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0015**		**Puskesmas Kantewu**	**0,00**	**50.735,00**	**50.735,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	50.735,00	50.735,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	50.735,00	50.735,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	50.735,00	50.735,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0016**		**Puskesmas Banasu**	**0,00**	**86.076,00**	**86.076,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	86.076,00	86.076,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	86.076,00	86.076,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	86.076,00	86.076,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0017**		**Puskesmas Towulu**	**0,00**	**53.130,00**	**53.130,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	53.130,00	53.130,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	53.130,00	53.130,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	53.130,00	53.130,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0018**		**Puskesmas Palolo**	**0,00**	**154.898,00**	**154.898,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	154.898,00	154.898,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	154.898,00	154.898,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	154.898,00	154.898,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0019**		**Puskesmas Banpres**	**0,00**	**73.460,00**	**73.460,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	73.460,00	73.460,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	73.460,00	73.460,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	73.460,00	73.460,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0020**		**Puskesmas Nokilalaki**	**0,00**	**123.285,00**	**123.285,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	123.285,00	123.285,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	123.285,00	123.285,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	123.285,00	123.285,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0006**		**Puskesmas Kaleke**	**0,00**	**40.624,00**	**40.624,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	40.624,00	40.624,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	40.624,00	40.624,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	40.624,00	40.624,00	0,00
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**800.000.000,00**	**602.063.499,00**	**(197.936.501,00)**	**75,25**
1.03	**1.03.1.04.0.00.01.0000**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**800.000.000,00**	**602.063.499,00**	**(197.936.501,00)**	**75,25**
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	800.000.000,00	602.063.499,00	(197.936.501,00)	75,25
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	800.000.000,00	602.063.499,00	(197.936.501,00)	75,25
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	800.000.000,00	602.063.499,00	(197.936.501,00)	75,25
2			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**582.050.000,00**	**394.945.000,00**	**(187.105.000,00)**	**67,85**
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**236.000.000,00**	**236.190.000,00**	**190.000,00**	**100,08**
2.09	**2.09.3.25.0.00.01.0000**		**Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan**	**236.000.000,00**	**236.190.000,00**	**190.000,00**	**100,08**
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	236.000.000,00	236.190.000,00	190.000,00	100,08
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	236.000.000,00	236.190.000,00	190.000,00	100,08
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	236.000.000,00	236.190.000,00	190.000,00	100,08
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**86.050.000,00**	**30.555.000,00**	**(55.495.000,00)**	**35,50**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**86.050.000,00**	**30.555.000,00**	**(55.495.000,00)**	**35,50**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	86.050.000,00	30.555.000,00	(55.495.000,00)	35,50
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86.050.000,00	30.555.000,00	(55.495.000,00)	35,50
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	86.050.000,00	30.555.000,00	(55.495.000,00)	35,50
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**260.000.000,00**	**128.200.000,00**	**(131.800.000,00)**	**49,30**
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Perhubungan**	**260.000.000,00**	**128.200.000,00**	**(131.800.000,00)**	**49,30**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	260.000.000,00	128.200.000,00	(131.800.000,00)	49,30
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	260.000.000,00	128.200.000,00	(131.800.000,00)	49,30
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	260.000.000,00	128.200.000,00	(131.800.000,00)	49,30
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**1.040.000.000,00**	**1.025.504.041,00**	**(14.495.959,00)**	**98,60**
3.26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**240.000.000,00**	**232.666.541,00**	**(7.333.459,00)**	**96,94**
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pariwisata**	**240.000.000,00**	**232.666.541,00**	**(7.333.459,00)**	**96,94**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	240.000.000,00	232.666.541,00	(7.333.459,00)	96,94
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	240.000.000,00	232.666.541,00	(7.333.459,00)	96,94
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	240.000.000,00	232.666.541,00	(7.333.459,00)	96,94
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**100.000.000,00**	**65.480.000,00**	**(34.520.000,00)**	**65,48**
3.27	**3.27.0.00.0.00.08.0000**		**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**100.000.000,00**	**65.480.000,00**	**(34.520.000,00)**	**65,48**
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	65.480.000,00	(34.520.000,00)	65,48
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	65.480.000,00	(34.520.000,00)	65,48
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	65.480.000,00	(34.520.000,00)	65,48
3.30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**700.000.000,00**	**727.357.500,00**	**27.357.500,00**	**103,90**
3.30	**3.31.3.30.0.00.02.0000**		**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**700.000.000,00**	**727.357.500,00**	**27.357.500,00**	**103,90**
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	727.357.500,00	27.357.500,00	103,90

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	700.000.000,00	727.357.500,00	27.357.500,00	103,90
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	700.000.000,00	727.357.500,00	27.357.500,00	103,90
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.223.786.876.696,00**	**1.137.789.952.848,98**	**(85.996.923.847,02)**	**92,97**
5.02			**KEUANGAN**	**1.223.786.876.696,00**	**1.137.789.952.848,98**	**(85.996.923.847,02)**	**92,97**
5.02	**5.02.0.00.0.00.03.0000**		**Badan Pendapatan Daerah**	**47.352.244.583,00**	**44.420.518.421,00**	**(2.931.726.162,00)**	**93,80**
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	47.352.244.583,00	44.420.518.421,00	(2.931.726.162,00)	93,80
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.352.244.583,00	44.420.518.421,00	(2.931.726.162,00)	93,80
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4.1.01	Pajak Daerah	47.352.244.583,00	44.393.219.166,00	(2.959.025.417,00)	93,75
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	27.299.255,00	27.299.255,00	0,00
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**1.176.434.632.113,00**	**1.093.369.434.427,98**	**(83.065.197.685,02)**	**92,93**
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.176.434.632.113,00	1.093.369.434.427,98	(83.065.197.685,02)	92,93
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.982.311.617,00	11.319.673.092,38	(662.638.524,62)	94,46
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.337.214.390,00	2.337.214.390,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.645.097.227,00	8.982.458.702,38	(662.638.524,62)	93,12
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.151.046.082.875,00	1.068.727.289.084,60	(82.318.793.790,40)	92,84
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.078.528.525.428,00	1.008.552.587.476,00	(69.975.937.952,00)	93,51
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.517.557.447,00	60.174.701.608,60	(12.342.855.838,40)	82,97
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.406.237.621,00	13.322.472.251,00	(83.765.370,00)	99,37
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.406.237.621,00	13.322.472.251,00	(83.765.370,00)	99,37
		5	**Belanja**	**1.314.504.395.663,00**	**1.205.322.078.915,00**	**(109.182.316.748,00)**	**91,69**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**595.462.510.923,00**	**569.057.003.272,00**	**(26.405.507.651,00)**	**95,56**
1.01			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**337.719.290.558,00**	**317.657.945.888,00**	**(20.061.344.670,00)**	**94,05**
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**337.719.290.558,00**	**317.657.945.888,00**	**(20.061.344.670,00)**	**94,05**
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	337.719.290.558,00	317.657.945.888,00	(20.061.344.670,00)	94,05
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	322.071.989.897,00	302.712.141.840,00	(19.359.848.057,00)	93,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	268.526.630.246,00	249.777.148.965,00	(18.749.481.281,00)	93,01
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.338.413.651,00	39.720.549.995,00	(617.863.656,00)	98,46
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	13.206.946.000,00	13.214.442.880,00	7.496.880,00	100,05
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.647.300.661,00	14.945.804.048,00	(701.496.613,00)	95,51
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.463.277.281,00	4.201.765.650,00	(261.511.631,00)	94,14
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.945.600.000,00	5.912.803.068,00	(32.796.932,00)	99,44
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.238.423.380,00	4.831.235.330,00	(407.188.050,00)	92,22
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**187.935.643.032,00**	**183.243.004.163,00**	**(4.692.638.869,00)**	**97,50**
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Kesehatan**	**92.305.752.958,00**	**88.886.332.337,00**	**(3.419.420.621,00)**	**96,29**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	92.305.752.958,00	88.886.332.337,00	(3.419.420.621,00)	96,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	88.313.316.851,40	84.901.653.104,00	(3.411.663.747,40)	96,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	50.098.244.124,00	48.505.149.916,00	(1.593.094.208,00)	96,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.965.072.727,40	36.146.503.188,00	(1.818.569.539,40)	95,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.992.436.106,60	3.984.679.233,00	(7.756.873,60)	99,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.576.500,00	232.537.400,00	(39.100,00)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.654.859.606,60	3.647.251.833,00	(7.607.773,60)	99,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.000.000,00	104.890.000,00	(110.000,00)	99,89
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0001**		**RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI**	**57.667.288.477,00**	**58.822.709.300,00**	**1.155.420.823,00**	**102,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	57.667.288.477,00	58.822.709.300,00	1.155.420.823,00	102,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.478.218.774,00	52.741.218.476,00	1.262.999.702,00	102,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	340.000.000,00	301.570.000,00	(38.430.000,00)	88,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.138.218.774,00	52.439.648.476,00	1.301.429.702,00	102,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	6.189.069.703,00	6.081.490.824,00	(107.578.879,00)	98,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.124.058.370,00	1.190.709.210,00	66.650.840,00	105,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.950.000.000,00	2.777.136.896,00	(172.863.104,00)	94,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.115.011.333,00	2.113.644.718,00	(1.366.615,00)	99,93
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0002**		**Puskesmas Biromaru**	**3.835.836.249,00**	**3.785.703.824,00**	**(50.132.425,00)**	**98,69**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	3.835.836.249,00	3.785.703.824,00	(50.132.425,00)	98,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.655.365.577,00	3.605.548.352,00	(49.817.225,00)	98,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.655.365.577,00	3.605.548.352,00	(49.817.225,00)	98,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	180.470.672,00	180.155.472,00	(315.200,00)	99,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.470.672,00	180.155.472,00	(315.200,00)	99,82
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0003**		**Puskesmas Dolo**	**2.731.410.505,00**	**2.614.153.002,00**	**(117.257.503,00)**	**95,70**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	2.731.410.505,00	2.614.153.002,00	(117.257.503,00)	95,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.657.499.505,00	2.547.518.002,00	(109.981.503,00)	95,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.657.499.505,00	2.547.518.002,00	(109.981.503,00)	95,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	73.911.000,00	66.635.000,00	(7.276.000,00)	90,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.911.000,00	66.635.000,00	(7.276.000,00)	90,15
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0004**		**Puskesmas Tinggede**	**1.339.297.528,00**	**1.297.149.545,00**	**(42.147.983,00)**	**96,85**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	1.339.297.528,00	1.297.149.545,00	(42.147.983,00)	96,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.297.557.528,00	1.255.496.545,00	(42.060.983,00)	96,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.297.557.528,00	1.255.496.545,00	(42.060.983,00)	96,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	41.740.000,00	41.653.000,00	(87.000,00)	99,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.740.000,00	41.653.000,00	(87.000,00)	99,79
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0005**		**Puskesmas Marawola**	**3.561.729.348,00**	**3.539.890.434,00**	**(21.838.914,00)**	**99,38**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	3.561.729.348,00	3.539.890.434,00	(21.838.914,00)	99,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.521.122.348,00	3.520.206.834,00	(915.514,00)	99,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.521.122.348,00	3.520.206.834,00	(915.514,00)	99,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	40.607.000,00	19.683.600,00	(20.923.400,00)	48,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.607.000,00	19.683.600,00	(20.923.400,00)	48,47
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0007**		**Puskesmas Baluase**	**2.873.973.147,00**	**2.638.278.006,00**	**(235.695.141,00)**	**91,79**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	2.873.973.147,00	2.638.278.006,00	(235.695.141,00)	91,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.810.776.147,00	2.577.646.006,00	(233.130.141,00)	91,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.810.776.147,00	2.577.646.006,00	(233.130.141,00)	91,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	63.197.000,00	60.632.000,00	(2.565.000,00)	95,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.197.000,00	60.632.000,00	(2.565.000,00)	95,94
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0008**		**Puskesmas Kinovaro**	**1.679.267.773,00**	**1.557.747.733,00**	**(121.520.040,00)**	**92,76**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	1.679.267.773,00	1.557.747.733,00	(121.520.040,00)	92,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.642.290.773,00	1.539.579.733,00	(102.711.040,00)	93,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.642.290.773,00	1.539.579.733,00	(102.711.040,00)	93,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	36.977.000,00	18.168.000,00	(18.809.000,00)	49,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.977.000,00	18.168.000,00	(7.809.000,00)	69,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0009**		**Puskesmas Dombusoi**	**1.250.978.469,00**	**1.185.852.826,00**	**(65.125.643,00)**	**94,79**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	1.250.978.469,00	1.185.852.826,00	(65.125.643,00)	94,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.978.469,00	1.185.852.826,00	(65.125.643,00)	94,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.978.469,00	1.185.852.826,00	(65.125.643,00)	94,79
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0010**		**Puskesmas Kamaipura**	**1.479.603.756,00**	**1.348.220.048,00**	**(131.383.708,00)**	**91,12**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	1.479.603.756,00	1.348.220.048,00	(131.383.708,00)	91,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.431.000.005,00	1.300.161.048,00	(130.838.957,00)	90,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.431.000.005,00	1.300.161.048,00	(130.838.957,00)	90,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	48.603.751,00	48.059.000,00	(544.751,00)	98,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.603.751,00	48.059.000,00	(544.751,00)	98,87
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0011**		**Puskesmas Panderee**	**2.378.394.000,00**	**2.200.865.644,00**	**(177.528.356,00)**	**92,53**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5	BELANJA DAERAH	2.378.394.000,00	2.200.865.644,00	(177.528.356,00)	92,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	2.339.188.320,00	2.164.272.820,00	(174.915.500,00)	92,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.339.188.320,00	2.164.272.820,00	(174.915.500,00)	92,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	39.205.680,00	36.592.824,00	(2.612.856,00)	93,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.205.680,00	36.592.824,00	(2.612.856,00)	93,33
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0012**		**Puskesmas Kulawi**	**2.128.604.965,00**	**2.071.188.525,00**	**(57.416.440,00)**	**97,30**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5	BELANJA DAERAH	2.128.604.965,00	2.071.188.525,00	(57.416.440,00)	97,30
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.123.804.965,00	2.071.188.525,00	(52.616.440,00)	97,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.123.804.965,00	2.071.188.525,00	(52.616.440,00)	97,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0013**		**Puskesmas Gimpu**	**1.945.622.593,00**	**1.594.820.218,00**	**(350.802.375,00)**	**81,96**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5	BELANJA DAERAH	1.945.622.593,00	1.594.820.218,00	(350.802.375,00)	81,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.885.622.593,00	1.576.820.218,00	(308.802.375,00)	83,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.885.622.593,00	1.576.820.218,00	(308.802.375,00)	83,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	18.000.000,00	(42.000.000,00)	30,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	18.000.000,00	(42.000.000,00)	30,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0014**		**Puskesmas Lindu**	**1.253.429.440,00**	**1.225.279.476,00**	**(28.149.964,00)**	**97,75**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5	BELANJA DAERAH	1.253.429.440,00	1.225.279.476,00	(28.149.964,00)	97,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.245.620.440,00	1.225.279.476,00	(20.340.964,00)	98,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.245.620.440,00	1.225.279.476,00	(20.340.964,00)	98,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	7.809.000,00	0,00	(7.809.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.809.000,00	0,00	(7.809.000,00)	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0015**		**Puskesmas Kantewu**	**1.330.094.354,00**	**1.188.332.518,00**	**(141.761.836,00)**	**89,34**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5	BELANJA DAERAH	1.330.094.354,00	1.188.332.518,00	(141.761.836,00)	89,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.330.094.354,00	1.188.332.518,00	(141.761.836,00)	89,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.094.354,00	1.188.332.518,00	(141.761.836,00)	89,34
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0016**		**Puskesmas Banasu**	**978.004.194,00**	**788.846.449,00**	**(189.157.745,00)**	**80,65**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5	BELANJA DAERAH	978.004.194,00	788.846.449,00	(189.157.745,00)	80,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	978.004.194,00	788.846.449,00	(189.157.745,00)	80,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.004.194,00	788.846.449,00	(189.157.745,00)	80,65

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0017**		**Puskesmas Towulu**	**1.052.597.100,00**	**993.809.098,00**	**(58.788.002,00)**	**94,41**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5	BELANJA DAERAH	1.052.597.100,00	993.809.098,00	(58.788.002,00)	94,41
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.052.597.100,00	993.809.098,00	(58.788.002,00)	94,41
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.052.597.100,00	993.809.098,00	(58.788.002,00)	94,41
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0018**		**Puskesmas Palolo**	**2.920.026.041,00**	**2.635.538.925,00**	**(284.487.116,00)**	**90,25**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5	BELANJA DAERAH	2.920.026.041,00	2.635.538.925,00	(284.487.116,00)	90,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.818.326.041,00	2.563.038.925,00	(255.287.116,00)	90,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.818.326.041,00	2.563.038.925,00	(255.287.116,00)	90,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	101.700.000,00	72.500.000,00	(29.200.000,00)	71,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.700.000,00	72.500.000,00	(29.200.000,00)	71,28
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0019**		**Puskesmas Banpres**	**1.453.420.768,00**	**1.354.946.957,00**	**(98.473.811,00)**	**93,22**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5	BELANJA DAERAH	1.453.420.768,00	1.354.946.957,00	(98.473.811,00)	93,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	1.402.025.768,00	1.304.346.957,00	(97.678.811,00)	93,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.402.025.768,00	1.304.346.957,00	(97.678.811,00)	93,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.2	BELANJA MODAL	51.395.000,00	50.600.000,00	(795.000,00)	98,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.395.000,00	50.600.000,00	(795.000,00)	98,45
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0020**		**Puskesmas Nokilalaki**	**1.221.531.931,00**	**1.057.323.468,00**	**(164.208.463,00)**	**86,55**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5	BELANJA DAERAH	1.221.531.931,00	1.057.323.468,00	(164.208.463,00)	86,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	1.197.488.327,00	1.034.823.468,00	(162.664.859,00)	86,41
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.197.488.327,00	1.034.823.468,00	(162.664.859,00)	86,41
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	24.043.604,00	22.500.000,00	(1.543.604,00)	93,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.043.604,00	22.500.000,00	(1.543.604,00)	93,57
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0006**		**Puskesmas Kaleke**	**2.548.779.436,00**	**2.456.015.830,00**	**(92.763.606,00)**	**96,36**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	2.548.779.436,00	2.456.015.830,00	(92.763.606,00)	96,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.506.581.043,00	2.414.215.830,00	(92.365.213,00)	96,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.506.581.043,00	2.414.215.830,00	(92.365.213,00)	96,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	42.198.393,00	41.800.000,00	(398.393,00)	99,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.198.393,00	41.800.000,00	(398.393,00)	99,05
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**43.259.386.889,00**	**42.236.628.421,00**	**(1.022.758.468,00)**	**97,63**
1.03	**1.03.1.04.0.00.01.0000**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**43.259.386.889,00**	**42.236.628.421,00**	**(1.022.758.468,00)**	**97,63**
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	43.259.386.889,00	42.236.628.421,00	(1.022.758.468,00)	97,63
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	28.532.710.327,00	27.771.256.652,00	(761.453.675,00)	97,33
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.301.716.929,00	4.203.802.393,00	(97.914.536,00)	97,72
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.230.993.398,00	23.567.454.259,00	(663.539.139,00)	97,26
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	14.726.676.562,00	14.465.371.769,00	(261.304.793,00)	98,22
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.867.000,00	(133.000,00)	99,73
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.626.676.562,00	14.415.504.769,00	(211.171.793,00)	98,55
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**9.879.706.533,00**	**9.742.564.797,00**	**(137.141.736,00)**	**98,61**
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**9.879.706.533,00**	**9.742.564.797,00**	**(137.141.736,00)**	**98,61**
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.879.706.533,00	9.742.564.797,00	(137.141.736,00)	98,61
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.902.430.533,00	7.772.280.408,00	(130.150.125,00)	98,35
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.871.758.264,00	1.784.624.216,00	(87.134.048,00)	95,34
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.030.672.269,00	5.987.656.192,00	(43.016.077,00)	99,28
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.977.276.000,00	1.970.284.389,00	(6.991.611,00)	99,64
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.191.000,00	141.364.504,00	(826.496,00)	99,41
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.835.085.000,00	1.828.919.885,00	(6.165.115,00)	99,66
1.05			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**9.818.561.022,00**	**9.488.468.592,00**	**(330.092.430,00)**	**96,63**
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**		**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**5.848.899.366,00**	**5.631.870.064,00**	**(217.029.302,00)**	**96,28**
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	5.848.899.366,00	5.631.870.064,00	(217.029.302,00)	96,28
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.746.394.291,00	5.531.050.064,00	(215.344.227,00)	96,25
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.758.556.693,00	2.667.451.372,00	(91.105.321,00)	96,69
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.987.837.598,00	2.863.598.692,00	(124.238.906,00)	95,84
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	102.505.075,00	100.820.000,00	(1.685.075,00)	98,35
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.505.075,00	100.820.000,00	(1.685.075,00)	98,35
1.05	**1.05.0.00.0.00.04.0000**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**3.969.661.656,00**	**3.856.598.528,00**	**(113.063.128,00)**	**97,15**
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	3.969.661.656,00	3.856.598.528,00	(113.063.128,00)	97,15
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.690.823.056,00	3.579.680.522,00	(111.142.534,00)	96,98
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.386.096.209,00	2.324.453.960,00	(61.642.249,00)	97,41
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.304.726.847,00	1.255.226.562,00	(49.500.285,00)	96,20
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	278.838.600,00	276.918.006,00	(1.920.594,00)	99,31
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.099.194,00	144.178.600,00	(1.920.594,00)	98,68
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.739.406,00	132.739.406,00	0,00	100,00
1.06			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**6.849.922.889,00**	**6.688.391.411,00**	**(161.531.478,00)**	**97,64**
1.06	**1.06.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Sosial**	**6.849.922.889,00**	**6.688.391.411,00**	**(161.531.478,00)**	**97,64**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.849.922.889,00	6.688.391.411,00	(161.531.478,00)	97,64
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.737.422.889,00	6.575.891.411,00	(161.531.478,00)	97,60
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.578.157.537,00	2.469.330.990,00	(108.826.547,00)	95,77
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.809.265.352,00	3.756.560.421,00	(52.704.931,00)	98,61
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	100,00
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**78.373.409.639,00**	**74.775.523.056,00**	**(3.597.886.583,00)**	**95,40**
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**4.353.722.412,00**	**4.262.804.610,00**	**(90.917.802,00)**	**97,91**
2.07	**2.07.3.32.0.00.02.0000**		**Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**	**4.353.722.412,00**	**4.262.804.610,00**	**(90.917.802,00)**	**97,91**
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	4.353.722.412,00	4.262.804.610,00	(90.917.802,00)	97,91
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.343.222.412,00	4.252.981.110,00	(90.241.302,00)	97,92
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.212.755.412,00	2.147.485.908,00	(65.269.504,00)	97,05
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.130.467.000,00	2.105.495.202,00	(24.971.798,00)	98,82
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.500.000,00	9.823.500,00	(676.500,00)	93,55
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	9.823.500,00	(676.500,00)	93,55
2.08			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**3.349.897.264,00**	**3.129.414.790,00**	**(220.482.474,00)**	**93,41**
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**3.349.897.264,00**	**3.129.414.790,00**	**(220.482.474,00)**	**93,41**
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.349.897.264,00	3.129.414.790,00	(220.482.474,00)	93,41
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.277.537.264,00	3.057.853.290,00	(219.683.974,00)	93,29
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.685.749.836,00	1.611.591.427,00	(74.158.409,00)	95,60
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.591.787.428,00	1.446.261.863,00	(145.525.565,00)	90,85
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	72.360.000,00	71.561.500,00	(798.500,00)	98,89
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.360.000,00	71.561.500,00	(798.500,00)	98,89
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**4.767.535.627,00**	**4.567.849.697,00**	**(199.685.930,00)**	**95,81**
2.09	**2.09.3.25.0.00.01.0000**		**Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan**	**4.767.535.627,00**	**4.567.849.697,00**	**(199.685.930,00)**	**95,81**
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.767.535.627,00	4.567.849.697,00	(199.685.930,00)	95,81
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.681.535.627,00	4.483.099.697,00	(198.435.930,00)	95,76
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.080.914.777,00	3.895.406.751,00	(185.508.026,00)	95,45
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.620.850,00	387.705.119,00	(12.915.731,00)	96,77
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1.04	Belanja Subsidi	200.000.000,00	199.987.827,00	(12.173,00)	99,99
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	86.000.000,00	84.750.000,00	(1.250.000,00)	98,54
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	35.250.000,00	(750.000,00)	97,91
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**9.761.831.385,00**	**9.324.259.764,00**	**(437.571.621,00)**	**95,51**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**9.761.831.385,00**	**9.324.259.764,00**	**(437.571.621,00)**	**95,51**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.761.831.385,00	9.324.259.764,00	(437.571.621,00)	95,51
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.190.845.755,00	5.986.332.791,00	(204.512.964,00)	96,69
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.476.461.874,00	2.335.386.313,00	(141.075.561,00)	94,30
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.714.383.881,00	3.650.946.478,00	(63.437.403,00)	98,29
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.570.985.630,00	3.337.926.973,00	(233.058.657,00)	93,47
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.570.985.630,00	3.337.926.973,00	(233.058.657,00)	93,47
2.12			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.976.424.252,00**	**4.739.206.889,00**	**(237.217.363,00)**	**95,23**
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	**4.976.424.252,00**	**4.739.206.889,00**	**(237.217.363,00)**	**95,23**
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.976.424.252,00	4.739.206.889,00	(237.217.363,00)	95,23
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.972.924.252,00	4.735.710.389,00	(237.213.863,00)	95,22
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.185.487.252,00	2.980.129.698,00	(205.357.554,00)	93,55
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.787.437.000,00	1.755.580.691,00	(31.856.309,00)	98,21
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.500.000,00	3.496.500,00	(3.500,00)	99,90
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.496.500,00	(3.500,00)	99,90
2.13			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**6.574.164.626,00**	**6.380.580.898,00**	**(193.583.728,00)**	**97,05**
2.13	**2.13.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**6.574.164.626,00**	**6.380.580.898,00**	**(193.583.728,00)**	**97,05**
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.574.164.626,00	6.380.580.898,00	(193.583.728,00)	97,05
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.491.376.626,00	6.299.802.898,00	(191.573.728,00)	97,04
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.222.358.026,00	2.109.314.850,00	(113.043.176,00)	94,91
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.019.018.600,00	3.940.488.048,00	(78.530.552,00)	98,04
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	82.788.000,00	80.778.000,00	(2.010.000,00)	97,57
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.788.000,00	80.778.000,00	(2.010.000,00)	97,57
2.14			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**9.107.431.481,00**	**8.756.863.070,00**	**(350.568.411,00)**	**96,15**
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**9.107.431.481,00**	**8.756.863.070,00**	**(350.568.411,00)**	**96,15**
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.107.431.481,00	8.756.863.070,00	(350.568.411,00)	96,15
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.667.431.481,00	8.338.903.070,00	(328.528.411,00)	96,20
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.390.119.358,00	2.305.054.556,00	(85.064.802,00)	96,44

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.277.312.123,00	6.033.848.514,00	(243.463.609,00)	96,12
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	440.000.000,00	417.960.000,00	(22.040.000,00)	94,99
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	440.000.000,00	417.960.000,00	(22.040.000,00)	94,99
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**5.511.026.857,00**	**5.045.877.997,00**	**(465.148.860,00)**	**91,55**
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Perhubungan**	**5.511.026.857,00**	**5.045.877.997,00**	**(465.148.860,00)**	**91,55**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.511.026.857,00	5.045.877.997,00	(465.148.860,00)	91,55
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.237.931.957,00	4.864.889.132,00	(373.042.825,00)	92,87
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.975.365.361,00	3.767.032.885,00	(208.332.476,00)	94,75
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.262.566.596,00	1.097.856.247,00	(164.710.349,00)	86,95
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	273.094.900,00	180.988.865,00	(92.106.035,00)	66,27
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.350.000,00	180.988.865,00	(10.361.135,00)	94,58
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.744.900,00	0,00	(81.744.900,00)	0,00
2.16			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**4.618.393.836,00**	**4.455.137.578,00**	**(163.256.258,00)**	**96,46**
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**4.618.393.836,00**	**4.455.137.578,00**	**(163.256.258,00)**	**96,46**
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.618.393.836,00	4.455.137.578,00	(163.256.258,00)	96,46
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.306.921.836,00	4.144.129.688,00	(162.792.148,00)	96,22
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.997.879.151,00	1.922.968.680,00	(74.910.471,00)	96,25
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.309.042.685,00	2.221.161.008,00	(87.881.677,00)	96,19
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	311.472.000,00	311.007.890,00	(464.110,00)	99,85
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.472.000,00	124.457.000,00	(15.000,00)	99,98
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.000.000,00	186.550.890,00	(449.110,00)	99,75
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**7.654.183.323,00**	**6.889.437.255,00**	**(764.746.068,00)**	**90,00**
2.17	**2.17.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**7.654.183.323,00**	**6.889.437.255,00**	**(764.746.068,00)**	**90,00**
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.654.183.323,00	6.889.437.255,00	(764.746.068,00)	90,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.652.083.323,00	6.889.437.255,00	(762.646.068,00)	90,03
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.620.256.116,00	1.564.198.407,00	(56.057.709,00)	96,54
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.894.827.207,00	1.839.638.848,00	(55.188.359,00)	97,08
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	4.137.000.000,00	3.485.600.000,00	(651.400.000,00)	84,25
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00
2.18			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**4.735.084.116,00**	**4.524.253.300,00**	**(210.830.816,00)**	**95,54**
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**4.735.084.116,00**	**4.524.253.300,00**	**(210.830.816,00)**	**95,54**
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.735.084.116,00	4.524.253.300,00	(210.830.816,00)	95,54
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.727.084.116,00	4.516.272.400,00	(210.811.716,00)	95,54
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.211.153.616,00	3.127.214.031,00	(83.939.585,00)	97,38
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.515.930.500,00	1.389.058.369,00	(126.872.131,00)	91,63
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	7.980.900,00	(19.100,00)	99,76
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	7.980.900,00	(19.100,00)	99,76
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**5.976.704.567,00**	**5.829.334.809,00**	**(147.369.758,00)**	**97,53**
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pemuda Dan Olahraga**	**5.976.704.567,00**	**5.829.334.809,00**	**(147.369.758,00)**	**97,53**
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.976.704.567,00	5.829.334.809,00	(147.369.758,00)	97,53
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.336.904.567,00	5.191.803.330,00	(145.101.237,00)	97,28
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.026.676.947,00	1.923.110.882,00	(103.566.065,00)	94,88
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.510.227.620,00	2.468.692.448,00	(41.535.172,00)	98,34
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	639.800.000,00	637.531.479,00	(2.268.521,00)	99,64
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00	100,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	460.700.000,00	458.431.479,00	(2.268.521,00)	99,50
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
2.22			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**4.290.634.800,00**	**4.279.371.747,00**	**(11.263.053,00)**	**99,73**
2.22	**1.01.2.22.0.00.01.0000**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**4.290.634.800,00**	**4.279.371.747,00**	**(11.263.053,00)**	**99,73**
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.290.634.800,00	4.279.371.747,00	(11.263.053,00)	99,73
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.890.634.800,00	3.879.417.722,50	(11.217.077,50)	99,71
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.190.634.800,00	3.179.417.722,50	(11.217.077,50)	99,64
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	399.954.024,50	(45.975,50)	99,98
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	399.954.024,50	(45.975,50)	99,98
2.23			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**2.551.845.343,00**	**2.446.616.452,00**	**(105.228.891,00)**	**95,87**
2.23	**2.23.2.24.0.00.02.0000**		**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**2.551.845.343,00**	**2.446.616.452,00**	**(105.228.891,00)**	**95,87**
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.551.845.343,00	2.446.616.452,00	(105.228.891,00)	95,87
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.506.845.343,00	2.402.993.452,00	(103.851.891,00)	95,85
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.778.776.843,00	1.683.900.710,00	(94.876.133,00)	94,66
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	728.068.500,00	719.092.742,00	(8.975.758,00)	98,76
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	43.623.000,00	(1.377.000,00)	96,94
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	43.623.000,00	(1.377.000,00)	96,94
2.24			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**144.529.750,00**	**144.514.200,00**	**(15.550,00)**	**99,98**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.24	**2.23.2.24.0.00.02.0000**		**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**144.529.750,00**	**144.514.200,00**	**(15.550,00)**	**99,98**
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	144.529.750,00	144.514.200,00	(15.550,00)	99,98
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	144.529.750,00	144.514.200,00	(15.550,00)	99,98
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.529.750,00	144.514.200,00	(15.550,00)	99,98
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**45.722.582.243,00**	**43.989.449.010,00**	**(1.733.133.233,00)**	**96,20**
3.25			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**2.315.723.452,00**	**2.301.366.893,00**	**(14.356.559,00)**	**99,38**
3.25	**2.09.3.25.0.00.01.0000**		**Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan**	**2.315.723.452,00**	**2.301.366.893,00**	**(14.356.559,00)**	**99,38**
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.315.723.452,00	2.301.366.893,00	(14.356.559,00)	99,38
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.243.723.452,00	2.229.751.608,00	(13.971.844,00)	99,37
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.243.723.452,00	2.229.751.608,00	(13.971.844,00)	99,37
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	72.000.000,00	71.615.285,00	(384.715,00)	99,46
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.000.000,00	71.615.285,00	(384.715,00)	99,46
3.26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**4.256.404.227,00**	**3.932.033.639,00**	**(324.370.588,00)**	**92,37**
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pariwisata**	**4.256.404.227,00**	**3.932.033.639,00**	**(324.370.588,00)**	**92,37**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.256.404.227,00	3.932.033.639,00	(324.370.588,00)	92,37
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.942.184.227,00	3.619.094.179,00	(323.090.048,00)	91,80
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.939.818.667,00	1.814.049.254,00	(125.769.413,00)	93,51
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.002.365.560,00	1.805.044.925,00	(197.320.635,00)	90,14
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	314.220.000,00	312.939.460,00	(1.280.540,00)	99,59
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.220.000,00	297.939.460,00	(1.280.540,00)	99,57
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**33.179.279.833,00**	**31.903.256.133,00**	**(1.276.023.700,00)**	**96,15**
3.27	**3.27.0.00.0.00.09.0000**		**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	**19.817.272.849,00**	**19.002.079.852,00**	**(815.192.997,00)**	**95,88**
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	19.817.272.849,00	19.002.079.852,00	(815.192.997,00)	95,88
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	19.581.600.849,00	18.768.620.182,00	(812.980.667,00)	95,84
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	14.018.746.613,00	13.612.994.507,00	(405.752.106,00)	97,10
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.562.854.236,00	5.155.625.675,00	(407.228.561,00)	92,67
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	235.672.000,00	233.459.670,00	(2.212.330,00)	99,06
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.672.000,00	233.459.670,00	(2.212.330,00)	99,06
3.27	**3.27.0.00.0.00.08.0000**		**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**13.362.006.984,00**	**12.901.176.281,00**	**(460.830.703,00)**	**96,55**
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	13.362.006.984,00	12.901.176.281,00	(460.830.703,00)	96,55
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.430.203.484,00	11.990.248.341,00	(439.955.143,00)	96,46
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.735.090.424,00	6.417.881.217,00	(317.209.207,00)	95,29
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.695.113.060,00	5.572.367.124,00	(122.745.936,00)	97,84
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	931.803.500,00	910.927.940,00	(20.875.560,00)	97,75
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	47.985.300,00	(14.700,00)	99,96
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	883.803.500,00	862.942.640,00	(20.860.860,00)	97,63
3.30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**5.442.650.981,00**	**5.362.151.856,00**	**(80.499.125,00)**	**98,52**
3.30	**3.31.3.30.0.00.02.0000**		**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**5.442.650.981,00**	**5.362.151.856,00**	**(80.499.125,00)**	**98,52**
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	5.442.650.981,00	5.362.151.856,00	(80.499.125,00)	98,52
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.188.508.981,00	5.111.790.899,00	(76.718.082,00)	98,52
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.221.768.833,00	2.158.728.212,00	(63.040.621,00)	97,16
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	966.740.148,00	953.105.387,00	(13.634.761,00)	98,58
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.999.957.300,00	(42.700,00)	99,99
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	254.142.000,00	250.360.957,00	(3.781.043,00)	98,51
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.158.000,00	42.513.000,00	(3.645.000,00)	92,10
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	207.984.000,00	207.847.957,00	(136.043,00)	99,93
3.31			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**528.523.750,00**	**490.640.489,00**	**(37.883.261,00)**	**92,83**
3.31	**3.31.3.30.0.00.02.0000**		**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**528.523.750,00**	**490.640.489,00**	**(37.883.261,00)**	**92,83**
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	528.523.750,00	490.640.489,00	(37.883.261,00)	92,83
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	528.523.750,00	490.640.489,00	(37.883.261,00)	92,83
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.523.750,00	490.640.489,00	(37.883.261,00)	92,83
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**87.338.954.207,00**	**83.250.305.909,00**	**(4.088.648.298,00)**	**95,31**
4.01			**SEKRETARIAT DAERAH**	**57.745.034.483,00**	**54.348.768.454,00**	**(3.396.266.029,00)**	**94,11**
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0001**		**Bagian Pemerintahan**	**4.924.182.008,00**	**4.724.377.763,00**	**(199.804.245,00)**	**95,94**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	4.924.182.008,00	4.724.377.763,00	(199.804.245,00)	95,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	624.382.008,00	623.505.996,00	(876.012,00)	99,85
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.382.008,00	623.505.996,00	(876.012,00)	99,85
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.299.800.000,00	4.100.871.767,00	(198.928.233,00)	95,37
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.800.000,00	18.435.000,00	(1.365.000,00)	93,10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.280.000.000,00	4.082.436.767,00	(197.563.233,00)	95,38
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0002**		**Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**18.629.218.825,00**	**16.845.386.536,00**	**(1.783.832.289,00)**	**90,42**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	18.629.218.825,00	16.845.386.536,00	(1.783.832.289,00)	90,42
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.629.218.825,00	16.845.386.536,00	(1.783.832.289,00)	90,42
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.808.218.825,00	9.998.886.536,00	(809.332.289,00)	92,51
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	7.630.000.000,00	6.687.500.000,00	(942.500.000,00)	87,64

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	191.000.000,00	159.000.000,00	(32.000.000,00)	83,24
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0003**		**Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**158.990.436,00**	**148.441.060,00**	**(10.549.376,00)**	**93,36**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	158.990.436,00	148.441.060,00	(10.549.376,00)	93,36
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	148.990.436,00	148.441.060,00	(549.376,00)	99,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.990.436,00	148.441.060,00	(549.376,00)	99,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0004**		**Bagian Administrasi Pembangunan**	**116.827.920,00**	**116.542.500,00**	**(285.420,00)**	**99,75**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	116.827.920,00	116.542.500,00	(285.420,00)	99,75
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	116.827.920,00	116.542.500,00	(285.420,00)	99,75
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.827.920,00	116.542.500,00	(285.420,00)	99,75
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0005**		**Bagian Hukum**	**1.162.357.980,00**	**1.121.794.128,00**	**(40.563.852,00)**	**96,51**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	1.162.357.980,00	1.121.794.128,00	(40.563.852,00)	96,51
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.154.357.980,00	1.114.099.128,00	(40.258.852,00)	96,51
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.154.357.980,00	1.114.099.128,00	(40.258.852,00)	96,51
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	7.695.000,00	(305.000,00)	96,18
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	7.695.000,00	(305.000,00)	96,18
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0006**		**Bagian Umum**	**17.864.983.991,00**	**16.947.770.119,00**	**(917.213.872,00)**	**94,86**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	17.864.983.991,00	16.947.770.119,00	(917.213.872,00)	94,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.466.416.287,00	13.627.217.104,00	(839.199.183,00)	94,19
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	582.292.894,00	568.927.406,00	(13.365.488,00)	97,70
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.884.123.393,00	13.058.289.698,00	(825.833.695,00)	94,05
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.398.567.704,00	3.320.553.015,00	(78.014.689,00)	97,70
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.223.567.704,00	3.151.052.375,00	(72.515.329,00)	97,75
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	169.500.640,00	(5.499.360,00)	96,85
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0007**		**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**2.082.203.900,00**	**2.061.038.371,00**	**(21.165.529,00)**	**98,98**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	2.082.203.900,00	2.061.038.371,00	(21.165.529,00)	98,98
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.018.003.900,00	1.997.105.371,00	(20.898.529,00)	98,96
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.018.003.900,00	1.997.105.371,00	(20.898.529,00)	98,96
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	64.200.000,00	63.933.000,00	(267.000,00)	99,58
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.200.000,00	63.933.000,00	(267.000,00)	99,58
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0008**		**Bagian Organisasi**	**365.253.940,00**	**356.462.464,00**	**(8.791.476,00)**	**97,59**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	365.253.940,00	356.462.464,00	(8.791.476,00)	97,59
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	252.885.940,00	245.318.864,00	(7.567.076,00)	97,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.885.940,00	245.318.864,00	(7.567.076,00)	97,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	112.368.000,00	111.143.600,00	(1.224.400,00)	98,91
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.368.000,00	42.368.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000,00	68.775.600,00	(1.224.400,00)	98,25
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0010**		**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	**304.085.500,00**	**295.921.217,00**	**(8.164.283,00)**	**97,31**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	304.085.500,00	295.921.217,00	(8.164.283,00)	97,31
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	267.476.500,00	259.313.417,00	(8.163.083,00)	96,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.476.500,00	259.313.417,00	(8.163.083,00)	96,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	36.609.000,00	36.607.800,00	(1.200,00)	99,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.609.000,00	36.607.800,00	(1.200,00)	99,99
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0011**		**Bagian Perencanaan dan Keuangan**	**12.136.929.983,00**	**11.731.034.296,00**	**(405.895.687,00)**	**96,65**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	5	BELANJA DAERAH	12.136.929.983,00	11.731.034.296,00	(405.895.687,00)	96,65
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	12.136.929.983,00	11.731.034.296,00	(405.895.687,00)	96,65
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	11.093.554.683,00	10.690.484.743,00	(403.069.940,00)	96,36
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.043.375.300,00	1.040.549.553,00	(2.825.747,00)	99,72
4.02			**SEKRETARIAT DPRD**	**29.593.919.724,00**	**28.901.537.455,00**	**(692.382.269,00)**	**97,66**
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**		**Sekretariat DPRD Kab. Sigi**	**29.593.919.724,00**	**28.901.537.455,00**	**(692.382.269,00)**	**97,66**
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	29.593.919.724,00	28.901.537.455,00	(692.382.269,00)	97,66
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	28.670.503.004,00	27.996.238.929,00	(674.264.075,00)	97,64
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	13.976.472.903,00	13.629.913.910,00	(346.558.993,00)	97,52
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.694.030.101,00	14.366.325.019,00	(327.705.082,00)	97,76
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	923.416.720,00	905.298.526,00	(18.118.194,00)	98,03
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	898.416.720,00	880.853.211,00	(17.563.509,00)	98,04
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.000.000,00	24.445.315,00	(554.685,00)	97,78
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**458.653.805.292,00**	**387.819.820.496,00**	**(70.833.984.796,00)**	**84,55**
5.01			**PERENCANAAN**	**6.247.650.718,00**	**5.939.469.075,00**	**(308.181.643,00)**	**95,06**
5.01	**5.01.5.05.0.00.02.0000**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**6.247.650.718,00**	**5.939.469.075,00**	**(308.181.643,00)**	**95,06**
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	6.247.650.718,00	5.939.469.075,00	(308.181.643,00)	95,06
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.607.650.718,00	5.393.202.964,00	(214.447.754,00)	96,17
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.735.941.864,00	2.605.762.707,00	(130.179.157,00)	95,24
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.871.708.854,00	2.787.440.257,00	(84.268.597,00)	97,06
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	640.000.000,00	546.266.111,00	(93.733.889,00)	85,35

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.826.800,00	(173.200,00)	99,56
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	306.439.311,00	(93.560.689,00)	76,60
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
5.02			**KEUANGAN**	**444.143.788.633,00**	**374.071.329.883,00**	**(70.072.458.750,00)**	**84,22**
5.02	**5.02.0.00.0.00.03.0000**		**Badan Pendapatan Daerah**	**16.872.293.829,00**	**16.200.369.548,00**	**(671.924.281,00)**	**96,01**
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	16.872.293.829,00	16.200.369.548,00	(671.924.281,00)	96,01
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.935.259.829,00	15.304.165.689,00	(631.094.140,00)	96,03
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.939.364.740,00	7.667.081.399,00	(272.283.341,00)	96,57
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.995.895.089,00	7.637.084.290,00	(358.810.799,00)	95,51
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	937.034.000,00	896.203.859,00	(40.830.141,00)	95,64
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.184.000,00	51.060.000,00	(1.124.000,00)	97,84
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	118.774.400,00	(1.225.600,00)	98,97
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	764.850.000,00	726.369.459,00	(38.480.541,00)	94,96
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**427.271.494.804,00**	**357.870.960.335,00**	**(69.400.534.469,00)**	**83,75**
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	427.271.494.804,00	357.870.960.335,00	(69.400.534.469,00)	83,75
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	194.021.985.115,00	154.810.045.979,00	(39.211.939.136,00)	79,78
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	181.040.206.275,00	142.942.168.364,00	(38.098.037.911,00)	78,95
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.981.778.840,00	11.867.877.615,00	(1.113.901.225,00)	91,41
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.193.180.125,00	5.098.904.468,00	(94.275.657,00)	98,18
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.998.180.125,00	4.954.008.331,00	(44.171.794,00)	99,11
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.000.000,00	144.896.137,00	(103.863,00)	99,92
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	(705.311.600,00)	87,51
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	(705.311.600,00)	87,51
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	222.406.329.564,00	193.017.321.488,00	(29.389.008.076,00)	86,78
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.977.492.764,00	4.977.492.764,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	217.428.836.800,00	188.039.828.724,00	(29.389.008.076,00)	86,48
5.03			**KEPEGAWAIAN**	**6.217.967.241,00**	**5.790.142.462,00**	**(427.824.779,00)**	**93,11**
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia**	**6.217.967.241,00**	**5.790.142.462,00**	**(427.824.779,00)**	**93,11**
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.217.967.241,00	5.790.142.462,00	(427.824.779,00)	93,11
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.217.967.241,00	5.790.142.462,00	(427.824.779,00)	93,11
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.952.319.321,00	3.742.002.880,00	(210.316.441,00)	94,67
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.265.647.920,00	2.048.139.582,00	(217.508.338,00)	90,39
5.04			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**1.538.015.950,00**	**1.524.295.883,00**	**(13.720.067,00)**	**99,10**
5.04	**5.03.5.04.0.00.01.0000**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia**	**1.538.015.950,00**	**1.524.295.883,00**	**(13.720.067,00)**	**99,10**
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	(13.720.067,00)	99,10
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	(13.720.067,00)	99,10
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	(13.720.067,00)	99,10
5.05			**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**506.382.750,00**	**494.583.193,00**	**(11.799.557,00)**	**97,66**
5.05	**5.01.5.05.0.00.02.0000**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**506.382.750,00**	**494.583.193,00**	**(11.799.557,00)**	**97,66**
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	506.382.750,00	494.583.193,00	(11.799.557,00)	97,66
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	506.382.750,00	494.583.193,00	(11.799.557,00)	97,66
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506.382.750,00	494.583.193,00	(11.799.557,00)	97,66
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**14.102.830.355,00**	**12.807.510.199,00**	**(1.295.320.156,00)**	**90,81**
6.01			**INSPEKTORAT DAERAH**	**14.102.830.355,00**	**12.807.510.199,00**	**(1.295.320.156,00)**	**90,81**
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**		**Inspektorat Kab. Sigi**	**14.102.830.355,00**	**12.807.510.199,00**	**(1.295.320.156,00)**	**90,81**
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	14.102.830.355,00	12.807.510.199,00	(1.295.320.156,00)	90,81
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.634.996.355,00	12.360.823.824,00	(1.274.172.531,00)	90,65
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.240.787.820,00	7.029.674.091,00	(211.113.729,00)	97,08
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.394.208.535,00	5.331.149.733,00	(1.063.058.802,00)	83,37
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	467.834.000,00	446.686.375,00	(21.147.625,00)	95,47
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	467.834.000,00	446.686.375,00	(21.147.625,00)	95,47
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**29.130.503.704,00**	**28.031.885.306,00**	**(1.098.618.398,00)**	**96,22**
7.01			**KECAMATAN**	**29.130.503.704,00**	**28.031.885.306,00**	**(1.098.618.398,00)**	**96,22**
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**		**Kecamatan Dolo**	**2.141.284.835,00**	**2.110.143.308,00**	**(31.141.527,00)**	**98,54**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.141.284.835,00	2.110.143.308,00	(31.141.527,00)	98,54
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.141.284.835,00	2.110.143.308,00	(31.141.527,00)	98,54
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.830.917.935,00	1.799.776.408,00	(31.141.527,00)	98,29
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.366.900,00	310.366.900,00	0,00	100,00
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**		**Kecamatan Dolo Barat**	**2.104.897.225,00**	**2.016.977.820,00**	**(87.919.405,00)**	**95,82**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.104.897.225,00	2.016.977.820,00	(87.919.405,00)	95,82
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.084.005.225,00	1.996.085.820,00	(87.919.405,00)	95,78
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.780.598.095,00	1.695.244.232,00	(85.353.863,00)	95,20
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.407.130,00	300.841.588,00	(2.565.542,00)	99,15
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.892.000,00	20.892.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.892.000,00	20.892.000,00	0,00	100,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**		**Kecamatan Dolo Selatan**	**1.631.885.681,00**	**1.581.871.584,00**	**(50.014.097,00)**	**96,93**
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	1.631.885.681,00	1.581.871.584,00	(50.014.097,00)	96,93
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.619.985.681,00	1.570.871.584,00	(49.114.097,00)	96,96
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.332.653.697,00	1.288.263.780,00	(44.389.917,00)	96,66
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.331.984,00	282.607.804,00	(4.724.180,00)	98,35
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.900.000,00	11.000.000,00	(900.000,00)	92,43
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.900.000,00	11.000.000,00	(900.000,00)	92,43
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**		**Kecamatan Kulawi Selatan**	**1.613.641.705,00**	**1.559.968.924,00**	**(53.672.781,00)**	**96,67**
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	1.613.641.705,00	1.559.968.924,00	(53.672.781,00)	96,67
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.613.641.705,00	1.559.968.924,00	(53.672.781,00)	96,67
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.127.491.605,00	1.099.103.024,00	(28.388.581,00)	97,48
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.150.100,00	460.865.900,00	(25.284.200,00)	94,79
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**		**Kecamatan Kulawi**	**1.710.740.636,00**	**1.615.100.629,00**	**(95.640.007,00)**	**94,40**
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	1.710.740.636,00	1.615.100.629,00	(95.640.007,00)	94,40
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.690.122.636,00	1.594.500.629,00	(95.622.007,00)	94,34
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.358.866.936,00	1.272.584.124,00	(86.282.812,00)	93,65
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.255.700,00	321.916.505,00	(9.339.195,00)	97,18
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.618.000,00	20.600.000,00	(18.000,00)	99,91
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.618.000,00	20.600.000,00	(18.000,00)	99,91
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**		**Kecamatan Lindu**	**1.209.180.647,00**	**1.142.933.607,00**	**(66.247.040,00)**	**94,52**
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	1.209.180.647,00	1.142.933.607,00	(66.247.040,00)	94,52
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.202.180.647,00	1.136.133.607,00	(66.047.040,00)	94,50
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	852.996.147,00	799.198.407,00	(53.797.740,00)	93,69
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.184.500,00	336.935.200,00	(12.249.300,00)	96,49
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	6.800.000,00	(200.000,00)	97,14
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	6.800.000,00	(200.000,00)	97,14
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**		**Kecamatan Marawola**	**2.279.843.294,00**	**2.203.326.074,00**	**(76.517.220,00)**	**96,64**
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	2.279.843.294,00	2.203.326.074,00	(76.517.220,00)	96,64
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.244.343.294,00	2.167.826.074,00	(76.517.220,00)	96,59
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.909.344.094,00	1.837.946.985,00	(71.397.109,00)	96,26
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.999.200,00	329.879.089,00	(5.120.111,00)	98,47
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**		**Kecamatan Marawola Barat**	**1.958.860.102,00**	**1.855.765.081,00**	**(103.095.021,00)**	**94,73**
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	1.958.860.102,00	1.855.765.081,00	(103.095.021,00)	94,73
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.946.932.002,00	1.843.865.081,00	(103.066.921,00)	94,70
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.636.131.902,00	1.547.196.591,00	(88.935.311,00)	94,56
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.800.100,00	296.668.490,00	(14.131.610,00)	95,45
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.928.100,00	11.900.000,00	(28.100,00)	99,76
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.928.100,00	11.900.000,00	(28.100,00)	99,76
7.01	**7.01.0.00.0.00.09.0000**		**Kecamatan Kinovaro**	**2.011.174.902,00**	**1.938.799.586,00**	**(72.375.316,00)**	**96,40**
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	2.011.174.902,00	1.938.799.586,00	(72.375.316,00)	96,40
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.971.006.902,00	1.898.631.586,00	(72.375.316,00)	96,32
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.672.304.402,00	1.606.395.131,00	(65.909.271,00)	96,05
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.702.500,00	292.236.455,00	(6.466.045,00)	97,83
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	40.168.000,00	40.168.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.168.000,00	40.168.000,00	0,00	100,00
7.01	**7.01.0.00.0.00.10.0000**		**Kecamatan Palolo**	**2.205.470.901,00**	**2.130.669.935,00**	**(74.800.966,00)**	**96,60**
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	2.205.470.901,00	2.130.669.935,00	(74.800.966,00)	96,60
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.081.200.901,00	2.012.718.015,00	(68.482.886,00)	96,70
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.703.868.109,00	1.641.615.646,00	(62.252.463,00)	96,34
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.332.792,00	371.102.369,00	(6.230.423,00)	98,34
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	124.270.000,00	117.951.920,00	(6.318.080,00)	94,91
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.270.000,00	117.951.920,00	(6.318.080,00)	94,91
7.01	**7.01.0.00.0.00.11.0000**		**Kecamatan Nokilalaki**	**1.545.887.505,00**	**1.476.090.487,00**	**(69.797.018,00)**	**95,48**
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	1.545.887.505,00	1.476.090.487,00	(69.797.018,00)	95,48
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.545.887.505,00	1.476.090.487,00	(69.797.018,00)	95,48
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.899.533,00	1.182.497.339,00	(68.402.194,00)	94,53
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.987.972,00	293.593.148,00	(1.394.824,00)	99,52
7.01	**7.01.0.00.0.00.12.0000**		**Kecamatan Tanambulava**	**1.879.276.807,00**	**1.816.981.274,00**	**(62.295.533,00)**	**96,68**
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5	BELANJA DAERAH	1.879.276.807,00	1.816.981.274,00	(62.295.533,00)	96,68
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.859.276.807,00	1.796.981.274,00	(62.295.533,00)	96,64
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.490.759.347,00	1.442.821.945,00	(47.937.402,00)	96,78
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.517.460,00	354.159.329,00	(14.358.131,00)	96,10
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
7.01	**7.01.0.00.0.00.13.0000**		**Kecamatan Gumbasa**	**1.454.956.132,00**	**1.369.349.821,00**	**(85.606.311,00)**	**94,11**
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	1.454.956.132,00	1.369.349.821,00	(85.606.311,00)	94,11
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.454.956.132,00	1.369.349.821,00	(85.606.311,00)	94,11
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.165.839.502,00	1.081.505.805,00	(84.333.697,00)	92,76
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.116.630,00	287.844.016,00	(1.272.614,00)	99,55
7.01	**7.01.0.00.0.00.14.0000**		**Kecamatan Pipikoro**	**1.852.444.222,00**	**1.794.350.141,00**	**(58.094.081,00)**	**96,86**
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	1.852.444.222,00	1.794.350.141,00	(58.094.081,00)	96,86
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.797.869.222,00	1.739.775.141,00	(58.094.081,00)	96,76
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.442.055.362,00	1.384.013.141,00	(58.042.221,00)	95,97
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.813.860,00	355.762.000,00	(51.860,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.2	BELANJA MODAL	54.575.000,00	54.575.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.575.000,00	54.575.000,00	0,00	100,00
7.01	**7.01.0.00.0.00.15.0000**		**Kecamatan Sigi Biromaru**	**1.932.217.545,00**	**1.897.822.658,00**	**(34.394.887,00)**	**98,21**
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	1.932.217.545,00	1.897.822.658,00	(34.394.887,00)	98,21
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.932.217.545,00	1.897.822.658,00	(34.394.887,00)	98,21
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.582.771.235,00	1.548.475.948,00	(34.295.287,00)	97,83
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.446.310,00	349.346.710,00	(99.600,00)	99,97
7.01	**7.01.0.00.0.00.16.0000**		**Kecamatan Sigi Kota**	**1.598.741.565,00**	**1.521.734.377,00**	**(77.007.188,00)**	**95,18**
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5	BELANJA DAERAH	1.598.741.565,00	1.521.734.377,00	(77.007.188,00)	95,18
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.572.241.565,00	1.496.244.377,00	(75.997.188,00)	95,16
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.301.171.415,00	1.227.448.757,00	(73.722.658,00)	94,33
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.070.150,00	268.795.620,00	(2.274.530,00)	99,16
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	26.500.000,00	25.490.000,00	(1.010.000,00)	96,18
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	25.490.000,00	(1.010.000,00)	96,18
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**5.719.799.300,00**	**5.590.581.667,00**	**(129.217.633,00)**	**97,74**
8.01			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**5.719.799.300,00**	**5.590.581.667,00**	**(129.217.633,00)**	**97,74**
8.01	**8.01.0.00.0.00.05.0000**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**5.719.799.300,00**	**5.590.581.667,00**	**(129.217.633,00)**	**97,74**
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	5.719.799.300,00	5.590.581.667,00	(129.217.633,00)	97,74
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.671.717.300,00	5.545.376.917,00	(126.340.383,00)	97,77
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.143.386.020,00	2.035.368.063,00	(108.017.957,00)	94,96
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.716.746.080,00	2.700.385.888,00	(16.360.192,00)	99,39
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.05	Belanja Hibah	811.585.200,00	809.622.966,00	(1.962.234,00)	99,75
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	48.082.000,00	45.204.750,00	(2.877.250,00)	94,01
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.082.000,00	45.204.750,00	(2.877.250,00)	94,01
			Jumlah	**(39.100.879.991,00)**	**(15.433.664.125,02)**	**23.667.215.865,98**	**39,47**

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. SIGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.275.403.515.672,00**	**1.189.888.414.789,98**	**93,29**	**1.410.150.504.679,44**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**103.756.606.200,00**	**100.945.078.154,38**	**97,29**	**84.824.192.278,39**
4.1.01	Pajak Daerah	47.352.244.583,00	44.393.219.166,00	93,75	35.118.053.979,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	378.814.588,00	397.164.817,00	104,84	331.024.150,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	360.854.588,00	385.474.817,00	106,82	322.154.150,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	360.854.588,00	385.474.817,00	106,82	322.154.150,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	17.960.000,00	11.690.000,00	65,08	8.870.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	17.960.000,00	11.690.000,00	65,08	8.870.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	174.859.979,00	116,57	97.674.471,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	174.859.979,00	116,57	97.674.471,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	174.859.979,00	116,57	97.674.471,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	22.500.000,00	75,00	28.200.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	22.500.000,00	75,00	28.200.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	22.500.000,00	75,00	28.200.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.550.000.000,00	929.036.862,00	26,17	5.778.085.601,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.550.000.000,00	929.036.862,00	26,17	5.778.085.601,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.550.000.000,00	929.036.862,00	26,17	5.778.085.601,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.500.000.000,00	2.848.062.342,00	113,92	3.039.538.933,00
4.1.01.15.01	PBBP2	2.500.000.000,00	2.848.062.342,00	113,92	3.039.538.933,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.500.000.000,00	2.848.062.342,00	113,92	3.039.538.933,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	6.015.267.772,00	120,30	13.451.071.203,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.500.000.000,00	3.160.888.386,00	90,31	12.021.747.859,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.500.000.000,00	3.160.888.386,00	90,31	12.021.747.859,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.500.000.000,00	2.854.379.386,00	190,29	1.429.323.344,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.500.000.000,00	2.854.379.386,00	190,29	1.429.323.344,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	11.813.248.995,00	11.544.517.650,00	97,72	12.392.459.621,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.100.000.000,00	1.965.878.629,00	93,61	2.677.493.254,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.106.881.061,00	522.757.050,00	47,22	1.236.670.253,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	993.118.939,00	1.443.121.579,00	145,31	1.440.823.001,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	9.217.448.995,00	9.344.145.823,00	101,37	9.115.985.859,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	9.217.448.995,00	9.344.145.823,00	101,37	9.115.985.859,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	280.000.000,00	166.109.097,00	59,32	319.471.983,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	0,00	0,00	0,00	315.951.983,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	280.000.000,00	166.109.097,00	59,32	3.520.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	34.800.000,00	20.007.010,00	57,49	38.600.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	34.800.000,00	20.007.010,00	57,49	38.600.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	181.000.000,00	48.377.091,00	26,72	240.908.525,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	49.985.318,00	14.435.000,00	28,87	16.500.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	131.014.682,00	33.942.091,00	25,90	220.908.525,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.282.640.000,00	11.174.092.788,00	78,23	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	14.282.640.000,00	11.174.092.788,00	78,23	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	14.282.640.000,00	11.174.092.788,00	78,23	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.647.541.000,00	11.287.716.956,00	117,00	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	9.647.541.000,00	11.287.716.956,00	117,00	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	9.647.541.000,00	11.287.716.956,00	117,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.422.050.000,00	2.022.512.540,00	83,50	3.039.618.382,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	946.050.000,00	855.012.500,00	90,37	774.740.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	86.050.000,00	30.555.000,00	35,50	25.441.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	86.050.000,00	30.555.000,00	35,50	25.441.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	185.000.000,00	125.263.000,00	67,70	96.190.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	185.000.000,00	125.263.000,00	67,70	96.190.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	675.000.000,00	699.194.500,00	103,58	617.359.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	516.388.186,00	527.874.500,00	102,22	453.682.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	134.752.210,00	144.815.000,00	107,46	138.672.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	23.859.604,00	26.505.000,00	111,08	25.005.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	35.750.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	35.750.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	776.000.000,00	565.436.541,00	72,86	691.134.082,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	65.480.000,00	65,48	65.215.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	65.480.000,00	65,48	65.215.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000.000,00	31.100.000,00	31,10	43.200.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000.000,00	31.100.000,00	31,10	43.200.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	240.000.000,00	232.666.541,00	96,94	218.619.082,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	240.000.000,00	232.666.541,00	96,94	218.619.082,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	236.000.000,00	236.190.000,00	100,08	364.100.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	0,00	0,00	208.100.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	236.000.000,00	236.190.000,00	100,08	156.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	602.063.499,00	86,00	1.573.744.300,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.000.000,00	602.063.499,00	86,00	1.573.744.300,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.000.000,00	602.063.499,00	86,00	1.573.744.300,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.337.214.390,00	2.337.214.390,00	100,00	2.092.871.872,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	0,00	2.092.871.872,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	0,00	2.092.871.872,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	0,00	2.092.871.872,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.337.214.390,00	2.337.214.390,00	100,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.337.214.390,00	2.337.214.390,00	100,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.337.214.390,00	2.337.214.390,00	100,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.645.097.227,00	52.192.132.058,38	101,05	44.573.648.045,39
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	175.017.800,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	173.896.800,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	173.896.800,00	0,00	0,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	1.121.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	1.121.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.500.000.000,00	588.426.393,71	23,53	1.614.228.010,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	550.921.750,71	22,03	1.590.079.071,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	550.921.750,71	22,03	1.590.079.071,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	0,00	2.190.873,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	0,00	2.190.873,00
4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	37.504.643,00	0,00	21.958.066,00
4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	37.504.643,00	0,00	21.958.066,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.391.998.007,00	28.176.344,00	1,17	1.097.697.476,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.391.998.007,00	28.176.344,00	1,17	1.097.697.476,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.391.998.007,00	28.176.344,00	1,17	1.097.697.476,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.480.300.000,00	3.413.391.230,67	230,58	2.022.539.406,79
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	35.494.576,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	35.494.576,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.480.300.000,00	3.413.391.230,67	230,58	1.987.044.830,79
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.480.300.000,00	3.413.391.230,67	230,58	1.987.044.830,79
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	20.638.708,00	0,00	20.054.305,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	20.638.708,00	0,00	20.054.305,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	20.638.708,00	0,00	20.054.305,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.300.000.000,00	1.349.569.737,00	103,81	437.596.534,32
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.300.000.000,00	1.349.569.737,00	103,81	437.596.534,32
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.300.000.000,00	1.349.569.737,00	103,81	437.596.534,32
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	27.299.255,00	0,00	124.890.113,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	27.299.255,00	0,00	124.890.113,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	27.299.255,00	0,00	124.890.113,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.972.799.220,00	3.408.896.438,00	172,79	739.488.241,28
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	105.770.044,00	0,00	23.656.960,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	105.770.044,00	0,00	23.656.960,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	880.226.634,00	0,00	472.431.394,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	846.612.601,00	0,00	373.711.554,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	0,00	7.482.492,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	3.092.880,00	0,00	86.508.312,00
4.1.04.15.08.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	0,00	5.905.120,00	0,00	1.331.528,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	3.351.000,00	0,00	10.880.000,00
4.1.04.15.08.0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	13.616.547,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	165.994,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.972.799.220,00	1.812.570.476,00	91,87	105.000,00
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.113.877.086,00	5.521.830,00	0,49	105.000,00
4.1.04.15.09.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	277.500.000,00	277.500.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.09.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	324.000.000,00	324.000.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.09.0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	66.922.134,00	371.398.646,00	554,97	0,00
4.1.04.15.09.0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	190.500.000,00	190.500.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.09.0082	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	643.650.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00
4.1.04.15.10.0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	21.726.332,00	0,00	3.575.000,00
4.1.04.15.15.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
4.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.1.04.15.15.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	5.336.158,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0499	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.04.15.15.0604	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	16.390.174,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	66.432.700,00	0,00	31.073.049,00
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	3.275.000,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	3.660.500,00	0,00	5.979.476,00
4.1.04.15.16.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.04.15.16.0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	27.452.900,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	359.200,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	21.318.573,00
4.1.04.15.16.0985	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	34.960.100,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	55.800,00	0,00	35.316.926,28
4.1.04.15.17.0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	20.518.700,00
4.1.04.15.17.0156	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.1.04.15.17.0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	55.800,00	0,00	2.750.000,00
4.1.04.15.17.0573	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	11.983.226,28
4.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	142.091.000,00	0,00	12.300.000,00
4.1.04.15.18.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00
4.1.04.15.18.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	142.091.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	316.352.452,00	0,00	140.365.300,00
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	316.352.452,00	0,00	140.365.300,00
4.1.04.15.37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.37.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	2.171.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.46.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	2.171.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	5.063.873,00
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	5.063.873,00
4.1.04.15.84	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	14.428.490,00
4.1.04.15.84.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	14.428.490,00
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	11.249,00
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	11.249,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	42.000.000.000,00	43.180.716.152,00	102,81	38.517.153.959,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	42.000.000.000,00	43.180.716.152,00	102,81	38.517.153.959,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	42.000.000.000,00	43.180.716.152,00	102,81	38.517.153.959,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**103.756.606.200,00**	**100.945.078.154,38**	**97,29**	**84.824.192.278,39**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.151.046.082.875,00**	**1.068.727.289.084,60**	**92,84**	**1.309.724.872.946,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.078.528.525.428,00	1.008.552.587.476,00	93,51	1.256.834.631.489,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.070.498.098.163,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	117.419.602.500,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.832.880.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	4.321.773.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	79.459.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	16.425.500,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	2.058.419.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	45.378.388.577,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	55.925.638.423,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	74.618.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.167.186.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	4.564.815.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	655.819.930.339,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	482.947.526.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	25.867.262.339,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	72.323.255.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	36.652.286.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	38.029.601.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	144.946.300.321,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	289.436.889,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	3.348.304.316,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	2.625.348.527,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	4.871.978.305,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	38.265.518.607,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	56.291.621.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	9.015.459.640,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	2.779.764.057,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	14.879.408.980,00
4.2.01.01.03.0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	12.579.460.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	152.312.265.003,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	33.446.164.150,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	1.752.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	57.992.687.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	3.421.875.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	12.879.386.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	4.079.924.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.942.047.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	12.002.478.579,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	315.131.000,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	16.779.163.104,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	5.788.401.270,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	940.540.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	400.817.900,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	571.150.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	79.162.852.000,00	62.560.154.084,00	79,02	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	21.467.838.000,00	14.533.427.084,00	67,69	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	10.061.922.000,00	6.839.509.100,00	67,97	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	11.223.072.000,00	7.563.730.584,00	67,39	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	165.732.000,00	113.075.400,00	68,22	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.112.000,00	17.112.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	56.169.264.000,00	46.500.977.000,00	82,78	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	1.196.333.000,00	1.131.455.000,00	94,57	0,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	18.525.135.000,00	16.062.095.000,00	86,70	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	35.515.747.000,00	28.375.378.000,00	79,89	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	80.873.000,00	80.873.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	851.176.000,00	851.176.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.525.750.000,00	1.525.750.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.525.750.000,00	1.525.750.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	646.984.503.276,00	633.151.507.541,00	97,86	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	470.003.059.276,00	486.885.692.276,00	103,59	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	470.003.059.276,00	486.885.692.276,00	103,59	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	176.981.444.000,00	146.265.815.265,00	82,64	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	60.717.524.000,00	30.001.895.265,00	49,41	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	75.629.233.000,00	75.629.233.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	40.634.687.000,00	40.634.687.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	182.941.497.152,00	172.291.869.085,00	94,17	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	16.292.574.429,00	16.091.875.982,00	98,76	0,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	9.789.982.000,00	9.626.318.207,00	98,32	0,00
4.2.01.09.01.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	446.851.000,00	424.808.896,00	95,06	0,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.055.741.429,00	6.040.748.879,00	99,75	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	166.648.922.723,00	156.199.993.103,00	93,72	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	33.794.765.000,00	33.664.487.218,00	99,61	0,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.869.000.000,00	1.869.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.173.236.000,00	4.035.680.480,00	96,70	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.233.830.000,00	3.229.662.700,00	99,87	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	90.000.000,00	66,66	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	10.222.097.267,00	10.222.097.267,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	388.834.000,00	388.834.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13.545.110.566,00	13.544.935.566,00	99,99	0,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	78.994.474.000,00	71.408.280.409,00	90,39	0,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	2.087.250.000,00	34.020.000,00	1,62	0,00
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	11.445.571.000,00	10.953.240.573,00	95,69	0,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.101.488.890,00	5.101.488.890,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0043	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	1.137.606.000,00	1.137.606.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**909.088.852.428,00**	**868.003.530.710,00**	**95,48**	**1.070.498.098.163,00**
4.2.01.05	Dana Desa	147.925.538.000,00	119.034.921.766,00	80,46	154.494.636.326,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	147.925.538.000,00	119.034.921.766,00	80,46	154.494.636.326,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	147.925.538.000,00	119.034.921.766,00	80,46	154.494.636.326,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	21.514.135.000,00	21.514.135.000,00	100,00	31.841.897.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	31.841.897.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	31.841.897.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	21.514.135.000,00	21.514.135.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	21.514.135.000,00	21.514.135.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**169.439.673.000,00**	**140.549.056.766,00**	**82,94**	**186.336.533.326,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.517.557.447,00	60.174.701.608,60	82,97	52.890.241.457,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	72.317.557.447,00	59.974.701.608,60	82,93	52.790.241.457,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.317.557.447,00	59.974.701.608,60	82,93	52.790.241.457,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.602.978.041,00	22.771.547.083,25	874,82	6.463.621.275,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.695.643.983,00	2.695.643.983,00	100,00	7.580.196.042,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	51.328.790.393,00	18.759.257.012,06	36,54	24.044.555.019,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	751.018.362,00	1.072.392.370,29	142,79	464.407.720,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.939.126.668,00	14.675.861.160,00	98,23	14.237.461.401,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100.000.000,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	100.000.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	100.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**72.517.557.447,00**	**60.174.701.608,60**	**82,97**	**52.890.241.457,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1.151.046.082.875,00**	**1.068.727.289.084,60**	**92,84**	**1.309.724.872.946,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**20.600.826.597,00**	**20.216.047.551,00**	**98,13**	**15.601.439.455,05**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.600.826.597,00	20.216.047.551,00	98,13	15.601.439.455,05
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	209.841.386,00	0,00	37.246.486,05
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	209.841.386,00	0,00	37.246.486,05
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	209.841.386,00	0,00	37.246.486,05
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	20.600.826.597,00	20.006.206.165,00	97,11	15.564.192.969,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.600.826.597,00	20.006.206.165,00	97,11	15.564.192.969,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.600.826.597,00	20.006.206.165,00	97,11	15.564.192.969,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**20.600.826.597,00**	**20.216.047.551,00**	**98,13**	**15.601.439.455,05**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.275.403.515.672,00**	**1.189.888.414.789,98**	**93,29**	**1.410.150.504.679,44**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.314.504.395.663,00**	**1.205.322.078.915,00**	**91,69**	**1.441.015.456.141,16**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.018.338.924.612,40**	**941.434.290.727,50**	**92,44**	**1.005.345.704.315,16**
5.1.01	Belanja Pegawai	644.783.534.944,00	580.775.450.926,00	90,07	547.590.556.019,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	507.332.638.195,00	456.886.880.280,00	90,05	409.308.135.035,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	389.129.814.400,00	356.399.313.310,00	91,58	315.448.941.510,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	257.389.709.020,00	250.550.138.941,00	97,34	244.063.997.428,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	131.740.105.380,00	105.849.174.369,00	80,34	71.384.944.082,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	32.539.787.506,00	28.717.672.826,00	88,25	26.727.166.635,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	22.272.207.932,00	20.556.042.647,00	92,29	21.339.135.023,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.267.579.574,00	8.161.630.179,00	79,48	5.388.031.612,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.743.132.183,00	5.218.430.898,00	90,86	5.081.529.682,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.743.132.183,00	5.218.430.898,00	90,86	5.081.529.682,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.400.622.611,00	16.688.285.000,00	95,90	21.825.937.500,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.400.622.611,00	16.688.285.000,00	95,90	17.611.967.500,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	0,00	4.213.970.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.717.815.336,00	9.733.764.596,00	83,06	2.860.502.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.917.953.836,00	3.304.380.000,00	84,33	2.860.502.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.799.861.500,00	6.429.384.596,00	82,42	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	20.410.582.947,00	17.719.718.452,00	86,81	16.001.685.050,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.920.654.843,00	11.559.793.952,00	89,46	12.024.306.230,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.489.928.104,00	6.159.924.500,00	82,24	3.977.378.820,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.389.012.866,00	1.617.192.653,00	47,71	1.729.734.066,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.389.012.866,00	1.617.192.653,00	47,71	1.729.734.066,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.395.702,00	5.202.699,00	70,34	4.743.144,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.560.736,00	3.094.712,00	67,85	3.225.830,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.834.966,00	2.107.987,00	74,35	1.517.314,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.539.477.552,00	17.905.985.234,00	76,06	17.030.544.423,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.002.581.641,00	13.606.646.317,00	75,58	14.222.070.934,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.536.895.911,00	4.299.338.917,00	77,64	2.808.473.489,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	899.868.463,00	720.646.503,00	80,08	649.340.104,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	583.502.755,00	493.954.118,00	84,65	500.871.182,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	316.365.708,00	226.692.385,00	71,65	148.468.922,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.555.128.629,00	2.160.668.109,00	84,56	1.948.010.921,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.606.061.086,00	1.480.614.722,00	92,18	1.502.617.785,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	949.067.543,00	680.053.387,00	71,65	445.393.136,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	125.186.047.916,00	112.053.410.855,00	89,50	35.801.168.342,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	29.685.333.783,00	27.672.775.110,00	93,22	33.624.362.612,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	29.685.333.783,00	27.672.775.110,00	93,22	33.624.362.612,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	181.782.108,00	174.233.465,00	95,84	134.603.566,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	181.782.108,00	174.233.465,00	95,84	134.603.566,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	120.160.886,00	120.155.000,00	99,99	107.100.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	120.160.886,00	120.155.000,00	99,99	107.100.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	21.457.301,00	21.455.000,00	99,98	1.935.102.164,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	21.457.301,00	21.455.000,00	99,98	1.935.102.164,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	95.177.313.838,00	84.064.792.280,00	88,32	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	7.323.669,00	7.323.668,00	99,99	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	1.449.984,00	1.449.984,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	579.994,00	579.994,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	68.632.582,00	68.632.582,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	48.332.804,00	48.332.804,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	96.665.608,00	96.665.608,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	945.178.033,00	938.262.396,00	99,26	0,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	276.128.017,00	276.128.017,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	186.517.084,00	186.517.084,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.663.615,00	1.663.614,00	99,99	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.518.628,00	3.518.628,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	13.107.857,00	13.107.856,00	99,99	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.933.312,00	1.933.312,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.933.312,00	1.933.312,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	1.933.312,00	1.933.312,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.639.949,00	4.639.949,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.562.617,00	4.562.617,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	9.666.561,00	9.666.561,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	71.810.029.300,00	56.019.803.209,00	78,01	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	7.783.231.064,00	5.705.743.773,00	73,30	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.513.000.000,00	29.520.000,00	1,95	0,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	7.688.640.000,00	15.388.477.200,00	200,14	0,00
5.1.01.02.06.0071	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	3.923.996.536,00	5.247.496.800,00	133,72	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	782.250.000,00	4.500.000,00	0,57	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	86.826.745.329,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.364.374.300,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	12.369.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	550.300,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	229.228.500,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	130.272.700,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	463.863.650,00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],	0,00	0,00	0,00	526.332.150,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	95.214.945,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	2.852.500,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	30.527.244,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	9.375.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	9.035.956,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	43.424.245,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	59.430.586.800,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	59.430.586.800,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	13.962.819.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	13.962.819.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.943.750.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.943.750.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	1.730.000.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	1.730.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	6.825.300.284,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	6.365.630.284,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	451.510.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	474.700.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	474.700.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.773.508.950,00	10.543.708.290,00	97,86	12.541.615.684,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00	100,00	671.580.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00	100,00	671.580.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	45.834.600,00	45.834.600,00	100,00	45.742.200,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	45.834.600,00	45.834.600,00	100,00	45.742.200,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	70.971.600,00	70.971.600,00	100,00	71.550.960,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	70.971.600,00	70.971.600,00	100,00	71.550.960,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00	66.549.000,00	99,06	67.158.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00	66.549.000,00	99,06	67.158.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	962.676.750,00	98,82	973.791.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	962.676.750,00	98,82	973.791.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.770.100,00	94.303.650,00	95,47	87.361.050,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.770.100,00	94.303.650,00	95,47	87.361.050,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.281.050,00	13.458.900,00	88,07	14.281.050,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.281.050,00	13.458.900,00	88,07	14.281.050,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00	2.242.800.000,00	98,88	3.780.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00	2.242.800.000,00	98,88	3.780.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	567.000.000,00	567.000.000,00	100,00	630.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	567.000.000,00	567.000.000,00	100,00	630.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	115.712.100,00	27.835.500,00	24,05	152.904.712,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	115.712.100,00	27.835.500,00	24,05	152.904.712,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.456.200.000,00	2.404.134.710,00	97,88	2.364.066.712,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	57.000.000,00	48.412.854,00	84,93	49.940.856,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.000.000,00	1.255.464,00	25,10	1.381.464,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.000.000,00	3.766.392,00	75,32	4.144.392,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.389.200.000,00	2.350.700.000,00	98,38	2.308.600.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.402.000.000,00	3.368.478.580,00	99,01	3.448.400.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.402.000.000,00	3.368.478.580,00	99,01	3.448.400.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.675.000,00	7.875.000,00	38,08	234.780.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.675.000,00	7.875.000,00	38,08	234.780.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	640.459.883,00	491.601.501,00	76,75	417.488.963,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	117.936.000,00	101.400.000,00	85,97	51.000.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	117.936.000,00	101.400.000,00	85,97	51.000.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	16.511.040,00	4.662.000,00	28,23	7.140.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	16.511.040,00	4.662.000,00	28,23	7.140.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	196.560.000,00	98.280.000,00	50,00	91.800.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	196.560.000,00	98.280.000,00	50,00	91.800.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	16.222.080,00	5.141.820,00	31,69	7.531.680,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	16.222.080,00	5.141.820,00	31,69	7.531.680,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.980.000,00	397.006,00	13,32	962.100,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.980.000,00	397.006,00	13,32	962.100,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.200,00	1.140,00	27,14	1.040,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.200,00	1.140,00	27,14	1.040,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	13.240.282,00	5.396.160,00	40,75	5.080.320,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	13.240.282,00	5.396.160,00	40,75	5.080.320,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	283.046,00	112.320,00	39,68	103.680,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	283.046,00	112.320,00	39,68	103.680,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	849.140,00	336.960,00	39,68	311.040,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	849.140,00	336.960,00	39,68	311.040,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	263.282.007,00	263.282.007,00	100,00	236.562.802,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.146.696,00	2.146.696,00	100,00	2.630.302,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	425.016,00	425.016,00	100,00	861.142,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	170.006,00	170.006,00	100,00	269.606,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.117.418,00	20.117.418,00	100,00	34.712.189,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.167.196,00	14.167.196,00	100,00	19.727.263,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	28.334.392,00	28.334.392,00	100,00	98.636.318,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	62.311.859,00	62.311.859,00	100,00	79.725.982,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(],PKB],	80.937.983,00	80.937.983,00	100,00	0,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [(],BBNKB],	54.671.441,00	54.671.441,00	100,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	12.592.088,00	12.592.088,00	100,00	16.996.301,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	487.635,00	487.635,00	100,00	418.284,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.031.372,00	1.031.372,00	100,00	868.000,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	3.842.144,00	3.842.144,00	100,00	3.452.271,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	566.688,00	566.688,00	100,00	657.575,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	566.688,00	566.688,00	100,00	657.575,00
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	566.688,00	566.688,00	100,00	0,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.360.051,00	1.360.051,00	100,00	1.643.939,00
5.1.01.05.11.0023	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	0,00	0,00	0,00	328.788,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.337.383,00	1.337.383,00	100,00	2.394.114,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	2.833.439,00	2.833.439,00	100,00	6.575.755,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	498.280.000,00	97,53	588.266.666,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	98.280.000,00	88,63	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	98.280.000,00	88,63	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	386.666.666,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	386.666.666,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	340.000.000,00	301.570.000,00	88,69	2.107.136.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	340.000.000,00	301.570.000,00	88,69	2.107.136.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	340.000.000,00	301.570.000,00	88,69	2.107.136.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.028.858.468,40	331.752.728.828,50	96,71	380.749.475.902,16
5.1.02.01	Belanja Barang	73.454.311.269,23	71.465.127.321,50	97,29	102.410.566.678,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.410.498.269,23	71.433.200.821,50	97,30	102.213.013.293,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.000.000,00	6.850.000,00	97,85	29.836.425,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	118.322.000,00	116.918.625,00	98,81	77.440.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.320.979.311,80	9.191.587.251,00	98,61	9.079.661.200,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	91.373.000,00	91.148.000,00	99,75	362.425.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	31.017.835,00	27.660.643,00	89,17	78.072.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	107.800.000,00	107.600.000,00	99,81	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.606.648.599,20	8.535.536.350,00	99,17	5.043.405.165,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	29.212.600,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	17.248.396,00	15.799.396,00	91,59	0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	5.000.000,00	0,00	0,00	243.825.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.680.133.004,00	3.478.998.191,00	94,53	3.881.588.458,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.925.550,00	44.912.600,00	99,97	67.348.318,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.620.231.350,23	4.355.142.003,00	94,26	5.118.647.979,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	383.980.000,00	383.390.000,00	99,84	370.732.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	1.948.800,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	155.126.330,00	151.948.008,00	97,95	173.168.732,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	172.784.760,00	157.567.882,00	91,19	294.060.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	20.950.000,00	20.950.000,00	100,00	170.611.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	66.620.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	898.405.800,00	896.879.375,00	99,83	214.922.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	557.997.708,00	535.584.102,00	95,98	444.269.355,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.055.936.886,00	6.036.782.284,00	99,68	4.573.514.408,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	136.826.550,00	136.079.927,00	99,45	817.770.974,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.742.436.550,00	16.504.487.644,50	98,57	45.868.851.742,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00	455.701.460,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	13.288.000,00	13.269.500,00	99,86	180.444.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.929.979.000,00	2.679.692.000,00	91,45	4.003.148.700,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	297.971.500,00	297.345.750,00	99,78	185.508.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	960.000.000,00	960.000.000,00	100,00	1.041.776.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.945.458.911,00	8.445.123.988,00	94,40	8.704.940.377,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.348.290.000,00	2.307.589.264,00	98,26	2.329.178.800,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.505.305.228,00	1.339.229.000,00	88,96	4.685.913.100,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	17.835.000,00	17.767.500,00	99,62	12.375.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.425.312.000,00	2.403.401.178,00	99,09	1.865.122.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	298.560.000,00	297.405.000,00	99,61	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	147.750.000,00	146.832.000,00	99,37	105.303.200,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	13.188.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	111.696.000,00	111.600.000,00	99,91	48.282.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	213.925.000,00	205.609.360,00	96,11	107.025.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	68.650.000,00	68.290.000,00	99,47	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	16.000.000,00	15.800.000,00	98,75	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	741.675.000,00	736.003.600,00	99,23	740.155.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	282.305.000,00	281.059.400,00	99,55	361.835.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	311.374.000,00	311.361.000,00	99,99	330.086.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	35.100.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	13.145.000,00	12.368.000,00	94,08	1.112.800,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	13.145.000,00	12.368.000,00	94,08	0,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.112.800,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	30.668.000,00	19.558.500,00	63,77	196.440.585,00
5.1.02.01.04.0062	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	306.800,00
5.1.02.01.04.0069	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0,00	0,00	0,00	278.000,00
5.1.02.01.04.0071	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	236.000,00
5.1.02.01.04.0075	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	295.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	12.350.000,00	1.258.500,00	10,19	0,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.318.000,00	2.300.000,00	99,22	0,00
5.1.02.01.04.0404	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	89.450.000,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.01.04.0569	Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	0,00	0,00	0,00	99.874.785,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	127.235.651.309,17	120.760.708.063,00	94,91	117.457.713.590,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	85.638.808.804,77	81.249.411.371,00	94,87	73.246.576.559,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	421.150.000,00	396.170.000,00	94,06	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	333.350.000,00	287.400.000,00	86,21	861.700.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.597.970.000,00	3.337.130.000,00	92,75	2.766.308.134,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.154.045.000,00	3.056.597.000,00	96,91	2.263.350.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	8.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00	94.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	79.725.000,00	70.675.000,00	88,64	20.400.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	782.400.000,00	743.855.000,00	95,07	743.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.234.500.000,00	3.956.400.000,00	93,43	4.387.500.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.251.236.844,77	23.172.259.710,00	95,55	16.480.480.488,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	127.997.579,00	80.558.068,00	62,93	159.910.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	249.300.000,00	165.400.000,00	66,34	213.740.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.638.800.000,00	1.582.800.000,00	96,58	1.683.275.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	375.000.000,00	357.000.000,00	95,20	455.000.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	162.200.000,00	149.100.000,00	91,92	128.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	168.750.000,00	168.150.000,00	99,64	108.500.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.281.900.000,00	1.231.800.000,00	96,09	3.165.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	48.500.000,00	30.500.000,00	62,88	58.750.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.204.700.000,00	5.826.706.113,00	93,90	7.159.622.390,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.064.900.000,00	4.847.050.875,00	95,69	5.450.017.927,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	723.060.894,00	641.114.803,00	88,66	1.054.267.982,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.296.500.000,00	1.208.000.000,00	93,17	892.662.500,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	418.300.000,00	410.800.000,00	98,20	318.438.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.810.050.000,00	1.629.800.000,00	90,04	1.966.790.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	926.500.000,00	885.044.500,00	95,52	1.146.110.450,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	491.323.050,00	396.963.150,00	80,79	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	293.250.000,00	282.725.000,00	96,41	174.641.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	37.325.000,00	34.200.000,00	91,62	57.800.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.567.500.000,00	1.561.324.000,00	99,60	1.230.051.040,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	703.250.000,00	703.032.858,00	99,96	1.152.923.674,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	229.556.000,00	229.280.490,00	99,87	64.744.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	509.880.000,00	506.578.697,00	99,35	255.600.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	0,00	68.624.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.924.723.200,00	1.898.280.000,00	98,62	2.393.480.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	124.920.000,00	120.601.722,00	96,54	696.583.150,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.884.060.595,00	3.635.321.904,00	93,59	2.986.323.328,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	47.580.000,00	45.900.000,00	96,46	869.940.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.411.378.200,00	2.215.763.667,00	91,88	1.900.357.361,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	36.660.000,00	29.995.304,00	81,82	24.636.203,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	445.680.000,00	444.925.725,00	99,83	18.169.456,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	893.685.440,00	568.678.922,00	63,63	693.288.280,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	3.140.600.000,00	3.130.447.911,00	99,67	2.068.533.646,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	43.500.000,00	43.500.000,00	100,00	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.358.167.002,00	4.267.715.300,00	97,92	5.199.578.750,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	330.000.000,00	234.694.652,00	71,11	193.879.800,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.120.000,00	1.050.000,00	93,75	1.530.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.349.805.000,00	6.243.475.000,00	98,32	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	393.110.000,00	349.746.000,00	88,96	0,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.435.375.461,00	19.225.470.205,00	94,07	18.242.765.095,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.180.191.424,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	18.229.054.341,00	17.467.532.769,00	95,82	11.873.149.097,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	301.728.000,00	65.592.500,00	21,73	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	940.000,00	420.000,00	44,68	5.520.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	224.248.128,00	85.300.023,00	38,03	134.226.940,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	179.404.992,00	106.624.913,00	59,43	142.583.518,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	0,00	0,00	0,00	4.907.094.116,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.132.599.000,00	2.042.185.422,00	95,76	726.299.500,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	30.262.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0019	Belanja Sewa Alat Penarik	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	43.320.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.527.904.000,00	1.502.513.672,00	98,33	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	116.330.000,00	102.000.000,00	87,68	107.995.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	49.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	290.833.000,00	272.381.750,00	93,65	270.754.500,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	22.770.000,00	20.790.000,00	91,30	0,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	76.500.000,00	76.500.000,00	100,00	76.900.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	139.330.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.157.348.000,00	1.019.269.500,00	88,06	979.478.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	620.000.000,00	589.196.500,00	95,03	649.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	78.500.000,00	50.700.000,00	64,58	50.500.000,00
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	18.000.000,00	11.700.000,00	65,00	10.800.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	53.400.000,00	53.400.000,00	100,00	52.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	176.250.000,00	103.075.000,00	58,48	37.750.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	211.198.000,00	211.198.000,00	100,00	168.928.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.502.713.543,40	9.204.707.025,00	96,86	17.094.204.386,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.350.266.748,42	1.330.585.494,00	98,54	3.540.159.344,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	680.100.000,00	675.965.340,00	99,39	303.705.563,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.705.000.000,00	3.464.008.523,00	93,49	502.071.390,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.559.000.000,00	1.553.193.000,00	99,62	1.467.039.000,00
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	40.000.000,00	39.854.869,00	99,63	0,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	2.852.977.631,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00	348.778.650,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	1.462.131.751,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.009.346.794,98	1.003.255.588,00	99,39	2.512.234.058,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	533.185.421,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	206.000.000,00	189.763.014,00	92,11	3.034.181.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	503.000.000,00	498.081.197,00	99,02	362.760.789,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	156.481.189,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	18.498.600,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.315.226.000,00	1.287.943.000,00	97,92	499.854.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	100.000.000,00	98.540.000,00	98,54	0,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	288.810.000,00	288.806.000,00	99,99	0,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	111.416.000,00	85.597.000,00	76,82	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	815.000.000,00	815.000.000,00	100,00	299.854.000,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.053.580.500,00	6.731.721.540,00	95,43	6.638.536.050,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.375.919.000,00	2.303.503.430,00	96,95	2.604.188.250,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.100.729.500,00	1.914.806.510,00	91,14	2.597.993.400,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.776.507.000,00	1.714.516.600,00	96,51	1.136.784.400,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	800.425.000,00	798.895.000,00	99,80	299.570.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.009.419.838,00	19.542.598.429,00	97,66	30.440.662.102,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	465.000.000,00	464.172.068,00	99,82	0,00
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	250.000.000,00	249.687.500,00	99,87	0,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	215.000.000,00	214.484.568,00	99,76	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.218.647.798,00	5.786.769.814,00	93,05	6.229.636.881,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.452.579.000,00	1.449.831.284,00	99,81	1.657.579.575,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.150.000,00	9.550.000,00	94,08	9.823.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.703.201.537,00	3.352.582.700,00	90,53	3.210.775.972,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	109.958.650,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	195.000.000,00	194.084.750,00	99,53	81.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	249.857.711,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	32.500.000,00	18.269.400,00	56,21	12.499.500,00
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	75.000.000,00	70.000.000,00	93,33	28.000.000,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	332.503.000,00	318.730.169,00	95,85	29.950.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.882.000,00	2.850.000,00	98,88	311.357.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	269.893.000,00	240.526.250,00	89,11	296.099.999,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	139.939.261,00	126.625.261,00	90,48	163.734.974,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	3.720.000,00	74,40	0,00
5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.694.603.040,00	3.665.871.023,00	99,22	14.174.056.681,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.539.546.040,00	1.519.486.612,00	98,69	12.091.405.698,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	300.000.000,00	298.217.681,00	99,40	109.639.976,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	37.460.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1.075.960.053,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	10.500.000,00	10.434.000,00	99,37	0,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	159.000.000,00	158.645.632,00	99,77	674.690.954,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	65.000.000,00	64.953.200,00	99,92	0,00
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.562.000.000,00	1.556.093.648,00	99,62	149.900.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	43.557.000,00	43.040.250,00	98,81	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.471.169.000,00	9.467.760.867,00	99,96	9.857.829.422,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	5.809.311.532,00	5.809.311.532,00	100,00	4.556.018.943,00
5.1.02.03.04.0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	14.763.000,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.610.688.468,00	1.610.240.710,00	99,97	955.495.079,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	407.294.000,00	407.294.000,00	100,00	1.393.200.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	93.875.000,00	91.724.290,00	97,70	50.000.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	2.788.700.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	250.000.000,00	249.190.335,00	99,67	99.652.400,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	160.000.000,00	158.024.657,00	98,76	169.139.118,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	160.000.000,00	158.024.657,00	98,76	169.139.118,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	48.915.139.940,00	46.208.398.942,00	94,46	58.528.060.780,16
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.915.139.940,00	46.208.398.942,00	94,46	58.233.592.328,16
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.081.993.759,00	21.118.142.254,00	95,63	28.479.900.989,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.672.561.181,00	24.934.336.688,00	93,48	29.230.854.339,16
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	125.745.000,00	121.300.000,00	96,46	511.287.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	34.840.000,00	34.620.000,00	99,36	6.750.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	294.468.452,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas BiasaÃ¢â‚¬â€œLuar Negeri	0,00	0,00	0,00	294.468.452,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.026.057.268,00	8.198.227.134,00	90,82	10.661.542.600,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.432.907.268,00	6.606.077.134,00	88,87	9.388.693.300,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	580.325.000,00	527.925.000,00	90,97	286.400.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	6.798.582.268,00	6.069.602.134,00	89,27	7.785.881.300,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	9.000.000,00	8.550.000,00	95,00	1.307.412.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.593.150.000,00	1.592.150.000,00	99,93	1.272.849.300,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	804.000.000,00	804.000.000,00	100,00	774.849.300,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	789.150.000,00	788.150.000,00	99,87	498.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	25.023.441.725,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	25.023.441.725,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	25.023.441.725,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	24.400.140.070,00	24.278.677.109,00	99,50	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	23.968.840.070,00	23.951.407.109,00	99,92	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	21.944.950.070,00	22.596.550.991,00	102,96	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.023.890.000,00	1.354.856.118,00	66,94	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	314.100.000,00	221.600.000,00	70,55	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	171.600.000,00	191.600.000,00	111,65	0,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	142.500.000,00	30.000.000,00	21,05	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	117.200.000,00	105.670.000,00	90,16	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	117.200.000,00	105.670.000,00	90,16	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.988.138.774,00	41.298.991.830,00	103,27	36.227.488.427,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.988.138.774,00	41.298.991.830,00	103,27	36.227.488.427,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.988.138.774,00	41.298.991.830,00	103,27	36.227.488.427,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.200.000.000,00	2.199.945.127,00	99,99	2.450.817.950,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	2.000.000.000,00	1.999.957.300,00	99,99	0,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	2.000.000.000,00	1.999.957.300,00	99,99	0,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	2.000.000.000,00	1.999.957.300,00	99,99	0,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	200.000.000,00	199.987.827,00	99,99	2.450.817.950,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	200.000.000,00	199.987.827,00	99,99	2.450.817.950,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	200.000.000,00	199.987.827,00	99,99	2.450.817.950,00
5.1.05	Belanja Hibah	28.135.531.200,00	26.547.165.846,00	94,35	69.417.912.244,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.878.000.000,00	10.573.574.000,00	89,01	58.206.156.428,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.070.000.000,00	2.708.074.000,00	88,21	51.992.070.950,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.070.000.000,00	2.708.074.000,00	88,21	51.348.298.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	643.772.950,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.716.000.000,00	6.773.500.000,00	87,78	6.114.085.478,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.716.000.000,00	6.773.500.000,00	87,78	6.114.085.478,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	642.000.000,00	642.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	642.000.000,00	642.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	5.186.630.700,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	5.186.630.700,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	5.186.630.700,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	475.585.200,00	475.548.966,00	99,99	416.854.116,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	475.585.200,00	475.548.966,00	99,99	416.854.116,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	475.585.200,00	475.548.966,00	99,99	416.854.116,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	12.286.946.000,00	12.654.442.880,00	102,99	5.608.271.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.196.380.000,00	5.525.299.700,00	106,32	0,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.196.380.000,00	5.525.299.700,00	106,32	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.977.036.000,00	3.721.004.480,00	93,56	3.841.724.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.977.036.000,00	3.721.004.480,00	93,56	3.841.724.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.113.530.000,00	3.408.138.700,00	109,46	1.766.547.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.113.530.000,00	3.408.138.700,00	109,46	1.766.547.000,00
5.1.05.11	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro	3.495.000.000,00	2.843.600.000,00	81,36	0,00
5.1.05.11.01	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro	3.495.000.000,00	2.843.600.000,00	81,36	0,00
5.1.05.11.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro	3.495.000.000,00	2.843.600.000,00	81,36	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	191.000.000,00	159.000.000,00	83,24	5.136.942.200,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	191.000.000,00	159.000.000,00	83,24	138.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	191.000.000,00	159.000.000,00	83,24	138.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	191.000.000,00	159.000.000,00	83,24	138.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	4.998.942.200,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	4.998.942.200,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	4.998.942.200,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.018.338.924.612,40**	**941.434.290.727,50**	**92,44**	**1.005.345.704.315,16**
5.2	**BELANJA MODAL**	**68.109.141.486,60**	**65.925.778.299,50**	**96,79**	**203.993.787.011,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	982.534.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	982.534.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	982.534.000,00
5.2.01.01.03.0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00	982.534.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.783.663.799,00	21.994.787.775,00	96,53	31.566.114.816,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.516.718.500,00	1.346.717.669,00	88,79	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.514.998.000,00	1.344.997.669,00	88,77	0,00
5.2.02.01.01.0009	Belanja Modal Loader	850.000.000,00	679.999.999,00	79,99	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	664.998.000,00	664.997.670,00	99,99	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.720.500,00	1.720.000,00	99,97	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.720.500,00	1.720.000,00	99,97	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.383.500.200,00	5.328.822.250,00	98,98	7.392.461.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.033.500.200,00	4.978.822.380,00	98,91	6.830.031.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.603.685.000,00	3.601.685.000,00	99,94	2.551.830.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	1.825.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	700.000.000,00	699.999.570,00	99,99	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.800.000,00	18.435.000,00	93,10	623.201.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	46.015.200,00	43.702.809,00	94,97	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	664.000.000,00	615.000.001,00	92,62	1.320.000.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	510.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	350.000.000,00	349.999.870,00	99,99	69.930.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	350.000.000,00	349.999.870,00	99,99	69.930.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	492.500.000,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	492.500.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	231.220.000,00	230.728.000,00	99,78	260.642.675,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.720.000,00	3.720.000,00	100,00	10.915.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.720.000,00	3.720.000,00	100,00	10.915.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	7.322.000,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.322.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	227.500.000,00	227.008.000,00	99,78	242.405.675,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	198.000.000,00	197.708.000,00	99,85	196.925.675,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	9.500.000,00	9.300.000,00	97,89	480.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	45.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.131.925.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	1.131.925.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	1.131.925.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.680.298.767,00	5.569.861.711,00	98,05	4.973.972.728,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.134.280.447,00	1.129.884.000,00	99,61	767.739.920,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	163.520.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.134.280.447,00	1.129.884.000,00	99,61	604.219.920,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.888.298.876,00	3.774.765.811,00	97,08	3.131.934.508,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.488.647.001,00	2.407.804.801,00	96,75	2.206.504.564,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	35.000.000,00	34.550.000,00	98,71	16.752.800,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	367.304.800,00	359.866.900,00	97,97	517.721.144,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	860.957.000,00	840.211.110,00	97,59	299.856.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	136.390.075,00	132.333.000,00	97,02	77.150.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	657.719.444,00	665.211.900,00	101,13	1.074.298.300,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	332.320.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	31.080.000,00	30.800.000,00	99,09	48.962.100,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	352.193.890,00	345.108.000,00	97,98	148.299.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	17.000.000,00	16.000.000,00	94,11	11.000.000,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	8.768.600,00	7.790.000,00	88,83	76.780.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	312.157.200,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	191.676.954,00	208.513.900,00	108,78	144.780.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.214.410.405,00	1.198.420.954,00	98,68	760.555.050,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.130.530.405,00	1.115.916.950,00	98,70	687.687.050,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	265.380.000,00	259.659.950,00	97,84	366.687.050,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	64.200.000,00	63.933.000,00	99,58	64.000.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	22.061.000,00	21.272.000,00	96,42	91.500.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	12.460.000,00	5.994.000,00	48,10	156.700.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	766.429.405,00	765.058.000,00	99,82	8.800.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	83.880.000,00	82.504.004,00	98,35	72.868.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	22.000.000,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	7.200.000,00	7.199.904,00	99,99	0,00
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	0,00	25.758.000,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	30.180.000,00	29.954.100,00	99,25	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	40.000.000,00	38.850.000,00	97,12	25.110.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	504.648.685,00	467.816.824,00	92,70	6.448.752.139,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	467.525.181,00	442.716.824,00	94,69	160.993.680,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	13.879.501,00	13.650.000,00	98,34	10.393.680,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	13.645.680,00	11.106.824,00	81,39	0,00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	440.000.000,00	417.960.000,00	94,99	150.600.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	37.123.504,00	25.100.000,00	67,61	6.287.758.459,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	37.123.504,00	25.100.000,00	67,61	6.287.758.459,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	29.200.000,00	0,00	0,00	837.704.400,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	29.200.000,00	0,00	0,00	500.129.400,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	29.200.000,00	0,00	0,00	220.844.400,00
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	0,00	0,00	0,00	68.435.000,00
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	0,00	0,00	0,00	210.850.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	330.525.000,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	170.775.000,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	159.750.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.239.547.322,00	3.053.458.207,00	94,25	5.139.985.017,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.277.443.472,00	2.125.069.067,00	93,30	3.862.590.827,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	65.060.000,00	48.000.000,00	73,77	6.300.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.212.383.472,00	2.077.069.067,00	93,88	3.762.050.877,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	94.239.950,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	962.103.850,00	928.389.140,00	96,49	1.277.394.190,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	291.835.000,00	290.255.121,00	99,45	0,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	498.332.000,00	484.102.169,00	97,14	559.351.190,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	93.513.600,00	77.369.600,00	82,73	35.857.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	78.423.250,00	76.662.250,00	97,75	612.186.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	72.000.000,00	71.615.285,00	99,46	1.034.579.507,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	72.000.000,00	71.615.285,00	99,46	135.579.507,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	72.000.000,00	71.615.285,00	99,46	0,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	135.579.507,00
5.2.02.13.02	Belanja Modal Produksi	0,00	0,00	0,00	899.000.000,00
5.2.02.13.02.0002	Belanja Modal Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	899.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	218.090.000,00	217.222.865,00	99,60	66.427.582,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	218.090.000,00	217.222.865,00	99,60	66.427.582,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	150.000.000,00	149.647.800,00	99,76	0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	44.861.482,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	68.090.000,00	67.575.065,00	99,24	21.566.100,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.490.138.060,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.490.138.060,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.490.138.060,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.569.971.550,00	3.319.414.800,00	92,98	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.542.271.550,00	3.312.314.800,00	93,50	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.542.271.550,00	3.312.314.800,00	93,50	0,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	24.600.000,00	4.500.000,00	18,29	0,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	24.600.000,00	4.500.000,00	18,29	0,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	3.100.000,00	2.600.000,00	83,87	0,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.100.000,00	2.600.000,00	83,87	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.124.058.370,00	1.190.709.210,00	105,92	1.028.971.658,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.124.058.370,00	1.190.709.210,00	105,92	1.028.971.658,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.124.058.370,00	1.190.709.210,00	105,92	1.028.971.658,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.140.627.912,60	18.544.762.808,50	96,88	67.896.098.558,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.114.014.835,00	14.861.773.115,50	98,33	66.564.020.090,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.114.014.835,00	14.861.773.115,50	98,33	66.564.020.090,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	307.000.000,00	305.325.290,00	99,45	838.726.663,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	2.285.000.282,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	392.000.000,00	391.724.270,00	99,92	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.955.741.429,00	5.940.998.729,00	99,75	1.485.000.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	400.000.000,00	399.954.024,50	99,98	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	14.936.576.543,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.702.850.000,00	2.672.918.416,00	98,89	3.722.652.580,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	460.700.000,00	458.431.479,00	99,50	989.819.841,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	207.984.000,00	207.847.957,00	99,93	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	175.000.000,00	169.500.640,00	96,85	443.965.979,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	132.739.406,00	132.739.406,00	100,00	33.561.865.594,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	4.544.152.996,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.280.000.000,00	4.082.436.767,00	95,38	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	100.000.000,00	99.896.137,00	99,89	174.709.612,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	3.581.550.000,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	81.744.900,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	81.744.900,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.03.01.0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	81.744.900,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.394.868.177,60	3.298.569.693,00	97,16	1.019.998.468,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.394.868.177,60	3.298.569.693,00	97,16	1.019.998.468,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	271.975.750,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	3.349.868.177,60	3.253.569.693,00	97,12	448.543.531,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00	299.479.187,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	550.000.000,00	384.420.000,00	69,89	312.080.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	550.000.000,00	384.420.000,00	69,89	312.080.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	550.000.000,00	384.420.000,00	69,89	312.080.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.711.622.895,00	19.453.774.146,00	98,69	98.114.695.523,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.523.175.000,00	5.489.078.411,00	99,38	85.494.674.091,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	5.523.175.000,00	5.489.078.411,00	99,38	79.904.891.291,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	4.323.175.000,00	4.292.897.000,00	99,29	76.824.904.800,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.200.000.000,00	1.196.181.411,00	99,68	3.079.986.491,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	5.589.782.800,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	5.589.782.800,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.638.885.562,00	7.486.859.098,00	98,00	11.904.688.389,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	8.582.796.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.582.796.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	198.175.229,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	198.175.229,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	7.438.885.562,00	7.286.859.098,00	97,95	3.123.717.160,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	7.413.885.562,00	7.261.859.098,00	97,94	3.123.717.160,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.569.616.000,00	3.538.322.458,00	99,12	187.354.640,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.889.616.000,00	2.860.748.671,00	99,00	15.000.000,00
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.889.616.000,00	2.860.748.671,00	99,00	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	550.000.000,00	548.238.472,00	99,67	0,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	550.000.000,00	548.238.472,00	99,67	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	130.000.000,00	129.335.315,00	99,48	0,00
5.2.04.03.05.0001	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	105.000.000,00	104.890.000,00	99,89	0,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	25.000.000,00	24.445.315,00	97,78	0,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	172.354.640,00
5.2.04.03.06.0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	0,00	0,00	172.354.640,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.979.946.333,00	2.939.514.179,00	98,64	527.978.403,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.979.946.333,00	2.939.514.179,00	98,64	527.978.403,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.979.946.333,00	2.939.514.179,00	98,64	527.978.403,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.183.226.880,00	5.743.677.970,00	92,89	5.170.359.809,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.106.000.000,00	2.093.925.500,00	99,42	2.201.280.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.095.000.000,00	2.093.925.500,00	99,94	2.201.280.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	2.045.000.000,00	2.044.425.500,00	99,97	1.251.280.000,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	5.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	0,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	0,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	883.803.500,00	862.942.640,00	97,63	0,00
5.2.05.03.03	Belanja Modal Hewan Lainnya	883.803.500,00	862.942.640,00	97,63	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.05.03.03.0001	Belanja Modal Hewan Lainnya	883.803.500,00	862.942.640,00	97,63	0,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	78.920.000,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	78.920.000,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	78.920.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	2.885.159.809,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	2.885.159.809,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	2.885.159.809,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	3.043.423.380,00	2.636.959.830,00	86,64	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	3.043.423.380,00	2.636.959.830,00	86,64	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	3.043.423.380,00	2.636.959.830,00	86,64	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	290.000.000,00	188.775.600,00	65,09	263.984.305,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	290.000.000,00	188.775.600,00	65,09	263.984.305,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	290.000.000,00	188.775.600,00	65,09	263.984.305,00
5.2.06.01.01.0004	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	170.000.000,00	68.775.600,00	40,45	193.961.600,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	34.572.705,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**68.109.141.486,60**	**65.925.778.299,50**	**96,79**	**203.993.787.011,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.650.000.000,00**	**4.944.688.400,00**	**87,51**	**3.912.745.909,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	87,51	3.912.745.909,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	87,51	3.912.745.909,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	87,51	3.912.745.909,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	87,51	3.912.745.909,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.650.000.000,00**	**4.944.688.400,00**	**87,51**	**3.912.745.909,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**222.406.329.564,00**	**193.017.321.488,00**	**86,78**	**227.763.218.906,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.977.492.764,00	4.977.492.764,00	100,00	3.124.684.980,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.645.979.559,00	4.645.979.559,00	100,00	2.835.557.175,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.645.979.559,00	4.645.979.559,00	100,00	2.835.557.175,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.645.979.559,00	4.645.979.559,00	100,00	2.835.557.175,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	331.513.205,00	331.513.205,00	100,00	289.127.805,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	331.513.205,00	331.513.205,00	100,00	289.127.805,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	331.513.205,00	331.513.205,00	100,00	289.127.805,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	217.428.836.800,00	188.039.828.724,00	86,48	224.638.533.926,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	217.428.836.800,00	188.039.828.724,00	86,48	224.638.533.926,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	217.428.836.800,00	188.039.828.724,00	86,48	224.638.533.926,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	147.925.538.000,00	119.034.921.766,00	80,46	154.494.636.326,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	69.503.298.800,00	69.004.906.958,00	99,28	70.143.897.600,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**222.406.329.564,00**	**193.017.321.488,00**	**86,78**	**227.763.218.906,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.314.504.395.663,00**	**1.205.322.078.915,00**	**91,69**	**1.441.015.456.141,16**
	SURPLUS/DEFISIT	**(39.100.879.991,00)**	**(15.433.664.125,02)**	**39,47**	**(30.864.951.461,72)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**39.100.879.991,00**	**39.112.019.642,74**	**100,02**	**69.965.831.452,46**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**39.100.879.991,00**	**39.112.019.642,74**	**100,02**	**69.965.831.452,46**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.100.879.991,00	39.112.019.642,74	100,02	69.965.831.452,46
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	320.614.100,00	320.614.100,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	320.614.100,00	320.614.100,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	320.614.100,00	320.614.100,00	100,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	30.321.988.677,00	30.321.988.676,88	99,99	65.136.514.246,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	22.764.875.012,00	22.764.875.011,88	99,99	65.136.514.246,00
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	5.167.668.000,00
6.1.01.02.01.0017	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	43.951.094.567,00
6.1.01.02.01.0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	5.306.120,00
6.1.01.02.01.0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	5.543.675,00
6.1.01.02.01.0048	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	32.227.935,00
6.1.01.02.01.0052	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	1.115.593,00
6.1.01.02.01.0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	1.599.209.800,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
6.1.01.02.01.0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	1.345.089.600,00
6.1.01.02.01.0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	0,00	0,00	0,00	239.971.730,00
6.1.01.02.01.0083	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	0,00	0,00	0,00	22.750.000,00
6.1.01.02.01.0099	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6.1.01.02.01.0101	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	16.217.000,00
6.1.01.02.01.0103	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	88.017.724,00
6.1.01.02.01.0111	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.399.999,00
6.1.01.02.01.0112	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	700.000,00
6.1.01.02.01.0123	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	1.057.120.421,00
6.1.01.02.01.0126	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	2.265.909.407,00
6.1.01.02.01.0127	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.863.332.178,00
6.1.01.02.01.0128	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	1.218.666.174,00
6.1.01.02.01.0129	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	3.253.629.323,00
6.1.01.02.01.0138	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SD	5.621.205,00	5.621.205,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0139	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	5.687.519,00	5.687.519,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0146	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	4.670.859,00	4.670.859,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0150	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0152	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0161	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	86.331.853,00	86.331.853,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0162	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0189	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Lainnya-DBH Sawit	32.186.000,00	32.186.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0190	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU	10.423.424.000,00	10.423.423.999,88	99,99	0,00
6.1.01.02.01.0194	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.268.138.404,00	3.268.138.404,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0195	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1.556.738.490,00	1.556.738.490,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0196	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	610.688.468,00	610.688.468,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0209	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.021.813.096,00	1.021.813.096,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0210	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.651.627,00	3.651.627,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0230	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	119.893,00	119.893,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0233	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	11.349.451,00	11.349.451,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0236	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.563.270,00	8.563.270,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0239	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	327.500,00	327.500,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0250	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0252	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	402.779,00	402.779,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0259	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	1.399.999,00	1.399.999,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0260	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0300	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TPG PNSD	504.195.300,00	504.195.300,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0301	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	208.000.000,00	208.000.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0302	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TKG PNSD	261.656.600,00	261.656.600,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0311	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	184.111.110,00	184.111.110,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0319	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	88.230.000,00	88.230.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0320	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	264.650,00	264.650,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0321	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-PK2UMK	7.900.050,00	7.900.050,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
6.1.01.02.01.0329	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	376.940.733,00	376.940.733,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0331	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.816.664.434,00	3.816.664.434,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0336	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	273.897.722,00	273.897.722,00	100,00	0,00
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	7.557.113.665,00	7.557.113.665,00	100,00	0,00
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	7.557.113.665,00	7.557.113.665,00	100,00	0,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.659.255,00	6.659.255,10	100,00	0,00
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.659.255,00	6.659.255,10	100,00	0,00
6.1.01.03.03.0010	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.665.055,00	2.665.055,10	100,00	0,00
6.1.01.03.03.0015	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	3.994.200,00	3.994.200,00	100,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	8.312.876.977,00	8.312.876.977,00	100,00	10.243.975,46
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	7.487.522.589,00	7.487.522.589,00	100,00	10.243.975,46
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	3.301.417.554,00	3.301.417.554,00	100,00	(0,54)
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	1.650.708.777,00	1.650.708.777,00	100,00	6.653.976,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	2.535.396.258,00	2.535.396.258,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0036	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00	0,00	3.590.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	825.354.388,00	825.354.388,00	100,00	0,00
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	825.354.388,00	825.354.388,00	100,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	138.740.982,00	149.880.633,76	108,02	4.819.073.231,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	2.184.144,00	13.422.881,84	614,56	1.160.706.270,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	2.184.144,00	13.422.881,84	614,56	1.160.706.270,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	109.272.982,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	109.272.982,00
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0,00	0,00	0,00	199.220.811,00
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0,00	0,00	0,00	199.220.811,00
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	136.556.838,00	136.282.751,92	99,79	0,00
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	136.556.838,00	136.282.751,92	99,79	0,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	175.000,00	0,00	3.349.873.168,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	175.000,00	0,00	3.349.873.168,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**39.100.879.991,00**	**39.112.019.642,74**	**100,02**	**69.965.831.452,46**
	PEMBIAYAAN NETTO	**39.100.879.991,00**	**39.112.019.642,74**	**100,02**	**69.965.831.452,46**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**23.678.355.517,72**	**0,00**	**39.100.879.990,74**

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	337.719.290.558,00	317.657.945.888,00	(20.061.344.670,00)	94,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	266.816.430.317,00	248.136.025.621,00	(18.680.404.696,00)	92,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	266.816.430.317,00	248.136.025.621,00	(18.680.404.696,00)	92,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	266.816.430.317,00	248.136.025.621,00	(18.680.404.696,00)	92,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	266.816.430.317,00	248.136.025.621,00	(18.680.404.696,00)	92,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	266.816.430.317,00	248.136.025.621,00	(18.680.404.696,00)	92,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	65.634.711.991,00	64.625.823.428,00	(1.008.888.563,00)	98,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	37.582.093.516,00	37.174.147.193,00	(407.946.323,00)	98,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	575.000.000,00	574.154.488,00	(845.512,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	511.750.000,00	510.904.488,00	(845.512,00)	99,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	511.750.000,00	510.904.488,00	(845.512,00)	99,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	2.110.000.000,00	2.107.677.914,00	(2.322.086,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	232.100.000,00	232.100.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.100.000,00	232.100.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.877.900.000,00	1.875.577.914,00	(2.322.086,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.877.900.000,00	1.875.577.914,00	(2.322.086,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	781.035.285,00	774.374.850,00	(6.660.435,00)	99,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	98.374.000,00	98.362.650,00	(11.350,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.374.000,00	98.362.650,00	(11.350,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	682.661.285,00	676.012.200,00	(6.649.085,00)	99,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532.661.285,00	526.162.200,00	(6.499.085,00)	98,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	149.850.000,00	(150.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	2.310.500.000,00	2.296.439.980,00	(14.060.020,00)	99,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	1.385.500.000,00	1.371.702.480,00	(13.797.520,00)	99,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.385.500.000,00	1.371.702.480,00	(13.797.520,00)	99,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	925.000.000,00	924.737.500,00	(262.500,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	925.000.000,00	924.737.500,00	(262.500,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	401.019.971,00	382.138.500,00	(18.881.471,00)	95,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	401.019.971,00	382.138.500,00	(18.881.471,00)	95,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.019.971,00	382.138.500,00	(18.881.471,00)	95,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	25.385.901.000,00	25.167.432.934,00	(218.468.066,00)	99,13	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	20.317.804.370,00	20.769.658.604,00	451.854.234,00	102,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.935.864.370,00	16.211.182.304,00	275.317.934,00	101,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	4.381.940.000,00	4.558.476.300,00	176.536.300,00	104,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	5.068.096.630,00	4.397.774.330,00	(670.322.300,00)	86,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.644.917.550,00	2.491.946.600,00	(152.970.950,00)	94,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.423.179.080,00	1.905.827.730,00	(517.351.350,00)	78,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	1.728.778.031,00	1.701.316.548,00	(27.461.483,00)	98,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	1.690.002.031,00	1.662.716.548,00	(27.285.483,00)	98,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.690.002.031,00	1.662.716.548,00	(27.285.483,00)	98,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.2	BELANJA MODAL	38.776.000,00	38.600.000,00	(176.000,00)	99,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.776.000,00	38.600.000,00	(176.000,00)	99,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	2.162.859.229,00	2.085.384.598,00	(77.474.631,00)	96,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	2.162.859.229,00	2.085.384.598,00	(77.474.631,00)	96,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	5.1.01	Belanja Pegawai	1.710.199.929,00	1.641.123.344,00	(69.076.585,00)	95,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.659.300,00	444.261.254,00	(8.398.046,00)	98,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	915.000.000,00	888.368.134,00	(26.631.866,00)	97,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	459.400.000,00	457.587.443,00	(1.812.557,00)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.400.000,00	457.587.443,00	(1.812.557,00)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	455.600.000,00	430.780.691,00	(24.819.309,00)	94,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	455.600.000,00	430.780.691,00	(24.819.309,00)	94,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	62.000.000,00	49.950.592,00	(12.049.408,00)	80,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	5.500.000,00	(12.000.000,00)	31,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	5.500.000,00	(12.000.000,00)	31,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2	BELANJA MODAL	44.500.000,00	44.450.592,00	(49.408,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.500.000,00	44.450.592,00	(49.408,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	1.150.000.000,00	1.146.908.655,00	(3.091.345,00)	99,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	1.023.500.000,00	1.020.408.655,00	(3.091.345,00)	99,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.023.500.000,00	1.020.408.655,00	(3.091.345,00)	99,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	15.347.631.734,00	15.003.365.830,00	(344.265.904,00)	97,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006		PEMBANGUNAN LABORATORIUM	715.000.000,00	713.718.980,00	(1.281.020,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	323.000.000,00	321.994.710,00	(1.005.290,00)	99,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.000.000,00	321.994.710,00	(1.005.290,00)	99,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	392.000.000,00	391.724.270,00	(275.730,00)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.000.000,00	391.724.270,00	(275.730,00)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.415.000.000,00	1.409.525.299,00	(5.474.701,00)	99,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	486.650.000,00	481.379.793,00	(5.270.207,00)	98,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.650.000,00	481.379.793,00	(5.270.207,00)	98,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	928.350.000,00	928.145.506,00	(204.494,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	928.350.000,00	928.145.506,00	(204.494,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	311.000.000,00	310.553.996,00	(446.004,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	133.000.000,00	132.849.652,00	(150.348,00)	99,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.000.000,00	132.849.652,00	(150.348,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	178.000.000,00	177.704.344,00	(295.656,00)	99,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.000.000,00	177.704.344,00	(295.656,00)	99,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	338.985.030,00	334.787.100,00	(4.197.930,00)	98,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	139.630.050,00	139.199.550,00	(430.500,00)	99,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.630.050,00	139.199.550,00	(430.500,00)	99,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	199.354.980,00	195.587.550,00	(3.767.430,00)	98,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.354.980,00	195.587.550,00	(3.767.430,00)	98,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	1.330.488.404,00	1.329.259.000,00	(1.229.404,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	630.488.404,00	629.259.000,00	(1.229.404,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.488.404,00	629.259.000,00	(1.229.404,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2	BELANJA MODAL	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	603.368.600,00	579.683.800,00	(23.684.800,00)	96,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	603.368.600,00	579.683.800,00	(23.684.800,00)	96,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603.368.600,00	579.683.800,00	(23.684.800,00)	96,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	10.277.864.000,00	10.271.168.505,00	(6.695.495,00)	99,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	8.760.265.700,00	8.731.698.205,00	(28.567.495,00)	99,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.945.825.700,00	7.764.874.805,00	(180.950.895,00)	97,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	814.440.000,00	966.823.400,00	152.383.400,00	118,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	1.517.598.300,00	1.539.470.300,00	21.872.000,00	101,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	897.354.000,00	820.368.200,00	(76.985.800,00)	91,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	620.244.300,00	719.102.100,00	98.857.800,00	115,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	55.925.700,00	54.669.150,00	(1.256.550,00)	97,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	55.925.700,00	54.669.150,00	(1.256.550,00)	97,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.925.700,00	54.669.150,00	(1.256.550,00)	97,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	9.109.981.741,00	8.693.701.705,00	(416.280.036,00)	95,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	371.700.000,00	368.902.963,00	(2.797.037,00)	99,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	238.200.000,00	235.670.495,00	(2.529.505,00)	98,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.200.000,00	235.670.495,00	(2.529.505,00)	98,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	133.500.000,00	133.232.468,00	(267.532,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.500.000,00	133.232.468,00	(267.532,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009		PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD	1.677.866.466,00	1.674.361.800,00	(3.504.666,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.135.353.000,00	1.132.672.700,00	(2.680.300,00)	99,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.135.353.000,00	1.132.672.700,00	(2.680.300,00)	99,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	542.513.466,00	541.689.100,00	(824.366,00)	99,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.513.466,00	122.001.100,00	(512.366,00)	99,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	420.000.000,00	419.688.000,00	(312.000,00)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	207.435.700,00	207.312.765,00	(122.935,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	207.435.700,00	207.312.765,00	(122.935,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.435.700,00	207.312.765,00	(122.935,00)	99,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	4.293.236.000,00	3.947.104.480,00	(346.131.520,00)	91,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	4.268.636.000,00	3.942.604.480,00	(326.031.520,00)	92,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.600.000,00	221.600.000,00	(70.000.000,00)	75,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	3.977.036.000,00	3.721.004.480,00	(256.031.520,00)	93,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	24.600.000,00	4.500.000,00	(20.100.000,00)	18,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.600.000,00	4.500.000,00	(20.100.000,00)	18,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	226.522.000,00	189.305.511,00	(37.216.489,00)	83,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026	5.1	BELANJA OPERASI	226.522.000,00	189.305.511,00	(37.216.489,00)	83,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.522.000,00	189.305.511,00	(37.216.489,00)	83,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	2.333.221.575,00	2.306.714.186,00	(26.507.389,00)	98,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1	BELANJA OPERASI	1.932.721.575,00	1.906.840.046,00	(25.881.529,00)	98,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.632.721.575,00	1.606.840.046,00	(25.881.529,00)	98,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.2	BELANJA MODAL	400.500.000,00	399.874.140,00	(625.860,00)	99,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.500.000,00	399.874.140,00	(625.860,00)	99,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	3.595.005.000,00	3.754.608.700,00	159.603.700,00	104,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	226.175.000,00	156.923.000,00	(69.252.000,00)	69,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1	BELANJA OPERASI	226.175.000,00	156.923.000,00	(69.252.000,00)	69,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.175.000,00	26.170.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	130.753.000,00	(69.247.000,00)	65,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	3.368.830.000,00	3.597.685.700,00	228.855.700,00	106,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	3.365.730.000,00	3.583.055.700,00	217.325.700,00	106,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.200.000,00	105.670.000,00	(146.530.000,00)	41,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	3.113.530.000,00	3.477.385.700,00	363.855.700,00	111,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2	BELANJA MODAL	3.100.000,00	14.630.000,00	11.530.000,00	471,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.100.000,00	2.600.000,00	(500.000,00)	83,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	12.030.000,00	12.030.000,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.268.148.250,00	4.896.096.839,00	(372.051.411,00)	92,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	5.268.148.250,00	4.896.096.839,00	(372.051.411,00)	92,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002		PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	5.268.148.250,00	4.896.096.839,00	(372.051.411,00)	92,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.268.148.250,00	4.896.096.839,00	(372.051.411,00)	92,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.148.148.250,00	4.836.096.839,00	(312.051.411,00)	93,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	120.000.000,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	50,00	
				JUMLAH BELANJA	337.719.290.558,00	317.657.945.888,00	(20.061.344.670,00)	94,05	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(337.719.290.558,00)	(317.657.945.888,00)	20.061.344.670,00	94,05	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	(274.086,00)	(274.086,00)	0,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	(274.086,00)	(274.086,00)	0,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	(274.086,00)	(274.086,00)	0,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	(274.086,00)	(274.086,00)	0,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(274.086,00)	(274.086,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(337.719.290.558,00)	(317.658.219.974,00)	20.061.070.584,00	94,05	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	7.194.588.976,00	6.893.575.300,00	(301.013.676,00)	95,81	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.194.588.976,00	6.893.575.300,00	(301.013.676,00)	95,81	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.194.588.976,00	6.893.575.300,00	(301.013.676,00)	95,81	
				JUMLAH PENDAPATAN	7.194.588.976,00	6.893.575.300,00	(301.013.676,00)	95,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	92.305.752.958,00	88.886.332.337,00	(3.419.420.621,00)	96,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.098.244.124,00	48.505.149.916,00	(1.593.094.208,00)	96,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	50.098.244.124,00	48.505.149.916,00	(1.593.094.208,00)	96,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	50.098.244.124,00	48.505.149.916,00	(1.593.094.208,00)	96,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.098.244.124,00	48.505.149.916,00	(1.593.094.208,00)	96,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	50.098.244.124,00	48.505.149.916,00	(1.593.094.208,00)	96,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	37.089.921.118,00	35.473.731.380,00	(1.616.189.738,00)	95,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.359.148.803,00	11.286.132.300,00	(73.016.503,00)	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002		PEMBANGUNAN PUSKESMAS	3.958.439.151,00	3.950.194.333,00	(8.244.818,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	198.579.544,40	198.052.500,00	(527.044,40)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.579.544,40	198.052.500,00	(527.044,40)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.759.859.606,60	3.752.141.833,00	(7.717.773,60)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.654.859.606,60	3.647.251.833,00	(7.607.773,60)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.000.000,00	104.890.000,00	(110.000,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020		PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	342.772.000,00	335.005.334,00	(7.766.666,00)	97,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	342.772.000,00	335.005.334,00	(7.766.666,00)	97,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.772.000,00	335.005.334,00	(7.766.666,00)	97,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	6.896.957.332,00	6.839.960.297,00	(56.997.035,00)	99,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	6.896.957.332,00	6.839.960.297,00	(56.997.035,00)	99,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.896.957.332,00	6.839.960.297,00	(56.997.035,00)	99,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026		DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	160.980.320,00	160.972.336,00	(7.984,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	160.980.320,00	160.972.336,00	(7.984,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.980.320,00	160.972.336,00	(7.984,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.730.772.315,00	24.187.599.080,00	(1.543.173.235,00)	94,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	107.960.000,00	60.000.000,00	(47.960.000,00)	55,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.960.000,00	60.000.000,00	(47.960.000,00)	55,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.960.000,00	60.000.000,00	(47.960.000,00)	55,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	118.400.000,00	118.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	118.400.000,00	118.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.400.000,00	118.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	88.000.000,00	45.665.000,00	(42.335.000,00)	51,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	88.000.000,00	45.665.000,00	(42.335.000,00)	51,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	45.665.000,00	(42.335.000,00)	51,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	48.051.000,00	48.051.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	48.051.000,00	48.051.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.051.000,00	48.051.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	200.390.394,00	199.472.750,00	(917.644,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	200.390.394,00	199.472.750,00	(917.644,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.390.394,00	199.472.750,00	(917.644,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	368.470.000,00	332.846.150,00	(35.623.850,00)	90,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	368.470.000,00	332.846.150,00	(35.623.850,00)	90,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.470.000,00	332.846.150,00	(35.623.850,00)	90,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	254.171.043,00	251.869.000,00	(2.302.043,00)	99,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	254.171.043,00	251.869.000,00	(2.302.043,00)	99,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.171.043,00	251.869.000,00	(2.302.043,00)	99,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	631.119.084,00	630.979.050,00	(140.034,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	631.119.084,00	630.979.050,00	(140.034,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	631.119.084,00	630.979.050,00	(140.034,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	18.591.215.841,00	17.581.058.769,00	(1.010.157.072,00)	94,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	18.591.215.841,00	17.581.058.769,00	(1.010.157.072,00)	94,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.591.215.841,00	17.581.058.769,00	(1.010.157.072,00)	94,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	44.275.000,00	0,00	(44.275.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	44.275.000,00	0,00	(44.275.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.275.000,00	0,00	(44.275.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	1.592.788.540,00	1.466.663.639,00	(126.124.901,00)	92,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	1.360.212.040,00	1.234.126.239,00	(126.085.801,00)	90,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.212.040,00	1.234.126.239,00	(126.085.801,00)	90,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	232.576.500,00	232.537.400,00	(39.100,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.576.500,00	232.537.400,00	(39.100,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	896.063.584,00	806.941.923,00	(89.121.661,00)	90,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	896.063.584,00	806.941.923,00	(89.121.661,00)	90,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.063.584,00	806.941.923,00	(89.121.661,00)	90,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.949.032.250,00	1.812.533.495,00	(136.498.755,00)	92,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	1.949.032.250,00	1.812.533.495,00	(136.498.755,00)	92,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.949.032.250,00	1.812.533.495,00	(136.498.755,00)	92,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	590.835.579,00	583.118.304,00	(7.717.275,00)	98,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	590.835.579,00	583.118.304,00	(7.717.275,00)	98,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.835.579,00	583.118.304,00	(7.717.275,00)	98,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.405.235.716,00	4.203.222.430,00	(202.013.286,00)	95,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01		PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	53.791.000,00	53.791.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	53.791.000,00	53.791.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.791.000,00	53.791.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.791.000,00	53.791.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	3.182.691.716,00	2.988.055.155,00	(194.636.561,00)	93,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001		PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	592.941.716,00	571.555.155,00	(21.386.561,00)	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	592.941.716,00	571.555.155,00	(21.386.561,00)	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.941.716,00	571.555.155,00	(21.386.561,00)	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	2.589.750.000,00	2.416.500.000,00	(173.250.000,00)	93,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.589.750.000,00	2.416.500.000,00	(173.250.000,00)	93,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.589.750.000,00	2.416.500.000,00	(173.250.000,00)	93,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.168.753.000,00	1.161.376.275,00	(7.376.725,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.168.753.000,00	1.161.376.275,00	(7.376.725,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.168.753.000,00	1.161.376.275,00	(7.376.725,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.168.753.000,00	1.161.376.275,00	(7.376.725,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	469.902.000,00	468.988.611,00	(913.389,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	179.515.000,00	178.798.159,00	(716.841,00)	99,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	179.515.000,00	178.798.159,00	(716.841,00)	99,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	179.515.000,00	178.798.159,00	(716.841,00)	99,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.515.000,00	178.798.159,00	(716.841,00)	99,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	145.549.000,00	145.352.472,00	(196.528,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	145.549.000,00	145.352.472,00	(196.528,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	145.549.000,00	145.352.472,00	(196.528,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.549.000,00	145.352.472,00	(196.528,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06		PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	144.838.000,00	144.837.980,00	(20,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001		PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	144.838.000,00	144.837.980,00	(20,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	144.838.000,00	144.837.980,00	(20,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.838.000,00	144.837.980,00	(20,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	242.450.000,00	235.240.000,00	(7.210.000,00)	97,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	242.450.000,00	235.240.000,00	(7.210.000,00)	97,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	242.450.000,00	235.240.000,00	(7.210.000,00)	97,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	242.450.000,00	235.240.000,00	(7.210.000,00)	97,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.450.000,00	235.240.000,00	(7.210.000,00)	97,02	
				JUMLAH BELANJA	92.305.752.958,00	88.886.332.337,00	(3.419.420.621,00)	96,29	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(85.111.163.982,00)	(81.992.757.037,00)	3.118.406.945,00	96,33	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(85.111.163.982,00)	(81.992.757.037,00)	3.118.406.945,00	96,33	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	42.000.000.000,00	43.180.716.152,00	1.180.716.152,00	102,81	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42.000.000.000,00	43.180.716.152,00	1.180.716.152,00	102,81	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.000.000.000,00	43.180.716.152,00	1.180.716.152,00	102,81	
				JUMLAH PENDAPATAN	42.000.000.000,00	43.180.716.152,00	1.180.716.152,00	102,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	57.667.288.477,00	58.822.709.300,00	1.155.420.823,00	102,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.286.063.759,00	44.458.191.040,00	1.172.127.281,00	102,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	119.966.615,00	118.600.000,00	(1.366.615,00)	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	119.966.615,00	118.600.000,00	(1.366.615,00)	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0001	5.2	BELANJA MODAL	119.966.615,00	118.600.000,00	(1.366.615,00)	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	119.966.615,00	118.600.000,00	(1.366.615,00)	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.163.900.000,00	1.163.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.163.900.000,00	1.163.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.163.900.000,00	1.163.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.163.900.000,00	1.163.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	42.002.197.144,00	43.175.691.040,00	1.173.493.896,00	102,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	42.002.197.144,00	43.175.691.040,00	1.173.493.896,00	102,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.328.138.774,00	41.600.561.830,00	1.272.423.056,00	103,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	340.000.000,00	301.570.000,00	(38.430.000,00)	88,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.988.138.774,00	41.298.991.830,00	1.310.853.056,00	103,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.674.058.370,00	1.575.129.210,00	(98.929.160,00)	94,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.124.058.370,00	1.190.709.210,00	66.650.840,00	105,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	384.420.000,00	(165.580.000,00)	69,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.264.224.718,00	14.255.620.739,00	(8.603.979,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.980.124.718,00	10.971.520.739,00	(8.603.979,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	4.980.124.718,00	4.971.564.533,00	(8.560.185,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	585.080.000,00	583.802.919,00	(1.277.081,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.080.000,00	583.802.919,00	(1.277.081,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	4.395.044.718,00	4.387.761.614,00	(7.283.104,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.400.000.000,00	2.392.716.896,00	(7.283.104,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.995.044.718,00	1.995.044.718,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	6.000.000.000,00	5.999.956.206,00	(43.794,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000.000,00	5.999.956.206,00	(43.794,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000.000,00	5.999.956.206,00	(43.794,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.284.100.000,00	3.284.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	3.284.100.000,00	3.284.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	3.284.100.000,00	3.284.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.284.100.000,00	3.284.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	117.000.000,00	108.897.521,00	(8.102.479,00)	93,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.000.000,00	108.897.521,00	(8.102.479,00)	93,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.000.000,00	108.897.521,00	(8.102.479,00)	93,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	117.000.000,00	108.897.521,00	(8.102.479,00)	93,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	108.897.521,00	(8.102.479,00)	93,07	
				JUMLAH BELANJA	57.667.288.477,00	58.822.709.300,00	1.155.420.823,00	102,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(15.667.288.477,00)	(15.641.993.148,00)	25.295.329,00	99,83	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	11.238.738,00	11.238.738,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	11.238.738,00	11.238.738,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	11.238.738,00	11.238.738,00	0,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	11.238.738,00	11.238.738,00	0,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	0,00	11.238.738,00	11.238.738,00	0,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.667.288.477,00)	(15.630.754.410,00)	36.534.067,00	99,76	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Biromaru

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	82.211,00	82.211,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	82.211,00	82.211,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	82.211,00	82.211,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	82.211,00	82.211,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		5	BELANJA DAERAH	3.835.836.249,00	3.785.703.824,00	(50.132.425,00)	98,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.835.836.249,00	3.785.703.824,00	(50.132.425,00)	98,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.835.836.249,00	3.785.703.824,00	(50.132.425,00)	98,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	108.630.000,00	108.600.000,00	(30.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.630.000,00	108.600.000,00	(30.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.630.000,00	108.600.000,00	(30.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	30.600.000,00	28.800.000,00	(1.800.000,00)	94,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.600.000,00	28.800.000,00	(1.800.000,00)	94,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	28.800.000,00	(1.800.000,00)	94,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	247.003.000,00	245.199.000,00	(1.804.000,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	247.003.000,00	245.199.000,00	(1.804.000,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.003.000,00	245.199.000,00	(1.804.000,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	18.900.000,00	15.400.000,00	(3.500.000,00)	81,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	18.900.000,00	15.400.000,00	(3.500.000,00)	81,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	15.400.000,00	(3.500.000,00)	81,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	92.792.000,00	90.970.000,00	(1.822.000,00)	98,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	92.792.000,00	90.970.000,00	(1.822.000,00)	98,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.792.000,00	90.970.000,00	(1.822.000,00)	98,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	2.742.354.249,00	2.720.873.237,00	(21.481.012,00)	99,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	2.561.883.577,00	2.540.717.765,00	(21.165.812,00)	99,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.561.883.577,00	2.540.717.765,00	(21.165.812,00)	99,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	180.470.672,00	180.155.472,00	(315.200,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.470.672,00	180.155.472,00	(315.200,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	279.057.000,00	257.661.587,00	(21.395.413,00)	92,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	279.057.000,00	257.661.587,00	(21.395.413,00)	92,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.057.000,00	257.661.587,00	(21.395.413,00)	92,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0048		PENGELOLAAN LAYANAN IMUNISASI	78.600.000,00	80.300.000,00	1.700.000,00	102,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0048	5.1	BELANJA OPERASI	78.600.000,00	80.300.000,00	1.700.000,00	102,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.600.000,00	80.300.000,00	1.700.000,00	102,16	
				JUMLAH BELANJA	3.835.836.249,00	3.785.703.824,00	(50.132.425,00)	98,69	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.835.836.249,00)	(3.785.621.613,00)	50.214.636,00	98,69	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.835.836.249,00)	(3.785.621.613,00)	50.214.636,00	98,69	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Dolo

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	88.666,00	88.666,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	88.666,00	88.666,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	88.666,00	88.666,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	88.666,00	88.666,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	2.731.410.505,00	2.614.153.002,00	(117.257.503,00)	95,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.724.810.505,00	2.607.553.002,00	(117.257.503,00)	95,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.724.810.505,00	2.607.553.002,00	(117.257.503,00)	95,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	302.885.000,00	302.285.000,00	(600.000,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	302.885.000,00	302.285.000,00	(600.000,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.885.000,00	302.285.000,00	(600.000,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	27.400.000,00	18.600.000,00	(8.800.000,00)	67,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	27.400.000,00	18.600.000,00	(8.800.000,00)	67,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	18.600.000,00	(8.800.000,00)	67,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	24.200.000,00	21.350.000,00	(2.850.000,00)	88,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	24.200.000,00	21.350.000,00	(2.850.000,00)	88,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	21.350.000,00	(2.850.000,00)	88,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	2.800.000,00	2.100.000,00	(700.000,00)	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.100.000,00	(700.000,00)	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.100.000,00	(700.000,00)	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	172.761.000,00	168.750.000,00	(4.011.000,00)	97,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	172.761.000,00	168.750.000,00	(4.011.000,00)	97,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.761.000,00	168.750.000,00	(4.011.000,00)	97,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	1.688.911.505,00	1.604.860.493,00	(84.051.012,00)	95,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.615.000.505,00	1.538.225.493,00	(76.775.012,00)	95,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.615.000.505,00	1.538.225.493,00	(76.775.012,00)	95,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	73.911.000,00	66.635.000,00	(7.276.000,00)	90,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.911.000,00	66.635.000,00	(7.276.000,00)	90,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	263.831.000,00	260.707.509,00	(3.123.491,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	263.831.000,00	260.707.509,00	(3.123.491,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.831.000,00	260.707.509,00	(3.123.491,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	11.000.000,00	10.800.000,00	(200.000,00)	98,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.800.000,00	(200.000,00)	98,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.800.000,00	(200.000,00)	98,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	93.922.000,00	84.300.000,00	(9.622.000,00)	89,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	93.922.000,00	84.300.000,00	(9.622.000,00)	89,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.922.000,00	84.300.000,00	(9.622.000,00)	89,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.731.410.505,00	2.614.153.002,00	(117.257.503,00)	95,70	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.731.410.505,00)	(2.614.064.336,00)	117.346.169,00	95,70	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.731.410.505,00)	(2.614.064.336,00)	117.346.169,00	95,70	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Tinggede

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	49.065,00	49.065,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	49.065,00	49.065,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	49.065,00	49.065,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	49.065,00	49.065,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		5	BELANJA DAERAH	1.339.297.528,00	1.297.149.545,00	(42.147.983,00)	96,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.326.999.528,00	1.285.749.545,00	(41.249.983,00)	96,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.326.999.528,00	1.285.749.545,00	(41.249.983,00)	96,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	89.760.000,00	66.135.000,00	(23.625.000,00)	73,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	89.760.000,00	66.135.000,00	(23.625.000,00)	73,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.760.000,00	66.135.000,00	(23.625.000,00)	73,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	246.710.000,00	245.210.000,00	(1.500.000,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	246.710.000,00	245.210.000,00	(1.500.000,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.710.000,00	245.210.000,00	(1.500.000,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	6.600.000,00	4.800.000,00	(1.800.000,00)	72,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	4.800.000,00	(1.800.000,00)	72,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	4.800.000,00	(1.800.000,00)	72,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	14.700.000,00	14.800.000,00	100.000,00	100,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	14.700.000,00	14.800.000,00	100.000,00	100,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.800.000,00	100.000,00	100,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	129.400.000,00	128.750.000,00	(650.000,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	129.400.000,00	128.750.000,00	(650.000,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.400.000,00	128.750.000,00	(650.000,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	545.706.528,00	534.215.545,00	(11.490.983,00)	97,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	503.966.528,00	492.562.545,00	(11.403.983,00)	97,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.966.528,00	492.562.545,00	(11.403.983,00)	97,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	41.740.000,00	41.653.000,00	(87.000,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.740.000,00	41.653.000,00	(87.000,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	195.023.000,00	194.839.000,00	(184.000,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	195.023.000,00	194.839.000,00	(184.000,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.023.000,00	194.839.000,00	(184.000,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	25,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	25,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	25,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.298.000,00	11.400.000,00	(898.000,00)	92,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.298.000,00	11.400.000,00	(898.000,00)	92,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	12.298.000,00	11.400.000,00	(898.000,00)	92,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.298.000,00	11.400.000,00	(898.000,00)	92,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.298.000,00	11.400.000,00	(898.000,00)	92,69	
				JUMLAH BELANJA	1.339.297.528,00	1.297.149.545,00	(42.147.983,00)	96,85	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.339.297.528,00)	(1.297.100.480,00)	42.197.048,00	96,84	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.339.297.528,00)	(1.297.100.480,00)	42.197.048,00	96,84	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Marawola

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	66.310,00	66.310,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	66.310,00	66.310,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	66.310,00	66.310,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	66.310,00	66.310,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	3.561.729.348,00	3.539.890.434,00	(21.838.914,00)	99,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.322.902.348,00	3.308.356.315,00	(14.546.033,00)	99,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.322.902.348,00	3.308.356.315,00	(14.546.033,00)	99,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	89.568.000,00	87.840.000,00	(1.728.000,00)	98,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	89.568.000,00	87.840.000,00	(1.728.000,00)	98,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.568.000,00	87.840.000,00	(1.728.000,00)	98,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	36.000.000,00	34.450.000,00	(1.550.000,00)	95,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	34.450.000,00	(1.550.000,00)	95,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	34.450.000,00	(1.550.000,00)	95,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	21.000.000,00	20.800.000,00	(200.000,00)	99,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	20.800.000,00	(200.000,00)	99,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	20.800.000,00	(200.000,00)	99,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	7.200.000,00	8.100.000,00	900.000,00	112,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	8.100.000,00	900.000,00	112,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	8.100.000,00	900.000,00	112,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	228.844.000,00	218.455.000,00	(10.389.000,00)	95,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	228.844.000,00	218.455.000,00	(10.389.000,00)	95,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.844.000,00	218.455.000,00	(10.389.000,00)	95,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	18.000.000,00	17.900.000,00	(100.000,00)	99,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.900.000,00	(100.000,00)	99,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.900.000,00	(100.000,00)	99,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	18.000.000,00	17.850.000,00	(150.000,00)	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.850.000,00	(150.000,00)	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.850.000,00	(150.000,00)	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	6.400.000,00	5.700.000,00	(700.000,00)	89,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	5.700.000,00	(700.000,00)	89,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	5.700.000,00	(700.000,00)	89,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	160.476.000,00	159.300.000,00	(1.176.000,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	160.476.000,00	159.300.000,00	(1.176.000,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.476.000,00	159.300.000,00	(1.176.000,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	2.635.034.348,00	2.636.249.315,00	1.214.967,00	100,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	2.594.427.348,00	2.616.565.715,00	22.138.367,00	100,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.594.427.348,00	2.616.565.715,00	22.138.367,00	100,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	40.607.000,00	19.683.600,00	(20.923.400,00)	48,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.607.000,00	19.683.600,00	(20.923.400,00)	48,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	78.080.000,00	77.412.000,00	(668.000,00)	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	78.080.000,00	77.412.000,00	(668.000,00)	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.080.000,00	77.412.000,00	(668.000,00)	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	238.827.000,00	231.534.119,00	(7.292.881,00)	96,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	238.827.000,00	231.534.119,00	(7.292.881,00)	96,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	238.827.000,00	231.534.119,00	(7.292.881,00)	96,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	238.827.000,00	231.534.119,00	(7.292.881,00)	96,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.827.000,00	231.534.119,00	(7.292.881,00)	96,94	
				JUMLAH BELANJA	3.561.729.348,00	3.539.890.434,00	(21.838.914,00)	99,38	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.561.729.348,00)	(3.539.824.124,00)	21.905.224,00	99,38	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.561.729.348,00)	(3.539.824.124,00)	21.905.224,00	99,38	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Kaleke

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	40.624,00	40.624,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	40.624,00	40.624,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	40.624,00	40.624,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	40.624,00	40.624,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	2.548.779.436,00	2.456.015.830,00	(92.763.606,00)	96,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.542.891.436,00	2.452.640.830,00	(90.250.606,00)	96,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.542.891.436,00	2.452.640.830,00	(90.250.606,00)	96,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	128.800.000,00	121.760.000,00	(7.040.000,00)	94,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	128.800.000,00	121.760.000,00	(7.040.000,00)	94,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.800.000,00	121.760.000,00	(7.040.000,00)	94,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	270.194.000,00	269.874.000,00	(320.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	270.194.000,00	269.874.000,00	(320.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.194.000,00	269.874.000,00	(320.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	162.850.000,00	164.050.000,00	1.200.000,00	100,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	162.850.000,00	164.050.000,00	1.200.000,00	100,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.850.000,00	164.050.000,00	1.200.000,00	100,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	1.532.884.436,00	1.457.236.830,00	(75.647.606,00)	95,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.490.686.043,00	1.415.436.830,00	(75.249.213,00)	94,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.490.686.043,00	1.415.436.830,00	(75.249.213,00)	94,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	42.198.393,00	41.800.000,00	(398.393,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.198.393,00	41.800.000,00	(398.393,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	248.953.000,00	240.540.000,00	(8.413.000,00)	96,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	248.953.000,00	240.540.000,00	(8.413.000,00)	96,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.953.000,00	240.540.000,00	(8.413.000,00)	96,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	12.510.000,00	12.480.000,00	(30.000,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	12.510.000,00	12.480.000,00	(30.000,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.510.000,00	12.480.000,00	(30.000,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.888.000,00	3.375.000,00	(2.513.000,00)	57,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.888.000,00	3.375.000,00	(2.513.000,00)	57,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	5.888.000,00	3.375.000,00	(2.513.000,00)	57,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.888.000,00	3.375.000,00	(2.513.000,00)	57,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.888.000,00	3.375.000,00	(2.513.000,00)	57,31	
				JUMLAH BELANJA	2.548.779.436,00	2.456.015.830,00	(92.763.606,00)	96,36	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.548.779.436,00)	(2.455.975.206,00)	92.804.230,00	96,35	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.548.779.436,00)	(2.455.975.206,00)	92.804.230,00	96,35	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Baluase

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	214.165,00	214.165,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	214.165,00	214.165,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	214.165,00	214.165,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	214.165,00	214.165,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	2.873.973.147,00	2.638.278.006,00	(235.695.141,00)	91,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.862.534.147,00	2.627.578.006,00	(234.956.141,00)	91,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.862.534.147,00	2.627.578.006,00	(234.956.141,00)	91,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	69.816.000,00	63.600.000,00	(6.216.000,00)	91,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	69.816.000,00	63.600.000,00	(6.216.000,00)	91,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.816.000,00	63.600.000,00	(6.216.000,00)	91,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	80.400.000,00	68.900.000,00	(11.500.000,00)	85,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	80.400.000,00	68.900.000,00	(11.500.000,00)	85,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.400.000,00	68.900.000,00	(11.500.000,00)	85,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	21.500.000,00	21.100.000,00	(400.000,00)	98,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	21.500.000,00	21.100.000,00	(400.000,00)	98,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.100.000,00	(400.000,00)	98,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	324.445.000,00	304.115.000,00	(20.330.000,00)	93,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	324.445.000,00	304.115.000,00	(20.330.000,00)	93,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.445.000,00	304.115.000,00	(20.330.000,00)	93,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	19.500.000,00	15.400.000,00	(4.100.000,00)	78,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	15.400.000,00	(4.100.000,00)	78,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	15.400.000,00	(4.100.000,00)	78,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	6.000.000,00	5.700.000,00	(300.000,00)	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.700.000,00	(300.000,00)	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.700.000,00	(300.000,00)	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	178.938.000,00	166.650.000,00	(12.288.000,00)	93,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	178.938.000,00	166.650.000,00	(12.288.000,00)	93,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.938.000,00	166.650.000,00	(12.288.000,00)	93,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	1.817.603.147,00	1.696.316.490,00	(121.286.657,00)	93,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.754.406.147,00	1.635.684.490,00	(118.721.657,00)	93,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.754.406.147,00	1.635.684.490,00	(118.721.657,00)	93,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	63.197.000,00	60.632.000,00	(2.565.000,00)	95,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.197.000,00	60.632.000,00	(2.565.000,00)	95,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	259.682.000,00	201.996.516,00	(57.685.484,00)	77,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	259.682.000,00	201.996.516,00	(57.685.484,00)	77,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.682.000,00	201.996.516,00	(57.685.484,00)	77,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.439.000,00	10.700.000,00	(739.000,00)	93,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.439.000,00	10.700.000,00	(739.000,00)	93,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	11.439.000,00	10.700.000,00	(739.000,00)	93,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.439.000,00	10.700.000,00	(739.000,00)	93,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.439.000,00	10.700.000,00	(739.000,00)	93,53	
				JUMLAH BELANJA	2.873.973.147,00	2.638.278.006,00	(235.695.141,00)	91,79	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.873.973.147,00)	(2.638.063.841,00)	235.909.306,00	91,79	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.873.973.147,00)	(2.638.063.841,00)	235.909.306,00	91,79	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Kinovaro

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	70.474,00	70.474,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	70.474,00	70.474,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	70.474,00	70.474,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	70.474,00	70.474,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		5	BELANJA DAERAH	1.679.267.773,00	1.557.747.733,00	(121.520.040,00)	92,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.676.957.773,00	1.555.437.733,00	(121.520.040,00)	92,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.676.957.773,00	1.555.437.733,00	(121.520.040,00)	92,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	45.186.000,00	44.850.000,00	(336.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.186.000,00	44.850.000,00	(336.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.186.000,00	44.850.000,00	(336.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	89.000.000,00	84.250.000,00	(4.750.000,00)	94,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.000.000,00	84.250.000,00	(4.750.000,00)	94,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	84.250.000,00	(4.750.000,00)	94,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	65.450.000,00	65.450.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	65.450.000,00	65.450.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.450.000,00	65.450.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	31.200.000,00	37.050.000,00	5.850.000,00	118,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	37.050.000,00	5.850.000,00	118,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	37.050.000,00	5.850.000,00	118,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	23.400.000,00	15.600.000,00	(7.800.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	15.600.000,00	(7.800.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	15.600.000,00	(7.800.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	59.750.000,00	48.200.000,00	(11.550.000,00)	80,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	59.750.000,00	48.200.000,00	(11.550.000,00)	80,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.750.000,00	48.200.000,00	(11.550.000,00)	80,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	246.306.000,00	226.053.000,00	(20.253.000,00)	91,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	246.306.000,00	226.053.000,00	(20.253.000,00)	91,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.306.000,00	226.053.000,00	(20.253.000,00)	91,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	718.793.773,00	672.887.505,00	(45.906.268,00)	93,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	681.816.773,00	654.719.505,00	(27.097.268,00)	96,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	681.816.773,00	654.719.505,00	(27.097.268,00)	96,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	36.977.000,00	18.168.000,00	(18.809.000,00)	49,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.977.000,00	18.168.000,00	(7.809.000,00)	69,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	240.372.000,00	205.547.228,00	(34.824.772,00)	85,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	240.372.000,00	205.547.228,00	(34.824.772,00)	85,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.372.000,00	205.547.228,00	(34.824.772,00)	85,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.679.267.773,00	1.557.747.733,00	(121.520.040,00)	92,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.679.267.773,00)	(1.557.677.259,00)	121.590.514,00	92,75	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.679.267.773,00)	(1.557.677.259,00)	121.590.514,00	92,75	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Dombusoi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	76.662,00	76.662,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	76.662,00	76.662,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	76.662,00	76.662,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	76.662,00	76.662,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		5	BELANJA DAERAH	1.250.978.469,00	1.185.852.826,00	(65.125.643,00)	94,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.250.978.469,00	1.185.852.826,00	(65.125.643,00)	94,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.250.978.469,00	1.185.852.826,00	(65.125.643,00)	94,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	146.520.000,00	142.630.000,00	(3.890.000,00)	97,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	146.520.000,00	142.630.000,00	(3.890.000,00)	97,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.520.000,00	142.630.000,00	(3.890.000,00)	97,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	42.790.000,00	46.680.000,00	3.890.000,00	109,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.790.000,00	46.680.000,00	3.890.000,00	109,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.790.000,00	46.680.000,00	3.890.000,00	109,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	237.451.000,00	205.868.600,00	(31.582.400,00)	86,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	237.451.000,00	205.868.600,00	(31.582.400,00)	86,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.451.000,00	205.868.600,00	(31.582.400,00)	86,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	13.615.000,00	11.670.000,00	(1.945.000,00)	85,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	13.615.000,00	11.670.000,00	(1.945.000,00)	85,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.615.000,00	11.670.000,00	(1.945.000,00)	85,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	115.408.000,00	115.233.000,00	(175.000,00)	99,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	115.408.000,00	115.233.000,00	(175.000,00)	99,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.408.000,00	115.233.000,00	(175.000,00)	99,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	361.991.469,00	337.822.526,00	(24.168.943,00)	93,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	361.991.469,00	337.822.526,00	(24.168.943,00)	93,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.991.469,00	337.822.526,00	(24.168.943,00)	93,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	222.481.000,00	217.258.700,00	(5.222.300,00)	97,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	222.481.000,00	217.258.700,00	(5.222.300,00)	97,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.481.000,00	217.258.700,00	(5.222.300,00)	97,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	14.407.000,00	14.320.000,00	(87.000,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	14.407.000,00	14.320.000,00	(87.000,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.407.000,00	14.320.000,00	(87.000,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.945.000,00	0,00	(1.945.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.945.000,00	0,00	(1.945.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.945.000,00	0,00	(1.945.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0048		PENGELOLAAN LAYANAN IMUNISASI	62.960.000,00	62.960.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0048	5.1	BELANJA OPERASI	62.960.000,00	62.960.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.960.000,00	62.960.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.250.978.469,00	1.185.852.826,00	(65.125.643,00)	94,79	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.250.978.469,00)	(1.185.776.164,00)	65.202.305,00	94,78	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.250.978.469,00)	(1.185.776.164,00)	65.202.305,00	94,78	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Kamaipura

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	71.811,00	71.811,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	71.811,00	71.811,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	71.811,00	71.811,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	71.811,00	71.811,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		5	BELANJA DAERAH	1.479.603.756,00	1.348.220.048,00	(131.383.708,00)	91,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.457.103.756,00	1.326.620.048,00	(130.483.708,00)	91,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.457.103.756,00	1.326.620.048,00	(130.483.708,00)	91,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	59.800.000,00	36.406.500,00	(23.393.500,00)	60,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.800.000,00	36.406.500,00	(23.393.500,00)	60,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.800.000,00	36.406.500,00	(23.393.500,00)	60,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	30.000.000,00	10.800.000,00	(19.200.000,00)	36,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	10.800.000,00	(19.200.000,00)	36,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	10.800.000,00	(19.200.000,00)	36,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	240.801.000,00	236.505.900,00	(4.295.100,00)	98,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	240.801.000,00	236.505.900,00	(4.295.100,00)	98,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.801.000,00	236.505.900,00	(4.295.100,00)	98,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	19.000.000,00	24.800.000,00	5.800.000,00	130,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	24.800.000,00	5.800.000,00	130,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	24.800.000,00	5.800.000,00	130,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	119.270.000,00	115.200.000,00	(4.070.000,00)	96,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	119.270.000,00	115.200.000,00	(4.070.000,00)	96,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.270.000,00	115.200.000,00	(4.070.000,00)	96,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	614.856.756,00	573.069.730,00	(41.787.026,00)	93,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	566.253.005,00	525.010.730,00	(41.242.275,00)	92,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	566.253.005,00	525.010.730,00	(41.242.275,00)	92,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	48.603.751,00	48.059.000,00	(544.751,00)	98,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.603.751,00	48.059.000,00	(544.751,00)	98,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	199.915.000,00	159.687.918,00	(40.227.082,00)	79,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	199.915.000,00	159.687.918,00	(40.227.082,00)	79,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.915.000,00	159.687.918,00	(40.227.082,00)	79,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	23.411.000,00	22.100.000,00	(1.311.000,00)	94,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	23.411.000,00	22.100.000,00	(1.311.000,00)	94,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.411.000,00	22.100.000,00	(1.311.000,00)	94,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	22.500.000,00	21.600.000,00	(900.000,00)	96,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.500.000,00	21.600.000,00	(900.000,00)	96,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	22.500.000,00	21.600.000,00	(900.000,00)	96,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	21.600.000,00	(900.000,00)	96,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	21.600.000,00	(900.000,00)	96,00	
				JUMLAH BELANJA	1.479.603.756,00	1.348.220.048,00	(131.383.708,00)	91,12	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.479.603.756,00)	(1.348.148.237,00)	131.455.519,00	91,11	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.479.603.756,00)	(1.348.148.237,00)	131.455.519,00	91,11	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Panderee

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	113.595,00	113.595,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	113.595,00	113.595,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	113.595,00	113.595,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	113.595,00	113.595,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		5	BELANJA DAERAH	2.378.394.000,00	2.200.865.644,00	(177.528.356,00)	92,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.375.594.000,00	2.200.865.644,00	(174.728.356,00)	92,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.375.594.000,00	2.200.865.644,00	(174.728.356,00)	92,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	115.661.000,00	115.072.000,00	(589.000,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	115.661.000,00	115.072.000,00	(589.000,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.661.000,00	115.072.000,00	(589.000,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	71.280.000,00	71.280.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	71.280.000,00	71.280.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.280.000,00	71.280.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	21.600.000,00	19.780.000,00	(1.820.000,00)	91,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	19.780.000,00	(1.820.000,00)	91,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	19.780.000,00	(1.820.000,00)	91,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	20.640.000,00	20.640.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	20.640.000,00	20.640.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.640.000,00	20.640.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	244.249.000,00	236.343.000,00	(7.906.000,00)	96,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	244.249.000,00	236.343.000,00	(7.906.000,00)	96,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.249.000,00	236.343.000,00	(7.906.000,00)	96,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	16.780.000,00	16.340.000,00	(440.000,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	16.780.000,00	16.340.000,00	(440.000,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.780.000,00	16.340.000,00	(440.000,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	20.010.000,00	18.040.000,00	(1.970.000,00)	90,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	20.010.000,00	18.040.000,00	(1.970.000,00)	90,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.010.000,00	18.040.000,00	(1.970.000,00)	90,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	17.390.000,00	17.200.000,00	(190.000,00)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	17.390.000,00	17.200.000,00	(190.000,00)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.390.000,00	17.200.000,00	(190.000,00)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	1.000.000,00	860.000,00	(140.000,00)	86,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	860.000,00	(140.000,00)	86,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	860.000,00	(140.000,00)	86,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	151.756.000,00	140.230.000,00	(11.526.000,00)	92,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	151.756.000,00	140.230.000,00	(11.526.000,00)	92,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.756.000,00	140.230.000,00	(11.526.000,00)	92,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	1.428.398.000,00	1.317.230.475,00	(111.167.525,00)	92,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.389.192.320,00	1.280.637.651,00	(108.554.669,00)	92,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.389.192.320,00	1.280.637.651,00	(108.554.669,00)	92,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	39.205.680,00	36.592.824,00	(2.612.856,00)	93,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.205.680,00	36.592.824,00	(2.612.856,00)	93,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	237.750.000,00	200.322.169,00	(37.427.831,00)	84,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	237.750.000,00	200.322.169,00	(37.427.831,00)	84,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.750.000,00	200.322.169,00	(37.427.831,00)	84,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	18.060.000,00	17.208.000,00	(852.000,00)	95,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	18.060.000,00	17.208.000,00	(852.000,00)	95,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.060.000,00	17.208.000,00	(852.000,00)	95,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	2.378.394.000,00	2.200.865.644,00	(177.528.356,00)	92,53	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.378.394.000,00)	(2.200.752.049,00)	177.641.951,00	92,53	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.378.394.000,00)	(2.200.675.549,00)	177.718.451,00	92,52	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Kulawi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	11.684,00	11.684,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	11.684,00	11.684,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	11.684,00	11.684,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	11.684,00	11.684,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		5	BELANJA DAERAH	2.128.604.965,00	2.071.188.525,00	(57.416.440,00)	97,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.122.704.965,00	2.065.288.525,00	(57.416.440,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.122.704.965,00	2.065.288.525,00	(57.416.440,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	46.000.000,00	45.400.000,00	(600.000,00)	98,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	46.000.000,00	45.400.000,00	(600.000,00)	98,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	45.400.000,00	(600.000,00)	98,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	48.675.000,00	48.675.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	48.675.000,00	48.675.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.675.000,00	48.675.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	9.945.000,00	9.745.000,00	(200.000,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.945.000,00	9.745.000,00	(200.000,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.945.000,00	9.745.000,00	(200.000,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	238.096.000,00	237.372.000,00	(724.000,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	238.096.000,00	237.372.000,00	(724.000,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.096.000,00	237.372.000,00	(724.000,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	158.180.000,00	150.970.000,00	(7.210.000,00)	95,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	158.180.000,00	150.970.000,00	(7.210.000,00)	95,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.180.000,00	150.970.000,00	(7.210.000,00)	95,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	1.229.875.965,00	1.185.422.525,00	(44.453.440,00)	96,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.225.075.965,00	1.185.422.525,00	(39.653.440,00)	96,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.075.965,00	1.185.422.525,00	(39.653.440,00)	96,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	224.919.000,00	221.204.000,00	(3.715.000,00)	98,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	224.919.000,00	221.204.000,00	(3.715.000,00)	98,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.919.000,00	221.204.000,00	(3.715.000,00)	98,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.514.000,00	2.000.000,00	(514.000,00)	79,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	2.514.000,00	2.000.000,00	(514.000,00)	79,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.514.000,00	2.000.000,00	(514.000,00)	79,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.128.604.965,00	2.071.188.525,00	(57.416.440,00)	97,30	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.128.604.965,00)	(2.071.176.841,00)	57.428.124,00	97,30	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.128.604.965,00)	(2.071.176.841,00)	57.428.124,00	97,30	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Gimpu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0013		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	177.425,00	177.425,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0013		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	177.425,00	177.425,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0013		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	177.425,00	177.425,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	177.425,00	177.425,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		5	BELANJA DAERAH	1.945.622.593,00	1.594.820.218,00	(350.802.375,00)	81,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.716.739.593,00	1.452.256.969,00	(264.482.624,00)	84,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.716.739.593,00	1.452.256.969,00	(264.482.624,00)	84,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	38.116.000,00	38.116.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.116.000,00	38.116.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.116.000,00	38.116.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	21.006.000,00	18.700.000,00	(2.306.000,00)	89,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.006.000,00	18.700.000,00	(2.306.000,00)	89,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.006.000,00	18.700.000,00	(2.306.000,00)	89,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	25.424.000,00	25.424.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	25.424.000,00	25.424.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.424.000,00	25.424.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	10.920.000,00	2.881.000,00	(8.039.000,00)	26,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	10.920.000,00	2.881.000,00	(8.039.000,00)	26,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	2.881.000,00	(8.039.000,00)	26,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	39.200.000,00	19.630.000,00	(19.570.000,00)	50,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	39.200.000,00	19.630.000,00	(19.570.000,00)	50,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	19.630.000,00	(19.570.000,00)	50,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	256.978.000,00	209.741.000,00	(47.237.000,00)	81,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	256.978.000,00	209.741.000,00	(47.237.000,00)	81,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.978.000,00	209.741.000,00	(47.237.000,00)	81,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	19.068.000,00	8.700.000,00	(10.368.000,00)	45,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	19.068.000,00	8.700.000,00	(10.368.000,00)	45,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.068.000,00	8.700.000,00	(10.368.000,00)	45,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	30.800.000,00	20.600.000,00	(10.200.000,00)	66,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	30.800.000,00	20.600.000,00	(10.200.000,00)	66,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	20.600.000,00	(10.200.000,00)	66,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	8.700.000,00	3.390.000,00	(5.310.000,00)	38,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	8.700.000,00	3.390.000,00	(5.310.000,00)	38,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	3.390.000,00	(5.310.000,00)	38,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	9.872.000,00	9.872.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	9.872.000,00	9.872.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.872.000,00	9.872.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	106.041.000,00	96.305.000,00	(9.736.000,00)	90,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	106.041.000,00	96.305.000,00	(9.736.000,00)	90,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.041.000,00	96.305.000,00	(9.736.000,00)	90,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	1.102.514.593,00	969.488.969,00	(133.025.624,00)	87,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.042.514.593,00	951.488.969,00	(91.025.624,00)	91,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.042.514.593,00	951.488.969,00	(91.025.624,00)	91,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	18.000.000,00	(42.000.000,00)	30,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	18.000.000,00	(42.000.000,00)	30,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	29.410.000,00	29.409.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	29.410.000,00	29.409.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.410.000,00	29.409.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	17.240.000,00	0,00	(17.240.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	17.240.000,00	0,00	(17.240.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.240.000,00	0,00	(17.240.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	228.883.000,00	142.563.249,00	(86.319.751,00)	62,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	228.883.000,00	142.563.249,00	(86.319.751,00)	62,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	228.883.000,00	142.563.249,00	(86.319.751,00)	62,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	228.883.000,00	142.563.249,00	(86.319.751,00)	62,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.883.000,00	142.563.249,00	(86.319.751,00)	62,28	
				JUMLAH BELANJA	1.945.622.593,00	1.594.820.218,00	(350.802.375,00)	81,96	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.945.622.593,00)	(1.594.642.793,00)	350.979.800,00	81,96	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.945.622.593,00)	(1.594.642.793,00)	350.979.800,00	81,96	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Lindu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0014		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	53.673,00	53.673,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0014		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	53.673,00	53.673,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0014		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	53.673,00	53.673,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	53.673,00	53.673,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		5	BELANJA DAERAH	1.253.429.440,00	1.225.279.476,00	(28.149.964,00)	97,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.253.429.440,00	1.225.279.476,00	(28.149.964,00)	97,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.253.429.440,00	1.225.279.476,00	(28.149.964,00)	97,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	230.191.400,00	251.549.000,00	21.357.600,00	109,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	230.191.400,00	251.549.000,00	21.357.600,00	109,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.191.400,00	251.549.000,00	21.357.600,00	109,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	42.750.000,00	33.750.000,00	(9.000.000,00)	78,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	42.750.000,00	33.750.000,00	(9.000.000,00)	78,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.750.000,00	33.750.000,00	(9.000.000,00)	78,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	125.790.000,00	125.790.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	125.790.000,00	125.790.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.790.000,00	125.790.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	352.276.440,00	325.285.204,00	(26.991.236,00)	92,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	344.467.440,00	325.285.204,00	(19.182.236,00)	94,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.467.440,00	325.285.204,00	(19.182.236,00)	94,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	7.809.000,00	0,00	(7.809.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.809.000,00	0,00	(7.809.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	333.021.600,00	324.005.272,00	(9.016.328,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	333.021.600,00	324.005.272,00	(9.016.328,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.021.600,00	324.005.272,00	(9.016.328,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.253.429.440,00	1.225.279.476,00	(28.149.964,00)	97,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.253.429.440,00)	(1.225.225.803,00)	28.203.637,00	97,74	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.253.429.440,00)	(1.225.225.803,00)	28.203.637,00	97,74	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Kantewu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0015		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	50.735,00	50.735,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0015		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	50.735,00	50.735,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0015		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	50.735,00	50.735,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	50.735,00	50.735,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		5	BELANJA DAERAH	1.330.094.354,00	1.188.332.518,00	(141.761.836,00)	89,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.326.106.354,00	1.184.344.518,00	(141.761.836,00)	89,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.326.106.354,00	1.184.344.518,00	(141.761.836,00)	89,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	40.000.000,00	36.000.000,00	(4.000.000,00)	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	36.000.000,00	(4.000.000,00)	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	36.000.000,00	(4.000.000,00)	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	245.477.000,00	162.621.000,00	(82.856.000,00)	66,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	245.477.000,00	162.621.000,00	(82.856.000,00)	66,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.477.000,00	162.621.000,00	(82.856.000,00)	66,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	430.172.354,00	382.012.330,00	(48.160.024,00)	88,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	430.172.354,00	382.012.330,00	(48.160.024,00)	88,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.172.354,00	382.012.330,00	(48.160.024,00)	88,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	225.207.000,00	219.061.188,00	(6.145.812,00)	97,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	225.207.000,00	219.061.188,00	(6.145.812,00)	97,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.207.000,00	219.061.188,00	(6.145.812,00)	97,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.330.094.354,00	1.188.332.518,00	(141.761.836,00)	89,34	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.330.094.354,00)	(1.188.281.783,00)	141.812.571,00	89,33	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.330.094.354,00)	(1.188.281.783,00)	141.812.571,00	89,33	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Banasu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0016		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	86.076,00	86.076,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0016		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	86.076,00	86.076,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0016		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	86.076,00	86.076,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	86.076,00	86.076,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		5	BELANJA DAERAH	978.004.194,00	788.846.449,00	(189.157.745,00)	80,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	978.004.194,00	788.846.449,00	(189.157.745,00)	80,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	978.004.194,00	788.846.449,00	(189.157.745,00)	80,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	76.808.000,00	76.200.000,00	(608.000,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.808.000,00	76.200.000,00	(608.000,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.808.000,00	76.200.000,00	(608.000,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	211.930.000,00	135.082.000,00	(76.848.000,00)	63,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	211.930.000,00	135.082.000,00	(76.848.000,00)	63,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.930.000,00	135.082.000,00	(76.848.000,00)	63,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	25.450.000,00	22.000.000,00	(3.450.000,00)	86,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	25.450.000,00	22.000.000,00	(3.450.000,00)	86,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.450.000,00	22.000.000,00	(3.450.000,00)	86,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	83.377.000,00	70.027.000,00	(13.350.000,00)	83,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	83.377.000,00	70.027.000,00	(13.350.000,00)	83,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.377.000,00	70.027.000,00	(13.350.000,00)	83,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	171.414.194,00	121.892.552,00	(49.521.642,00)	71,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	171.414.194,00	121.892.552,00	(49.521.642,00)	71,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.414.194,00	121.892.552,00	(49.521.642,00)	71,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	201.860.000,00	173.844.897,00	(28.015.103,00)	86,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	201.860.000,00	173.844.897,00	(28.015.103,00)	86,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.860.000,00	173.844.897,00	(28.015.103,00)	86,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	39.365.000,00	27.500.000,00	(11.865.000,00)	69,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	39.365.000,00	27.500.000,00	(11.865.000,00)	69,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.365.000,00	27.500.000,00	(11.865.000,00)	69,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0048		PENGELOLAAN LAYANAN IMUNISASI	49.500.000,00	44.000.000,00	(5.500.000,00)	88,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0048	5.1	BELANJA OPERASI	49.500.000,00	44.000.000,00	(5.500.000,00)	88,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	44.000.000,00	(5.500.000,00)	88,88	
				JUMLAH BELANJA	978.004.194,00	788.846.449,00	(189.157.745,00)	80,65	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(978.004.194,00)	(788.760.373,00)	189.243.821,00	80,64	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(978.004.194,00)	(788.760.373,00)	189.243.821,00	80,64	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Towulu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0017		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	53.130,00	53.130,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0017		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	53.130,00	53.130,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0017		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	53.130,00	53.130,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	53.130,00	53.130,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		5	BELANJA DAERAH	1.052.597.100,00	993.809.098,00	(58.788.002,00)	94,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.052.597.100,00	993.809.098,00	(58.788.002,00)	94,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.052.597.100,00	993.809.098,00	(58.788.002,00)	94,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	262.466.000,00	261.716.000,00	(750.000,00)	99,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	262.466.000,00	261.716.000,00	(750.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.466.000,00	261.716.000,00	(750.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	11.260.000,00	11.210.000,00	(50.000,00)	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	11.260.000,00	11.210.000,00	(50.000,00)	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.260.000,00	11.210.000,00	(50.000,00)	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	21.218.000,00	21.120.000,00	(98.000,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	21.218.000,00	21.120.000,00	(98.000,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.218.000,00	21.120.000,00	(98.000,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	64.490.000,00	55.440.000,00	(9.050.000,00)	85,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	64.490.000,00	55.440.000,00	(9.050.000,00)	85,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.490.000,00	55.440.000,00	(9.050.000,00)	85,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	242.867.100,00	223.229.098,00	(19.638.002,00)	91,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	242.867.100,00	223.229.098,00	(19.638.002,00)	91,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.867.100,00	223.229.098,00	(19.638.002,00)	91,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	202.646.000,00	178.724.000,00	(23.922.000,00)	88,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	202.646.000,00	178.724.000,00	(23.922.000,00)	88,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.646.000,00	178.724.000,00	(23.922.000,00)	88,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.052.597.100,00	993.809.098,00	(58.788.002,00)	94,41	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.052.597.100,00)	(993.755.968,00)	58.841.132,00	94,40	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.052.597.100,00)	(993.755.968,00)	58.841.132,00	94,40	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Palolo

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0018		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	154.898,00	154.898,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0018		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	154.898,00	154.898,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0018		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	154.898,00	154.898,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	154.898,00	154.898,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018		5	BELANJA DAERAH	2.920.026.041,00	2.635.538.925,00	(284.487.116,00)	90,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.914.026.041,00	2.635.538.925,00	(278.487.116,00)	90,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.914.026.041,00	2.635.538.925,00	(278.487.116,00)	90,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	60.000.000,00	59.250.000,00	(750.000,00)	98,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.250.000,00	(750.000,00)	98,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.250.000,00	(750.000,00)	98,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	76.800.000,00	51.900.000,00	(24.900.000,00)	67,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	76.800.000,00	51.900.000,00	(24.900.000,00)	67,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	51.900.000,00	(24.900.000,00)	67,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	7.200.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	21.000.000,00	22.200.000,00	1.200.000,00	105,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	22.200.000,00	1.200.000,00	105,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	22.200.000,00	1.200.000,00	105,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	260.384.000,00	229.725.000,00	(30.659.000,00)	88,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	260.384.000,00	229.725.000,00	(30.659.000,00)	88,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.384.000,00	229.725.000,00	(30.659.000,00)	88,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	157.305.000,00	147.200.000,00	(10.105.000,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	157.305.000,00	147.200.000,00	(10.105.000,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.305.000,00	147.200.000,00	(10.105.000,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	2.008.480.041,00	1.842.384.457,00	(166.095.584,00)	91,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.906.780.041,00	1.769.884.457,00	(136.895.584,00)	92,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.906.780.041,00	1.769.884.457,00	(136.895.584,00)	92,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	101.700.000,00	72.500.000,00	(29.200.000,00)	71,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.700.000,00	72.500.000,00	(29.200.000,00)	71,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	228.127.000,00	189.979.468,00	(38.147.532,00)	83,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	228.127.000,00	189.979.468,00	(38.147.532,00)	83,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.127.000,00	189.979.468,00	(38.147.532,00)	83,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	91,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	91,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	91,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	3.630.000,00	300.000,00	(3.330.000,00)	8,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	3.630.000,00	300.000,00	(3.330.000,00)	8,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	300.000,00	(3.330.000,00)	8,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	2.920.026.041,00	2.635.538.925,00	(284.487.116,00)	90,25	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.920.026.041,00)	(2.635.384.027,00)	284.642.014,00	90,25	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.920.026.041,00)	(2.635.384.027,00)	284.642.014,00	90,25	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Banpres

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0019		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	73.460,00	73.460,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0019		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	73.460,00	73.460,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0019		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	73.460,00	73.460,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	73.460,00	73.460,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		5	BELANJA DAERAH	1.453.420.768,00	1.354.946.957,00	(98.473.811,00)	93,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.431.634.768,00	1.342.146.957,00	(89.487.811,00)	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.431.634.768,00	1.342.146.957,00	(89.487.811,00)	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	50.260.000,00	48.020.000,00	(2.240.000,00)	95,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.260.000,00	48.020.000,00	(2.240.000,00)	95,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.260.000,00	48.020.000,00	(2.240.000,00)	95,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	14.400.000,00	12.300.000,00	(2.100.000,00)	85,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	12.300.000,00	(2.100.000,00)	85,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	12.300.000,00	(2.100.000,00)	85,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	19.500.000,00	14.200.000,00	(5.300.000,00)	72,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	14.200.000,00	(5.300.000,00)	72,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	14.200.000,00	(5.300.000,00)	72,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	285.982.000,00	283.984.500,00	(1.997.500,00)	99,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	285.982.000,00	283.984.500,00	(1.997.500,00)	99,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.982.000,00	283.984.500,00	(1.997.500,00)	99,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	15.997.000,00	15.600.000,00	(397.000,00)	97,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	15.997.000,00	15.600.000,00	(397.000,00)	97,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.997.000,00	15.600.000,00	(397.000,00)	97,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.400.000,00	15.000.000,00	(2.400.000,00)	86,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	17.400.000,00	15.000.000,00	(2.400.000,00)	86,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	15.000.000,00	(2.400.000,00)	86,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	10.900.000,00	2.200.000,00	(8.700.000,00)	20,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	10.900.000,00	2.200.000,00	(8.700.000,00)	20,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	2.200.000,00	(8.700.000,00)	20,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	6.460.000,00	6.200.000,00	(260.000,00)	95,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	6.460.000,00	6.200.000,00	(260.000,00)	95,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000,00	6.200.000,00	(260.000,00)	95,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	143.311.000,00	125.000.000,00	(18.311.000,00)	87,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	143.311.000,00	125.000.000,00	(18.311.000,00)	87,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.311.000,00	125.000.000,00	(18.311.000,00)	87,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	588.036.768,00	537.354.378,00	(50.682.390,00)	91,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	536.641.768,00	486.754.378,00	(49.887.390,00)	90,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.641.768,00	486.754.378,00	(49.887.390,00)	90,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	51.395.000,00	50.600.000,00	(795.000,00)	98,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.395.000,00	50.600.000,00	(795.000,00)	98,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	208.388.000,00	213.788.079,00	5.400.079,00	102,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	208.388.000,00	213.788.079,00	5.400.079,00	102,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.388.000,00	213.788.079,00	5.400.079,00	102,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.800.000,00	300.000,00	(2.500.000,00)	10,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	300.000,00	(2.500.000,00)	10,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	300.000,00	(2.500.000,00)	10,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	21.786.000,00	12.800.000,00	(8.986.000,00)	58,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.786.000,00	12.800.000,00	(8.986.000,00)	58,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	21.786.000,00	12.800.000,00	(8.986.000,00)	58,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.786.000,00	12.800.000,00	(8.986.000,00)	58,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.786.000,00	12.800.000,00	(8.986.000,00)	58,75	
				JUMLAH BELANJA	1.453.420.768,00	1.354.946.957,00	(98.473.811,00)	93,22	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.453.420.768,00)	(1.354.873.497,00)	98.547.271,00	93,21	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.453.420.768,00)	(1.354.873.497,00)	98.547.271,00	93,21	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Nokilalaki

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0020		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	123.285,00	123.285,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0020		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	123.285,00	123.285,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0020		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	123.285,00	123.285,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	123.285,00	123.285,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020		5	BELANJA DAERAH	1.221.531.931,00	1.057.323.468,00	(164.208.463,00)	86,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.221.531.931,00	1.057.323.468,00	(164.208.463,00)	86,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.221.531.931,00	1.057.323.468,00	(164.208.463,00)	86,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	114.400.000,00	89.250.000,00	(25.150.000,00)	78,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	114.400.000,00	89.250.000,00	(25.150.000,00)	78,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.400.000,00	89.250.000,00	(25.150.000,00)	78,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	199.385.000,00	129.773.000,00	(69.612.000,00)	65,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	199.385.000,00	129.773.000,00	(69.612.000,00)	65,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.385.000,00	129.773.000,00	(69.612.000,00)	65,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	12.800.000,00	11.800.000,00	(1.000.000,00)	92,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	12.800.000,00	11.800.000,00	(1.000.000,00)	92,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	11.800.000,00	(1.000.000,00)	92,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	38.200.000,00	30.400.000,00	(7.800.000,00)	79,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	38.200.000,00	30.400.000,00	(7.800.000,00)	79,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.200.000,00	30.400.000,00	(7.800.000,00)	79,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	135.431.000,00	129.100.000,00	(6.331.000,00)	95,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	135.431.000,00	129.100.000,00	(6.331.000,00)	95,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.431.000,00	129.100.000,00	(6.331.000,00)	95,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	388.654.931,00	367.150.351,00	(21.504.580,00)	94,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	364.611.327,00	344.650.351,00	(19.960.976,00)	94,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.611.327,00	344.650.351,00	(19.960.976,00)	94,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	24.043.604,00	22.500.000,00	(1.543.604,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.043.604,00	22.500.000,00	(1.543.604,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	208.520.000,00	180.050.117,00	(28.469.883,00)	86,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	208.520.000,00	180.050.117,00	(28.469.883,00)	86,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.520.000,00	180.050.117,00	(28.469.883,00)	86,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	28.141.000,00	23.800.000,00	(4.341.000,00)	84,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	28.141.000,00	23.800.000,00	(4.341.000,00)	84,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.141.000,00	23.800.000,00	(4.341.000,00)	84,57	
				JUMLAH BELANJA	1.221.531.931,00	1.057.323.468,00	(164.208.463,00)	86,55	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.221.531.931,00)	(1.057.200.183,00)	164.331.748,00	86,54	
	1.02.0.00.0.00.01.0020		6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0020		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0020		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.221.531.931,00)	(1.057.101.683,00)	164.430.248,00	86,53	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	800.000.000,00	602.063.499,00	(197.936.501,00)	75,25	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	800.000.000,00	602.063.499,00	(197.936.501,00)	75,25	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	800.000.000,00	602.063.499,00	(197.936.501,00)	75,25	
				JUMLAH PENDAPATAN	800.000.000,00	602.063.499,00	(197.936.501,00)	75,25	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	43.259.386.889,00	42.236.628.421,00	(1.022.758.468,00)	97,63	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.968.908.689,00	7.548.963.684,00	(419.945.005,00)	94,73	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	91.150.760,00	90.512.098,00	(638.662,00)	99,29	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	16.623.000,00	16.622.800,00	(200,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.623.000,00	16.622.800,00	(200,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.623.000,00	16.622.800,00	(200,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	24.000.000,00	23.973.950,00	(26.050,00)	99,89	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.973.950,00	(26.050,00)	99,89	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.973.950,00	(26.050,00)	99,89	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	22.000.000,00	21.985.138,00	(14.862,00)	99,93	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	21.985.138,00	(14.862,00)	99,93	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.985.138,00	(14.862,00)	99,93	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	14.527.760,00	13.930.210,00	(597.550,00)	95,88	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.527.760,00	13.930.210,00	(597.550,00)	95,88	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.527.760,00	13.930.210,00	(597.550,00)	95,88	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.897.356.929,00	4.778.292.393,00	(119.064.536,00)	97,56	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.301.716.929,00	4.203.802.393,00	(97.914.536,00)	97,72	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.301.716.929,00	4.203.802.393,00	(97.914.536,00)	97,72	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.301.716.929,00	4.203.802.393,00	(97.914.536,00)	97,72	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	595.640.000,00	574.490.000,00	(21.150.000,00)	96,44	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	595.640.000,00	574.490.000,00	(21.150.000,00)	96,44	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	595.640.000,00	574.490.000,00	(21.150.000,00)	96,44	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	12.600.000,00	11.850.000,00	(750.000,00)	94,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	12.600.000,00	11.850.000,00	(750.000,00)	94,04	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	11.850.000,00	(750.000,00)	94,04	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	11.850.000,00	(750.000,00)	94,04	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	976.690.000,00	849.976.346,00	(126.713.654,00)	87,02	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	193.600.000,00	193.590.134,00	(9.866,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	193.600.000,00	193.590.134,00	(9.866,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.600.000,00	193.590.134,00	(9.866,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	84.087.800,00	83.802.232,00	(285.568,00)	99,66	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	84.087.800,00	83.802.232,00	(285.568,00)	99,66	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.087.800,00	83.802.232,00	(285.568,00)	99,66	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	695.402.200,00	568.983.980,00	(126.418.220,00)	81,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	695.402.200,00	568.983.980,00	(126.418.220,00)	81,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	695.402.200,00	568.983.980,00	(126.418.220,00)	81,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.659.750.000,00	1.541.725.000,00	(118.025.000,00)	92,88	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	150.150.000,00	129.525.000,00	(20.625.000,00)	86,26	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.150.000,00	129.525.000,00	(20.625.000,00)	86,26	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.150.000,00	129.525.000,00	(20.625.000,00)	86,26	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.509.600.000,00	1.412.200.000,00	(97.400.000,00)	93,54	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.509.600.000,00	1.412.200.000,00	(97.400.000,00)	93,54	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.509.600.000,00	1.412.200.000,00	(97.400.000,00)	93,54	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	331.361.000,00	276.607.847,00	(54.753.153,00)	83,47	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	321.277.000,00	266.607.847,00	(54.669.153,00)	82,98	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	321.277.000,00	266.607.847,00	(54.669.153,00)	82,98	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.277.000,00	266.607.847,00	(54.669.153,00)	82,98	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.084.000,00	10.000.000,00	(84.000,00)	99,16	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.084.000,00	10.000.000,00	(84.000,00)	99,16	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.084.000,00	10.000.000,00	(84.000,00)	99,16	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.835.688.468,00	4.618.675.996,00	(217.012.472,00)	95,51	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.225.000.000,00	3.008.435.286,00	(216.564.714,00)	93,28	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093		NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	407.294.000,00	407.294.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1	BELANJA OPERASI	407.294.000,00	407.294.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.294.000,00	407.294.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0128		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	2.817.706.000,00	2.601.141.286,00	(216.564.714,00)	92,31	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0128	5.1	BELANJA OPERASI	2.817.706.000,00	2.601.141.286,00	(216.564.714,00)	92,31	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0128	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.817.706.000,00	2.601.141.286,00	(216.564.714,00)	92,31	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.610.688.468,00	1.610.240.710,00	(447.758,00)	99,97	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021		OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	1.610.688.468,00	1.610.240.710,00	(447.758,00)	99,97	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	1.610.688.468,00	1.610.240.710,00	(447.758,00)	99,97	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.688.468,00	1.610.240.710,00	(447.758,00)	99,97	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.279.657.000,00	12.089.790.263,00	(189.866.737,00)	98,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.279.657.000,00	12.089.790.263,00	(189.866.737,00)	98,45	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	1.826.155.438,00	1.796.497.087,00	(29.658.351,00)	98,37	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.826.155.438,00	1.796.497.087,00	(29.658.351,00)	98,37	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.826.155.438,00	1.796.497.087,00	(29.658.351,00)	98,37	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026		PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	4.169.808.562,00	4.086.555.823,00	(83.252.739,00)	98,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	4.169.808.562,00	4.086.555.823,00	(83.252.739,00)	98,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.169.808.562,00	4.086.555.823,00	(83.252.739,00)	98,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028		PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	2.244.077.000,00	2.197.068.754,00	(47.008.246,00)	97,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	2.244.077.000,00	2.197.068.754,00	(47.008.246,00)	97,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.244.077.000,00	2.197.068.754,00	(47.008.246,00)	97,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	1.150.000.000,00	1.148.919.928,00	(1.080.072,00)	99,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	1.150.000.000,00	1.148.919.928,00	(1.080.072,00)	99,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000.000,00	1.148.919.928,00	(1.080.072,00)	99,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032		PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	2.889.616.000,00	2.860.748.671,00	(28.867.329,00)	99,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	2.889.616.000,00	2.860.748.671,00	(28.867.329,00)	99,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.889.616.000,00	2.860.748.671,00	(28.867.329,00)	99,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	90.039.900,00	90.000.000,00	(39.900,00)	99,95	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.039.900,00	90.000.000,00	(39.900,00)	99,95	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	90.039.900,00	90.000.000,00	(39.900,00)	99,95	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	90.039.900,00	90.000.000,00	(39.900,00)	99,95	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.039.900,00	90.000.000,00	(39.900,00)	99,95	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.298.200.000,00	1.274.184.521,00	(24.015.479,00)	98,15	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	1.298.200.000,00	1.274.184.521,00	(24.015.479,00)	98,15	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0015		IDENTIFIKASI, PENETAPAN, PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.000.000.000,00	978.234.521,00	(21.765.479,00)	97,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	978.234.521,00	(21.765.479,00)	97,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0015	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	978.234.521,00	(21.765.479,00)	97,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	298.200.000,00	295.950.000,00	(2.250.000,00)	99,24	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	298.200.000,00	295.950.000,00	(2.250.000,00)	99,24	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.200.000,00	295.950.000,00	(2.250.000,00)	99,24	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.832.325.000,00	1.827.801.429,00	(4.523.571,00)	99,75	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.832.325.000,00	1.827.801.429,00	(4.523.571,00)	99,75	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008		PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA	1.300.000.000,00	1.299.867.000,00	(133.000,00)	99,98	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.867.000,00	(133.000,00)	99,73	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.867.000,00	(133.000,00)	99,73	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0009		SUPERVISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA	532.325.000,00	527.934.429,00	(4.390.571,00)	99,17	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	532.325.000,00	527.934.429,00	(4.390.571,00)	99,17	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.325.000,00	527.934.429,00	(4.390.571,00)	99,17	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	13.864.826.532,00	13.777.481.190,00	(87.345.342,00)	99,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	13.864.826.532,00	13.777.481.190,00	(87.345.342,00)	99,37	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	2.332.340.000,00	2.293.140.658,00	(39.199.342,00)	98,31	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	2.332.340.000,00	2.293.140.658,00	(39.199.342,00)	98,31	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.332.340.000,00	2.293.140.658,00	(39.199.342,00)	98,31	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0030		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DAN DESA	200.000.000,00	183.792.000,00	(16.208.000,00)	91,89	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	183.792.000,00	(16.208.000,00)	91,89	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	183.792.000,00	(16.208.000,00)	91,89	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033		REKONSTRUKSI JALAN	4.323.175.000,00	4.292.897.000,00	(30.278.000,00)	99,29	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	4.323.175.000,00	4.292.897.000,00	(30.278.000,00)	99,29	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.323.175.000,00	4.292.897.000,00	(30.278.000,00)	99,29	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038		PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043		SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	700.000.000,00	698.340.000,00	(1.660.000,00)	99,76	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000,00	698.340.000,00	(1.660.000,00)	99,76	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	698.340.000,00	(1.660.000,00)	99,76	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	5.809.311.532,00	5.809.311.532,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	5.809.311.532,00	5.809.311.532,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.809.311.532,00	5.809.311.532,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	404.841.300,00	342.073.078,00	(62.768.222,00)	84,49	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	404.841.300,00	342.073.078,00	(62.768.222,00)	84,49	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016		PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS	404.841.300,00	342.073.078,00	(62.768.222,00)	84,49	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	354.841.300,00	342.073.078,00	(12.768.222,00)	96,40	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.841.300,00	342.073.078,00	(12.768.222,00)	96,40	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	684.900.000,00	667.658.260,00	(17.241.740,00)	97,48	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	403.400.000,00	402.935.260,00	(464.740,00)	99,88	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0005		PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN/KOTA	210.069.800,00	209.605.960,00	(463.840,00)	99,77	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	210.069.800,00	209.605.960,00	(463.840,00)	99,77	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.069.800,00	209.605.960,00	(463.840,00)	99,77	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006		PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA	193.330.200,00	193.329.300,00	(900,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	193.330.200,00	193.329.300,00	(900,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.330.200,00	193.329.300,00	(900,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	281.500.000,00	264.723.000,00	(16.777.000,00)	94,04	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	281.500.000,00	264.723.000,00	(16.777.000,00)	94,04	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	281.500.000,00	264.723.000,00	(16.777.000,00)	94,04	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.500.000,00	264.723.000,00	(16.777.000,00)	94,04	
				JUMLAH BELANJA	43.259.386.889,00	42.236.628.421,00	(1.022.758.468,00)	97,63	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(42.459.386.889,00)	(41.634.564.922,00)	824.821.967,00	98,05	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(42.459.386.889,00)	(41.634.564.922,00)	824.821.967,00	98,05	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.879.706.533,00	9.742.564.797,00	(137.141.736,00)	98,61	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.773.882.835,00	2.671.847.991,00	(102.034.844,00)	96,32	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	79.258.968,00	73.356.770,00	(5.902.198,00)	92,55	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10.014.335,00	9.625.800,00	(388.535,00)	96,12	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.014.335,00	9.625.800,00	(388.535,00)	96,12	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.014.335,00	9.625.800,00	(388.535,00)	96,12	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.065.600,00	2.707.020,00	(1.358.580,00)	66,58	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.065.600,00	2.707.020,00	(1.358.580,00)	66,58	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.065.600,00	2.707.020,00	(1.358.580,00)	66,58	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.565.600,00	5.557.790,00	(7.810,00)	99,85	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.565.600,00	5.557.790,00	(7.810,00)	99,85	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.565.600,00	5.557.790,00	(7.810,00)	99,85	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	9.644.033,00	9.514.760,00	(129.273,00)	98,65	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.644.033,00	9.514.760,00	(129.273,00)	98,65	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.644.033,00	9.514.760,00	(129.273,00)	98,65	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	6.370.800,00	5.857.400,00	(513.400,00)	91,94	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.370.800,00	5.857.400,00	(513.400,00)	91,94	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.370.800,00	5.857.400,00	(513.400,00)	91,94	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.634.000,00	4.563.020,00	(70.980,00)	98,46	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.634.000,00	4.563.020,00	(70.980,00)	98,46	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.634.000,00	4.563.020,00	(70.980,00)	98,46	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.964.600,00	35.530.980,00	(3.433.620,00)	91,18	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	38.964.600,00	35.530.980,00	(3.433.620,00)	91,18	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.964.600,00	35.530.980,00	(3.433.620,00)	91,18	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.035.194.244,00	1.947.863.824,00	(87.330.420,00)	95,70	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.871.758.264,00	1.784.624.216,00	(87.134.048,00)	95,34	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.871.758.264,00	1.784.624.216,00	(87.134.048,00)	95,34	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.871.758.264,00	1.784.624.216,00	(87.134.048,00)	95,34	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	152.640.000,00	152.640.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	152.640.000,00	152.640.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.640.000,00	152.640.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	10.795.980,00	10.599.608,00	(196.372,00)	98,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.795.980,00	10.599.608,00	(196.372,00)	98,18	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.795.980,00	10.599.608,00	(196.372,00)	98,18	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	8.168.400,00	7.315.945,00	(852.455,00)	89,56	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	8.168.400,00	7.315.945,00	(852.455,00)	89,56	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.168.400,00	7.315.945,00	(852.455,00)	89,56	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.168.400,00	7.315.945,00	(852.455,00)	89,56	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	92.816.043,00	89.626.550,00	(3.189.493,00)	96,56	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.754.770,00	8.415.000,00	(339.770,00)	96,11	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.754.770,00	8.415.000,00	(339.770,00)	96,11	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.754.770,00	8.415.000,00	(339.770,00)	96,11	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	6.467.273,00	6.450.495,00	(16.778,00)	99,74	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.467.273,00	6.450.495,00	(16.778,00)	99,74	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.467.273,00	6.450.495,00	(16.778,00)	99,74	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	77.594.000,00	74.761.055,00	(2.832.945,00)	96,34	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	77.594.000,00	74.761.055,00	(2.832.945,00)	96,34	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.594.000,00	74.761.055,00	(2.832.945,00)	96,34	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	142.191.000,00	141.364.504,00	(826.496,00)	99,41	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	142.191.000,00	141.364.504,00	(826.496,00)	99,41	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	142.191.000,00	141.364.504,00	(826.496,00)	99,41	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.191.000,00	141.364.504,00	(826.496,00)	99,41	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	315.624.180,00	311.782.284,00	(3.841.896,00)	98,78	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	11.324.180,00	10.616.784,00	(707.396,00)	93,75	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.324.180,00	10.616.784,00	(707.396,00)	93,75	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.324.180,00	10.616.784,00	(707.396,00)	93,75	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	32.000.000,00	31.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	31.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	31.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	272.300.000,00	269.166.500,00	(3.133.500,00)	98,84	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	272.300.000,00	269.166.500,00	(3.133.500,00)	98,84	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.300.000,00	269.166.500,00	(3.133.500,00)	98,84	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	93.130.000,00	93.038.114,00	(91.886,00)	99,90	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	84.400.000,00	84.308.114,00	(91.886,00)	99,89	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.400.000,00	84.308.114,00	(91.886,00)	99,89	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.400.000,00	84.308.114,00	(91.886,00)	99,89	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.499.000.000,00	2.496.732.425,00	(2.267.575,00)	99,90	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	2.499.000.000,00	2.496.732.425,00	(2.267.575,00)	99,90	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004		PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	2.499.000.000,00	2.496.732.425,00	(2.267.575,00)	99,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.499.000.000,00	2.496.732.425,00	(2.267.575,00)	99,90	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.499.000.000,00	2.496.732.425,00	(2.267.575,00)	99,90	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.813.750.000,00	1.813.103.542,00	(646.458,00)	99,96	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03		PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	1.813.750.000,00	1.813.103.542,00	(646.458,00)	99,96	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	1.813.750.000,00	1.813.103.542,00	(646.458,00)	99,96	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.813.750.000,00	1.813.103.542,00	(646.458,00)	99,96	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.813.750.000,00	1.813.103.542,00	(646.458,00)	99,96	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.793.073.698,00	2.760.880.839,00	(32.192.859,00)	98,84	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	2.793.073.698,00	2.760.880.839,00	(32.192.859,00)	98,84	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001		PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN	200.000.000,00	199.500.078,00	(499.922,00)	99,75	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.500.078,00	(499.922,00)	99,75	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.500.078,00	(499.922,00)	99,75	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	2.593.073.698,00	2.561.380.761,00	(31.692.937,00)	98,77	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	757.988.698,00	732.460.876,00	(25.527.822,00)	96,63	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.988.698,00	732.460.876,00	(25.527.822,00)	96,63	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.835.085.000,00	1.828.919.885,00	(6.165.115,00)	99,66	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.835.085.000,00	1.828.919.885,00	(6.165.115,00)	99,66	
				JUMLAH BELANJA	9.879.706.533,00	9.742.564.797,00	(137.141.736,00)	98,61	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(9.879.706.533,00)	(9.742.564.797,00)	137.141.736,00	98,61	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.879.706.533,00)	(9.742.564.797,00)	137.141.736,00	98,61	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	5.848.899.366,00	5.631.870.064,00	(217.029.302,00)	96,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.758.556.693,00	2.667.451.372,00	(91.105.321,00)	96,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.758.556.693,00	2.667.451.372,00	(91.105.321,00)	96,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.758.556.693,00	2.667.451.372,00	(91.105.321,00)	96,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.758.556.693,00	2.667.451.372,00	(91.105.321,00)	96,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.758.556.693,00	2.667.451.372,00	(91.105.321,00)	96,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.090.342.673,00	2.964.418.692,00	(125.923.981,00)	95,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	3.090.342.673,00	2.964.418.692,00	(125.923.981,00)	95,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0001		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT	3.090.342.673,00	2.964.418.692,00	(125.923.981,00)	95,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.987.837.598,00	2.863.598.692,00	(124.238.906,00)	95,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.987.837.598,00	2.863.598.692,00	(124.238.906,00)	95,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0001	5.2	BELANJA MODAL	102.505.075,00	100.820.000,00	(1.685.075,00)	98,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.505.075,00	100.820.000,00	(1.685.075,00)	98,35	
				JUMLAH BELANJA	5.848.899.366,00	5.631.870.064,00	(217.029.302,00)	96,28	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.848.899.366,00)	(5.631.870.064,00)	217.029.302,00	96,28	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.848.899.366,00)	(5.631.870.064,00)	217.029.302,00	96,28	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	3.969.661.656,00	3.856.598.528,00	(113.063.128,00)	97,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.886.096.209,00	2.822.493.286,00	(63.602.923,00)	97,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.386.096.209,00	2.324.453.960,00	(61.642.249,00)	97,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.386.096.209,00	2.324.453.960,00	(61.642.249,00)	97,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.386.096.209,00	2.324.453.960,00	(61.642.249,00)	97,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.386.096.209,00	2.324.453.960,00	(61.642.249,00)	97,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	500.000.000,00	498.039.326,00	(1.960.674,00)	99,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	500.000.000,00	498.039.326,00	(1.960.674,00)	99,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	235.000.000,00	233.259.920,00	(1.740.080,00)	99,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000,00	233.259.920,00	(1.740.080,00)	99,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	5.2	BELANJA MODAL	265.000.000,00	264.779.406,00	(220.594,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.260.594,00	132.040.000,00	(220.594,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.739.406,00	132.739.406,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.083.565.447,00	1.034.105.242,00	(49.460.205,00)	95,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.083.565.447,00	1.034.105.242,00	(49.460.205,00)	95,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0028		PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	1.083.565.447,00	1.034.105.242,00	(49.460.205,00)	95,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	1.069.726.847,00	1.021.966.642,00	(47.760.205,00)	95,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.069.726.847,00	1.021.966.642,00	(47.760.205,00)	95,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0028	5.2	BELANJA MODAL	13.838.600,00	12.138.600,00	(1.700.000,00)	87,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.838.600,00	12.138.600,00	(1.700.000,00)	87,71	
				JUMLAH BELANJA	3.969.661.656,00	3.856.598.528,00	(113.063.128,00)	97,15	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.969.661.656,00)	(3.856.598.528,00)	113.063.128,00	97,15	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.969.661.656,00)	(3.856.598.528,00)	113.063.128,00	97,15	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.849.922.889,00	6.688.391.411,00	(161.531.478,00)	97,64	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.578.157.537,00	2.469.330.990,00	(108.826.547,00)	95,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.578.157.537,00	2.469.330.990,00	(108.826.547,00)	95,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.578.157.537,00	2.469.330.990,00	(108.826.547,00)	95,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.578.157.537,00	2.469.330.990,00	(108.826.547,00)	95,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.578.157.537,00	2.469.330.990,00	(108.826.547,00)	95,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	30.440.900,00	30.440.100,00	(800,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01		PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)	30.440.900,00	30.440.100,00	(800,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENDAMPINGAN KAT	30.440.900,00	30.440.100,00	(800,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.440.900,00	30.440.100,00	(800,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.440.900,00	30.440.100,00	(800,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.241.324.452,00	4.188.620.321,00	(52.704.131,00)	98,75	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	3.387.740.032,00	3.335.818.479,00	(51.921.553,00)	98,46	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	443.054.700,00	428.011.440,00	(15.043.260,00)	96,60	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	443.054.700,00	428.011.440,00	(15.043.260,00)	96,60	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.054.700,00	428.011.440,00	(15.043.260,00)	96,60	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	2.555.077.332,00	2.519.286.239,00	(35.791.093,00)	98,59	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.475.577.332,00	2.439.786.239,00	(35.791.093,00)	98,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.375.577.332,00	2.339.786.239,00	(35.791.093,00)	98,49	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	389.608.000,00	388.520.800,00	(1.087.200,00)	99,72	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	389.608.000,00	388.520.800,00	(1.087.200,00)	99,72	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.608.000,00	388.520.800,00	(1.087.200,00)	99,72	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	853.584.420,00	852.801.842,00	(782.578,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0007		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	29.937.800,00	29.620.406,00	(317.394,00)	98,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.937.800,00	29.620.406,00	(317.394,00)	98,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.937.800,00	29.620.406,00	(317.394,00)	98,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0008		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA	769.977.520,00	769.889.336,00	(88.184,00)	99,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	736.977.520,00	736.889.336,00	(88.184,00)	99,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.977.520,00	486.889.336,00	(88.184,00)	99,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0010		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	53.669.100,00	53.292.100,00	(377.000,00)	99,29	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	53.669.100,00	53.292.100,00	(377.000,00)	99,29	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.669.100,00	53.292.100,00	(377.000,00)	99,29	
				JUMLAH BELANJA	6.849.922.889,00	6.688.391.411,00	(161.531.478,00)	97,64	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.849.922.889,00)	(6.688.391.411,00)	161.531.478,00	97,64	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.849.922.889,00)	(6.688.391.411,00)	161.531.478,00	97,64	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	4.353.722.412,00	4.262.804.610,00	(90.917.802,00)	97,91	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.212.755.412,00	2.147.485.908,00	(65.269.504,00)	97,05	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.212.755.412,00	2.147.485.908,00	(65.269.504,00)	97,05	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.212.755.412,00	2.147.485.908,00	(65.269.504,00)	97,05	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.212.755.412,00	2.147.485.908,00	(65.269.504,00)	97,05	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.212.755.412,00	2.147.485.908,00	(65.269.504,00)	97,05	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.108.467.000,00	2.090.178.702,00	(18.288.298,00)	99,13	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	1.692.882.500,00	1.675.076.547,00	(17.805.953,00)	98,94	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	805.656.500,00	803.001.383,00	(2.655.117,00)	99,67	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	805.656.500,00	803.001.383,00	(2.655.117,00)	99,67	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	805.656.500,00	803.001.383,00	(2.655.117,00)	99,67	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.01.0003		PENGADAAN SARANA PELATIHAN KERJA KABUPATEN/KOTA	887.226.000,00	872.075.164,00	(15.150.836,00)	98,29	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	876.726.000,00	862.251.664,00	(14.474.336,00)	98,34	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	876.726.000,00	862.251.664,00	(14.474.336,00)	98,34	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	10.500.000,00	9.823.500,00	(676.500,00)	93,55	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	9.823.500,00	(676.500,00)	93,55	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.02		PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	415.584.500,00	415.102.155,00	(482.345,00)	99,88	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.02.0001		PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	415.584.500,00	415.102.155,00	(482.345,00)	99,88	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	415.584.500,00	415.102.155,00	(482.345,00)	99,88	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.584.500,00	415.102.155,00	(482.345,00)	99,88	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	32.500.000,00	25.140.000,00	(7.360.000,00)	77,35	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04.2.01		PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.425.250,00	18.369.000,00	(7.056.250,00)	72,24	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04.2.01.0005		PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	25.425.250,00	18.369.000,00	(7.056.250,00)	72,24	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.425.250,00	18.369.000,00	(7.056.250,00)	72,24	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.425.250,00	18.369.000,00	(7.056.250,00)	72,24	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04.2.04		PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.074.750,00	6.771.000,00	(303.750,00)	95,70	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04.2.04.0003		PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PURNA PENEMPATAN	7.074.750,00	6.771.000,00	(303.750,00)	95,70	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.074.750,00	6.771.000,00	(303.750,00)	95,70	
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.074.750,00	6.771.000,00	(303.750,00)	95,70	
				JUMLAH BELANJA	4.353.722.412,00	4.262.804.610,00	(90.917.802,00)	97,91	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.353.722.412,00)	(4.262.804.610,00)	90.917.802,00	97,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.353.722.412,00)	(4.262.804.610,00)	90.917.802,00	97,91	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.349.897.264,00	3.129.414.790,00	(220.482.474,00)	93,41	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.685.749.836,00	1.611.591.427,00	(74.158.409,00)	95,60	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.685.749.836,00	1.611.591.427,00	(74.158.409,00)	95,60	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.685.749.836,00	1.611.591.427,00	(74.158.409,00)	95,60	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.685.749.836,00	1.611.591.427,00	(74.158.409,00)	95,60	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.685.749.836,00	1.611.591.427,00	(74.158.409,00)	95,60	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	270.300.000,00	179.411.500,00	(90.888.500,00)	66,37	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	270.300.000,00	179.411.500,00	(90.888.500,00)	66,37	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	270.300.000,00	179.411.500,00	(90.888.500,00)	66,37	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	270.300.000,00	179.411.500,00	(90.888.500,00)	66,37	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.300.000,00	179.411.500,00	(90.888.500,00)	66,37	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	220.848.428,00	217.648.428,00	(3.200.000,00)	98,55	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	151.828.428,00	148.628.428,00	(3.200.000,00)	97,89	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	151.828.428,00	148.628.428,00	(3.200.000,00)	97,89	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	151.828.428,00	148.628.428,00	(3.200.000,00)	97,89	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.828.428,00	148.628.428,00	(3.200.000,00)	97,89	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	312.917.500,00	290.101.280,00	(22.816.220,00)	92,70	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.554.000,00	22.850.000,00	(2.704.000,00)	89,41	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	25.554.000,00	22.850.000,00	(2.704.000,00)	89,41	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.554.000,00	22.850.000,00	(2.704.000,00)	89,41	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.554.000,00	22.850.000,00	(2.704.000,00)	89,41	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	287.363.500,00	267.251.280,00	(20.112.220,00)	93,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	287.363.500,00	267.251.280,00	(20.112.220,00)	93,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	287.363.500,00	267.251.280,00	(20.112.220,00)	93,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.363.500,00	267.251.280,00	(20.112.220,00)	93,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	629.941.500,00	618.522.155,00	(11.419.345,00)	98,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	629.941.500,00	618.522.155,00	(11.419.345,00)	98,18	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	629.941.500,00	618.522.155,00	(11.419.345,00)	98,18	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	557.581.500,00	546.960.655,00	(10.620.845,00)	98,09	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.581.500,00	546.960.655,00	(10.620.845,00)	98,09	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	72.360.000,00	71.561.500,00	(798.500,00)	98,89	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.360.000,00	71.561.500,00	(798.500,00)	98,89	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	230.140.000,00	212.140.000,00	(18.000.000,00)	92,17	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	230.140.000,00	212.140.000,00	(18.000.000,00)	92,17	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0007		KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK	230.140.000,00	212.140.000,00	(18.000.000,00)	92,17	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	230.140.000,00	212.140.000,00	(18.000.000,00)	92,17	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.140.000,00	212.140.000,00	(18.000.000,00)	92,17	
				JUMLAH BELANJA	3.349.897.264,00	3.129.414.790,00	(220.482.474,00)	93,41	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.349.897.264,00)	(3.129.414.790,00)	220.482.474,00	93,41	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.349.897.264,00)	(3.129.414.790,00)	220.482.474,00	93,41	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.25.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	236.000.000,00	236.190.000,00	190.000,00	100,08	
	2.09.3.25.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	236.000.000,00	236.190.000,00	190.000,00	100,08	
	2.09.3.25.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	236.000.000,00	236.190.000,00	190.000,00	100,08	
				JUMLAH PENDAPATAN	236.000.000,00	236.190.000,00	190.000,00	100,08	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.767.535.627,00	4.567.849.697,00	(199.685.930,00)	95,81	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.404.702.827,00	4.206.287.570,00	(198.415.257,00)	95,49	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.530.000,00	7.525.000,00	(5.000,00)	99,93	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.530.000,00	7.525.000,00	(5.000,00)	99,93	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.530.000,00	7.525.000,00	(5.000,00)	99,93	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.530.000,00	7.525.000,00	(5.000,00)	99,93	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.080.914.777,00	3.895.406.751,00	(185.508.026,00)	95,45	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.080.914.777,00	3.895.406.751,00	(185.508.026,00)	95,45	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.080.914.777,00	3.895.406.751,00	(185.508.026,00)	95,45	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.080.914.777,00	3.895.406.751,00	(185.508.026,00)	95,45	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	90.644.950,00	88.738.491,00	(1.906.459,00)	97,89	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.232.950,00	16.232.775,00	(175,00)	99,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.232.950,00	16.232.775,00	(175,00)	99,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.232.950,00	16.232.775,00	(175,00)	99,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	74.412.000,00	72.505.716,00	(1.906.284,00)	97,43	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	74.412.000,00	72.505.716,00	(1.906.284,00)	97,43	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.412.000,00	72.505.716,00	(1.906.284,00)	97,43	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	36.000.000,00	35.250.000,00	(750.000,00)	97,91	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	36.000.000,00	35.250.000,00	(750.000,00)	97,91	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	36.000.000,00	35.250.000,00	(750.000,00)	97,91	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	35.250.000,00	(750.000,00)	97,91	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	134.613.100,00	133.429.000,00	(1.184.100,00)	99,12	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.000.000,00	23.986.000,00	(14.000,00)	99,94	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.986.000,00	(14.000,00)	99,94	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.986.000,00	(14.000,00)	99,94	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	110.613.100,00	109.443.000,00	(1.170.100,00)	98,94	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	110.613.100,00	109.443.000,00	(1.170.100,00)	98,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.613.100,00	109.443.000,00	(1.170.100,00)	98,94	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	55.000.000,00	45.938.328,00	(9.061.672,00)	83,52	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	21.000.000,00	11.938.328,00	(9.061.672,00)	56,84	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	11.938.328,00	(9.061.672,00)	56,84	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	11.938.328,00	(9.061.672,00)	56,84	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	60.728.300,00	60.228.300,00	(500.000,00)	99,17	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.02.2.01		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.728.300,00	60.228.300,00	(500.000,00)	99,17	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA	60.728.300,00	60.228.300,00	(500.000,00)	99,17	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.728.300,00	10.728.300,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.728.300,00	10.728.300,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	260.272.250,00	260.078.827,00	(193.423,00)	99,92	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	224.150.000,00	224.087.827,00	(62.173,00)	99,97	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003		PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	215.750.000,00	215.687.827,00	(62.173,00)	99,97	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	215.750.000,00	215.687.827,00	(62.173,00)	99,97	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.700.000,00	(50.000,00)	99,68	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.04	Belanja Subsidi	200.000.000,00	199.987.827,00	(12.173,00)	99,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0005		PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	36.122.250,00	35.991.000,00	(131.250,00)	99,63	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	36.122.250,00	35.991.000,00	(131.250,00)	99,63	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.122.250,00	35.991.000,00	(131.250,00)	99,63	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.122.250,00	35.991.000,00	(131.250,00)	99,63	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	19.450.000,00	18.880.000,00	(570.000,00)	97,06	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.01		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	19.450.000,00	18.880.000,00	(570.000,00)	97,06	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	19.450.000,00	18.880.000,00	(570.000,00)	97,06	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.450.000,00	18.880.000,00	(570.000,00)	97,06	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	18.880.000,00	(570.000,00)	97,06	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	22.382.250,00	22.375.000,00	(7.250,00)	99,96	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.382.250,00	22.375.000,00	(7.250,00)	99,96	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.382.250,00	22.375.000,00	(7.250,00)	99,96	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.382.250,00	22.375.000,00	(7.250,00)	99,96	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.382.250,00	22.375.000,00	(7.250,00)	99,96	
				JUMLAH BELANJA	4.767.535.627,00	4.567.849.697,00	(199.685.930,00)	95,81	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.531.535.627,00)	(4.331.659.697,00)	199.875.930,00	95,58	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.531.535.627,00)	(4.331.659.697,00)	199.875.930,00	95,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	86.050.000,00	30.555.000,00	(55.495.000,00)	35,50	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86.050.000,00	30.555.000,00	(55.495.000,00)	35,50	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	86.050.000,00	30.555.000,00	(55.495.000,00)	35,50	
				JUMLAH PENDAPATAN	86.050.000,00	30.555.000,00	(55.495.000,00)	35,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.761.831.385,00	9.324.259.764,00	(437.571.621,00)	95,51	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.476.461.874,00	2.335.386.313,00	(141.075.561,00)	94,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.476.461.874,00	2.335.386.313,00	(141.075.561,00)	94,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.476.461.874,00	2.335.386.313,00	(141.075.561,00)	94,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.476.461.874,00	2.335.386.313,00	(141.075.561,00)	94,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.476.461.874,00	2.335.386.313,00	(141.075.561,00)	94,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	101.391.443,00	93.498.000,00	(7.893.443,00)	92,21	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	101.391.443,00	93.498.000,00	(7.893.443,00)	92,21	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0008		PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAINNYA	80.873.000,00	80.648.000,00	(225.000,00)	99,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	80.873.000,00	80.648.000,00	(225.000,00)	99,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.873.000,00	80.648.000,00	(225.000,00)	99,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0009		PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN	20.518.443,00	12.850.000,00	(7.668.443,00)	62,62	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.518.443,00	12.850.000,00	(7.668.443,00)	62,62	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.518.443,00	12.850.000,00	(7.668.443,00)	62,62	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	7.108.684.318,00	6.840.104.951,00	(268.579.367,00)	96,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.108.684.318,00	6.840.104.951,00	(268.579.367,00)	96,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002		PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	4.984.176.660,00	4.749.640.856,00	(234.535.804,00)	95,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.563.590.230,00	1.556.923.292,00	(6.666.938,00)	99,57	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.563.590.230,00	1.556.923.292,00	(6.666.938,00)	99,57	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.420.586.430,00	3.192.717.564,00	(227.868.866,00)	93,33	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.420.586.430,00	3.192.717.564,00	(227.868.866,00)	93,33	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP	261.220.000,00	260.720.168,00	(499.832,00)	99,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	261.220.000,00	260.720.168,00	(499.832,00)	99,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.220.000,00	260.720.168,00	(499.832,00)	99,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT	1.863.287.658,00	1.829.743.927,00	(33.543.731,00)	98,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.712.888.458,00	1.684.534.518,00	(28.353.940,00)	98,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.712.888.458,00	1.684.534.518,00	(28.353.940,00)	98,34	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	150.399.200,00	145.209.409,00	(5.189.791,00)	96,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.399.200,00	145.209.409,00	(5.189.791,00)	96,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	75.293.750,00	55.270.500,00	(20.023.250,00)	73,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	75.293.750,00	55.270.500,00	(20.023.250,00)	73,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGANGKUTAN	75.293.750,00	55.270.500,00	(20.023.250,00)	73,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	75.293.750,00	55.270.500,00	(20.023.250,00)	73,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.293.750,00	55.270.500,00	(20.023.250,00)	73,40	
				JUMLAH BELANJA	9.761.831.385,00	9.324.259.764,00	(437.571.621,00)	95,51	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(9.675.781.385,00)	(9.293.704.764,00)	382.076.621,00	96,05	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.675.781.385,00)	(9.293.704.764,00)	382.076.621,00	96,05	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.976.424.252,00	4.739.206.889,00	(237.217.363,00)	95,23	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.873.480.252,00	4.636.367.889,00	(237.112.363,00)	95,13	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	90.678.000,00	90.665.000,00	(13.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	41.684.000,00	41.675.000,00	(9.000,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.684.000,00	41.675.000,00	(9.000,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.684.000,00	41.675.000,00	(9.000,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	48.994.000,00	48.990.000,00	(4.000,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.994.000,00	48.990.000,00	(4.000,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.994.000,00	48.990.000,00	(4.000,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.337.267.252,00	3.130.169.698,00	(207.097.554,00)	93,79	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.185.487.252,00	2.980.129.698,00	(205.357.554,00)	93,55	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.185.487.252,00	2.980.129.698,00	(205.357.554,00)	93,55	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.185.487.252,00	2.980.129.698,00	(205.357.554,00)	93,55	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	151.780.000,00	150.040.000,00	(1.740.000,00)	98,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	151.780.000,00	150.040.000,00	(1.740.000,00)	98,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.780.000,00	150.040.000,00	(1.740.000,00)	98,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	559.364.250,00	553.516.065,00	(5.848.185,00)	98,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	943.560,00	943.560,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	943.560,00	943.560,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	943.560,00	943.560,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	28.935.040,00	28.367.955,00	(567.085,00)	98,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.935.040,00	28.367.955,00	(567.085,00)	98,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.935.040,00	28.367.955,00	(567.085,00)	98,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.861.000,00	1.861.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.861.000,00	1.861.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.861.000,00	1.861.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	417.840.650,00	415.444.817,00	(2.395.833,00)	99,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	417.840.650,00	415.444.817,00	(2.395.833,00)	99,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.840.650,00	415.444.817,00	(2.395.833,00)	99,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	66,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	66,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	66,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	106.184.000,00	104.498.733,00	(1.685.267,00)	98,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	106.184.000,00	104.498.733,00	(1.685.267,00)	98,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.184.000,00	104.498.733,00	(1.685.267,00)	98,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.500.000,00	3.496.500,00	(3.500,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.500.000,00	3.496.500,00	(3.500,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.500.000,00	3.496.500,00	(3.500,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.496.500,00	(3.500,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	675.000.000,00	653.434.984,00	(21.565.016,00)	96,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	84.000.000,00	74.434.984,00	(9.565.016,00)	88,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	74.434.984,00	(9.565.016,00)	88,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	74.434.984,00	(9.565.016,00)	88,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	591.000.000,00	579.000.000,00	(12.000.000,00)	97,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	591.000.000,00	579.000.000,00	(12.000.000,00)	97,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.000.000,00	579.000.000,00	(12.000.000,00)	97,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	200.470.750,00	197.885.642,00	(2.585.108,00)	98,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	171.270.750,00	168.685.642,00	(2.585.108,00)	98,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	171.270.750,00	168.685.642,00	(2.585.108,00)	98,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.270.750,00	168.685.642,00	(2.585.108,00)	98,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	33.948.000,00	33.943.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03		PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	16.350.000,00	16.345.000,00	(5.000,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002		PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	16.350.000,00	16.345.000,00	(5.000,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.350.000,00	16.345.000,00	(5.000,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.350.000,00	16.345.000,00	(5.000,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	34.048.000,00	34.043.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02		PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	16.450.000,00	16.445.000,00	(5.000,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004		PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENCATATAN SIPIL	16.450.000,00	16.445.000,00	(5.000,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.450.000,00	16.445.000,00	(5.000,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.450.000,00	16.445.000,00	(5.000,00)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	31.390.000,00	31.295.000,00	(95.000,00)	99,69	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	31.390.000,00	31.295.000,00	(95.000,00)	99,69	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001		PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	15.040.000,00	14.945.000,00	(95.000,00)	99,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.040.000,00	14.945.000,00	(95.000,00)	99,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.040.000,00	14.945.000,00	(95.000,00)	99,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002		KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002		PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	4.976.424.252,00	4.739.206.889,00	(237.217.363,00)	95,23	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.976.424.252,00)	(4.739.206.889,00)	237.217.363,00	95,23	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.976.424.252,00)	(4.739.206.889,00)	237.217.363,00	95,23	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.574.164.626,00	6.380.580.898,00	(193.583.728,00)	97,05	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.277.558.826,00	2.164.467.650,00	(113.091.176,00)	95,03	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.222.358.026,00	2.109.314.850,00	(113.043.176,00)	94,91	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.222.358.026,00	2.109.314.850,00	(113.043.176,00)	94,91	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.222.358.026,00	2.109.314.850,00	(113.043.176,00)	94,91	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.222.358.026,00	2.109.314.850,00	(113.043.176,00)	94,91	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	29.912.800,00	29.864.800,00	(48.000,00)	99,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	29.912.800,00	29.864.800,00	(48.000,00)	99,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.912.800,00	29.864.800,00	(48.000,00)	99,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.912.800,00	29.864.800,00	(48.000,00)	99,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	25.288.000,00	25.288.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	25.288.000,00	25.288.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	25.288.000,00	25.288.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.288.000,00	25.288.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.296.605.800,00	4.216.113.248,00	(80.492.552,00)	98,12	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.296.605.800,00	4.216.113.248,00	(80.492.552,00)	98,12	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.296.605.800,00	4.216.113.248,00	(80.492.552,00)	98,12	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.239.105.800,00	4.160.623.248,00	(78.482.552,00)	98,14	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.989.105.800,00	3.910.623.248,00	(78.482.552,00)	98,03	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	57.500.000,00	55.490.000,00	(2.010.000,00)	96,50	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.500.000,00	55.490.000,00	(2.010.000,00)	96,50	
				JUMLAH BELANJA	6.574.164.626,00	6.380.580.898,00	(193.583.728,00)	97,05	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.574.164.626,00)	(6.380.580.898,00)	193.583.728,00	97,05	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.574.164.626,00)	(6.380.580.898,00)	193.583.728,00	97,05	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.107.431.481,00	8.756.863.070,00	(350.568.411,00)	96,15	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.390.119.358,00	2.305.054.556,00	(85.064.802,00)	96,44	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.390.119.358,00	2.305.054.556,00	(85.064.802,00)	96,44	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.390.119.358,00	2.305.054.556,00	(85.064.802,00)	96,44	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.390.119.358,00	2.305.054.556,00	(85.064.802,00)	96,44	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.390.119.358,00	2.305.054.556,00	(85.064.802,00)	96,44	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	984.861.123,00	808.626.167,00	(176.234.956,00)	82,10	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.01		PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	984.861.123,00	808.626.167,00	(176.234.956,00)	82,10	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0009		ADVOKASI, SOSIALISASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL DI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI DAN SLTP/MTS, JALUR NONFORMAL DAN INFORMAL	271.541.123,00	271.232.579,00	(308.544,00)	99,88	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	271.541.123,00	271.232.579,00	(308.544,00)	99,88	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.541.123,00	271.232.579,00	(308.544,00)	99,88	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0018		PENGUATAN KERJA SAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL	713.320.000,00	537.393.588,00	(175.926.412,00)	75,33	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	713.320.000,00	537.393.588,00	(175.926.412,00)	75,33	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.320.000,00	537.393.588,00	(175.926.412,00)	75,33	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.732.451.000,00	5.643.182.347,00	(89.268.653,00)	98,44	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	5.120.451.000,00	5.034.879.107,00	(85.571.893,00)	98,32	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0009		PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI SARANA KIE PROGRAM BANGGA KENCANA	446.851.000,00	424.808.896,00	(22.042.104,00)	95,06	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.851.000,00	6.848.896,00	(2.104,00)	99,96	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.851.000,00	6.848.896,00	(2.104,00)	99,96	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	440.000.000,00	417.960.000,00	(22.040.000,00)	94,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	440.000.000,00	417.960.000,00	(22.040.000,00)	94,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	4.631.600.000,00	4.568.285.211,00	(63.314.789,00)	98,63	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.631.600.000,00	4.568.285.211,00	(63.314.789,00)	98,63	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.631.600.000,00	4.568.285.211,00	(63.314.789,00)	98,63	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012		PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	42.000.000,00	41.785.000,00	(215.000,00)	99,48	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	41.785.000,00	(215.000,00)	99,48	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	41.785.000,00	(215.000,00)	99,48	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.000.000,00	17.981.000,00	(19.000,00)	99,89	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001		PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	18.000.000,00	17.981.000,00	(19.000,00)	99,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.981.000,00	(19.000,00)	99,89	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.981.000,00	(19.000,00)	99,89	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	594.000.000,00	590.322.240,00	(3.677.760,00)	99,38	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0005		FASILITASI PENGELOLAAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	594.000.000,00	590.322.240,00	(3.677.760,00)	99,38	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	594.000.000,00	590.322.240,00	(3.677.760,00)	99,38	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.000.000,00	590.322.240,00	(3.677.760,00)	99,38	
				JUMLAH BELANJA	9.107.431.481,00	8.756.863.070,00	(350.568.411,00)	96,15	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(9.107.431.481,00)	(8.756.863.070,00)	350.568.411,00	96,15	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.107.431.481,00)	(8.756.863.070,00)	350.568.411,00	96,15	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	260.000.000,00	128.200.000,00	(131.800.000,00)	49,30	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	260.000.000,00	128.200.000,00	(131.800.000,00)	49,30	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	260.000.000,00	128.200.000,00	(131.800.000,00)	49,30	
				JUMLAH PENDAPATAN	260.000.000,00	128.200.000,00	(131.800.000,00)	49,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.511.026.857,00	5.045.877.997,00	(465.148.860,00)	91,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.646.400.057,00	4.426.130.160,00	(220.269.897,00)	95,25	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.066.025.361,00	3.857.692.885,00	(208.332.476,00)	94,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.975.365.361,00	3.767.032.885,00	(208.332.476,00)	94,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.975.365.361,00	3.767.032.885,00	(208.332.476,00)	94,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.975.365.361,00	3.767.032.885,00	(208.332.476,00)	94,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	90.660.000,00	90.660.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	90.660.000,00	90.660.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.660.000,00	90.660.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	73.040.696,00	67.728.976,00	(5.311.720,00)	92,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.341.976,00	10.850.080,00	(491.896,00)	95,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.341.976,00	10.850.080,00	(491.896,00)	95,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.341.976,00	10.850.080,00	(491.896,00)	95,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.061.720,00	923.000,00	(138.720,00)	86,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.061.720,00	923.000,00	(138.720,00)	86,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.720,00	923.000,00	(138.720,00)	86,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.600.000,00	3.120.000,00	(480.000,00)	86,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.120.000,00	(480.000,00)	86,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.120.000,00	(480.000,00)	86,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	53.437.000,00	49.235.896,00	(4.201.104,00)	92,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	53.437.000,00	49.235.896,00	(4.201.104,00)	92,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.437.000,00	49.235.896,00	(4.201.104,00)	92,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	157.584.000,00	154.988.896,00	(2.595.104,00)	98,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	13.104.000,00	11.108.896,00	(1.995.104,00)	84,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.104.000,00	11.108.896,00	(1.995.104,00)	84,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.104.000,00	11.108.896,00	(1.995.104,00)	84,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	144.480.000,00	143.880.000,00	(600.000,00)	99,58	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	144.480.000,00	143.880.000,00	(600.000,00)	99,58	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.480.000,00	143.880.000,00	(600.000,00)	99,58	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	342.250.000,00	338.219.403,00	(4.030.597,00)	98,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	336.240.000,00	332.409.403,00	(3.830.597,00)	98,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	336.240.000,00	332.409.403,00	(3.830.597,00)	98,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.240.000,00	332.409.403,00	(3.830.597,00)	98,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.010.000,00	5.810.000,00	(200.000,00)	96,67	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.010.000,00	5.810.000,00	(200.000,00)	96,67	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.010.000,00	5.810.000,00	(200.000,00)	96,67	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	777.126.800,00	593.297.837,00	(183.828.963,00)	76,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	281.744.900,00	199.643.350,00	(82.101.550,00)	70,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	281.744.900,00	199.643.350,00	(82.101.550,00)	70,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.550.000,00	76.500.000,00	(50.000,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.550.000,00	76.500.000,00	(50.000,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	205.194.900,00	123.143.350,00	(82.051.550,00)	60,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.450.000,00	123.143.350,00	(306.650,00)	99,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.744.900,00	0,00	(81.744.900,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05		PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	325.441.900,00	306.280.127,00	(19.161.773,00)	94,11	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0001		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	325.441.900,00	306.280.127,00	(19.161.773,00)	94,11	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	263.001.900,00	248.434.612,00	(14.567.288,00)	94,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.001.900,00	248.434.612,00	(14.567.288,00)	94,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0001	5.2	BELANJA MODAL	62.440.000,00	57.845.515,00	(4.594.485,00)	92,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.440.000,00	57.845.515,00	(4.594.485,00)	92,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08		AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	169.940.000,00	87.374.360,00	(82.565.640,00)	51,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0003		PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN TERMINAL	169.940.000,00	87.374.360,00	(82.565.640,00)	51,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	169.940.000,00	87.374.360,00	(82.565.640,00)	51,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.940.000,00	87.374.360,00	(82.565.640,00)	51,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	87.500.000,00	26.450.000,00	(61.050.000,00)	30,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13		PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	87.500.000,00	26.450.000,00	(61.050.000,00)	30,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0010		PENGAWASAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	87.500.000,00	26.450.000,00	(61.050.000,00)	30,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0010	5.1	BELANJA OPERASI	82.040.000,00	26.450.000,00	(55.590.000,00)	32,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.040.000,00	26.450.000,00	(55.590.000,00)	32,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0010	5.2	BELANJA MODAL	5.460.000,00	0,00	(5.460.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.460.000,00	0,00	(5.460.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	5.511.026.857,00	5.045.877.997,00	(465.148.860,00)	91,55	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.251.026.857,00)	(4.917.677.997,00)	333.348.860,00	93,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.251.026.857,00)	(4.917.677.997,00)	333.348.860,00	93,65	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.618.393.836,00	4.455.137.578,00	(163.256.258,00)	96,46	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.479.513.836,00	4.320.409.278,00	(159.104.558,00)	96,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.177.000,00	15.169.000,00	(8.000,00)	99,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.177.000,00	15.169.000,00	(8.000,00)	99,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.177.000,00	15.169.000,00	(8.000,00)	99,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.177.000,00	15.169.000,00	(8.000,00)	99,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.071.559.151,00	1.996.648.680,00	(74.910.471,00)	96,38	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.997.879.151,00	1.922.968.680,00	(74.910.471,00)	96,25	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.997.879.151,00	1.922.968.680,00	(74.910.471,00)	96,25	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.997.879.151,00	1.922.968.680,00	(74.910.471,00)	96,25	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	73.680.000,00	73.680.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	73.680.000,00	73.680.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.680.000,00	73.680.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	193.280.685,00	190.591.052,00	(2.689.633,00)	98,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.509.485,00	37.959.796,00	(2.549.689,00)	93,70	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.509.485,00	37.959.796,00	(2.549.689,00)	93,70	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.509.485,00	37.959.796,00	(2.549.689,00)	93,70	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.725.200,00	4.586.600,00	(138.600,00)	97,06	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.725.200,00	4.586.600,00	(138.600,00)	97,06	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.725.200,00	4.586.600,00	(138.600,00)	97,06	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	4.913.000,00	4.913.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.913.000,00	4.913.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.913.000,00	4.913.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	143.133.000,00	143.131.656,00	(1.344,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	143.133.000,00	143.131.656,00	(1.344,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.133.000,00	143.131.656,00	(1.344,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	124.472.000,00	124.457.000,00	(15.000,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	124.472.000,00	124.457.000,00	(15.000,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	124.472.000,00	124.457.000,00	(15.000,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.472.000,00	124.457.000,00	(15.000,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.742.440.000,00	1.663.990.000,00	(78.450.000,00)	95,49	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.010.000,00	3.000.000,00	(10.000,00)	99,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.010.000,00	3.000.000,00	(10.000,00)	99,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	3.000.000,00	(10.000,00)	99,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.524.530.000,00	1.477.790.000,00	(46.740.000,00)	96,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.524.530.000,00	1.477.790.000,00	(46.740.000,00)	96,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.524.530.000,00	1.477.790.000,00	(46.740.000,00)	96,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	183.000.000,00	151.300.000,00	(31.700.000,00)	82,67	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	183.000.000,00	151.300.000,00	(31.700.000,00)	82,67	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.000.000,00	151.300.000,00	(31.700.000,00)	82,67	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	319.645.000,00	316.613.546,00	(3.031.454,00)	99,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	319.645.000,00	316.613.546,00	(3.031.454,00)	99,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	132.645.000,00	130.062.656,00	(2.582.344,00)	98,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.645.000,00	130.062.656,00	(2.582.344,00)	98,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.2	BELANJA MODAL	187.000.000,00	186.550.890,00	(449.110,00)	99,75	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.000.000,00	186.550.890,00	(449.110,00)	99,75	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	119.695.000,00	119.678.300,00	(16.700,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	119.695.000,00	119.678.300,00	(16.700,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	119.695.000,00	119.678.300,00	(16.700,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	119.695.000,00	119.678.300,00	(16.700,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.695.000,00	119.678.300,00	(16.700,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	19.185.000,00	15.050.000,00	(4.135.000,00)	78,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.185.000,00	15.050.000,00	(4.135.000,00)	78,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0019		KOORDINASI PELAKSANAAN MANAJEMEN SPBE	19.185.000,00	15.050.000,00	(4.135.000,00)	78,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	19.185.000,00	15.050.000,00	(4.135.000,00)	78,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.185.000,00	15.050.000,00	(4.135.000,00)	78,44	
				JUMLAH BELANJA	4.618.393.836,00	4.455.137.578,00	(163.256.258,00)	96,46	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.618.393.836,00)	(4.455.137.578,00)	163.256.258,00	96,46	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.618.393.836,00)	(4.455.137.578,00)	163.256.258,00	96,46	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.654.183.323,00	6.889.437.255,00	(764.746.068,00)	90,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.877.051.123,00	2.767.851.044,00	(109.200.079,00)	96,20	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.716.618,00	7.706.450,00	(10.168,00)	99,86	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.717.407,00	4.717.300,00	(107,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.717.407,00	4.717.300,00	(107,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.717.407,00	4.717.300,00	(107,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	449.811,00	449.750,00	(61,00)	99,98	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	449.811,00	449.750,00	(61,00)	99,98	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.811,00	449.750,00	(61,00)	99,98	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	449.750,00	449.750,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	449.750,00	449.750,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.750,00	449.750,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	599.900,00	599.900,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	599.900,00	599.900,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.900,00	599.900,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	899.850,00	889.850,00	(10.000,00)	98,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	899.850,00	889.850,00	(10.000,00)	98,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	899.850,00	889.850,00	(10.000,00)	98,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	299.950,00	299.950,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	299.950,00	299.950,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.950,00	299.950,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	299.950,00	299.950,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	299.950,00	299.950,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.950,00	299.950,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.724.291.116,00	1.668.233.257,00	(56.057.859,00)	96,74	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.620.256.116,00	1.564.198.407,00	(56.057.709,00)	96,54	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.620.256.116,00	1.564.198.407,00	(56.057.709,00)	96,54	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.620.256.116,00	1.564.198.407,00	(56.057.709,00)	96,54	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	104.035.000,00	104.034.850,00	(150,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	104.035.000,00	104.034.850,00	(150,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.035.000,00	104.034.850,00	(150,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	9.330.000,00	8.279.700,00	(1.050.300,00)	88,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	9.330.000,00	8.279.700,00	(1.050.300,00)	88,74	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.330.000,00	8.279.700,00	(1.050.300,00)	88,74	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.330.000,00	8.279.700,00	(1.050.300,00)	88,74	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	412.623.389,00	407.717.350,00	(4.906.039,00)	98,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.740.600,00	14.740.600,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.740.600,00	14.740.600,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.740.600,00	14.740.600,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	743.689,00	490.000,00	(253.689,00)	65,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	743.689,00	490.000,00	(253.689,00)	65,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.689,00	490.000,00	(253.689,00)	65,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.096.100,00	11.095.850,00	(250,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.096.100,00	11.095.850,00	(250,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.096.100,00	11.095.850,00	(250,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	386.043.000,00	381.390.900,00	(4.652.100,00)	98,79	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	386.043.000,00	381.390.900,00	(4.652.100,00)	98,79	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.043.000,00	381.390.900,00	(4.652.100,00)	98,79	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	585.531.000,00	545.785.000,00	(39.746.000,00)	93,21	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	555.031.000,00	515.285.000,00	(39.746.000,00)	92,83	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	555.031.000,00	515.285.000,00	(39.746.000,00)	92,83	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.031.000,00	515.285.000,00	(39.746.000,00)	92,83	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	135.459.000,00	130.129.287,00	(5.329.713,00)	96,06	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	133.019.000,00	127.769.287,00	(5.249.713,00)	96,05	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	133.019.000,00	127.769.287,00	(5.249.713,00)	96,05	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.019.000,00	127.769.287,00	(5.249.713,00)	96,05	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.440.000,00	2.360.000,00	(80.000,00)	96,72	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.440.000,00	2.360.000,00	(80.000,00)	96,72	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	2.360.000,00	(80.000,00)	96,72	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	12.350.000,00	10.200.000,00	(2.150.000,00)	82,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.2.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	12.350.000,00	10.200.000,00	(2.150.000,00)	82,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.2.01.0003		PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI	12.350.000,00	10.200.000,00	(2.150.000,00)	82,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.350.000,00	10.200.000,00	(2.150.000,00)	82,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	10.200.000,00	(2.150.000,00)	82,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	12.350.000,00	12.050.000,00	(300.000,00)	97,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04.2.01		PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.350.000,00	12.050.000,00	(300.000,00)	97,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04.2.01.0003		PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI MELIPUTI TATA KELOLA, PROFIL RISIKO, KINERJA KEUANGAN, DAN PERMODALAN	12.350.000,00	12.050.000,00	(300.000,00)	97,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.350.000,00	12.050.000,00	(300.000,00)	97,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	12.050.000,00	(300.000,00)	97,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	647.920.000,00	647.920.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.2.01		PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	647.920.000,00	647.920.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.2.01.0007		FASILITASI AKSES PERMODALAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	647.920.000,00	647.920.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	647.920.000,00	647.920.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.2.01.0007	5.1.05	Belanja Hibah	642.000.000,00	642.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.161.172.200,00	2.508.953.611,00	(652.218.589,00)	79,36	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	3.161.172.200,00	2.508.953.611,00	(652.218.589,00)	79,36	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0008		PEMULIHAN USAHA MIKRO	2.896.172.200,00	2.248.090.200,00	(648.082.000,00)	77,62	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.896.172.200,00	2.248.090.200,00	(648.082.000,00)	77,62	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.172.200,00	46.090.200,00	(82.000,00)	99,82	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0008	5.1.05	Belanja Hibah	2.850.000.000,00	2.202.000.000,00	(648.000.000,00)	77,26	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0013		PENYEDIAAN TEMPAT PROMOSI DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL PADA INFRASTRUKTUR PUBLIK	180.000.000,00	179.263.411,00	(736.589,00)	99,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	179.263.411,00	(736.589,00)	99,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	179.263.411,00	(736.589,00)	99,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0015		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	85.000.000,00	81.600.000,00	(3.400.000,00)	96,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	81.600.000,00	(3.400.000,00)	96,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0015	5.1.05	Belanja Hibah	85.000.000,00	81.600.000,00	(3.400.000,00)	96,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	943.340.000,00	942.462.600,00	(877.400,00)	99,90	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.2.01		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	943.340.000,00	942.462.600,00	(877.400,00)	99,90	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0002		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	623.000.000,00	622.462.600,00	(537.400,00)	99,91	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	623.000.000,00	622.462.600,00	(537.400,00)	99,91	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.000.000,00	382.462.600,00	(537.400,00)	99,85	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0004		FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBASI SECARA TERPADU DAN BERJENJANG	320.340.000,00	320.000.000,00	(340.000,00)	99,89	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	320.340.000,00	320.000.000,00	(340.000,00)	99,89	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000,00	0,00	(340.000,00)	0,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	7.654.183.323,00	6.889.437.255,00	(764.746.068,00)	90,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.654.183.323,00)	(6.889.437.255,00)	764.746.068,00	90,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.654.183.323,00)	(6.889.437.255,00)	764.746.068,00	90,00	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.735.084.116,00	4.524.253.300,00	(210.830.816,00)	95,54	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.760.657.843,00	3.638.744.574,00	(121.913.269,00)	96,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	26.934.280,00	25.751.729,00	(1.182.551,00)	95,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.476.280,00	8.884.117,00	(592.163,00)	93,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.476.280,00	8.884.117,00	(592.163,00)	93,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.476.280,00	8.884.117,00	(592.163,00)	93,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.058.000,00	6.875.612,00	(182.388,00)	97,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.058.000,00	6.875.612,00	(182.388,00)	97,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.058.000,00	6.875.612,00	(182.388,00)	97,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	10.400.000,00	9.992.000,00	(408.000,00)	96,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.400.000,00	9.992.000,00	(408.000,00)	96,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	9.992.000,00	(408.000,00)	96,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.293.113.616,00	3.209.174.031,00	(83.939.585,00)	97,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.211.153.616,00	3.127.214.031,00	(83.939.585,00)	97,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.211.153.616,00	3.127.214.031,00	(83.939.585,00)	97,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.211.153.616,00	3.127.214.031,00	(83.939.585,00)	97,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	81.960.000,00	81.960.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	81.960.000,00	81.960.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.960.000,00	81.960.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	103.429.947,00	77.702.500,00	(25.727.447,00)	75,12	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.441.180,00	5.884.100,00	(557.080,00)	91,35	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.441.180,00	5.884.100,00	(557.080,00)	91,35	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.441.180,00	5.884.100,00	(557.080,00)	91,35	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.158.767,00	4.548.000,00	(610.767,00)	88,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.158.767,00	4.548.000,00	(610.767,00)	88,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.158.767,00	4.548.000,00	(610.767,00)	88,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	91.830.000,00	67.270.400,00	(24.559.600,00)	73,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	91.830.000,00	67.270.400,00	(24.559.600,00)	73,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.830.000,00	67.270.400,00	(24.559.600,00)	73,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8.000.000,00	7.980.900,00	(19.100,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.000.000,00	7.980.900,00	(19.100,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	7.980.900,00	(19.100,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	7.980.900,00	(19.100,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	187.260.000,00	176.215.414,00	(11.044.586,00)	94,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	187.260.000,00	176.215.414,00	(11.044.586,00)	94,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	187.260.000,00	176.215.414,00	(11.044.586,00)	94,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.260.000,00	176.215.414,00	(11.044.586,00)	94,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	163.867.593,00	162.148.708,00	(1.718.885,00)	98,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02		PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	163.867.593,00	162.148.708,00	(1.718.885,00)	98,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0001		PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.867.593,00	162.148.708,00	(1.718.885,00)	98,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	163.867.593,00	162.148.708,00	(1.718.885,00)	98,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.867.593,00	162.148.708,00	(1.718.885,00)	98,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	483.187.800,00	445.247.671,00	(37.940.129,00)	92,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	483.187.800,00	445.247.671,00	(37.940.129,00)	92,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002		PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	348.295.850,00	315.678.471,00	(32.617.379,00)	90,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	348.295.850,00	315.678.471,00	(32.617.379,00)	90,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.295.850,00	315.678.471,00	(32.617.379,00)	90,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003		PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	134.891.950,00	129.569.200,00	(5.322.750,00)	96,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	134.891.950,00	129.569.200,00	(5.322.750,00)	96,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.891.950,00	129.569.200,00	(5.322.750,00)	96,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	144.135.000,00	121.216.900,00	(22.918.100,00)	84,09	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	144.135.000,00	121.216.900,00	(22.918.100,00)	84,09	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	35.942.840,00	34.655.100,00	(1.287.740,00)	96,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	35.942.840,00	34.655.100,00	(1.287.740,00)	96,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.942.840,00	34.655.100,00	(1.287.740,00)	96,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	84.507.160,00	65.061.800,00	(19.445.360,00)	76,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	84.507.160,00	65.061.800,00	(19.445.360,00)	76,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.507.160,00	65.061.800,00	(19.445.360,00)	76,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008		PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	23.685.000,00	21.500.000,00	(2.185.000,00)	90,77	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	23.685.000,00	21.500.000,00	(2.185.000,00)	90,77	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.685.000,00	21.500.000,00	(2.185.000,00)	90,77	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	183.235.880,00	156.895.447,00	(26.340.433,00)	85,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	183.235.880,00	156.895.447,00	(26.340.433,00)	85,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004		PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	34.565.080,00	32.511.647,00	(2.053.433,00)	94,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.565.080,00	32.511.647,00	(2.053.433,00)	94,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.565.080,00	32.511.647,00	(2.053.433,00)	94,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005		BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	82.970.800,00	60.120.200,00	(22.850.600,00)	72,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	82.970.800,00	60.120.200,00	(22.850.600,00)	72,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.970.800,00	60.120.200,00	(22.850.600,00)	72,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006		PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	65.700.000,00	64.263.600,00	(1.436.400,00)	97,81	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	65.700.000,00	64.263.600,00	(1.436.400,00)	97,81	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.700.000,00	64.263.600,00	(1.436.400,00)	97,81	
				JUMLAH BELANJA	4.735.084.116,00	4.524.253.300,00	(210.830.816,00)	95,54	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.735.084.116,00)	(4.524.253.300,00)	210.830.816,00	95,54	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.735.084.116,00)	(4.524.253.300,00)	210.830.816,00	95,54	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Pemuda Dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.976.704.567,00	5.829.334.809,00	(147.369.758,00)	97,53	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.026.676.947,00	1.923.110.882,00	(103.566.065,00)	94,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.026.676.947,00	1.923.110.882,00	(103.566.065,00)	94,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.026.676.947,00	1.923.110.882,00	(103.566.065,00)	94,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.026.676.947,00	1.923.110.882,00	(103.566.065,00)	94,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.026.676.947,00	1.923.110.882,00	(103.566.065,00)	94,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	371.241.398,00	366.703.520,00	(4.537.878,00)	98,77	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	371.241.398,00	366.703.520,00	(4.537.878,00)	98,77	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0010		PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN MELALUI PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN SERTA PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH/RAD TINGKAT KABUPATEN/KOTA	102.200.998,00	101.619.260,00	(581.738,00)	99,43	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	26.600.998,00	26.019.260,00	(581.738,00)	97,81	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.600.998,00	26.019.260,00	(581.738,00)	97,81	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0010	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0013		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	269.040.400,00	265.084.260,00	(3.956.140,00)	98,52	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	269.040.400,00	265.084.260,00	(3.956.140,00)	98,52	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.040.400,00	65.084.260,00	(3.956.140,00)	94,26	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0013	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.078.385.222,00	3.061.125.347,00	(17.259.875,00)	99,43	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.634.114.900,00	1.623.713.152,00	(10.401.748,00)	99,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	1.634.114.900,00	1.623.713.152,00	(10.401.748,00)	99,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.173.414.900,00	1.165.281.673,00	(8.133.227,00)	99,30	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.173.414.900,00	1.165.281.673,00	(8.133.227,00)	99,30	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	460.700.000,00	458.431.479,00	(2.268.521,00)	99,50	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	460.700.000,00	458.431.479,00	(2.268.521,00)	99,50	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	580.482.542,00	577.030.555,00	(3.451.987,00)	99,40	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006		KEIKUTSERTAAN ANGGOTA KONTINGEN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA	580.482.542,00	577.030.555,00	(3.451.987,00)	99,40	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	546.982.542,00	543.530.555,00	(3.451.987,00)	99,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.982.542,00	543.530.555,00	(3.451.987,00)	99,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	863.787.780,00	860.381.640,00	(3.406.140,00)	99,60	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA	685.564.000,00	683.616.790,00	(1.947.210,00)	99,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	685.564.000,00	683.616.790,00	(1.947.210,00)	99,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.564.000,00	383.616.790,00	(1.947.210,00)	99,49	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0010		PEMBENTUKAN DAN PENYEDIAAN SISTEM DATA KEOLAHRAGAAN TERPADU DI KABUPATEN/KOTA	178.223.780,00	176.764.850,00	(1.458.930,00)	99,18	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	108.223.780,00	106.764.850,00	(1.458.930,00)	98,65	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.223.780,00	106.764.850,00	(1.458.930,00)	98,65	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0010	5.2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0010	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.401.000,00	478.395.060,00	(22.005.940,00)	95,60	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	500.401.000,00	478.395.060,00	(22.005.940,00)	95,60	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005		PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	500.401.000,00	478.395.060,00	(22.005.940,00)	95,60	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	500.401.000,00	478.395.060,00	(22.005.940,00)	95,60	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.401.000,00	178.395.060,00	(22.005.940,00)	89,01	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	5.976.704.567,00	5.829.334.809,00	(147.369.758,00)	97,53	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.976.704.567,00)	(5.829.334.809,00)	147.369.758,00	97,53	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.976.704.567,00)	(5.829.334.809,00)	147.369.758,00	97,53	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	144.529.750,00	144.514.200,00	(15.550,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	142.129.750,00	142.114.200,00	(15.550,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	142.129.750,00	142.114.200,00	(15.550,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001		PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	57.469.750,00	57.469.700,00	(50,00)	99,99	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.469.750,00	57.469.700,00	(50,00)	99,99	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.469.750,00	57.469.700,00	(50,00)	99,99	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003		PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	84.660.000,00	84.644.500,00	(15.500,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	84.660.000,00	84.644.500,00	(15.500,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.660.000,00	84.644.500,00	(15.500,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.01		PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.01.0004		PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	144.529.750,00	144.514.200,00	(15.550,00)	99,98	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(144.529.750,00)	(144.514.200,00)	15.550,00	99,98	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(144.529.750,00)	(144.514.200,00)	15.550,00	99,98	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.551.845.343,00	2.446.616.452,00	(105.228.891,00)	95,87	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.778.776.843,00	1.683.900.710,00	(94.876.133,00)	94,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.778.776.843,00	1.683.900.710,00	(94.876.133,00)	94,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.778.776.843,00	1.683.900.710,00	(94.876.133,00)	94,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.778.776.843,00	1.683.900.710,00	(94.876.133,00)	94,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.778.776.843,00	1.683.900.710,00	(94.876.133,00)	94,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	768.068.500,00	758.615.742,00	(9.452.758,00)	98,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	437.051.300,00	429.084.116,00	(7.967.184,00)	98,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0004		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0016		PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	285.413.000,00	278.888.000,00	(6.525.000,00)	97,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	285.413.000,00	278.888.000,00	(6.525.000,00)	97,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.413.000,00	278.888.000,00	(6.525.000,00)	97,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0018		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN	92.388.300,00	92.323.116,00	(65.184,00)	99,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	92.388.300,00	92.323.116,00	(65.184,00)	99,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.388.300,00	92.323.116,00	(65.184,00)	99,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0020		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	45.000.000,00	43.623.000,00	(1.377.000,00)	96,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	43.623.000,00	(1.377.000,00)	96,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	43.623.000,00	(1.377.000,00)	96,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	331.017.200,00	329.531.626,00	(1.485.574,00)	99,55	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0007		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	83.941.000,00	83.781.500,00	(159.500,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	83.941.000,00	83.781.500,00	(159.500,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.941.000,00	83.781.500,00	(159.500,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0009		PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	84.675.000,00	83.429.560,00	(1.245.440,00)	98,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	84.675.000,00	83.429.560,00	(1.245.440,00)	98,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.675.000,00	83.429.560,00	(1.245.440,00)	98,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0010		SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT	162.401.200,00	162.320.566,00	(80.634,00)	99,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	162.401.200,00	162.320.566,00	(80.634,00)	99,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.401.200,00	162.320.566,00	(80.634,00)	99,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	5.000.000,00	4.100.000,00	(900.000,00)	82,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03.2.01		PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.000.000,00	4.100.000,00	(900.000,00)	82,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03.2.01.0004		PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN DAN PENGALIHMEDIAAN NASKAH KUNO YANG DIMILIKI OLEH MASYARAKAT UNTUK DILESTARIKAN DAN DIDAYAGUNAKAN	5.000.000,00	4.100.000,00	(900.000,00)	82,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.100.000,00	(900.000,00)	82,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.100.000,00	(900.000,00)	82,00	
				JUMLAH BELANJA	2.551.845.343,00	2.446.616.452,00	(105.228.891,00)	95,87	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.551.845.343,00)	(2.446.616.452,00)	105.228.891,00	95,87	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.551.845.343,00)	(2.446.616.452,00)	105.228.891,00	95,87	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Pariwisata

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	240.000.000,00	232.666.541,00	(7.333.459,00)	96,94	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	240.000.000,00	232.666.541,00	(7.333.459,00)	96,94	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	240.000.000,00	232.666.541,00	(7.333.459,00)	96,94	
				JUMLAH PENDAPATAN	240.000.000,00	232.666.541,00	(7.333.459,00)	96,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.256.404.227,00	3.932.033.639,00	(324.370.588,00)	92,37	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.188.999.227,00	2.953.392.880,00	(235.606.347,00)	92,61	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	54.394.000,00	51.550.000,00	(2.844.000,00)	94,77	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	54.394.000,00	51.550.000,00	(2.844.000,00)	94,77	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.394.000,00	51.550.000,00	(2.844.000,00)	94,77	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.394.000,00	51.550.000,00	(2.844.000,00)	94,77	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.013.831.797,00	1.888.062.384,00	(125.769.413,00)	93,75	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.939.818.667,00	1.814.049.254,00	(125.769.413,00)	93,51	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.939.818.667,00	1.814.049.254,00	(125.769.413,00)	93,51	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.939.818.667,00	1.814.049.254,00	(125.769.413,00)	93,51	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	74.013.130,00	74.013.130,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	74.013.130,00	74.013.130,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.013.130,00	74.013.130,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	394.993.430,00	307.713.130,00	(87.280.300,00)	77,90	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.621.430,00	50.322.430,00	(299.000,00)	99,40	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.371.430,00	39.191.430,00	(180.000,00)	99,54	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.371.430,00	39.191.430,00	(180.000,00)	99,54	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	11.250.000,00	11.131.000,00	(119.000,00)	98,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.250.000,00	11.131.000,00	(119.000,00)	98,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.524.000,00	13.524.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.524.000,00	13.524.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.524.000,00	13.524.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	330.848.000,00	243.866.700,00	(86.981.300,00)	73,70	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	330.848.000,00	243.866.700,00	(86.981.300,00)	73,70	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.848.000,00	243.866.700,00	(86.981.300,00)	73,70	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	499.500.000,00	489.969.886,00	(9.530.114,00)	98,09	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	120.000.000,00	114.469.886,00	(5.530.114,00)	95,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	114.469.886,00	(5.530.114,00)	95,39	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	114.469.886,00	(5.530.114,00)	95,39	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	379.500.000,00	375.500.000,00	(4.000.000,00)	98,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	379.500.000,00	375.500.000,00	(4.000.000,00)	98,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.500.000,00	375.500.000,00	(4.000.000,00)	98,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	226.280.000,00	216.097.480,00	(10.182.520,00)	95,50	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	226.280.000,00	216.097.480,00	(10.182.520,00)	95,50	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.280.000,00	190.345.480,00	(9.934.520,00)	95,03	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.280.000,00	190.345.480,00	(9.934.520,00)	95,03	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.2	BELANJA MODAL	26.000.000,00	25.752.000,00	(248.000,00)	99,04	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	25.752.000,00	(248.000,00)	99,04	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	630.512.500,00	614.782.060,00	(15.730.440,00)	97,50	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	630.512.500,00	614.782.060,00	(15.730.440,00)	97,50	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004		PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	415.128.000,00	414.067.560,00	(1.060.440,00)	99,74	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	157.598.000,00	157.225.200,00	(372.800,00)	99,76	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.598.000,00	157.225.200,00	(372.800,00)	99,76	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	257.530.000,00	256.842.360,00	(687.640,00)	99,73	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	242.530.000,00	241.842.360,00	(687.640,00)	99,71	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	215.384.500,00	200.714.500,00	(14.670.000,00)	93,18	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	215.384.500,00	200.714.500,00	(14.670.000,00)	93,18	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.384.500,00	200.714.500,00	(14.670.000,00)	93,18	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	265.953.000,00	198.563.199,00	(67.389.801,00)	74,66	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	265.953.000,00	198.563.199,00	(67.389.801,00)	74,66	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006		FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	265.953.000,00	198.563.199,00	(67.389.801,00)	74,66	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	246.513.000,00	179.349.099,00	(67.163.901,00)	72,75	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.513.000,00	179.349.099,00	(67.163.901,00)	72,75	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	19.440.000,00	19.214.100,00	(225.900,00)	98,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.440.000,00	19.214.100,00	(225.900,00)	98,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	170.939.500,00	165.295.500,00	(5.644.000,00)	96,69	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	147.975.000,00	142.645.500,00	(5.329.500,00)	96,39	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0009		PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA	117.430.000,00	115.232.500,00	(2.197.500,00)	98,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	117.430.000,00	115.232.500,00	(2.197.500,00)	98,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.430.000,00	115.232.500,00	(2.197.500,00)	98,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011		MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	30.545.000,00	27.413.000,00	(3.132.000,00)	89,74	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	30.545.000,00	27.413.000,00	(3.132.000,00)	89,74	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.545.000,00	27.413.000,00	(3.132.000,00)	89,74	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.02		PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF	22.964.500,00	22.650.000,00	(314.500,00)	98,63	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001		PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF	22.964.500,00	22.650.000,00	(314.500,00)	98,63	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.964.500,00	22.650.000,00	(314.500,00)	98,63	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.964.500,00	22.650.000,00	(314.500,00)	98,63	
				JUMLAH BELANJA	4.256.404.227,00	3.932.033.639,00	(324.370.588,00)	92,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.016.404.227,00)	(3.699.367.098,00)	317.037.129,00	92,10	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.016.404.227,00)	(3.699.367.098,00)	317.037.129,00	92,10	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.0.00.0.00.08.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	65.480.000,00	(34.520.000,00)	65,48	
	3.27.0.00.0.00.08.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	65.480.000,00	(34.520.000,00)	65,48	
	3.27.0.00.0.00.08.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	65.480.000,00	(34.520.000,00)	65,48	
				JUMLAH PENDAPATAN	100.000.000,00	65.480.000,00	(34.520.000,00)	65,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	13.362.006.984,00	12.901.176.281,00	(460.830.703,00)	96,55	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.814.141.124,00	8.472.066.857,00	(342.074.267,00)	96,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.016.000,00	32.954.000,00	(62.000,00)	99,81	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	33.016.000,00	32.954.000,00	(62.000,00)	99,81	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.016.000,00	32.954.000,00	(62.000,00)	99,81	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.016.000,00	32.954.000,00	(62.000,00)	99,81	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.735.090.424,00	6.417.881.217,00	(317.209.207,00)	95,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.735.090.424,00	6.417.881.217,00	(317.209.207,00)	95,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.735.090.424,00	6.417.881.217,00	(317.209.207,00)	95,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.735.090.424,00	6.417.881.217,00	(317.209.207,00)	95,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	534.989.800,00	526.784.040,00	(8.205.760,00)	98,46	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	140.408.640,00	140.393.940,00	(14.700,00)	99,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.408.640,00	92.408.640,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.408.640,00	92.408.640,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	48.000.000,00	47.985.300,00	(14.700,00)	99,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	47.985.300,00	(14.700,00)	99,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.581.160,00	44.580.100,00	(1.060,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	44.581.160,00	44.580.100,00	(1.060,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.581.160,00	44.580.100,00	(1.060,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	350.000.000,00	341.810.000,00	(8.190.000,00)	97,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	341.810.000,00	(8.190.000,00)	97,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	341.810.000,00	(8.190.000,00)	97,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.033.144.900,00	1.016.559.900,00	(16.585.000,00)	98,39	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	58.000.000,00	57.977.000,00	(23.000,00)	99,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.000.000,00	57.977.000,00	(23.000,00)	99,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	57.977.000,00	(23.000,00)	99,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	975.144.900,00	958.582.900,00	(16.562.000,00)	98,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	975.144.900,00	958.582.900,00	(16.562.000,00)	98,30	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	975.144.900,00	958.582.900,00	(16.562.000,00)	98,30	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	477.900.000,00	477.887.700,00	(12.300,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	477.900.000,00	477.887.700,00	(12.300,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	477.900.000,00	477.887.700,00	(12.300,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.900.000,00	477.887.700,00	(12.300,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.297.601.060,00	4.180.486.525,00	(117.114.535,00)	97,27	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	4.297.601.060,00	4.180.486.525,00	(117.114.535,00)	97,27	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	4.297.601.060,00	4.180.486.525,00	(117.114.535,00)	97,27	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.413.797.560,00	3.317.543.885,00	(96.253.675,00)	97,18	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.413.797.560,00	3.317.543.885,00	(96.253.675,00)	97,18	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.02.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	883.803.500,00	862.942.640,00	(20.860.860,00)	97,63	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.02.2.06.0003	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	883.803.500,00	862.942.640,00	(20.860.860,00)	97,63	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	103.128.800,00	102.527.799,00	(601.001,00)	99,41	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	103.128.800,00	102.527.799,00	(601.001,00)	99,41	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.03.2.02.0015		PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH POTONG HEWAN	103.128.800,00	102.527.799,00	(601.001,00)	99,41	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	103.128.800,00	102.527.799,00	(601.001,00)	99,41	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.128.800,00	102.527.799,00	(601.001,00)	99,41	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	147.136.000,00	146.095.100,00	(1.040.900,00)	99,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	147.136.000,00	146.095.100,00	(1.040.900,00)	99,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.07.2.01.0005		PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	147.136.000,00	146.095.100,00	(1.040.900,00)	99,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	147.136.000,00	146.095.100,00	(1.040.900,00)	99,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.136.000,00	146.095.100,00	(1.040.900,00)	99,29	
				JUMLAH BELANJA	13.362.006.984,00	12.901.176.281,00	(460.830.703,00)	96,55	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(13.262.006.984,00)	(12.835.696.281,00)	426.310.703,00	96,78	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.262.006.984,00)	(12.835.696.281,00)	426.310.703,00	96,78	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	19.817.272.849,00	19.002.079.852,00	(815.192.997,00)	95,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.824.315.617,00	16.213.069.148,00	(611.246.469,00)	96,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	105.500.000,00	105.034.000,00	(466.000,00)	99,55	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	84.400.000,00	84.082.000,00	(318.000,00)	99,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.400.000,00	84.082.000,00	(318.000,00)	99,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.400.000,00	84.082.000,00	(318.000,00)	99,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	21.100.000,00	20.952.000,00	(148.000,00)	99,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.100.000,00	20.952.000,00	(148.000,00)	99,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	20.952.000,00	(148.000,00)	99,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.039.846.613,00	13.633.910.507,00	(405.936.106,00)	97,10	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	14.018.746.613,00	13.612.994.507,00	(405.752.106,00)	97,10	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.018.746.613,00	13.612.994.507,00	(405.752.106,00)	97,10	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	14.018.746.613,00	13.612.994.507,00	(405.752.106,00)	97,10	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	21.100.000,00	20.916.000,00	(184.000,00)	99,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.100.000,00	20.916.000,00	(184.000,00)	99,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	20.916.000,00	(184.000,00)	99,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	21.100.000,00	21.026.000,00	(74.000,00)	99,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	21.100.000,00	21.026.000,00	(74.000,00)	99,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.100.000,00	21.026.000,00	(74.000,00)	99,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	21.026.000,00	(74.000,00)	99,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.125.999.004,00	1.123.034.425,00	(2.964.579,00)	99,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	313.200.400,00	310.356.823,00	(2.843.577,00)	99,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	149.028.400,00	148.276.438,00	(751.962,00)	99,49	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.028.400,00	148.276.438,00	(751.962,00)	99,49	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	164.172.000,00	162.080.385,00	(2.091.615,00)	98,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.172.000,00	162.080.385,00	(2.091.615,00)	98,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.241.604,00	44.241.604,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	44.241.604,00	44.241.604,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.241.604,00	44.241.604,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	768.557.000,00	768.435.998,00	(121.002,00)	99,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	768.557.000,00	768.435.998,00	(121.002,00)	99,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.557.000,00	768.435.998,00	(121.002,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	944.920.000,00	788.349.675,00	(156.570.325,00)	83,43	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	88.000.000,00	58.959.675,00	(29.040.325,00)	66,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.000.000,00	58.959.675,00	(29.040.325,00)	66,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	58.959.675,00	(29.040.325,00)	66,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	856.920.000,00	729.390.000,00	(127.530.000,00)	85,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	856.920.000,00	729.390.000,00	(127.530.000,00)	85,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	856.920.000,00	729.390.000,00	(127.530.000,00)	85,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	586.950.000,00	541.714.541,00	(45.235.459,00)	92,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	461.950.000,00	441.714.541,00	(20.235.459,00)	95,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	461.950.000,00	441.714.541,00	(20.235.459,00)	95,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.950.000,00	441.714.541,00	(20.235.459,00)	95,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	125.000.000,00	100.000.000,00	(25.000.000,00)	80,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	100.000.000,00	(25.000.000,00)	80,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	100.000.000,00	(25.000.000,00)	80,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	170.400.000,00	170.281.937,00	(118.063,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	170.400.000,00	170.281.937,00	(118.063,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	170.400.000,00	170.281.937,00	(118.063,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	170.400.000,00	170.281.937,00	(118.063,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.400.000,00	170.281.937,00	(118.063,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	491.700.000,00	392.775.535,00	(98.924.465,00)	79,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	491.700.000,00	392.775.535,00	(98.924.465,00)	79,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.03.2.02.0009		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	491.700.000,00	392.775.535,00	(98.924.465,00)	79,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	420.200.000,00	321.396.250,00	(98.803.750,00)	76,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.200.000,00	321.396.250,00	(98.803.750,00)	76,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.03.2.02.0009	5.2	BELANJA MODAL	71.500.000,00	71.379.285,00	(120.715,00)	99,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.03.2.02.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.500.000,00	71.379.285,00	(120.715,00)	99,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.330.857.232,00	2.225.953.232,00	(104.904.000,00)	95,49	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	2.330.857.232,00	2.225.953.232,00	(104.904.000,00)	95,49	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.07.2.01.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	1.193.257.232,00	1.137.853.232,00	(55.404.000,00)	95,35	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.193.257.232,00	1.137.853.232,00	(55.404.000,00)	95,35	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.193.257.232,00	1.137.853.232,00	(55.404.000,00)	95,35	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.07.2.01.0006		PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN	1.137.600.000,00	1.088.100.000,00	(49.500.000,00)	95,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.137.600.000,00	1.088.100.000,00	(49.500.000,00)	95,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.137.600.000,00	1.088.100.000,00	(49.500.000,00)	95,64	
				JUMLAH BELANJA	19.817.272.849,00	19.002.079.852,00	(815.192.997,00)	95,88	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(19.817.272.849,00)	(19.002.079.852,00)	815.192.997,00	95,88	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(19.817.272.849,00)	(19.002.079.852,00)	815.192.997,00	95,88	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	727.357.500,00	27.357.500,00	103,90	
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	700.000.000,00	727.357.500,00	27.357.500,00	103,90	
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	700.000.000,00	727.357.500,00	27.357.500,00	103,90	
				JUMLAH PENDAPATAN	700.000.000,00	727.357.500,00	27.357.500,00	103,90	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	5.442.650.981,00	5.362.151.856,00	(80.499.125,00)	98,52	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.790.568.982,00	2.718.167.405,00	(72.401.577,00)	97,40	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.333.640.833,00	2.270.600.212,00	(63.040.621,00)	97,29	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.221.768.833,00	2.158.728.212,00	(63.040.621,00)	97,16	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.221.768.833,00	2.158.728.212,00	(63.040.621,00)	97,16	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.221.768.833,00	2.158.728.212,00	(63.040.621,00)	97,16	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	111.872.000,00	111.872.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	111.872.000,00	111.872.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.872.000,00	111.872.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	127.737.549,00	125.908.809,00	(1.828.740,00)	98,56	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.174.600,00	24.374.490,00	(800.110,00)	96,82	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.174.600,00	24.374.490,00	(800.110,00)	96,82	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.174.600,00	24.374.490,00	(800.110,00)	96,82	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.747.949,00	45.747.610,00	(339,00)	99,99	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	45.747.949,00	45.747.610,00	(339,00)	99,99	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.747.949,00	45.747.610,00	(339,00)	99,99	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	56.815.000,00	55.786.709,00	(1.028.291,00)	98,19	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	56.815.000,00	55.786.709,00	(1.028.291,00)	98,19	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.815.000,00	55.786.709,00	(1.028.291,00)	98,19	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	198.100.000,00	196.280.000,00	(1.820.000,00)	99,08	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.000.000,00	19.980.000,00	(1.020.000,00)	95,14	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	19.980.000,00	(1.020.000,00)	95,14	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	19.980.000,00	(1.020.000,00)	95,14	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	175.100.000,00	174.300.000,00	(800.000,00)	99,54	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	175.100.000,00	174.300.000,00	(800.000,00)	99,54	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.100.000,00	174.300.000,00	(800.000,00)	99,54	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	113.330.600,00	107.618.384,00	(5.712.216,00)	94,95	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	98.340.600,00	93.198.384,00	(5.142.216,00)	94,77	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	98.340.600,00	93.198.384,00	(5.142.216,00)	94,77	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.340.600,00	93.198.384,00	(5.142.216,00)	94,77	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.990.000,00	4.420.000,00	(570.000,00)	88,57	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.990.000,00	4.420.000,00	(570.000,00)	88,57	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	4.420.000,00	(570.000,00)	88,57	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	535.025.999,00	529.235.759,00	(5.790.240,00)	98,91	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	527.845.999,00	522.100.759,00	(5.745.240,00)	98,91	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	527.845.999,00	522.100.759,00	(5.745.240,00)	98,91	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	283.703.999,00	281.739.802,00	(1.964.197,00)	99,30	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.703.999,00	281.739.802,00	(1.964.197,00)	99,30	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	244.142.000,00	240.360.957,00	(3.781.043,00)	98,45	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.158.000,00	42.513.000,00	(3.645.000,00)	92,10	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.984.000,00	197.847.957,00	(136.043,00)	99,93	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.02		PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	7.180.000,00	7.135.000,00	(45.000,00)	99,37	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.02.0001		PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.180.000,00	7.135.000,00	(45.000,00)	99,37	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.180.000,00	7.135.000,00	(45.000,00)	99,37	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.180.000,00	7.135.000,00	(45.000,00)	99,37	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.076.650.000,00	2.076.607.300,00	(42.700,00)	99,99	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	2.076.650.000,00	2.076.607.300,00	(42.700,00)	99,99	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04.2.02.0003		PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	2.076.650.000,00	2.076.607.300,00	(42.700,00)	99,99	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.076.650.000,00	2.076.607.300,00	(42.700,00)	99,99	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.650.000,00	76.650.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.999.957.300,00	(42.700,00)	99,99	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	40.406.000,00	38.141.392,00	(2.264.608,00)	94,39	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	40.406.000,00	38.141.392,00	(2.264.608,00)	94,39	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	38.706.000,00	36.441.392,00	(2.264.608,00)	94,14	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.706.000,00	36.441.392,00	(2.264.608,00)	94,14	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.706.000,00	36.441.392,00	(2.264.608,00)	94,14	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.2.01.0002		PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	5.442.650.981,00	5.362.151.856,00	(80.499.125,00)	98,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.742.650.981,00)	(4.634.794.356,00)	107.856.625,00	97,72	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.742.650.981,00)	(4.634.794.356,00)	107.856.625,00	97,72	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	727.357.500,00	27.357.500,00	103,90	
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	700.000.000,00	727.357.500,00	27.357.500,00	103,90	
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	700.000.000,00	727.357.500,00	27.357.500,00	103,90	
				JUMLAH PENDAPATAN	700.000.000,00	727.357.500,00	27.357.500,00	103,90	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	528.523.750,00	490.640.489,00	(37.883.261,00)	92,83	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	528.373.750,00	490.490.489,00	(37.883.261,00)	92,83	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	528.373.750,00	490.490.489,00	(37.883.261,00)	92,83	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	148.468.500,00	142.562.850,00	(5.905.650,00)	96,02	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	148.468.500,00	142.562.850,00	(5.905.650,00)	96,02	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.468.500,00	142.562.850,00	(5.905.650,00)	96,02	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	368.955.250,00	336.977.639,00	(31.977.611,00)	91,33	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	368.955.250,00	336.977.639,00	(31.977.611,00)	91,33	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.955.250,00	336.977.639,00	(31.977.611,00)	91,33	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0006		EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04.2.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04.2.01.0003		PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPATUHAN PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI LINGKUP KABUPATEN/KOTA DALAM PENYAMPAIAN DATA KE SIINAS	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	528.523.750,00	490.640.489,00	(37.883.261,00)	92,83	
				SURPLUS / (DEFISIT)	171.476.250,00	236.717.011,00	65.240.761,00	138,04	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	171.476.250,00	236.717.011,00	65.240.761,00	138,04	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Pemerintahan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	4.924.182.008,00	4.724.377.763,00	(199.804.245,00)	95,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.924.182.008,00	4.724.377.763,00	(199.804.245,00)	95,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	4.894.182.008,00	4.694.377.763,00	(199.804.245,00)	95,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	4.488.031.408,00	4.290.053.963,00	(197.977.445,00)	95,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	208.031.408,00	207.617.196,00	(414.212,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.031.408,00	207.617.196,00	(414.212,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.280.000.000,00	4.082.436.767,00	(197.563.233,00)	95,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.280.000.000,00	4.082.436.767,00	(197.563.233,00)	95,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	89.071.800,00	87.545.800,00	(1.526.000,00)	98,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.271.800,00	69.110.800,00	(161.000,00)	99,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.271.800,00	69.110.800,00	(161.000,00)	99,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	19.800.000,00	18.435.000,00	(1.365.000,00)	93,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.800.000,00	18.435.000,00	(1.365.000,00)	93,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	317.078.800,00	316.778.000,00	(300.800,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	317.078.800,00	316.778.000,00	(300.800,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.078.800,00	316.778.000,00	(300.800,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003		EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	4.924.182.008,00	4.724.377.763,00	(199.804.245,00)	95,94	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.924.182.008,00)	(4.724.377.763,00)	199.804.245,00	95,94	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.924.182.008,00)	(4.724.377.763,00)	199.804.245,00	95,94	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		5	BELANJA DAERAH	18.629.218.825,00	16.845.386.536,00	(1.783.832.289,00)	90,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	18.629.218.825,00	16.845.386.536,00	(1.783.832.289,00)	90,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	18.629.218.825,00	16.845.386.536,00	(1.783.832.289,00)	90,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	18.617.480.925,00	16.833.650.736,00	(1.783.830.189,00)	90,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.617.480.925,00	16.833.650.736,00	(1.783.830.189,00)	90,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.796.480.925,00	9.987.150.736,00	(809.330.189,00)	92,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	7.630.000.000,00	6.687.500.000,00	(942.500.000,00)	87,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	191.000.000,00	159.000.000,00	(32.000.000,00)	83,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	5.369.500,00	5.367.450,00	(2.050,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.369.500,00	5.367.450,00	(2.050,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.369.500,00	5.367.450,00	(2.050,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	6.368.400,00	6.368.350,00	(50,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.368.400,00	6.368.350,00	(50,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.368.400,00	6.368.350,00	(50,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	18.629.218.825,00	16.845.386.536,00	(1.783.832.289,00)	90,42	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(18.629.218.825,00)	(16.845.386.536,00)	1.783.832.289,00	90,42	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.629.218.825,00)	(16.845.386.536,00)	1.783.832.289,00	90,42	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	158.990.436,00	148.441.060,00	(10.549.376,00)	93,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	158.990.436,00	148.441.060,00	(10.549.376,00)	93,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	105.230.436,00	104.706.060,00	(524.376,00)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	57.780.000,00	57.480.000,00	(300.000,00)	99,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.780.000,00	57.480.000,00	(300.000,00)	99,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.780.000,00	57.480.000,00	(300.000,00)	99,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	32.737.328,00	32.513.060,00	(224.268,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.737.328,00	32.513.060,00	(224.268,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.737.328,00	32.513.060,00	(224.268,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	14.713.108,00	14.713.000,00	(108,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.713.108,00	14.713.000,00	(108,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.713.108,00	14.713.000,00	(108,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	53.760.000,00	43.735.000,00	(10.025.000,00)	81,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	17.200.000,00	17.175.000,00	(25.000,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.200.000,00	17.175.000,00	(25.000,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	17.175.000,00	(25.000,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	21.340.000,00	11.340.000,00	(10.000.000,00)	53,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0003	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	158.990.436,00	148.441.060,00	(10.549.376,00)	93,36	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(158.990.436,00)	(148.441.060,00)	10.549.376,00	93,36	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(158.990.436,00)	(148.441.060,00)	10.549.376,00	93,36	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Administrasi Pembangunan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		5	BELANJA DAERAH	116.827.920,00	116.542.500,00	(285.420,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	116.827.920,00	116.542.500,00	(285.420,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	116.827.920,00	116.542.500,00	(285.420,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	16.059.400,00	16.039.100,00	(20.300,00)	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.059.400,00	16.039.100,00	(20.300,00)	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.059.400,00	16.039.100,00	(20.300,00)	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	37.572.800,00	37.401.400,00	(171.400,00)	99,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.572.800,00	37.401.400,00	(171.400,00)	99,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.572.800,00	37.401.400,00	(171.400,00)	99,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	63.195.720,00	63.102.000,00	(93.720,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	63.195.720,00	63.102.000,00	(93.720,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.195.720,00	63.102.000,00	(93.720,00)	99,85	
				JUMLAH BELANJA	116.827.920,00	116.542.500,00	(285.420,00)	99,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(116.827.920,00)	(116.542.500,00)	285.420,00	99,75	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(116.827.920,00)	(116.542.500,00)	285.420,00	99,75	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Umum

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	17.864.983.991,00	16.947.770.119,00	(917.213.872,00)	94,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.864.983.991,00	16.947.770.119,00	(917.213.872,00)	94,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	201.550.000,00	200.530.000,00	(1.020.000,00)	99,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	201.550.000,00	200.530.000,00	(1.020.000,00)	99,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	201.550.000,00	200.530.000,00	(1.020.000,00)	99,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.550.000,00	200.530.000,00	(1.020.000,00)	99,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	7.006.247.903,00	6.672.461.669,00	(333.786.234,00)	95,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	34.376.700,00	34.373.000,00	(3.700,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.376.700,00	34.373.000,00	(3.700,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.376.700,00	34.373.000,00	(3.700,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	89.521.115,00	89.509.200,00	(11.915,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.521.115,00	89.509.200,00	(11.915,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.521.115,00	89.509.200,00	(11.915,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.172.622.854,00	1.165.001.000,00	(7.621.854,00)	99,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	196.481.000,00	196.251.000,00	(230.000,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.481.000,00	196.251.000,00	(230.000,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	976.141.854,00	968.750.000,00	(7.391.854,00)	99,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	976.141.854,00	968.750.000,00	(7.391.854,00)	99,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	33.953.234,00	33.949.800,00	(3.434,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	33.953.234,00	33.949.800,00	(3.434,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.953.234,00	33.949.800,00	(3.434,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.703.174.000,00	2.532.585.264,00	(170.588.736,00)	93,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.703.174.000,00	2.532.585.264,00	(170.588.736,00)	93,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.703.174.000,00	2.532.585.264,00	(170.588.736,00)	93,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	2.972.600.000,00	2.817.043.405,00	(155.556.595,00)	94,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.972.600.000,00	2.817.043.405,00	(155.556.595,00)	94,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.972.600.000,00	2.817.043.405,00	(155.556.595,00)	94,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.478.922.850,00	2.407.017.755,00	(71.905.095,00)	97,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	968.685.850,00	957.311.875,00	(11.373.975,00)	98,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	968.685.850,00	957.311.875,00	(11.373.975,00)	98,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.685.850,00	957.311.875,00	(11.373.975,00)	98,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.281.680.000,00	1.227.930.500,00	(53.749.500,00)	95,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.278.740.000,00	1.224.990.500,00	(53.749.500,00)	95,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.278.740.000,00	1.224.990.500,00	(53.749.500,00)	95,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	228.557.000,00	221.775.380,00	(6.781.620,00)	97,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	53.557.000,00	52.274.740,00	(1.282.260,00)	97,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.557.000,00	52.274.740,00	(1.282.260,00)	97,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	175.000.000,00	169.500.640,00	(5.499.360,00)	96,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	169.500.640,00	(5.499.360,00)	96,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.914.190.000,00	2.794.294.446,00	(119.895.554,00)	95,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	558.200.000,00	554.116.933,00	(4.083.067,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	558.200.000,00	554.116.933,00	(4.083.067,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.200.000,00	554.116.933,00	(4.083.067,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.275.990.000,00	2.160.177.513,00	(115.812.487,00)	94,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.275.990.000,00	2.160.177.513,00	(115.812.487,00)	94,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.275.990.000,00	2.160.177.513,00	(115.812.487,00)	94,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.759.530.344,00	2.487.292.691,00	(272.237.653,00)	90,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.896.759.304,00	1.762.265.460,00	(134.493.844,00)	92,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.896.759.304,00	1.762.265.460,00	(134.493.844,00)	92,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.896.759.304,00	1.762.265.460,00	(134.493.844,00)	92,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	455.973.450,00	328.009.136,00	(127.964.314,00)	71,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	455.973.450,00	328.009.136,00	(127.964.314,00)	71,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.973.450,00	328.009.136,00	(127.964.314,00)	71,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	102.370.000,00	94.031.669,00	(8.338.331,00)	91,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	102.370.000,00	94.031.669,00	(8.338.331,00)	91,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.370.000,00	94.031.669,00	(8.338.331,00)	91,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	304.427.590,00	302.986.426,00	(1.441.164,00)	99,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	304.427.590,00	302.986.426,00	(1.441.164,00)	99,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.427.590,00	302.986.426,00	(1.441.164,00)	99,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.134.352.894,00	1.022.057.058,00	(112.295.836,00)	90,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	582.292.894,00	568.927.406,00	(13.365.488,00)	97,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	582.292.894,00	568.927.406,00	(13.365.488,00)	97,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	582.292.894,00	568.927.406,00	(13.365.488,00)	97,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	312.060.000,00	308.405.000,00	(3.655.000,00)	98,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	312.060.000,00	308.405.000,00	(3.655.000,00)	98,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.060.000,00	308.405.000,00	(3.655.000,00)	98,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	240.000.000,00	144.724.652,00	(95.275.348,00)	60,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	144.724.652,00	(95.275.348,00)	60,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	144.724.652,00	(95.275.348,00)	60,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	1.370.190.000,00	1.364.116.500,00	(6.073.500,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	720.000.000,00	715.600.000,00	(4.400.000,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	720.000.000,00	715.600.000,00	(4.400.000,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	715.600.000,00	(4.400.000,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	580.120.000,00	579.308.000,00	(812.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	580.120.000,00	579.308.000,00	(812.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.120.000,00	579.308.000,00	(812.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	70.070.000,00	69.208.500,00	(861.500,00)	98,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.070.000,00	69.208.500,00	(861.500,00)	98,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.070.000,00	69.208.500,00	(861.500,00)	98,77	
				JUMLAH BELANJA	17.864.983.991,00	16.947.770.119,00	(917.213.872,00)	94,86	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(17.864.983.991,00)	(16.947.770.119,00)	917.213.872,00	94,86	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.864.983.991,00)	(16.947.770.119,00)	917.213.872,00	94,86	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	2.082.203.900,00	2.061.038.371,00	(21.165.529,00)	98,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.082.203.900,00	2.061.038.371,00	(21.165.529,00)	98,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.082.203.900,00	2.061.038.371,00	(21.165.529,00)	98,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	609.094.238,00	588.437.971,00	(20.656.267,00)	96,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	609.094.238,00	588.437.971,00	(20.656.267,00)	96,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.094.238,00	588.437.971,00	(20.656.267,00)	96,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	1.175.916.000,00	1.175.916.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.175.916.000,00	1.175.916.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.916.000,00	1.175.916.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	297.193.662,00	296.684.400,00	(509.262,00)	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	232.993.662,00	232.751.400,00	(242.262,00)	99,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.993.662,00	232.751.400,00	(242.262,00)	99,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0003	5.2	BELANJA MODAL	64.200.000,00	63.933.000,00	(267.000,00)	99,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.200.000,00	63.933.000,00	(267.000,00)	99,58	
				JUMLAH BELANJA	2.082.203.900,00	2.061.038.371,00	(21.165.529,00)	98,98	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.082.203.900,00)	(2.061.038.371,00)	21.165.529,00	98,98	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.082.203.900,00)	(2.061.038.371,00)	21.165.529,00	98,98	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Organisasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		5	BELANJA DAERAH	365.253.940,00	356.462.464,00	(8.791.476,00)	97,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	365.253.940,00	356.462.464,00	(8.791.476,00)	97,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	365.253.940,00	356.462.464,00	(8.791.476,00)	97,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	107.287.800,00	106.773.255,00	(514.545,00)	99,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.287.800,00	76.773.255,00	(514.545,00)	99,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.287.800,00	76.773.255,00	(514.545,00)	99,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	100.741.500,00	94.984.820,00	(5.756.680,00)	94,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.741.500,00	94.984.820,00	(5.756.680,00)	94,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.741.500,00	94.984.820,00	(5.756.680,00)	94,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	107.305.800,00	105.140.069,00	(2.165.731,00)	97,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.937.800,00	23.996.469,00	(941.331,00)	96,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.937.800,00	23.996.469,00	(941.331,00)	96,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003	5.2	BELANJA MODAL	82.368.000,00	81.143.600,00	(1.224.400,00)	98,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.368.000,00	12.368.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000,00	68.775.600,00	(1.224.400,00)	98,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0004		MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	49.918.840,00	49.564.320,00	(354.520,00)	99,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.918.840,00	49.564.320,00	(354.520,00)	99,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.918.840,00	49.564.320,00	(354.520,00)	99,28	
				JUMLAH BELANJA	365.253.940,00	356.462.464,00	(8.791.476,00)	97,59	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(365.253.940,00)	(356.462.464,00)	8.791.476,00	97,59	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(365.253.940,00)	(356.462.464,00)	8.791.476,00	97,59	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010		5	BELANJA DAERAH	304.085.500,00	295.921.217,00	(8.164.283,00)	97,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	304.085.500,00	295.921.217,00	(8.164.283,00)	97,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	304.085.500,00	295.921.217,00	(8.164.283,00)	97,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	146.186.800,00	142.072.918,00	(4.113.882,00)	97,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	146.186.800,00	142.072.918,00	(4.113.882,00)	97,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.186.800,00	142.072.918,00	(4.113.882,00)	97,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	91.504.700,00	87.550.300,00	(3.954.400,00)	95,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.704.700,00	58.751.500,00	(3.953.200,00)	93,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.704.700,00	58.751.500,00	(3.953.200,00)	93,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	28.800.000,00	28.798.800,00	(1.200,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.800.000,00	28.798.800,00	(1.200,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	66.394.000,00	66.297.999,00	(96.001,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	58.585.000,00	58.488.999,00	(96.001,00)	99,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.585.000,00	58.488.999,00	(96.001,00)	99,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	7.809.000,00	7.809.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.809.000,00	7.809.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	304.085.500,00	295.921.217,00	(8.164.283,00)	97,31	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(304.085.500,00)	(295.921.217,00)	8.164.283,00	97,31	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(304.085.500,00)	(295.921.217,00)	8.164.283,00	97,31	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Perencanaan dan Keuangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011		5	BELANJA DAERAH	12.136.929.983,00	11.731.034.296,00	(405.895.687,00)	96,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.136.929.983,00	11.731.034.296,00	(405.895.687,00)	96,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	405.765.600,00	403.656.053,00	(2.109.547,00)	99,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	205.380.400,00	204.906.700,00	(473.700,00)	99,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	205.380.400,00	204.906.700,00	(473.700,00)	99,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.380.400,00	204.906.700,00	(473.700,00)	99,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.316.000,00	5.315.800,00	(200,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.316.000,00	5.315.800,00	(200,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.316.000,00	5.315.800,00	(200,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	568.700,00	552.600,00	(16.100,00)	97,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	568.700,00	552.600,00	(16.100,00)	97,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.700,00	552.600,00	(16.100,00)	97,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.349.100,00	6.328.450,00	(20.650,00)	99,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.349.100,00	6.328.450,00	(20.650,00)	99,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.349.100,00	6.328.450,00	(20.650,00)	99,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	10.054.200,00	10.033.200,00	(21.000,00)	99,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.054.200,00	10.033.200,00	(21.000,00)	99,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.054.200,00	10.033.200,00	(21.000,00)	99,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	20.798.400,00	20.650.700,00	(147.700,00)	99,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.798.400,00	20.650.700,00	(147.700,00)	99,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.798.400,00	20.650.700,00	(147.700,00)	99,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	157.298.800,00	155.868.603,00	(1.430.197,00)	99,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	157.298.800,00	155.868.603,00	(1.430.197,00)	99,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.298.800,00	155.868.603,00	(1.430.197,00)	99,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.698.803.063,00	11.295.237.093,00	(403.565.970,00)	96,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.093.554.683,00	10.690.484.743,00	(403.069.940,00)	96,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.093.554.683,00	10.690.484.743,00	(403.069.940,00)	96,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.093.554.683,00	10.690.484.743,00	(403.069.940,00)	96,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	598.309.000,00	597.925.000,00	(384.000,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	598.309.000,00	597.925.000,00	(384.000,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.309.000,00	597.925.000,00	(384.000,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	3.417.580,00	3.325.350,00	(92.230,00)	97,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.417.580,00	3.325.350,00	(92.230,00)	97,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.417.580,00	3.325.350,00	(92.230,00)	97,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	896.800,00	877.000,00	(19.800,00)	97,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	896.800,00	877.000,00	(19.800,00)	97,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.800,00	877.000,00	(19.800,00)	97,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0006		PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	32.361.320,00	32.141.150,00	(220.170,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	4.005.720,00	3.949.500,00	(56.220,00)	98,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.005.720,00	3.949.500,00	(56.220,00)	98,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.005.720,00	3.949.500,00	(56.220,00)	98,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	4.687.600,00	4.577.800,00	(109.800,00)	97,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.687.600,00	4.577.800,00	(109.800,00)	97,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.687.600,00	4.577.800,00	(109.800,00)	97,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	23.668.000,00	23.613.850,00	(54.150,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.668.000,00	23.613.850,00	(54.150,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.668.000,00	23.613.850,00	(54.150,00)	99,77	
				JUMLAH BELANJA	12.136.929.983,00	11.731.034.296,00	(405.895.687,00)	96,65	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(12.136.929.983,00)	(11.731.034.296,00)	405.895.687,00	96,65	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.136.929.983,00)	(11.731.034.296,00)	405.895.687,00	96,65	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD Kab. Sigi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	29.593.919.724,00	28.901.537.455,00	(692.382.269,00)	97,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.009.784.588,00	20.429.173.728,00	(580.610.860,00)	97,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.000.000,00	28.860.000,00	(140.000,00)	99,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.000.000,00	28.860.000,00	(140.000,00)	99,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	28.860.000,00	(140.000,00)	99,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	28.860.000,00	(140.000,00)	99,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.450.059.953,00	3.331.738.620,00	(118.321.333,00)	96,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.092.083.953,00	2.987.925.620,00	(104.158.333,00)	96,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.092.083.953,00	2.987.925.620,00	(104.158.333,00)	96,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.092.083.953,00	2.987.925.620,00	(104.158.333,00)	96,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	357.976.000,00	343.813.000,00	(14.163.000,00)	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	357.976.000,00	343.813.000,00	(14.163.000,00)	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.976.000,00	343.813.000,00	(14.163.000,00)	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.233.261.185,00	3.211.463.993,00	(21.797.192,00)	99,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	91.172.680,00	89.565.040,00	(1.607.640,00)	98,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	66.172.680,00	65.119.725,00	(1.052.955,00)	98,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.172.680,00	65.119.725,00	(1.052.955,00)	98,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.445.315,00	(554.685,00)	97,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.000.000,00	24.445.315,00	(554.685,00)	97,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.311.856.100,00	1.292.763.800,00	(19.092.300,00)	98,54	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	413.439.380,00	411.910.589,00	(1.528.791,00)	99,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.439.380,00	411.910.589,00	(1.528.791,00)	99,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	898.416.720,00	880.853.211,00	(17.563.509,00)	98,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	898.416.720,00	880.853.211,00	(17.563.509,00)	98,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	153.862.571,00	152.900.100,00	(962.471,00)	99,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	153.862.571,00	152.900.100,00	(962.471,00)	99,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.862.571,00	152.900.100,00	(962.471,00)	99,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	205.401.000,00	205.300.000,00	(101.000,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	205.401.000,00	205.300.000,00	(101.000,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.401.000,00	205.300.000,00	(101.000,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.470.968.834,00	1.470.935.053,00	(33.781,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.470.968.834,00	1.470.935.053,00	(33.781,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.470.968.834,00	1.470.935.053,00	(33.781,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.204.121.100,00	2.036.493.135,00	(167.627.965,00)	92,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	88.783.800,00	88.095.100,00	(688.700,00)	99,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	88.783.800,00	88.095.100,00	(688.700,00)	99,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.783.800,00	88.095.100,00	(688.700,00)	99,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	336.000.000,00	240.673.035,00	(95.326.965,00)	71,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	336.000.000,00	240.673.035,00	(95.326.965,00)	71,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.000.000,00	240.673.035,00	(95.326.965,00)	71,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.779.337.300,00	1.707.725.000,00	(71.612.300,00)	95,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.779.337.300,00	1.707.725.000,00	(71.612.300,00)	95,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.779.337.300,00	1.707.725.000,00	(71.612.300,00)	95,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	253.303.400,00	224.884.690,00	(28.418.710,00)	88,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	192.413.400,00	164.741.690,00	(27.671.710,00)	85,61	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	192.413.400,00	164.741.690,00	(27.671.710,00)	85,61	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.413.400,00	164.741.690,00	(27.671.710,00)	85,61	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	60.890.000,00	60.143.000,00	(747.000,00)	98,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	60.890.000,00	60.143.000,00	(747.000,00)	98,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.890.000,00	60.143.000,00	(747.000,00)	98,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	10.974.388.950,00	10.731.958.290,00	(242.430.660,00)	97,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	10.884.388.950,00	10.641.988.290,00	(242.400.660,00)	97,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.884.388.950,00	10.641.988.290,00	(242.400.660,00)	97,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.884.388.950,00	10.641.988.290,00	(242.400.660,00)	97,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	90.000.000,00	89.970.000,00	(30.000,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	89.970.000,00	(30.000,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.970.000,00	(30.000,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	865.650.000,00	863.775.000,00	(1.875.000,00)	99,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	350.750.000,00	349.832.000,00	(918.000,00)	99,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	350.750.000,00	349.832.000,00	(918.000,00)	99,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.750.000,00	349.832.000,00	(918.000,00)	99,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	514.900.000,00	513.943.000,00	(957.000,00)	99,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	514.900.000,00	513.943.000,00	(957.000,00)	99,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.900.000,00	513.943.000,00	(957.000,00)	99,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8.584.135.136,00	8.472.363.727,00	(111.771.409,00)	98,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	120.900.000,00	120.900.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001		PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004		FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	100.904.000,00	100.600.000,00	(304.000,00)	99,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001		PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	40.600.000,00	40.400.000,00	(200.000,00)	99,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.600.000,00	40.400.000,00	(200.000,00)	99,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	40.400.000,00	(200.000,00)	99,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003		PEMBAHASAN APBD	19.704.000,00	19.680.000,00	(24.000,00)	99,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.704.000,00	19.680.000,00	(24.000,00)	99,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.704.000,00	19.680.000,00	(24.000,00)	99,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006		PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	40.600.000,00	40.520.000,00	(80.000,00)	99,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	40.600.000,00	40.520.000,00	(80.000,00)	99,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	40.520.000,00	(80.000,00)	99,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004		PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	2.026.306.745,00	1.915.456.900,00	(110.849.845,00)	94,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	1.026.500.000,00	947.580.000,00	(78.920.000,00)	92,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.026.500.000,00	947.580.000,00	(78.920.000,00)	92,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.026.500.000,00	947.580.000,00	(78.920.000,00)	92,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	999.806.745,00	967.876.900,00	(31.929.845,00)	96,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	999.806.745,00	967.876.900,00	(31.929.845,00)	96,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.806.745,00	967.876.900,00	(31.929.845,00)	96,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.07		PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	557.723.200,00	557.300.000,00	(423.200,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.07.0002		PENYUSUNAN BAHAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	557.723.200,00	557.300.000,00	(423.200,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	557.723.200,00	557.300.000,00	(423.200,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.723.200,00	557.300.000,00	(423.200,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	5.274.301.191,00	5.274.106.827,00	(194.364,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	5.187.301.191,00	5.187.754.827,00	453.636,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.187.301.191,00	5.187.754.827,00	453.636,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.187.301.191,00	5.187.754.827,00	453.636,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	29.000.000,00	28.932.000,00	(68.000,00)	99,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	28.932.000,00	(68.000,00)	99,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	28.932.000,00	(68.000,00)	99,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0005		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA KHUSUS	58.000.000,00	57.420.000,00	(580.000,00)	99,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0005	5.1	BELANJA OPERASI	58.000.000,00	57.420.000,00	(580.000,00)	99,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	57.420.000,00	(580.000,00)	99,00	
				JUMLAH BELANJA	29.593.919.724,00	28.901.537.455,00	(692.382.269,00)	97,66	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(29.593.919.724,00)	(28.901.537.455,00)	692.382.269,00	97,66	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(29.593.919.724,00)	(28.901.537.455,00)	692.382.269,00	97,66	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	506.382.750,00	494.583.193,00	(11.799.557,00)	97,66	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	506.382.750,00	494.583.193,00	(11.799.557,00)	97,66	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	410.627.750,00	408.515.650,00	(2.112.100,00)	99,48	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0005		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH, REFORMASI BIROKRASI	410.627.750,00	408.515.650,00	(2.112.100,00)	99,48	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	410.627.750,00	408.515.650,00	(2.112.100,00)	99,48	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.627.750,00	408.515.650,00	(2.112.100,00)	99,48	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	95.755.000,00	86.067.543,00	(9.687.457,00)	89,88	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0004		SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN	95.755.000,00	86.067.543,00	(9.687.457,00)	89,88	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	95.755.000,00	86.067.543,00	(9.687.457,00)	89,88	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.755.000,00	86.067.543,00	(9.687.457,00)	89,88	
				JUMLAH BELANJA	506.382.750,00	494.583.193,00	(11.799.557,00)	97,66	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(506.382.750,00)	(494.583.193,00)	11.799.557,00	97,66	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(506.382.750,00)	(494.583.193,00)	11.799.557,00	97,66	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	6.247.650.718,00	5.939.469.075,00	(308.181.643,00)	95,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.923.689.238,00	4.663.738.676,00	(259.950.562,00)	94,72	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	229.581.874,00	229.276.491,00	(305.383,00)	99,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.758.394,00	7.707.100,00	(51.294,00)	99,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.758.394,00	7.707.100,00	(51.294,00)	99,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.758.394,00	7.707.100,00	(51.294,00)	99,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.860.100,00	4.844.100,00	(16.000,00)	99,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.860.100,00	4.844.100,00	(16.000,00)	99,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.860.100,00	4.844.100,00	(16.000,00)	99,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.860.100,00	4.836.100,00	(24.000,00)	99,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.860.100,00	4.836.100,00	(24.000,00)	99,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.860.100,00	4.836.100,00	(24.000,00)	99,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.503.900,00	2.503.800,00	(100,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.503.900,00	2.503.800,00	(100,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.503.900,00	2.503.800,00	(100,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.018.700,00	4.999.800,00	(18.900,00)	99,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.018.700,00	4.999.800,00	(18.900,00)	99,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.018.700,00	4.999.800,00	(18.900,00)	99,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	18.973.600,00	18.963.650,00	(9.950,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.973.600,00	18.963.650,00	(9.950,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.973.600,00	18.963.650,00	(9.950,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	185.607.080,00	185.421.941,00	(185.139,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	185.607.080,00	185.421.941,00	(185.139,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.607.080,00	185.421.941,00	(185.139,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.016.082.054,00	2.882.694.601,00	(133.387.453,00)	95,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.735.941.864,00	2.605.762.707,00	(130.179.157,00)	95,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.735.941.864,00	2.605.762.707,00	(130.179.157,00)	95,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.735.941.864,00	2.605.762.707,00	(130.179.157,00)	95,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	197.462.370,00	194.358.384,00	(3.103.986,00)	98,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	197.462.370,00	194.358.384,00	(3.103.986,00)	98,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.462.370,00	194.358.384,00	(3.103.986,00)	98,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	82.677.820,00	82.573.510,00	(104.310,00)	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	67.677.820,00	67.644.010,00	(33.810,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.677.820,00	67.644.010,00	(33.810,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.929.500,00	(70.500,00)	99,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.929.500,00	(70.500,00)	99,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	220.670.510,00	219.965.480,00	(705.030,00)	99,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.386.040,00	14.385.220,00	(820,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.386.040,00	14.385.220,00	(820,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.386.040,00	14.385.220,00	(820,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.347.470,00	18.347.426,00	(44,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.347.470,00	18.347.426,00	(44,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.347.470,00	18.347.426,00	(44,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.510.000,00	5.508.000,00	(2.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.510.000,00	5.508.000,00	(2.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00	5.508.000,00	(2.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	182.427.000,00	181.724.834,00	(702.166,00)	99,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	182.427.000,00	181.724.834,00	(702.166,00)	99,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.427.000,00	181.724.834,00	(702.166,00)	99,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	645.000.000,00	551.115.701,00	(93.884.299,00)	85,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	645.000.000,00	551.115.701,00	(93.884.299,00)	85,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.676.390,00	(323.610,00)	99,28	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.676.390,00	(323.610,00)	99,28	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	600.000.000,00	506.439.311,00	(93.560.689,00)	84,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	306.439.311,00	(93.560.689,00)	76,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0009	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	447.500.000,00	420.870.365,00	(26.629.635,00)	94,04	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	409.500.000,00	382.870.365,00	(26.629.635,00)	93,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	409.500.000,00	382.870.365,00	(26.629.635,00)	93,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.500.000,00	382.870.365,00	(26.629.635,00)	93,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	364.854.800,00	359.816.038,00	(5.038.762,00)	98,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	353.724.800,00	350.097.038,00	(3.627.762,00)	98,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	353.724.800,00	350.097.038,00	(3.627.762,00)	98,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.724.800,00	350.097.038,00	(3.627.762,00)	98,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11.130.000,00	9.719.000,00	(1.411.000,00)	87,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.130.000,00	9.719.000,00	(1.411.000,00)	87,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.130.000,00	9.719.000,00	(1.411.000,00)	87,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	529.305.500,00	525.719.387,00	(3.586.113,00)	99,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	345.312.500,00	341.837.600,00	(3.474.900,00)	98,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001		ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	4.581.000,00	4.581.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.581.000,00	4.581.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.581.000,00	4.581.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002		KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA	999.900,00	999.900,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	999.900,00	999.900,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.900,00	999.900,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	28.612.000,00	28.591.400,00	(20.600,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	28.612.000,00	28.591.400,00	(20.600,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.612.000,00	28.591.400,00	(20.600,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	20.100.200,00	20.008.400,00	(91.800,00)	99,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.100.200,00	20.008.400,00	(91.800,00)	99,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.100.200,00	20.008.400,00	(91.800,00)	99,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	46.287.000,00	46.267.000,00	(20.000,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	46.287.000,00	46.267.000,00	(20.000,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.287.000,00	46.267.000,00	(20.000,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006		PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN	27.685.400,00	27.634.900,00	(50.500,00)	99,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.685.400,00	27.634.900,00	(50.500,00)	99,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.685.400,00	27.634.900,00	(50.500,00)	99,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	217.047.000,00	213.755.000,00	(3.292.000,00)	98,48	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	217.047.000,00	213.755.000,00	(3.292.000,00)	98,48	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.047.000,00	213.755.000,00	(3.292.000,00)	98,48	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.455.000,00	10.454.870,00	(130,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0001		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.400.000,00	4.399.978,00	(22,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	4.399.978,00	(22,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.399.978,00	(22,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002		PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0003		PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.155.000,00	2.154.892,00	(108,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.155.000,00	2.154.892,00	(108,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.155.000,00	2.154.892,00	(108,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	173.538.000,00	173.426.917,00	(111.083,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001		KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	68.798.100,00	68.767.205,00	(30.895,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	68.798.100,00	68.767.205,00	(30.895,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.798.100,00	68.767.205,00	(30.895,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0002		PENGENDALIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH	1.377.900,00	1.377.900,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.377.900,00	1.377.900,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.377.900,00	1.377.900,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003		MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	103.362.000,00	103.281.812,00	(80.188,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	103.362.000,00	103.281.812,00	(80.188,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.362.000,00	103.281.812,00	(80.188,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	794.655.980,00	750.011.012,00	(44.644.968,00)	94,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	447.625.470,00	431.982.500,00	(15.642.970,00)	96,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	12.826.760,00	12.250.800,00	(575.960,00)	95,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.826.760,00	12.250.800,00	(575.960,00)	95,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.826.760,00	12.250.800,00	(575.960,00)	95,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	7.940.800,00	7.824.000,00	(116.800,00)	98,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.940.800,00	7.824.000,00	(116.800,00)	98,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.940.800,00	7.824.000,00	(116.800,00)	98,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	5.458.800,00	5.255.200,00	(203.600,00)	96,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.458.800,00	5.255.200,00	(203.600,00)	96,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.458.800,00	5.255.200,00	(203.600,00)	96,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	7.981.800,00	7.828.400,00	(153.400,00)	98,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.981.800,00	7.828.400,00	(153.400,00)	98,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.981.800,00	7.828.400,00	(153.400,00)	98,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	76.684.910,00	76.115.300,00	(569.610,00)	99,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	76.684.910,00	76.115.300,00	(569.610,00)	99,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.684.910,00	76.115.300,00	(569.610,00)	99,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	4.408.800,00	4.341.000,00	(67.800,00)	98,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.408.800,00	4.341.000,00	(67.800,00)	98,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.408.800,00	4.341.000,00	(67.800,00)	98,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	145.537.100,00	136.742.300,00	(8.794.800,00)	93,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	145.537.100,00	136.742.300,00	(8.794.800,00)	93,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.537.100,00	136.742.300,00	(8.794.800,00)	93,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	186.786.500,00	181.625.500,00	(5.161.000,00)	97,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	186.786.500,00	181.625.500,00	(5.161.000,00)	97,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.786.500,00	181.625.500,00	(5.161.000,00)	97,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	161.314.740,00	136.891.012,00	(24.423.728,00)	84,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	45.005.300,00	43.565.337,00	(1.439.963,00)	96,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.005.300,00	43.565.337,00	(1.439.963,00)	96,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.005.300,00	43.565.337,00	(1.439.963,00)	96,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	60.720.000,00	38.078.200,00	(22.641.800,00)	62,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.720.000,00	38.078.200,00	(22.641.800,00)	62,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.720.000,00	38.078.200,00	(22.641.800,00)	62,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	11.130.400,00	11.130.400,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.130.400,00	11.130.400,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.130.400,00	11.130.400,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	17.569.040,00	17.227.075,00	(341.965,00)	98,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	17.569.040,00	17.227.075,00	(341.965,00)	98,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.569.040,00	17.227.075,00	(341.965,00)	98,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	185.715.770,00	181.137.500,00	(4.578.270,00)	97,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	41.823.750,00	41.292.600,00	(531.150,00)	98,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.823.750,00	41.292.600,00	(531.150,00)	98,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.823.750,00	41.292.600,00	(531.150,00)	98,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	10.332.120,00	9.985.200,00	(346.920,00)	96,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.332.120,00	9.985.200,00	(346.920,00)	96,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.332.120,00	9.985.200,00	(346.920,00)	96,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	27.865.000,00	27.597.000,00	(268.000,00)	99,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.865.000,00	27.597.000,00	(268.000,00)	99,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.865.000,00	27.597.000,00	(268.000,00)	99,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	19.461.000,00	18.898.000,00	(563.000,00)	97,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.461.000,00	18.898.000,00	(563.000,00)	97,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.461.000,00	18.898.000,00	(563.000,00)	97,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	35.431.900,00	35.068.100,00	(363.800,00)	98,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.431.900,00	35.068.100,00	(363.800,00)	98,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.431.900,00	35.068.100,00	(363.800,00)	98,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	9.716.000,00	9.670.000,00	(46.000,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.716.000,00	9.670.000,00	(46.000,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.716.000,00	9.670.000,00	(46.000,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	10.420.000,00	8.100.000,00	(2.320.000,00)	77,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.420.000,00	8.100.000,00	(2.320.000,00)	77,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.420.000,00	8.100.000,00	(2.320.000,00)	77,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	30.666.000,00	30.526.600,00	(139.400,00)	99,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.666.000,00	5.629.300,00	(36.700,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.666.000,00	5.629.300,00	(36.700,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.897.300,00	(102.700,00)	99,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.897.300,00	(102.700,00)	99,58	
				JUMLAH BELANJA	6.247.650.718,00	5.939.469.075,00	(308.181.643,00)	95,06	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.247.650.718,00)	(5.939.469.075,00)	308.181.643,00	95,06	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.247.650.718,00)	(5.939.469.075,00)	308.181.643,00	95,06	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.176.434.632.113,00	1.093.369.434.427,98	(83.065.197.685,02)	92,93	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.982.311.617,00	11.319.673.092,38	(662.638.524,62)	94,46	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.337.214.390,00	2.337.214.390,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.645.097.227,00	8.982.458.702,38	(662.638.524,62)	93,12	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.151.046.082.875,00	1.068.727.289.084,60	(82.318.793.790,40)	92,84	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.078.528.525.428,00	1.008.552.587.476,00	(69.975.937.952,00)	93,51	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.517.557.447,00	60.174.701.608,60	(12.342.855.838,40)	82,97	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.406.237.621,00	13.322.472.251,00	(83.765.370,00)	99,37	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.406.237.621,00	13.322.472.251,00	(83.765.370,00)	99,37	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.176.434.632.113,00	1.093.369.434.427,98	(83.065.197.685,02)	92,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	427.271.494.804,00	357.870.960.335,00	(69.400.534.469,00)	83,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	191.921.860.480,00	153.277.747.221,00	(38.644.113.259,00)	79,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	125.076.787,00	125.062.387,00	(14.400,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	24.006.587,00	24.006.587,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.006.587,00	24.006.587,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.006.587,00	24.006.587,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	84.370.200,00	84.356.000,00	(14.200,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	84.370.200,00	84.356.000,00	(14.200,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.370.200,00	84.356.000,00	(14.200,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	182.140.169.715,00	143.975.833.764,00	(38.164.335.951,00)	79,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	181.040.206.275,00	142.942.168.364,00	(38.098.037.911,00)	78,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	181.040.206.275,00	142.942.168.364,00	(38.098.037.911,00)	78,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	181.040.206.275,00	142.942.168.364,00	(38.098.037.911,00)	78,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	764.112.000,00	698.582.000,00	(65.530.000,00)	91,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	764.112.000,00	698.582.000,00	(65.530.000,00)	91,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764.112.000,00	698.582.000,00	(65.530.000,00)	91,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	335.851.440,00	335.083.400,00	(768.040,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	335.851.440,00	335.083.400,00	(768.040,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.851.440,00	335.083.400,00	(768.040,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	5.150.000,00	5.130.000,00	(20.000,00)	99,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.450.000,00	2.430.000,00	(20.000,00)	99,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.450.000,00	2.430.000,00	(20.000,00)	99,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.430.000,00	(20.000,00)	99,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	153.750.000,00	152.219.600,00	(1.530.400,00)	99,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	153.750.000,00	152.219.600,00	(1.530.400,00)	99,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	153.750.000,00	152.219.600,00	(1.530.400,00)	99,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.750.000,00	152.219.600,00	(1.530.400,00)	99,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	902.414.333,00	878.371.719,00	(24.042.614,00)	97,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	45.000.000,00	44.989.422,00	(10.578,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.989.422,00	(10.578,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.989.422,00	(10.578,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	32.722.800,00	32.722.800,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.722.800,00	32.722.800,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.722.800,00	32.722.800,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	74.681.446,00	74.564.387,00	(117.059,00)	99,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	59.681.446,00	59.564.387,00	(117.059,00)	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.681.446,00	59.564.387,00	(117.059,00)	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	29.609.887,00	28.835.000,00	(774.887,00)	97,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.609.887,00	28.835.000,00	(774.887,00)	97,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.609.887,00	28.835.000,00	(774.887,00)	97,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	57.640.000,00	57.638.000,00	(2.000,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	57.640.000,00	57.638.000,00	(2.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.640.000,00	57.638.000,00	(2.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	588.260.200,00	565.122.110,00	(23.138.090,00)	96,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	588.260.200,00	565.122.110,00	(23.138.090,00)	96,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.260.200,00	565.122.110,00	(23.138.090,00)	96,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.393.625.125,00	4.318.371.210,00	(75.253.915,00)	98,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	3.581.000.000,00	3.579.000.000,00	(2.000.000,00)	99,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.581.000.000,00	3.579.000.000,00	(2.000.000,00)	99,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.581.000.000,00	3.579.000.000,00	(2.000.000,00)	99,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	400.595.000,00	383.435.561,00	(17.159.439,00)	95,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	400.595.000,00	383.435.561,00	(17.159.439,00)	95,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.595.000,00	383.435.561,00	(17.159.439,00)	95,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	362.030.125,00	355.935.649,00	(6.094.476,00)	98,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	362.030.125,00	355.935.649,00	(6.094.476,00)	98,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	362.030.125,00	355.935.649,00	(6.094.476,00)	98,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0008		PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0008	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0008	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.288.081.120,00	1.933.086.366,00	(354.994.754,00)	84,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	294.800.000,00	229.033.430,00	(65.766.570,00)	77,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	264.800.000,00	206.555.930,00	(58.244.070,00)	78,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.800.000,00	206.555.930,00	(58.244.070,00)	78,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	22.477.500,00	(7.522.500,00)	74,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	22.477.500,00	(7.522.500,00)	74,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.993.281.120,00	1.704.052.936,00	(289.228.184,00)	85,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.993.281.120,00	1.704.052.936,00	(289.228.184,00)	85,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.993.281.120,00	1.704.052.936,00	(289.228.184,00)	85,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.913.593.400,00	1.889.672.175,00	(23.921.225,00)	98,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	585.058.400,00	573.574.597,00	(11.483.803,00)	98,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	585.058.400,00	573.574.597,00	(11.483.803,00)	98,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.058.400,00	573.574.597,00	(11.483.803,00)	98,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	363.860.000,00	362.423.073,00	(1.436.927,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	363.860.000,00	362.423.073,00	(1.436.927,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.860.000,00	362.423.073,00	(1.436.927,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	944.545.000,00	933.544.505,00	(11.000.495,00)	98,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	799.545.000,00	788.648.368,00	(10.896.632,00)	98,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.545.000,00	788.648.368,00	(10.896.632,00)	98,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011	5.2	BELANJA MODAL	145.000.000,00	144.896.137,00	(103.863,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.000.000,00	144.896.137,00	(103.863,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	233.534.336.324,00	202.948.849.623,00	(30.585.486.701,00)	86,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	2.353.056.480,00	2.036.417.160,00	(316.639.320,00)	86,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	81.752.800,00	74.776.800,00	(6.976.000,00)	91,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	81.752.800,00	74.776.800,00	(6.976.000,00)	91,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.752.800,00	74.776.800,00	(6.976.000,00)	91,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	61.878.800,00	59.878.800,00	(2.000.000,00)	96,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.878.800,00	59.878.800,00	(2.000.000,00)	96,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.878.800,00	59.878.800,00	(2.000.000,00)	96,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0003		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	53.650.000,00	38.432.000,00	(15.218.000,00)	71,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	53.650.000,00	38.432.000,00	(15.218.000,00)	71,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.650.000,00	38.432.000,00	(15.218.000,00)	71,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0004		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	10.500.000,00	9.520.000,00	(980.000,00)	90,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	9.520.000,00	(980.000,00)	90,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	9.520.000,00	(980.000,00)	90,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	1.596.597.640,00	1.334.914.760,00	(261.682.880,00)	83,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.596.597.640,00	1.334.914.760,00	(261.682.880,00)	83,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.596.597.640,00	1.334.914.760,00	(261.682.880,00)	83,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	542.233.640,00	517.644.800,00	(24.588.840,00)	95,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	517.233.640,00	492.644.800,00	(24.588.840,00)	95,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.233.640,00	492.644.800,00	(24.588.840,00)	95,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0009		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	1.458.400,00	0,00	(1.458.400,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.458.400,00	0,00	(1.458.400,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.458.400,00	0,00	(1.458.400,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0010		KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN	2.458.400,00	850.000,00	(1.608.400,00)	34,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.458.400,00	850.000,00	(1.608.400,00)	34,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.458.400,00	850.000,00	(1.608.400,00)	34,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0011		KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	1.458.400,00	400.000,00	(1.058.400,00)	27,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.458.400,00	400.000,00	(1.058.400,00)	27,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.458.400,00	400.000,00	(1.058.400,00)	27,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0013		PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	1.068.400,00	0,00	(1.068.400,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.068.400,00	0,00	(1.068.400,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.068.400,00	0,00	(1.068.400,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	1.532.858.100,00	1.432.899.459,00	(99.958.641,00)	93,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0001		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	147.330.000,00	101.278.059,00	(46.051.941,00)	68,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	147.330.000,00	101.278.059,00	(46.051.941,00)	68,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.330.000,00	101.278.059,00	(46.051.941,00)	68,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	2.210.000,00	1.700.000,00	(510.000,00)	76,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.210.000,00	1.700.000,00	(510.000,00)	76,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	1.700.000,00	(510.000,00)	76,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0003		PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	58.080.000,00	54.859.000,00	(3.221.000,00)	94,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	58.080.000,00	54.859.000,00	(3.221.000,00)	94,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.080.000,00	54.859.000,00	(3.221.000,00)	94,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0005		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	372.600.000,00	367.050.000,00	(5.550.000,00)	98,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	372.600.000,00	367.050.000,00	(5.550.000,00)	98,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.600.000,00	367.050.000,00	(5.550.000,00)	98,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0006		KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	3.400.000,00	3.365.000,00	(35.000,00)	98,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.365.000,00	(35.000,00)	98,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.365.000,00	(35.000,00)	98,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	161.000.000,00	149.575.000,00	(11.425.000,00)	92,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	161.000.000,00	149.575.000,00	(11.425.000,00)	92,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.000.000,00	149.575.000,00	(11.425.000,00)	92,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS	2.550.000,00	2.546.000,00	(4.000,00)	99,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.550.000,00	2.546.000,00	(4.000,00)	99,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.546.000,00	(4.000,00)	99,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0009		REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	411.520.000,00	388.142.000,00	(23.378.000,00)	94,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	411.520.000,00	388.142.000,00	(23.378.000,00)	94,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.520.000,00	388.142.000,00	(23.378.000,00)	94,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0010		PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN	267.944.100,00	264.568.600,00	(3.375.500,00)	98,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	267.944.100,00	264.568.600,00	(3.375.500,00)	98,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.944.100,00	264.568.600,00	(3.375.500,00)	98,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0011		PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	106.224.000,00	99.815.800,00	(6.408.200,00)	93,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	101.724.000,00	95.965.800,00	(5.758.200,00)	94,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.724.000,00	95.965.800,00	(5.758.200,00)	94,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0011	5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	3.850.000,00	(650.000,00)	85,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	3.850.000,00	(650.000,00)	85,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1.497.590.180,00	1.423.621.116,00	(73.969.064,00)	95,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0001		KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	220.709.900,00	213.609.000,00	(7.100.900,00)	96,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	170.709.900,00	166.131.500,00	(4.578.400,00)	97,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.709.900,00	166.131.500,00	(4.578.400,00)	97,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	47.477.500,00	(2.522.500,00)	94,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	47.477.500,00	(2.522.500,00)	94,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0002		REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	84.700.000,00	71.906.000,00	(12.794.000,00)	84,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.700.000,00	71.906.000,00	(12.794.000,00)	84,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.700.000,00	71.906.000,00	(12.794.000,00)	84,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0003		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	413.524.000,00	401.228.546,00	(12.295.454,00)	97,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	413.524.000,00	401.228.546,00	(12.295.454,00)	97,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.524.000,00	401.228.546,00	(12.295.454,00)	97,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	385.183.740,00	383.231.490,00	(1.952.250,00)	99,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	367.183.740,00	365.582.490,00	(1.601.250,00)	99,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.183.740,00	365.582.490,00	(1.601.250,00)	99,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	17.649.000,00	(351.000,00)	98,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	17.649.000,00	(351.000,00)	98,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	110.329.100,00	107.050.100,00	(3.279.000,00)	97,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	110.329.100,00	107.050.100,00	(3.279.000,00)	97,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.329.100,00	107.050.100,00	(3.279.000,00)	97,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0006		PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	9.171.680,00	8.931.680,00	(240.000,00)	97,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.171.680,00	8.931.680,00	(240.000,00)	97,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.171.680,00	8.931.680,00	(240.000,00)	97,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0007		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	92.960.000,00	86.474.000,00	(6.486.000,00)	93,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	92.960.000,00	86.474.000,00	(6.486.000,00)	93,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.960.000,00	86.474.000,00	(6.486.000,00)	93,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0008		PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	41.914.000,00	36.600.000,00	(5.314.000,00)	87,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	41.914.000,00	36.600.000,00	(5.314.000,00)	87,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.914.000,00	36.600.000,00	(5.314.000,00)	87,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0009		PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	6.271.680,00	6.005.000,00	(266.680,00)	95,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.271.680,00	6.005.000,00	(266.680,00)	95,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.271.680,00	6.005.000,00	(266.680,00)	95,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0010		PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	4.801.580,00	4.593.300,00	(208.280,00)	95,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.801.580,00	4.593.300,00	(208.280,00)	95,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.801.580,00	4.593.300,00	(208.280,00)	95,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0011		PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	82.494.500,00	60.126.000,00	(22.368.500,00)	72,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	68.994.500,00	47.626.000,00	(21.368.500,00)	69,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.994.500,00	47.626.000,00	(21.368.500,00)	69,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0011	5.2	BELANJA MODAL	13.500.000,00	12.500.000,00	(1.000.000,00)	92,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	12.500.000,00	(1.000.000,00)	92,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0012		PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD KABUPATEN/KOTA	41.914.000,00	40.538.000,00	(1.376.000,00)	96,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	41.914.000,00	40.538.000,00	(1.376.000,00)	96,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.914.000,00	40.538.000,00	(1.376.000,00)	96,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0013		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.616.000,00	3.328.000,00	(288.000,00)	92,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	3.616.000,00	3.328.000,00	(288.000,00)	92,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.616.000,00	3.328.000,00	(288.000,00)	92,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	228.150.831.564,00	198.055.911.888,00	(30.094.919.676,00)	86,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	217.523.338.800,00	188.133.730.724,00	(29.389.608.076,00)	86,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	94.502.000,00	93.902.000,00	(600.000,00)	99,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.502.000,00	93.902.000,00	(600.000,00)	99,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	217.428.836.800,00	188.039.828.724,00	(29.389.008.076,00)	86,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	217.428.836.800,00	188.039.828.724,00	(29.389.008.076,00)	86,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	(705.311.600,00)	87,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	(705.311.600,00)	87,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	(705.311.600,00)	87,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0010		PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	4.977.492.764,00	4.977.492.764,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	4.977.492.764,00	4.977.492.764,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.977.492.764,00	4.977.492.764,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.815.298.000,00	1.644.363.491,00	(170.934.509,00)	90,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.815.298.000,00	1.644.363.491,00	(170.934.509,00)	90,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	53.135.000,00	27.752.000,00	(25.383.000,00)	52,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.135.000,00	27.752.000,00	(25.383.000,00)	52,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.135.000,00	27.752.000,00	(25.383.000,00)	52,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0003		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0005		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	1.016.785.000,00	993.265.791,00	(23.519.209,00)	97,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	719.950.000,00	703.010.670,00	(16.939.330,00)	97,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.950.000,00	703.010.670,00	(16.939.330,00)	97,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	296.835.000,00	290.255.121,00	(6.579.879,00)	97,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	296.835.000,00	290.255.121,00	(6.579.879,00)	97,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0006		INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	110.464.700,00	104.814.700,00	(5.650.000,00)	94,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	110.464.700,00	104.814.700,00	(5.650.000,00)	94,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.464.700,00	104.814.700,00	(5.650.000,00)	94,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	431.030.900,00	360.193.900,00	(70.837.000,00)	83,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	229.310.900,00	158.765.900,00	(70.545.000,00)	69,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.310.900,00	158.765.900,00	(70.545.000,00)	69,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	201.720.000,00	201.428.000,00	(292.000,00)	99,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.720.000,00	201.428.000,00	(292.000,00)	99,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0008		PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	69.637.400,00	30.264.100,00	(39.373.300,00)	43,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	69.637.400,00	30.264.100,00	(39.373.300,00)	43,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.637.400,00	30.264.100,00	(39.373.300,00)	43,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0009		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	21.300.000,00	16.325.000,00	(4.975.000,00)	76,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	21.300.000,00	16.325.000,00	(4.975.000,00)	76,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	16.325.000,00	(4.975.000,00)	76,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0011		REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	107.695.000,00	106.498.000,00	(1.197.000,00)	98,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	107.695.000,00	106.498.000,00	(1.197.000,00)	98,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.695.000,00	106.498.000,00	(1.197.000,00)	98,88	
				JUMLAH BELANJA	427.271.494.804,00	357.870.960.335,00	(69.400.534.469,00)	83,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	749.163.137.309,00	735.498.474.092,98	(13.664.663.216,02)	98,17	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	39.100.879.991,00	39.100.879.990,74	(0,26)	99,99	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.100.879.991,00	39.100.879.990,74	(0,26)	99,99	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.100.879.991,00	39.100.879.990,74	(0,26)	99,99	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.100.879.991,00	39.100.879.990,74	(0,26)	99,99	
				PEMBIAYAAN NETTO	39.100.879.991,00	39.100.879.990,74	(0,26)	99,99	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	788.264.017.300,00	774.599.354.083,72	(13.664.663.216,28)	98,26	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	47.352.244.583,00	44.420.518.421,00	(2.931.726.162,00)	93,80	
	5.02.0.00.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.352.244.583,00	44.420.518.421,00	(2.931.726.162,00)	93,80	
	5.02.0.00.0.00.03.0000		4.1.01	Pajak Daerah	47.352.244.583,00	44.393.219.166,00	(2.959.025.417,00)	93,75	
	5.02.0.00.0.00.03.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	27.299.255,00	27.299.255,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	47.352.244.583,00	44.420.518.421,00	(2.931.726.162,00)	93,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	16.872.293.829,00	16.200.369.548,00	(671.924.281,00)	96,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.495.937.369,00	14.953.113.514,00	(542.823.855,00)	96,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.271.376,00	6.245.700,00	(25.676,00)	99,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.017.800,00	1.017.600,00	(200,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.017.800,00	1.017.600,00	(200,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.017.800,00	1.017.600,00	(200,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.997.841,00	1.972.800,00	(25.041,00)	98,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.997.841,00	1.972.800,00	(25.041,00)	98,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.997.841,00	1.972.800,00	(25.041,00)	98,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	425.985,00	425.700,00	(285,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	425.985,00	425.700,00	(285,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.985,00	425.700,00	(285,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	309.750,00	309.600,00	(150,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	309.750,00	309.600,00	(150,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.750,00	309.600,00	(150,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.193.867.140,00	7.914.851.599,00	(279.015.541,00)	96,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.939.364.740,00	7.667.081.399,00	(272.283.341,00)	96,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.939.364.740,00	7.667.081.399,00	(272.283.341,00)	96,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.939.364.740,00	7.667.081.399,00	(272.283.341,00)	96,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	156.155.000,00	153.810.000,00	(2.345.000,00)	98,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	156.155.000,00	153.810.000,00	(2.345.000,00)	98,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.155.000,00	153.810.000,00	(2.345.000,00)	98,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	22.617.400,00	22.490.200,00	(127.200,00)	99,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.617.400,00	22.490.200,00	(127.200,00)	99,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.617.400,00	22.490.200,00	(127.200,00)	99,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	75.730.000,00	71.470.000,00	(4.260.000,00)	94,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	75.730.000,00	71.470.000,00	(4.260.000,00)	94,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.730.000,00	71.470.000,00	(4.260.000,00)	94,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	44.203.653,00	39.464.400,00	(4.739.253,00)	89,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	596.524,00	596.400,00	(124,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	596.524,00	596.400,00	(124,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.524,00	596.400,00	(124,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	22.847.129,00	22.418.000,00	(429.129,00)	98,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.847.129,00	22.418.000,00	(429.129,00)	98,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.847.129,00	22.418.000,00	(429.129,00)	98,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	20.760.000,00	16.450.000,00	(4.310.000,00)	79,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.760.000,00	16.450.000,00	(4.310.000,00)	79,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.760.000,00	16.450.000,00	(4.310.000,00)	79,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.306.531.176,00	1.235.032.398,00	(71.498.778,00)	94,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	128.805.800,00	124.459.798,00	(4.346.002,00)	96,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	128.805.800,00	124.459.798,00	(4.346.002,00)	96,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.805.800,00	124.459.798,00	(4.346.002,00)	96,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	83.599.609,00	73.345.952,00	(10.253.657,00)	87,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	83.599.609,00	73.345.952,00	(10.253.657,00)	87,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.599.609,00	73.345.952,00	(10.253.657,00)	87,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	255.297.826,00	227.085.350,00	(28.212.476,00)	88,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	255.297.826,00	227.085.350,00	(28.212.476,00)	88,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.297.826,00	227.085.350,00	(28.212.476,00)	88,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	67.301.000,00	38.792.500,00	(28.508.500,00)	57,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	67.301.000,00	38.792.500,00	(28.508.500,00)	57,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.301.000,00	38.792.500,00	(28.508.500,00)	57,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	771.075.000,00	770.941.398,00	(133.602,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	771.075.000,00	770.941.398,00	(133.602,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.075.000,00	770.941.398,00	(133.602,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	451.941,00	407.400,00	(44.541,00)	90,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	451.941,00	407.400,00	(44.541,00)	90,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.941,00	407.400,00	(44.541,00)	90,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	902.632.500,00	862.241.859,00	(40.390.641,00)	95,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	598.500,00	0,00	(598.500,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	598.500,00	0,00	(598.500,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.500,00	0,00	(598.500,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.184.000,00	13.098.000,00	(86.000,00)	99,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	13.184.000,00	13.098.000,00	(86.000,00)	99,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.184.000,00	13.098.000,00	(86.000,00)	99,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0007		PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	764.850.000,00	726.369.459,00	(38.480.541,00)	94,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0007	5.2	BELANJA MODAL	764.850.000,00	726.369.459,00	(38.480.541,00)	94,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0007	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	764.850.000,00	726.369.459,00	(38.480.541,00)	94,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	120.000.000,00	118.774.400,00	(1.225.600,00)	98,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	120.000.000,00	118.774.400,00	(1.225.600,00)	98,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	118.774.400,00	(1.225.600,00)	98,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.698.230.000,00	3.653.878.911,00	(44.351.089,00)	98,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.730.000,00	7.730.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.730.000,00	7.730.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.730.000,00	7.730.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.268.100.000,00	3.240.248.911,00	(27.851.089,00)	99,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.268.100.000,00	3.240.248.911,00	(27.851.089,00)	99,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.268.100.000,00	3.240.248.911,00	(27.851.089,00)	99,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	422.400.000,00	405.900.000,00	(16.500.000,00)	96,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	422.400.000,00	405.900.000,00	(16.500.000,00)	96,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.400.000,00	405.900.000,00	(16.500.000,00)	96,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.344.201.524,00	1.241.398.647,00	(102.802.877,00)	92,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	601.296.000,00	532.151.484,00	(69.144.516,00)	88,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	601.296.000,00	532.151.484,00	(69.144.516,00)	88,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.296.000,00	532.151.484,00	(69.144.516,00)	88,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	136.458.000,00	111.070.094,00	(25.387.906,00)	81,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	136.458.000,00	111.070.094,00	(25.387.906,00)	81,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.458.000,00	111.070.094,00	(25.387.906,00)	81,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	46.680.000,00	43.240.000,00	(3.440.000,00)	92,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	46.680.000,00	43.240.000,00	(3.440.000,00)	92,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.680.000,00	43.240.000,00	(3.440.000,00)	92,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	559.767.524,00	554.937.069,00	(4.830.455,00)	99,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	559.767.524,00	554.937.069,00	(4.830.455,00)	99,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.767.524,00	554.937.069,00	(4.830.455,00)	99,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.376.356.460,00	1.247.256.034,00	(129.100.426,00)	90,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.376.356.460,00	1.247.256.034,00	(129.100.426,00)	90,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0001		PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	29.100.702,00	28.470.000,00	(630.702,00)	97,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.100.702,00	28.470.000,00	(630.702,00)	97,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.100.702,00	28.470.000,00	(630.702,00)	97,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0002		ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	46.366.000,00	40.392.500,00	(5.973.500,00)	87,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.366.000,00	40.392.500,00	(5.973.500,00)	87,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.366.000,00	40.392.500,00	(5.973.500,00)	87,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	331.967.500,00	245.770.000,00	(86.197.500,00)	74,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	331.967.500,00	245.770.000,00	(86.197.500,00)	74,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.967.500,00	245.770.000,00	(86.197.500,00)	74,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	39.000.000,00	37.962.000,00	(1.038.000,00)	97,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	39.000.000,00	37.962.000,00	(1.038.000,00)	97,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000,00	37.962.000,00	(1.038.000,00)	97,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	115.147.407,00	114.992.000,00	(155.407,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	115.147.407,00	114.992.000,00	(155.407,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.147.407,00	114.992.000,00	(155.407,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0006		PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	23.820.635,00	16.809.847,00	(7.010.788,00)	70,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.820.635,00	16.809.847,00	(7.010.788,00)	70,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.820.635,00	16.809.847,00	(7.010.788,00)	70,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0007		PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	95.200.000,00	94.300.000,00	(900.000,00)	99,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	95.200.000,00	94.300.000,00	(900.000,00)	99,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.200.000,00	94.300.000,00	(900.000,00)	99,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0008		PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	98.948.320,00	97.445.526,00	(1.502.794,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	98.948.320,00	97.445.526,00	(1.502.794,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.948.320,00	97.445.526,00	(1.502.794,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0009		PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	153.658.659,00	137.909.154,00	(15.749.505,00)	89,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	153.658.659,00	137.909.154,00	(15.749.505,00)	89,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.658.659,00	137.909.154,00	(15.749.505,00)	89,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0010		PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	21.600.000,00	21.060.000,00	(540.000,00)	97,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	21.060.000,00	(540.000,00)	97,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.060.000,00	(540.000,00)	97,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0011		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	216.170.788,00	211.499.475,00	(4.671.313,00)	97,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	216.170.788,00	211.499.475,00	(4.671.313,00)	97,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.170.788,00	211.499.475,00	(4.671.313,00)	97,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0012		PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	16.160.200,00	15.832.204,00	(327.996,00)	97,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	16.160.200,00	15.832.204,00	(327.996,00)	97,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.160.200,00	15.832.204,00	(327.996,00)	97,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0013		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	75.000.249,00	74.532.328,00	(467.921,00)	99,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.249,00	74.532.328,00	(467.921,00)	99,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.249,00	74.532.328,00	(467.921,00)	99,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0014		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	88.956.000,00	85.521.000,00	(3.435.000,00)	96,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	88.956.000,00	85.521.000,00	(3.435.000,00)	96,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.956.000,00	85.521.000,00	(3.435.000,00)	96,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0015		ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	25.260.000,00	24.760.000,00	(500.000,00)	98,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	25.260.000,00	24.760.000,00	(500.000,00)	98,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.260.000,00	24.760.000,00	(500.000,00)	98,02	
				JUMLAH BELANJA	16.872.293.829,00	16.200.369.548,00	(671.924.281,00)	96,01	
				SURPLUS / (DEFISIT)	30.479.950.754,00	28.220.148.873,00	(2.259.801.881,00)	92,58	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	30.479.950.754,00	28.220.148.873,00	(2.259.801.881,00)	92,58	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.217.967.241,00	5.790.142.462,00	(427.824.779,00)	93,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.165.139.111,00	4.930.000.422,00	(235.138.689,00)	95,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.390.200,00	27.352.200,00	(1.038.000,00)	96,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	28.390.200,00	27.352.200,00	(1.038.000,00)	96,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	28.390.200,00	27.352.200,00	(1.038.000,00)	96,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.390.200,00	27.352.200,00	(1.038.000,00)	96,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.122.836.401,00	3.911.377.380,00	(211.459.021,00)	94,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.952.319.321,00	3.742.002.880,00	(210.316.441,00)	94,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.952.319.321,00	3.742.002.880,00	(210.316.441,00)	94,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.952.319.321,00	3.742.002.880,00	(210.316.441,00)	94,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	154.480.000,00	153.880.000,00	(600.000,00)	99,61	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	154.480.000,00	153.880.000,00	(600.000,00)	99,61	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.480.000,00	153.880.000,00	(600.000,00)	99,61	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	16.037.080,00	15.494.500,00	(542.580,00)	96,61	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.037.080,00	15.494.500,00	(542.580,00)	96,61	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.037.080,00	15.494.500,00	(542.580,00)	96,61	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	291.896.510,00	289.893.934,00	(2.002.576,00)	99,31	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.458.900,00	7.458.900,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.458.900,00	7.458.900,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.458.900,00	7.458.900,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	69.612.660,00	67.818.875,00	(1.793.785,00)	97,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.612.660,00	67.818.875,00	(1.793.785,00)	97,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.612.660,00	67.818.875,00	(1.793.785,00)	97,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	61.419.950,00	61.397.000,00	(22.950,00)	99,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	61.419.950,00	61.397.000,00	(22.950,00)	99,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.419.950,00	61.397.000,00	(22.950,00)	99,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	149.805.000,00	149.619.159,00	(185.841,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	149.805.000,00	149.619.159,00	(185.841,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.805.000,00	149.619.159,00	(185.841,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	341.900.000,00	329.232.433,00	(12.667.567,00)	96,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	84.000.000,00	81.171.520,00	(2.828.480,00)	96,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	81.171.520,00	(2.828.480,00)	96,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	81.171.520,00	(2.828.480,00)	96,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	252.900.000,00	243.060.913,00	(9.839.087,00)	96,10	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	252.900.000,00	243.060.913,00	(9.839.087,00)	96,10	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.900.000,00	243.060.913,00	(9.839.087,00)	96,10	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	367.516.000,00	359.544.475,00	(7.971.525,00)	97,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	351.476.000,00	343.544.475,00	(7.931.525,00)	97,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	351.476.000,00	343.544.475,00	(7.931.525,00)	97,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.476.000,00	343.544.475,00	(7.931.525,00)	97,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.040.000,00	16.000.000,00	(40.000,00)	99,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.040.000,00	16.000.000,00	(40.000,00)	99,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.040.000,00	16.000.000,00	(40.000,00)	99,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.052.828.130,00	860.142.040,00	(192.686.090,00)	81,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	285.206.070,00	279.954.182,00	(5.251.888,00)	98,15	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0004		EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN	180.766.060,00	179.104.552,00	(1.661.508,00)	99,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	180.766.060,00	179.104.552,00	(1.661.508,00)	99,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.766.060,00	179.104.552,00	(1.661.508,00)	99,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	49.071.530,00	47.685.150,00	(1.386.380,00)	97,17	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	49.071.530,00	47.685.150,00	(1.386.380,00)	97,17	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.071.530,00	47.685.150,00	(1.386.380,00)	97,17	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008		FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	12.760.000,00	12.596.000,00	(164.000,00)	98,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.760.000,00	12.596.000,00	(164.000,00)	98,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.760.000,00	12.596.000,00	(164.000,00)	98,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	42.608.480,00	40.568.480,00	(2.040.000,00)	95,21	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	42.608.480,00	40.568.480,00	(2.040.000,00)	95,21	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.608.480,00	40.568.480,00	(2.040.000,00)	95,21	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	644.512.110,00	458.633.112,00	(185.878.998,00)	71,15	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	46.072.790,00	45.210.943,00	(861.847,00)	98,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.072.790,00	45.210.943,00	(861.847,00)	98,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.072.790,00	45.210.943,00	(861.847,00)	98,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	598.439.320,00	413.422.169,00	(185.017.151,00)	69,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	598.439.320,00	413.422.169,00	(185.017.151,00)	69,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.439.320,00	413.422.169,00	(185.017.151,00)	69,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	123.109.950,00	121.554.746,00	(1.555.204,00)	98,73	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008		PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	123.109.950,00	121.554.746,00	(1.555.204,00)	98,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	123.109.950,00	121.554.746,00	(1.555.204,00)	98,73	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.109.950,00	121.554.746,00	(1.555.204,00)	98,73	
				JUMLAH BELANJA	6.217.967.241,00	5.790.142.462,00	(427.824.779,00)	93,11	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.217.967.241,00)	(5.790.142.462,00)	427.824.779,00	93,11	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.217.967.241,00)	(5.790.142.462,00)	427.824.779,00	93,11	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	(13.720.067,00)	99,10	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	(13.720.067,00)	99,10	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02		SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	(13.720.067,00)	99,10	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	(13.720.067,00)	99,10	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	(13.720.067,00)	99,10	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	(13.720.067,00)	99,10	
				JUMLAH BELANJA	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	(13.720.067,00)	99,10	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.538.015.950,00)	(1.524.295.883,00)	13.720.067,00	99,10	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.538.015.950,00)	(1.524.295.883,00)	13.720.067,00	99,10	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat Kab. Sigi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	14.102.830.355,00	12.807.510.199,00	(1.295.320.156,00)	90,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.471.395.455,00	10.039.596.799,00	(431.798.656,00)	95,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.654.000,00	12.462.000,00	(4.192.000,00)	74,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.464.000,00	3.464.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.464.000,00	3.464.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.464.000,00	3.464.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.096.000,00	0,00	(2.096.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.096.000,00	0,00	(2.096.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.096.000,00	0,00	(2.096.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.096.000,00	0,00	(2.096.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.096.000,00	0,00	(2.096.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.096.000,00	0,00	(2.096.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.340.027.820,00	7.128.914.091,00	(211.113.729,00)	97,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.240.787.820,00	7.029.674.091,00	(211.113.729,00)	97,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.240.787.820,00	7.029.674.091,00	(211.113.729,00)	97,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.240.787.820,00	7.029.674.091,00	(211.113.729,00)	97,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	99.240.000,00	99.240.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	99.240.000,00	99.240.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.240.000,00	99.240.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	180.000.000,00	178.232.800,00	(1.767.200,00)	99,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	180.000.000,00	178.232.800,00	(1.767.200,00)	99,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	178.232.800,00	(1.767.200,00)	99,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	178.232.800,00	(1.767.200,00)	99,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.534.459.635,00	1.477.409.145,00	(57.050.490,00)	96,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.515.000,00	275.000,00	(3.240.000,00)	7,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.515.000,00	275.000,00	(3.240.000,00)	7,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.515.000,00	275.000,00	(3.240.000,00)	7,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.015.163.335,00	983.499.490,00	(31.663.845,00)	96,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	547.329.335,00	536.813.115,00	(10.516.220,00)	98,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.329.335,00	536.813.115,00	(10.516.220,00)	98,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	467.834.000,00	446.686.375,00	(21.147.625,00)	95,47	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	467.834.000,00	446.686.375,00	(21.147.625,00)	95,47	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	38.179.300,00	25.410.000,00	(12.769.300,00)	66,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	38.179.300,00	25.410.000,00	(12.769.300,00)	66,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.179.300,00	25.410.000,00	(12.769.300,00)	66,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	477.602.000,00	468.224.655,00	(9.377.345,00)	98,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	477.602.000,00	468.224.655,00	(9.377.345,00)	98,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.602.000,00	468.224.655,00	(9.377.345,00)	98,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	491.220.000,00	418.600.619,00	(72.619.381,00)	85,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	150.000.000,00	118.383.119,00	(31.616.881,00)	78,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	118.383.119,00	(31.616.881,00)	78,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	118.383.119,00	(31.616.881,00)	78,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	341.220.000,00	300.217.500,00	(41.002.500,00)	87,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	341.220.000,00	300.217.500,00	(41.002.500,00)	87,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.220.000,00	300.217.500,00	(41.002.500,00)	87,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	897.034.000,00	811.978.144,00	(85.055.856,00)	90,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	897.034.000,00	811.978.144,00	(85.055.856,00)	90,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	897.034.000,00	811.978.144,00	(85.055.856,00)	90,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	897.034.000,00	811.978.144,00	(85.055.856,00)	90,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.995.304.400,00	2.266.494.400,00	(728.810.000,00)	75,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	2.586.072.400,00	2.014.149.400,00	(571.923.000,00)	77,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	411.974.000,00	252.774.000,00	(159.200.000,00)	61,35	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	411.974.000,00	252.774.000,00	(159.200.000,00)	61,35	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.974.000,00	252.774.000,00	(159.200.000,00)	61,35	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	477.524.000,00	446.174.000,00	(31.350.000,00)	93,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	477.524.000,00	446.174.000,00	(31.350.000,00)	93,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.524.000,00	446.174.000,00	(31.350.000,00)	93,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	544.104.000,00	320.000.000,00	(224.104.000,00)	58,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	544.104.000,00	320.000.000,00	(224.104.000,00)	58,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.104.000,00	320.000.000,00	(224.104.000,00)	58,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	48.324.000,00	48.324.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	48.324.000,00	48.324.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.324.000,00	48.324.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA	377.424.000,00	231.980.000,00	(145.444.000,00)	61,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	377.424.000,00	231.980.000,00	(145.444.000,00)	61,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.424.000,00	231.980.000,00	(145.444.000,00)	61,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	726.722.400,00	714.897.400,00	(11.825.000,00)	98,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	726.722.400,00	714.897.400,00	(11.825.000,00)	98,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.722.400,00	714.897.400,00	(11.825.000,00)	98,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	409.232.000,00	252.345.000,00	(156.887.000,00)	61,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	29.408.000,00	13.200.000,00	(16.208.000,00)	44,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.408.000,00	13.200.000,00	(16.208.000,00)	44,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.408.000,00	13.200.000,00	(16.208.000,00)	44,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	379.824.000,00	239.145.000,00	(140.679.000,00)	62,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	379.824.000,00	239.145.000,00	(140.679.000,00)	62,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.824.000,00	239.145.000,00	(140.679.000,00)	62,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	636.130.500,00	501.419.000,00	(134.711.500,00)	78,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	409.551.500,00	300.609.000,00	(108.942.500,00)	73,39	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	409.551.500,00	300.609.000,00	(108.942.500,00)	73,39	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	409.551.500,00	300.609.000,00	(108.942.500,00)	73,39	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.551.500,00	300.609.000,00	(108.942.500,00)	73,39	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	226.579.000,00	200.810.000,00	(25.769.000,00)	88,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	226.579.000,00	200.810.000,00	(25.769.000,00)	88,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	226.579.000,00	200.810.000,00	(25.769.000,00)	88,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.579.000,00	200.810.000,00	(25.769.000,00)	88,62	
				JUMLAH BELANJA	14.102.830.355,00	12.807.510.199,00	(1.295.320.156,00)	90,81	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(14.102.830.355,00)	(12.807.510.199,00)	1.295.320.156,00	90,81	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.102.830.355,00)	(12.807.510.199,00)	1.295.320.156,00	90,81	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Dolo

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.141.284.835,00	2.110.143.308,00	(31.141.527,00)	98,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.141.284.835,00	2.110.143.308,00	(31.141.527,00)	98,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.910.238.535,00	1.879.097.008,00	(31.141.527,00)	98,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.830.917.935,00	1.799.776.408,00	(31.141.527,00)	98,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.830.917.935,00	1.799.776.408,00	(31.141.527,00)	98,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.830.917.935,00	1.799.776.408,00	(31.141.527,00)	98,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	79.320.600,00	79.320.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	79.320.600,00	79.320.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.320.600,00	79.320.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	72.156.300,00	72.156.300,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.556.300,00	7.556.300,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.556.300,00	7.556.300,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.556.300,00	7.556.300,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	90.690.000,00	90.690.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.141.284.835,00	2.110.143.308,00	(31.141.527,00)	98,54	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.141.284.835,00)	(2.110.143.308,00)	31.141.527,00	98,54	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.141.284.835,00)	(2.110.143.308,00)	31.141.527,00	98,54	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Dolo Barat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.104.897.225,00	2.016.977.820,00	(87.919.405,00)	95,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.104.897.225,00	2.016.977.820,00	(87.919.405,00)	95,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.827.758.095,00	1.742.404.232,00	(85.353.863,00)	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.780.598.095,00	1.695.244.232,00	(85.353.863,00)	95,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.780.598.095,00	1.695.244.232,00	(85.353.863,00)	95,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.780.598.095,00	1.695.244.232,00	(85.353.863,00)	95,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	47.160.000,00	47.160.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.160.000,00	47.160.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.160.000,00	47.160.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	7.300.000,00	6.900.000,00	(400.000,00)	94,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	7.300.000,00	6.900.000,00	(400.000,00)	94,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.300.000,00	6.900.000,00	(400.000,00)	94,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	6.900.000,00	(400.000,00)	94,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	50.195.780,00	50.185.100,00	(10.680,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.655.380,00	13.653.200,00	(2.180,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.655.380,00	13.653.200,00	(2.180,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.655.380,00	13.653.200,00	(2.180,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.276.000,00	4.276.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.276.000,00	4.276.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.276.000,00	4.276.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.714.400,00	2.705.900,00	(8.500,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.714.400,00	2.705.900,00	(8.500,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.714.400,00	2.705.900,00	(8.500,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	20.892.000,00	20.892.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.892.000,00	20.892.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	20.892.000,00	20.892.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.892.000,00	20.892.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	129.000.000,00	126.846.488,00	(2.153.512,00)	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.100.000,00	7.496.488,00	(603.512,00)	92,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.100.000,00	7.496.488,00	(603.512,00)	92,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	7.496.488,00	(603.512,00)	92,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	119.400.000,00	117.850.000,00	(1.550.000,00)	98,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	119.400.000,00	117.850.000,00	(1.550.000,00)	98,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.400.000,00	117.850.000,00	(1.550.000,00)	98,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	69.751.350,00	69.750.000,00	(1.350,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	69.021.350,00	69.020.000,00	(1.350,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	69.021.350,00	69.020.000,00	(1.350,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.021.350,00	69.020.000,00	(1.350,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	730.000,00	730.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	730.000,00	730.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.000,00	730.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.104.897.225,00	2.016.977.820,00	(87.919.405,00)	95,82	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.104.897.225,00)	(2.016.977.820,00)	87.919.405,00	95,82	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.104.897.225,00)	(2.016.977.820,00)	87.919.405,00	95,82	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Dolo Selatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	1.631.885.681,00	1.581.871.584,00	(50.014.097,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.631.885.681,00	1.581.871.584,00	(50.014.097,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.373.933.697,00	1.329.543.780,00	(44.389.917,00)	96,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.332.653.697,00	1.288.263.780,00	(44.389.917,00)	96,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.332.653.697,00	1.288.263.780,00	(44.389.917,00)	96,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.332.653.697,00	1.288.263.780,00	(44.389.917,00)	96,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	68.261.984,00	68.261.284,00	(700,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.761.734,00	9.761.734,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.761.734,00	9.761.734,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.761.734,00	9.761.734,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	733.250,00	732.550,00	(700,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	733.250,00	732.550,00	(700,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.250,00	732.550,00	(700,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	30.947.000,00	30.947.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	30.947.000,00	30.947.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.947.000,00	30.947.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	11.900.000,00	11.000.000,00	(900.000,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11.900.000,00	11.000.000,00	(900.000,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	11.900.000,00	11.000.000,00	(900.000,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.900.000,00	11.000.000,00	(900.000,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	97.510.000,00	95.856.520,00	(1.653.480,00)	98,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.000.000,00	7.346.520,00	(1.653.480,00)	81,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	7.346.520,00	(1.653.480,00)	81,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	7.346.520,00	(1.653.480,00)	81,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	73.380.000,00	70.310.000,00	(3.070.000,00)	95,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	47.770.000,00	44.700.000,00	(3.070.000,00)	93,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.770.000,00	44.700.000,00	(3.070.000,00)	93,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.770.000,00	44.700.000,00	(3.070.000,00)	93,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	610.000,00	610.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	610.000,00	610.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.000,00	610.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.631.885.681,00	1.581.871.584,00	(50.014.097,00)	96,93	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.631.885.681,00)	(1.581.871.584,00)	50.014.097,00	96,93	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.631.885.681,00)	(1.581.871.584,00)	50.014.097,00	96,93	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Kulawi Selatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	1.613.641.705,00	1.559.968.924,00	(53.672.781,00)	96,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.613.641.705,00	1.559.968.924,00	(53.672.781,00)	96,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.172.371.605,00	1.143.629.024,00	(28.742.581,00)	97,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.127.491.605,00	1.099.103.024,00	(28.388.581,00)	97,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.127.491.605,00	1.099.103.024,00	(28.388.581,00)	97,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.127.491.605,00	1.099.103.024,00	(28.388.581,00)	97,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	44.880.000,00	44.526.000,00	(354.000,00)	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.880.000,00	44.526.000,00	(354.000,00)	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.880.000,00	44.526.000,00	(354.000,00)	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	6.560.000,00	4.600.000,00	(1.960.000,00)	70,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	6.560.000,00	4.600.000,00	(1.960.000,00)	70,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.560.000,00	4.600.000,00	(1.960.000,00)	70,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.560.000,00	4.600.000,00	(1.960.000,00)	70,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	266.510.100,00	262.869.900,00	(3.640.200,00)	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	37.246.900,00	36.521.900,00	(725.000,00)	98,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.246.900,00	36.521.900,00	(725.000,00)	98,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.246.900,00	36.521.900,00	(725.000,00)	98,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.861.200,00	0,00	(2.861.200,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.861.200,00	0,00	(2.861.200,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.861.200,00	0,00	(2.861.200,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	226.402.000,00	226.348.000,00	(54.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	226.402.000,00	226.348.000,00	(54.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.402.000,00	226.348.000,00	(54.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	98.700.000,00	89.370.000,00	(9.330.000,00)	90,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	91.850.000,00	85.520.000,00	(6.330.000,00)	93,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	91.850.000,00	85.520.000,00	(6.330.000,00)	93,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.850.000,00	85.520.000,00	(6.330.000,00)	93,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	69.500.000,00	59.500.000,00	(10.000.000,00)	85,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	27.500.000,00	17.500.000,00	(10.000.000,00)	63,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.500.000,00	17.500.000,00	(10.000.000,00)	63,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	17.500.000,00	(10.000.000,00)	63,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.613.641.705,00	1.559.968.924,00	(53.672.781,00)	96,67	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.613.641.705,00)	(1.559.968.924,00)	53.672.781,00	96,67	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.613.641.705,00)	(1.559.968.924,00)	53.672.781,00	96,67	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Kulawi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	1.710.740.636,00	1.615.100.629,00	(95.640.007,00)	94,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.710.740.636,00	1.615.100.629,00	(95.640.007,00)	94,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.411.726.936,00	1.323.994.124,00	(87.732.812,00)	93,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.358.866.936,00	1.272.584.124,00	(86.282.812,00)	93,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.358.866.936,00	1.272.584.124,00	(86.282.812,00)	93,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.358.866.936,00	1.272.584.124,00	(86.282.812,00)	93,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	52.860.000,00	51.410.000,00	(1.450.000,00)	97,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	52.860.000,00	51.410.000,00	(1.450.000,00)	97,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.860.000,00	51.410.000,00	(1.450.000,00)	97,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	173.128.700,00	173.110.700,00	(18.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	27.493.000,00	27.475.000,00	(18.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	20.618.000,00	20.600.000,00	(18.000,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.618.000,00	20.600.000,00	(18.000,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.886.700,00	4.886.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.886.700,00	4.886.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.886.700,00	4.886.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	86.324.000,00	86.324.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	86.324.000,00	86.324.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.324.000,00	86.324.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	54.425.000,00	54.425.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	54.425.000,00	54.425.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.425.000,00	54.425.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	106.925.000,00	99.045.805,00	(7.879.195,00)	92,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.500.000,00	1.120.805,00	(379.195,00)	74,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.120.805,00	(379.195,00)	74,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.120.805,00	(379.195,00)	74,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	104.925.000,00	97.425.000,00	(7.500.000,00)	92,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	104.925.000,00	97.425.000,00	(7.500.000,00)	92,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.925.000,00	97.425.000,00	(7.500.000,00)	92,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.960.000,00	18.950.000,00	(10.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	18.960.000,00	18.950.000,00	(10.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.960.000,00	18.950.000,00	(10.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.960.000,00	18.950.000,00	(10.000,00)	99,94	
				JUMLAH BELANJA	1.710.740.636,00	1.615.100.629,00	(95.640.007,00)	94,40	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.710.740.636,00)	(1.615.100.629,00)	95.640.007,00	94,40	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.710.740.636,00)	(1.615.100.629,00)	95.640.007,00	94,40	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Lindu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	1.209.180.647,00	1.142.933.607,00	(66.247.040,00)	94,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.209.180.647,00	1.142.933.607,00	(66.247.040,00)	94,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	901.780.147,00	847.545.207,00	(54.234.940,00)	93,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	852.996.147,00	799.198.407,00	(53.797.740,00)	93,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	852.996.147,00	799.198.407,00	(53.797.740,00)	93,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	852.996.147,00	799.198.407,00	(53.797.740,00)	93,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	48.784.000,00	48.346.800,00	(437.200,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.784.000,00	48.346.800,00	(437.200,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.784.000,00	48.346.800,00	(437.200,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	5.393.600,00	4.475.000,00	(918.600,00)	82,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	5.393.600,00	4.475.000,00	(918.600,00)	82,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.393.600,00	4.475.000,00	(918.600,00)	82,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.393.600,00	4.475.000,00	(918.600,00)	82,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	117.556.100,00	108.382.400,00	(9.173.700,00)	92,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	28.686.400,00	22.303.400,00	(6.383.000,00)	77,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.686.400,00	22.303.400,00	(6.383.000,00)	77,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.686.400,00	22.303.400,00	(6.383.000,00)	77,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.877.700,00	9.157.000,00	(1.720.700,00)	84,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.877.700,00	9.157.000,00	(1.720.700,00)	84,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.877.700,00	9.157.000,00	(1.720.700,00)	84,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	77.992.000,00	76.922.000,00	(1.070.000,00)	98,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	77.992.000,00	76.922.000,00	(1.070.000,00)	98,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.992.000,00	76.922.000,00	(1.070.000,00)	98,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.000.000,00	6.800.000,00	(200.000,00)	97,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.000.000,00	6.800.000,00	(200.000,00)	97,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	6.800.000,00	(200.000,00)	97,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	6.800.000,00	(200.000,00)	97,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	92.700.000,00	91.466.000,00	(1.234.000,00)	98,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	2.980.000,00	(20.000,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.980.000,00	(20.000,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.980.000,00	(20.000,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.000.000,00	4.786.000,00	(1.214.000,00)	79,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.786.000,00	(1.214.000,00)	79,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.786.000,00	(1.214.000,00)	79,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	84.750.800,00	84.265.000,00	(485.800,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	84.750.800,00	84.265.000,00	(485.800,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.750.800,00	84.265.000,00	(485.800,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.750.800,00	84.265.000,00	(485.800,00)	99,42	
				JUMLAH BELANJA	1.209.180.647,00	1.142.933.607,00	(66.247.040,00)	94,52	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.209.180.647,00)	(1.142.933.607,00)	66.247.040,00	94,52	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.209.180.647,00)	(1.142.933.607,00)	66.247.040,00	94,52	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Marawola

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	2.279.843.294,00	2.203.326.074,00	(76.517.220,00)	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.279.843.294,00	2.203.326.074,00	(76.517.220,00)	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.970.944.094,00	1.895.646.985,00	(75.297.109,00)	96,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.909.344.094,00	1.837.946.985,00	(71.397.109,00)	96,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.909.344.094,00	1.837.946.985,00	(71.397.109,00)	96,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.909.344.094,00	1.837.946.985,00	(71.397.109,00)	96,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	61.600.000,00	57.700.000,00	(3.900.000,00)	93,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	61.600.000,00	57.700.000,00	(3.900.000,00)	93,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.600.000,00	57.700.000,00	(3.900.000,00)	93,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	123.594.200,00	123.094.200,00	(500.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.308.800,00	9.308.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.308.800,00	9.308.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.308.800,00	9.308.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.805.400,00	4.805.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.805.400,00	4.805.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.805.400,00	4.805.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	109.480.000,00	108.980.000,00	(500.000,00)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	109.480.000,00	108.980.000,00	(500.000,00)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.480.000,00	108.980.000,00	(500.000,00)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	98.105.000,00	97.564.889,00	(540.111,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.200.000,00	15.824.889,00	(375.111,00)	97,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.200.000,00	15.824.889,00	(375.111,00)	97,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	15.824.889,00	(375.111,00)	97,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	81.275.000,00	81.110.000,00	(165.000,00)	99,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	81.275.000,00	81.110.000,00	(165.000,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.275.000,00	81.110.000,00	(165.000,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	51.700.000,00	51.520.000,00	(180.000,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	51.700.000,00	51.520.000,00	(180.000,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.700.000,00	51.520.000,00	(180.000,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.700.000,00	51.520.000,00	(180.000,00)	99,65	
				JUMLAH BELANJA	2.279.843.294,00	2.203.326.074,00	(76.517.220,00)	96,64	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.279.843.294,00)	(2.203.326.074,00)	76.517.220,00	96,64	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.279.843.294,00)	(2.203.326.074,00)	76.517.220,00	96,64	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Marawola Barat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	1.958.860.102,00	1.855.765.081,00	(103.095.021,00)	94,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.958.860.102,00	1.855.765.081,00	(103.095.021,00)	94,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.698.771.902,00	1.609.836.591,00	(88.935.311,00)	94,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.636.131.902,00	1.547.196.591,00	(88.935.311,00)	94,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.636.131.902,00	1.547.196.591,00	(88.935.311,00)	94,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.636.131.902,00	1.547.196.591,00	(88.935.311,00)	94,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	62.640.000,00	62.640.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	62.640.000,00	62.640.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.640.000,00	62.640.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	142.070.300,00	131.083.800,00	(10.986.500,00)	92,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	54.710.300,00	54.523.800,00	(186.500,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.782.200,00	42.623.800,00	(158.400,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.782.200,00	42.623.800,00	(158.400,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	11.928.100,00	11.900.000,00	(28.100,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.928.100,00	11.900.000,00	(28.100,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	87.360.000,00	76.560.000,00	(10.800.000,00)	87,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	87.360.000,00	76.560.000,00	(10.800.000,00)	87,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.360.000,00	76.560.000,00	(10.800.000,00)	87,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	46.077.900,00	46.077.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.377.900,00	7.377.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.377.900,00	7.377.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.377.900,00	7.377.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	71.940.000,00	68.766.790,00	(3.173.210,00)	95,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	71.940.000,00	68.766.790,00	(3.173.210,00)	95,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.940.000,00	68.766.790,00	(3.173.210,00)	95,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.940.000,00	68.766.790,00	(3.173.210,00)	95,58	
				JUMLAH BELANJA	1.958.860.102,00	1.855.765.081,00	(103.095.021,00)	94,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.958.860.102,00)	(1.855.765.081,00)	103.095.021,00	94,73	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.958.860.102,00)	(1.855.765.081,00)	103.095.021,00	94,73	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Kinovaro

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	2.011.174.902,00	1.938.799.586,00	(72.375.316,00)	96,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.011.174.902,00	1.938.799.586,00	(72.375.316,00)	96,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.719.915.202,00	1.654.005.931,00	(65.909.271,00)	96,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.672.304.402,00	1.606.395.131,00	(65.909.271,00)	96,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.672.304.402,00	1.606.395.131,00	(65.909.271,00)	96,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.672.304.402,00	1.606.395.131,00	(65.909.271,00)	96,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	47.610.800,00	47.610.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.610.800,00	47.610.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.610.800,00	47.610.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	6.967.600,00	6.967.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	6.967.600,00	6.967.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.967.600,00	6.967.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.967.600,00	6.967.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	45.594.100,00	45.594.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.573.400,00	6.573.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.573.400,00	6.573.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.573.400,00	6.573.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.946.700,00	1.946.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.946.700,00	1.946.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.946.700,00	1.946.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	11.704.000,00	11.704.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.704.000,00	11.704.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.704.000,00	11.704.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	40.168.000,00	40.168.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	40.168.000,00	40.168.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	40.168.000,00	40.168.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.168.000,00	40.168.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	158.730.000,00	155.103.000,00	(3.627.000,00)	97,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.000.000,00	8.373.000,00	(3.627.000,00)	69,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	8.373.000,00	(3.627.000,00)	69,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	8.373.000,00	(3.627.000,00)	69,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.800.000,00	36.960.955,00	(2.839.045,00)	92,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	24.800.000,00	21.960.955,00	(2.839.045,00)	88,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.800.000,00	21.960.955,00	(2.839.045,00)	88,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	21.960.955,00	(2.839.045,00)	88,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.011.174.902,00	1.938.799.586,00	(72.375.316,00)	96,40	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.011.174.902,00)	(1.938.799.586,00)	72.375.316,00	96,40	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.011.174.902,00)	(1.938.799.586,00)	72.375.316,00	96,40	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Palolo

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	2.205.470.901,00	2.130.669.935,00	(74.800.966,00)	96,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.205.470.901,00	2.130.669.935,00	(74.800.966,00)	96,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.776.211.509,00	1.712.618.646,00	(63.592.863,00)	96,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.703.868.109,00	1.641.615.646,00	(62.252.463,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.703.868.109,00	1.641.615.646,00	(62.252.463,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.703.868.109,00	1.641.615.646,00	(62.252.463,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	72.343.400,00	71.003.000,00	(1.340.400,00)	98,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	72.343.400,00	71.003.000,00	(1.340.400,00)	98,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.343.400,00	71.003.000,00	(1.340.400,00)	98,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	106.620.000,00	106.579.000,00	(41.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	106.620.000,00	106.579.000,00	(41.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	106.620.000,00	106.579.000,00	(41.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.620.000,00	106.579.000,00	(41.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	139.270.000,00	132.931.920,00	(6.338.080,00)	95,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	139.270.000,00	132.931.920,00	(6.338.080,00)	95,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	124.270.000,00	117.951.920,00	(6.318.080,00)	94,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.270.000,00	117.951.920,00	(6.318.080,00)	94,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	183.369.392,00	178.540.369,00	(4.829.023,00)	97,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	121.904.992,00	117.081.369,00	(4.823.623,00)	96,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	121.904.992,00	117.081.369,00	(4.823.623,00)	96,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.904.992,00	117.081.369,00	(4.823.623,00)	96,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	61.464.400,00	61.459.000,00	(5.400,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	61.464.400,00	61.459.000,00	(5.400,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.464.400,00	61.459.000,00	(5.400,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	2.205.470.901,00	2.130.669.935,00	(74.800.966,00)	96,60	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.205.470.901,00)	(2.130.669.935,00)	74.800.966,00	96,60	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.205.470.901,00)	(2.130.669.935,00)	74.800.966,00	96,60	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Nokilalaki

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	1.545.887.505,00	1.476.090.487,00	(69.797.018,00)	95,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.545.887.505,00	1.476.090.487,00	(69.797.018,00)	95,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.250.899.533,00	1.182.497.339,00	(68.402.194,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.250.899.533,00	1.182.497.339,00	(68.402.194,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.899.533,00	1.182.497.339,00	(68.402.194,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.899.533,00	1.182.497.339,00	(68.402.194,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	121.240.980,00	121.231.400,00	(9.580,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	121.240.980,00	121.231.400,00	(9.580,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	121.240.980,00	121.231.400,00	(9.580,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.240.980,00	121.231.400,00	(9.580,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	85.470.000,00	85.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	85.470.000,00	85.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	85.470.000,00	85.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.470.000,00	85.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	88.276.992,00	86.891.748,00	(1.385.244,00)	98,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	88.276.992,00	86.891.748,00	(1.385.244,00)	98,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	88.276.992,00	86.891.748,00	(1.385.244,00)	98,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.276.992,00	86.891.748,00	(1.385.244,00)	98,43	
				JUMLAH BELANJA	1.545.887.505,00	1.476.090.487,00	(69.797.018,00)	95,48	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.545.887.505,00)	(1.476.090.487,00)	69.797.018,00	95,48	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.545.887.505,00)	(1.476.090.487,00)	69.797.018,00	95,48	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tanambulava

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		5	BELANJA DAERAH	1.879.276.807,00	1.816.981.274,00	(62.295.533,00)	96,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.879.276.807,00	1.816.981.274,00	(62.295.533,00)	96,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.552.019.347,00	1.504.081.945,00	(47.937.402,00)	96,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.490.759.347,00	1.442.821.945,00	(47.937.402,00)	96,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.490.759.347,00	1.442.821.945,00	(47.937.402,00)	96,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.490.759.347,00	1.442.821.945,00	(47.937.402,00)	96,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	61.260.000,00	61.260.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	61.260.000,00	61.260.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.260.000,00	61.260.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0006	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	127.357.460,00	118.280.310,00	(9.077.150,00)	92,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.045.360,00	13.045.360,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.045.360,00	13.045.360,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.045.360,00	13.045.360,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.280.100,00	3.255.950,00	(24.150,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.280.100,00	3.255.950,00	(24.150,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.280.100,00	3.255.950,00	(24.150,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	94.232.000,00	85.329.000,00	(8.903.000,00)	90,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	94.232.000,00	85.329.000,00	(8.903.000,00)	90,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.232.000,00	85.329.000,00	(8.903.000,00)	90,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	16.800.000,00	16.650.000,00	(150.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.650.000,00	(150.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.650.000,00	(150.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	91.300.000,00	88.219.019,00	(3.080.981,00)	96,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.000.000,00	11.919.019,00	(80.981,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.919.019,00	(80.981,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.919.019,00	(80.981,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	78.300.000,00	75.300.000,00	(3.000.000,00)	96,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	78.300.000,00	75.300.000,00	(3.000.000,00)	96,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.300.000,00	75.300.000,00	(3.000.000,00)	96,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	84.700.000,00	82.500.000,00	(2.200.000,00)	97,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	84.700.000,00	82.500.000,00	(2.200.000,00)	97,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.700.000,00	82.500.000,00	(2.200.000,00)	97,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.700.000,00	82.500.000,00	(2.200.000,00)	97,40	
				JUMLAH BELANJA	1.879.276.807,00	1.816.981.274,00	(62.295.533,00)	96,68	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.879.276.807,00)	(1.816.981.274,00)	62.295.533,00	96,68	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.879.276.807,00)	(1.816.981.274,00)	62.295.533,00	96,68	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Gumbasa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		5	BELANJA DAERAH	1.454.956.132,00	1.369.349.821,00	(85.606.311,00)	94,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.454.956.132,00	1.369.349.821,00	(85.606.311,00)	94,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.209.639.502,00	1.125.305.805,00	(84.333.697,00)	93,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.165.839.502,00	1.081.505.805,00	(84.333.697,00)	92,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.165.839.502,00	1.081.505.805,00	(84.333.697,00)	92,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.165.839.502,00	1.081.505.805,00	(84.333.697,00)	92,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	12.230.000,00	12.230.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	12.230.000,00	12.230.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.230.000,00	12.230.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.230.000,00	12.230.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	76.282.350,00	76.282.350,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.037.200,00	6.037.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.037.200,00	6.037.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.037.200,00	6.037.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.685.150,00	2.685.150,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.685.150,00	2.685.150,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.685.150,00	2.685.150,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	67.560.000,00	67.560.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	67.560.000,00	67.560.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.560.000,00	67.560.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	92.604.280,00	91.519.552,00	(1.084.728,00)	98,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.000.000,00	4.915.272,00	(1.084.728,00)	81,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.915.272,00	(1.084.728,00)	81,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.915.272,00	(1.084.728,00)	81,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	86.604.280,00	86.604.280,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	86.604.280,00	86.604.280,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.604.280,00	86.604.280,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	64.200.000,00	64.012.114,00	(187.886,00)	99,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	64.200.000,00	64.012.114,00	(187.886,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.200.000,00	64.012.114,00	(187.886,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	64.012.114,00	(187.886,00)	99,70	
				JUMLAH BELANJA	1.454.956.132,00	1.369.349.821,00	(85.606.311,00)	94,11	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.454.956.132,00)	(1.369.349.821,00)	85.606.311,00	94,11	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.454.956.132,00)	(1.369.349.821,00)	85.606.311,00	94,11	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Pipikoro

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		5	BELANJA DAERAH	1.852.444.222,00	1.794.350.141,00	(58.094.081,00)	96,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.852.444.222,00	1.794.350.141,00	(58.094.081,00)	96,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.442.055.362,00	1.384.013.141,00	(58.042.221,00)	95,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.442.055.362,00	1.384.013.141,00	(58.042.221,00)	95,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.442.055.362,00	1.384.013.141,00	(58.042.221,00)	95,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.442.055.362,00	1.384.013.141,00	(58.042.221,00)	95,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	352.848.860,00	352.837.000,00	(11.860,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	154.208.860,00	154.204.000,00	(4.860,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	154.208.860,00	154.204.000,00	(4.860,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.208.860,00	154.204.000,00	(4.860,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	198.640.000,00	198.633.000,00	(7.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	144.065.000,00	144.058.000,00	(7.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.065.000,00	144.058.000,00	(7.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	5.2	BELANJA MODAL	54.575.000,00	54.575.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.575.000,00	54.575.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	57.540.000,00	57.500.000,00	(40.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	57.540.000,00	57.500.000,00	(40.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.540.000,00	57.500.000,00	(40.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.540.000,00	57.500.000,00	(40.000,00)	99,93	
				JUMLAH BELANJA	1.852.444.222,00	1.794.350.141,00	(58.094.081,00)	96,86	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.852.444.222,00)	(1.794.350.141,00)	58.094.081,00	96,86	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.852.444.222,00)	(1.794.350.141,00)	58.094.081,00	96,86	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sigi Biromaru

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000		5	BELANJA DAERAH	1.932.217.545,00	1.897.822.658,00	(34.394.887,00)	98,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.932.217.545,00	1.897.822.658,00	(34.394.887,00)	98,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.625.131.235,00	1.590.835.948,00	(34.295.287,00)	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.580.371.235,00	1.546.075.948,00	(34.295.287,00)	97,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.580.371.235,00	1.546.075.948,00	(34.295.287,00)	97,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.580.371.235,00	1.546.075.948,00	(34.295.287,00)	97,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	44.760.000,00	44.760.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.760.000,00	44.760.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.760.000,00	44.760.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	10.124.310,00	10.124.310,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	10.124.310,00	10.124.310,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.124.310,00	10.124.310,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.724.310,00	7.724.310,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	117.116.200,00	117.059.300,00	(56.900,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.770.000,00	17.756.000,00	(14.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.770.000,00	17.756.000,00	(14.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.770.000,00	17.756.000,00	(14.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.286.200,00	10.255.300,00	(30.900,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.286.200,00	10.255.300,00	(30.900,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.286.200,00	10.255.300,00	(30.900,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	89.060.000,00	89.048.000,00	(12.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	89.060.000,00	89.048.000,00	(12.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.060.000,00	89.048.000,00	(12.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	179.845.800,00	179.803.100,00	(42.700,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.000.000,00	16.957.300,00	(42.700,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.957.300,00	(42.700,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.957.300,00	(42.700,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	158.845.800,00	158.845.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	158.845.800,00	158.845.800,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.845.800,00	158.845.800,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.932.217.545,00	1.897.822.658,00	(34.394.887,00)	98,21	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.932.217.545,00)	(1.897.822.658,00)	34.394.887,00	98,21	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.932.217.545,00)	(1.897.822.658,00)	34.394.887,00	98,21	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sigi Kota

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000		5	BELANJA DAERAH	1.598.741.565,00	1.521.734.377,00	(77.007.188,00)	95,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.598.741.565,00	1.521.734.377,00	(77.007.188,00)	95,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.356.221.415,00	1.282.498.757,00	(73.722.658,00)	94,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.301.171.415,00	1.227.448.757,00	(73.722.658,00)	94,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.301.171.415,00	1.227.448.757,00	(73.722.658,00)	94,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.301.171.415,00	1.227.448.757,00	(73.722.658,00)	94,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	55.050.000,00	55.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	55.050.000,00	55.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.050.000,00	55.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	98.836.900,00	97.378.900,00	(1.458.000,00)	98,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	44.046.900,00	42.768.900,00	(1.278.000,00)	97,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.546.900,00	17.278.900,00	(268.000,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.546.900,00	17.278.900,00	(268.000,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	26.500.000,00	25.490.000,00	(1.010.000,00)	96,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	25.490.000,00	(1.010.000,00)	96,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	54.790.000,00	54.610.000,00	(180.000,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	54.790.000,00	54.610.000,00	(180.000,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.790.000,00	54.610.000,00	(180.000,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	60.000.000,00	59.428.000,00	(572.000,00)	99,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	55.000.000,00	54.428.000,00	(572.000,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.428.000,00	(572.000,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.428.000,00	(572.000,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	76.633.250,00	75.378.720,00	(1.254.530,00)	98,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	76.633.250,00	75.378.720,00	(1.254.530,00)	98,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	76.633.250,00	75.378.720,00	(1.254.530,00)	98,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.633.250,00	75.378.720,00	(1.254.530,00)	98,36	
				JUMLAH BELANJA	1.598.741.565,00	1.521.734.377,00	(77.007.188,00)	95,18	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.598.741.565,00)	(1.521.734.377,00)	77.007.188,00	95,18	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.598.741.565,00)	(1.521.734.377,00)	77.007.188,00	95,18	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	5.719.799.300,00	5.590.581.667,00	(129.217.633,00)	97,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.802.113.400,00	2.681.754.097,00	(120.359.303,00)	95,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	104.364.200,00	101.376.750,00	(2.987.450,00)	97,13	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	104.364.200,00	101.376.750,00	(2.987.450,00)	97,13	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	62.864.200,00	62.754.000,00	(110.200,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.864.200,00	62.754.000,00	(110.200,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	41.500.000,00	38.622.750,00	(2.877.250,00)	93,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.500.000,00	38.622.750,00	(2.877.250,00)	93,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.217.126.020,00	2.109.108.063,00	(108.017.957,00)	95,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.143.386.020,00	2.035.368.063,00	(108.017.957,00)	94,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.143.386.020,00	2.035.368.063,00	(108.017.957,00)	94,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.143.386.020,00	2.035.368.063,00	(108.017.957,00)	94,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	73.740.000,00	73.740.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	73.740.000,00	73.740.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.740.000,00	73.740.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	38.262.000,00	37.936.260,00	(325.740,00)	99,14	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	38.262.000,00	37.936.260,00	(325.740,00)	99,14	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	38.262.000,00	37.936.260,00	(325.740,00)	99,14	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.262.000,00	37.936.260,00	(325.740,00)	99,14	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	245.117.980,00	237.483.480,00	(7.634.500,00)	96,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	221.117.980,00	213.483.480,00	(7.634.500,00)	96,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	221.117.980,00	213.483.480,00	(7.634.500,00)	96,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.117.980,00	213.483.480,00	(7.634.500,00)	96,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	197.243.200,00	195.849.544,00	(1.393.656,00)	99,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	197.243.200,00	195.849.544,00	(1.393.656,00)	99,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	197.243.200,00	195.849.544,00	(1.393.656,00)	99,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.243.200,00	195.849.544,00	(1.393.656,00)	99,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.153.062.600,00	1.152.579.004,00	(483.596,00)	99,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.153.062.600,00	1.152.579.004,00	(483.596,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0008		PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	1.153.062.600,00	1.152.579.004,00	(483.596,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.146.480.600,00	1.145.997.004,00	(483.596,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.146.480.600,00	1.145.997.004,00	(483.596,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	6.582.000,00	6.582.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.582.000,00	6.582.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	559.760.400,00	559.724.166,00	(36.234,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	559.760.400,00	559.724.166,00	(36.234,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	559.760.400,00	559.724.166,00	(36.234,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	559.760.400,00	559.724.166,00	(36.234,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.175.200,00	84.175.200,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	475.585.200,00	475.548.966,00	(36.234,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	68.670.000,00	68.670.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.04.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	68.670.000,00	68.670.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.04.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	68.670.000,00	68.670.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	68.670.000,00	68.670.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.670.000,00	32.670.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.036.192.900,00	1.027.854.400,00	(8.338.500,00)	99,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.036.192.900,00	1.027.854.400,00	(8.338.500,00)	99,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	802.804.900,00	800.466.400,00	(2.338.500,00)	99,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	802.804.900,00	800.466.400,00	(2.338.500,00)	99,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.804.900,00	602.392.400,00	(412.500,00)	99,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	198.074.000,00	(1.926.000,00)	99,03	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0006		PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	233.388.000,00	227.388.000,00	(6.000.000,00)	97,42	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	233.388.000,00	227.388.000,00	(6.000.000,00)	97,42	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.388.000,00	227.388.000,00	(6.000.000,00)	97,42	
				JUMLAH BELANJA	5.719.799.300,00	5.590.581.667,00	(129.217.633,00)	97,74	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.719.799.300,00)	(5.590.581.667,00)	129.217.633,00	97,74	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.719.799.300,00)	(5.590.581.667,00)	129.217.633,00	97,74	

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KABUPATEN SIGI
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	551.619.250.115,40	526.442.156.107,00	43.843.260.807,60	42.614.847.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	322.071.989.897,00	302.712.141.840,00	15.647.300.661,00	14.945.804.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	322.071.989.897,00	302.712.141.840,00	15.647.300.661,00	14.945.804.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	266.816.430.317,00	248.136.025.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	266.816.430.317,00	248.136.025.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	266.816.430.317,00	248.136.025.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	49.987.411.330,00	49.680.019.380,00	15.647.300.661,00	14.945.804.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26.954.309.601,00	27.254.900.823,00	10.627.783.915,00	9.919.246.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	63.250.000,00	63.250.000,00	511.750.000,00	510.904.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	232.100.000,00	232.100.000,00	1.877.900.000,00	1.875.577.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	98.374.000,00	98.362.650,00	682.661.285,00	676.012.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.385.500.000,00	1.371.702.480,00	925.000.000,00	924.737.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	401.019.971,00	382.138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20.317.804.370,00	20.769.658.604,00	5.068.096.630,00	4.397.774.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.690.002.031,00	1.662.716.548,00	38.776.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.162.859.229,00	2.085.384.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	459.400.000,00	457.587.443,00	455.600.000,00	430.780.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17.500.000,00	5.500.000,00	44.500.000,00	44.450.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	126.500.000,00	126.500.000,00	1.023.500.000,00	1.020.408.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11.432.328.454,00	11.070.733.860,00	3.915.303.280,00	3.932.631.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	323.000.000,00	321.994.710,00	392.000.000,00	391.724.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	486.650.000,00	481.379.793,00	928.350.000,00	928.145.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	133.000.000,00	132.849.652,00	178.000.000,00	177.704.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	139.630.050,00	139.199.550,00	199.354.980,00	195.587.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	630.488.404,00	629.259.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	603.368.600,00	579.683.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.760.265.700,00	8.731.698.205,00	1.517.598.300,00	1.539.470.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	55.925.700,00	54.669.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.008.868.275,00	7.614.405.997,00	1.101.113.466,00	1.079.295.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	238.200.000,00	235.670.495,00	133.500.000,00	133.232.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.135.353.000,00	1.132.672.700,00	542.513.466,00	541.689.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	207.435.700,00	207.312.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.268.636.000,00	3.942.604.480,00	24.600.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	226.522.000,00	189.305.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.932.721.575,00	1.906.840.046,00	400.500.000,00	399.874.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.591.905.000,00	3.739.978.700,00	3.100.000,00	14.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	226.175.000,00	156.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.365.730.000,00	3.583.055.700,00	3.100.000,00	14.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.268.148.250,00	4.896.096.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.268.148.250,00	4.896.096.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.268.148.250,00	4.896.096.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	176.937.479.122,40	172.499.855.210,00	10.998.163.909,60	10.743.148.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	88.313.316.851,40	84.901.653.104,00	3.992.436.106,60	3.984.679.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.098.244.124,00	48.505.149.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.098.244.124,00	48.505.149.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.098.244.124,00	48.505.149.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	33.097.485.011,40	31.489.052.147,00	3.992.436.106,60	3.984.679.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.599.289.196,40	7.533.990.467,00	3.759.859.606,60	3.752.141.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	198.579.544,40	198.052.500,00	3.759.859.606,60	3.752.141.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	342.772.000,00	335.005.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.896.957.332,00	6.839.960.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	160.980.320,00	160.972.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.498.195.815,00	23.955.061.680,00	232.576.500,00	232.537.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	107.960.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	118.400.000,00	118.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	88.000.000,00	45.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	48.051.000,00	48.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200.390.394,00	199.472.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	368.470.000,00	332.846.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	254.171.043,00	251.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	631.119.084,00	630.979.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18.591.215.841,00	17.581.058.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	44.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.360.212.040,00	1.234.126.239,00	232.576.500,00	232.537.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	896.063.584,00	806.941.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.949.032.250,00	1.812.533.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	590.835.579,00	583.118.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.405.235.716,00	4.203.222.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	53.791.000,00	53.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	53.791.000,00	53.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.182.691.716,00	2.988.055.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	592.941.716,00	571.555.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.589.750.000,00	2.416.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.168.753.000,00	1.161.376.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.168.753.000,00	1.161.376.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	469.902.000,00	468.988.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	179.515.000,00	178.798.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	179.515.000,00	178.798.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	145.549.000,00	145.352.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	145.549.000,00	145.352.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	144.838.000,00	144.837.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	144.838.000,00	144.837.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	242.450.000,00	235.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242.450.000,00	235.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	242.450.000,00	235.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	51.478.218.774,00	52.741.218.476,00	6.189.069.703,00	6.081.490.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.492.038.774,00	42.764.461.830,00	1.794.024.985,00	1.693.729.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	0,00	119.966.615,00	118.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	119.966.615,00	118.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.163.900.000,00	1.163.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.163.900.000,00	1.163.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	40.328.138.774,00	41.600.561.830,00	1.674.058.370,00	1.575.129.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	40.328.138.774,00	41.600.561.830,00	1.674.058.370,00	1.575.129.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.869.180.000,00	9.867.859.125,00	4.395.044.718,00	4.387.761.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.585.080.000,00	6.583.759.125,00	4.395.044.718,00	4.387.761.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	585.080.000,00	583.802.919,00	4.395.044.718,00	4.387.761.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.000.000.000,00	5.999.956.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.284.100.000,00	3.284.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.284.100.000,00	3.284.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	117.000.000,00	108.897.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.000.000,00	108.897.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.000.000,00	108.897.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas Biromaru	3.655.365.577,00	3.605.548.352,00	180.470.672,00	180.155.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.655.365.577,00	3.605.548.352,00	180.470.672,00	180.155.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.655.365.577,00	3.605.548.352,00	180.470.672,00	180.155.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	108.630.000,00	108.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.600.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	247.003.000,00	245.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.900.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92.792.000,00	90.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.561.883.577,00	2.540.717.765,00	180.470.672,00	180.155.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	279.057.000,00	257.661.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	78.600.000,00	80.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Dolo	2.657.499.505,00	2.547.518.002,00	73.911.000,00	66.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.650.899.505,00	2.540.918.002,00	73.911.000,00	66.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.650.899.505,00	2.540.918.002,00	73.911.000,00	66.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	302.885.000,00	302.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	27.400.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.200.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.800.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	172.761.000,00	168.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.615.000.505,00	1.538.225.493,00	73.911.000,00	66.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	263.831.000,00	260.707.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.000.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	93.922.000,00	84.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Tinggede	1.297.557.528,00	1.255.496.545,00	41.740.000,00	41.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.285.259.528,00	1.244.096.545,00	41.740.000,00	41.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.285.259.528,00	1.244.096.545,00	41.740.000,00	41.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89.760.000,00	66.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	246.710.000,00	245.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.600.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.700.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	129.400.000,00	128.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	503.966.528,00	492.562.545,00	41.740.000,00	41.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	195.023.000,00	194.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.298.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.298.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.298.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Marawola	3.521.122.348,00	3.520.206.834,00	40.607.000,00	19.683.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.282.295.348,00	3.288.672.715,00	40.607.000,00	19.683.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.282.295.348,00	3.288.672.715,00	40.607.000,00	19.683.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89.568.000,00	87.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36.000.000,00	34.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	21.000.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.200.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	228.844.000,00	218.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.000.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.400.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	160.476.000,00	159.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.594.427.348,00	2.616.565.715,00	40.607.000,00	19.683.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	78.080.000,00	77.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	238.827.000,00	231.534.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	238.827.000,00	231.534.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	238.827.000,00	231.534.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Kaleke	2.506.581.043,00	2.414.215.830,00	42.198.393,00	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.500.693.043,00	2.410.840.830,00	42.198.393,00	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.500.693.043,00	2.410.840.830,00	42.198.393,00	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	128.800.000,00	121.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	270.194.000,00	269.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	162.850.000,00	164.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.490.686.043,00	1.415.436.830,00	42.198.393,00	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	248.953.000,00	240.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.510.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.888.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.888.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.888.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Baluase	2.810.776.147,00	2.577.646.006,00	63.197.000,00	60.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.799.337.147,00	2.566.946.006,00	63.197.000,00	60.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.799.337.147,00	2.566.946.006,00	63.197.000,00	60.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69.816.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	80.400.000,00	68.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	21.500.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	324.445.000,00	304.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.500.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.000.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	178.938.000,00	166.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.754.406.147,00	1.635.684.490,00	63.197.000,00	60.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	259.682.000,00	201.996.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.439.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.439.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.439.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Kinovaro	1.642.290.773,00	1.539.579.733,00	36.977.000,00	18.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.639.980.773,00	1.537.269.733,00	36.977.000,00	18.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.639.980.773,00	1.537.269.733,00	36.977.000,00	18.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.186.000,00	44.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	89.000.000,00	84.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	65.450.000,00	65.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	31.200.000,00	37.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	23.400.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	59.750.000,00	48.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	246.306.000,00	226.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	681.816.773,00	654.719.505,00	36.977.000,00	18.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	240.372.000,00	205.547.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Dombusoi	1.250.978.469,00	1.185.852.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.250.978.469,00	1.185.852.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.250.978.469,00	1.185.852.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	146.520.000,00	142.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.790.000,00	46.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	237.451.000,00	205.868.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.615.000,00	11.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	115.408.000,00	115.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	361.991.469,00	337.822.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	222.481.000,00	217.258.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.407.000,00	14.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	62.960.000,00	62.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Kamaipura	1.431.000.005,00	1.300.161.048,00	48.603.751,00	48.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.408.500.005,00	1.278.561.048,00	48.603.751,00	48.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.408.500.005,00	1.278.561.048,00	48.603.751,00	48.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.800.000,00	36.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.000.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	240.801.000,00	236.505.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.000.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	119.270.000,00	115.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	566.253.005,00	525.010.730,00	48.603.751,00	48.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	199.915.000,00	159.687.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	23.411.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	22.500.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.500.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22.500.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Panderee	2.339.188.320,00	2.164.272.820,00	39.205.680,00	36.592.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.336.388.320,00	2.164.272.820,00	39.205.680,00	36.592.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.336.388.320,00	2.164.272.820,00	39.205.680,00	36.592.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	115.661.000,00	115.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	71.280.000,00	71.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	21.600.000,00	19.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.640.000,00	20.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	244.249.000,00	236.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.780.000,00	16.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.010.000,00	18.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.390.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.000.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	151.756.000,00	140.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.389.192.320,00	1.280.637.651,00	39.205.680,00	36.592.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	237.750.000,00	200.322.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18.060.000,00	17.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Kulawi	2.123.804.965,00	2.071.188.525,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.117.904.965,00	2.065.288.525,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.117.904.965,00	2.065.288.525,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.000.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	48.675.000,00	48.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.945.000,00	9.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	238.096.000,00	237.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	158.180.000,00	150.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.225.075.965,00	1.185.422.525,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	224.919.000,00	221.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.514.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Gimpu	1.885.622.593,00	1.576.820.218,00	60.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.656.739.593,00	1.434.256.969,00	60.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.656.739.593,00	1.434.256.969,00	60.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.116.000,00	38.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.006.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.424.000,00	25.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.920.000,00	2.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	39.200.000,00	19.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	256.978.000,00	209.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19.068.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.800.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.700.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.872.000,00	9.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	106.041.000,00	96.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.042.514.593,00	951.488.969,00	60.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	29.410.000,00	29.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	17.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	228.883.000,00	142.563.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	228.883.000,00	142.563.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	228.883.000,00	142.563.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Lindu	1.245.620.440,00	1.225.279.476,00	7.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.245.620.440,00	1.225.279.476,00	7.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.245.620.440,00	1.225.279.476,00	7.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	230.191.400,00	251.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	125.790.000,00	125.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	344.467.440,00	325.285.204,00	7.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	333.021.600,00	324.005.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Kantewu	1.330.094.354,00	1.188.332.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.326.106.354,00	1.184.344.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.326.106.354,00	1.184.344.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	245.477.000,00	162.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	430.172.354,00	382.012.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	225.207.000,00	219.061.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		Puskesmas Banasu	978.004.194,00	788.846.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	978.004.194,00	788.846.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	978.004.194,00	788.846.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76.808.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	211.930.000,00	135.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.450.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	83.377.000,00	70.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	171.414.194,00	121.892.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	201.860.000,00	173.844.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	39.365.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	49.500.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		Puskesmas Towulu	1.052.597.100,00	993.809.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.052.597.100,00	993.809.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.052.597.100,00	993.809.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	262.466.000,00	261.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11.260.000,00	11.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.218.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	64.490.000,00	55.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	242.867.100,00	223.229.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	202.646.000,00	178.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018		Puskesmas Palolo	2.818.326.041,00	2.563.038.925,00	101.700.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.812.326.041,00	2.563.038.925,00	101.700.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.812.326.041,00	2.563.038.925,00	101.700.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	60.000.000,00	59.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	76.800.000,00	51.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	21.000.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	260.384.000,00	229.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	157.305.000,00	147.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.906.780.041,00	1.769.884.457,00	101.700.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	228.127.000,00	189.979.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	36.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.630.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		Puskesmas Banpres	1.402.025.768,00	1.304.346.957,00	51.395.000,00	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.380.239.768,00	1.291.546.957,00	51.395.000,00	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.380.239.768,00	1.291.546.957,00	51.395.000,00	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.260.000,00	48.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.400.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.500.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	285.982.000,00	283.984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.997.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.400.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.900.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.460.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	143.311.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	536.641.768,00	486.754.378,00	51.395.000,00	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	208.388.000,00	213.788.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	21.786.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.786.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21.786.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020		Puskesmas Nokilalaki	1.197.488.327,00	1.034.823.468,00	24.043.604,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.197.488.327,00	1.034.823.468,00	24.043.604,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.197.488.327,00	1.034.823.468,00	24.043.604,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	114.400.000,00	89.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	199.385.000,00	129.773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	38.200.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	135.431.000,00	129.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	364.611.327,00	344.650.351,00	24.043.604,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	208.520.000,00	180.050.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	28.141.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.532.710.327,00	27.771.256.652,00	14.726.676.562,00	14.465.371.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	28.532.710.327,00	27.771.256.652,00	14.726.676.562,00	14.465.371.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.968.908.689,00	7.548.963.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.150.760,00	90.512.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.623.000,00	16.622.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.000.000,00	23.973.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.000.000,00	21.985.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.527.760,00	13.930.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.897.356.929,00	4.778.292.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.301.716.929,00	4.203.802.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	595.640.000,00	574.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.600.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.600.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	976.690.000,00	849.976.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.600.000,00	193.590.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	84.087.800,00	83.802.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	695.402.200,00	568.983.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.659.750.000,00	1.541.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.150.000,00	129.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.509.600.000,00	1.412.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.361.000,00	276.607.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	321.277.000,00	266.607.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.084.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.835.688.468,00	4.618.675.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.225.000.000,00	3.008.435.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	407.294.000,00	407.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.817.706.000,00	2.601.141.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.610.688.468,00	1.610.240.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.610.688.468,00	1.610.240.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.976.155.438,00	2.945.417.015,00	9.303.501.562,00	9.144.373.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.976.155.438,00	2.945.417.015,00	9.303.501.562,00	9.144.373.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.826.155.438,00	1.796.497.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00	4.169.808.562,00	4.086.555.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00	2.244.077.000,00	2.197.068.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.150.000.000,00	1.148.919.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00	2.889.616.000,00	2.860.748.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	90.039.900,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.039.900,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	90.039.900,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	298.200.000,00	295.950.000,00	1.000.000.000,00	978.234.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	298.200.000,00	295.950.000,00	1.000.000.000,00	978.234.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	1.000.000.000,00	978.234.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	298.200.000,00	295.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.782.325.000,00	1.777.934.429,00	50.000.000,00	49.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.782.325.000,00	1.777.934.429,00	50.000.000,00	49.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	50.000.000,00	49.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	532.325.000,00	527.934.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	9.541.651.532,00	9.484.584.190,00	4.323.175.000,00	4.292.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	9.541.651.532,00	9.484.584.190,00	4.323.175.000,00	4.292.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.332.340.000,00	2.293.140.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	200.000.000,00	183.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	0,00	0,00	4.323.175.000,00	4.292.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	700.000.000,00	698.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.809.311.532,00	5.809.311.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	354.841.300,00	342.073.078,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	354.841.300,00	342.073.078,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	354.841.300,00	342.073.078,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	684.900.000,00	667.658.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	403.400.000,00	402.935.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	210.069.800,00	209.605.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	193.330.200,00	193.329.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	281.500.000,00	264.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	281.500.000,00	264.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.902.430.533,00	7.772.280.408,00	1.977.276.000,00	1.970.284.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.902.430.533,00	7.772.280.408,00	1.977.276.000,00	1.970.284.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.631.691.835,00	2.530.483.487,00	142.191.000,00	141.364.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.258.968,00	73.356.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.014.335,00	9.625.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.065.600,00	2.707.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.565.600,00	5.557.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.644.033,00	9.514.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.370.800,00	5.857.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.634.000,00	4.563.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.964.600,00	35.530.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.035.194.244,00	1.947.863.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.871.758.264,00	1.784.624.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.640.000,00	152.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.795.980,00	10.599.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.168.400,00	7.315.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.168.400,00	7.315.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.816.043,00	89.626.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.754.770,00	8.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.467.273,00	6.450.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.594.000,00	74.761.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	142.191.000,00	141.364.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	142.191.000,00	141.364.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.624.180,00	311.782.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.324.180,00	10.616.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.000.000,00	31.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272.300.000,00	269.166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.130.000,00	93.038.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.400.000,00	84.308.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.499.000.000,00	2.496.732.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.499.000.000,00	2.496.732.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	2.499.000.000,00	2.496.732.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.813.750.000,00	1.813.103.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.813.750.000,00	1.813.103.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.813.750.000,00	1.813.103.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	957.988.698,00	931.960.954,00	1.835.085.000,00	1.828.919.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	957.988.698,00	931.960.954,00	1.835.085.000,00	1.828.919.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	200.000.000,00	199.500.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	757.988.698,00	732.460.876,00	1.835.085.000,00	1.828.919.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.437.217.347,00	9.110.730.586,00	381.343.675,00	377.738.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.746.394.291,00	5.531.050.064,00	102.505.075,00	100.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.758.556.693,00	2.667.451.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.758.556.693,00	2.667.451.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.758.556.693,00	2.667.451.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.987.837.598,00	2.863.598.692,00	102.505.075,00	100.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	2.987.837.598,00	2.863.598.692,00	102.505.075,00	100.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2.987.837.598,00	2.863.598.692,00	102.505.075,00	100.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.690.823.056,00	3.579.680.522,00	278.838.600,00	276.918.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.621.096.209,00	2.557.713.880,00	265.000.000,00	264.779.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.386.096.209,00	2.324.453.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.386.096.209,00	2.324.453.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.000.000,00	233.259.920,00	265.000.000,00	264.779.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.000.000,00	233.259.920,00	265.000.000,00	264.779.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.069.726.847,00	1.021.966.642,00	13.838.600,00	12.138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.069.726.847,00	1.021.966.642,00	13.838.600,00	12.138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.069.726.847,00	1.021.966.642,00	13.838.600,00	12.138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.737.422.889,00	6.575.891.411,00	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		Dinas Sosial	6.737.422.889,00	6.575.891.411,00	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.578.157.537,00	2.469.330.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.578.157.537,00	2.469.330.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.578.157.537,00	2.469.330.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	30.440.900,00	30.440.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	30.440.900,00	30.440.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	30.440.900,00	30.440.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.128.824.452,00	4.076.120.321,00	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.308.240.032,00	3.256.318.479,00	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	443.054.700,00	428.011.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.475.577.332,00	2.439.786.239,00	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	389.608.000,00	388.520.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	820.584.420,00	819.801.842,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	29.937.800,00	29.620.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	736.977.520,00	736.889.336,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	53.669.100,00	53.292.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	72.427.809.109,00	69.188.140.424,50	5.945.600.530,00	5.587.382.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.343.222.412,00	4.252.981.110,00	10.500.000,00	9.823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	4.343.222.412,00	4.252.981.110,00	10.500.000,00	9.823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.212.755.412,00	2.147.485.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.212.755.412,00	2.147.485.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.212.755.412,00	2.147.485.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.097.967.000,00	2.080.355.202,00	10.500.000,00	9.823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.682.382.500,00	1.665.253.047,00	10.500.000,00	9.823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	805.656.500,00	803.001.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	876.726.000,00	862.251.664,00	10.500.000,00	9.823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	415.584.500,00	415.102.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	415.584.500,00	415.102.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	32.500.000,00	25.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	25.425.250,00	18.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	25.425.250,00	18.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	7.074.750,00	6.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	7.074.750,00	6.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.277.537.264,00	3.057.853.290,00	72.360.000,00	71.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.277.537.264,00	3.057.853.290,00	72.360.000,00	71.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.685.749.836,00	1.611.591.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.685.749.836,00	1.611.591.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.685.749.836,00	1.611.591.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	270.300.000,00	179.411.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	270.300.000,00	179.411.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	270.300.000,00	179.411.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	220.848.428,00	217.648.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	151.828.428,00	148.628.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	151.828.428,00	148.628.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	312.917.500,00	290.101.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.554.000,00	22.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.554.000,00	22.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	287.363.500,00	267.251.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	287.363.500,00	267.251.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	557.581.500,00	546.960.655,00	72.360.000,00	71.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	557.581.500,00	546.960.655,00	72.360.000,00	71.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	557.581.500,00	546.960.655,00	72.360.000,00	71.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	230.140.000,00	212.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.140.000,00	212.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	230.140.000,00	212.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.681.535.627,00	4.483.099.697,00	86.000.000,00	84.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	4.681.535.627,00	4.483.099.697,00	86.000.000,00	84.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.368.702.827,00	4.171.037.570,00	36.000.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.530.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.530.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.080.914.777,00	3.895.406.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.080.914.777,00	3.895.406.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.644.950,00	88.738.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.232.950,00	16.232.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.412.000,00	72.505.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	36.000.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	36.000.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.613.100,00	133.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	23.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.613.100,00	109.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000,00	45.938.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000,00	11.938.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	10.728.300,00	10.728.300,00	50.000.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.728.300,00	10.728.300,00	50.000.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	10.728.300,00	10.728.300,00	50.000.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	260.272.250,00	260.078.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	224.150.000,00	224.087.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	215.750.000,00	215.687.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	36.122.250,00	35.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	36.122.250,00	35.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	19.450.000,00	18.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	19.450.000,00	18.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	19.450.000,00	18.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	22.382.250,00	22.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	22.382.250,00	22.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	22.382.250,00	22.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.190.845.755,00	5.986.332.791,00	3.570.985.630,00	3.337.926.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	6.190.845.755,00	5.986.332.791,00	3.570.985.630,00	3.337.926.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.476.461.874,00	2.335.386.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.476.461.874,00	2.335.386.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.476.461.874,00	2.335.386.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	101.391.443,00	93.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	101.391.443,00	93.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	80.873.000,00	80.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	20.518.443,00	12.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	3.537.698.688,00	3.502.177.978,00	3.570.985.630,00	3.337.926.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.537.698.688,00	3.502.177.978,00	3.570.985.630,00	3.337.926.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.563.590.230,00	1.556.923.292,00	3.420.586.430,00	3.192.717.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	261.220.000,00	260.720.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	1.712.888.458,00	1.684.534.518,00	150.399.200,00	145.209.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	75.293.750,00	55.270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	75.293.750,00	55.270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	75.293.750,00	55.270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.972.924.252,00	4.735.710.389,00	3.500.000,00	3.496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.972.924.252,00	4.735.710.389,00	3.500.000,00	3.496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.869.980.252,00	4.632.871.389,00	3.500.000,00	3.496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.678.000,00	90.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	41.684.000,00	41.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	48.994.000,00	48.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.337.267.252,00	3.130.169.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.185.487.252,00	2.980.129.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	151.780.000,00	150.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	559.364.250,00	553.516.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	943.560,00	943.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.935.040,00	28.367.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.861.000,00	1.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	417.840.650,00	415.444.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.184.000,00	104.498.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	3.500.000,00	3.496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	3.500.000,00	3.496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.000.000,00	653.434.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000,00	74.434.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	591.000.000,00	579.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.470.750,00	197.885.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.270.750,00	168.685.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	33.948.000,00	33.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	16.350.000,00	16.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	16.350.000,00	16.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	34.048.000,00	34.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	16.450.000,00	16.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	16.450.000,00	16.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	31.390.000,00	31.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	31.390.000,00	31.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	15.040.000,00	14.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.491.376.626,00	6.299.802.898,00	82.788.000,00	80.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.491.376.626,00	6.299.802.898,00	82.788.000,00	80.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.252.270.826,00	2.139.179.650,00	25.288.000,00	25.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.222.358.026,00	2.109.314.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.222.358.026,00	2.109.314.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.912.800,00	29.864.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.912.800,00	29.864.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	25.288.000,00	25.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	25.288.000,00	25.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.239.105.800,00	4.160.623.248,00	57.500.000,00	55.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.239.105.800,00	4.160.623.248,00	57.500.000,00	55.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4.239.105.800,00	4.160.623.248,00	57.500.000,00	55.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.667.431.481,00	8.338.903.070,00	440.000.000,00	417.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.667.431.481,00	8.338.903.070,00	440.000.000,00	417.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.390.119.358,00	2.305.054.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.390.119.358,00	2.305.054.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.390.119.358,00	2.305.054.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	984.861.123,00	808.626.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	984.861.123,00	808.626.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	271.541.123,00	271.232.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	713.320.000,00	537.393.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.292.451.000,00	5.225.222.347,00	440.000.000,00	417.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.680.451.000,00	4.616.919.107,00	440.000.000,00	417.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	6.851.000,00	6.848.896,00	440.000.000,00	417.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	4.631.600.000,00	4.568.285.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	42.000.000,00	41.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000,00	17.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.000.000,00	17.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	594.000.000,00	590.322.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	594.000.000,00	590.322.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.237.931.957,00	4.864.889.132,00	273.094.900,00	180.988.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	5.237.931.957,00	4.864.889.132,00	273.094.900,00	180.988.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.646.400.057,00	4.426.130.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.066.025.361,00	3.857.692.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.975.365.361,00	3.767.032.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.660.000,00	90.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.040.696,00	67.728.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.341.976,00	10.850.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.061.720,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.600.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.437.000,00	49.235.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.584.000,00	154.988.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.104.000,00	11.108.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.480.000,00	143.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.250.000,00	338.219.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	336.240.000,00	332.409.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.010.000,00	5.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	509.491.900,00	412.308.972,00	267.634.900,00	180.988.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	76.550.000,00	76.500.000,00	205.194.900,00	123.143.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	76.550.000,00	76.500.000,00	205.194.900,00	123.143.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	263.001.900,00	248.434.612,00	62.440.000,00	57.845.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	263.001.900,00	248.434.612,00	62.440.000,00	57.845.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	169.940.000,00	87.374.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	169.940.000,00	87.374.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	82.040.000,00	26.450.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	82.040.000,00	26.450.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	82.040.000,00	26.450.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.306.921.836,00	4.144.129.688,00	311.472.000,00	311.007.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	4.306.921.836,00	4.144.129.688,00	311.472.000,00	311.007.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.168.041.836,00	4.009.401.388,00	311.472.000,00	311.007.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.177.000,00	15.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.177.000,00	15.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.071.559.151,00	1.996.648.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.997.879.151,00	1.922.968.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.680.000,00	73.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.280.685,00	190.591.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.509.485,00	37.959.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.725.200,00	4.586.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.913.000,00	4.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.133.000,00	143.131.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	124.472.000,00	124.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	124.472.000,00	124.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.742.440.000,00	1.663.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.010.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.524.530.000,00	1.477.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.000.000,00	151.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.645.000,00	130.062.656,00	187.000.000,00	186.550.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132.645.000,00	130.062.656,00	187.000.000,00	186.550.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	119.695.000,00	119.678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	119.695.000,00	119.678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	119.695.000,00	119.678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	19.185.000,00	15.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.185.000,00	15.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	19.185.000,00	15.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.652.083.323,00	6.889.437.255,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.652.083.323,00	6.889.437.255,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.874.951.123,00	2.767.851.044,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.716.618,00	7.706.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.717.407,00	4.717.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	449.811,00	449.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	449.750,00	449.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	599.900,00	599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	899.850,00	889.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	299.950,00	299.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	299.950,00	299.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.724.291.116,00	1.668.233.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.620.256.116,00	1.564.198.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.035.000,00	104.034.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.330.000,00	8.279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.330.000,00	8.279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.623.389,00	407.717.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.740.600,00	14.740.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	743.689,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.096.100,00	11.095.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386.043.000,00	381.390.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.531.000,00	545.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.031.000,00	515.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.459.000,00	130.129.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.019.000,00	127.769.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	12.350.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12.350.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	12.350.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	12.350.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.350.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	12.350.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	647.920.000,00	647.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	647.920.000,00	647.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	647.920.000,00	647.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.161.172.200,00	2.508.953.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.161.172.200,00	2.508.953.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	2.896.172.200,00	2.248.090.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	180.000.000,00	179.263.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	85.000.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	943.340.000,00	942.462.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	943.340.000,00	942.462.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	623.000.000,00	622.462.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	320.340.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.727.084.116,00	4.516.272.400,00	8.000.000,00	7.980.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.727.084.116,00	4.516.272.400,00	8.000.000,00	7.980.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.752.657.843,00	3.630.763.674,00	8.000.000,00	7.980.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.934.280,00	25.751.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.476.280,00	8.884.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.058.000,00	6.875.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.400.000,00	9.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.293.113.616,00	3.209.174.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.211.153.616,00	3.127.214.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.960.000,00	81.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.429.947,00	77.702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.441.180,00	5.884.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.158.767,00	4.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.830.000,00	67.270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	8.000.000,00	7.980.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	8.000.000,00	7.980.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.260.000,00	176.215.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.260.000,00	176.215.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	163.867.593,00	162.148.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	163.867.593,00	162.148.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	163.867.593,00	162.148.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	483.187.800,00	445.247.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	483.187.800,00	445.247.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	348.295.850,00	315.678.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	134.891.950,00	129.569.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	144.135.000,00	121.216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	144.135.000,00	121.216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35.942.840,00	34.655.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	84.507.160,00	65.061.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	23.685.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	183.235.880,00	156.895.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	183.235.880,00	156.895.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	34.565.080,00	32.511.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	82.970.800,00	60.120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	65.700.000,00	64.263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.336.904.567,00	5.191.803.330,00	639.800.000,00	637.531.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemuda Dan Olahraga	5.336.904.567,00	5.191.803.330,00	639.800.000,00	637.531.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.026.676.947,00	1.923.110.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.026.676.947,00	1.923.110.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.026.676.947,00	1.923.110.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	295.641.398,00	291.103.520,00	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	295.641.398,00	291.103.520,00	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	26.600.998,00	26.019.260,00	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	269.040.400,00	265.084.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.514.185.222,00	2.499.193.868,00	564.200.000,00	561.931.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.173.414.900,00	1.165.281.673,00	460.700.000,00	458.431.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.173.414.900,00	1.165.281.673,00	460.700.000,00	458.431.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	546.982.542,00	543.530.555,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	546.982.542,00	543.530.555,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	793.787.780,00	790.381.640,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	685.564.000,00	683.616.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	108.223.780,00	106.764.850,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.401.000,00	478.395.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.401.000,00	478.395.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	500.401.000,00	478.395.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.890.634.800,00	3.879.417.722,50	400.000.000,00	399.954.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.890.634.800,00	3.879.417.722,50	400.000.000,00	399.954.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.420.300.480,00	2.413.967.628,50	400.000.000,00	399.954.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.420.300.480,00	2.413.967.628,50	400.000.000,00	399.954.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1.424.988.000,00	1.419.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	995.312.480,00	994.147.628,50	400.000.000,00	399.954.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.041.008.000,00	1.036.123.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.041.008.000,00	1.036.123.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.041.008.000,00	1.036.123.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	429.326.320,00	429.326.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	429.326.320,00	429.326.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	429.326.320,00	429.326.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.506.845.343,00	2.402.993.452,00	45.000.000,00	43.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.506.845.343,00	2.402.993.452,00	45.000.000,00	43.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.778.776.843,00	1.683.900.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.778.776.843,00	1.683.900.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.778.776.843,00	1.683.900.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	723.068.500,00	714.992.742,00	45.000.000,00	43.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	392.051.300,00	385.461.116,00	45.000.000,00	43.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	285.413.000,00	278.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	92.388.300,00	92.323.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0,00	0,00	45.000.000,00	43.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	331.017.200,00	329.531.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	83.941.000,00	83.781.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	84.675.000,00	83.429.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	162.401.200,00	162.320.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	5.000.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5.000.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	144.529.750,00	144.514.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	144.529.750,00	144.514.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	142.129.750,00	142.114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	142.129.750,00	142.114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	57.469.750,00	57.469.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	84.660.000,00	84.644.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	43.914.744.743,00	42.210.145.698,00	1.807.837.500,00	1.779.303.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.243.723.452,00	2.229.751.608,00	72.000.000,00	71.615.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	2.243.723.452,00	2.229.751.608,00	72.000.000,00	71.615.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.109.223.452,00	2.097.046.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.109.223.452,00	2.097.046.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.109.223.452,00	2.097.046.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	134.500.000,00	132.705.406,00	72.000.000,00	71.615.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	134.500.000,00	132.705.406,00	72.000.000,00	71.615.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	134.500.000,00	132.705.406,00	72.000.000,00	71.615.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.942.184.227,00	3.619.094.179,00	314.220.000,00	312.939.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	3.942.184.227,00	3.619.094.179,00	314.220.000,00	312.939.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.151.749.227,00	2.916.509.880,00	37.250.000,00	36.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.394.000,00	51.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.394.000,00	51.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.013.831.797,00	1.888.062.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.939.818.667,00	1.814.049.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.013.130,00	74.013.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.743.430,00	296.582.130,00	11.250.000,00	11.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.371.430,00	39.191.430,00	11.250.000,00	11.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.524.000,00	13.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.848.000,00	243.866.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.500.000,00	489.969.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	114.469.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	379.500.000,00	375.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.280.000,00	190.345.480,00	26.000.000,00	25.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.280.000,00	190.345.480,00	26.000.000,00	25.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	372.982.500,00	357.939.700,00	257.530.000,00	256.842.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	372.982.500,00	357.939.700,00	257.530.000,00	256.842.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	157.598.000,00	157.225.200,00	257.530.000,00	256.842.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	215.384.500,00	200.714.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	246.513.000,00	179.349.099,00	19.440.000,00	19.214.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	246.513.000,00	179.349.099,00	19.440.000,00	19.214.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	246.513.000,00	179.349.099,00	19.440.000,00	19.214.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	170.939.500,00	165.295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	147.975.000,00	142.645.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	117.430.000,00	115.232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.545.000,00	27.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	22.964.500,00	22.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	22.964.500,00	22.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	32.011.804.333,00	30.758.868.523,00	1.167.475.500,00	1.144.387.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.430.203.484,00	11.990.248.341,00	931.803.500,00	910.927.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.766.141.124,00	8.424.081.557,00	48.000.000,00	47.985.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.016.000,00	32.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.016.000,00	32.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.735.090.424,00	6.417.881.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.735.090.424,00	6.417.881.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	486.989.800,00	478.798.740,00	48.000.000,00	47.985.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.408.640,00	92.408.640,00	48.000.000,00	47.985.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.581.160,00	44.580.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	341.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.033.144.900,00	1.016.559.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.000.000,00	57.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	975.144.900,00	958.582.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477.900.000,00	477.887.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	477.900.000,00	477.887.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.413.797.560,00	3.317.543.885,00	883.803.500,00	862.942.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.413.797.560,00	3.317.543.885,00	883.803.500,00	862.942.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.413.797.560,00	3.317.543.885,00	883.803.500,00	862.942.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	103.128.800,00	102.527.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	103.128.800,00	102.527.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	103.128.800,00	102.527.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	147.136.000,00	146.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	147.136.000,00	146.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.08.0000	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	147.136.000,00	146.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	19.581.600.849,00	18.768.620.182,00	235.672.000,00	233.459.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.660.143.617,00	16.050.988.763,00	164.172.000,00	162.080.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.500.000,00	105.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.400.000,00	84.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.100.000,00	20.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.039.846.613,00	13.633.910.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.018.746.613,00	13.612.994.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.100.000,00	20.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.100.000,00	21.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.100.000,00	21.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	961.827.004,00	960.954.040,00	164.172.000,00	162.080.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.028.400,00	148.276.438,00	164.172.000,00	162.080.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.241.604,00	44.241.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	768.557.000,00	768.435.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	944.920.000,00	788.349.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.000.000,00	58.959.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	856.920.000,00	729.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.950.000,00	541.714.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	461.950.000,00	441.714.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	170.400.000,00	170.281.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	170.400.000,00	170.281.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	170.400.000,00	170.281.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	420.200.000,00	321.396.250,00	71.500.000,00	71.379.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	420.200.000,00	321.396.250,00	71.500.000,00	71.379.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	420.200.000,00	321.396.250,00	71.500.000,00	71.379.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.330.857.232,00	2.225.953.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.330.857.232,00	2.225.953.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.193.257.232,00	1.137.853.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.09.0000	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	1.137.600.000,00	1.088.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.188.508.981,00	5.111.790.899,00	254.142.000,00	250.360.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.188.508.981,00	5.111.790.899,00	254.142.000,00	250.360.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.780.568.982,00	2.708.167.405,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.333.640.833,00	2.270.600.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.221.768.833,00	2.158.728.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	111.872.000,00	111.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.737.549,00	125.908.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.174.600,00	24.374.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.747.949,00	45.747.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.815.000,00	55.786.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.100.000,00	196.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.100.000,00	174.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.330.600,00	97.618.384,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.340.600,00	93.198.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	290.883.999,00	288.874.802,00	244.142.000,00	240.360.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	283.703.999,00	281.739.802,00	244.142.000,00	240.360.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	283.703.999,00	281.739.802,00	244.142.000,00	240.360.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	7.180.000,00	7.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7.180.000,00	7.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.076.650.000,00	2.076.607.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	2.076.650.000,00	2.076.607.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.076.650.000,00	2.076.607.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	40.406.000,00	38.141.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	40.406.000,00	38.141.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	38.706.000,00	36.441.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	528.523.750,00	490.640.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	528.523.750,00	490.640.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	528.373.750,00	490.490.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	528.373.750,00	490.490.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	148.468.500,00	142.562.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	368.955.250,00	336.977.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	78.485.992.783,00	74.704.203.201,00	8.852.961.424,00	8.546.102.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	49.815.489.779,00	46.707.964.272,00	7.929.544.704,00	7.640.804.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		Bagian Pemerintahan	624.382.008,00	623.505.996,00	4.299.800.000,00	4.100.871.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	624.382.008,00	623.505.996,00	4.299.800.000,00	4.100.871.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	594.382.008,00	593.505.996,00	4.299.800.000,00	4.100.871.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	208.031.408,00	207.617.196,00	4.280.000.000,00	4.082.436.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	69.271.800,00	69.110.800,00	19.800.000,00	18.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	317.078.800,00	316.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		Bagian Kesejahteraan Rakyat	18.629.218.825,00	16.845.386.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	18.629.218.825,00	16.845.386.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	18.629.218.825,00	16.845.386.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	18.617.480.925,00	16.833.650.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5.369.500,00	5.367.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	6.368.400,00	6.368.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	148.990.436,00	148.441.060,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	148.990.436,00	148.441.060,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	105.230.436,00	104.706.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	57.780.000,00	57.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	32.737.328,00	32.513.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	14.713.108,00	14.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	43.760.000,00	43.735.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	17.200.000,00	17.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	11.340.000,00	11.340.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		Bagian Administrasi Pembangunan	116.827.920,00	116.542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	116.827.920,00	116.542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	116.827.920,00	116.542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	16.059.400,00	16.039.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	37.572.800,00	37.401.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	63.195.720,00	63.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		Bagian Hukum	1.154.357.980,00	1.114.099.128,00	8.000.000,00	7.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.154.357.980,00	1.114.099.128,00	8.000.000,00	7.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.154.357.980,00	1.114.099.128,00	8.000.000,00	7.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	735.897.800,00	718.417.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	243.499.160,00	228.598.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	174.961.020,00	167.083.252,00	8.000.000,00	7.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		Bagian Umum	14.466.416.287,00	13.627.217.104,00	3.398.567.704,00	3.320.553.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.466.416.287,00	13.627.217.104,00	3.398.567.704,00	3.320.553.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	201.550.000,00	200.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	201.550.000,00	200.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.030.106.049,00	5.703.711.669,00	976.141.854,00	968.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.376.700,00	34.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.521.115,00	89.509.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	196.481.000,00	196.251.000,00	976.141.854,00	968.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.953.234,00	33.949.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.703.174.000,00	2.532.585.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.972.600.000,00	2.817.043.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.497.000,00	55.214.740,00	2.422.425.850,00	2.351.803.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	968.685.850,00	957.311.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.940.000,00	2.940.000,00	1.278.740.000,00	1.224.990.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.557.000,00	52.274.740,00	175.000.000,00	169.500.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.914.190.000,00	2.794.294.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	558.200.000,00	554.116.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.275.990.000,00	2.160.177.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.759.530.344,00	2.487.292.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.896.759.304,00	1.762.265.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.973.450,00	328.009.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.370.000,00	94.031.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	304.427.590,00	302.986.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.134.352.894,00	1.022.057.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	582.292.894,00	568.927.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	312.060.000,00	308.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240.000.000,00	144.724.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.370.190.000,00	1.364.116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	720.000.000,00	715.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	580.120.000,00	579.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	70.070.000,00	69.208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.018.003.900,00	1.997.105.371,00	64.200.000,00	63.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.018.003.900,00	1.997.105.371,00	64.200.000,00	63.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.018.003.900,00	1.997.105.371,00	64.200.000,00	63.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	609.094.238,00	588.437.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.175.916.000,00	1.175.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	232.993.662,00	232.751.400,00	64.200.000,00	63.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		Bagian Organisasi	252.885.940,00	245.318.864,00	112.368.000,00	111.143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	252.885.940,00	245.318.864,00	112.368.000,00	111.143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	252.885.940,00	245.318.864,00	112.368.000,00	111.143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	77.287.800,00	76.773.255,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.741.500,00	94.984.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	24.937.800,00	23.996.469,00	82.368.000,00	81.143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	49.918.840,00	49.564.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	267.476.500,00	259.313.417,00	36.609.000,00	36.607.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	267.476.500,00	259.313.417,00	36.609.000,00	36.607.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	267.476.500,00	259.313.417,00	36.609.000,00	36.607.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	146.186.800,00	142.072.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	62.704.700,00	58.751.500,00	28.800.000,00	28.798.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	58.585.000,00	58.488.999,00	7.809.000,00	7.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011		Bagian Perencanaan dan Keuangan	12.136.929.983,00	11.731.034.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.136.929.983,00	11.731.034.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	405.765.600,00	403.656.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.380.400,00	204.906.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.316.000,00	5.315.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	568.700,00	552.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.349.100,00	6.328.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.054.200,00	10.033.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.798.400,00	20.650.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.298.800,00	155.868.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.698.803.063,00	11.295.237.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.093.554.683,00	10.690.484.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	598.309.000,00	597.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.417.580,00	3.325.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	896.800,00	877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.361.320,00	32.141.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.005.720,00	3.949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.687.600,00	4.577.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.668.000,00	23.613.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	28.670.503.004,00	27.996.238.929,00	923.416.720,00	905.298.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD Kab. Sigi	28.670.503.004,00	27.996.238.929,00	923.416.720,00	905.298.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.086.367.868,00	19.523.875.202,00	923.416.720,00	905.298.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.000.000,00	28.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.000.000,00	28.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.450.059.953,00	3.331.738.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.092.083.953,00	2.987.925.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	357.976.000,00	343.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.309.844.465,00	2.306.165.467,00	923.416.720,00	905.298.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.172.680,00	65.119.725,00	25.000.000,00	24.445.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	413.439.380,00	411.910.589,00	898.416.720,00	880.853.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	153.862.571,00	152.900.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	205.401.000,00	205.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.470.968.834,00	1.470.935.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.204.121.100,00	2.036.493.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.783.800,00	88.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336.000.000,00	240.673.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.779.337.300,00	1.707.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.303.400,00	224.884.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.413.400,00	164.741.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.890.000,00	60.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	10.974.388.950,00	10.731.958.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.884.388.950,00	10.641.988.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000,00	89.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	865.650.000,00	863.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	350.750.000,00	349.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	514.900.000,00	513.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8.584.135.136,00	8.472.363.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	120.900.000,00	120.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100.904.000,00	100.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	40.600.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	19.704.000,00	19.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	40.600.000,00	40.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.026.306.745,00	1.915.456.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.026.500.000,00	947.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	999.806.745,00	967.876.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	557.723.200,00	557.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	557.723.200,00	557.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	5.274.301.191,00	5.274.106.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.187.301.191,00	5.187.754.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	29.000.000,00	28.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	58.000.000,00	57.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	223.827.261.603,00	183.316.436.170,00	6.770.214.125,00	6.541.374.438,00	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	222.406.329.564,00	193.017.321.488,00
5.01			PERENCANAAN	5.607.650.718,00	5.393.202.964,00	640.000.000,00	546.266.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.607.650.718,00	5.393.202.964,00	640.000.000,00	546.266.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.308.689.238,00	4.142.369.865,00	615.000.000,00	521.368.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.581.874,00	229.276.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.758.394,00	7.707.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.860.100,00	4.844.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.860.100,00	4.836.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.503.900,00	2.503.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.018.700,00	4.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.973.600,00	18.963.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.607.080,00	185.421.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.001.082.054,00	2.867.765.101,00	15.000.000,00	14.929.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.735.941.864,00	2.605.762.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.462.370,00	194.358.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	67.677.820,00	67.644.010,00	15.000.000,00	14.929.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.670.510,00	219.965.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.386.040,00	14.385.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.347.470,00	18.347.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.510.000,00	5.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.427.000,00	181.724.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,00	44.676.390,00	600.000.000,00	506.439.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.676.390,00	600.000.000,00	506.439.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.500.000,00	420.870.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	409.500.000,00	382.870.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.854.800,00	359.816.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	353.724.800,00	350.097.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.130.000,00	9.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	529.305.500,00	525.719.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	345.312.500,00	341.837.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	4.581.000,00	4.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	999.900,00	999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	28.612.000,00	28.591.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20.100.200,00	20.008.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	46.287.000,00	46.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	27.685.400,00	27.634.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	217.047.000,00	213.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	10.455.000,00	10.454.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.400.000,00	4.399.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.155.000,00	2.154.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	173.538.000,00	173.426.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	68.798.100,00	68.767.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1.377.900,00	1.377.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	103.362.000,00	103.281.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	769.655.980,00	725.113.712,00	25.000.000,00	24.897.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	447.625.470,00	431.982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.826.760,00	12.250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.940.800,00	7.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.458.800,00	5.255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	7.981.800,00	7.828.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76.684.910,00	76.115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.408.800,00	4.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	145.537.100,00	136.742.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	186.786.500,00	181.625.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	161.314.740,00	136.891.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.005.300,00	43.565.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	60.720.000,00	38.078.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.130.400,00	11.130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	17.569.040,00	17.227.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	160.715.770,00	156.240.200,00	25.000.000,00	24.897.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	41.823.750,00	41.292.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.332.120,00	9.985.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	27.865.000,00	27.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	19.461.000,00	18.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.431.900,00	35.068.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.716.000,00	9.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.420.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.666.000,00	5.629.300,00	25.000.000,00	24.897.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	209.957.244.944,00	170.114.211.668,00	6.130.214.125,00	5.995.108.327,00	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	222.406.329.564,00	193.017.321.488,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	194.021.985.115,00	154.810.045.979,00	5.193.180.125,00	5.098.904.468,00	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	222.406.329.564,00	193.017.321.488,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	187.338.235.355,00	148.777.002.374,00	4.583.625.125,00	4.500.744.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.076.787,00	125.062.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.006.587,00	24.006.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	84.370.200,00	84.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	182.140.169.715,00	143.975.833.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	181.040.206.275,00	142.942.168.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	764.112.000,00	698.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	335.851.440,00	335.083.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.150.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.450.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	153.750.000,00	152.219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	153.750.000,00	152.219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	887.414.333,00	863.371.719,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000,00	44.989.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.722.800,00	32.722.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.681.446,00	59.564.387,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.609.887,00	28.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.640.000,00	57.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	588.260.200,00	565.122.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	4.393.625.125,00	4.318.371.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	3.581.000.000,00	3.579.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	400.595.000,00	383.435.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	362.030.125,00	355.935.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.258.081.120,00	1.910.608.866,00	30.000.000,00	22.477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.800.000,00	206.555.930,00	30.000.000,00	22.477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.993.281.120,00	1.704.052.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.768.593.400,00	1.744.776.038,00	145.000.000,00	144.896.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	585.058.400,00	573.574.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	363.860.000,00	362.423.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	799.545.000,00	788.648.368,00	145.000.000,00	144.896.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.367.006.760,00	4.880.363.235,00	111.000.000,00	106.476.500,00	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	222.406.329.564,00	193.017.321.488,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.328.056.480,00	2.011.417.160,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	81.752.800,00	74.776.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	61.878.800,00	59.878.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	53.650.000,00	38.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	10.500.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.596.597.640,00	1.334.914.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	517.233.640,00	492.644.800,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.458.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2.458.400,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1.458.400,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.068.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.528.358.100,00	1.429.049.459,00	4.500.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	147.330.000,00	101.278.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.210.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	58.080.000,00	54.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	372.600.000,00	367.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3.400.000,00	3.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	161.000.000,00	149.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2.550.000,00	2.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	411.520.000,00	388.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	267.944.100,00	264.568.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	101.724.000,00	95.965.800,00	4.500.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.416.090.180,00	1.345.994.616,00	81.500.000,00	77.626.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	170.709.900,00	166.131.500,00	50.000.000,00	47.477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	84.700.000,00	71.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	413.524.000,00	401.228.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	367.183.740,00	365.582.490,00	18.000.000,00	17.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	110.329.100,00	107.050.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	9.171.680,00	8.931.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	92.960.000,00	86.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	41.914.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	6.271.680,00	6.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	4.801.580,00	4.593.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	68.994.500,00	47.626.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	41.914.000,00	40.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	3.616.000,00	3.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	94.502.000,00	93.902.000,00	0,00	0,00	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	222.406.329.564,00	193.017.321.488,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	94.502.000,00	93.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.428.836.800,00	188.039.828.724,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977.492.764,00	4.977.492.764,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.316.743.000,00	1.152.680.370,00	498.555.000,00	491.683.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.316.743.000,00	1.152.680.370,00	498.555.000,00	491.683.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	53.135.000,00	27.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	719.950.000,00	703.010.670,00	296.835.000,00	290.255.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	110.464.700,00	104.814.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	229.310.900,00	158.765.900,00	201.720.000,00	201.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	69.637.400,00	30.264.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	21.300.000,00	16.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	107.695.000,00	106.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000		Badan Pendapatan Daerah	15.935.259.829,00	15.304.165.689,00	937.034.000,00	896.203.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.597.903.369,00	14.094.871.655,00	898.034.000,00	858.241.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.271.376,00	6.245.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.017.800,00	1.017.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.997.841,00	1.972.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	425.985,00	425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	309.750,00	309.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.193.867.140,00	7.914.851.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.939.364.740,00	7.667.081.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156.155.000,00	153.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.617.400,00	22.490.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.730.000,00	71.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.203.653,00	39.464.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	596.524,00	596.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.847.129,00	22.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.760.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.306.531.176,00	1.235.032.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.805.800,00	124.459.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.599.609,00	73.345.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	255.297.826,00	227.085.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.301.000,00	38.792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	771.075.000,00	770.941.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	451.941,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.598.500,00	4.000.000,00	898.034.000,00	858.241.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	598.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	13.184.000,00	13.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	764.850.000,00	726.369.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	120.000.000,00	118.774.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.698.230.000,00	3.653.878.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.730.000,00	7.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.268.100.000,00	3.240.248.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.400.000,00	405.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.344.201.524,00	1.241.398.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	601.296.000,00	532.151.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.458.000,00	111.070.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.680.000,00	43.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	559.767.524,00	554.937.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.337.356.460,00	1.209.294.034,00	39.000.000,00	37.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.337.356.460,00	1.209.294.034,00	39.000.000,00	37.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	29.100.702,00	28.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	46.366.000,00	40.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	331.967.500,00	245.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0,00	0,00	39.000.000,00	37.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	115.147.407,00	114.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	23.820.635,00	16.809.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	95.200.000,00	94.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	98.948.320,00	97.445.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	153.658.659,00	137.909.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	21.600.000,00	21.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	216.170.788,00	211.499.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	16.160.200,00	15.832.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	75.000.249,00	74.532.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	88.956.000,00	85.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	25.260.000,00	24.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	6.217.967.241,00	5.790.142.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia	6.217.967.241,00	5.790.142.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.165.139.111,00	4.930.000.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.390.200,00	27.352.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.390.200,00	27.352.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.122.836.401,00	3.911.377.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.952.319.321,00	3.742.002.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	154.480.000,00	153.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.037.080,00	15.494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.896.510,00	289.893.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.458.900,00	7.458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.612.660,00	67.818.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.419.950,00	61.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.805.000,00	149.619.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.900.000,00	329.232.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000,00	81.171.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.900.000,00	243.060.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.516.000,00	359.544.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	351.476.000,00	343.544.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.040.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.052.828.130,00	860.142.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	285.206.070,00	279.954.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	180.766.060,00	179.104.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	49.071.530,00	47.685.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	12.760.000,00	12.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	42.608.480,00	40.568.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	644.512.110,00	458.633.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	46.072.790,00	45.210.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	598.439.320,00	413.422.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	123.109.950,00	121.554.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	123.109.950,00	121.554.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.538.015.950,00	1.524.295.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	506.382.750,00	494.583.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	506.382.750,00	494.583.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	506.382.750,00	494.583.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	410.627.750,00	408.515.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	410.627.750,00	408.515.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	95.755.000,00	86.067.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	95.755.000,00	86.067.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.634.996.355,00	12.360.823.824,00	467.834.000,00	446.686.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	13.634.996.355,00	12.360.823.824,00	467.834.000,00	446.686.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat Kab. Sigi	13.634.996.355,00	12.360.823.824,00	467.834.000,00	446.686.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.003.561.455,00	9.592.910.424,00	467.834.000,00	446.686.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.654.000,00	12.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.464.000,00	3.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.340.027.820,00	7.128.914.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.240.787.820,00	7.029.674.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.240.000,00	99.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.000.000,00	178.232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.000.000,00	178.232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.066.625.635,00	1.030.722.770,00	467.834.000,00	446.686.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.515.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	547.329.335,00	536.813.115,00	467.834.000,00	446.686.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.179.300,00	25.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.602.000,00	468.224.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.220.000,00	418.600.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	118.383.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.220.000,00	300.217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	897.034.000,00	811.978.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	897.034.000,00	811.978.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.995.304.400,00	2.266.494.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.586.072.400,00	2.014.149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	411.974.000,00	252.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	477.524.000,00	446.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	544.104.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	48.324.000,00	48.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	377.424.000,00	231.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	726.722.400,00	714.897.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	409.232.000,00	252.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	29.408.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	379.824.000,00	239.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	636.130.500,00	501.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	409.551.500,00	300.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	409.551.500,00	300.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	226.579.000,00	200.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	226.579.000,00	200.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	28.757.152.604,00	27.667.008.386,00	373.351.100,00	364.876.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN	28.757.152.604,00	27.667.008.386,00	373.351.100,00	364.876.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Dolo	2.141.284.835,00	2.110.143.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.141.284.835,00	2.110.143.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.910.238.535,00	1.879.097.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.830.917.935,00	1.799.776.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.320.600,00	79.320.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.156.300,00	72.156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.556.300,00	7.556.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.690.000,00	90.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Dolo Barat	2.084.005.225,00	1.996.085.820,00	20.892.000,00	20.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.084.005.225,00	1.996.085.820,00	20.892.000,00	20.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.827.758.095,00	1.742.404.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.780.598.095,00	1.695.244.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.160.000,00	47.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.300.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.300.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.195.780,00	50.185.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.655.380,00	13.653.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.276.000,00	4.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.714.400,00	2.705.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	20.892.000,00	20.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	20.892.000,00	20.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.000.000,00	126.846.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.100.000,00	7.496.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.400.000,00	117.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.751.350,00	69.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.021.350,00	69.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Dolo Selatan	1.619.985.681,00	1.570.871.584,00	11.900.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.619.985.681,00	1.570.871.584,00	11.900.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.373.933.697,00	1.329.543.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.332.653.697,00	1.288.263.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.261.984,00	68.261.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.761.734,00	9.761.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	733.250,00	732.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.947.000,00	30.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	11.900.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	11.900.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.510.000,00	95.856.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	7.346.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.380.000,00	70.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.770.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Kulawi Selatan	1.613.641.705,00	1.559.968.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.613.641.705,00	1.559.968.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.172.371.605,00	1.143.629.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.127.491.605,00	1.099.103.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.880.000,00	44.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.560.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.560.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.510.100,00	262.869.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.246.900,00	36.521.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.861.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	226.402.000,00	226.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.700.000,00	89.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.850.000,00	85.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Kulawi	1.690.122.636,00	1.594.500.629,00	20.618.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.690.122.636,00	1.594.500.629,00	20.618.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.411.726.936,00	1.323.994.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.358.866.936,00	1.272.584.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.860.000,00	51.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.510.700,00	152.510.700,00	20.618.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.875.000,00	6.875.000,00	20.618.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.886.700,00	4.886.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	86.324.000,00	86.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.425.000,00	54.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.925.000,00	99.045.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.500.000,00	1.120.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.925.000,00	97.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.960.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.960.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Lindu	1.202.180.647,00	1.136.133.607,00	7.000.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.202.180.647,00	1.136.133.607,00	7.000.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	901.780.147,00	847.545.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	852.996.147,00	799.198.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.784.000,00	48.346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.393.600,00	4.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.393.600,00	4.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.556.100,00	108.382.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.686.400,00	22.303.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.877.700,00	9.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.992.000,00	76.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	7.000.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	7.000.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.700.000,00	91.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	4.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.750.800,00	84.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.750.800,00	84.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		Kecamatan Marawola	2.244.343.294,00	2.167.826.074,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.244.343.294,00	2.167.826.074,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.970.944.094,00	1.895.646.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.909.344.094,00	1.837.946.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.600.000,00	57.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.594.200,00	123.094.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.308.800,00	9.308.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.805.400,00	4.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	109.480.000,00	108.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.105.000,00	97.564.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.200.000,00	15.824.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.275.000,00	81.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.700.000,00	51.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.700.000,00	51.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		Kecamatan Marawola Barat	1.946.932.002,00	1.843.865.081,00	11.928.100,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.946.932.002,00	1.843.865.081,00	11.928.100,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.698.771.902,00	1.609.836.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.636.131.902,00	1.547.196.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.640.000,00	62.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.142.200,00	119.183.800,00	11.928.100,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.782.200,00	42.623.800,00	11.928.100,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.360.000,00	76.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.077.900,00	46.077.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.377.900,00	7.377.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.940.000,00	68.766.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.940.000,00	68.766.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		Kecamatan Kinovaro	1.971.006.902,00	1.898.631.586,00	40.168.000,00	40.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.971.006.902,00	1.898.631.586,00	40.168.000,00	40.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.719.915.202,00	1.654.005.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.672.304.402,00	1.606.395.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.610.800,00	47.610.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.967.600,00	6.967.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.967.600,00	6.967.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.594.100,00	45.594.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.573.400,00	6.573.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.946.700,00	1.946.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.704.000,00	11.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	40.168.000,00	40.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	40.168.000,00	40.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.730.000,00	155.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	8.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.800.000,00	36.960.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.800.000,00	21.960.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		Kecamatan Palolo	2.081.200.901,00	2.012.718.015,00	124.270.000,00	117.951.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.081.200.901,00	2.012.718.015,00	124.270.000,00	117.951.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.776.211.509,00	1.712.618.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.703.868.109,00	1.641.615.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.343.400,00	71.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.620.000,00	106.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.620.000,00	106.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	14.980.000,00	124.270.000,00	117.951.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	14.980.000,00	124.270.000,00	117.951.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.369.392,00	178.540.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.904.992,00	117.081.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.464.400,00	61.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		Kecamatan Nokilalaki	1.545.887.505,00	1.476.090.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.545.887.505,00	1.476.090.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.250.899.533,00	1.182.497.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.250.899.533,00	1.182.497.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.240.980,00	121.231.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.240.980,00	121.231.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.470.000,00	85.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.470.000,00	85.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.276.992,00	86.891.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.276.992,00	86.891.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		Kecamatan Tanambulava	1.859.276.807,00	1.796.981.274,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.859.276.807,00	1.796.981.274,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.552.019.347,00	1.504.081.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.490.759.347,00	1.442.821.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.260.000,00	61.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.900.000,00	3.900.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.357.460,00	118.280.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.045.360,00	13.045.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.280.100,00	3.255.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	94.232.000,00	85.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.800.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.300.000,00	88.219.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	11.919.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.300.000,00	75.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.700.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.700.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		Kecamatan Gumbasa	1.454.956.132,00	1.369.349.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.454.956.132,00	1.369.349.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.209.639.502,00	1.125.305.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.165.839.502,00	1.081.505.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.230.000,00	12.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.230.000,00	12.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.282.350,00	76.282.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.037.200,00	6.037.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.685.150,00	2.685.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.560.000,00	67.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.604.280,00	91.519.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	4.915.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.604.280,00	86.604.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.200.000,00	64.012.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.200.000,00	64.012.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		Kecamatan Pipikoro	1.797.869.222,00	1.739.775.141,00	54.575.000,00	54.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.797.869.222,00	1.739.775.141,00	54.575.000,00	54.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.442.055.362,00	1.384.013.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.442.055.362,00	1.384.013.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.273.860,00	298.262.000,00	54.575.000,00	54.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.208.860,00	154.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.065.000,00	144.058.000,00	54.575.000,00	54.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.540.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.540.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000		Kecamatan Sigi Biromaru	1.932.217.545,00	1.897.822.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.932.217.545,00	1.897.822.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.625.131.235,00	1.590.835.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.580.371.235,00	1.546.075.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.760.000,00	44.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.124.310,00	10.124.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.124.310,00	10.124.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.116.200,00	117.059.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.770.000,00	17.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.286.200,00	10.255.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	89.060.000,00	89.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.845.800,00	179.803.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000,00	16.957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.845.800,00	158.845.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000		Kecamatan Sigi Kota	1.572.241.565,00	1.496.244.377,00	26.500.000,00	25.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.572.241.565,00	1.496.244.377,00	26.500.000,00	25.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.356.221.415,00	1.282.498.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.301.171.415,00	1.227.448.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.050.000,00	55.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.336.900,00	71.888.900,00	26.500.000,00	25.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.546.900,00	17.278.900,00	26.500.000,00	25.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.790.000,00	54.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	59.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.000.000,00	54.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.633.250,00	75.378.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.633.250,00	75.378.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.671.717.300,00	5.545.376.917,00	48.082.000,00	45.204.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.671.717.300,00	5.545.376.917,00	48.082.000,00	45.204.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.671.717.300,00	5.545.376.917,00	48.082.000,00	45.204.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.760.613.400,00	2.643.131.347,00	41.500.000,00	38.622.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.864.200,00	62.754.000,00	41.500.000,00	38.622.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.864.200,00	62.754.000,00	41.500.000,00	38.622.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.217.126.020,00	2.109.108.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.143.386.020,00	2.035.368.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.740.000,00	73.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.262.000,00	37.936.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.262.000,00	37.936.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.117.980,00	237.483.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.117.980,00	213.483.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.243.200,00	195.849.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	197.243.200,00	195.849.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.146.480.600,00	1.145.997.004,00	6.582.000,00	6.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.146.480.600,00	1.145.997.004,00	6.582.000,00	6.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.146.480.600,00	1.145.997.004,00	6.582.000,00	6.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	559.760.400,00	559.724.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	559.760.400,00	559.724.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	559.760.400,00	559.724.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	68.670.000,00	68.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	68.670.000,00	68.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	68.670.000,00	68.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.036.192.900,00	1.027.854.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.036.192.900,00	1.027.854.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	802.804.900,00	800.466.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	233.388.000,00	227.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	**1.018.338.924.612,40**	**941.434.290.727,49**	**68.109.141.486,60**	**65.925.778.299,50**	**5.650.000.000,00**	**4.944.688.400,00**	**222.406.329.564,00**	**193.017.321.488,00**

Lampiran I.1 (Perkada) : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PERIODE 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	39.100.879.990,74	69.965.831.452,72
PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	39.112.019.642,74	69.965.831.452,46
SUBTOTAL (1-2)	(11.139.652,00)	0,26
SiLPA/(SiKPA)	23.678.355.517,72	39.100.879.990,74
SUBTOTAL (3+4)	23.667.215.865,72	39.100.879.991,00
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	11.139.652,00	(0,26)
LAIN-LAIN	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	23.678.355.517,72	39.100.879.990,74

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KABUPATEN SIGI

LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2025

1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	**PENDAPATAN**	**1.103.972.439.744,82**	**1.215.577.696.469,79**	**(111.605.256.724,97)**	**(9,18)**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**112.383.647.982,15**	**91.306.932.881,52**	**21.076.715.100,63**	**23,08**
7.1.01	Pajak Daerah-LO	46.334.342.633,18	36.624.448.442,50	9.709.894.190,68	26,51
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	2.022.512.540,00	3.039.618.382,00	(1.017.105.842,00)	(33,46)
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.337.214.390,00	2.092.871.872,00	244.342.518,00	11,67
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	61.689.578.418,97	49.549.994.185,02	12.139.584.233,95	24,50
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**112.383.647.982,15**	**91.306.932.881,52**	**21.076.715.100,63**	**23,08**
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**946.364.139.768,60**	**1.097.772.387.805,00**	**(151.408.248.036,40)**	**(13,79)**
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	887.331.280.710,00	1.035.792.461.163,00	(148.461.180.453,00)	(14,33)
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**887.331.280.710,00**	**1.035.792.461.163,00**	**(148.461.180.453,00)**	**(14,33)**
7.2.02	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO**	**59.032.859.058,60**	**61.979.926.642,00**	**(2.947.067.583,40)**	**(4,75)**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	**59.032.859.058,60**	**61.979.926.642,00**	**(2.947.067.583,40)**	**(4,75)**
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	**946.364.139.768,60**	**1.097.772.387.805,00**	**(151.408.248.036,40)**	**(13,79)**
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	**45.224.651.994,07**	**26.498.375.783,27**	**18.726.276.210,80**	**70,67**
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	25.008.604.443,07	10.835.226.028,22	14.173.378.414,85	130,81
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	20.216.047.551,00	15.663.149.755,05	4.552.897.795,95	29,07
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**45.224.651.994,07**	**26.498.375.783,27**	**18.726.276.210,80**	**70,67**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.103.972.439.744,82**	**1.215.577.696.469,79**	**(111.605.256.724,97)**	**(9,18)**
8	**BEBAN**	**1.133.257.413.463,21**	**1.232.701.585.489,41**	**(99.444.172.026,20)**	**(8,07)**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**947.296.855.896,32**	**1.001.812.651.416,41**	**(54.515.795.520,09)**	**(5,44)**
8.1.01	Beban Pegawai	580.934.465.482,00	547.590.556.019,00	33.343.909.463,00	6,09
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	335.525.242.047,86	373.954.141.477,92	(38.428.899.430,06)	(10,28)
8.1.04	Beban Subsidi	2.199.945.127,00	2.450.817.950,00	(250.872.823,00)	(10,24)
8.1.05	Beban Hibah	26.547.165.846,00	70.491.912.244,00	(43.944.746.398,00)	(62,34)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	159.000.000,00	5.136.942.200,00	(4.977.942.200,00)	(96,90)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	1.931.037.393,46	2.188.281.525,49	(257.244.132,03)	(11,76)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**947.296.855.896,32**	**1.001.812.651.416,41**	**(54.515.795.520,09)**	**(5,44)**
8.1.08	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**106.201.245.201,89**	**153.707.605.584,00**	**(47.506.360.382,11)**	**(30,91)**
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**106.201.245.201,89**	**153.707.605.584,00**	**(47.506.360.382,11)**	**(30,91)**
8.3	**BEBAN TRANSFER**	**74.814.623.965,00**	**73.268.582.580,00**	**1.546.041.385,00**	**2,11**
8.3.01	Beban Bagi Hasil	4.977.492.764,00	3.124.684.980,00	1.852.807.784,00	59,30
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	69.073.963.308,00	70.143.897.600,00	(1.069.934.292,00)	(1,53)
8.3.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	763.167.893,00	0,00	763.167.893,00	100,00
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	**74.814.623.965,00**	**73.268.582.580,00**	**1.546.041.385,00**	**2,11**
8.2	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	**4.944.688.400,00**	**3.912.745.909,00**	**1.031.942.491,00**	**26,37**
8.2.01	Beban Tidak Terduga	4.944.688.400,00	3.912.745.909,00	1.031.942.491,00	26,37
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	**4.944.688.400,00**	**3.912.745.909,00**	**1.031.942.491,00**	**26,37**
	JUMLAH BEBAN	**1.133.257.413.463,21**	**1.232.701.585.489,41**	**(99.444.172.026,20)**	**(8,07)**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**(29.284.973.718,39)**	**(17.123.889.019,62)**	**(12.161.084.698,77)**	**71,02**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**	**67.321.480,00**	**0,00**	**67.321.480,00**	**100,00**
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	67.321.480,00	0,00	67.321.480,00	100,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**67.321.480,00**	**0,00**	**67.321.480,00**	**100,00**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(67.321.480,00)**	**0,00**	**(67.321.480,00)**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(29.352.295.198,39)**	**(17.123.889.019,62)**	**(12.228.406.178,77)**	**71,41**

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(29.352.295.198,39)	(17.123.889.019,62)	(12.228.406.178,77)	71,41

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI
KONSOLIDASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.969.786.578.201,86	1.989.430.120.334,80
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(29.352.295.198,39)	(17.123.889.019,62)
RK PPKD	943.533.386.846,00	1.197.818.297.096,68
RK SKPD	(943.533.386.846,00)	(1.197.818.297.096,69)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(102.074.680,00)	(62.864.200,00)
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(19.016.280.512,90)	(2.456.788.913,31)
EKUITAS AKHIR	1.921.315.927.810,57	1.969.786.578.201,86

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KABUPATEN SIGI
NERACA (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	**ASET**	**1.941.604.945.187,53**	**792.956.837.743,15**
1.1	**ASET LANCAR**	**83.101.658.570,09**	**(1.079.656.660.247,04)**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	24.560.079.400,70	39.587.850.026,74
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	21.501.549.199,86	35.079.482.226,88
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	334.557.210,00	59.279.644,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	53.449,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	18.447.993,84	2.184.143,84
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	233.730.150,10	6.659.255,10
1.1.01.07	Kas Lainnya	881.723.882,98	486.970.036,00
1.1.01.10	Kas Dana BOSP	255.618.530,92	136.556.837,92
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	1.334.452.433,00	3.816.664.434,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	26.267.819.927,80	24.326.696.461,50
1.1.03.09	Piutang Pajak Reklame	30.430.546,00	43.650.532,00
1.1.03.12	Piutang Pajak Air Tanah	53.079.273,20	53.009.148,00
1.1.03.14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.136.457.246,60	493.518.243,50
1.1.03.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.106.678.368,00	22.914.060.362,00
1.1.03.19	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	941.174.494,00	822.458.176,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	21.356.118.980,33	14.675.786.039,12
1.1.06.05	Piutang Jasa Giro	0,00	2.186.385.000,00
1.1.06.08	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10.873.267.180,33	7.963.131.352,12
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	9.306.450.400,00	4.057.716.587,00
1.1.06.18	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	1.176.401.400,00	468.553.100,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	13.418.915.826,00	14.555.133.350,00
1.1.08.01	Piutang Bagi Hasil	13.418.915.826,00	14.555.133.350,00
1.1.09	Piutang Lainnya	97.000.000,00	97.000.000,00
1.1.09.02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	97.000.000,00	97.000.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(19.134.232.423,10)	(18.702.589.150,04)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(15.637.766.325,06)	(14.651.255.712,17)
1.1.10.02	Penyisihan Piutang Lainnya	(3.496.466.098,04)	(4.051.333.437,87)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	286.344.735,80	23.865.151.491,06
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	0,00	23.462.042.104,20
1.1.11.02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	286.344.735,80	403.109.386,86
1.1.12	Persediaan	16.249.612.122,56	19.756.608.631,27
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	16.249.612.122,56	19.756.608.631,27
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	(1.197.818.297.096,69)
1.1.13.01	RK SKPD	0,00	(1.197.818.297.096,69)
	JUMLAH ASET LANCAR	**83.101.658.570,09**	**(1.079.656.660.247,04)**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**9.700.000.000,00**	**9.700.000.000,00**
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	9.700.000.000,00	9.700.000.000,00
1.2.02.01	Penyertaan Modal	9.700.000.000,00	9.700.000.000,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	**9.700.000.000,00**	**9.700.000.000,00**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**9.700.000.000,00**	**9.700.000.000,00**
1.3	**ASET TETAP**	**1.681.568.432.224,35**	**1.690.929.554.140,62**
1.3.01	Tanah	127.577.975.778,55	127.577.975.759,55
1.3.01.01	Tanah	127.577.975.778,55	127.577.975.759,55
1.3.02	Peralatan dan Mesin	603.827.015.264,45	581.700.144.892,02
1.3.02.01	Alat Besar	17.952.184.153,00	15.400.698.776,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	133.647.151.431,85	127.637.961.881,88
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.061.219.675,10	5.298.897.925,10

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.04	Alat Pertanian	10.048.979.030,40	4.196.176.430,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	99.252.047.565,15	91.025.709.506,12
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	13.865.962.237,57	13.319.730.284,57
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	167.082.142.573,96	166.956.252.245,53
1.3.02.08	Alat Laboratorium	54.192.851.340,34	59.971.474.790,74
1.3.02.09	Alat Persenjataan	151.491.643,00	156.341.643,00
1.3.02.10	Komputer	94.912.996.026,08	91.406.437.686,08
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	4.450.000,00	4.450.000,00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	59.900.000,00	59.900.000,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	2.358.805.100,00	2.228.573.100,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	20.000.000,00	20.000.000,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	3.454.493.647,00	3.276.259.782,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	762.340.841,00	741.280.841,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	906.647.079.456,90	837.277.284.002,94
1.3.03.01	Bangunan Gedung	859.245.018.594,36	793.612.196.715,40
1.3.03.02	Monumen	11.590.329.576,00	11.590.329.576,00
1.3.03.03	Bangunan Menara	587.040.000,00	587.040.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	35.224.691.286,54	31.487.717.711,54
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.537.612.994.487,68	1.496.179.342.888,97
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	1.033.493.096.546,09	1.008.919.422.041,36
1.3.04.02	Bangunan Air	381.889.678.279,94	371.170.548.128,03
1.3.04.03	Instalasi	52.217.767.713,65	49.234.702.488,58
1.3.04.04	Jaringan	70.012.451.948,00	66.854.670.231,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	46.235.418.656,95	40.004.869.509,95
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	34.943.926.498,94	29.698.201.195,94
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	1.259.524.935,00	1.137.643.731,00
1.3.05.03	Hewan	2.075.882.640,00	1.212.940.000,00
1.3.05.04	Biota Perairan	51.551.600,00	51.551.600,00
1.3.05.05	Tanaman	108.598.000,00	108.598.000,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	7.795.934.983,01	7.795.934.983,01
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	125.245.319.380,90	155.163.922.922,36
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	32.417.705.976,80	63.346.666.710,26
1.3.06.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.051.739.685,18	68.041.382.493,18
1.3.06.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	23.775.873.718,92	23.775.873.718,92
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.665.577.370.801,08)	(1.546.973.985.835,17)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(507.901.093.244,05)	(472.139.335.434,44)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(214.557.506.459,68)	(188.586.036.948,59)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(942.206.389.985,37)	(886.248.613.452,14)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(912.381.111,98)	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	**1.681.568.432.224,35**	**1.690.929.554.140,62**
1.5	**ASET LAINNYA**	**167.234.854.392,09**	**171.983.943.849,57**
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	474.666.514,00	1.472.614.514,65
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	474.666.514,00	1.472.614.514,65
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	10.544.164.540,00	11.040.860.760,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	10.544.164.540,00	11.040.860.760,00
1.5.04	Aset Lain-lain	258.923.217.205,62	261.523.253.532,56
1.5.04.01	Aset Lain-lain	258.923.217.205,62	261.523.253.532,56
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.478.769.539,39)	(5.661.638.392,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.478.769.539,39)	(5.661.638.392,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(95.228.424.328,14)	(96.391.146.565,64)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(95.228.424.328,14)	(96.391.146.565,64)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**167.234.854.392,09**	**171.983.943.849,57**
1.6	**PROPERTI INVESTASI**	**1,00**	**0,00**
1.6.01	Properti Investasi Tanah	1,00	0,00
1.6.01.01	Properti Investasi Tanah	1,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**1,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**1.941.604.945.187,53**	**792.956.837.743,15**
2	**KEWAJIBAN**	**20.289.017.376,96**	**20.988.556.637,98**

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**20.289.017.376,96**	**20.988.556.637,98**
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	232.546.600,98	239.268.325,00
2.1.01.05	Utang PPh Pusat	10.370.913,00	4.053.465,00
2.1.01.06	Utang PPN Pusat	222.175.687,98	235.214.860,00
2.1.06	Utang Belanja	20.034.034.325,98	20.732.476.888,98
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	1.556.457.219,00	858.314.862,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	17.875.891.659,98	19.263.063.098,98
2.1.06.04	Utang Belanja Subsidi	1.333.481,00	2.451.711,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.928.075,00	407.660.217,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.283.541,00	194.903.000,00
2.1.06.09	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.084.000,00	6.084.000,00
2.1.06.13	Utang Belanja Bantuan Keuangan	69.056.350,00	0,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	22.436.450,00	16.811.424,00
2.1.07.01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	16.811.424,00	16.811.424,00
2.1.07.02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	5.625.026,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**20.289.017.376,96**	**20.988.556.637,98**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**20.289.017.376,96**	**20.988.556.637,98**
3	**EKUITAS**	**1.921.315.927.810,57**	**1.969.786.578.201,86**
3.1	**EKUITAS**	**1.921.315.927.810,57**	**1.969.786.578.201,86**
3.1.01	Ekuitas	1.921.315.927.810,57	1.969.786.578.201,86
3.1.01.01	Ekuitas	1.950.668.223.008,96	1.969.786.578.201,86
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(29.352.295.198,39)	0,00
	JUMLAH EKUITAS	**1.921.315.927.810,57**	**1.969.786.578.201,86**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.941.604.945.187,53**	**1.990.775.134.839,84**

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**5.6.1**		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1.1	**1,189,713,396,989.98**	**1,410,150,504,679.44**
Pajak Daerah	5.6.1.1.1	44,393,219,166.00	35,118,053,979.00
Retribusi Daerah	5.6.1.1.2	2,022,512,540.00	3,039,618,382.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.3	2,337,214,390.00	2,092,871,872.00
Lain-lain PAD yang Sah	5.6.1.1.4	52,017,114,258.38	44,573,648,045.39
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.6.1.1.5-10	1,008,552,587,476.00	1,256,834,631,489.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.6.1.1.11-12	60,174,701,608.60	52,890,241,457.00
Pendapatan Hibah		-	-
Dana Darurat		-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.6.1.1.13	20,216,047,551.00	15,601,439,455.05
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**5.6.1.2**	**1,139,396,300,615.50**	**1,237,021,669,130.16**
Belanja Pegawai	5.6.1.2.1	580,775,450,926.00	547,590,556,019.00
Belanja Barang dan Jasa	5.6.1.2.2	331,752,728,828.50	380,749,475,902.16
Belanja Bunga		-	-
Belanja Subsidi	5.6.1.2.3	2,199,945,127.00	2,450,817,950.00
Belanja Hibah	5.6.1.2.4	26,547,165,846.00	69,417,912,244.00
Belanja Bantuan Sosial	5.6.1.2.5	159,000,000.00	5,136,942,200.00
Belanja Imbalan		-	-
Belanja Tidak Terduga	5.6.1.2.6	4,944,688,400.00	3,912,745,909.00
Belanja Bagi Hasil	5.6.1.2.7	4,977,492,764.00	3,124,684,980.00
Belanja Bantuan Keuangan	5.6.1.2.8	188,039,828,724.00	224,638,533,926.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**50,317,096,374.48**	**173,128,835,549.28**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**5.6.2**		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**5.6.2.1**	**175,017,800.00**	**-**
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.6.2.1.1-2	175,017,800.00	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**5.6.2.2**	**65,925,778,299.50**	**203,993,787,011.00**
Belanja Modal Tanah	5.6.2.2.1	-	982,534,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.6.2.2.2	21,994,787,775.00	31,566,114,816.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.6.2.2.3	18,544,762,808.50	67,896,098,558.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.6.2.2.4	19,453,774,146.00	98,114,695,523.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2.5	5,743,677,970.00	5,170,359,809.00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.6.2.2.6	188,775,600.00	263,984,305.00
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Daerah		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		**(65,750,760,499.50)**	**(203,993,787,011.00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**5.6.3**		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		**-**	**-**
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		**-**	**-**
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		**-**	**-**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**5.6.4**		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	**5.6.4.1**	**47,316,483,472.00**	**45,393,706,486.00**
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1	47,316,483,472.00	45,393,706,486.00

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		-	-
Kiriman Uang Masuk		-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	**5.6.4.2**	**47,803,453,508.00**	**45,393,706,486.00**
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2	47,316,483,472.00	45,393,706,486.00
Pemberian Uang Persediaan kepada Bend.		-	-
Koreksi PFK tahun sebelumnya		486,970,036.00	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		**(486,970,036.00)**	**-**
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	**5.6.5**	**(15,920,634,161.02)**	**(30,864,951,461.72)**
SALDO AWAL KAS		**39,587,850,026.74**	**70,452,801,488.46**
KOREKSI SILPA TAHUN LALU		**11,139,652.00**	**-**
SALDO AKHIR KAS		**23,678,355,517.72**	**39,587,850,026.74**

BAB I
PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Laporan Keuangan merupakan media pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu Laporan Keuangan merupakan tahap akhir siklus anggaran untuk satu tahun anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima umum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk laporan keuangan. Untuk maksud tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
c. Neraca;
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e. Laporan Operasional (LO);

f. Laporan Arus Kas (LAK); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

. Dalam penyusunan laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Adapun manfaat dari basis akrual antara lain: memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, serta mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Sigi telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi disusun atas dasar APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2024 dan APBD Perubahan Nomor 07 Tahun 2025 yang bertujuan memberi informasi tentang posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode pelaporan, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga berfungsi membantu dalam menilai kondisi keuangan, keefektifan, dan keefisiensian dalam penyelenggaraan pelaksanaan anggaran serta menentukan ketaatan terhadap kewajiban serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan pemerintah ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan Daerah melainkan untuk melaksanakan asas efisiensi, efektivitas, serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim serta dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Sejalan dengan maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan laporan keuangan pemerintah ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang di dalamnya mencakup keadaan realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan, yang menunjukkan akuntabilitas suatu entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Negara/Daerah antara lain:

a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Ayat (1);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 Ayat (1);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sigi;
m. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Bupati Sigi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Bupati Sigi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025;
q. Peraturan Bupati Sigi Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025; dan

s. Peraturan Bupati Sigi Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Sigi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Ikhtisar Realisasi Pemenuhan Dukungan Program Nasional dan *Mandatory Spending*
- 3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

6.3 Struktur Organisasi dan Formasi Pegawai

BAB VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi tahun 2024 atau tahun sebelumnya, yaitu (minimal):

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 10,47%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,3%;
c. Rasio Gini sebesar 0,252 (belum di hitung PRV);
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,68%;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,91%;
f. Tingkat Inflasi sebesar 3,31%; dan
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp13.589.210.000.

2.1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1.1 Letak, luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Sigi terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Donggala. Kabupaten Sigi terletak antara 0^0 52’16” hingga 2^0 03’21” Lintang Selatan dan 119^0 38’ 45” hingga 119^0 21’ 24” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Sigi, adalah berupa daratan seluas 5.196,02 km2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kabupaten Donggala dan Kota Palu.

Sebelah Selatan	:	Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebelah Timur	:	Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong.
Sebelah Barat	:	Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 1
Peta Kecamatan Dalam Kabupaten Sigi

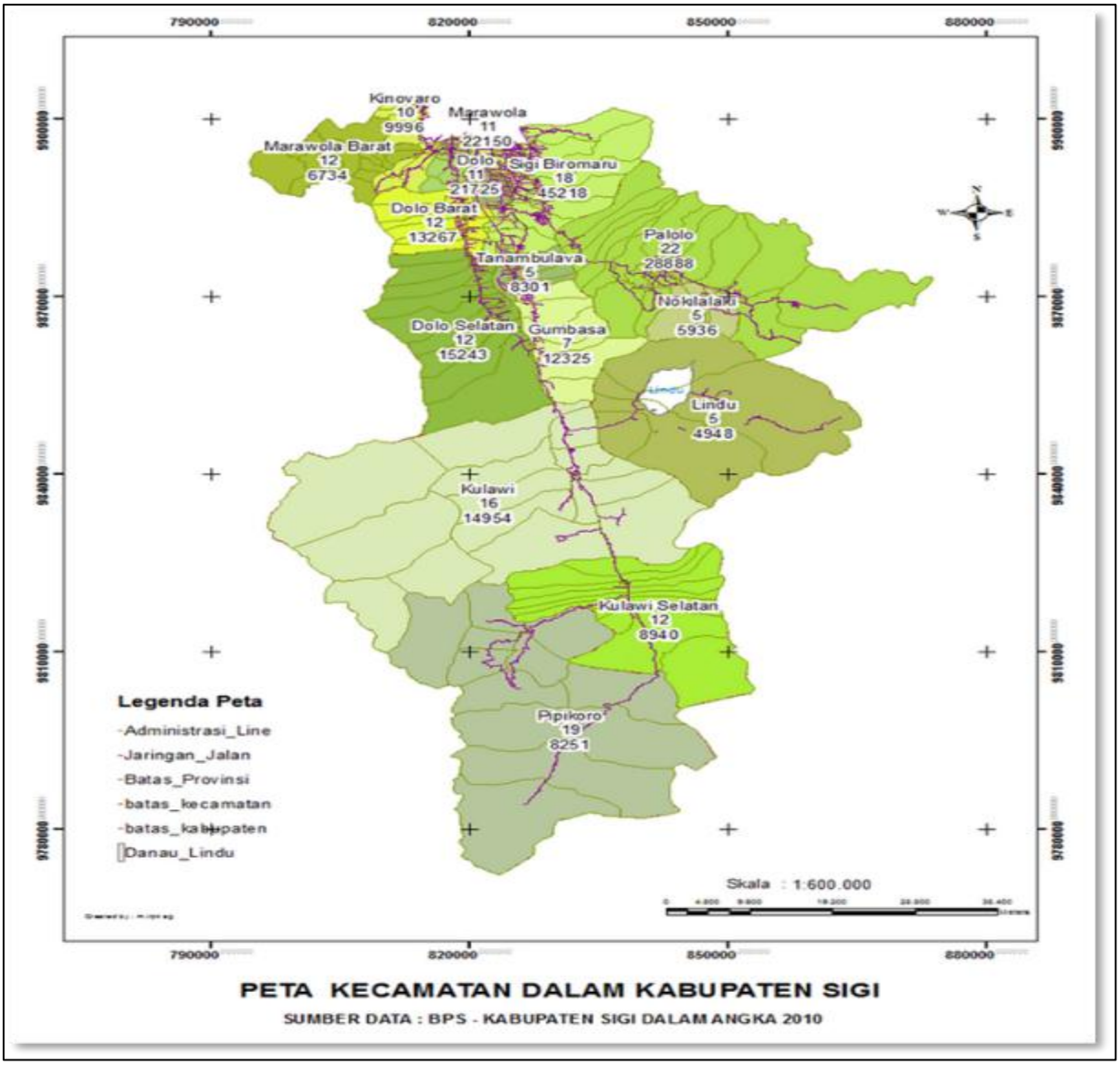

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi dan disahkan pada tanggal 21 Juli 2008, maka bekas wilayah Kerajaan Sigi Dolo ini resmi menjadi Kabupaten Sigi dengan 15 wilayah Kecamatan, 176 Desa

dan 1 (satu) unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Sejak September 2020, Kabupaten Sigi memiliki 16 kecamatan. Namun karena kecamatan Sigi Kota masih baru, data mengenai kecamatan tersebut masih menyatu dengan kecamatan yang lama (Sigi Biromaru, Dolo, dan Palolo). Persentase luas wilayah Kabupaten Sigi berdasarkan kecamatan tersaji pada gambar sebagai berikut.

Berdasarkan data proporsi wilayah terluas di Kabupaten Sigi adalah Kecamatan Kulawi dengan luas 1.053,56 Km² atau sebesar 20,28% dari total wilayah kabupaten, sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Dolo hanya 0.69% dari luas wilayah Kabupaten Sigi atau seluas 21,79 Km². Secara lengkap persentase luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Sigi tersaji pada tabel dan gambar sebagai berikut.

Tabel 1
Luas Kabupaten Sigi Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Persentase (%)
1	Pipikoro	956,13	18,40
2	Kulawi Selatan	418,12	8,05
3	Kulawi	1.053,56	20,28
4	Lindu	552,11	10,63
5	Nokilalaki	75,19	1,45
6	Palolo	581,48	11,19
7	Gumbasa	176,49	3,40
8	Dolo Selatan	584,71	11,25
9	Dolo barat	112,18	2,16
10	Tanambulava	56,33	1,08
11	Dolo	21,79	0,42
12	Sigi Biromaru	175,29	3,37
13	Marawola	150,51	2,90
14	Marawola Barat	70,38	1,35
15	Kinovaro	38,65	0,74
16	Sigi Kota	173,1	3,33
Total		**5.196,02**	**100,00**

Sumber Data: BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka 2025

Gambar 2
Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sigi

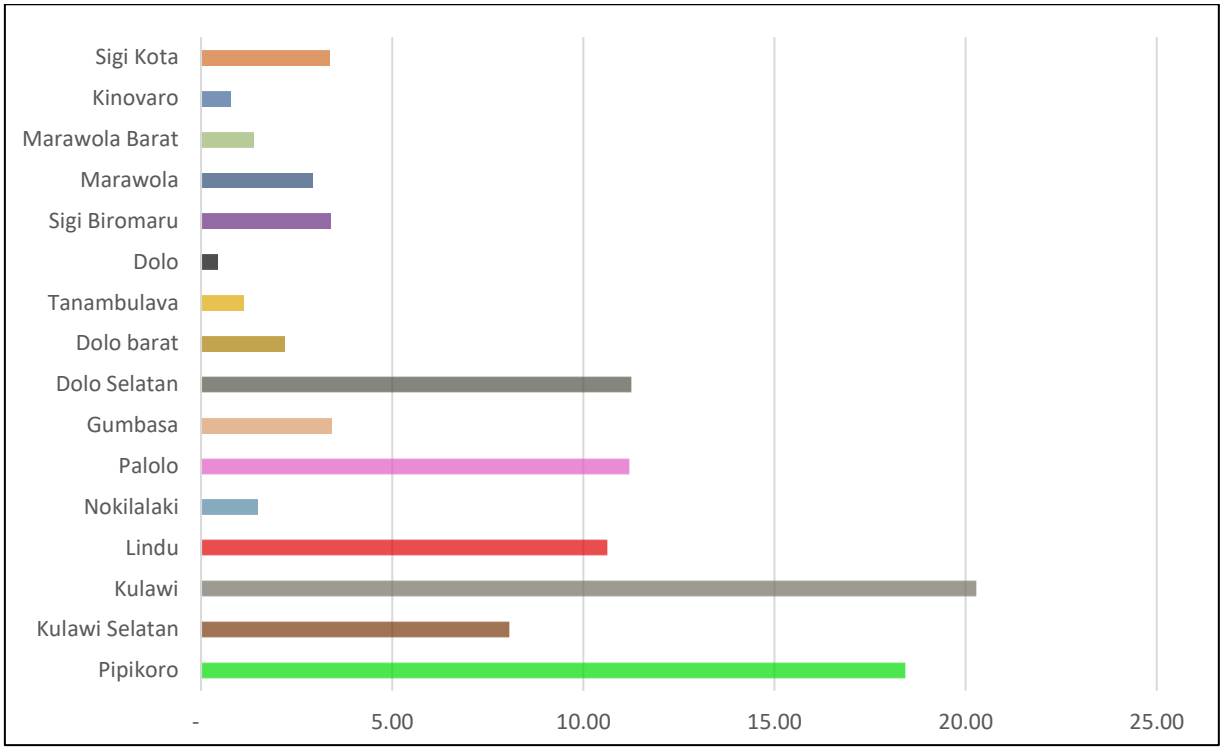

2.1.1.2 Kondisi Geografis

Kabupaten Sigi terletak antara 0^0 52’ 16” LS hingga 2^0 03’ 21” LS dan 119^0 38’ 45” BT hingga120^0 21’24” BT yang terdiri atas dataran, hutan dan lembah, pegunungan, sehingga dapat dipetakan menjadi dua kawasan yakni: wilayah lembah dan pegunungan. Wilayah dataran atau lembah meliputi 8 (delapan) kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan wilayah lembah yaitu Kecamatan Marawola, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Sigi Kota, Kecamatan Gumbasa dan Kecamatan Tanambulava. Sedangkan di wilayah pegunungan yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Palolo, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Marawola Barat dan Kecamatan Kinovaro.

2.1.1.3 Kondisi Topografi

Kabupaten Sigi merupakan wilayah dengan kawasan pegunungan dan perbukitan, dengan ketinggian wilayah umumnya berada antara 82-meter hingga 1.525 meter di atas permukaan laut. Tingkat kemiringan tanah/lereng antara datar sampai sangat curam. Kondisi topografis tersebut mempengaruhi wilayah permukiman desa dimana dari 177 desa sebagian

besar berada di daerah dataran dan pegunungan. Jumlah desa menurut kecamatan dan jarak ibukota kecamatan tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Jarak Ibukota Kecamatan di Kabupaten Sigi

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jarak Dari Ibukota Kabupaten (Km)
1.	Pipikoro	Peana	19	123
2.	Kulawi Selatan	Lawua	12	96
3.	Kulawi	Bolapapu	16	62
4.	Lindu	Tomado	5	89
5.	Nokilalaki	Kamarora A	5	35
6.	Palolo	Makmur	21	25
7.	Gumbasa	Pakuli	7	32
8.	Dolo Selatan	Baluase	12	13
9.	Dolo barat	Kaleke	12	7
10.	Tanambulava	Sibalaya Utara	5	17
11.	Dolo	Kota Pulu	9	7
12.	Sigi Biromaru	Mpanau	10	14
13.	Marawola	Binangga	11	18
14.	Marawola Barat	Dombu	12	33
15.	Kinovaro	Porame	10	20
16.	Sigi Kota	Bora	11	-

Sumber Data: BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka 2025

2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan–kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota pada periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap

pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 3
Statistik Kemiskinan Sigi, 2024-2025

Uraian	2024	2025
Garis Kemiskinan (Rp)	463.011	474.669
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	29,80	26,03
Persentase Penduduk Miskin (%)	12,06	10,47
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,52	1,77
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,70	0,44

Sumber Data BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka, 2025

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sigi pada Tahun 2025 sebesar 10,47% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin adalah 12,06% Hal ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi untuk dapat menurunkan angka penduduk miskin pada Tahun 2024, untuk itu diharapkan melalui program-program kerja Pemerintah Daerah akan lebih difokuskan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dapat semakin mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Sigi. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sigi masih diatas provinsi akan tetapi masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran Tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sigi, 2024-2025

Uraian	2024	2025
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	2,55	2,30
Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	2,94	2,92

Uraian	2024	2025
Tingkat Pengangguran Nasional (%)	4,91	4,85
Peringkat Provinsi	6	4
Peringkat Nasional	5	4

Sumber Data: BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sigi mengalami penurunan pada tahun 2025 sebesar 2,30 atau turun sebesar 0,25% dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 2,55% hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat sehingga berpengaruh pada menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Sigi. Selain itu, TPT Kabupaten Sigi tahun 2025 masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Tengah yang sebesar 2,92%.

2.1.4 Indeks Rasio Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Rasio Gini atau *Gini Ratio* adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Rasio Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
b. Indeks Rasio Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi realisasi pencapaian Rasio Gini Kabupaten Sigi tahun 2025 adalah sebesar 0,252 poin, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5
Indeks Rasio Gini (*Gini Ratio*) Kabupaten Sigi

Uraian	2024	2025
Tingkat Kabupaten/Kota	0,246	0,252

Uraian	2024	2025
Tingkat Provinsi	0,301	0,279
Tingkat Nasional	0,379	0,375

Sumber Data: BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2025, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sigi yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,252 Angka ini naik sebesar 0,06 jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* tahun 2024 yang sebesar 0,246 dan lebih rendah apabila dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM terbentuk dengan 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60≤IPM<70);
c. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sigi tahun 2025 adalah sebesar 71,68 poin dengan kategori “tinggi” sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sigi

Uraian	2024	2025
Tingkat Kabupaten/Kota	70,90	71,68
Tingkat Provinsi	72,24	72,82
Tingkat Nasional	75,02	75,90
Peringkat Provinsi	6	6

Sumber Data: BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka, 2025

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sigi tahun 2025 adalah sebesar 71,68 poin, dibandingkan Tahun 2024 sebesar 70,90 poin mengalami peningkatan sebesar 0,78 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), atau Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. IPM di Kabupaten Sigi pada saat ini berada pada urutan ke-6 dari Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu, sehingga aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat merupakan pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten Sigi dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sigi

Uraian	Kabupaten Sigi			Provinsi	Nasional
	2023	2024	2025	2025	2025
PDRB (harga konstan 2010) (Miliar Rp)	6.904,56	7.146,19	7.425,48	230.265,22	13.580.524,70
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,37	3,50	3,91	8,47	5,11
Peringkat Nasional (Indonesia)	13	13	13	2	2

Sumber Data: BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi tahun 2025 adalah 3,91%. Apabila melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, pada tahun 2023 sebesar 3,37% dan tahun 2024 sebesar 3,50%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi masih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8,47% serta lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11%.

2.1.7 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sigi dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian, namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi 4 kategori yaitu:

a. Inflasi ringan (*creeping inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, persentasenya kurang dari 10% dalam satu tahun;
b. Inflasi sedang (*galloping inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
c. Inflasi berat (*high inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
d. Hiperinflasi (*hyper inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi masih mengikuti nilai inflasi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar 3,31%. Tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,31 %.

2.1.8 Struktur Perekonomian Kabupaten Sigi

Struktur perekonomian Kabupaten Sigi dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8
PDRB Menurut Lapangan Usaha

(dalam Jutaan Rupiah)

Kategori	Uraian	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.374,76	4.686,01	5.171,94	5.784,28

Kategori	Uraian	2022	2023	2024	2025
B	Pertambangan dan Penggalian	429,87	468,67	578,15	614,91
C	Industri Pengolahan	220,35	229,10	247,96	271,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,87	0,94	1,0	1,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,76	13,70	15,01	15,81
F	Konstruksi	1.404,03	1.501,24	1.636,65	1.675,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.424,50	1.554,55	1.747,93	1.864,23
H	Transportasi dan Pergudangan	157,11	174,59	189,61	199,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50,79	55,94	60,93	65,03
J	Informasi dan Komunikasi	226,20	241,31	256,47	270,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	343,33	349,60	387,70	423,40
L	Real Estate	280,19	315,43	358,32	385,42
M, N	Jasa Perusahaan	13,46	14,88	16,30	17,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	884,17	951,32	1.033,40	1.069,42
P	Jasa Pendidikan	528,88	549,64	578,20	626,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174,87	188,21	199,46	215,75
R, S, T, U	Jasa Lainnya	74,58	77,49	83,27	88,83
Produk Domestik Regional Bruto		**10.600,72**	**10.600,72**	**11.372,64**	**12.562,35**
Produk Domestik Regional Bruto Non-Migas		**10.600,72**	**10.600,72**	**11.372,64**	**12.562,35**
Produk Domestik Regional Bruto Non Pemerintahan		**9.716,54**	**9.716,54**	**10.421,32**	**11.528,95**

Sumber Data: BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka, 2025

2.2 Kebijakan Keuangan

Penentuan arah kebijakan ekonomi di Kabupaten Sigi didasari pada visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2029. Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Visi : Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.

Misi : 1. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata Dan Berkeadilan;

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sejahtera;
3. Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata;
4. Mewujudkan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Harmoni Sosial;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Partisipatif.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerahnya khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sigi diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Sigi dan penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Penyusunan perubahan kebijakan keuangan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik Nasional maupun Daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan Pendapatan Daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah, di samping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi Belanja Daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya memenuhi beberapa hal:

a. menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat;
b. mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian;
c. berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

2.3 Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Target indikator makro ekonomi Kabupaten Sigi yang ingin dicapai pada Tahun 2025 sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi nasional serta internal Kabupaten Sigi. Selain asumsi kondisi makro ekonomi nasional, untuk mencapai target indikator makro ekonomi Kabupaten Sigi, berikut asumsi-asumsi yang digunakan sebagai prasyarat tercapainya rencana target makro Kabupaten Sigi Tahun 2025 yang kemudian dituangkan dalam Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sigi, antara lain laju pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran dan indeks pembangunan manusia. Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, APBD Tahun 2025 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dan mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan sejalan dengan tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sigi, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2025 yang terkait dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sigi yang merupakan transisi antara RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025 2029 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 9
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2025 yang terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
1. **Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan.**	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar masyarakat.	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas. 2. Meningkatkannya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau. 4. Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital.
2. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sejahtera.**	1. Meningkatkan kualitas masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing.	1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 3. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga. 4. Meningkatnya berkebudayaan maju. 5. Meningkatnya literasi masyarakat.

Misi	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
	2. Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender.	1. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak. 2. Meningkatnya keluarga yang berkualitas.
	3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.	1. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif. 2. Menurunnya tingkat kemiskinan.
3. **Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata.**	1. Meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah.	1. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan. 2. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif. 3. Meningkatnya kesejahteraan petani. 4. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau.
	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah.	1. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif. 2. Meningkatnya nilai tambah perdagangan. 3. Meningkatnya daya saing industri. 4. Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian. 5. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja.
	3. Meningkatkan kemandirian masyarakat.	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa. 2. Meningkatnya pengembangan wilayah baru.
4. **Mewujudkan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial.**	1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 2. Meningkatnya penataan ruang yang berkelanjutan.
	2. Meningkatkan ketahanan bencana.	1. Meningkatnya ketahanan bencana dan perubahan iklim.
	3. Meningkatkan harmoni sosial.	1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. 2. Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM. 3. Meningkatnya harmoni sosial secara inklusif.
5. **Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.**	1. Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat.	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 2. Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien. 3. Meningkatnya keamanan informasi. 4. Meningkatnya tata kelola arsip. 5. Meningkatnya profesionalitas ASN. 6. Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan ketrampilan ASN. 7. Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
	2. Meningkatkan pengelolaan pembangunan yang akuntabel.	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. 2. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan.

Misi	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
		3. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. 4. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. 5. Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber Data: RPJMD, Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Sasaran ekonomi makro pada tahun 2025 di antaranya, untuk meningkatkan perekonomian dengan upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural seperti yang diamanatkan pada RKPD 2025 akan difokuskan pada: industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan ketrampilan, dan reformasi kesehatan. Seperti yang dapat dilihat pada kondisi sosial ekonomi Kabupaten Sigi di bawah.

Tabel 10
Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Sigi Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

Uraian	2024	2025
Perkiraan Besaran-besaran Pokok		
PDRB atas dasar harga berlaku (juta rupiah)	11.500.000- 12.000.000	13.589.210.000
PDRB atas dasar harga Konstan (juta rupiah)	7.000.000-7.250.000	7.425.480.000
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Rp)	40.500.000-41.000.000	48.690.000
Pertumbuhan PDRB (%)	5,10-5,15	3,91
Laju inflasi, IHK Rata-rata	0,80-1,00	
Target Pembangunan		
Tingkat Kemiskinan	11,00-11,50	10,47
Indeks kedalaman kemiskinan	1,80-1,90	1,77
Jumlah penduduk miskin	29.000-29.500	26.030
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,43-0,45	0,44
Garis Kemiskinan (Rp)	425.000-450.000	476.690
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,50-2,75	2,30
Jumlah penganggur	3.250-3.500	3.573
Gini Ratio	0,270	0,252
Indeks ketimpangan wilayah	0,94-0,96	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,75-70,25	71,68
Angka harapan hidup	70,50-70,75	71,63
Rata-rata lama sekolah	8,90-8,95	
Harapan lama sekolah	13,25-13,50	
Pengeluaran per kapita (ribu Rp)	8.750-.9.000	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik (Rumah Sakit)	87,00-89,00	

Sumber Data: BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka, 2025

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD menyajikan informasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program, serta kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi merupakan transisi antara RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025 2029 dan selanjutnya dijabarkan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2025. Kegunaan indikator adalah sebagai salah satu bahan evaluasi serta dapat dijadikan bahan kebijakan untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Salah satu capaian kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan akuntabilitas kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis.

Tabel 11
Tabel Perbandingan Pencapaian Target Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar masyarakat.	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	0,40	0,48	120,00
	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas.	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	0,40	0,48	120,00
	2. Meningkatkannya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan	Persentase	85,43	86,14	100,83
	3. Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau.	Rasio Konektivitas	Ratio	54,06		

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	4. Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	0,25		
2	Meningkatkan kualitas masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,00		
	1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah.	1. Skor Literasi 2. Skor Numerasi 3. Rata-Rata Lama Sekolah 4. Harapan Lama Sekolah	Skor Skor Tahun Tahun	55,22 50,66 09,12 13,26		
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	1. Usia Harapan Hidup (UHH) 2. Indeks Keluarga Sehat (IKS) 3. Prevalensi Stunting 4. Kabupaten Sehat (KS)	Tahun Indeks Poin Kriteria	71,69 0,21 30,00 -		
	3. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga.	1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2. Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks Indeks	20,00 0,05		
	4. Meningkatnya berkebudayaan maju.	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	50,20		
	5. Meningkatnya literasi masyarakat.	2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	70,00		
3	Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender.	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	61,24		
	1. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak.	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 3. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 4. Kabupaten Layak Anak (KLA)	Indeks Indeks Indeks Kriteria	94,84 0,43 65,03 Madya		
	2. Meningkatnya keluarga yang berkualitas.	1. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	61,24		
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.	1. PDRB Per Kapita 2. Indeks Gini	Juta Rupiah Indeks	48,00 0,25		
	1. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif.	1. Indeks Kesejahteraan Sosial 1. Tingkat Kemiskinan	Indeks Persentase	71 11,8 – 11,5	10,47	91,04

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	2. Menurunnya tingkat kemiskinan.					
5	Meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah.	1. Indeks Ekonomi Hijau 2. Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3. Kontribusi PDRB Pariwisata	Indeks Persentase Persentase	70,00 40,76 0,51		
	1. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan. 2. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif. 3. Meningkatnya kesejahteraan petani. 4. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau.	1. NTN Perikanan Tangkap 2. NTN Perikanan Budidaya 1. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1. NTP Pertanian 1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Poin Poin Persentase Poin Indeks	105,00 104,00 0,55 109,00 80,86		
6	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah.	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,80 - 4,00		
	1. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif. 2. Meningkatnya nilai tambah perdagangan. 3. Meningkatnya daya saing industri. 4. Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian. 5. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja.	1. Persentase Peningkatan Investasi 1. Kontribusi PDRB Perdagangan 1. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 1. Kontribusi UMKM terhadap PDRB 1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	38 14,05 0,10 - 5,29	 13,72 2,00 	 97,65 101,01
7	Meningkatkan kemandirian masyarakat.	Persentase Desa Mandiri	Persentase	10,42		
	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa. 2. Meningkatnya pengembangan wilayah baru.	1. Indeks Desa Membangun (IDM) 1. Pendapatan Per Kapita di wilayah Transmigrasi	Indeks Rupiah	0,05 -		
8	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persentase Kategori	28 -	 35,16	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		2. Kategori Penghargaan ADIPURA				
	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 2. Meningkatnya penataan ruang yang berkelanjutan.	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	Indeks Rasio	79,70 0,08	88,12 0,65	110,56 812,50
9	Meningkatkan ketahanan bencana.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,47		
	1. Meningkatnya Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Indeks Risiko Bencana	Indeks	48,22		
10	Meningkatkan harmoni sosial.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	75,00		
	1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. 2. Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM. 3. Meningkatnya harmoni sosial secara inklusif.	1. Indeks Penyelenggaraan Trantibunlinmas 1. Indeks Demokrasi Indonesia 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Indeks Indeks	- 84,00 75,00	 81 	 96,43
11	Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72,26		
	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 2. Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien. 3. Meningkatnya keamanan informasi. 4. Meningkatnya tata kelola arsip. 5. Meningkatnya profesionalitas ASN. 6. Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan ketrampilan ASN. 7. Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	1. Indeks Reformasi Birokrasi 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan 1. Indeks SPBE (terkait Keamanan)* 1. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkungan Pemerintah Daerah 1. Indeks Profesionalitas ASN 1. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi 1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Persentase	72,26 82,18 0,37 B 74,68 24,49 95,00	 88,59 99,14	 107,80 104,36
12	Meningkatkan pengelolaan pembangunan yang akuntabel.	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks Indeks	80,00 2,00	76,06 1,9	95,07 95,00

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		2. Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)				
	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	-		
	2. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan.	1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1,60		
	3. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.	1. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	50,75	14,50	28,57
	4. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP		
	5. Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah.	1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	7,67	8,41	112,89
	6. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,32	3,102	93,43

Sumber Data: BAPERIDA, Kabupaten Sigi

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

APBD Pemerintah Kabupaten Sigi tahun anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2025 terdapat Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (*budgeting reform*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019, bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu manajemen penerimaan daerah, dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Reformasi anggaran dengan pendekatan *New Publik Management* meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari anggaran tradisional (*traditional budget*) ke anggaran berbasis kinerja (*performance budget*). Paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah saat ini adalah secara lebih spesifik diarahkan, sebagai berikut:

a. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
b. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
c. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
d. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
e. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

Anggaran Pemerintah Daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, serta pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Dengan demikian fungsi anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh penting dalam pelaporan keuangan antara lain:

a. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah;
b. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
c. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan;
d. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam ringkasan Realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 12
Ringkasan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi Tahun Anggaran 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5(4:3)*	*6*
1	**PENDAPATAN**	**1.275.403.515.672,00**	**1.189.888.414.789,98**	**93,29**	**1.410.150.504.679,44**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	103.756.606.200,00	100.945.078.154,38	97,29	84.824.192.278,39
1.2	Pendapatan Transfer	1.151.046.082.875,00	1.068.727.289.084,60	92,84	1.309.724.872.946,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	20.600.826.597,00	20.216.047.551,00	98,13	15.601.439.455,05
2	**BELANJA DAN TRANSFER**	**1.314.504.395.663,00**	**1.205.322.078.915,00**	**91,69**	**1.441.015.456.141,16**
2.1	Belanja Operasi	1.018.338.924.612,40	941.434.290.727,50	92,44	1.005.345.704.315,16
2.2	Belanja Modal	68.109.141.486,60	65.925.778.299,50	96,79	203.993.787.011,00
2.3	Belanja Tak Terduga	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	87,51	3.912.745.909,00
2.4	Transfer – Bantuan Keuangan	222.406.329.564,00	193.017.321.488,00	86,78	227.763.218.906,00
SURPLUS/(DEFISIT)		**(39.100.879.991,00)**	**(15.433.664.125,02)**	**39,47**	**(30.864.951.461,72)**
3	**PEMBIAYAAN**	**39.100.879.991,00**	**39.112.019.642,74**	**100,02**	**69.965.831.452,46**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	39.100.879.991,00	39.112.019.642,74	100,02	69.965.831.452,46
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**SILPA**	**0,00**	**23.678.355.517,72**	**0,00**	**39.100.879.990,74**

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025

Realisasi pencapaian target kinerja pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.189.888.414.789,98 atau 93,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.275.403.515.672,00. Realisasi Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar

Rp100.945.078.154,38 Pendapatan Transfer sebesar Rp1.068.727.289.084,60 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp20.216.047.551,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp100.945.078.154,38 atau 97,29% dari target sebesar Rp103.756.606.200,00. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp84.824.192.278,39, realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.120.885.875,99 atau 19,01%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi hak Pemerintah Kabupaten mulai tahun 2025, selain itu terdapat pencapaian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah melebih dari yang ditargetkan terutama pada Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan dari Pengembalian dan Pendapatan BLUD.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp44.393.219.166,00 atau 93,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp47.352.244.583,00. Realisasi Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp9.275.165.187,00 dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan ini disebabkan membaiknya kondisi makro ekonomi yang dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang terjaga di level aman sampai dengan akhir tahun 2025 di Kabupaten Sigi. Kenaikan realisasi juga dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang maksimal hingga akhir tahun 2025 dan pemberian kebijakan insentif PBB P2 dan PKB di Tahun 2025;
b. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp2.022.512.540,00 atau 83,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.422.050.000,00. Capaian peningkatan realisasi Retribusi Daerah yang cukup signifikan dari yang ditargetkan di antaranya terdapat pada Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 103,58%;
c. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.337.214.390,00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.337.214.390,00. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp244.342.518,00 atau 11,67% dibandingkan tahun lalu; dan

d. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp52.192.132.058,38 atau 101,05% dari target yang ditetapkan sebesar Rp51.645.097.227,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp7.618.484.012,99 dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, pendapatan dari pengembalian serta Pendapatan BLUD.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.068.727.289.084,60 atau 92,84% dari target sebesar Rp1.151.046.082.875,00. Pendapatan Transfer tahun anggaran 2025 yang tidak terealisasi dikarenakan faktor kebijakan pemerintah di mana penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Kurang Salur sampai dengan tahun 2024 yang seharusnya menjadi hak Pemerintah Daerah dilakukan penundaan salur ke Rekening Kas Umum Daerah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2025 merupakan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sigi sebesar Rp20.216.047.551,00 atau 98,13% dari target sebesar Rp20.600.826.597,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak mencapai target anggaran disebabkan pada akun Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP terdapat pengurangan penyaluran di tahun 2025 akibat terdapat sisa dana Kapitasi JKN di tahun 2024. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.614.608.095,95 atau 29,58% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp15.601.439.455,05.

3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.205.322.078.915,00 atau 91,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.314.504.395.663,00. Apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 yang jumlahnya tercatat Rp1.441.015.456.141,16, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp235.693.377.226,16 atau 16,36%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah dan Transfer tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa jenis

belanja mengalami penurunan di Tahun 2025 yaitu Belanja Modal yang mengalami penurunan sebesar Rp138.068.008.711,50 atau 67,68% dibanding tahun anggaran 2024.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer terdiri dari:

a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp941.434.290.727,50 atau 92,44% dari anggaran sebesar Rp1.018.338.924.612,40. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:
   1. Belanja Pegawai sebesar Rp580.775.450.926,00 atau 90,07% dari anggaran sebesar Rp644.783.534.944,00. Belanja Pegawai tidak terserap di antaranya disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
      a) adanya perhitungan *accres* anggaran Belanja Pegawai;
      b) kekosongan jabatan struktural;
      c) iuran jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja ASN, Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD yang tidak seluruhnya terealisasi;
   2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp331.752.728.828,50 atau 96,71% dari anggaran sebesar Rp343.028.858.468,40. Belanja Barang dan Jasa tidak terserap di antaranya adanya kegiatan yang gagal lelang dan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
   3. Belanja Subsidi sebesar Rp2.199.945.127,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp2.200.000.000,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Subsidi dikarenakan adanya efisiensi dari biaya operasional kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi;
   4. Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 sebesar Rp26.547.165.846,00 atau 94,35% dari anggaran sebesar Rp28.135.531.200,00. Belanja Hibah tidak terserap 100% dikarenakan terdapat beberapa Yayasan/Lembaga yang sudah mengajukan sebagai penerima hibah namun tidak melengkapi persyaratan proses pencairan hibah terdapat pada SKPD Dinas Sosial, Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
   5. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp159.000.000,00 atau 83,24% dari anggaran sebesar Rp191.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial tidak terserap 100% di antaranya disebabkan oleh verifikasi yang lebih selektif untuk memastikan ketepatan sasaran

penerima bantuan sosial sehingga penyerapan khususnya untuk penerima baru kurang dari kuota yang dianggarkan.

b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp65.925.778.299,50 atau 96,79% dari anggaran sebesar Rp68.109.141.486,60, terdiri dari:
   1. Belanja Modal Tanah tidak terdapat realisasi hal ini disebabkan pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sigi tidak menganggarkan belanja modal tanah;
   2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.994.787.775,00 atau 96,53% dari anggaran sebesar Rp22.783.663.799,00;
   3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.544.762.808,50 atau 96,88% dari anggaran sebesar Rp19.140.627.912,60;
   4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp19.453.774.146,00 atau 98,69% dari anggaran sebesar Rp19.711.622.895,00;
   5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.743.677.970,00 atau 92,89% dari anggaran sebesar Rp6.183.226.880,00; dan
   6. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp188.775.600,00 atau 65,09% dari anggaran sebesar Rp290.000.000,00.

c. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.944.688.400,00 atau 87,52% dari anggaran sebesar Rp5.650.000.000,00. Tidak terserapnya Belanja Tidak Terduga disebabkan karena tidak ada kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak yang mengharuskan penggunaan Belanja Tidak Terduga.

d. Realisasi Transfer atau Bantuan Keuangan sebesar Rp193.017.321.488,00 atau 86,78% dari anggaran sebesar Rp222.406.329.564,00.

3.1.3 Surplus / (Defisit)

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.189.888.414.789,98 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.205.322.078.915,00 menyebabkan kinerja keuangan Tahun Anggaran 2025 mengalami Surplus/(Defisit) sebesar (Rp15.433.664.125,02) sebelum memperhitungkan pembiayaan daerah.

3.1.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp39.112.019.642,74 atau 100,02% dari anggaran sebesar Rp39.100.879.991,00. Rincian realisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp39.112.019.642,74 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan terdapat koreksi sebesar Rp11.139.652,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1. Koreksi pencatatan atas transaksi Kas di BLUD tahun 2024 sebesar Rp11.238.737,84;
   2. Koreksi pencatatan atas saldo Kas BOSP tahun 2024 sebesar (Rp274.086,00);
   3. Koreksi pencatatan atas saldo Kas BOK Puskesmas tahun 2024 sebesar Rp175.000,00.
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00.

3.1.5 SiLPA

Berdasarkan data realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp23.678.355.517,72. Penjelasan lebih rinci atas komponen LRA disajikan dalam CaLK **Bab V**.

3.2 Ikhtisar Realisasi Pemenuhan Dukungan Program Nasional dan *Mandatory Spending*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 pada Lampiran Angka 5 yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah menyusun rencana kerja dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus serta kepada masyarakat dan *mandatory spending*, sehingga terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur dan wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagaimana undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
b. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 40% (empat puluh persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 147 mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 40% dari APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa. Jika alokasi belanja infrastruktur dalam APBD belum mencapai 40%, maka porsi belanja ini harus disesuaikan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 146 merupakan aturan yang mengatur tentang alokasi belanja pegawai oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) maksimal 30% dari total belanja APBD.

   Jika persentase belanja pegawai didaerah melebihi 30%, maka daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak

diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya yang diterima Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:
   1. Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
   2. Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah daerah dan badan usaha;
   3. Hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.
   4. Hasil penerimaan dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) paling rendah 10% (sepuluh persen) pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
      a) penanaman pohon;
      b) pembuatan lubang atau sumur serapan;
      c) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
      d) pengelolaan limbah

e. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana desa (ADD) yang merupakan bagian keuangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan penyelenggaraan masyarakat.

f. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus;

g. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan bantuan keuangan kepada partai politik dituangkan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota setiap tahun.

Pemerintah Provinsi memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Provinsi sebesar Rp1.200,00 per suara sah. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.500,00 per suara sah. Akan tetapi, jika alokasi anggarannya sudah melebihi ketentuan tersebut, maka alokasi anggaran tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan pada tahun berjalan.

Berpedoman pada beberapa ketentuan tersebut, berikut disajikan alokasi anggaran *Mandatory Spending* tahun 2025.

a. Belanja Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan serta berdasarkan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) yang

menyebutkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehubungan dengan pelayanan penyelenggaraan pendidikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi tahun anggaran 2025 menganggarkan sebesar RpRp.378.041.004.293,00 dengan rasio anggaran sebesar 28,76% dari total belanja daerah sebesar Rp1.314.504.395.663,00 dengan rincian penganggaran dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 13
Anggaran dan Realisasi Alokasi Belanja Pendidikan Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	**Total Belanja Pendidikan**	**378.041.004.293,00**	**344.422.940.943,00**
	a. Urusan Bidang Pendidikan dan Urusan Bidang Kebudayaan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	342.009.925.358,00	309.671.713.637,00
	b. Urusan Bidang Perpustakaan	773.068.500,00	762.715.742,00
	c. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3.950.027.620,00	3.906.223.927,00
	d. Belanja diluar Urusan Bidang Pendidikan dan Urusan Bidang Kebudayaan, Urusan Bidang Perpustakaan, Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang menunjang kebutuhan masyarakat di Bidang Pendidikan	31.307.982.815,00	30.082.287.637,00
2	**Total Belanja Daerah**	**1.314.504.395.663,00**	**1.205.322.078.915,00**
3	**Rasio Belanja Pendidikan (1:2 x 100%)**	**28,76%**	**28,58%**

Sumber Data: BKAD Kabupaten Sigi, diolah kembali

b. Belanja infrastruktur

Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Sehubungan dengan pelayanan penyelenggaraan belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi tahun anggaran 2025 menganggarkan sebesar Rp436.839.226.439,60 dengan rasio anggaran sebesar 40% dari total belanja daerah sebesar Rp1.314.504.395.663,00 dengan rincian penganggaran dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 14
Komponen Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

(dalam rupiah)

No.	Komponen perhitungan	Anggaran	Realisasi
A.	**Total Belanja Daerah**	**1.314.504.395.663,00**	**1.205.322.078.915,00**
B.	**Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:**		
	1. Belanja Bagi Hasil	4.977.492.764,00	4.977.492.764,00
	2. Belanja Bantuan Keuangan	217.428.836.800,00	188.039.828.724,00
	Jumlah (1+2)	**222.406.329.564,00**	**193.017.321.488,00**
C.	**Selisih (A – B)**	**1.092.098.066.099,00**	**1.012.304.757.427,00**
D.	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)**	**436.839.226.439,60**	**404.921.902.970,80**

Sumber Data: BKAD Kabupaten Sigi, diolah kembali

Tabel 15
Belanja Infrastruktur Daerah

(dalam rupiah)

No.	Komponen perhitungan	Anggaran	Realisasi
1.	**A. Belanja Modal:**	**68.109.141.486,60**	**65.925.778.299,50**
	1. Tanah	0,00	0,00
	2. Peralatan dan Mesin	22.783.663.799,00	21.994.787.775,00
	3. Gedung dan Bangunan	19.140.627.912,60	18.544.762.808,50
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.711.622.895,00	19.453.774.146,00
	5. Aset Tetap Lainnya	6.183.226.880,00	5.743.677.970,00
	6. Aset Lainnya	290.000.000,00	188.775.600,00
	B. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment)*	**20.009.419.838,00**	**19.542.598.429,00**
	1. Belanja Pemeliharaan	20.009.419.838,00	19.542.598.429,00
	Total 1 (A +B)	**88.118.561.324,60**	**85.468.376.728,50**
2.	**A. Belanja Hibah**	28.135.531.200,00	26.547.165.846,00
	B. Belanja Bantuan Sosial	191.000.000,00	159.000.000,00
	C. Belanja Bantuan Keuangan	217.428.836.800,00	188.039.828.724,00
	Total 2 (A +B + C)	**245.755.368.000,00**	**219.564.487.334,00**
3.	**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)**	**333.873.929.324,60**	**305.032.864.062,50**
	Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	**1.092.098.066.099,00**	**1.012.290.070.309,00**
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	**30,57%**	**30,13%**

Sumber Data: BKAD Kabupaten Sigi, diolah kembali

Berdasarkan data perhitungan tabel diatas, pencapaian realisasi belanja infrastruktur daerah sebesar 30,13% belum dapat memenuhi kewajiban pemenuhan belanja infrastruktur daerah sebesar 40%. Hal ini disebabkan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Sigi yang masih rendah serta besarnya pembiayaan beban belanja pegawai yang masih diatas 30% menjadi kendala utama, selain itu pada Tahun Anggaran 2025 Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya untuk bidang infrastruktur telah dihapuskan program penyalurannya ke Pemerintah Daerah.

c. Belanja Pegawai

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 146 merupakan aturan yang mengatur tentang alokasi belanja pegawai oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) maksimal 30% dari total belanja APBD.

Tabel 16
Proporsi Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Sigi Tahun 2022-2025

NO	TAHUN	TOTAL BELANJA PEGAWAI	TOTAL BELANJA DAERAH	PERSENTASE
1.	2022	461.235.619.286,00	1.247.162.377.500,60	36,98
2.	2023	463.059.919.316,00	1.307.795.789.549,90	35,41
3.	2024	547.590.556.019,00	1.441.015.456.141,16	38,00
4.	2025	580.775.450.926,00	1.205.322.078.915,00	48,18

Sumber Data: BKAD Kabupaten Sigi, diolah kembali

Gambar 3
Proporsi Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Sigi Tahun 2022-2025

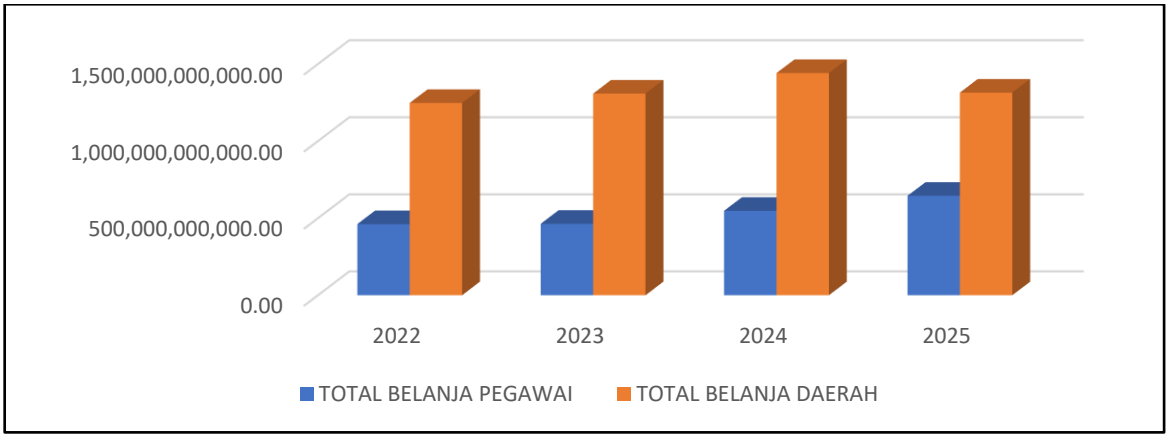

d. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengamanatkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun formulasi perhitungan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 17
Proporsi Alokasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sigi Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
A.	**PENERIMAAN**		
	1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	79.162.852.000,00	62.560.154.084,00
	2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	646.984.503.276,00	633.151.507.541,00
	JUMLAH PENERIMAAN	**726.147.355.276,00**	**695.711.661.625,00**
B.	**PENGURANGAN**		
	1. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.112.000,00	17.112.000,00
	2. DBH Sawit	1.525.750.000,00	1.525.750.000,00
	JUMLAH PENGURANGAN	**1.542.862.000,00**	**1.542.862.000,00**
C.	**JUMLAH DTU YANG DIPERHITUNGKAN UNTUK ADD**	**724.604.493.276,00**	**724.604.493.276,00**
D.	**JUMLAH ALOKASI DANA DESA**	**69.503.298.800,00**	**69.004.906.958,00**
E.	**RASIO ALOKASI DANA DESA**	**9,59%**	**9,52%**

Sumber Data: BKAD Kabupaten Sigi, diolah kembali

e. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya yang diterima Kabupaten

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda

dan sarana transportasi umum. Pemerintah Kabupaten Sigi memformulasikan sebagai berikut:

No.	Komponen perhitungan	Anggaran	Realisasi
A.	**Total Penerimaan PKB dan Opsen PKB**	**14.282.640.000,00**	**11.174.092.788,00**
B.	**Rincian Kegiatan**		
	1. Pemeliharaan Rutin Jembatan	400.000.000,00	400.000.000,00
	2. Pemeliharaan Rutin Jalan	300.000.000,00	300.000.000,00
	3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	325.441.900,00	3062.80.127,00
	Jumlah	**1.025.441.900,00**	**700.083.189,00**
C.	**Persentase Alokasi OPSEN PKB Minimal 10%**	**7,18%**	**6,27%**

2. Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah daerah dan badan usaha. Pemerintah Kabupaten Sigi memformulasikan sebagai berikut:

No.	Komponen perhitungan	Anggaran	Realisasi
A.	**Total Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik**	**9.217.448.995,00**	**9.344.145.823,00**
B.	**Rincian Kegiatan**		
	1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	645.179.700,00	543.271.860,00
	2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	281.744.900,00	199.643.350,00
	Jumlah	**926.924.600,00**	**742.915.210,00**
C.	**Persentase Alokasi PBJT Atas Tenaga Listrik Minimal 10%**	**10,06%**	**7,95%**

3. Hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok. Pemerintah Kabupaten Sigi memformulasikan sebagai berikut:

No.	Komponen perhitungan	Anggaran	Realisasi
A.	**Total Penerimaan Pajak Rokok bagian kabupaten/kota**	**14.939.126.668,00**	**14.675.861.160,00**
B.	**Dasar Perhitungan Alokasi Minimal 50% Pajak Rokok**	**7.469.563.334,00**	**7.337.930.580,00**
C.	**Alokasi Kegiatan Pendanaan**		
	1. Alokasi Pajak Rokok Minimal 37,5% Untuk Pembayaran BPJS	4.644.552.511,00	4.644.552.511,00

No.	Komponen perhitungan	Anggaran	Realisasi
	2. Alokasi Pajak Rokok 12,5% Selain Untuk Pembayaran BPJS	4.068.066.487,00	3.742.868.558,00
	Total Alokasi Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok	**8.712.618.998,00**	**8.387.421.069,00**
C.	**Persentase Alokasi Pajak Rokok bagian kabupaten/kota 50%**	**58.32%**	**57,15%**

4. Hasil penerimaan dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) paling rendah 10% (sepuluh persen) pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah. Pemerintah Kabupaten Sigi memformulasikan sebagai berikut:

No.	Komponen perhitungan	Anggaran	Realisasi
A.	**Total Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)**	**150.000.000,00**	**174.859.979,00**
B.	**Rincian Kegiatan**		
	1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	20.518.443,00	12.850.000,00
	Jumlah	**20.518.443,00**	**12.850.000,00**
C.	**Persentase Alokasi Pajak Air Tanah (PAT) 10%**	**13.68%**	**7,35%**

f. Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota setiap tahun.

Pada Tahun Anggaran 2025, belanja Bantuan Partai Politik dilaksanakan berdasarkan masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi yakni masa jabatan 2024-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 200.1.1-218 Tahun 2025 Tentang Daftar Penerima Dan Besaran Hibah Berupa Uang Kepada Partai Politik Periode 2024-2029 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi. Rincian belanja Bantuan Partai Politik sebagai berikut.

Tabel 18
Proporsi Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Sigi
Masa Jabatan Tahun 2024-2029

(dalam rupiah)

No.	Partai Politik	Jumlah Suara Sah	Satuan Nilai Suara Sah	Nilai Bantuan Keuangan
1	Partai Golongan Karya	25.073	3.657	91.691.961,00
2	Partai Gerindra	18.728	3.657	68.488.296,00
3	Partai Nasional Demokrat	13.745	3.657	56.672.529,00
4	Partai Demokrat	15.497	3.657	50.265.465,00
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16.179	3.657	59.166.603,00
6	Partai Keadilan Sejahtera	7.103	3.657	32.938.599,00
7	Partai Kebangkitan Bangsa	9.527	3.657	25.558.773,00
8	Partai Bulan Bintang	6.989	3.657	34.840.239,00
9	Partai Persatuan Indonesia	9.007	3.657	25.975.671,00
10	Partai Amanat Nasional	8.190	3.657	29.950.830,00
Total		**130.038**		**475.548.966,00**

Sumber Data: Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 220-492 Tahun 2024

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3.3.1 Pajak Daerah

Secara keseluruhan untuk Pajak Daerah dapat terealisasi tetapi realisasi per jenis pajak tidak semua memenuhi target yang ditetapkan antara lain pajak burung walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal ini disebabkan:

a. Pajak Sarang Burung Walet
   1. Belum adanya pola pengukuran yang tetap terhadap besaran produksi atas objek sarang burung walet;
   2. Kurang pemahamannya masyarakat atas pentingnya Pajak Sarang Burung Walet terhadap penerimaan daerah.

b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
   1. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atas hak pungut Pemerintah Daerah terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
   2. Terdapat perbedaan pemahaman antara pihak pengusaha perumahan dengan Pemerintah Daerah atas perubahan peraturan perundang-undangan terhadap hak Pemerintah Daerah.

3.3.2 Retribusi Daerah

Untuk retribusi daerah, secara keseluruhan telah memenuhi target yang telah ditetapkan namun untuk penerimaan per jenis retribusi masih banyak retribusi yang belum ada rasionalisasi terhadap potensi atau sumber-sumber pendapatan, sehingga OPD Pengelola

Pendapatan yang menjadi *leading* sektor pemungutan retribusi tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan:

a. Data Objek Retribusi yang belum akurat karena keterbatasan sumber dana dan personil;
b. Belum adanya kajian terhadap analisa potensi. Penganggaran dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas atas kajian terhadap Analisa Potensi;
c. Belum optimalnya kinerja petugas pemungut; dan
d. Masih kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

3.3.3 Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat, seperti DBH Pajak, DBH bukan Pajak, DAU, dan DAK yang dalam penetapan target dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini kementerian/lembaga teknis dan mekanisme pencairannya melalui koordinasi lintas sektoral, sehingga pencapaian realisasinya tidak tepat waktu bahkan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, contohnya realisasi DAU dan DID yang jumlahnya menurun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Perubahan regulasi terkait sumber dana transfer dari pemerintah pusat yang telah ditentukan peruntukkannya (*remarking*) dengan proses penyalurannya berdasarkan ketentuan tertentu menjadi salah satu hambatan dalam pemenuhan target penerimaan daerah.

3.3.4 Belanja Daerah

Adapun realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 tercapai sebesar Rp1.205.322.078.915,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.314.504.395.663,00 dengan persentase mencapai 91,69%. Namun, ada beberapa rincian objek belanja yang belum memenuhi target. Beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target belanja antara lain:

a. Masih terdapat keterlambatan informasi dan petunjuk pelaksanaan terkait dengan dana-dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan program baik dalam penganggarannya maupun pengerjaannya;

b. Transparansi penetapan formula pengalokasian dana-dana di luar DAU belum nyata (daerah kesulitan menentukan asumsi penerimaan untuk tahun yang akan datang);
c. Kurangnya daya serap atau keterlambatan penyampaian pertanggung jawaban terhadap penggunaan DAK serta Dana Penyesuaian sehingga memperlambat pencairan dana berikutnya dari pusat;
d. Perubahan harga barang yang mengalami kenaikan pada jenis barang tertentu mengakibatkan terhambatnya untuk melakukan pembelian sehingga harus menyesuaikan untuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan dengan Standar Harga Barang dan Jasa;
e. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang kurang cermat sehingga berakibat tertundanya realisasi menunggu penyesuaian anggaran kas; dan
f. Masih terdapat keterbatasan pengetahuan perhitungan pajak yang benar pada rincian objek Belanja Barang dan Jasa sehingga mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar kadang lebih rendah atau tinggi.

3.3.5 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana tahun sebelumnya, Kabupaten Sigi pada Tahun Anggaran 2025 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Keuangan secara menyeluruh khususnya yang terintegrasi dari penyusunan RKA sampai pada proses akuntansi dan pelaporannya. Upaya ini dimaksudkan untuk membenahi dan menertibkan administrasi pengelolaan keuangan daerah. Adapun penyusunan Laporan Keuangan di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025 telah terdesentralisasi di masing-masing OPD dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku pengelola keuangan daerah yang menyusun Laporan Keuangan Daerah dengan mekanisme mengkonsolidasikan pada aplikasi SIPD dengan database berada di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menjadi kendala dan tantangan tersendiri dikarenakan pada aplikasi SIPD menu akuntansi pelaporan masih dalam proses pengembangan sehingga pemerintah daerah selaku pengguna harus aktif berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk setiap permasalahan yang terjadi selama proses penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025 antara lain:

a. Reformasi peraturan perundang–undangan di bidang keuangan yang berjalan dengan cepat belum dapat direspons oleh kemampuan SDM yang masih terbatas;
b. Beberapa peraturan masih belum ada petunjuk pelaksanaan yang jelas, misalnya yang mengatur masalah penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
c. Pengelolaan dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Pendidikan sekolah SD dan SMP belum memadai, satuan pendidikan sering terlambat memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS dikarenakan petunjuk teknis dari kementerian terkait terlambat diterima oleh satuan pendidikan; dan
d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sigi yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873). Dalam pelaksanaannya, Bupati sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang merupakan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Entitas akuntansi di Kabupaten Sigi meliputi:

a. Inspektorat Daerah;
b. Sekretariat Daerah;
c. Sekretariat DPRD;
d. Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo;
e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
f. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
g. Dinas Kesehatan;
h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
i. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
j. Dinas Perhubungan;
k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

m. Dinas Sosial;
n. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
q. Dinas Ketahanan Pangan;
r. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
s. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
t. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
u. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
v. Dinas Lingkungan Hidup;
w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
y. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
aa. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
dd. Badan Pendapatan Daerah;
ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
gg. Kecamatan Sigi Biromaru;
hh. Kecamatan Dolo;
ii. Kecamatan Marawola;
jj. Kecamatan Marawola Barat;
kk. Kecamatan Dolo Barat;
ll. Kecamatan Dolo Selatan
mm. Kecamatan Tanambulava;
nn. Kecamatan Gumbasa;
oo. Kecamatan Nokilalaki;
pp. Kecamatan Kulawi;

qq. Kecamatan Kulawi Selatan;

rr. Kecamatan Pipikoro;

ss. Kecamatan Lindu;

tt. Kecamatan Kinovaro;

uu. Kecamatan Palolo; dan

vv. Kecamatan Sigi Kota.

Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Daerah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah terbagi atas beberapa bagian dimana Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah di Bagian Perlengkapan dan Umum dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing Bagian, sedangkan laporannya dikonsolidasikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan di Bagian Perlengkapan dan Umum. Adapun bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi terdiri dari:

a. Bagian Pemerintahan;

b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

c. Bagian Hukum;

d. Bagian Organisasi;

e. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;

f. Bagian Perlengkapan dan Umum;

g. Bagian Perencanaan dan Keuangan;

h. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

i. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan

j. Bagian Administrasi Pembangunan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan−LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Hal tersebut berarti bahwa pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Selain itu, belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Pemerintah Kabupaten Sigi merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (*historical cost*) tanpa memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam nilai mata uang. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, sehingga kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah dan angka-angka disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan peraturan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Kebijakan Akuntansi per komponen Laporan Keuangan diuraikan sebagai berikut.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran, kas di Badan Layanan Umum daerah (BLUD) dan kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP (Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama) milik Pemerintah Daerah.
b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum Daerah dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
b. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas antara lain: Saldo Kas di Kas Daerah, Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah, Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP (Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama) milik Pemerintah Daerah.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang Pemerintah Kabupaten Sigi diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Berdasarkan peristiwa yang mendasari, piutang jangka pendek dibedakan menjadi:

a. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

c. Piutang berdasarkan transfer pemerintahan;

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, dan piutang Dana Bagi Hasil.

d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi;

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

e. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, merupakan piutang yang disebabkan karena terjadinya peristiwa selain pada huruf a, b, c, dan d.

Piutang jangka panjang dapat berupa:

a. Piutang yang terjadi karena kurang bayar dan ketetapan kurang bayarnya melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
b. Piutang jangka panjang karena perikatan. Dalam perikatan tersebut terdapat angsuran pembayaran piutang dan bunganya.

Pengakuan

a. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
b. Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwa yang mendasarinya.
c. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait. Misalnya piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul dari pendapatan pajak daerah oleh sebab itu pengakuan piutang pajak daerah harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria:
    1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
    2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

d. Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria:
   1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
   2. Jumlah piutang dapat diukur;
   3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
   4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

e. Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:
   1. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), Apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
   2. Piutang Dana Alokasi Umum, apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
   3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.
   4. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
   5. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
      a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi belum menyalurkan

seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi.

f. Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui apabila telah memenuhi kriteria:

1. Telah ditandatanganinya Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
2. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
3. Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan penting.

Pengukuran

a. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.

b. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat sebagai berikut:

1. Untuk metode *official assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan;
2. Untuk metode *self assesment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.

c. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
2. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
3. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
4. Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
5. Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

d. Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.

e. Pengukuran piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:
   1. Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Sigi;
   3. Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat;
   4. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pengukuran piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKP2PS;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Penyajian

a. Piutang disajikan pada neraca.
b. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
c. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.
d. Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Bagian lancar piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Lancar. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu pada Kelompok Aset Lain-lain.
e. Untuk piutang yang dalam tertunggak tetap disajikan sebagai piutang pada Aset Lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya.
f. Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, *debt swap* dicatat pada Aset lain-lain.
g. Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

h. Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

i. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

j. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

k. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

l. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   1. kualitas piutang lancar;
   2. kualitas piutang kurang lancar;
   3. kualitas piutang diragukan;
   4. kualitas piutang macet.

m. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
   1. pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
   2. pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

n. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
   1. kualitas lancar, dengan kriteria:
      a) Umur piutang kurang dari dan/atau sama dengan 1 (satu) tahun;
      b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
      c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
      d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
      e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
   2. kualitas piutang kurang lancar, dengan kriteria:

a) Umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

3. kualitas piutang diragukan, dengan kriteria:
   a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
   b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
   d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. kualitas piutang macet, dengan kriteria:
   a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
   b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d) Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure*).

o. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
1. kualitas piutang lancar:
   a) Umur piutang kurang dari dan/atau sama dengan 1 (satu) tahun;
   b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
   c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
   e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. kualitas piutang kurang lancar:
   a) Umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
   b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

3. kualitas piutang diragukan:
    a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
    b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. kualitas piutang macet:
    a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
    b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
    c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

p. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
1. kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
2. kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
3. kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
4. kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

q. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
1. kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan 6 (enam) bulan belum dilakukan pelunasan atau apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan atau apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

4. kualitas macet, apabila dalam jangka waktu di atas 12 (dua belas) bulan tidak dilakukan pelunasan atau apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

r. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan bukan Retribusi, termasuk piutang dana bergulir dalam melakukan penggolongannya juga dapat dilakukan secara konsisten dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 tahun;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 s/d 2 tahun;
3. Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 2 s/d 3 tahun; dan
4. Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 tahun.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

a. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Keterangan
1	Lancar	0,5%	(Nilai Piutang dikurangi jika ada Nilai Agunan atau Nilai Barang Sitaan)
2	Kurang Lancar	10%	
3	Diragukan	50%	
4	Macet	100%	

b. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban penyisihan piutang.

c. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

d. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang

menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.

f. Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/obyek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Tingkat Kolektibilitas			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah				
	a) Piutang Pajak Daerah	≤ 1 Tahun	< 1 s.d ≥ 3 Tahun	< 3 s.d ≥ 5 Tahun	> 5 Tahun
	b) Piutang Retribusi Daerah	0 s.d 1 Bulan	1 s.d 3 Bulan	> 3 s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
2	Piutang dari Perikatan				
	a) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	< 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun
	b) Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD dan lembaga lainnya	< 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun
	c) Bagian Lancar Tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	< 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun
3	Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara Lain:				
	a) Piutang transfer Pemerintah Pusat	< 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun
	b) Piutang transfer Pemerintah Lainnya	< 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun
	c) Piutang transfer Pemerintah Daerah Lainnya	< 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun
4	Piutang Dana Bergulir	< 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun

g. Pengelompokan piutang tersebut dilakukan menurut per masing-masing wajib pajak daerah/wajib retribusi/ nasabah/debitur/badan/ perorangan/dll, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih dari pemerintah daerah.

Pemberhentian Pengakuan

a. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

b. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

c. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

d. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

e. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapustagihan dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

f. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
   1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
   2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada Neraca Pemerintah Daerah, apabila perlu sebelum di finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
   3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku (*write-off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

g. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebajikan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.

h. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal, maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di Neraca dengan diberi

catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

i. Kewenangan penghapusan piutang ditetapkan oleh:
   1. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00;
   2. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00.

j. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
   1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
   2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
   3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
   4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedule* dan penurunan tarif bunga kredit.
   5. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
   6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
   7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil

teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

k. Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara sebagian atau seluruhnya adalah nilai yang setara dengan nilai huruf "i" dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat pengelola keuangan daerah.

l. Piutang daerah yang akan dihapuskan secara sebagian atau seluruhnya diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Provinsi Sulawesi.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;

c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;

d. Informasi lengkap tentang jumlah nominal piutang, jumlah penyisihan piutang dan dasar penyisihan piutang;

e. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;

f. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

g. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan

pendapatan Pajak atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sigi, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

a. Pengakuan Persediaan, diakui pada saat:
   1. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
   2. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.
b. Pengakuan beban persediaan berdasarkan dua pendekatan, yaitu:
   1. Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi.
   2. Pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.
c. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

a. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan, pemakaian persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan/harga pokok/nilai wajar.
b. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

Metode perpetual Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan, alat kesehatan pakai habis, bahan makanan, bahan persediaan yang bersifat membahayakan, dan persediaan lainnya yang nilainya cukup material.

c. Persediaan disajikan sebesar:
   1. Harga perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
   2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
   3. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*Arm Length Transaction*).
d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
e. Persediaan obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis dinilai dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Beban Persediaan

a. Pengakuan beban dengan menggunakan pendekatan aset, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
b. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
c. Jika terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stok opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluwarsa atau rusak.
d. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Akan tetapi, jika selisih persediaan

dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
b. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
    1. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
    2. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang (kadaluwarsa) dikeluarkan dari persediaan dan dicatat secara ekstrakomptabel dan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
c. Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

a. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sigi pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, antara lain dapat berupa:

a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Kabupaten Sigi;
b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
c. Dana yang disisihkan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir;
d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Kabupaten Sigi secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sigi dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi ini. Akuntansi untuk investasi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam properti dan kerja sama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

Pengakuan

a. Transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Sigi;
   2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

b. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

c. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf 8 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya.

d. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

Pengukuran

a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga

transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

e. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sigi, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

f. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

g. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

h. Investasi non permanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

i. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Sigi dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

j. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Sigi, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sigi adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

k. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

l. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

m. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.

n. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1. Metode biaya;

   Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas;

   Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Kabupaten Sigi mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kabupaten Sigi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Kabupaten Sigi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Sigi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

   Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

   Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

   Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

   Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 Tahun	5 %

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d. 3 Tahun	10 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 Tahun	100%

o. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
   1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
   2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
   3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
   4. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

p. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
   1. kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
   2. kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
   3. kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
   4. kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

q. Dalam hal penerapan metode ekuitas untuk kepemilikan investasi dalam bentuk saham, dimungkinkan bersaldo minus (negatif) karena perusahaan negara/daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus diakui oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau Pemerintah Kabupaten Sigi mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*incurred legal/constructive obligatio*) terhadap perusahaan negara/daerah tersebut.

r. Alasan pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan negara/daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca.

Pengakuan Hasil Investasi

a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

b. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sigi yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Kabupaten Sigi.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

a. Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Sigi dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.
b. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
d. penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
f. perubahan pos investasi.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Karakteristik utama dana bergulir adalah:

a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
b. Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBD, diakui sebagai kekayaan daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama Pemerintah Kabupaten Sigi.

c. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.

d. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran daerah dimasukkan dalam APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencatatan alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBD awal atau revisi APBD (APBD Perubahan).

e. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

f. Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

g. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).

h. Pemerintah Kabupaten Sigi dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dapat ditagih untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

Dana yang disalurkan kepada masyarakat yang harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Daerah tanpa disalurkan kembali kepada masyarakat atau dana yang disalurkan kepada masyarakat harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Daerah dan hendak disalurkan kembali kepada masyarakat dengan mengalokasikan pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran tidak memenuhi karakteristik dana bergulir dan lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Jangka Pendek atau Piutang Jangka Panjang, sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo piutang yang bersangkutan. Karakteristik dana bergulir adalah dana yang dapat ditagih dan langsung digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyetor ke Rekening Kas Daerah

(*revolving fund*) terlebih dahulu dan tanpa perlu pengalokasian pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah dengan lembaga kerja yang dimaksud. Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chaneliing agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.

Pengakuan

a. Pengeluaran dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur Pengeluaran Pembiayaan – Dana bergulir. Rencana pengeluaran dana bergulir tersebut harus dianggarkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) meskipun secara teknis akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
b. Realisasi pengeluaran dana bergulir dicatat pada Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas. Pada saat pengeluaran dana bergulir terealisasi tersebut, dana bergulir dicatat dineraca sebesar harga perolehan dana bergulir dan tandingannya adalah Kas Di Kas Daerah. Tetapi secara periodik, Pemerintah Kabupaten Sigi harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
c. Rencana penagihan dana bergulir yang tidak akan digulirkan kembali dianggarkan pada nomenklatur Penerimaan Pembiayaan – Dana Bergulir untuk pokok dana bergulir sedangkan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur lain-lain pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir

yang diterima di Kas Daerah dicatat pada Penerimaan Pembiayaan – Dana Bergulir sedangkan penerimaan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat pada lain-lain pendapatan hasil daerah. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir dicatat di neraca mengurangi dana bergulir dan tandingannya Kas Di Kas Daerah.

d. Penagihan dana bergulir yang digulirkan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sigi tidak dilakukan pencatatan karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah dicatat dan dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi ketika dana tersebut dikeluarkan dari APBD.

e. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:
   1. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Sigi;
   2. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*).

f. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria dana bergulir yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

g. Alokasi anggaran untuk dana bergulir berada di BUD, tetapi pelaksanaan dana bergulir dapat didelegasikan kepada SKPD. Walaupun pelaksanaan didelegasikan tetapi transaksi dana bergulir tersebut tetap merupakan transaksi pembiayaan.

h. Realisasi pengeluaran dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pengukuran

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar

harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

a. Pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dengan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika Pemerintah Kabupaten Sigi pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya atau (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.
b. Dana bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir pada neraca diikuti dengan pencatatan beban penyisihan dana bergulir pada laporan operasional.
c. Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
d. Penyisihan Dana Bergulir
    1. Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangkan dana bergulir dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian nilai penyisihan dana bergulir akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan.
    2. Penyisihan dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan direalisasi. Penyisihan dana bergulir harus didukung dengan bukti-bukti bahwa dana bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan tetap harus dibukukan sampai dana bergulir tersebut dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:
   a) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
      1) jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
      2) upaya penagihan.
   b) Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
      1) kualitas lancar;
      2) kualitas kurang lancar;
      3) kualitas diragukan; dan
      4) kualitas macet.
   c) Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
      1) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
         (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
            (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun;
            (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
            (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
            (4) Penerima dana kooperatif.
         (b) Kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
            (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
            (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
            (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
            (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
         (c) Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria:
            (1) Umur dana bergulir lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun;

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
(3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
(4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

(d) Kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria:
(1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun;
(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
(3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya;
(4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
(5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

2) Dana bergulir dengan *executing agency*;
(a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
(1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

(b) Kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria:
(1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
(2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
(3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
(4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).

3) Dana bergulir dengan *chanelling agency;*

(a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
   (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
   (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

(b) Kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
   (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
   (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

(c) Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria:
   (1) Umur dana bergulir lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

(d) Kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria:
   (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
   (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
   (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
   (4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

4. Penentuan Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan sebagai berikut:
   a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
   b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;

c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Metode Penilaian Dana Bergulir

Penilaian dana bergulir Pemerintah Kabupaten Sigi dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

Pengakuan Hasil Dari Dana Bergulir

a. Hasil investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan pada saat bunga atau bagi hasil telah di setor ke kas daerah.

b. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir digulirkan kepada masyarakat (tidak disetor ke kas daerah) maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digulirkan tersebut pada saat bersamaan harus dicatat pada pengeluaran pembiayaan – dana bergulir sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas sekaligus menambah investasi non-permanen dan dana bergulir dan ekuitas di Neraca.

c. Pendapatan dari dana bergulir berupa bunga atau bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan.

Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas.

Penghapusan

a. Penghapusan dana bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi terdiri atas:
   1. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir;
   2. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.

b. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
   1. Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau
   2. Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
   3. Debitur mengalami musibah *(force majeure*); dan/atau
   4. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
   5. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
   6. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
   7. Debitur yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
      a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
      b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
   8. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti

bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Bupati; dan/atau

9. Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

c. Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

e. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapus bukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.

6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

g. Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan

Dana bergulir disajikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang non permanen.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

a. Dasar Penilaian Dana Bergulir;
b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Sigi atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan

a. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
b. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
c. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
d. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
e. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimum Kapitalisasi
1	**Tanah**	0,00
2	**Alat Besar**	
	Alat Besar Darat	500.000,00
	Alat Besar Apung	500.000,00
	Alat Bantu	500.000,00
3	**Alat Angkutan**	
	Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000,00
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	500.000,00
	Alat Angkutan Apung Bermotor	500.000,00
	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	500.000,00
	Alat Angkutan Bermotor Udara	500.000,00
4	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
	Alat Bengkel Bermesin	500.000,00
	Alat Bengkel Tak Bermesin	500.000,00
	Alat-alat Ukur	500.000,00
5	**Alat Pertanian**	
	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	500.000,00
6	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
	Alat Kantor	500.000,00
	Alat Rumah Tangga	500.000,00
	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	500.000,00
7	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
	Alat Studio	500.000,00
	Alat Komunikasi	500.000,00
	Peralatan Pemancar	500.000,00
	Peralatan Komunikasi Navigasi	500.000,00
8	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
	Alat Kedokteran	500.000,00
	Alat Kesehatan Umum	500.000,00
9	**Alat Laboratorium**	
	Unit Alat Laboratorium	500.000,00
	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	500.000,00
	Alat Peraga Praktek Sekolah	500.000,00
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	500.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimum Kapitalisasi
	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	500.000,00
	Radiation Application and NonDestructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	500.000,00
	Laboratorium Lingkungan Hidup	500.000,00
	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	500.000,00
	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	500.000,00
10	**Alat Persenjataan**	
	Senjata Api	500.000,00
	Persenjataan Non Senjata Api	500.000,00
	Senjata Sinar	500.000,00
	Alat Khusus Kepolisian	500.000,00
11	**Komputer**	
	Komputer Unit	500.000,00
	Peralatan Komputer	500.000,00
12	**Alat Eksplorasi**	
	Alat Eksplorasi Topografi	500.000,00
	Alat Eksplorasi Geofisika	500.000,00
13	**Alat Pengeboran**	
	Alat Pengeboran Mesin	500.000,00
	Alat Pengeboran Non Mesin	500.000,00
14	**Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian**	
	Sumur	500.000,00
	Produksi	500.000,00
	Pengolahan dan Pemurnian	500.000,00
15	**Alat Bantu Eksplorasi**	
	Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00
	Alat Bantu Produksi	500.000,00
16	**Alat Keselamatan Kerja**	
	Alat Deteksi	500.000,00
	Alat Pelindung	500.000,00
	Alat SAR	500.000,00
	Alat Kerja Penerbangan	500.000,00
17	**Alat Peraga**	
	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	500.000,00
18	**Unit Peralatan Proses/Produksi**	500.000,00
19	**Rambu - Rambu**	
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	500.000,00
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	500.000,00
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	500.000,00
20	**Peralatan Olah Raga**	
	Peralatan Olah Raga	500.000,00
21	**Bangunan Gedung**	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000,00
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20.000.000,00
22	**Monumen**	
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20.000.000,00
23	**Bangunan Menara**	
	Bangunan Menara Perambuan	20.000.000,00
24	**Tugu Titik Kontrol/Pasti**	
	Tugu/Tanda Batas	20.000.000,00
25	**Jalan, Jaringan Dan Irigasi**	0,00
26	**Bahan Perpustakaan**	
	Bahan Perpustakaan Tercetak	100.000,00
	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	100.000,00
	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	100.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimum Kapitalisasi
	Musik	100.000,00
	Karya Grafika (*Graphic Material*)	100.000,00
	Three Dimensional Artefacs and Realita	100.000,00
	TARSCALT	100.000,00
27	**Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	
	Barang Bercorak Kesenian	100.000,00
	Alat Bercorak Kebudayaan	100.000,00
	Tanda Penghargaan	100.000,00
28	**Hewan**	
	Hewan Piaraan	100.000,00
	Ternak	100.000,00
	Hewan Lainnya	100.000,00
29	**Biota Perairan**	
	Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip)	100.000,00
	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	100.000,00
	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	100.000,00
	Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	100.000,00
	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)	100.000,00
	Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)	100.000,00
	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)	100.000,00
	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	100.000,00
	Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	100.000,00
	Biota Perairan Lainnya	100.000,00
30	**Tanaman**	
	Tanaman	100.000,00
31	**Barang Koleksi Non Budaya**	
	Barang Koleksi Non Budaya	100.000,00
32	**Aset Tetap Dalam Renovasi**	0,00

Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Entitas mengakui/mencatat perolehan tersebut sebagai beban operasional dan tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan tetap tercatat dalam ekstrakomptabel.

d. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sigi. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Sigi. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat

dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

e. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

f. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

g. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

h. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Pengukuran

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

b. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 4) bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

c. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat

diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

e. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Penilaian Awal Aset Tetap

a. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai suatu aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehannya.

b. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

c. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kabupaten Sigi sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kabupaten Sigi oleh pengembang dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Sigi untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki.

d. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sigi. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

e. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 26 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 26. Penilaian kembali yang

dimaksud pada paragraf 65 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

f. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

a. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

b. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
   1. biaya persiapan tempat;
   2. biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat;
   3. biaya pemasangan;
   4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
   5. biaya konstruksi;
   6. biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar.

c. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

d. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

e. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya

langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

f. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak, perencanaan dan pengawasan.

g. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

h. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

i. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

j. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

k. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

l. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

m. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
   1. biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
   2. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan;
   3. semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

n. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

o. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

b. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk didalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan.

c. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

a. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
b. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerja sama Fasos Fasum

a. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange Of Assets*)

a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos macam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan

tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan *(impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun – nilai - bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun – nilai – bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, dan peralatan khusus. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apa pun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

c. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

b. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
    1. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
    2. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.
    3. Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas.

d. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *over haul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul Dari Nilai Aset (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat
1.3.2.1.1	Alat-alat Besar Darat	Over haul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
1.3.2.1.2	Alat Besar Apung	Over haul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	2
			> 45% s.d. 65%	5
1.3.2.1.3	Alat Bantu	Over haul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	2
			> 45% s.d. 65%	4
1.3.2.2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	Over haul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.2.2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.2.3	Alat Angkutan Apung Bermotor	Over haul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
1.3.2.2.4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.2.5	Alat Angkutan Bermotor Udara	Over haul	> 0% s.d. 25%	3
			> 25% s.d. 50%	6
			> 50% s.d. 75%	9
1.3.2.3.1	Alat Bengkel Bermesin	Over haul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.3.2	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.3.3	Alat Ukur	Over haul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.4.1	Alat Pengolahan	Over haul	> 0% s.d. 20%	1
			> 20% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	5
1.3.2.5.1	Alat Kantor	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.5.2	Alat Rumah Tangga	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul Dari Nilai Aset (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat
1.3.2.5.3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.6.1	Alat Studio	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.6.2	Alat Komunikasi	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.6.3	Peralatan Pemancar	Over haul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
1.3.2.6.4	Peralatan Komunikasi Navigasi	Over haul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 75%	7
1.3.2.7.1	Alat Kedokteran	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.7.2	Alat Kesehatan Umum	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.8.1	Unit Alat Laboratorium	Over haul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.8.2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Over haul	> 0% s.d. 25%	3
			> 25% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 75%	7
1.3.2.8.3	Alat Peraga Praktek Sekolah	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	5
1.3.2.8.4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Over haul	> 0% s.d. 25%	3
			> 25% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 75%	7
1.3.2.8.5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Over haul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
1.3.2.8.6	*Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya	Over haul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
1.3.2.8.7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Over haul	> 0% s.d. 25%	1

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul Dari Nilai Aset (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.8.8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Over haul	> 0% s.d. 25%	3
			> 25% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 75%	7
1.3.2.8.9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	Over haul	> 0% s.d. 25%	3
			> 25% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 75%	7
1.3.2.9.1	Senjata Api	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	5
1.3.2.9.2	Persenjataan Non Senjata Api	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.9.3	Senjata Sinar	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.9.4	Alat Khusus Kepolisian	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.10.1	Komputer Unit	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.10.2	Peralatan Komputer	Over haul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.11.1	Alat Eksplorasi Topografi	Over haul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.11.2	Alat Eksplorasi Geofisika	Over haul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
1.3.2.12.1	Alat Pengeboran Mesin	Over haul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
1.3.2.12.2	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.13.1	Sumur	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.13.2	Produksi	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul Dari Nilai Aset (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.13.3	Pengolahan Dan Pemurnian	Over haul	> 0% s.d. 25%	3
			> 25% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 75%	7
1.3.2.14.1	Alat Bantu Eksplorasi	Over haul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	4
			> 50% s.d. 75%	6
1.3.2.14.2	Alat Bantu Produksi	Over haul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	4
			> 50% s.d. 75%	6
1.3.2.15.1	Alat Deteksi	Over haul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.15.2	Alat Pelindung	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.15.3	Alat SAR	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
1.3.2.16.1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Over haul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
1.3.2.17.1	Unit Peralatan Proses/Produksi	Over haul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.18.1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Over haul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.18.2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Over haul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 75%	2
			> 50% s.d. 50%	3
1.3.2.18.3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Over haul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.2.19.1	Peralatan Olah Raga	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.3.1.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.3.1.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul Dari Nilai Aset (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.3.2.1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.3.3.1	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.3.4.1	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.1.1	Jalan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	5
			> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.1.2	Jembatan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.2.1	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	5
			> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.2.2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2
			> 5% s.d. 10%	5
			> 10% s.d. 20%	10
1.3.4.2.3	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	3
			> 10% s.d. 20%	5
1.3.4.2.4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	2
			> 10% s.d. 20%	3
1.3.4.2.5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	2
			> 10% s.d. 20%	3
1.3.4.2.6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.2.7	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.3.1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.3.2	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul Dari Nilai Aset (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.3.3	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
1.3.4.3.4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
1.3.4.3.5	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.3.6	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.3.7	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
1.3.4.3.8	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.3.9	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	2
			> 45% s.d. 65%	3
1.3.4.3.10	Instalasi Lain	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	2
			> 45% s.d. 65%	3
1.3.4.4.1	Jaringan Air Minum	Over haul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.4.2	Jaringan Listrik	Over haul	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.4.3	Jaringan Telepon	Over haul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	5
			> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.4.4	Jaringan Gas	Over haul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
1.3.5.2.1	Barang Bercorak Kesenian	Over haul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
1.3.5.7.1	Aset Tetap Dalam Renovasi	Over haul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5

Penyusutan

a. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

b. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

c. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\textbf{Penyusutan Per Periode} = \frac{\textbf{Nilai yang dapat disusutkan}}{\textbf{Masa Manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

1. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
2. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
3. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada poin b.
4. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

d. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

e. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan Metode Garis Lurus (*straight line method*) maka masa manfaat aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Barang	Uraian	Umur/Masa Manfaat (TAHUN)
1.3.2.1.1	Alat Besar Darat	10
1.3.2.1.2	Alat Besar Apung	8
1.3.2.1.3	Alat Bantu	7
1.3.2.2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.2.2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.3.2.2.3	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1.3.2.2.4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.2.5	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1.3.2.3.1	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.3.2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.3.3	Alat Ukur	5
1.3.2.4.1	Alat Pengolahan	4
1.3.2.5.1	Alat Kantor	5
1.3.2.5.2	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.5.3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.6.1	Alat Studio	5
1.3.2.6.2	Alat Komunikasi	5
1.3.2.6.3	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.6.4	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1.3.2.7.1	Alat Kedokteran	5
1.3.2.7.2	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.2.8.1	Unit Alat Laboratorium	8
1.3.2.8.2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.8.3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
1.3.2.8.4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1.3.2.8.5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.8.6	*Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya	10
1.3.2.8.7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.8.8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1.3.2.8.9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10
1.3.2.9.1	Senjata Api	10
1.3.2.9.2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.2.9.3	Senjata Sinar	5
1.3.2.9.4	Alat Khusus Kepolisian	4
1.3.2.10.1	Komputer Unit	4
1.3.2.10.2	Peralatan Komputer	4
1.3.2.11.1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1.3.2.11.2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1.3.2.12.1	Alat Pengeboran Mesin	10
1.3.2.12.2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1.3.2.13.1	Sumur	10
1.3.2.13.2	Produksi	10
1.3.2.13.3	Pengolahan Dan Pemurnian	15
1.3.2.14.1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1.3.2.14.2	Alat Bantu Produksi	10
1.3.2.15.1	Alat Deteksi	5
1.3.2.15.2	Alat Pelindung	5
1.3.2.15.3	Alat SAR	2
1.3.2.15.4	Alat Kerja Penerbangan	10
1.3.2.16.1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10

Kode Barang	Uraian	Umur/Masa Manfaat (TAHUN)
1.3.2.17.1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1.3.2.18.1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1.3.2.18.2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1.3.2.18.3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1.3.2.19.1	Peralatan Olah Raga	3
1.3.3.1.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.1.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.3.2.1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1.3.3.3.1	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.3.4.1	Tugu/Tanda Batas	50
1.3.4.1.1	Jalan	10
1.3.4.1.2	Jembatan	50
1.3.4.2.1	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.2.2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1.3.4.2.3	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1.3.4.2.4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.2.5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1.3.4.2.6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.2.7	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.3.1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1.3.4.3.2	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.3.3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.3.4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.3.5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.3.6	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.3.7	Instalasi Pertahanan	30
1.3.4.3.8	Instalasi Gas	30
1.3.4.3.9	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.3.10	Instalasi Lain	5
1.3.4.4.1	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.4.2	Jaringan Listrik	40
1.3.4.4.3	Jaringan Telepon	20
1.3.4.4.4	Jaringan Gas	30
1.3.5.2.1	Barang Bercorak Kesenian	4
1.5.3.1.1	Aset Tidak Berwujud	4

f. Aset tetap lainnya berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

g. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

h. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

1. aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
2. aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap

Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan bulan penggunaan. Dengan pendekatan bulan penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan. Misalnya, jika suatu aset diperoleh dan digunakan tanggal bulan Oktober 20x1 maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung 3 bulan yaitu dari tanggal bulan Oktober ke bulan Desember 20x1. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan.

Penyusutan Atas Aset Secara Berkelompok

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

Penjualan Aset Tetap Yang Telah Disusutkan Seluruhnya

Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

Penyajian Penyusutan

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional. Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Aset Tetap Lainnya

a. Aset yang termasuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/ buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman.
b. Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas.
c. Perolehan aset tetap lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai aset tetap lainnya dan mengurangi kas umum daerah pada neraca dalam rangka penyajian dalam laporan realisasi anggaran, perolehan aset tetap lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan aset tetap lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai aset tetap lainnya pada neraca dan sebagai pendapatan-LO.
d. Aset tetap lainnya yang berupa buku perpustakaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, Ikan, dan tanaman yang sudah tidak dapat digunakan atau mati dihapuskan dari aset tetap lainnya.

e. Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan.

f. Aset tetap lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam neraca. Aset tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam neraca namun tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

b. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap

a. Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tersebut hakikatnya tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan sehingga penggunaannya harus dihentikan.

b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

c. Suatu aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

d. Pelepasan aset tetap atau pemindah tanganan barang milik daerah dilakukan dengan dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau dijadikan penyertaan modal daerah.

e. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah sedangkan aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal daerah dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal daerah.

f. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan aset non lancar dan disajikan pada laporan operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada laporan realisasi anggaran (LRA).

g. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.

Aset Tetap Hilang

a. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

b. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan

ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

Pengungkapan Aset Tetap

a. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
    1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount)*;
    2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
        a) Penambahan;
        b) Pelepasan;
        c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
        d) Mutasi aset tetap lainnya.
b. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
    1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
    2. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
    3. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
    4. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
c. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
    1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
    2. tanggal efektif penilaian kembali;
    3. jika ada, nama penilai independen;
    4. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
    5. nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
d. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan.

Pengakuan

a. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 kriteria berikut: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.
b. Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
c. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
d. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengukuran

a. Aset tetap berupa Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
b. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Pada umumnya, pembelian tanah dianggarkan dalam belanja modal, sehingga pengakuan aset tetap tanah didahului dengan pengakuan belanja modal yang telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
c. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
d. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Aset tetap berupa tanah, berapa pun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
b. Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya); Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah; serta Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Peralatan Dan Mesin

a. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
b. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Berat, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi dan lain sebagainya.
c. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, akan tetapi dikelompokkan sebagai persediaan.

Pengukuran

a. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
b. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut
c. Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pengungkapan

a. Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan
b. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Gedung Dan Bangunan

a. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

b. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigran, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Gedung dan Bangunan, melainkan disajikan sebagai Persediaan.

Pengakuan

a. Gedung dan bangunan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.
b. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Pengakuan gedung dan bangunan dipisahkan dengan tanah di mana gedung bangunan tersebut didirikan. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
c. Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal dan belanja lainnya yang bisa kapitalisasi secara langsung untuk aset tersebut sedangkan gedung dan bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat gedung dan bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

a. Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan
b. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

c. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana
d. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
e. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengungkapan

a. Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan
b. Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Jalan, Irigasi Dan Jaringan

a. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
b. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

c. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.
d. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti pembangunan jalan perkampungan yang akan diserahkan kepada pemerintah desa, maka jalan tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Jalan, irigasi, dan jaringan, melainkan disajikan sebagai Persediaan.

Pengakuan

a. Jalan, irigasi, dan jaringan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.
b. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai
c. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui pembangunan diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal dan belanja lainnya yang dapat kapitalisasi secara langsung untuk aset tersebut.
d. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat jalan, irigasi dan jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

a. Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
b. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran
c. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengungkapan

a. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh
b. Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

a. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
b. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
    1. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
    2. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
    3. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
    4. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

a. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
b. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
    1. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
    2. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
    3. Biaya masing-masing aset dapat di identifikasikan.
c. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

1. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
2. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan

a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
   1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
   2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
c. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
d. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu konstruksi dalam pengerjaan adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. Apabila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan konstruksi dalam pengerjaan tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
e. Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan sebagai berikut:
   1. Atas dasar bukti transaksi yang obyektif;
   2. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
f. Dalam kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan diantaranya:

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh entitas, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh entitas, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh entitas, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.
6. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

g. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran

a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
    1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
    2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
    3. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
c. Biaya- biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
    1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
    2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
    3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
    4. Biaya penyewaan sarana dan prasarana
    5. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
    1. asuransi;
    2. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
    3. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
e. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
    1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
    2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
    3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

f. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

g. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

h. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

i. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

j. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

k. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

l. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan

a. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
   1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
   2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.
   3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
   4. Uang muka kerja yang diberikan;

5. Retensi.

b. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap). Berikut adalah contoh properti investasi:

a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
g. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai

properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

h. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa Gedung.

i. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

j. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya penyewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatur Aset Tetap.

k. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan

a. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

b. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

c. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

d. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

e. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

f. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
    1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
    2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
    3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
e. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
f. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
g. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
h. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai

properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

i. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

j. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

k. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

l. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

    1. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
    2. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset

yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

m. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Saldo Awal

a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
b. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sigi yang mengatur Aset Tetap.
c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan

masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

i. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

j. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf diatas, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

   1. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
   2. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
   3. proyeksi arus kas diskonto berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

k. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.

l. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

Alih Guna

a. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
   1. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
   2. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
   3. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
   4. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

b. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.

c. Paragraf a (2) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.

d. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
e. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

Pelepasan

a. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
b. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
c. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.
d. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

e. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
f. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
g. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sigi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
b. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
c. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
d. Entitas mengungkapkan:
    1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
    2. metode penyusutan yang digunakan;
    3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (*agregat* dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
    5. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:

a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
c) pelepasan;
d) penyusutan;
e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
f) perubahan lain.

6. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
   a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
   b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
   c) tanggal efektif penilaian kembali;
   d) nilai tercatat sebelum revaluasi
   e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
   f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
8. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
9. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
10. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

11. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
    a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
    b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
    c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
12. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
13. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

Ketentuan Transisi

a. Entitas menerapkan pernyataan standar ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
b. Entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja.

Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan. Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukkannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pengakuan

a. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
b. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
c. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
d. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
e. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Pengukuran

a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non lancar.
b. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
c. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
d. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
    1. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
    2. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
    3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
    4. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
    5. Sumber Dana Cadangan; dan
    6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
e. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
f. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
g. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
h. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya

memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Yang termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

a. tagihan piutang penjualan angsuran;
b. tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
c. kemitraan dengan pihak ketiga;
d. aset tidak berwujud; dan
e. aset lain-lain.

Pengelolaan aset lainnya berdasarkan kewenangannya sebagai berikut:

a. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
    1. Tagihan Jangka Panjang;
    2. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
    3. Aset Lain-lain.
b. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
    1. Aset Tak Berwujud;
    2. Aset Lain-lain.

Pengakuan

a. Tagihan Jangka Panjang, terdiri dari:
    1. Tagihan Penjualan Angsuran

       Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
    2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

   Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

   Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

   BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

   BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

1. Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

5. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian

atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7. Aset Tidak Berwujud Lainnya

   tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan

   Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d. Diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika:

   1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
   2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

e. Aset Lain-lain

   Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran dan Penilaian

a. Tagihan Jangka Panjang

   1. Tagihan Penjualan Angsuran

      Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

   Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bersangkutan ke kas umum daerah.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

   1. Sewa

      Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

   2. Kerja sama Pemanfaatan (KSP)

      Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

   3. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

      BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

   4. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

      BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

e. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Aset kerja sama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK. Aset kerja sama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerja sama.
b. Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.
c. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
    1. besaran dan rincian aset lainnya;
    2. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
    3. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
    4. informasi lainnya yang penting.

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud

Pemerintah sering kali mengeluarkan sumber daya untuk mendapatkan, mengembangkan, memelihara atau memperkuat sumber daya tidak berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi dan hak kekayaan intelektual. Beberapa jenis aset tidak berwujud mungkin terkandung dalam bentuk fisik, seperti dalam *compact disc* (yang memuat piranti lunak komputer), dokumentasi legal (yang memuat lisensi atau paten), atau film. Untuk itu, penentuan apakah aset tersebut termasuk dalam aset berwujud atau tidak berwujud ditentukan dengan mempertimbangkan atribut yang dominan pada aset tersebut. Misalnya, piranti lunak untuk menjalankan komputer, dimana komputer tersebut tidak dapat beroperasi tanpa piranti lunak tersebut merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari piranti kerasnya sehingga diperlakukan

sebagai bagian dari aset tetap. Akan tetapi, bila piranti lunak tersebut bukan merupakan bagian integral dari piranti keras yang terkait, piranti lunak tersebut diperlakukan sebagai aset tidak berwujud.

Aset tidak berwujud meliputi:

a. Piranti lunak (*software*) komputer;

   Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

b. Lisensi dan *franchise;*

   Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu panen yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak cipta (*copyright)*, paten, dan hak lainnya;

   Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerimaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

   Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

   Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

e. Aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah

f. Aset tidak berwujud dalam pengerjaan

Pengakuan

a. Aset tak berwujud diakui jika:
   1. Dapat diidentifikasi;
   2. Dikendalikan, dikuasai atau dimiliki entitas;
   3. Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
   4. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

b. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila:
   1. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; atau
   2. Timbul dari kesepakatan yang mengikat seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

c. Entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan mengendalikan aset pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga berwenang. Namun demikian, dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

d. Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat mencakup penerimaan pendapatan daerah, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas.

e. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis dan/atau sosial masa depan, entitas harus menggunakan pertimbangan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi dan/atau sosial yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut.

f. Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud, perusahaan mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset tak berwujud dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal.

g. Pengakuan aset tak berwujud akan sangat andal bila aset tak berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Bila aset tak berwujud diperoleh dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan.

h. Aset tak berwujud dapat diperoleh entitas melalui pelaksanaan hasil kegiatan yang dilakukan secara internal (swakelola). Kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Sigi memenuhi kriteria untuk diakui. Kesulitan tersebut antar lain untuk:
   1. Menentukan apakah telah timbul, dan saat timbulnya, aset yang dapat diidentifikasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; dan
   2. Menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal.

i. Dalam menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkan aset tak berwujud menjadi dua tahap:
   1. Tahap penelitian atau riset; dan
   2. Tahap pengembangan.

j. Jika suatu entitas tidak dapat membedakan antara tahap riset dan tahap pengembangan suatu kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud, maka entitas memperlakukan kegiatan tersebut seolah-olah sebagai pengeluaran yang dilakukan hanya pada tahap riset saja.

k. Suatu entitas tidak boleh mengakui aset tak berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal). Pengeluaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya.

l. Contoh-contoh kegiatan penelitian atau riset adalah sebagai berikut:
   1. Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
   2. Pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya;
   3. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa; dan
   4. Perumusan, perancangan, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa.

m. Suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu kegiatan internal) diakui jika, dan hanya jika Pemerintah Kabupaten Sigi dapat menunjukkan semua hal berikut ini:
    1. Kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan;
    2. Keinginan untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan menggunakan atau memanfaatkan aset tak berwujud tersebut;
    3. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tak berwujud tersebut;
    4. Cara aset tak berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan, yaitu antara lain entitas harus mampu menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut;
    5. Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan menggunakan aset tersebut; dan
    6. Kemampuan untuk mengukur secara andal dan memadai pengeluaran yang dapat diatribusikan terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya.
n. Pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Contoh aktivitas pada tahap pengembangan:
    1. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
    2. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
    3. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
o. Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai aset tidak berwujud apabila:
    1. Dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga
    2. Dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan.
p. Hak paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah diakui pada saat dokumen hukum yang sah telah diperoleh. Dalam kondisi hak paten dalam

proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka dapat diakui sebagai hak paten dengan nilai sebesar biaya pendaftaran dan memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan

q. Hak paten dari hasil kajian/pengembangan diakui pada saat dokumen hukum yang sah telah diperoleh. Dalam kondisi hak paten dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka dapat diakui sebagai hak paten dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai hasil kajian/pengembangan dan memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban Masa Lalu Tidak Diakui Sebagai Aset

Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

Pengakuan Khusus Terhadap Perangkat Lunak

a. Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten SIgi tidak diakui sebagai aset tak berwujud. Perangkat lunak (*software*) yang dikembangkan sendiri dapat diakui sebagai aset tidak berwujud berupa software yang dikontrakan kepada pihak ketiga.
b. Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dnegan pihak ketiga diakui sebagai aset tak berwujud sebesar nilai kontraknya.
c. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa perangkat lunak tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka perangkat lunak tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
d. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli dan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perangkat lunak (*software*) tersebut dicatat sebagai persediaan.
e. Perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (*software*) dan biaya lisensinya harus

dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Sedangkan perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (*software*) tidak dikapitalisasi.

f. Perangkat lunak (*software*) yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Perangkat lunak (*software*) yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak dikapitalisasi.
g. Perangkat lunak (*software*) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Perangkat lunak (*software*) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak dikapitalisasi.
h. Pengeluaran terkait perangkat lunak (*software*) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktik di pemerintahan terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu namun dana ini dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset tak berwujud walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Namun demikian, instansi Pemerintah Kabupaten Sigi yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui aset tak berwujud tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik dan memenuhi kriteria pengakuan aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang berasal dari penelitian dan pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan aset tak berwujud dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.

Pengukuran

a. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tak berwujud melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tak berwujud yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan Terpisah

a. tak berwujud biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya.
b. Biaya perolehan suatu aset tak berwujud terdiri atas harga beli, termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya.
c. Pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, misalnya imbalan profesional konsultan hukum. Apabila terdapat diskonto atau rabat, maka diskonto atau rabat tersebut mengurangi biaya perolehan aset.

Pertukaran Aset

Suatu aset tak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah aset tak berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Biaya perolehan aset tak berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan.

Kerja sama

Aset tak berwujud yang dihasilkan dari kerja sama dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima aset tidak berwujud tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

Hibah/Donasi

Aset tak berwujud yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan aset tak berwujud tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Aset Tak Berwujud yang Dihasilkan Secara Internal (Swakelola)

a. Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal (swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset tak berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan:
    1. Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tak berwujud;
    2. Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut; dan
    3. Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum.
b. Pengeluaran pelatihan pegawai untuk mengoperasikan aset tak berwujud bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal.

Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud

Aset tak berwujud yang berasal dari aset bersejarah tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila aset tak berwujud bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Pengeluaran Setelah Perolehan

a. Pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:
    1. Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
    2. Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.

b. Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk memelihara agar aset dapat beroperasi pada standar kinerja yang diperkirakan semula. Aset tak berwujud memiliki karakteristik sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus tidak mungkin ditentukan apakah pengeluaran setelah aset diperoleh akan dapat mempertahankan atau meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas dari aset tersebut.
c. Di samping itu, sering kali sulit mengaitkan secara langsung pengeluaran tersebut dengan aset tak berwujud tertentu, tetapi lebih mudah mengaitkan pengeluaran dengan entitas secara keseluruhan. Dengan demikian, jarang terjadi pengeluaran setelah pengakuan awal aset tak berwujud, baik aset yang diperoleh melalui pembelian maupun yang dihasilkan sendiri, diakui sebagai penambahan biaya perolehan aset tak berwujud.
d. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang lebih dari 12 bulan dikapitalisasi.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.

Periode Amortisasi

a. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.
b. Manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung dalam suatu aset tak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan. Hal tersebut, dilakukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Alokasi yang sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat aset tersebut.

Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu aset tak berwujud, termasuk:

1. Perkiraan pemakaian aset oleh entitas dan efisiensi pengelolaannya oleh tim manajemen yang lain;
2. Siklus hidup yang lazim bagi aset tersebut dan informasi yang beredar mengenai estimasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan cara yang sama;
3. Keusangan teknis, teknologi;
4. Tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;
5. Periode pengendalian aset dan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut; dan
6. Ketergantungan masa manfaat aset tersebut atas masa manfaat aset lainnya dari entitas.

c. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (*software*) komputer dan banyak aset tak berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat aset tak berwujud cenderung pendek.

d. Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu aset tak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:

1. Hak hukum tersebut dapat diperbarui; dan
2. Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.

e. Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali terdapat kebijakan akuntansi lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain-lain.

f. Metode amortisasi yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode garis lurus;
2. Metode saldo menurun ganda; dan

3. Metode unit produksi.

g. Pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan metode amortisasi garis lurus dan diterapkan secara konsisten.

h. Metode amortisasi yang digunakan pada suatu aset tak berwujud harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan oleh entitas.

i. Pelaksanaan amortisasi dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual.

j. Periode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari aset tak berwujud, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tak berwujud dapat berubah.

k. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus.

l. Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (paten, hak cipta, waralaba, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.

m. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Nilai Aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tak berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

n. Aset tak berwujud yang semula memiliki manfaat tidak terbatas, namun di kemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas aset tak berwujud tersebut selama masa manfaat yang dapat diidentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut terjadi.

o. Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas aset tak berwujud. Beban amortisasi disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun aset tak berwujud dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi.

Penghentian dan Pelepasan

a. Aset tak berwujud yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya.

b. Aset tak berwujud yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penghentian secara permanen atau pelepasan Aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Dalam hal Aset tak berwujud dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka aset tak berwujud harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional.

d. Dalam hal Aset tak berwujud dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat aset tak berwujud diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat hal tersebut dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pengungkapan

a. Laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut terkait aset tak berwujud, antara lain:

    1. Rincian masing-masing pos aset tak berwujud yang signifikan;

2. Aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya.
3. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
4. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
5. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
6. Aset tak berwujud yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
7. Penghentian dan pelepasan aset tak berwujud, jika ada;
8. Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada;
9. Keberadaan aset tak berwujud yang dimiliki bersama, jika ada
10. Indikasi penurunan nilai aset tak berwujud yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

b. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
   1. Alasan penentuan atau faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tidak berwujud;
   2. Penjelasan, nilai tercatat dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
   3. Jumlah keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan; dan
   4. Gambaran mengenai setiap aset tidak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasi yang masih digunakan.

4.4.16 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Sigi. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sigi juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Pengakuan

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan pertukaran;
b. Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah; dan
d. Kejadian yang diakui pemerintah.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Kabupaten Sigi memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Kabupaten Sigi, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

Dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Sigi seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

a. Badan Legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan.
b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Pengukuran

a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
b. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Sigi pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
c. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

Utang Kepada Pihak Ketiga

a. Pada saat Pemerintah Kabupaten Sigi menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Kabupaten Sigi harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak.
b. Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.
c. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

Utang Bunga

a. Utang Bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Sigi harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

b. Pengukuran dan penyajian, utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN).

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang perhitungan pihak ketiga adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
b. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sigi harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Bagian Lancar Jangka Panjang

a. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
b. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka

a. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
b. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.

c. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk pendapatan diterima dimuka adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban Lancar Lainnya

a. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

b. Penilaian utang Pemerintah Kabupaten Sigi disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

    1. Utang Pemerintah Kabupaten Sigi yang tidak diperjualbelikan

        a) Nilai nominal atas utang Pemerintah Kabupaten Sigi yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan dalam tanggal pelaporan.

        b) Contoh dari utang Pemerintah Kabupaten Sigi yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).

        c) Untuk utang Pemerintah Kabupaten Sigi dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Kabupaten Sigi dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

2. Utang Pemerintah Kabupaten Sigi yang diperjualbelikan

   a) Akuntansi untuk utang Pemerintah Kabupaten Sigi dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Sigi pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode di antaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Kabupaten Sigi.

   b) Utang Pemerintah Kabupaten Sigi yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

   c) Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

   d) Sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Sigi yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Kabupaten Sigi yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.

   e) Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

Perubahan Valuta Asing

a. Utang Pemerintah Kabupaten Sigi dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

b. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
c. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
d. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.
e. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
f. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

a. Untuk sekuritas utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
b. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.

c. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tunggakan

a. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Sigi harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
b. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Sigi tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang Pemerintah Kabupaten Sigi mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
c. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari informasi terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Kabupaten Sigi menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas entitas.
d. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

Restrukturisasi Utang

a. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
b. Restrukturisasi utang dapat berupa:
    1. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
    2. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
    3. Perubahan jadwal pembayaran,
    4. Penambahan masa tenggang, atau
    5. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
c. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
d. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
e. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam

persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

f. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

g. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang sering kali harus diestimasi.

Penghapusan Utang

a. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya.

b. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun non kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

c. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas maka ketentuan mengenai Restrukturisasi Utang pada angka 2 (dua) berlaku.

d. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non kas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan restrukturisasi Utang, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non kas yang berhubungan.

e. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

1. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
2. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

f. Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah Daerah

a. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten Sigi adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya yang dimaksud meliputi:
   1. Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang;
   2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
   3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment-fee*, dan sebagainya.
   4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

b. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

c. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 83

d. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasikan adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek

Pemerintah Daerah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional untuk menentukan hal tersebut.

e. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Utang Pemerintah Kabupaten Sigi harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
b. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
    1. Jumlah saldo kewajiban jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
    2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
    3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
    4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
    5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
        a) Pengurangan pinjaman;
        b) Modifikasi persyaratan utang;
        c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
        d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
        e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
        f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
c. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

d. Biaya pinjaman:
    1. Perlakuan biaya pinjaman;
    2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.17 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
    1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
    2. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
b. Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
    1. Terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
    2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
    3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
    4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (di bayarkan secara tunai tanpa penetapan)
    5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
c. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
d. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:

1. Pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui penetapan diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
2. Pendapatan asli daerah yang diperoleh tanpa melalui penetapan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran ke Rekening Umum Kas Daerah
3. Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari hasil eksekusi jaminan diakui pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan
4. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sigi. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.
6. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima.

e. Pengakuan pendapatan-LO pada SKPD:

1. Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak bersangkutan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
2. Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungkan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan penetapan.

Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

3. Pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

Pengukuran

a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran).
b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LO adalah:

a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.18 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sigi, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sigi.

Pengakuan

a. Pendapatan LRA diakui pada saat:
    1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
    2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
    3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

c. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

d. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Sigi dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Sigi. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi.

e. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

f. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang atas penerimaan pendapatan – LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan – LRA.

g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

h. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

i. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Sigi, baik yang dicatat di SKPD maupun BUD.
j. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Laporan Operasional. Contoh transaksi berwujud barang adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.
k. Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa dapat tidak dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
l. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasilkan aset tetap dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.

Pengukuran

a. Akuntansi pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran).
b. Pendapatan perpajakan – LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/di kompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
c. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan – LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
d. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Kabupaten Sigi atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktu singkat.

Penyajian

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
b. Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.19 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, beban transfer, defisit non operasional, dan beban luar biasa.

Klasifikasi beban berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, beban yang merupakan belanja dari sekretariat DPRD tingkat kabupaten, sekretariat daerah, dinas di pemerintah tingkat kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat kabupaten.

Pengakuan

a. Beban diakui pada:
    1. Saat timbulnya kewajiban;
    2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
    3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

b. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

c. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

d. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

e. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   3. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

f. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

g. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

h. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka

pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

i. Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

j. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

k. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

l. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

    1. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
    2. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
    3. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

4. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
5. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
6. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian

a. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
    1. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
    2. Beban Transfer;
    3. Beban Non Operasional;
    4. Beban Luar Biasa.

b. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
b. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.

4.4.20 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Sigi yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak

dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi:

a. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang di antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
b. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
c. Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal:

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Kabupaten Sigi.
b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi.
c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Batasan minimal kapitalisasi (*threshold capitalization*) aset tetap atau aset lainnya didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Batasan minimal kapitalisasi (*threshold capitalization*) untuk setiap jenis aset atau belanja modal adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	**Belanja Modal Tanah**	Rp. 0,00
2	**Belanja Modal Alat Besar**	
	Belanja Modal Alat-alat Berat	Rp.500.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
3	**Belanja Modal Alat Angkutan**	
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Udara	Rp.500.000,00
4	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat-alat Ukur	Rp.500.000,00
5	**Belanja Modal Alat Pertanian**	
	Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp.500.000,00
6	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
	Belanja Modal Peralatan Kantor	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Mebeulair	Rp.500.000,00
7	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
	Belanja Modal Alat Studio	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Peralatan Pemancar	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp.500.000,00
8	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
	Belanja Modal Alat Kedokteran	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	Rp.500.000,00
9	**Belanja Modal Alat Laboratorium**	
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp.500.000,00
	Belanja Modal *Radiation Application and NonDestructive Testing* Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp.500.000,00
	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp.500.000,00
10	**Belanja Modal Alat Persenjataan**	
	Belanja Modal Senjata Api	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Persenjataan Non Senjata Api	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Senjata Sinar	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat Khusus Kepolisian	Rp.500.000,00
11	**Belanja Modal Komputer**	
	Belanja Modal Komputer Unit	Rp. 300.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
12	**Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan**	Rp.20.000.000,00
13	**Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan**	Rp. 0,00
14	**Belanja Modal Buku/Kepustakaan**	Rp. 100.000,00
15	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan**	Rp. 100.000,00
16	**Belanja Modal Hewan/Ternak dan Tanaman**	Rp. 100.000,00

Batasan Minimal Kapitalisasi *(threshold capitalization*) aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan di atas khusus untuk belanja modal tanah, jika belanja modal tersebut menambah bidang dan atau luas tanah maka tetap diperlakukan sebagai belanja modal walaupun biayanya di bawah batasan minimal kapitalisasi (*threshold capitalization*).

Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara;
b. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
c. Bertambah umur ekonomis, dan/atau
d. bertambah volume, dan/atau
e. bertambah kapasitas produksi.
f. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

a. terjadinya pengeluaran dari RKBUD;
b. khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
c. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
b. Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.21 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan

Pengakuan pembiayaan dapat dibagi sebagai berikut:

a. Penerimaan/Pengeluaran pembiayaan yang melalui RKUD:
    1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
    2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
    3. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
b. Penerimaan/Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD:
    1. Pemerintah Kabupaten Sigi menerima hibah berupa saham (bukan kas). Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi mengakuinya sebagai pendapatan hibah dan

juga mengakuinya sebagai pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sigi.

2. Pemerintah Kabupaten melakukan konversi piutang atau penyertaan modal dalam bentuk aset non kas menjadi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sigi. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi mengakui adanya pengurangan piutang atau aset non kas dan mengakui penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sigi dan pengeluaran pembiayaan.
3. Satker Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menggunakan pendapatannya untuk menambah pokok dana bergulir atau menambah pokok dana investasi. Atas transaksi tersebut satker BLUD mengakui adanya pengeluaran pembiayaan dan penambahan dana bergulir atau investasi walaupun pengeluaran tersebut tidak melalui RKUD.

Pengukuran

a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran).
b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
b. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
    1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
    2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.275.403.515.672,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.189.888.414.789,98 atau 93,29%.

Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp220.262.089.889,46 atau turun15,62% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp1.410.150.504.679,44.

Realisasi Pendapatan Daerah (PD) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp100.945.078.154,38, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.068.727.289.084,60, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp20.216.047.551,00. Rincian realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	103.756.606.200,00	100.945.078.154,38	97,29	84.824.192.278,39
Pendapatan Transfer	1.151.046.082.875,00	1.068.727.289.084,60	92,84	1.309.724.872.946,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.600.826.597,00	20.216.047.551,00	98,13	15.601.439.455,05
Jumlah	**1.275.403.515.672,00**	**1.189.888.414.789,98**	**93,29**	**1.410.150.504.679,44**

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 digambarkan dalam diagram di bawah ini.

Gambar 4
Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

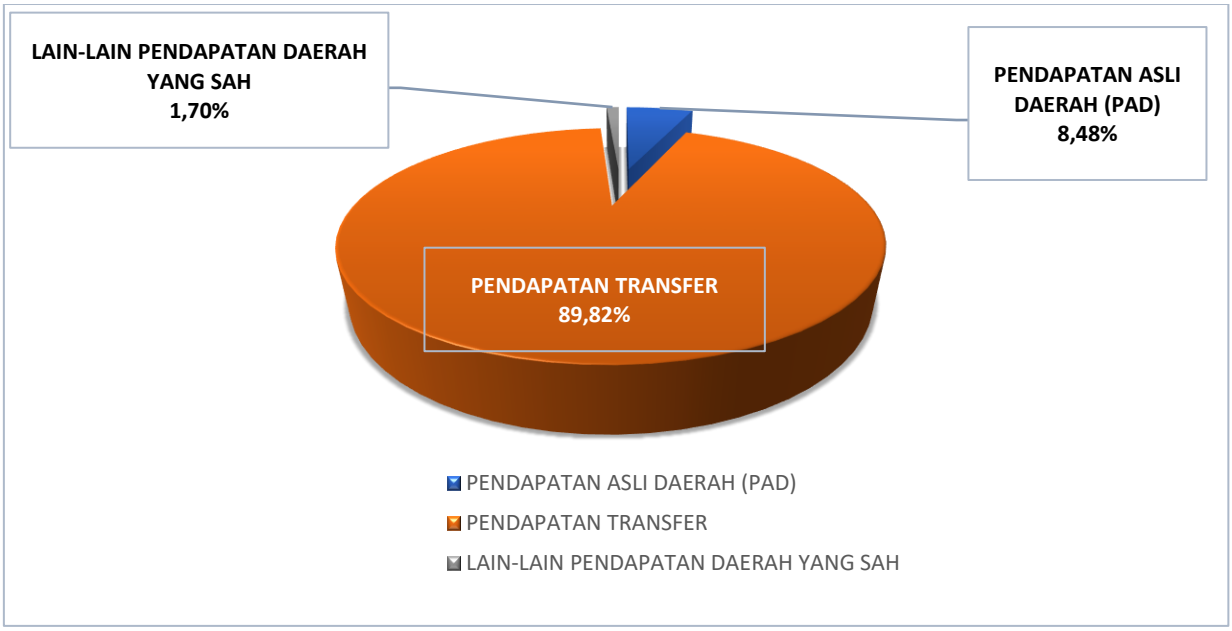

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp103.756.606.200,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp100.945.078.154,38 atau 97,29%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun 2025 terdiri atas realisasi Pajak Daerah sebesar Rp44.393.219.166,00 atau 93,75%, realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp2.022.512.540,00 atau 83,50%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.337.214.390,00 atau 100%, dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar

Rp52.192.132.058,38 atau 101,05%. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 21
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	47.352.244.583,00	44.393.219.166,00	93,75	35.118.053.979,00
Pendapatan Retribusi Daerah	2.422.050.000,00	2.022.512.540,00	83,50	3.039.618.382,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.337.214.390,00	2.337.214.390,00	100	2.092.871.872,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.645.097.227,00	52.192.132.058,38	101,05	44.573.648.045,39
Jumlah	**103.756.606.200,00**	**100.945.078.154,38**	**97,29**	**84.824.192.278,39**

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sesuai Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat perubahan nomenklatur jenis Pajak Daerah yang dipungut terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Air Tanah (PAT);
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak Daerah merupakan PAD yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Pajak Daerah Kabupaten Sigi dipungut dengan asas berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment*) dan penetapan Bupati Sigi (*official assesment*) serta dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati Sigi (*official assesment*) terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
b. Pajak Reklame;
c. Pajak Air Tanah;
d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB.

Sedangkan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) terdiri atas:

a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas;
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp44.393.219.166,00 atau 93,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp47.352.244.583,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.275.165.187,00 atau 26,41% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.118.053.979,00. Lebih rinci mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada **lampiran 1**.

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame berupa benda, alat, perbuatan atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Pajak Reklame untuk TA 2025 dianggarkan sebesar Rp378.814.588,00 dan terealisasi sebesar Rp397.164.817,00 atau 104,84%, berdasarkan data realisasi tersebut pada TA 2025 Pendapatan Pajak Reklame dapat memenuhi target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp331.024.150,00 terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp66.140.667,00 atau 19,98%. Adapun jenis objek pajak reklame yaitu reklame papan, *billboard* dan reklame kain dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 22
Rincian Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/ Megatron	360.854.588,00	385.474.817,00	106,82	322.154.150,00
Pajak Reklame Kain	17.960.000,00	11.690.000,00	65,08	8.870.000,00
Jumlah	**378.814.588,00**	**397.164.817,00**	**104,84**	**331.024.150,00**

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Reklame di Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi, telah melakukan beberapa

kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2025 antara lain sebagai berikut:

a. Penagihan untuk piutang SKPD pajak reklame yang terbit sejak 01 Januari 2021 sampai dengan sekarang;
b. Ekstensifikasi melalui pendataan reklame perkantoran, insidental dan reklame berjalan pada kendaraan;
c. Penyampaian himbauan reklame yang belum daftar ulang (BDU) kelompok tertentu;
d. Simplifikasi persyaratan pendaftaran/perpanjangan reklame guna mendorong Wajib Pajak melakukan pendaftaran dan perpanjangan izin reklame;
e. Sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang pengenaan pajak reklame kepada *stakeholders* atas reklame pengenal usaha; reklame dalam ruang; hingga dan penyelenggaraan reklame kegiatan politik.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pajak reklame Tahun Anggaran 2025 antara lain kecenderungan penyelenggara reklame memilih media sosial sebagai sarana penyelenggaraan/penayangan reklame/iklan, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

2. Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pada tahun 2025 Pajak Air Tanah ditargetkan sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp174.859.979,00 atau sebesar 116,57% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp97.674.471,00 mengalami kenaikan cukup signifikan yakni sebesar Rp77.185.508,00 atau sebesar 79,02%, hal ini disebabkan semakin tingginya tingkat kesadaran para objek pajak dalam membayar kewajiban atas pengambilan pemanfaatan air tanah permukaan, selain itu berkat sosialisasi yang berkesinambungan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pajak Air Tanah kepada masyarakat dan para pengusaha diwilayah Kabupaten Sigi.

3. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pada tahun 2025 Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.500.000,00 atau sebesar 75,00% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp28.200.000,00 mengalami penurunan cukup signifikan yakni sebesar Rp5.700.000,00 atau sebesar 20,21%, hal ini disebabkan menurunnya kesadaran para pelaku usaha sarang burung walet dalam menyampaikan secara mandiri hasil pengambilan yang dilakukan.

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk di manfaatkan.

Pada tahun 2025 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp3.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp929.036.862,00 atau sebesar 26,17% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.778.085.601,00 mengalami penurunan cukup signifikan yakni sebesar Rp4.849.048.739,00 atau sebesar 83,92%, hal ini disebabkan salah satunya moratorium pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang merupakan tujuan utama dan terbesar dari penjualan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kabupaten Sigi.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Pada tahun 2025 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditargetkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.848.062.342,00 atau sebesar 113,92% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar

Rp3.039.538.933,00 mengalami penurunan sebesar Rp191.476.591,00 atau sebesar 6,30%, hal ini disebabkan Badan Pendapatan Daerah mengintensifkan pendataan dan penagihan kembali atas wajib pajak daerah bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Pada tahun 2025 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.015.267.772,00 atau sebesar 120,30% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp13.451.071.203,00 mengalami penurunan cukup signifikan yakni sebesar Rp7.435.803.431,00 atau turun sebesar 55,28%, hal ini disebabkan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3015/KPTS/M/2024 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 Tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Surat Keputusan Bersama (SKB) ini menghimbau kepada para kepala daerah untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk pembangunan rumah tipe 36 yang merupakan produk properti utama diwilayah Kabupaten Sigi.

Adapun realisasi per jenis objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu BPHTB-Pemindahan Hak dan BPHTB-Pemberian Hak Baru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 23
Rincian Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BPHTB-Pemindahan Hak	3.500.000.000,00	3.160.888.386,00	90,31	12.021.747.859,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.500.000.000,00	2.854.379.386,00	190,29	1.429.323.344,00
Jumlah	**5.000.000.000,00**	**6.015.267.772,00**	**120,30**	**13.451.071.203,00**

7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan perubahan nomenklatur baru berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang merupakan tindaklanjut dari Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

Pada tahun 2025 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ditargetkan sebesar Rp11.813.248.995,00 dan terealisasi sebesar Rp11.544.517.650,00 atau 97,72%. bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp12.392.459.621,00 mengalami penurunan yakni sebesar Rp847.941.971,00 atau turun sebesar 6,84%. Hal ini disebabkan selama tahun 2025 PT. PLN (Persero) beberapa kali menjalankan program diskon tarif listrik dan penambahan daya sehingga mempengaruhi perhitungan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik yang merupakan bagian Kabupaten Sigi. Adapun realisasi per jenis objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 24
Rincian Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.100.000.000,00	1.965.878.629,00	93,61	2.677.493.254,00
PBJT-Tenaga Listrik	9.217.448.995,00	9.344.145.823,00	101,37	9.115.985.859,00
PBJT-Jasa Perhotelan	280.000.000,00	166.109.097,00	59,32	319.471.983,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PBJT-Jasa Parkir	34.800.000,00	20.007.010,00	57,49	38.600.000,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	181.000.000,00	48.377.091,00	26,72	240.908.525,00
Jumlah	**11.813.248.995,00**	**11.544.517.650,00**	**97,72**	**12.392.459.621,00**

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan penerimaan pajak daerah baru berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang merupakan tindaklanjut dari Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu atas Pajak kendaraan bermotor yang menjadi bagian hak pemerintah daerah.

Ketentuan opsen pajak kendaraan bermotor 2025 yang diberlakukan sejak 5 Januari diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Implementasi Undang-undang tersebut telah resmi menggantikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pada tahun 2025 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan sebesar Rp14.282.640.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.174.092.788,00 atau 78,23%.

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pungutan tambahan tarif pada biaya balik nama kendaraan bermotor yang menjadi bagian hak pemerintah daerah. Tarif ini akan dikenakan ketika kendaraan berpindah kepemilikan, ini berlaku untuk kendaraan baru maupun bekas.

Ketentuan opsen Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025 yang diberlakukan sejak 5 Januari diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Implementasi Undang-undang tersebut telah resmi menggantikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pada tahun 2025 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp9.647.541.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.287.716.956,00 atau 117,00%.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Berdasarkan peraturan daerah dimaksud, Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.022.512.540,00 atau 83,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.422.050.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.017.105.842,00 atau 33,46% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.039.618.382,00. Lebih rinci mengenai realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada **lampiran 1**.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 25
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	946.050.000,00	855.012.500,00	90,37	774.740.000,00
Retribusi Jasa Usaha	776.000.000,00	565.436.541,00	72,86	691.134.082,00
Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	602.063.499,00	86,00	1.573.744.300,00
Jumlah	**2.422.050.000,00**	**2.022.512.540,00**	**83,50**	**3.039.618.382,00**

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Target pendapatan dari Retribusi Jasa Umum setelah Perubahan APBD TA 2025 adalah Rp946.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp855.012.500,00 atau sebesar 90,37% dari yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasinya sebesar Rp774.740.000,00, maka pada TA 2025 Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan sebesar Rp80.272.500,00 atau sebesar 10,36%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 26
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	86.050.000,00	30.555.000,00	35,50	25.441.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	185.000.000,00	125.263.000,00	67,70	96.190.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	675.000.000,00	699.194.500,00	103,58	617.359.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	35.750.000,00
Jumlah	**946.050.000,00**	**855.012.500,00**	**90,37**	**774.740.000,00**

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah/ pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
- penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Pelayanan kebersihan dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan fasilitas perkantoran Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2025 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditargetkan sebesar Rp86.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp30.555.000,00 atau sebesar 35,50%. Pencapaian realisasi yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan disebabkan fasilitas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah belum maksimal dilakukan terutama penyediaan lokasi dan bak penampungan sementara sehingga menjadi hambatan pemungutan atas retribusi persampahan dari masyarakat.

b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan pembayaran atas jasa penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditargetkan sebesar Rp185.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp125.263.000,00 atau 67,70%. Dibandingkan dengan penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2024 sebesar Rp96.190.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp29.073.000,00 atau 30,22%. Peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2025 dikarenakan upaya maksimal dari perangkat daerah pemungut retribusi pada lokasi yang telah ditentukan dapat dilakukan pemungutan terutama pada lokasi parkir pada pasar-pasar harian yang ada di wilayah Kabupaten Sigi.

c. Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2025 Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp675.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp699.194.500,00 atau 103,58%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp617.359.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp81.835.500,00 atau sebesar 13,26%. Peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terjadi disebabkan dilaksanakannya perhitungan kembali atas pengenaan tarif fasilitas Los dan Kios pada seluruh pasar tradisional di wilayah Kabupaten Sigi menggunakan luasan yang digunakan oleh pengusaha.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2025 berdasarkan jenis fasilitas pasar dapat diliat pada tabel berikut.

Tabel 27
Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Pelataran	516.388.186,00	527.874.500,00	102,22	453.682.000,00
Retribusi Los	134.752.210,00	144.815.000,00	107,46	138.672.000,00
Retribusi Kios	23.859.604,00	26.505.000,00	111,08	25.005.000,00
Jumlah	**675.000.000,00**	**699.194.500,00**	**103,58**	**617.359.000,00**

d. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Secara peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan atas retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sehingga pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat realisasi penerimaan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Target pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha setelah Perubahan APBD TA 2025 adalah Rp776.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp565.436.541,00 atau sebesar 72,86% dari yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasinya sebesar Rp691.134.082,00, maka pada TA 2025 Retribusi Jasa Umum mengalami penurunan sebesar Rp125.697.541,00 atau sebesar 18,19%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 28
Realisasi Penerimaan Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	65.480.000,00	65,48	65.215.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000.000,00	31.100.000,00	31,10	43.200.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	240.000.000,00	232.666.541,00	96,94	218.619.082,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	236.000.000,00	236.190.000,00	100,08	364.100.000,00
Jumlah	**776.000.000,00**	**565.436.541,00**	**72,86**	**691.134.082,00**

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan retribusi atas pemakaian atau sewa alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat realisasi, hal ini disebabkan pada tahun 2025 diwilayah Kabupaten Sigi banyak terjadi bencana alam banjir bandang dan tanah longsor sehingga alat berat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum difokuskan pada penanggulangan bencana.

b. Retribusi Rumah Potong Hewan

Pungutan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan dilakukan oleh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dilakukan berdasarkan Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang muncul akibat penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Pada tahun 2025 Retribusi Rumah Potong Hewan ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp65.480.000,00 atau sebesar 65,48%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp65.215.000,00 terdapat peningkatan penerimaan yang disebabkan pada tahun 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara masif dan konsisten melakukan sosialisasi pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan kepada masyarakat maupun kelompok peternak diwilayah Kabupaten Sigi yang berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan jumlah hewan ternak yang dipotong di rumah potong hewan.

c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Penerimaan pungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada penggunaan fasilitas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp31.100.000,00 atau sebesar 31,10%. Realisasi Penerimaan pungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diperoleh dari fasilitas penyeberangan menggunakan kapal angkutan umum di Danau Lindu.

d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan penerimaan pungutan atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada TA 2025 ditargetkan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp240.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp232.666.541,00 atau 96,94%, dan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp218.619.082,00 mengalami kenaikan sebesar 6,43%. Realisasi tersebut merupakan pendapatan retribusi atas penyediaan tempat rekreasi pada dua lokasi objek wisata yaitu Objek Wisata Permandian Air Panas Bora, Objek Wisata Paralayang-Wayu.

e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah pada TA 2025 ditargetkan sebesar Rp236.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp236.190.000,00 atau 100,08% dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan realisasi retribusi penjualan produk usaha daerah TA 2024 sebesar Rp364.100.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp127.910.000,00 atau sebesar 35,13%. Realisasi pendapatan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah TA 2025 merupakan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 104, jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp602.063.499,00 atau 86%. Jika dibandingkan

dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp1.573.744.300,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan realisasi sebesar Rp971.680.801,00 atau 61,74%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yaitu PT. Bank Sulteng berdasarkan Surat Pemberitahuan PT. Bank Sulteng tentang Daftar Konversi Dana Setoran Modal Pemerintah Kabupaten Sigi Pembagian atas Laba Bersih dalam Bentuk Dividen Pemegang Saham tahun buku 2024 sebesar Rp2.337.214.390,00 atau 100% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp2.337.214.390,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pembagian dividen atas laba lembaga keuangan Bank tahun buku 2024 yang diterima TA 2025 sebesar Rp2.337.214.390,00 mengalami kenaikan sebesar 11,67% dari TA 2024 sebesar Rp2.092.871.872,00 hal ini disebabkan besarnya nilai penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah kabupaten Sigi kepada PT. Bank Sulteng serta kenaikan laba dari PT. Bank Sulteng itu sendiri.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah bersumber antara lain dari penerimaan jasa giro, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari fasilitas umum, lain-lain PAD yang sah lainnya, dan pendapatan BLUD.

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp51.645.097.227,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp52.192.132.058,38 atau 101,05%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp44.573.648.045,39, maka di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.618.484.012,99 atau 17,09%. Realisasi Lain- lain PAD yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 termasuk realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD sebesar Rp43.180.716.152,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi dari Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29
Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	175.017.800,00	-	0,00
Jasa Giro	2.500.000.000,00	588.426.393,71	23,53	1.614.228.010,00
Pendapatan Bunga	2.391.998.007,00	28.176.344,00	1,17	1.097.697.476,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.480.300.000,00	3.413.391.230,67	230,58	2.022.539.406,79
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	20.638.708,00	-	20.054.305,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.300.000.000,00	1.349.569.737,00	103,81	437.596.534,32
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	27.299.255,00	-	124.890.113,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.972.799.220,00	3.408.896.438,00	172,79	739.488.241,28
Pendapatan BLUD	42.000.000.000,00	43.180.716.152,00	102,81	38.517.153.959,00
Jumlah	**51.645.097.227,00**	**52.192.132.058,38**	**101,05**	**44.573.648.045,39**

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp175.017.800,00 diperoleh dari hasil penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor. 000.2.3.2-507 Tahun 2024 tentang Penjualan Barang Milik Daerah dan Penetapan Nilai Wajar Serta Nilai Penjualan Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sigi Kepada Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 dengan nilai penjualan sebesar Rp173.896.800,00;
- Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor. 400.7-243 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Serta Pemusnahan Bangunan Ruang Tunggu Keluarga Pasien Pada Rumah

Sakit Umum Daerah Tora Belo dalam rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Penjualan Langsung Berupa Material Bangunan yang Dibongkar, dengan nilai penjualan sebesar Rp1.121.000,00.

2. Jasa Giro

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa giro penempatan rekening kas umum daerah pada beberapa Bank umum Pemerintah dan penempatan rekening bendahara penerimaan maupun pengeluaran pada PT. Bank Sulteng. Penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp588.426.393,71 atau 23,53%. Realisasi ini cukup rendah dikarenakan adanya pemaksimalan penyerapan anggaran pada RKUD tahun 2025 dan jika dibandingkan penerimaan jasa giro tahun 2024 sebesar Rp1.614.228.010,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.025.801.616,29 atau turun sebesar 63,55%. Adapun rincian anggaran dan realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

- Jasa Giro Kas Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari penempatan rekening kas daerah pada beberapa Bank selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 550.921.750,71; dan
- Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas sebesar Rp37.504.643,00.

3. Pendapatan Bunga

Penerimaan ini merupakan pengakuan pendapatan daerah yang berasal dari penempatan uang Pemerintah Daerah berdasarkan Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang merupakan program Pemerintah Pusat yaitu pembentukan dan pengelolaan *Treasury Deposit Facility* ke Daerah (TDF-KD). Dana Transfer TDF merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemerintah Daerah yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah tahun 2024 dengan nilai realisasi penerimaan sebesar Rp28.176.344,00.

4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari penyetoran kerugian daerah yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (Majelis TGR) untuk ditagih dan dikembalikan ke kas daerah. Penyetoran ganti kerugian daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.480.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.413.391.230,67 atau 230,58%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.022.539.406,79 terjadi penurunan sebesar Rp1.390.851.823,88 atau 68,77%. Penurunan ini terjadi karena kurangnya upaya dari Majelis TGR dalam melakukan penagihan melalui sidang-sidang majelis dan kesadaran dari individu untuk menyelesaikan temuannya baik secara langsung (tunai) maupun melalui pemotongan langsung atas hak-hak yang diterima di tahun 2025.

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tersebut diperoleh dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp3.413.391.230,67.

5. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada Tahun Anggaran 2025 terdapat realisasi sebesar Rp20.638.708,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp584.403,00 atau 2,91% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.054.305,00.

6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari denda keterlambatan rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak. Pendapatan ini dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp1.349.569.737,00. Adapun rincian bidang penyetor denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Nilai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.050.000,00
Dinas Kesehatan	368.220.000,00
Dinas Perhubungan	4.450.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	969.849.737,00
Jumlah	**1.349.569.737,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp437.596.534,32 terjadi peningkatan sebesar Rp 911.973.202,68 atau 208,41%.

7. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah atas denda pajak daerah dan pada Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Denda Pajak dalam APBD tidak dianggarkan dan sampai dengan periode 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp27.299.255,00 atas Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2024 sebesar Rp124.890.113,00 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp97.590.858,00 atau turun 78,14%. Hal ini disebabkan terdapat program Pemerintah Kabupaten Sigi berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor: 900.1.13.1-207 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pokok dan Pembebasan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), kebijakan ini sebagai apresiasi kepada masyarakat dalam rangka HUT Kabupaten Sigi ke 17 serta upaya peningkatan kepatuhan pembayaran PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Sigi memberikan pengurangan atas pokok serta pembebasan sanksi PBB-P2 berupa pemberian potongan sebesar 25% atas pokok Pajak PBB-P2 tahun 2025 kepada wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan dan pembebasan atas sanksi atau denda atas

tunggakan PBB-P2 tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan.

8. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.972.799.220,00, terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.408.896.438,00.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 tersebut terdiri atas perolehan:

- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp105.770.044,00;
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp880.226.634,00;
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp1.812.570.476,00;
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp21.726.332,00;
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebesar Rp66.432.700,00;
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp55.800,00;
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp142.091.000,00;
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp316.352.452,00;
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp60.000.000,00;
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.171.000,00;

- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp1.500.000,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp739.488.241,28, maka realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.669.408.196,72 atau 360,98%.

9. Pendapatan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 790-051 Tahun 2016 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Tora Belo sebagai BLUD dengan Status Penuh, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerja sama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp42.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp43.180.716.152,00 atau 102,81%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.517.153.959,00, terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp4.663.562.193,00 atau 12,11%. Rincian pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel komparasi di bawah ini.

Tabel 30
Komparasi Realisasi Penerimaan Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Periode Pendapatan	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Triwulan I	10.549.214.532,00	8.517.783.239,00
2	Triwulan II	6.356.135.890,00	9.472.552.240,00
3	Triwulan III	11.382.834.430,00	9.870.829.723,00
4	Triwulan IV	14.892.531.300,00	10.655.988.757,00
Jumlah		**43.180.716.152,00**	**37.617.993.559,16**

Penjelasan lebih rinci tentang Pendapatan BLUD RSUD Tora Belo dapat dilihat dalam Laporan Keuangan BLUD *Audited* pada **Lampiran 2**.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 merupakan pendapatan yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan kepada kabupaten untuk membiayai kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sigi menargetkan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.151.046.082.875,00 dan terealisasi sebesar Rp1.068.727.289.084,60 atau sebesar 92,84% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.309.724.872.946,00 mengalami penurunan sebesar

Rp240.997.583.861,40 atau sebesar 18,40%. Adapun rincian lebih lanjut mengenai pendapatan transfer tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 31
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	909.088.852.428,00	868.003.530.710,00	95,48	1.070.498.098.163,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	169.439.673.000,00	140.549.056.766,00	82,94	186.336.533.326,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.517.557.447,00	60.174.701.608,60	82,97	52.890.241.457,00
Jumlah	**1.151.046.082.875,00**	**1.068.727.289.084,60**	**92,84**	**1.309.724.872.946,00**

Komposisi realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 digambarkan dalam diagram di bawah ini.

Gambar 5
Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025

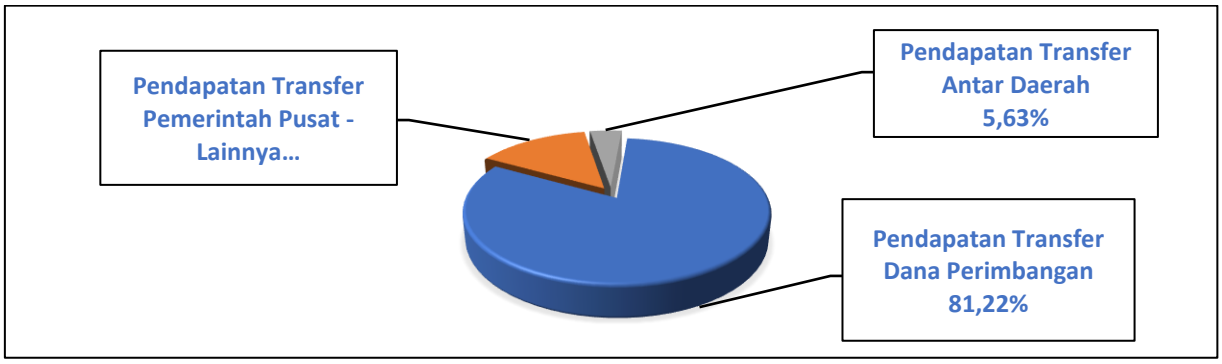

Dari keseluruhan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.068.727.289.084,60 pada gambar diatas dapat dilihat bahwa penyumbang terbesar adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Dana Perimbangan yaitu sebesar 81,22%, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar 13,15%, kemudian Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 5,63%. Hal ini bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi masih sangat tergantung pada penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat.

Adapun rincian Pendapatan Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

Rincian Saldo Pendapatan Transfer Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 32
Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	79.162.852.000,00	62.560.154.084,00	79,02	117.419.602.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	646.984.503.276,00	633.151.507.541,00	97,86	655.819.930.339,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	182.941.497.152,00	172.291.869.085,00	94,17	297.258.565.324,00
Jumlah	**909.088.852.428,00**	**868.003.530.710,00**	**95,48**	**1.070.498.098.163,00**

Penjelasan:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Target Dana Bagi Hasil Pajak pada APBD Tahun Anggaran 2025 adalah Rp79.162.852.000,00 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan terealisasi sebesar Rp62.560.154.084,00 atau mencapai 79,02% dari target anggarannya dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp117.419.602.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp54.859.448.416,00 atau turun 46,72%.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

a. Realisasi DBH Pajak sebesar Rp14.533.427.084,00 atau 67,69% dengan rincian sebagai berikut:
   1) realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp6.839.509.100,00 atau 67,97%;
   2) realisasi DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp7.563.730.584,00 atau 67,39%;
   3) realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp113.075.400,00 atau 68,22%;
   4) realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp17.112.000,00 atau 100%;
b. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp46.500.977.000,00 atau 82,78% dengan rincian sebagai berikut:
   1) realisasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp1.131.455.000,00 atau 94,57%;
   2) realisasi DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp16.062.095.000,00 atau 86,70%;
   3) realisasi DBH SDA Mineral dan Batubara- *Royalty* sebesar Rp28.375.378.000,00 atau 79,89%;
   4) realisasi DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp80.873.000,00 atau 100%;
   5) realisasi DBH SDA Perikanan sebesar Rp851.176.000,00 atau 100%;
c. Realisasi DBH Lainnya berupa DBH Sawit sebesar Rp1.525.750.000,00 atau 100%.

2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dana Alokasi Umum yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Sigi terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (DAU *Block Grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *Spesific Grant*) yaitu DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Infrastruktur.

Namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Infrastruktur untuk Pemerintah Kabupaten Sigi termasuk dalam efisiensi belanja dari Pemerintah Pusat.

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sigi ditargetkan sebesar Rp646.984.503.276,00 terealisasi sebesar Rp633.151.507.541,00 atau mencapai 97,86% dari target anggarannya dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp655.819.930.339,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.668.422.798 atau turun 3,46%.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

a. Realisasi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp486.885.692.276,00 atau 103,59%, realisasi melebihi dari yang ditargetkan dikarenakan terdapat penerimaan Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah sebesar Rp16.882.633.000,00;
b. Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp146.265.815.265,00 atau 82,64% dengan rincian sebagai berikut:
    1) realisasi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp30.001.895.265,00 atau 49,41%;
    2) realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp75.629.233.000,00 atau 100%;
    3) realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp40.634.687.000,00 atau 100%.

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Sigi terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pagu anggaran DAK

Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sedangkan Pagu DAK Non Fisik diatur berdasarkan bidang pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025 memperoleh Dana Alokasi Khusus sebesar Rp182.941.497.152,00 terealisasi sebesar Rp172.291.869.085,00 atau mencapai 94,17%.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

a. Realisasi DAK Fisik sebesar Rp16.091.875.982,00 atau 98,77% dengan rincian sebagai berikut:
   1) realisasi DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler sebesar Rp9.626.318.207,00 atau 98,33%;
   2) realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana sebesar Rp 424.808.896,00 atau 95,07%;
   3) realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp6.040.748.879,00 atau 99,75%.
b. Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp156.199.993.103,00 atau 93,72% dengan rincian sebagai berikut:
   1) realisasi DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp400.660.000,00 atau 100%;
   2) realisasi DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler sebesar Rp33.664.487.218,00 atau 99,61%;
   3) realisasi DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp1.869.000.000,00 atau 100%;
   4) realisasi DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler sebesar Rp4.035.680.480,00 atau 96,70%;
   5) realisasi DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja sebesar Rp120.000.000,00 atau 100%;
   6) realisasi DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebesar Rp3.229.662.700,00 atau 99,87%;

7) realisasi DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebesar Rp90.000.000,00 atau 66,66%;
8) realisasi DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota sebesar Rp10.222.097.267,00 atau 100%;
9) realisasi DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp388.834.000,00 atau 100%;
10) realisasi DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas sebesar Rp13.544.935.566,00 atau 100%;
11) realisasi DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp71.408.280.409,00 atau 90,39%;
12) realisasi DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp34.020.000,00 atau 1,62%;
13) realisasi DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp10.953.240.573,00 atau 95,69%;
14) realisasi DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp5.101.488.890,00 atau 100%;
15) realisasi DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian sebesar Rp1.137.606.000,00 atau 100%.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Rincian Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 33
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Desa	147.925.538.000,00	119.034.921.766,00	80,47	154.494.636.326,00
Insentif Fiskal	21.514.135.000,00	21.514.135.000,00	100	31.841.897.000,00
Jumlah	**169.439.673.000,00**	**140.549.056.766,00**	**82,95**	**186.336.533.326,00**

Penjelasan:

1. Dana Desa

Pagu anggaran Dana Desa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sigi dianggarkan sebesar Rp147.925.538.000,00 dan terealisasi sebesar Rp119.034.921.766,00 atau mencapai 80,47%. Realisasi Dana Desa tidak mencapai 100% disebabkan tidak disalurkannya tahap II jenis Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal 29B.

2. Insentif Fiskal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Sigi dianggarkan sebesar Rp21.514.135.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.514.135.000,00 atau mencapai 100%.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Rincian Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 34
Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	72.317.557.447,00	59.974.701.608,60	82,93	52.790.241.457,00
Bantuan Keuangan	200.000.000,00	200.000.000,00	100	100.000.000,00
Jumlah	**72.517.557.447,00**	**60.174.701.608,60**	**82,97**	**52.890.241.457,00**

Penjelasan:

1. Pendapatan Bagi Hasil

Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 900.1.14.3/27/BAPENDA-G.ST/2025 tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp72.317.557.447,00 dan realisasi tersalurkan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp59.974.701.608,60.

Selain bagi hasil tahun anggaran berjalan, terdapat realisasi kurang salur Pendapatan Bagi Hasil tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 900.1.14.3/28/BAPENDA-G.ST/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.555.133.350,00.

2. Bantuan Keuangan

Realisasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan prestasi suatu daerah dan atau terdapat program yang sinergikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sigi mendapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp200.000.000,00.

Realisasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 terdiri dari:

a. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp100.000.000,00 berdasarkan prestasi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam menurunkan angka prevalensi stunting ;

b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp100.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 900.1.3/075/BPKAD-G.ST/2025 tentang Rincian Dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota Tahun 2025. Bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sigi tersebut khusus dialokasikan berupa kegiatan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) Lingkungan Hidup.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 35
Rekapitulasi Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain Pendapatan	0,00	209.841.386,00	-	37.246.486,05
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	20.600.826.597,00	20.006.206.165,00	97,11	15.564.192.969,00
Jumlah	**20.600.826.597,00**	**20.216.047.551,00**	**98,13**	**15.601.439.455,05**

5.1.1.3.1 Lain-lain Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sigi tidak menganggarkan Lain - Lain Pendapatan disebabkan selama periode penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan tidak mendapat lain-lain pendapatan selain yang telah terdapat dasar hukum pendapatan daerah baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Lainnya.

Realisasi Lain - Lain Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah Pendapatan atas Pengembalian sisa Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (BAWASLUDA) Kabupaten Sigi yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Sigi sebesar Rp209.841.386,00.

5.1.1.3.2 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah menjelaskan penyaluran dana Kapitasi dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku penyelenggara program Jaminan Kesehatan kepada Puskesmas selaku FKTP milik Pemerintah Daerah yang besaran pembayaran per bulannya dibayarkan dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sedangkan untuk penerimaan dana Non Kapitasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional menjelaskan penyaluran dana Non Kapitasi dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku penyelenggara program Jaminan Kesehatan kepada Puskesmas selaku FKTP milik Pemerintah Daerah yang besaran pembayarannya berdasarkan klaim yang diajukan oleh FKTP kepada BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan sub rincian objek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dianggarkan sebesar Rp20.600.826.597,00 dan terealisasi sebesar Rp20.006.206.165,00 atau 97,11%. Rincian pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2025 pada 19 (Sembilan Belas) Puskesmas yang ada di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36
Rekapitulasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN Per FKTP
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	FKTP	Realisasi Dana Kapitasi	Realisasi Dana Non Kapitasi
1	PKM Banasu	121.657.461,00	0,00
2	PKM Kantewu	379.019.183,00	2.994.200,00
3	PKM Baluase	938.838.880,00	772.812.300,00
4	PKM Lindu	304.123.857,00	35.666.000,00
5	PKM Biromaru	2.431.584.336,00	361.540.700,00

No.	FKTP	Realisasi Dana Kapitasi	Realisasi Dana Non Kapitasi
6	PKM Gimpu	458.023.235,00	849.919.400,00
7	PKM Palolo	1.037.276.679,00	818.430.200,00
8	PKM Nokilalaki	352.178.339,00	30.436.000,00
9	PKM Towulu	220.621.098,00	3.245.500,00
10	PKM Kulawi	587.004.618,00	567.075.200,00
11	PKM Marawola	945.160.180,00	1.683.740.200,00
12	PKM Tinggede	540.689.609,00	40.908.100,00
13	PKM Kinovaro	588.070.521,00	87.856.000,00
14	PKM Pandere	612.622.255,00	683.995.200,00
15	PKM Dolo	1.458.145.246,00	178.810.200,00
16	PKM Kaleke	811.765.190,00	654.150.200,00
17	PKM Banpres	473.501.428,00	50.423.100,00
18	PKM Kamaipura	512.577.656,00	61.708.100,00
19	PKM Dombusoi	339.771.094,00	9.864.700,00
Jumlah		**13.112.630.865,00**	**6.893.575.300,00**

5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 37
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5(4:3)*	*6*
I	**Belanja Operasi**	**1.018.338.924.612,40**	**941.434.290.727,50**	**92,44**	**1.005.345.704.315,16**

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai	644.783.534.944,00	580.775.450.926,00	90,07	547.590.556.019,00
2	Belanja Barang dan Jasa	343.028.858.468,40	331.752.728.828,50	96,71	380.749.475.902,16
3	Belanja Subsidi	2.200.000.000,00	2.199.945.127,00	99,99	2.450.817.950,00
4	Belanja Hibah	28.135.531.200,00	26.547.165.846,00	94,35	69.417.912.244,00
5	Belanja Bantuan Sosial	191.000.000,00	159.000.000,00	83,25	5.136.942.200,00
II	**Belanja Modal**	**68.109.141.486,60**	**65.925.778.299,50**	**96,79**	**203.993.787.011,00**
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	982.534.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.783.663.799,00	21.994.787.775,00	96,53	31.566.114.816,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.140.627.912,60	18.544.762.808,50	96,88	67.896.098.558,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.711.622.895,00	19.453.774.146,00	98,69	98.114.695.523,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.183.226.880,00	5.743.677.970,00	92,89	5.170.359.809,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	290.000.000,00	188.775.600,00	65,10	263.984.305,00
III	**Belanja Tidak Terduga**	**5.650.000.000,00**	**4.944.688.400,00**	**87,52**	**3.912.745.909,00**
1	Belanja Tidak Terduga	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	87,52	3.912.745.909,00
IV	**Belanja Transfer**	**222.406.329.564,00**	**193.017.321.488,00**	**86,78**	**227.763.218.906,00**
1	Belanja Bagi Hasil	4.977.492.764,00	4.977.492.764,00	100	3.124.684.980,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	217.428.836.800,00	188.039.828.724,00	86,48	224.638.533.926,00
Jumlah (I,II,III dan IV)		**1.314.504.395.663,00**	**1.205.322.078.915,00**	**91,69**	**1.441.015.456.141,16**

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.018.338.924.612,40. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp941.434.290.727,50 atau 92,44%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp1.005.345.704.315,16 terdapat penurunan sebesar Rp63.911.413.587,66 atau turun 6,36%.

Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 untuk masing-masing perangkat daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada **lampiran 3**.

Komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Gambar 6
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025

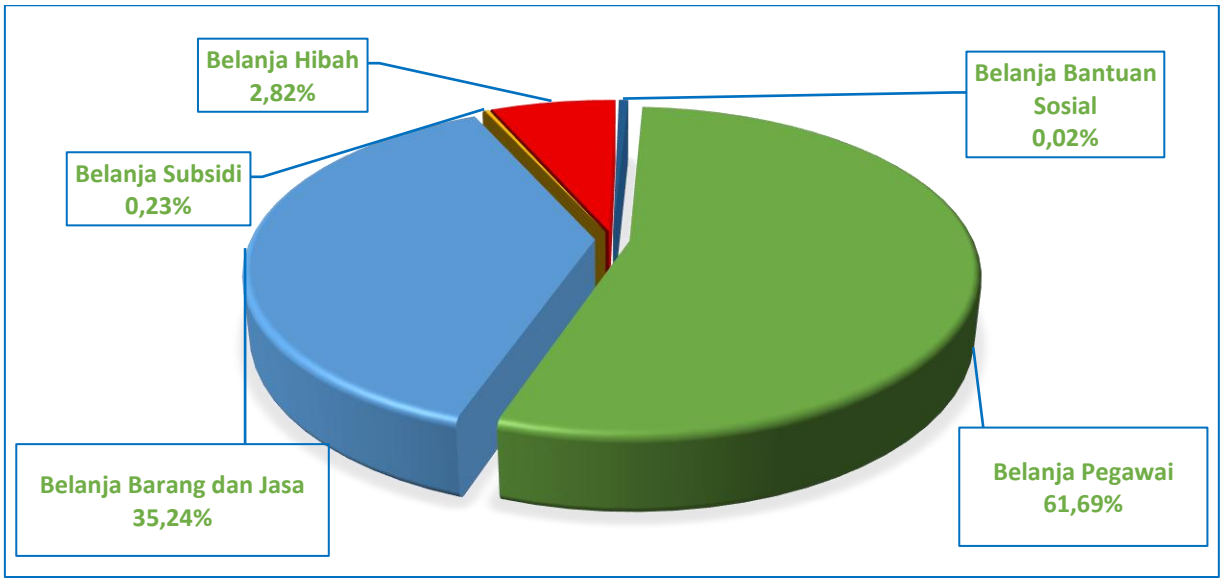

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp644.783.534.944,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp580.775.450.926,00 atau 90,07%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 tidak terserap sebesar Rp64.008.084.018,00 atau 9,93% disebabkan adanya perhitungan *accres* anggaran Belanja Pegawai, kekosongan jabatan struktural, iuran jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja ASN, Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD.

Apabila realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp547.590.556.019,00 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp33.184.894.907,00 atau 6,06%.

Berikut rincian realisasi belanja pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Tabel 38
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	507.332.638.195,00	456.886.880.280,00	90,05	409.308.135.035,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	125.186.047.916,00	112.053.410.855,00	89,50	35.801.168.342,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	86.826.745.329,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.773.508.950,00	10.543.708.290,00	97,87	12.541.615.684,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	640.459.883,00	491.601.501,00	76,76	417.488.963,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	498.280.000,00	97,53	588.266.666,00
Belanja Pegawai BLUD	340.000.000,00	301.570.000,00	88,69	2.107.136.000,00
Jumlah	**644.783.534.944,00**	**580.775.450.926,00**	**90,07**	**547.590.556.019,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp343.028.858.468,40. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp331.752.728.828,50 atau 96,71%. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp380.749.475.902,16, terdapat penurunan sebesar 12,87% yang disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sigi yang menurun.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp331.752.728.828,50 di antaranya merupakan:

a. Realisasi belanja barang sebesar Rp71.465.127.321,50;
b. Realisasi belanja jasa sebesar Rp120.760.708.063,00;
c. Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp19.542.598.429,00;
d. Realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp46.208.398.942,00;
e. Realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp8.198.227.134,00;
f. Realisasi belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp24.278.677.109,00;
g. Realisasi belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp41.298.991.830,00.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sigi dalam memenuhi pelaksanaan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Sigi khususnya misi ke 3 (tiga) yakni “Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata”, menyusun kegiatan untuk operasi pasar yang bertujuan untuk mengintervensi harga pasar kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Kabupaten Sigi menjadi terjangkau dengan kemampuan masyarakat. Selain itu untuk program ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sigi juga memprogramkan cadangan pangan kebutuhan pokok masyarakat sebagai langkah antisipasi kondisi kerawanan bencana.

Capaian realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.199.945.127,00 atau 99,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.200.000.000,00 jika dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.450.817.950,00 terjadi penurunan sebesar Rp250.872.823,00 atau turun sebesar 10,24%, hal ini disebabkan penurunan intensitas pelaksanaan operasi pasar dalam rangka menjaga kestabilan harga pasar pada bahan -bahan kebutuhan pokok masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan

Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp28.135.531.200,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.547.165.846,00 atau 94,35%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp69.417.912.244,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp42.870.746.398,00 atau turun sebesar 61,76%, hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi belanja hibah dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 26.547.165.846,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 39
Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.878.000.000,00	10.573.574.000,00	89,02
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	475.585.200,00	475.548.966,00	99,99
Belanja Hibah Dana BOSP	12.286.946.000,00	12.654.442.880,00	102,99
Belanja Hibah kepada Usaha Mikro	3.495.000.000,00	2.843.600.000,00	81,36
Jumlah	**28.135.531.200,00**	**26.547.165.846,00**	**94,35**

Penjelasan:

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp11.878.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.573.574.000,00 atau 89,02%. Rincian pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja Hibah	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	3.070.000.000,00	2.708.074.000,00	88,21
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.716.000.000,00	6.773.500.000,00	87,78
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	450.000.000,00	450.000.000,00	100
4.	Belanja Hibah kepada Koperasi	642.000.000,00	642.000.000,00	100
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		**11.878.000.000,00**	**10.573.574.000,00**	**89,01**

Rincian penerima Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada **lampiran 3.1**.

b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sigi Nomor 220 – 492 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 220-202 Tahun 2024 Tentang Daftar Penerima Dan Besaran Hibah Berupa Uang Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Serta Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.

Tabel 40
Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Partai Golongan Karya	91.691.961,00	91.691.961,00	100
Partai Gerindra	68.488.296,00	68.488.296,00	100
Partai Nasional Demokrat	56.672.529,00	56.672.529,00	100
Partai Demokrat	50.265.465,00	50.265.465,00	100
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	59.166.603,00	59.166.603,00	100
Partai Keadilan Sejahtera	32.938.599,00	32.938.599,00	100
Partai Kebangkitan Bangsa	25.558.773,00	25.558.773,00	100
Partai Bulan Bintang	34.840.239,00	34.840.239,00	100
Partai Persatuan Indonesia	25.975.671,00	25.975.671,00	100
Partai Amanat Nasional	29.950.830,00	29.950.830,00	100
Jumlah	**475.548.966,00**	**475.548.966,00**	**100**

c. Belanja Hibah Dana BOSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa belanja Dana BOSP pada Satuan Pendidikan Swasta diuraikan ke dalam kelompok belanja operasi dan jenis belanja hibah. Pemerintah Kabupaten Sigi pada Tahun Anggaran 2025 menganggarkan belanja hibah BOSP sebesar Rp12.286.946.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.654.442.880,00 atau 102,99%.

d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025 2029 serta bertujuan meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan program bantuan modal usaha untuk jenis Usaha Mikro dengan nilai anggaran sebesar Rp3.495.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.843.600.000,00 atau 81,36%

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, bantuan ini sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp191.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp159.000.000,00 atau 83,24% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp5.136.942.200,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 96,90%.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan kualitas aset, seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp65.925.778.299,50 atau 96,79% dari anggarannya sebesar Rp68.109.141.486,60. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp203.993.787.011,00, maka terjadi penurunan

Belanja Modal sebesar Rp138.068.008.711,50 atau turun sebesar 67,68%. Penurunan ini disebabkan menurunnya kemampuan keuangan daerah terutama penerimaan transfer pusat yang masih menjadi sumber keuangan utama Pemerintah Kabupaten Sigi dalam membiayai pemerataan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sigi.

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **lampiran 4**.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sigi tidak menganggarkan Belanja Modal Tanah, hal ini disebabkan kemampuan keuangan daerah yang menurun dan belum terdapat kebutuhan yang mendesak. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp982.534.000,00 terjadi penurunan sebesar 100%.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.994.787.775,00 atau 96,53% dari anggarannya sebesar Rp22.783.663.799,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.566.114.816,00 terjadi penurunan sebesar Rp9.571.327.041,00 atau turun sebesar 30,32%. Penurunan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 disebabkan adanya efisiensi pengadaan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.994.787.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	1.516.718.500,00	1.346.717.669,00	88,79	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	5.383.500.200,00	5.328.822.250,00	98,98	7.392.461.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	231.220.000,00	230.728.000,00	99,78	260.642.675,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.131.925.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.680.298.767,00	5.569.861.711,00	98,05	4.973.972.728,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.214.410.405,00	1.198.420.954,00	98,68	760.555.050,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	504.648.685,00	467.816.824,00	92,70	6.448.752.139,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	29.200.000,00	0,00	0,00	837.704.400,00
Belanja Modal Komputer	3.239.547.322,00	3.053.458.207,00	94,25	5.139.985.017,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	72.000.000,00	71.615.285,00	99,46	1.034.579.507,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	218.090.000,00	217.222.865,00	99,60	66.427.582,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.490.138.060,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.569.971.550,00	3.319.414.800,00	92,98	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.124.058.370,00	1.190.709.210,00	105,92	1.028.971.658,00
Jumlah	**22.783.663.799,00**	**21.994.787.775,00**	**96,53**	**31.566.114.816,00**

Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **lampiran 4.1**.

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.544.762.808,50 atau 96,88% dari anggarannya sebesar Rp19.140.627.912,60. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp67.896.098.558,00 terjadi penurunan sebesar Rp49.351.335.749,50 atau turun sebesar 72,69%. Penurunan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 disebabkan menurunnya penerimaan dana transfer Dana Alokasi Khusus dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

untuk Pemerintah Kabupaten Sigi jika dibandingkan dengan alokasi pada Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.544.762.808,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42
Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	15.114.014.835,00	14.861.773.115,50	98,33	66.564.020.090,00
Belanja Modal Bangunan Menara	81.744.900,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.394.868.177,60	3.298.569.693,00	97,16	1.019.998.468,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	550.000.000,00	384.420.000,00	69,89	312.080.000,00
Jumlah	**19.140.627.912,60**	**18.544.762.808,50**	**96,88**	**67.896.098.558,00**

Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **lampiran 4.2**.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal ini diperuntukkan untuk kelancaran baik transportasi, irigasi air dan lain-lain yang dapat menghubungkan dari 1 kecamatan ke kecamatan yang lain di wilayah Kabupaten Sigi. Belanja Modal ini tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sigi dan dilaksanakan oleh beberapa OPD. Realisasi Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.453.774.146,00 atau 98,69% dari anggarannya sebesar Rp19.711.622.895,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp98.114.695.523,00 terjadi penurunan sebesar Rp78.660.921.377,00 atau sebesar 80,17%. Penurunan realisasi Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 disebabkan menurunnya penerimaan dana transfer Dana Alokasi Khusus dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Sigi jika dibandingkan dengan alokasi pada Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.453.774.146,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43
Realisasi Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.523.175.000,00	5.489.078.411,00	99,38	85.494.674.091,00
Belanja Modal Bangunan Air	7.638.885.562,00	7.486.859.098,00	98,01	11.904.688.389,00
Belanja Modal Instalasi	3.569.616.000,00	3.538.322.458,00	99,12	187.354.640,00
Belanja Modal Jaringan	2.979.946.333,00	2.939.514.179,00	98,64	527.978.403,00
Jumlah	**19.711.622.895,00**	**19.453.774.146,00**	**98,69**	**98.114.695.523,00**

Terdapat realisasi Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 menggunakan mekanisme Bank Garansi Jaminan Penyelesaian sebesar Rp146.417.863,00 dengan rincian sebagai berikut:

OPD	Pihak Ketiga	Nomor Kontrak	Uraian Kontrak	Nilai Jaminan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. REZKI ILAHI	600/640/106.948/KONT/2025	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Pombewe	45.417.863,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. VIGAT BINTANG	PPK.02.06/DIKBUD/X/2025	Pembangunan Pagar SMP Negeri 4 Sigi	70.000.000,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. ANZA LINO TAMA	PPK.36.04/DIKBUD/XI/2025	Pembangunan Pagar SDN Inti Loru	31.000.000,00
Jumlah				**146.417.863,00**

Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **lampiran 4.3**.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.743.677.970,00 atau 92,89% dari anggarannya sebesar Rp6.183.226.880,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.170.359.809,00 terjadi peningkatan sebesar Rp573.318.161,00 atau sebesar 11,09%.

Peningkatan realisasi terbesar terdapat pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.743.677.970,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.106.000.000,00	2.093.925.500,00	99,43	2.201.280.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	5.000.000,00
Belanja Modal Hewan	883.803.500,00	862.942.640,00	97,64	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	78.920.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	2.885.159.809,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	3.043.423.380,00	2.636.959.830,00	86,64	0,00
Jumlah	**6.183.226.880,00**	**5.743.677.970,00**	**92,89**	**5.170.359.809,00**

Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **lampiran 4.4**.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp188.775.600,00 atau 65,10% dari anggarannya sebesar Rp290.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp263.984.305,00 terjadi penurunan sebesar Rp75.208.705,00 atau sebesar 28,49%.

Rincian saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software* dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00 terealisasi sebesar Rp68.775.600,00 atau sebesar 40,45% terdapat pada perangkat daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berupa Pembuatan Aplikasi e SAKIB Kabupaten Sigi;

b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00 terealisasi sebesar 100% terdapat pada perangkat daerah Dinas Pemuda Dan Olahraga berupa Kajian tentang:
   1. Desain Olahraga Daerah (DOD) Kabupaten Sigi sebesar Rp70.000.000,00;
   2. Rencana Aksi Daerah Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sigi sebesar Rp500.000.000,00.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial dan belanja lainnya yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp4.944.688.400,00 atau 87,52% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp5.650.000.000,00. Jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.912.745.909,00, terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp1.031.942.491,00 atau sebesar 26,37%.

Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

a. Penanganan darurat bencana di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.886.401.000,00;
b. Pembiayaan terkait dukungan pada pelaksanaan program nasional ketahanan pangan sebesar Rp783.533.400,00;
c. Pemulangan Calon Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp40.389.000,00;
d. Pembiayaan Kunjungan Kerja Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Ke Kabupaten Sigi sebesar Rp163.300.000,00;
e. Pembiayaan Pemantauan Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Kabupaten Sigi sebesar Rp533.420.000,00;
f. Penganggaran Dana APKASI untuk Korban Bencana Alam di Wilayah Sumatera sebesar Rp50.000.000,00.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan.

Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada pemerintah desa.

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp222.406.329.564,00, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp193.017.321.488,00 atau 86,79%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp227.763.218.906,00 terjadi penurunan realisasi sebesar Rp34.745.897.418,00 atau 15,26%, hal ini disebabkan penurunan target penerimaan yang bersumber dari Dana Desa serta terdapat realisasi dari Dana Desa untuk beberapa desa yang tidak dilakukan penyaluran dari Pemerintah Pusat. Rincian belanja transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Transfer bagi hasil pendapatan Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp4.977.492.764,00 terealisasi 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.124.684.980,00 terdapat peningkatan sebesar Rp1.852.807.784,00 atau 59,30%, hal ini disebabkan peningkatan pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor penerimaan pajak dan retribusi daerah di Tahun Anggaran 2024.

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 176 desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Sigi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan yang Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp217.428.836.800,00 dan terealisasi sebesar Rp188.039.828.724,00 atau 86,48%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahu Anggaran 2024 sebesar Rp224.638.533.926,00 terdapat penurunan sebesar Rp36.598.705.202,00 atau turun 16,29%. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp119.034.921.766,00 atau 80,47%, tidak tercapainya realisasi 100% disebabkan tidak disalurkannya tahap II jenis Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal 29B.

   Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa dapat dilihat pada **lampiran 5**;

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp69.004.906.958,00 atau 99,28%.

5.1.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar (Rp39.100.879.991,00). Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp15.433.664.125,02) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45
Realisasi Surplus/(Defisit) Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	1.275.403.515.672,00	1.189.888.414.789,98
Belanja Daerah	1.314.504.395.663,00	1.205.322.078.915,00
Belanja Operasi	1.018.338.924.612,40	941.434.290.727,50
Belanja Modal	68.109.141.486,60	65.925.778.299,50
Belanja Tidak Terduga	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00
Belanja Transfer	222.406.329.564,00	193.017.321.488,00
Surplus/Defisit	**(39.100.879.991,00)**	**(15.433.664.125,02)**

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan anggaran masing-masing Rp39.100.879.991,00 dan Rp0,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 pada Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan masing-masing Rp39.112.019.642,74 dan Rp0,00. Berdasarkan nilai realisasi tersebut maka nilai Pembiayaan *Netto* adalah sebesar Rp39.112.019.642,74. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp39.100.879.991,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp39.112.019.642,74 atau 100,02%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tersebut merupakan Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang telah diaudit oleh BPK-RI dan koreksi atas kesalahan pencatatan tahun sebelumnya.

Rincian realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pelampauan Penerimaan PAD sebesar Rp320.614.100,00;
b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp30.321.988.676,88;
c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp6.659.255,10;
d. Penghematan Belanja sebesar Rp8.312.876.977,00;
e. Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp149.880.633,76.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sigi tidak menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan sama halnya dengan Tahun Anggaran 2024.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp23.678.355.517,72 yang merupakan perhitungan dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.189.888.414.789,98, realisasi

Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp1.205.322.078.915,00 dan Pembiayaan *Netto* sebesar Rp39.112.019.642,74 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Daerah	**1.275.403.515.672,00**	**1.189.888.414.789,98**	**93,29**	**1.410.150.504.679,44**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	103.756.606.200,00	100.945.078.154,38	97,29	84.824.192.278,39
Pendapatan Transfer	1.151.046.082.875,00	1.068.727.289.084,60	92,84	1.309.724.872.946,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	20.600.826.597,00	20.216.047.551,00	98,13	15.601.439.455,05
Belanja Daerah	**1.314.504.395.663,00**	**1.205.322.078.915,00**	**91,69**	**1.441.015.456.141,16**
Belanja Operasi	1.018.338.924.612,40	941.434.290.727,50	92,44	1.005.345.704.315,16
Belanja Modal	68.109.141.486,60	65.925.778.299,50	96,79	203.993.787.011,00
Belanja Tidak Terduga	5.650.000.000,00	4.944.688.400,00	87,51	3.912.745.909,00
Belanja Transfer	222.406.329.564,00	193.017.321.488,00	86,78	227.763.218.906,00
Pembiayaan Daerah	**39.100.879.991,00**	**39.112.019.642,74**	**100,02**	**69.965.831.452,46**
Penerimaan Pembiayaan	39.100.879.991,00	39.112.019.642,74	100,02	69.965.831.452,46
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0,00**	**23.678.355.517,72**	**0,00**	**39.100.879.990,74**

Nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
➢ **Dana SiLPA Terikat**	
▪ **Dana pada Kas di BLUD**	18.447.993,84
▪ **Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP**	233.730.150,10
▪ **Dana pada Kas Dana BOSP**	255.618.530,92
▪ **Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas**	1.334.452.433,00
▪ **Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang di dalamnya memuat dana:**	
• **Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non Fisik yang terdiri dari:**	0,00
» **DAK Non Fisik Bidang BOK**	129.634.268,00
» **DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana**	67.226.549,00
» **DAK Non Fisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan**	196.548,00
» **DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak**	21.200.000,00
» **DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian**	49.506.000,00
▪ **Dana DAU *Earmarking***	
• **Bidang Pendidikan**	2.024.142.134,00
• **Bidang Kesehatan**	1.251.380.035,00
• **Bidang Pekerjaan Umum**	1.300.000,00
▪ **Dana Insentif Daerah – Insentif Fiskal Kesejahteraan Masyarakat**	1.041.262.178,00
▪ **Dana DBH Sawit**	8.034.186,00
▪ **DAU Dukungan THR dan Gaji 13 Bagi Guru ASN Daerah**	16.882.633.000,00
▪ **DANA NON KAPITASI PKM yang telah disetor ke Kas Daerah**	19.409.275,86

Uraian	Nilai
▪ **Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**	5.625.026,00
➢ **Dana SiLPA Non Terikat**	
▪ **Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan**	334.557.210,00
Jumlah	**23.678.355.517,72**

Rincian keberadaan SiLPA per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024
Kas di Kas Daerah	21.501.549.199,86	35.079.482.226,88
Kas di Bendahara Penerimaan	334.557.210,00	59.279.644,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	53.449,00
Kas di BLUD	18.447.993,84	2.184.143,84
Kas Dana BOSP	255.618.530,92	136.556.837,92
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	233.730.150,10	6.659.255,10
Kas Dana BOK Puskesmas	1.334.452.433,00	3.816.664.434,00
Jumlah	**23.678.355.517,72**	**39.100.879.990,74**

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan. Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 46
Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Kas di Kas Daerah	35.079.482.226,88	64.869.573.344,44
Kas di Bendahara Penerimaan	59.279.644,00	847.594,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	53.449,00	276.346.055,00
Kas di BLUD	2.184.143,84	1.160.706.269,84
Kas di Bendahara BOS	0,00	112.862.981,92
Kas di Bendahara Kapitasi pada FKTP	6.659.255,10	3.545.495.207,26
Kas Dana BOSP	136.556.837,92	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.816.664.434,00	0,00
Jumlah	**39.100.879.990,74**	**69.965.831.452,46**

Saldo di atas merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal di Tahun 2025 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sigi. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Nilai Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp39.112.019.642,74 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sigi selama Tahun Anggaran 2025. Untuk saldo SiLPA Tahun Anggaran 2024, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA Tahun Anggaran 2024 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Sigi pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diungkapkan dalam catatan poin **5.2.4** hal Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

5.2.3 SiLPA/(SiKPA)

Nilai saldo SiLPA untuk masing-masing Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp23.678.355.517,72 dan Rp39.100.879.990,74. Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Sigi pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing Laporan Realisasi

Anggaran pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin **5.1.5**.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.139.652,00 yang terdiri dari:

a. Koreksi pencatatan atas transaksi Kas di BLUD tahun 2024 sebesar Rp11.238.737,84;
b. Koreksi pencatatan atas saldo Kas BOSP tahun 2024 sebesar (Rp274.086,00);
c. Koreksi pencatatan atas saldo Kas BOK Puskesmas tahun 2024 sebesar Rp175.000,00.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebesar Rp23.678.355.517,72 dan Rp39.100.879.990,74, sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada Poin **5.1.5**. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada Poin **5.2.3** di atas.

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Sigi terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas.

Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kabupaten Sigi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Tabel 47
Aset Komparatif Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	83.101.658.570,09	118.161.636.851,65	(35.059.978.279,56)	(29,67)
Investasi Jangka Panjang	9.700.000.000,00	9.700.000.000,00	0,00	0,00
Aset Tetap	1.679.925.362.417,02	1.690.929.554.140,62	(11.004.191.723,60)	(0,65)
Aset Lainnya	167.234.854.392,09	171.983.943.849,57	(4.749.089.457,48)	(2,76)
Properti Investasi	1,00	0,00	1,00	-
Jumlah	**1.939.961.875.380,20**	**1.990.775.134.841,84**	**(50.813.259.459,64)**	

Total Aset Pemerintah Kabupaten Sigi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.939.961.875.380,20 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.990.775.134.841,84 mengalami penurunan saldo sebesar (Rp50.813.259.459,64) atau sebesar (2,55%). Penjelasan atas rincian Aset tersebut sebagai berikut.

5.3.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025 dirincikan sebagai berikut.

Tabel 48
Aset Lancar Komparatif Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	24.560.079.400,70	39.587.850.026,74	(15.027.770.626,04)	(37,96)
Piutang Pajak Daerah	26.267.819.927,80	24.326.696.463,50	1.941.123.466,30	7,98
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	21.356.118.980,33	14.675.786.039,12	6.680.332.941,21	45,52
Piutang Transfer Antar Daerah	13.418.915.826,00	14.555.133.350,00	(1.136.217.524,00)	(7,81)
Piutang Lainnya	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(19.134.232.423,10)	(18.702.589.150,04)	431.643.273,06	2,31
Beban Dibayar Dimuka	286.344.735,80	23.865.151.491,06	(23.578.806.755,26)	(8.234,41)
Persediaan	16.249.612.122,56	19.756.608.631,27	(3.506.996.508,71)	(17,75)
Jumlah	**83.101.658.570,09**	**118.161.636.851,65**	**(35.059.978.280,14)**	

Penjelasan rincian aset lancar tahun 2025 dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 49
Kas dan Setara Kas Komparatif Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	21.501.549.199,86	35.079.482.226,88	(13.577.933.027,02)	(38,71)
Kas di Bendahara Penerimaan	334.557.210,00	59.279.644,00	275.277.566,00	464,37
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	53.449,00	(53.449,00)	(100)
Kas di BLUD	18.447.993,84	2.184.143,84	16.263.850,00	744,63
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	233.730.150,10	6.659.255,10	227.070.895,00	100
Kas Lainnya	881.723.882,98	486.970.036,00	394.753.846,98	81,06
Kas Dana BOSP	255.618.530,92	136.556.837,92	119.061.693,00	87,19
Kas Dana BOK Puskesmas	1.334.452.433,00	3.816.664.434,00	(2.482.212.001,00)	(65,04)
Jumlah	**24.560.079.400,70**	**39.587.850.026,74**	**(15.027.770.626,04)**	**(37,96)**

Berikut penjelasan rincian saldo kas dan setara kas sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

a. Kas di Kas Daerah

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah pada bank sebagaimana di atas ditunjuk oleh Bupati Sigi untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah dan dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi untuk tahun 2025.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.501.549.199,86 atau turun 38,71% dibandingkan Saldo Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.079.482.226,88 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 50
Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Peruntukan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	Saldo Akhir	
					31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Bank SULTENG	007.01.03.00005-1	Rekening Pengeluaran Pemda Kab. Sigi	Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 910-014 Tahun 2024	0,00	270.122.313,00
2	Bank SULTENG	007.01.03.00003-6	Rekening Penerimaan BPHTB Kab. Sigi	Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 910-014 Tahun 2024	1.110.340,00	0,00
3	Bank SULTENG	007.01.03.00004-8	Rekening Penerimaan Bend PBB Kab. Sigi	Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 910-014 Tahun 2024	0,00	0,00
4	Bank SULTENG	007.01.03.00002-4	RKUD KAB. SIGI	Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor	21.047.687.542,86	34.545.842.128,66

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Peruntukan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	Saldo Akhir 31 Desember 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2024
				910-012 Tahun 2024		
5	Bank BNI	2406201602	Rekening Pengeluaran Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sigi	Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 910-014 Tahun 2024	452.751.317,00	263.517.785,22
6	Bank BNI	2420242007	Rekening Penerimaan, Penampungan Pendapatan Daerah	Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 910-014 Tahun 2024	0,00	0,00
Saldo Kas di Kas Daerah					**21.501.549.199,86**	**35.079.482.226,88**

Berdasarkan rekonsiliasi antara saldo Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran BUD dengan saldo rekening koran (R/C) bank terdapat selisih sebesar Rp308.469.942,00 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 51
Rekonsiliasi Saldo Menurut Buku dan Saldo Menurut Bank Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Menurut Buku	Saldo Menurut Bank
1	Bank Sulteng Nomor Rek. 007.01.03.00005-1 An. Kuasa BUD Kab. Sigi TA 2012	0,00	0,00
2	Bank Sulteng Nomor Rek. 007.01.03.00003-6 An. BPHTB Kab. Sigi	1.110.340,00	1.110.340,00
3	Bank Sulteng Nomor Rek. 007.01.03.00004-8 An. Bend. PBB Kab. Sigi	0,00	0,00
4	Bank Sulteng Nomor Rek. 007.01.03.00002-4 An. Kas Umum Daerah Kab. Sigi	21.047.687.542,86	21.356.157.484,86
5	Bank Negara Indonesia Rek. 2406201602 An. Kas Umum Daerah Kab. Sigi	452.751.317,00	452.751.317,00
6	Bank Negara Indonesia Rek. 2420242007 An. Rekening Penerimaan, Penampungan Pendapatan Daerah	0,00	0,00
Saldo Bank		**21.501.549.199,86**	**21.810.019.141,86**

Penjelasan atas selisih sebesar Rp308.469.942,00 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai
Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank belum dicatat oleh Buku		**(315.397.042,00)**
• Pembayaran Belanja	(20.445.000,00)	
• Kurang Bayar PPN dan PPh	(202.206.649,00)	
• Kurang Bayar Iuran JKK dan JKM	(92.432.819,00)	
• Kurang Bayar IWP 1%	(312.574,00)	
Pengeluaran yang telah dicatat pada Saldo Kas Bank belum dicatat dalam Saldo Buku		**6.927.100,00**
• Pembayaran dimuka BPJS 1% atas ADD Kabupaten Sigi	1.196.050,00	
• Kesalahan Debet pihak Bank atas pembayaran IWP 1% Dinas Sosial	5.731.050,00	
Jumlah Selisih		**(308.469.942,00)**

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp334.557.210,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pendapatan PBB -P2 pada rekening BNI dengan nomor rekening 2420242007 sebesar Rp61.027.379,00;
2. Penerimaan Pendapatan Opsen PKB pada rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0070103011565 sebesar Rp69.227.986,00;
3. Penerimaan Pendapatan Opsen BBNKB pada rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0070103011576 sebesar Rp204.301.845,00.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas nama Bendahara Pengeluaran OPD. Kas pada Bendahara Pengeluaran merupakan saldo pada bank maupun uang tunai yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp 53.449,00, terjadi penurunan sebesar Rp53.449,00.

d. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan dan lainnya. Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.447.993,84. Jika dibandingkan dengan saldo Kas BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.184.143,84, terjadi kenaikan sebesar Rp16.263.850,00 atau naik sebesar 744,63%. Saldo Kas di BLUD dengan rincian perhitungan Kas di BLUD tahun 2025 terdiri dari.

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Pendapatan BLUD	Belanja BLUD	Saldo Akhir
1	*2*	*3*	*4*	*5=(2+3-4)*

RSUD Torabelo	2.184.143,84	43.191.954.890,00	43.175.691.040,00	18.447.993,84

Saldo kas BLUD 31 Desember 2025 terdapat Kas Bank dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening Bank BNI Nomor 8686118888 sebesar Rp4.382,84;
2. Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7318349497 sebesar Rp18.443.611,00.

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) *Audited* terdapat pada **lampiran 2**.

e. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo Dana Kapitasi JKN dan Non Kapitasi JKN periode 31 Desember 2025 sebesar Rp233.730.050,10 yang bersumber dari 19 (sembilan belas) Puskesmas yang ada di Kabupaten Sigi yang terdiri dari kas bank di bendahara Kapitasi sebesar Rp233.269.930,10 dan kas tunai dibendahara Kapitasi FKTP sebesar Rp 460.120,00.

Rekonsiliasi nilai tercatat kas JKN pada akhir periode dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 52
Rekapitulasi Saldo Kas Dana Kapitasi Pada FKTP Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Nama FKTP	Saldo Kas Bank Dana Kapitasi	Saldo Kas Tunai Dana Kapitasi
Puskesmas Biromaru	73.591.299,00	0,00
Puskesmas Dolo	32.085.013,00	0,00
Puskesmas Tinggede	38.209.206,00	0,00
Puskesmas Marawola	0,00	505,00
Puskesmas Kaleke	0,00	0,00
Puskesmas Baluase	0,00	0,00
Puskesmas Kinovaro	4.124,00	0,00
Puskesmas Dombusoi	14.176.368,00	0,00
Puskesmas Kamaipura	1.813.426,00	0,00
Puskesmas Pandere	0,00	0,00
Puskesmas Kulawi	433,00	0,00
Puskesmas Gimpu	31.360.166,00	19.000,00
Puskesmas Lindu	4.778.653,00	0,00
Puskesmas Kantewu	1.053,00	0,00
Puskesmas Banasu	0,00	0,00
Puskesmas Towulu	0,00	0,00
Puskesmas Palolo	16.220.213,10	0,00
Puskesmas Banpres	1.825.828,00	440.615,00
Puskesmas Nokilalaki	19.204.148,00	0,00

Nama FKTP	Saldo Kas Bank Dana Kapitasi	Saldo Kas Tunai Dana Kapitasi
Total	**233.269.930,10**	**460.120,00**
Total Kas Bank Dana Kapitasi	**233.730.150,10**	

f. Kas Lainnya

Kas Lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 881.723.882,98 merupakan kas lainya yang masih dalam penguasaan bendahara per 31 Desember 2025. Jika dibandingkan dengan Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp486.970.036,00, terjadi kenaikan sebesar Rp394.753.846,98 atau naik sebesar 81,06%. Saldo Kas Lainnya terdiri dari utang PFK yang ada di Bendahara Dana BOSP dan belum disetor ke kas negara, serta penerimaan jasa giro pada rekening OPD yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai
Saldo Awal		**486.970.036,00**
Mutasi Tambah:		
- Untuk Pembayaran Utang PFK JKN Kapitasi Tahun 2025	68.244.700,00	
- Untuk Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan FKTP	5.557.000,00	
- Untuk Pembayaran belanja TPP yang belum dibayarkan	642.286.801,00	
- Koreksi Kurang Catat Pungutan PFK BOSP Tahun 2025	403.710.823,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**1.119.799.324,00**
Mutasi Kurang:		
- Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	(103.159.000,00)	
- Pembayaran Utang Belanja Diserahkan mekanisme pengembalian ke Kas Daerah	(142.091.000,00)	
- Untuk pembayaran Utang PFK BOK Tahun 2023	(2.478.129,00)	
- Untuk pembayaran Utang PFK JKN Kapitasi Tahun 2023	(107.166,00)	
- Untuk pembayaran Utang PFK Dana BOK 2024	(1.297.630,00)	
- Pembayaran bunga subsidi KUR 0% pada Bank BTN Tahun 2024	(1.118.230,00)	
- Koreksi Lebih Catat Saldo Awal PFK Dana BOSP Tahun 2023	(78.764.213,00)	
- Koreksi Kurang Catat Setoran PFK BOSP Tahun 2025	(396.030.109,02)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(725.045.477,02)**
Saldo Akhir Kas Lainnya		**881.723.882,98**

Penjelasan rincian saldo Kas Lainnya:

1. Utang PFK Dana BOSP sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp163.579.021,98;
2. Utang PFK atas pengelolaan Dana BOK Puskesmas Tahun 2024 yang belum dibayarkan sebesar Rp217.000,00;

3. Utang PFK atas pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp68.750.579,00 dengan rincian tahun 2024 sebesar Rp505.879,00 dan tahun 2025 sebesar Rp68.244.700,00;
4. Utang pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan tahun 2025 pada tingkat Puskesmas sebesar Rp5.557.000,00;
5. Utang pembayaran Belanja TPP tahun 2025 sebesar Rp642.286.801,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a) Dinas Kesehatan sebesar Rp144.622.500,00;
   b) RSUD Torabelo sebesar Rp14.773.721,00;
   c) Inspektorat Kabupaten Sigi sebesar Rp412.042.946,00;
   d) Kecamatan Kulawi Selatan sebesar Rp13.841.015,00;
   e) Kecamatan Kulawi sebesar Rp9.272.658,00;
   f) Kecamatan Kinovaro sebesar Rp14.878.181,00;
   g) Kecamatan Palolo sebesar Rp6.481.530,00;
   h) Kecamatan Pipikoro sebesar Rp12.416.085,00;
   i) Kecamatan Sigi Kota sebesar Rp13.958.165,00.
6. Sisa Dana Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 0%

   Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 0% merupakan program kerja Pemerintah Kabupaten sigi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Saldo sisa dana program tersebut per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.333.481,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a) Saldo pada Bank BNI sebesar Rp 1.012.970,00;
   b) Saldo pada Bank Tabungan Negara sebesar Rp 320.511,00.

g. Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp255.618.530,92 dan jika dibandingkan dengan kas di bendahara dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp136.556.837,92 terjadi kenaikan sebesar Rp119.061.693,00, atau sebesar 87,19%. Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 terdiri dari:

1. Kas Bank di bendahara dana BOSP sebesar Rp55.182.750,92;
2. Kas Tunai di bendahara dana BOSP sebesar Rp200.435.780,00.

Rincian Saldo Kas Dana BOSP dapat dilihat pada **lampiran 6.**

h. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.334.452.433,00 dan jika dibandingkan dengan Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.816.664.434,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.482.212.001,00, atau sebesar 65,04%.

Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 53
Saldo Kas Dana BOK Pada FKTP Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Nama FKTP	Saldo Kas Dana BOK Per 31 Desember 2025
Puskesmas Biromaru	28.733.624,00
Puskesmas Dolo	33.295.157,00
Puskesmas Tinggede	30.706.065,00
Puskesmas Marawola	23.120.191,00
Puskesmas Kaleke	17.156.624,00
Puskesmas Baluase	114.622.649,00
Puskesmas Kinovaro	75.684.246,00
Puskesmas Dombusoi	41.033.362,00
Puskesmas Kamaipura	89.668.493,00
Puskesmas Pandere	66.474.426,00
Puskesmas Kulawi	12.974.684,00
Puskesmas Gimpu	217.954.176,00
Puskesmas Lindu	2.346.401,00
Puskesmas Kantewu	93.642.547,00
Puskesmas Banasu	139.722.179,00
Puskesmas Towulu	39.203.130,00
Puskesmas Palolo	118.546.430,00
Puskesmas Banpres	47.864.881,00
Puskesmas Nokilalaki	141.703.168,00
Total Saldo Kas Dana BOK	**1.334.452.433,00**

Penjelasan atas saldo Kas Dana BOK per 31 Desember 2025 merupakan saldo Kas di Bank pada 19 (sembilan belas) Puskesmas terdiri dari sisa belanja atas penggunaan saldo awal dan pendapatan Dana BOK Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.332.794.484,00 dan pendapatan jasa giro bulan Desember tahun 2025 yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2025 berakhir sebesar Rp1.657.949,00.

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang pendapatan merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh

pemerintah. Akun ini menggambarkan hak pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp61.139.854.734,13.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca akun Aset Lancar untuk Pos Piutang Pendapatan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan yang terdapat pada piutang pendapatan serta penjelasannya.

Tabel 54
Rekapitulasi Piutang Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Piutang Pajak Daerah	26.267.819.927,80	24.326.696.463,50	1.941.123.466,30	7,39
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	21.356.118.980,33	14.675.786.039,12	6.680.332.941,21	31,28
Piutang Transfer Antar Daerah	13.418.915.826,00	14.555.133.350,00	(1.136.217.524,00)	(8,47)
Piutang Lainnya	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**61.139.854.734,13**	**53.654.615.852,62**	**7.485.238.881,51**	**12,24**

Berikut penjelasan rincian saldo piutang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025:

a. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp26.267.819.927,80 dan Rp24.326.696.463,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55
Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Janis Piutang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024
Piutang Pajak Reklame	30.430.546,00	43.650.532,00
Piutang Pajak Air Tanah	53.079.273,20	53.009.148,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.136.457.246,60	493.518.243,50
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	24.106.678.368,00	22.914.060.362,00
Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	941.174.494,00	822.458.178,00
Total	**26.267.819.927,80**	**24.326.696.463,50**

1. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.430.546,00 dibandingkan saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.650.532,00 terjadi penurunan saldo Piutang Pajak Reklame sebesar Rp13.219.986,00 atau turun 30,29%, hal ini disebabkan terdapat realisasi pembayaran piutang reklame sebesar Rp12.143.125,00.

Pada tahun 2025, ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak reklame sebesar Rp383.816.542,00 dan terealisasi sebesar Rp383.620.292,00 atau sebesar 99,95%, sehingga terdapat penambahan saldo piutang pajak reklame untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp196.250,00.

2. Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp53.079.273,20 dibandingkan saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.009.148,00 terjadi kenaikan saldo Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp70.125,20 atau turun sebesar 0,13%. Piutang Pajak Air Tanah merupakan piutang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sigi atas pengambilan sumber mata air tanah yang dilakukan oleh pihak ketiga termasuk didalamnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala pada periode masa pajak tahun 2025.

3. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.136.457.246,60 jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 493.518.243,50 terjadi kenaikan sebesar Rp 642.939.003,10 atau naik sebesar 130,28%. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan piutang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sigi atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan diwilayah Kabupaten Sigi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

4. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Saldo Piutang PBB-P2 secara komparatif per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp24.106.678.368,00 dan Rp22.914.060.362,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.192.618.006,00 atau naik sebesar 5,20%.

Rincian Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 56
Rincian Piutang PBB-P2 Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Tahun	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	1995	31.269.571,00	-	325.151,00	30.944.420,00
2	1996	64.271.342,00	-	776.717,00	63.494.625,00
3	1997	52.639.138,00	-	488.031,00	52.151.107,00
4	1998	67.674.747,00	-	785.973,00	66.888.774,00
5	1999	109.925.598,00	-	1.629.045,00	108.296.553,00
6	2000	220.800.648,00	-	3.430.522,00	217.370.126,00
7	2001	280.935.472,00	-	3.510.105,00	277.425.367,00
8	2002	326.872.722,00	-	3.881.792,00	322.990.930,00
9	2003	345.596.784,00	-	5.998.548,00	339.598.236,00
10	2004	389.309.458,00	-	6.272.538,00	383.036.920,00
11	2005	428.339.224,00	-	6.622.972,00	421.716.252,00
12	2006	629.212.422,00	-	9.826.189,00	619.386.233,00
13	2007	508.346.100,00	-	7.350.027,00	500.996.073,00
14	2008	611.063.110,00	-	9.615.831,00	601.447.279,00
15	2009	764.317.578,00	-	12.624.612,00	751.692.966,00
16	2010	885.743.924,00	-	15.763.833,00	869.980.091,00
17	2011	971.952.356,00	-	16.470.063,00	955.482.293,00
18	2012	1.080.058.297,00	-	19.450.073,00	1.060.608.224,00
19	2013	948.386.708,00	-	19.679.219,00	928.707.489,00
20	2014	539.250.246,00	-	12.269.423,00	526.980.823,00
21	2015	835.369.131,00	-	16.484.214,00	818.884.917,00
22	2016	793.403.096,00	-	21.666.037,00	771.737.059,00
23	2017	1.939.066.916,00	-	54.459.614,00	1.884.607.302,00
24	2018	-	-	-	-
25	2019	1.138.304.020,00	-	48.100.480,00	1.090.203.540,00
26	2020	1.250.196.244,00	-	51.932.081,00	1.198.264.163,00
27	2021	1.440.438.842,00	-	64.361.051,00	1.376.077.791,00
28	2022	2.106.385.960,00	-	105.185.445,00	2.001.200.515,00
29	2023	2.181.966.984,00	-	132.618.592,00	2.049.348.392,00
30	2024	1.972.963.724,00	-	254.235.875,00	1.718.727.849,00
31	2025	-	4.039.434.386,00	1.941.002.327,00	2.098.432.059,00
Jumlah		**22.914.060.362,00**	**4.039.434.386,00**	**2.846.816.380,00**	**24.106.678.368,00**

Pada TA 2025, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi Nomor: 800.1.11/1224/BAPENDA/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor: 800.1.11/10/BAPENDA/2024 Tentang Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan

Ketetapan Objek Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Sigi Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2025 memuat hal-hal sebagai berikut.

Sektor	: Pedesaan dan Perkotaan
Desa-Kecamatan	: 176 Desa 16 Kecamatan
Jumlah SPPT PBB	: 124.431 Lembar
Jumlah DHKP PBB	: 176 Buku
Jumlah Pajak Terhutang	: Rp4.039.434.386,00

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa piutang pendapatan PBB P2 terjadi mulai dari tahun 1995 yang notabene masih ditangani oleh KPP Pratama sampai dengan diserahkan kepada daerah pada tahun 2014. Adapun upaya yang telah dan akan dilakukan untuk memperoleh kembali piutang tersebut yaitu melalui sosialisasi serta himbauan pajak pada saat penyerahan SPT terhadap objek pajak terutang maupun objek pajak ganda agar kiranya melapor ke petugas pajak ataupun ke aparat desa, selanjutnya pemerintah Kabupaten Sigi akan terus melakukan verifikasi terhadap seluruh piutang PBB-P2 agar nantinya diperoleh data yang valid terhadap piutang yang masih dapat ditagih kembali dan piutang yang tidak dapat ditagih kembali atau dihapus bukukan.

Rincian realisasi pelunasan Piutang PBB-P2 tahun 2025 dapat dilihat pada **lampiran 7**.

5. Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beberapa jenis pajak berbasis konsumsi mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PBJT didefinisikan sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, meliputi: 1) Jasa Perhotelan; 2) Makanan dan/atau Minuman; 3) Jasa Kesenian dan Hiburan; 4) Tenaga Listrik; dan 5) Jasa Parkir.

Saldo Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain merupakan perubahan nomenklatur yang sebelumnya Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember

2025 sebesar Rp941.174.494,00 merupakan piutang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sigi atas pajak penerangan jalan bulan Desember tahun 2025 yang telah diterima pada tahun 2026 berdasarkan berita acara rekonsiliasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi dengan PT. PLN (Persero) UP3 Palu tanggal 7 Januari 2026. Jika dibandingkan dengan saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2024 sebesar Rp822.458.178,00 terdapat kenaikan sebesar Rp118.716.318,00 atau naik 14,43%.

b. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah piutang selain pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah diantaranya piutang jasa giro, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, BLUD, piutang pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp21.356.118.980,33 dan Rp14.675.786.039,12 yang terdiri dari:

Tabel 57
Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Piutang Jasa Giro	0,00	2.186.385.000,00
2	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10.873.267.180,33	7.963.131.352,12
3	Piutang Pendapatan BLUD	9.306.450.400,00	4.057.716.587,00
4	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	1.176.401.400,00	468.553.100,00
Jumlah		**21.356.118.980,33**	**14.675.786.039,12**

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

1. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Piutang TGR adalah piutang berupa kerugian daerah yang dicatat sebagai piutang daerah dan sudah ada penetapannya. Untuk kerugian daerah yang belum ada penetapannya dalam bentuk ketetapan pembebanan maupun dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), masih dicatat dalam Daftar Kerugian Daerah yang masih dalam proses atau masih bersifat informasi saja.

Saldo Piutang TGR per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.873.267.180,33 dibandingkan saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.963.131.352,12 terjadi kenaikan saldo Piutang TGR sebesar Rp2.910.135.828,21 atau naik sebesar 36,55%. Saldo Piutang TGR terdiri atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Panjar Kegiatan serta Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pihak Ketiga dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 58
Rincian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	380.630.855,00	381.230.855,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	10.492.636.325,33	7.581.900.497,12
Jumlah	**10.873.267.180,33**	**7.963.131.352,12**

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut merupakan Piutang yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis TGR. Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti kerugian yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dari informasi kerugian daerah, yang belum diakui sebagai piutang.

2. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang BLUD adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan hibah kerja sama BLUD, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah. Piutang BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.306.450.400,00 dan Rp4.057.716.587,00. Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 59
Rincian saldo Piutang BLUD Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024
Piutang BPJS	9.211.984.400,00	4.032.141.587,00
Praktikum Diklat Bulan Juli-Desember 2023	11.530.000,00	20.375.000,00
Piutang Pajak Parkir	50.800.000,00	5.200.000,00

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024
Piutang Pengambilan Tabung Oksigen	24.736.000,00	0,00
Piutang Sewa Tempat ATM	7.400.000,00	0,00
Jumlah	**9.306.450.400,00**	**4.057.716.587,00**

3. Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP

Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan piutang yang timbul atas klaim pelayanan Kesehatan non Kapitasi pada 19 (sembilan belas) Puskesmas di wilayah Kabupaten Sigi kepada BPJS Kesehatan. Saldo Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.176.401.400,00 dan Rp 468.553.100,00.

c. Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.418.915.826,00 dibandingkan saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.555.133.350,00 terjadi penurunan saldo Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp1.136.217.524,00 atau turun sebesar 7,81%. Piutang Transfer Antar Daerah yang merupakan Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Pajak Air Permukaan (PAP) yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 900.1.14.3/46/BAPENDA-G.ST/2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024 Dan Tahun Anggaran 2025.

d. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp97.000.000,00 dibandingkan saldo Piutang per 31 Desember 2024 tidak terdapat realisasi pengurangan Piutang Lainnya. Saldo piutang ini merupakan saldo piutang Bagian Lancar Jangka Panjang (KSO *Handtractor*).

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar (Rp19.134.232.423,10). Jika dibandingkan dengan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp (18.702.589.150,04) terjadi kenaikan sebesar Rp431.643.273,06 atau sebesar 2,31%. Rekapitulasi perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **lampiran 8**.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca akun Aset Lancar untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan yang terdapat pada Penyisihan Piutang serta penjelasannya.

Tabel 60
Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis Penyisihan Piutang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024
Penyisihan Piutang Pendapatan	(15.637.766.325,06)	(14.651.255.712,17)
Penyisihan Piutang Lainnya	(3.496.466.098,56)	(4.051.333.437,87)
Jumlah	**(19.134.232.423,62)**	**(18.702.589.150,04)**

Penjelasan lebih rinci atas saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Pendapatan

Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan tak tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp15.637.766.325,06) dan (Rp14.651.255.712,17). Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan tak tertagih dihitung sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan tak tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan tak tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 61
Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis Penyisihan Piutang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(15.583.427.461,06)	(14.628.624.363,73)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(54.338.864,00)	(22.631.348,44)
Jumlah	**(15.637.766.325,06)**	**(14.651.255.712,17)**

Penjelasan rincian Penyisihan Piutang Pendapatan tak tertagih lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Nilai Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar (Rp15.583.427.461,06) yang terdiri dari:

a) Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar (Rp21.804.530,85);

b) Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah sebesar (Rp265.396,37);
c) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar (Rp17.433.249,48);
d) Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan – P2 sebesar (Rp15.539.218.411,90);
e) Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain sebesar (Rp4.705.872,47).

Rincian perhitungan nilai perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **lampiran 8**.

2. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain – Lain PAD yang Sah adalah nilai penyisihan piutang selain pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Piutang Lain – Lain PAD yang Sah diantaranya Piutang Jasa Giro, BLUD, Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Nilai Penyisihan Piutang Lain – Lain PAD yang Sah yang tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar (Rp 54.338.864,00) yang terdiri dari:

a) Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD sebesar (Rp46.059.922,00);
b) Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Investasi sebesar (Rp2.396.935,00);
c) Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar (Rp5.882.007,00).

Rincian perhitungan nilai perhitungan Penyisihan Piutang Lain – Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada **lampiran 8**.

b. Penyisihan Piutang Lainnya

Nilai Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar (Rp3.496.466.098,04) apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.051.333.437,87) terdapat penurunan sebesar 13,70% dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang

Penyisihan Piutang bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang yang merupakan Penyisihan Piutang Lainnya atas pelaksanaan KSO *Handtractor* yang kemungkinan sudah tidak tertagih lagi sebesar (Rp97.000.000,00), saldo ini sama dengan tahun 2024 disebabkan piutang lainnya telah masuk dalam kategori Macet.

2. **Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

   Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 sebesar (Rp3.399.466.098,04) jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar (Rp3.954.333.437,87) terdapat penurunan 14,03% sebesar yang terdiri dari:

   a) Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara per 31 Desember 2025 sebesar (Rp380.630.855,00); dan
   b) Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain per 31 Desember 2025 sebesar (Rp3.018.835.243,04) jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar (Rp3.573.102.582,00) terjadi penurunan sebesar 15,51%.

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 merupakan beban atas sewa gedung dan bangunan tempat kerja atau kantor yang dilaksanakan oleh beberapa OPD akibat dampak bencana alam gempa bumi dan likuefaksi di Kabupaten Sigi yang berakibat rusaknya beberapa fasilitas umum dan perkantoran di wilayah Pemerintah Kabupaten Sigi dan guna menjamin terlaksananya pelayanan masyarakat secara keseluruhan, maka beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyewaan rumah warga yang diperuntukkan untuk kantor sementara yang perikatan kontrak jatuh temponya pada tahun 2025. Selain perjanjian sewa menyewa kantor sementara OPD, pada saldo beban dibayar dimuka terdapat pengakuan atas jaminan penyelesaian pekerjaan dari pihak ketiga atas paket pekerjaan konstruksi yang telah dibayarkan.

Saldo akun Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp286.344.735,80 jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp23.853.912.753,06 mengalami penurunan sebesar Rp23.578.806.755,26 atau sebesar 98,80%. Rekapitulasi beban dibayar dimuka OPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 62
Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka OPD Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis Beban Dibayar Dimuka	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	0,00	9.780.821,92	(9.780.821,92)	(100)
Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	265.545.837,73	362.050.995,55	(96.505.157,82)	(26,66)
Beban Dibayar Dimuka Untuk Sewa Bangunan Gudang	0,00	27.322,40	(27.322,40)	(100)
Beban Dibayar Dimuka Untuk Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	20.798.898,07	31.250.246,99	(10.451.348,92)	(33,44)
Jaminan Penyelesaian Pekerjaan	0,00	23.450.803.366,20	(23.223.885.366,20)	(100)
Kelebihan Pembayaran Pajak Pusat	0,00	11.238.738,00	(11.238.738,00)	(100)
Jumlah	**286.344.735,80**	**23.865.151.491,06**	**(23.578.806.755,26)**	**(98,80)**

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **lampiran 9**.

5.3.1.1.5 Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah Persediaan Barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sigi serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di OPD. Penilaian persediaan yang ada pada OPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2025 dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO) atau metode harga perolehan terakhir.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.249.612.122,56 mengalami penurunan saldo Persediaan sebesar Rp3.506.996.508,71 atau turun sebesar 17,75% dari saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.756.608.631,27. Perbandingan saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 63
Rekapitulasi Saldo Persediaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Jenis Persediaan	Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2025	Bertambah
1	Bahan Lainnya	1.462.124.704,59	1.618.016.913,00	2.719.818.297,41
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	662.084.404,00	706.039.061,00	50.161.209,00
3	Obat-Obatan	11.074.582.762,68	11.916.588.216,92	(1.727.487.186,76)
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	6.045.136.730,00	1.999.006.931,64	(3.896.547.118,36)
5	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	467.860.030,00	5.000.000,00	(462.860.030,00)

No.	Jenis Persediaan	Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2025	Bertambah
6	Pakan	44.820.000,00	4.961.000,00	(39.859.000,00)
Jumlah		**19.756.608.631,27**	**16.249.612.122,56**	**(3.356.773.828,71)**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan Paragraf 25 tentang pengungkapan barang persediaan untuk kategori rusak diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah. Terkait hal tersebut, nilai barang persediaan kategori rusak per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp763.167.893,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64
Rekapitulasi Obat Rusak/Kadaluwarsa Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Nama OPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	272.548.874,00
2	Puskesmas Baluase	42.185.465,00
3	Puskesmas Banpres	24.662.041,00
4	Puskesmas Banasu	9.552.136,00
5	Puskesmas Biromaru	22.862.878,00
6	Puskesmas Dolo	52.934.643,00
7	Puskesmas Dombusoi	0,00
8	Puskesmas Gimpu	14.597.362,00
9	Puskesmas Kaleke	11.022.775,00
10	Puskesmas Kamaipura	15.017.870,00
11	Puskesmas Kantewu	107.362.190,00
12	Puskesmas Kinovaro	58.209.560,00
13	Puskesmas Kulawi	29.906.595,00
14	Puskesmas Lindu	14.015.300,00
15	Puskesmas Marawola	24.266.367,00
16	Puskesmas Nokilalaki	12.609.577,00
17	Puskesmas Palolo	15.590.119,00
18	Puskesmas Pandere	16.129.537,00
19	Puskesmas Tinggede	12.744.957,00
20	Puskesmas Towulu	6.949.647,00
Total Nilai Obat Kadaluwarsa		**763.167.893,00**

Persediaan dan rincian persediaan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada **lampiran 10** dan **lampiran 10.1** serta rincian persediaan obat rusak/kadaluwarsa dapat dilihat pada **lampiran 10.2**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti

bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Jangka Panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi merupakan jenis Investasi Jangka Panjang Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Saldo tersajikan pada akun Investasi Jangka Panjang sebesar Rp9.700.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sigi pada PT. Bank Sulteng berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng. Untuk Tahun Anggaran 2023 tidak melakukan penambahan realisasi penyertaan modal daerah disebabkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulteng hanya sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

Adapun rincian penyertaan modal keadaan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 65
Rincian Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sulteng

(dalam rupiah)

No.	Tahun	Uraian	Dasar Hukum	Nilai Penyertaan Modal
1	2012	Penyertaan Modal	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	1.500.000.000,00
2	2013	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	1.700.000.000,00
3	2014	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	1.500.000.000,00
4	2015	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	310.000.000,00
5	2016	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	785.215.606,00
6	2017	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	900.000.000,00
7	2020	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019	1.000.000.000,00
8	2021	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019	1.000.000.000,00
9	2022	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019	1.004.784.394,00
10	2023	-	-	0,00
11	2024	-	-	0,00
12	2025	-	-	0,00
Total Penyertaan Modal Daerah				**9.700.000.000,00**

Harga saham atas Dana setoran modal Pemegang Saham Tahun 2012 sampai saat ini adalah sebesar Rp158.459 per lembar saham dengan rincian Rp100.000 dibukukan sebagai Nominal saham dan Rp58.459 dibukukan sebagai Agio saham berdasarkan hasil penilaian dari

Kantor Jasa Penilai Publik "Miduk Totok" yang telah diputuskan pada RUPS-LB tanggal 12 April 2013 dan tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng No.69 tanggal 21 Juni 2013.

5.3.1.3 Aset Tetap

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, klasifikasi, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus akuntansi, karena aset tetap memiliki nilai yang signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.347.145.803.024,43 dan Rp3.237.903.539.975,79. Selama tahun 2025, mutasi pertambahan sebesar Rp180.456.064.635,78 dan mutasi pengurangan sebesar (Rp71.213.801.588,58), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66
Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024	Bertambah	Berkurang	Saldo per 31 Desember 2025
1	Tanah	127.577.975.759,55	28,00	(9,00)	127.577.975.778,55
2	Peralatan dan Mesin	581.700.144.892,04	30.113.980.958,00	(7.987.110.585,59)	603.827.015.264,45
3	Gedung dan Bangunan	837.277.284.002,04	75.403.758.880,58	(6.033.963.425,71)	906.647.079.456,91
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.496.179.342.888,97	50.535.129.773,00	(9.101.478.174,29)	1.537.612.994.487,68
5	Aset Tetap Lainnya	40.004.869.513,95	9.537.277.773,00	(3.306.728.630,00)	46.235.418.656,95
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	155.163.922.921,70	14.865.917.223,20	(44.784.520.764,00)	125.245.319.380,90

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024	Bertambah	Berkurang	Saldo per 31 Desember 2025
Jumlah Aset Tetap		**3.237.903.539.978,25**	**180.128.362.486,78**	**(71.232.311.588,58)**	**3.346.799.590.876,45**
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(472.139.335.434,44)	(59.988.415.834,35)	24.226.658.033,74	(507.901.093.244,05)
8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(188.586.036.948,59)	(25.971.469.511,09)	0,00	(214.557.506.459,68)
9	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(886.248.613.452,14)	(65.549.735.462,71)	9.591.958.929,48	(942.206.389.985,37)
10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	(3.201.322.524,31)	2.288.941.412,33	(912.381.111,98)
Jumlah Akumulasi Penyusutan		**(1.546.973.985.835,17)**	**(154.710.943.332,46)**	**(36.107.558.375,55)**	**(1.665.577.370.801,08)**

Daftar Saldo Aset Tetap Per OPD per 31 Desember 2025 tersaji pada **lampiran 11**. Rincian penjelasan untuk nilai mutasi tambah dan mutasi kurang untuk masing-masing aset tetap terdapat pada penjelasan berikut ini:

5.3.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah pada tahun 2025 sebesar Rp127.577.975.778,55 jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp127.577.975.759,55 terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp19,00. Aset Tetap berupa Tanah tersebut terdiri dari 928 bidang tanah, dengan rincian 210 bidang tanah yang sudah bersertifikat, yang mempunyai surat penyerahan sebanyak 386 bidang, dan bidang tanah yang belum memiliki alas hak sebanyak 419 bidang tanah.

Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp28,00 dan mutasi pengurangan sebesar (Rp9,00) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**127.577.975.759,55**
Mutasi Tambah:		
1. Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat	2,00	
2. Hibah dari Pemerintah Provinsi	18,00	
3. Mutasi Masuk Antar OPD	8,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**28,00**
Mutasi Kurang:		
1. Mutasi Keluar Antar OPD	(8,00)	
2. Reklasifikasi ke Properti Investasi	(1,00)	

Jumlah Mutasi Kurang		**(9,00)**
Saldo Akhir		**127.577.975.778,55**

Penjelasan dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

1. Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat mutasi penambahan pada aset tetap Tanah disebabkan Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan total nilai Rp2,00.

2. Hibah dari Pemerintah Provinsi

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah yang bersumber dari Penerimaan Hibah sebesar Rp18,00 yang berasal dari tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Hasfarm Holtikultura Sulawesi dengan luasan lahan seluas 1.063 Ha, Akan tetapi Hibah tersebut tanpa nilai perolehan sehingga menunggu hasil penilaian.

3. Mutasi Masuk Antar OPD

Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal pencatatan mutasi masuk antar OPD sebesar Rp8,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD Asal	OPD Tujuan	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.3.1.01.01.01.011	Tanah Kaveling Tanah Matang	8,00

b. Mutasi Pengurangan

1. Mutasi Keluar Antar OPD

Mutasi pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal pencatatan mutasi keluar antar OPD sebesar Rp8,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD Asal	OPD Tujuan	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.3.1.01.01.01.011	Tanah Kaveling Tanah Matang	8,00

2. Reklasifikasi ke Properti Investasi

Mutasi pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal pencatatan reklasifikasi ke properti investasi sebesar Rp1,00. Pencatatan reklasifikasi ini terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akun 1.3.1.01.03.10.999 Tanah Untuk Bangunan Jaringan Lain – Lain berdasarkan Naskah Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Sigi dengan PT. Tower Bersama Tentang Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sigi Untuk Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru dengan naskah perjanjian sewa nomor: 600.2.1/170.11/SEK.DPKP/2025 dan nomor: 6127/TBIG-TBE-00/STC/04/XI/2025 tanggal 10 November 2025 dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun terhitung 10 April 2025 sampai dengan 10 April 2030.

Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tersaji pada **lampiran 12**.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin secara komparasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp603.827.015.264,45 dan Rp581.700.144.892,04 terdapat kenaikan nilai saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.126.870.372,43 atau bertambah 3,80%. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar

Rp30.113.980.958,00 dan mutasi pengurangan sebesar (Rp7.987.710.585,58) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai
Saldo Awal		**581.700.144.892,04**
Mutasi Tambah:		
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025	22.022.577.775,00	
2. Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat	850.000,00	
3. Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat	912.837.826,00	
4. Pindah Rekening pada KIB yang Sama	4.518.726.166,00	
5. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	834.996.175,00	
6. Mutasi Masuk Antar OPD	417.960.000,00	
7. Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	1.204.197.708,00	
8. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	39.283.700,00	
9. Reklasifikasi dari Persediaan	10.540.000,00	
10. Pencatatan dari Utang	152.011.608,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**30.113.980.958,00**
Mutasi Kurang:		
1. Pindah Rekening pada KIB yang Sama	(4.518.726.166,00)	
2. Koreksi Saldo Awal - Tercatat Ganda	(13.575.000,00)	
3. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	(1.180.839.420,58)	
4. Reklasifikasi ke Pembukuan Ekstrakomptabel	(780.775.949,01)	
5. Mutasi Keluar Antar OPD	(417.960.000,00)	
6. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat)	(177.524.186,00)	
7. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(39.955.000,00)	
8. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(690.114.285,00)	
9. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	(7.500.000,00)	
10. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	(160.140.579,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(7.987.110.585,59)**
Saldo Akhir		**603.827.015.264,45**

Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 tersaji pada **lampiran 13**. Rincian penjelasan untuk nilai mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pada penjelasan berikut ini:

a. Mutasi Penambahan

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp21.994.787.775,00 termasuk di dalam nilai tersebut Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari sumber dana BLUD, Dana BOSP dan Dana Kapitasi JKN dengan rincian Perangkat Daerah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

OPD		Nilai
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.204.750,00
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.954.008.331,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	144.178.600,00

OPD	Nilai
4. Badan Pendapatan Daerah	51.060.000,00
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	39.826.800,00
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.496.500,00
7. Dinas Kesehatan	937.306.296,00
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	106.865.285,00
9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	9.823.500,00
10. Dinas Komunikasi dan Informatika	124.457.000,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	3.337.926.973,00
12. Dinas Pariwisata	297.939.460,00
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	49.867.000,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.778.000,00
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	71.561.500,00
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga	59.100.000,00
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.980.900,00
18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.201.765.650,00
19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	417.960.000,00
20. Dinas Perhubungan	180.988.865,00
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	42.513.000,00
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43.623.000,00
23. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	141.364.504,00
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	47.985.300,00
25. Dinas Sosial	112.500.000,00
26. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	233.459.670,00
27. Inspektorat Kab. Sigi	446.686.375,00
28. Kecamatan Dolo Barat	20.892.000,00
29. Kecamatan Dolo Selatan	11.000.000,00
30. Kecamatan Kinovaro	40.168.000,00
31. Kecamatan Kulawi	20.600.000,00
32. Kecamatan Lindu	6.800.000,00
33. Kecamatan Marawola	10.500.000,00
34. Kecamatan Marawola Barat	11.900.000,00
35. Kecamatan Palolo	117.951.920,00
36. Kecamatan Pipikoro	54.575.000,00
37. Kecamatan Sigi Kota	25.490.000,00
38. Kecamatan Tanambulava	20.000.000,00
39. RSUD Tora Belo	1.190.709.210,00
40. Sekretariat Daerah	3.320.091.175,00
41. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100.820.000,00
42. Sekretariat DPRD Kab. Sigi	880.853.211,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**22.022.577.775,00**

2. **Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat**

   Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan terdapat koreksi saldo awal akibat kurang catat sebesar Rp850.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akun 1.3.02.05.01.0004 - Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.

3. **Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat**

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyaluran Bantuan Logistik dan Peralatan Nomor: 331/BNPB/OJL/LP.02.03/12/2025 berupa Mobil Rescue tercatat pada akun rekening 1.3.02.02.01.0001 - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan nilai hibah sebesar Rp912.837.826,00.

4. **Pindah Rekening pada KIB yang Sama**

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan Pindah Rekening pada KIB yang Sama sebesar Rp4.518.726.166,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nilai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.082.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	626.776.432,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.478.600,00
Dinas Kesehatan	58.280.596,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	69.592.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.709.849.371,00
Dinas Pariwisata	124.175.700,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.788.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.061.500,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	149.306.413,00
Dinas Perhubungan	4.900.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.425.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.964.504,00
Dinas Sosial	37.000.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	12.566.200,00
Inspektorat Kab. Sigi	128.000.000,00
Kecamatan Palolo	55.900.000,00
Kecamatan Pipikoro	22.685.000,00
Sekretariat DPRD Kab. Sigi	31.063.350,00
Sekretariat Daerah	1.323.831.500,00
Jumlah Pindah Rekening pada KIB yang Sama	**4.518.726.166,00**

5. **Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa**

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal pencatatan reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp862.786.175,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.3.2.06.03.47	Sumber Tenaga	6.850.000,00
Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	2.940.000,00

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	98.235.000,00
	1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00
Dinas Kesehatan	1.3.2.05.02.01	Meubelair	5.000.000,00
	1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin	4.880.000,00
	1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	5.850.000,00
	1.3.2.07.01.01	Alat Kedokteran Umum	3.750.000,00
	1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	5.600.000,00
	1.3.2.10.02.03	Personal Komputer	12.000.000,00
	1.3.2.10.02.04	Peralatan Jaringan	3.300.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.3.2.03.01.02	Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	275.000,00
	1.3.2.04.01.04	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	11.000.000,00
	1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	24.900.000,00
	1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	128.326.675,00
	1.3.2.05.02.01	Meubelair	207.669.000,00
	1.3.2.05.02.03	Alat Pembersih	4.500.000,00
	1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin	42.051.400,00
	1.3.2.05.02.05	Alat Dapur	6.600.000,00
	1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	61.113.100,00
	1.3.2.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	1.300.000,00
	1.3.2.05.03.07	Lemari Dan Arsip Pejabat	11.095.000,00
	1.3.2.06.01.01	Peralatan Studio Audio	10.440.500,00
	1.3.2.06.01.02	Peralatan Studio Video Dan Film	2.600.000,00
	1.3.2.08.01.41	Alat Laboratorium Pertanian	13.500.000,00
	1.3.2.08.01.43	Laboratorium Energi Surya	1.393.300,00
	1.3.2.08.01.56	Alat Laboratorium Lain	6.150.000,00
	1.3.2.08.03.02	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	500.000,00
	1.3.2.08.03.03	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	3.100.000,00

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
	1.3.2.08.03.04	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	1.000.000,00
	1.3.2.08.03.10	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	6.700.000,00
	1.3.2.08.03.16	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	2.800.000,00
	1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	87.930.600,00
	1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	30.086.600,00
	1.3.2.10.02.04	Peralatan Jaringan	18.750.000,00
	1.3.2.16.01.01	Alat Peraga Pelatihan	1.600.000,00
	1.3.2.19.01.02	Peralatan Permainan	5.500.000,00
	1.3.2.19.01.06	Peralatan Olah Raga Lainnya	3.500.000,00
Jumlah Reklasifikasi Dari Belanja Barang dan Jasa			**862.786.175,00**

6. **Mutasi Masuk Antar OPD**

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal pencatatan mutasi masuk antar OPD sebesar Rp417.960.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD Asal	OPD Tujuan	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan	1.3.02.07.01.0003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	417.960.000,00

7. **Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan**

Mutasi tambah pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.204.197.708,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

OPD	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin				Nilai
	Asal Aset Tetap		Aset Tetap Tujuan		
	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	
Dinas Kesehatan	1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.02.01.01.0011	Mesin Proses	1.204.197.708,00
Jumlah Reklasifikasi Dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan					**1.204.197.708,00**

8. **Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya**

Mutasi tambah pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 41.813.700,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

OPD	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin				Nilai
	Asal Aset Tetap		Aset Tetap Tujuan		
	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.3.5.01.01.0001	Buku Umum	1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	39.283.700,00
Jumlah Reklasifikasi Dari Aset Tetap Lainnya					**39.283.700,00**

9. **Reklasifikasi dari Persediaan**

Mutasi tambah pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi dari persediaan sebesar Rp10.540.000,00 terdapat pada Dinas Sosial dengan rincian sebagai berikut:

a) 1.3.2.05.01.04.002 - Lemari Kayu sebesar Rp750.000,00;
b) 1.3.2.05.02.01.002 - Meja Kerja Kayu sebesar Rp 500.000,00;
c) 1.3.2.05.02.01.025 - Kasur/*Spring Bed* sebesar Rp3.000.000,00;
d) 1.3.2.05.02.01.051 - Kursi Plastik sebesar Rp384.000,00;
e) 1.3.2.05.02.04.006 - Kipas Angin sebesar Rp1.000.000,00;
f) 1.3.2.05.02.05.002 - Kompor Gas (Alat Dapur) sebesar Rp1.750.000,00;
g) 1.3.2.05.02.05.005 - *Rice Cooker* (Alat Dapur) sebesar Rp650.000,00;
h) 1.3.2.05.02.05.009 - Tabung Gas sebesar Rp300.000,00;
i) 1.3.2.05.02.06.038 – Dispenser sebesar Rp1.456.000,00;
j) 1.3.2.05.02.06.125 - Rak Piring sebesar Rp750.000,00.

10. **Pencatatan dari Utang**

Mutasi tambah pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari pencatatan utang sebesar Rp152.011.608,00 terdapat pada RSUD Torabelo pada akun 1.3.2.07.01.29 - Alat Kedokteran Lainnya.

b. Mutasi Pengurangan

1. **Pindah Rekening pada KIB yang Sama**

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan Pindah Rekening pada KIB yang Sama sebesar Rp4.518.726.166,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nilai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.082.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	626.776.432,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.478.600,00
Dinas Kesehatan	58.280.596,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	69.592.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.709.849.371,00
Dinas Pariwisata	124.175.700,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.788.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.061.500,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	149.306.413,00
Dinas Perhubungan	4.900.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.425.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.964.504,00
Dinas Sosial	37.000.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	12.566.200,00
Inspektorat Kab. Sigi	128.000.000,00
Kecamatan Palolo	55.900.000,00
Kecamatan Pipikoro	22.685.000,00
Sekretariat DPRD Kab. Sigi	31.063.350,00
Sekretariat Daerah	1.323.831.500,00
Jumlah Pindah Rekening pada KIB yang Sama	**4.518.726.166,00**

2. **Koreksi Saldo Awal - Tercatat Ganda**

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan Koreksi Saldo Awal - Tercatat Ganda sebesar Rp13.575.000,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akun 1.3.2.02.01.04 - Kendaraan Bermotor Beroda Dua.

3. **Reklasifikasi ke Barang dan Jasa**

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan Reklasifikasi Ke Barang dan Jasa sebesar Rp1.180.839.420,58 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Dinas Kesehatan	1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00
	1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	14.605.400,00
	1.3.2.07.01.01	Alat Kedokteran Umum	5.908.660,58
	1.3.2.07.01.04	Alat Kedokteran Bedah	1.000.000,00
	1.3.2.07.02.05	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.000.000,00

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	529.500,00
	1.3.2.06.01.01	Peralatan Studio Audio	720.000,00
	1.3.2.10.02.05	Peralatan Komputer Lainnya	983.500,00
Dinas Pariwisata	1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	160.745.760,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.3.2.01.03.03	Compressor	6.270.000,00
	1.3.2.04.01.04	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4.200.000,00
	1.3.2.05.01.03	Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.250.000,00
	1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	3.750.200,00
	1.3.2.05.02.01	Meubelair	5.628.000,00
	1.3.2.05.02.02	Alat Pengukur Waktu	872.500,00
	1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	10.799.100,00
	1.3.2.05.03.07	Lemari Dan Arsip Pejabat	1.950.000,00
	1.3.2.08.01.20	Alat Laboratorium Fisika	800.000,00
	1.3.2.08.03.11	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	6.861.000,00
	1.3.2.08.03.12	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : PKN	375.000,00
	1.3.2.09.02.04	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	5.608.000,00
	1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	594.000,00
	1.3.2.10.02.01	Peralatan Mainframe	979.300,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.3.2.05.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	65.520.000,00
Sekretariat Daerah	1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	473.025.000,00
	1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	396.150.000,00
	1.3.2.06.01.06	Alat Studio Lainnya	7.714.500,00
Jumlah Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa			**1.180.839.420,58**

4. **Reklasifikasi ke Pembukuan Ekstrakomptabel**

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan Reklasifikasi Ke Pembukuan Ekstrakomptabel sebesar Rp780.775.949,01 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Dinas Kesehatan	1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	2.100.000,00
	1.3.02.05.02.0001	Meubelair	11.380.000,00
	1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	2.540.000,00
	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	2.785.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.3.02.05.02.0001	Meubelair	3.496.500,00
	1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	1.380.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam Yang *Transportable* (Berpindah)	275.000,00
	1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	250.000,00
	1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	450.000,00
	1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	1.020.000,00

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
	1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	41.252.021,00
	1.3.02.05.02.0001	Meubelair	516.306.400,00
	1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	300.000,00
	1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	13.634.500,00
	1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	5.980.450,00
	1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	5.500.000,00
	1.3.02.05.03.0007	Lemari Dan Arsip Pejabat	3.600.000,00
	1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	1.050.000,00
	1.3.02.08.01.0005	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	200.000,00
	1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	6.200.000,00
	1.3.02.08.03.0005	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	175.000,00
	1.3.02.08.03.0010	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	450.000,00
	1.3.02.10.01.0002	Personal Komputer	6.000.000,00
	1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Komputer	350.000,00
	1.3.02.16.01.0001	Alat Peraga Pelatihan	1.600.000,00
	1.3.02.19.01.0003	Peralatan Senam	400.000,00
Dinas Sosial	1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	(300.000,00)
	1.3.02.05.02.0001	Meubelair	(384.000,01)
Kecamatan Dolo Barat	1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	(2.300.000,00)
Kecamatan Marawola	1.3.02.05.02.0001	Meubelair	(10.500.000,00)
Kecamatan Palolo	1.3.02.05.02.0001	Meubelair	(14.000.000,00)
	1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	(2.250.000,00)
RSUD Tora Belo	1.3.02.05.02.0001	Meubelair	(8.954.400,00)
	1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	(4.950.750,00)
	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	(9.956.570,00)
	1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(2.629.368,00)
	1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya	(778.370,00)
	1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya	(418.370,00)
Sekretariat Daerah	1.3.02.05.02.0001	Meubelair	(70.650.000,00)
	1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	2.940.000,00
Sekretariat DPRD	1.3.02.05.02.0001	Meubelair	21.089.250,00
Jumlah Reklasifikasi ke Pembukuan Ekstrakomptabel			**780.775.949,01**

5. **Mutasi Keluar Antar OPD**

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal pencatatan mutasi keluar antar OPD sebesar Rp417.960.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD Asal	OPD Tujuan	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan	1.3.02.07.01.0003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	417.960.000,00

6. **Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat)**

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal pencatatan reklasifikasi ke aset lainnya (Rusak Berat) sebesar Rp177.524.186,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Kecamatan Gumbasa	1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	6.157.000,00
	1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.3.02.05.02.0001	Mebel	11.533.500,00
	1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	2.217.600,00
	1.3.02.08.04.0002	*Modular Counting and Scientific Electronic*	4.920.000,00
	1.3.02.10.01.0002	Personal Komputer	60.871.136,00
	1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Komputer	35.000.000,00
	1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia	1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.196.700,00
	1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Komputer	19.628.250,00
Jumlah Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat)			**177.524.186,00**

7. **Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal pencatatan reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp39.955.000,00 terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang sebelumnya pada akun 1.3.02.05.02.0001 – Mebel direklasifikasi ke akun 1.3.3.01.01.01.001 - Bangunan Gedung Kantor Permanen.

8. **Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal pencatatan reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp690.114.285,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin				Nilai
	Asal Aset Tetap		Aset Tetap Tujuan		
	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	1.3.4.03.10.01.006	Instalasi Penerangan Lampu Jalan	38.989.000,00
RSUD Torabelo Kabupaten Sigi	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	1.3.4.03.08.04.001	Instalasi Gas Lainnya	579.510.000,00

OPD	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Asal Aset Tetap Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Aset Tetap Tujuan Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	1.3.02.13.01.0002	Sumur Pemboran	1.3.4.02.05.02.003	Sumur Bor	71.615.285,00
Jumlah Reklasifikasi Ke Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi					**690.114.285,00**

9. **Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud**

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal pencatatan Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp7.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Asal Aset Tetap Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Aset Tetap Tujuan Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.3.2.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	1.5.3.01.01.0005	*Software*	2.500.000,00
RSUD Torabelo Kabupaten Sigi	1.3.2.08.08.0003	*Data Accquisition And Analyzing System*	1.5.3.01.01.0005	*Software*	5.000.000,00
Jumlah Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud					**7.500.000,00**

10. **Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya**

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal pencatatan Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp Rp160.140.579,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian asal Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa 1.3.02.05.01.0005 - Alat Kantor Lainnya di reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa 1.3.5.01.01.0001 – Buku Umum.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan secara komparasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp906.452.878.915,91 dan Rp837.277.284.002,04. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp75.209.558.339,58 dan mutasi pengurangan sebesar (Rp6.033.963.425,71) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai
Saldo Awal		**837.277.284.002,04**
Mutasi Tambah:		
1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025	18.544.762.809,00	
2. Hibah dari Pemerintah Pusat	2.506.620.256,07	
3. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	2.384.951.041,51	
4. Pindah Rekening pada KIB yang Sama	4.245.581.956,00	
5. Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Rusak Berat)	2.703.166.513,00	
6. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	39.955.000,00	
7. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.784.520.764,00	
8. Pencatatan dari Utang	194.200.541,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**75.209.558.339,58**
Mutasi Kurang:		
1. Pindah Rekening pada KIB yang Sama	(4.245.581.956,00)	
2. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	(134.177.974,00)	
3. Reklasifikasi ke Pembukuan Ekstrakomptabel	(98.974.283,00)	
4. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(306.439.311,00)	
5. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(1.204.197.708,00)	
6. Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan	(44.592.193,71)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(5.661.130.410,00)**
Saldo Akhir		**906.933.513.119,44**

Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tersaji pada **lampiran 14**. Rincian penjelasan untuk nilai mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat pada penjelasan berikut ini:

a. Mutasi Penambahan

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp18.544.762.809,00 termasuk di dalam nilai tersebut Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berasal dari sumber dana BLUD dengan rincian Perangkat Daerah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

OPD	Nilai
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.312.757.092,50
2. Dinas Kesehatan	3.647.251.833,00
3. RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	2.777.136.896,00
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	132.739.406,00
5. Dinas Komunikasi dan Informatika	186.550.890,00
6. Dinas Pemuda Dan Olahraga	458.431.479,00
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	207.847.957,00
8. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	4.082.436.767,00
9. Bagian Umum Sekretariat Daerah	169.500.640,00
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	306.439.311,00
11. Badan Keuangan dan Aset Daerah	144.896.137,00
12. Badan Pendapatan Daerah	118.774.400,00

OPD	Nilai
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**18.544.762.808,50**

2. **Hibah dari Pemerintah Pusat**

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah dari Pemerintah Pusat Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menegah yaitu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.506.620.256,07 dengan rincian sebagai berikut:

a) 1.3.3.01.01.10.001 - Bangunan Gedung Pendidikan Permanen sebesar Rp2.420.404.293,21; dan

b) 1.3.3.01.01.10.005 - Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain sebesar Rp86.215.962,86.

3. **Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa**

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal pencatatan reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp2.384.951.041,51 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	484.997.657,00
	1.3.3.01.01.02	Bangunan Gudang	217.543.771,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	233.259.920,00
Dinas Kesehatan	1.3.03.04.01.0004	Pagar	24.670.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.3.3.01.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	179.263.411,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	1.3.3.01.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	166.741.687,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.3.3.01.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	64.609.362,00
	1.3.3.01.01.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	321.466.431,51
	1.3.3.01.01.37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	73.156.854,00
	1.3.3.04.01.04	Pagar	390.403.060,00
RSUD Torabelo Kabupaten Sigi	1.3.3.01.01.06	Bangunan Kesehatan	99.750.150,00
Sekretariat Daerah	1.3.3.01.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	9.234.490,00
	1.3.3.01.01.30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	119.854.248,00
Jumlah Reklasifikasi Dari Belanja Barang dan Jasa			**2.384.951.041,51**

4. **Pindah Rekening pada KIB yang Sama**

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan Pindah Rekening pada KIB yang Sama sebesar Rp4.245.581.956,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nilai
Dinas Kesehatan	3.548.281.833,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	489.452.166,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	207.847.957,00
Jumlah Pindah Rekening pada KIB yang Sama	**4.245.581.956,00**

5. **Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Rusak Berat)**

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal pencatatan reklasifikasi dari Aset Lainnya (Rusak Berat) sebesar Rp2.703.166.513,00 terdapat pada perangkat daerah RSUD Torabelo Kabupaten Sigi pada akun 1.3.03.01.01.0006 - Bangunan Kesehatan.

6. **Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal pencatatan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp39.955.000,00 terdapat pada perangkat daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang sebelumnya pada akun 1.3.02.05.02.0001 – Mebel direklasifikasi ke akun 1.3.3.01.01.001 - Bangunan Gedung Kantor Permanen.

7. **Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal pencatatan Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp44.784.520.764,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Dinas Kesehatan	1.3.3.01.01.06	Bangunan Kesehatan	4.986.120.000,00
	1.3.3.01.01.36	Taman	3.975.760.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.3.3.01.01.32	Bangunan Fasilitas Umum	14.908.387.085,00
	1.3.3.01.01.36	Taman	6.076.534.568,00
	1.3.3.01.01.37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.508.434.236,00
	1.3.3.02.01.02	Tugu	329.284.875,00
Jumlah Reklasifikasi Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan			**44.784.520.764,00**

8. **Pencatatan dari Utang**

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari pencatatan utang sebesar Rp194.200.541,00 dengan rincian OPD dan akun barang milik daerah sebagai berikut:

c) RSUD Tora Belo pada akun 1.3.3.01.01.06 - Bangunan Kesehatan sebesar Rp104.741.000,00;

d) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah pada akun 1.3.3.04.01.04 – Pagar sebesar Rp89.459.541,00.

b. Mutasi Pengurangan

1. **Pindah Rekening pada KIB yang Sama**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan Pindah Rekening pada KIB yang Sama sebesar Rp4.245.581.956,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nilai
Dinas Kesehatan	3.548.281.833,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	489.452.166,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	207.847.957,00
Jumlah Pindah Rekening pada KIB yang Sama	**4.245.581.956,00**

2. **Reklasifikasi ke Barang dan Jasa**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan Reklasifikasi ke Barang dan Jasa sebesar Rp134.177.974,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Pemuda Dan Olahraga akun 1.3.03.01.01.0011 - Bangunan Gedung Tempat Olahraga.

3. **Reklasifikasi ke Pembukuan Ekstrakomptabel**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan Reklasifikasi ke Pembukuan Ekstrakomptabel sebesar Rp98.974.283,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.3.3.01.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	10.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.3.3.04.01.04	Pagar	88.974.283,00
Jumlah Reklasifikasi ke Pembukuan Ekstrakomptabel			**98.974.283,00**

4. **Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp306.439.311,00 terdapat pada perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah akun 1.3.03.04.01.0004 - Pagar.

5. **Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.204.197.708,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan				
	Asal Aset Tetap		Aset Tetap Tujuan		Nilai
	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	
Dinas Kesehatan	1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.02.01.01.0011	Mesin Proses	1.204.197.708,00
Jumlah Reklasifikasi Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin					**1.204.197.708,00**

6. **Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp44.592.193,71 dengan rincian sebagai berikut:

a) Sekretariat Daerah pada akun 1.3.3.01.01.01 - Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp20.807.467,90;

b) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada akun:

1) 1.3.3.01.01.08 - Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp881.524,60;

2) 1.3.3.01.01.10 - Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp20.832.517,71;

c) Dinas Pemuda dan Olahraga pada akun 1.3.3.01.01.11 - Bangunan Gedung Tempat Olah Raga sebesar Rp2.070.683,50.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi secara komparasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.537.612.994.487,68 dan Rp1.496.179.342.888,97 terdapat penambahan nilai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp32.332.173.425,42 atau

3,38%. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp50.535.129.773,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp9.101.478.174,29 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai
Saldo Awal		**1.496.179.342.888,97**
Mutasi Tambah:		
1. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025	19.453.774.146,00	
2. Pindah Rekening pada KIB yang Sama	7.568.158.769,00	
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	690.114.285,00	
4. Hibah Dari Pemerintah Pusat	21.589.146.343,00	
5. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Kapitalisasi)	1.233.936.231,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**50.535.129.773,00**
Mutasi Kurang:		
1. Pindah Rekening pada KIB yang Sama	(7.568.158.769,00)	
2. Reklasifikasi Ke Persediaan	(118.600.000,00)	
3. Reklasifikasi Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(984.645.085,00)	
4. Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan	(430.074.320,29)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(9.101.478.174,29)**
Saldo Akhir		**1.537.612.994.487,68**

Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 tersaji pada **lampiran 15**. Rincian penjelasan untuk nilai mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi terdapat pada penjelasan berikut ini:

a. Mutasi Penambahan

1. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp19.453.774.146,00 termasuk di dalam nilai tersebut Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang berasal dari sumber dana BLUD dengan rincian Perangkat Daerah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

OPD	Nilai
1. Dinas Kesehatan	104.890.000,00
2. RSUD Torabelo	2.113.644.718,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14.415.504.769,00
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.828.919.885,00
5. Dinas Pariwisata	15.000.000,00

OPD	Nilai
6. Sekretariat DPRD Kab. Sigi	24.445.315,00
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	200.000.000,00
8. Badan Pendapatan Daerah	726.369.459,00
9. Kecamatan Marawola	25.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	**19.453.774.146,00**

2. **Pindah Rekening pada KIB yang Sama**

Mutasi penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi disebabkan Pindah Rekening pada KIB yang Sama sebesar Rp7.568.158.769,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nilai
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.280.217.051,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.292.897.000,00
RSUD Torabelo Kabupaten Sigi	1.995.044.718,00
Jumlah Pindah Rekening pada KIB yang Sama	**7.568.158.769,00**

3. **Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Mutasi penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi disebabkan Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp690.114.285,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi				Nilai
	Asal Aset Tetap		Aset Tetap Tujuan		
	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	1.3.4.03.10.01.006	Instalasi Penerangan Lampu Jalan	38.989.000,00
RSUD Torabelo Kabupaten Sigi	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	1.3.4.03.08.04.001	Instalasi Gas Lainnya	579.510.000,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	1.3.02.13.01.0002	Sumur Pemboran	1.3.4.02.05.02.003	Sumur Bor	71.615.285,00
Jumlah Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin					**690.114.285,00**

4. **Hibah Dari Pemerintah Pusat**

Mutasi penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi disebabkan Hibah Dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 21.589.146.343,00 terdapat pada perangkat daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Berupa (IJD) Peningkatan Jalan Lingkar Kota Sibalaya (Sibalaya – Poi) dari Kementerian Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 041/BA/B614.5/2025, Nomor: 900.16.3/062.25/SETDA/2025 tanggal 14 Juli 2025.

5. **Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Kapitalisasi)**

Mutasi penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi disebabkan Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Kapitalisasi) sebesar Rp1.233.936.230,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	91.724.290,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.3.04.01.01.0005	Jalan Desa	183.792.000,00
	1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	420.431.215,00
	1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	48.990.825,00
RSUD Torabelo Kabupaten Sigi	1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	444.197.900,00
Dinas Kesehatan	1.3.04.03.05.0001	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	44.800.000,00
Jumlah Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Kapitalisasi)			**1.233.936.230,00**

b. Mutasi Pengurangan

1. **Pindah Rekening pada KIB yang Sama**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi disebabkan Pindah Rekening pada KIB yang Sama sebesar Rp7.568.158.769,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nilai
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.280.217.051,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.292.897.000,00
RSUD Torabelo Kabupaten Sigi	1.995.044.718,00
Jumlah Pindah Rekening pada KIB yang Sama	**7.568.158.769,00**

2. **Reklasifikasi Ke Persediaan**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi disebabkan Reklasifikasi Ke Persediaan sebesar Rp118.600.000,00 terdapat pada perangkat daerah RSUD Torabelo Kabupaten Sigi untuk akun 1.3.04.04.02.0003 - Jaringan Listrik Lainnya.

3. **Reklasifikasi Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi disebabkan Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp984.645.085,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada akun 1.3.04.03.01.0005 - Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya.

4. **Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi disebabkan Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp430.074.320,29 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.3.4.01.01.05	Jalan Desa	284.205.676,27
	1.3.4.02.06.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	104.314.949,09
	1.3.4.03.01.05	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	7.437.803,32
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.3.4.03.02.04	Instalasi Air Kotor Lainnya	11.285.531,61
RSUD Tora Belo	1.3.4.04.02.02	Jaringan Distribusi	22.830.360,00
Jumlah Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan			**430.074.320,29**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya secara komparasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp46.235.418.656,95 dan Rp40.004.869.513,95 sehingga terdapat penambahan nilai saldo akun Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.681.177.661,00 atau 9,20%. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp9.537.277.773,00 dan mutasi pengurangan sebesar (Rp3.306.728.630,00) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**40.004.869.513,95**
Mutasi Tambah:		
1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	5.743.677.970,00	
2. Pindah Rekening pada KIB yang Sama	177.442.640,00	
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	160.140.579,00	
4. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	3.456.016.584,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**9.537.277.773,00**
Mutasi Kurang:		
1. Reklasifikasi Ke Barang dan Jasa	(7.605.256,00)	

Uraian		Nilai
2. Reklasifikasi Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(39.283.700,00)	
3. Aset Tetap yang Diserahkan Ke Masyarakat	(625.663.212,00)	
4. Reklasifikasi ke Pembukuan Ekstrakomptabel	(2.456.733.822,00)	
5. Pindah Rekening pada KIB yang Sama	(177.442.640,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(3.306.728.630,00)**
Saldo Akhir		**46.235.418.656,95**

Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tersaji pada **lampiran 16**. Rincian penjelasan untuk nilai mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya terdapat pada penjelasan berikut ini:

a. Mutasi Penambahan

1. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp5.743.677.970,00 termasuk di dalam nilai tersebut Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berasal dari sumber dana BLUD dengan rincian Perangkat Daerah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

OPD	Nilai
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.831.235.330,00
2. Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	49.500.000,00
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	862.942.640,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**5.743.677.970,00**

2. **Pindah Rekening pada KIB yang Sama**

Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya disebabkan Pindah Rekening pada KIB yang Sama sebesar Rp177.442.640,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada akun asal 1.3.05.03.03.0001 - Hewan Lainnya menjadi akun 1.3.05.03.02.0001 - Ternak Potong.

3. **Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya disebabkan Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp160.140.579,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dana dari Bantuan Operasional

Satuan Pendidikan (BOSP) dengan rincian asal Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa 1.3.02.05.01.0005 - Alat Kantor Lainnya dan 1.3.2.08.03.01 - Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia di reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa 1.3.5.01.01.01 - Buku Umum.

4. **Reklasifikasi dari Barang dan Jasa**

Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya disebabkan Reklasifikasi dari Barang dan Jasa sebesar Rp3.456.016.584,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dana dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dengan rincian sebagai berikut:

a) 1.3.5.01.01.01 - Buku Umum sebesar Rp2.891.542.871,00;
b) 1.3.5.01.01.03 - Buku Agama sebesar Rp5.006.500,00;
c) 1.3.5.01.01.04 - Buku Ilmu Sosial sebesar Rp3.523.200,00;
d) 1.3.5.01.01.05 - Buku Ilmu Bahasa sebesar Rp12.077.000,00;
e) 1.3.5.01.01.06 - Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam sebesar Rp8.033.500,00;
f) 1.3.5.01.01.08 - Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga sebesar Rp32.908.900,00;
g) 1.3.5.01.01.09 - Buku Geografi, Biografi, Sejarah sebesar Rp502.864.613,00;
h) 1.3.5.01.01.11 - Buku Laporan sebesar Rp60.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

1. **Reklasifikasi Ke Barang dan Jasa**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya disebabkan Reklasifikasi ke Barang dan Jasa sebesar Rp7.605.256,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada akun sebagai berikut:

a) 1.3.5.01.01.01 - Buku Umum sebesar Rp5.335.256,00;
b) 1.3.5.01.01.03 - Buku Agama sebesar Rp600.000,00;
c) 1.3.5.02.01.02 – Lukisan sebesar Rp1.260.000,00;
d) 1.3.5.02.02.02 - Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah sebesar Rp410.000,00.

2. **Reklasifikasi Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya disebabkan Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp41.813.700,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dana dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dengan rincian asal Aset Tetap Lainnya berupa 1.3.5.01.01.0001 – Buku Umum di reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa 1.3.02.05.01.0005 - Alat Kantor Lainnya.

3. **Aset Tetap yang Diserahkan Ke Masyarakat**

   Mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya disebabkan Reklasifikasi ke Aset Tetap yang Diserahkan Ke Masyarakat sebesar Rp625.663.212,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa akun 1.3.05.01.01.0001 - Buku Umum.

4. **Reklasifikasi ke Pembukuan Ekstrakomptabel**

   Mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya disebabkan Reklasifikasi ke Pembukuan Ekstrakomptabel sebesar Rp2.456.733.822,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa akun-akun sebagai berikut:

   a) 1.3.05.01.01.0001 - Buku Umum sebesar Rp2.322.923.022,00;
   b) 1.3.5.01.01.03 - Buku Agama sebesar Rp17.772.500,00;
   c) 1.3.5.01.01.04 - Buku Ilmu Sosial sebesar Rp8.387.800,00;
   d) 1.3.5.01.01.05 - Buku Ilmu Bahasa sebesar Rp27.611.700,00;
   e) 1.3.5.01.01.06 - Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam sebesar Rp19.126.200,00;
   f) 1.3.5.01.01.08 - Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga sebesar Rp60.248.800,00;
   g) 1.3.5.01.01.09 - Buku Geografi, Biografi, Sejarah sebesar Rp451.800,00;
   h) 1.3.5.01.01.11 - Buku Laporan sebesar Rp120.000,00;
   i) 1.3.5.02.01.04 - Barang Bercorak Kesenian Lainnya sebesar Rp92.000,00.

5. **Pindah Rekening pada KIB yang Sama**

   Mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya disebabkan Pindah Rekening pada KIB yang Sama sebesar Rp177.442.640,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada akun asal 1.3.05.03.03.0001 - Hewan Lainnya menjadi akun 1.3.05.03.02.0001 - Ternak Potong.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan secara komparasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp125.245.319.380,90 dan Rp155.163.922.922,36. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan dan mutasi pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai
Saldo Awal		**155.163.922.921,70**
Mutasi Tambah:		
1. Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat	13.549.120.720,20	
2. Reklasifikasi dari Barang Dan Jasa (Kapitalisasi)	25.712.107,00	
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	306.439.311,00	
4. Reklasifikasi Dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	984.645.085,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**14.865.917.223,20**
Mutasi Kurang:		
1. Reklasifikasi Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(44.784.520.764,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(44.784.520.764,00)**
Saldo Akhir		**125.245.319.380,90**

Daftar Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tersaji pada **lampiran 17**. Rincian penjelasan untuk nilai mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada penjelasan berikut ini:

a. Mutasi Penambahan

1. **Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat**

   Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang disebabkan Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat sebesar Rp 13.549.120.720,20 rincian OPD dan pada akun sebagai berikut:

   a) Dinas Kesehatan pada akun 1.3.6.01.01.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.084.975.787,00; dan
   b) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada akun .3.6.01.01.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp10.464.144.933,20.

2. **Reklasifikasi dari Barang Dan Jasa**

Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang disebabkan reklasifikasi dari barang dan jasa sebesar Rp25.712.107,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atas akun 1.3.06.04.03.0005 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya.

3. **Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

   Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang disebabkan Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp306.439.311,00 terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atas akun 1.3.06.03.04.0004 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar.

4. **Reklasifikasi Dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi**

   Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang disebabkan Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp984.645.085,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atas akun 1.3.06.04.03.0005 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya.

b. Mutasi Pengurangan

1. **Reklasifikasi Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

   Mutasi pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang disebabkan Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp44.784.520.764,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nilai
Dinas Kesehatan	1.3.6.01.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.961.880.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.3.6.01.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	35.822.640.764,00
Jumlah Reklasifikasi Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan			**44.784.520.764,00**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai Aset Tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sigi sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi

Penyusutan Berbasis Akrual. Metode penyusutan dilakukan secara bulanan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan masa manfaat. Masa manfaat Aset Tetap diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap secara komparasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp1.665.577.370.801,08) dan (Rp1.546.973.985.835,17) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 67
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian Rekening	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(507.901.093.244,05)	(472.139.335.434,44)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(214.557.506.459,68)	(188.586.036.948,59)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(942.206.389.985,37)	(886.248.613.452,14)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(912.381.111,98)	0,00
Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**(1.665.577.370.801,08)**	**(1.546.973.985.835,17)**

5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp167.234.854.392,09 dan Rp171.983.943.849,57 dengan nilai akumulasi penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp102.707.193.867,53) dan (Rp102.052.784.957,64). Rincian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 68
Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	474.666.514,00	1.472.614.514,65	(997.948.000,65)	(65,68)
Aset Tidak Berwujud	10.544.164.540,00	11.040.860.760,00	(496.696.220,00)	(4,50)
Aset Lain-lain	258.923.217.205,62	261.523.253.532,56	(2.600.036.326,94)	(0,99)
Nilai Perolehan	**269.942.048.259,62**	**274.036.728.807,21**	**(4.094.680.547,59)**	**(1,21)**

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.478.769.539,39)	(5.661.638.392,00)	1.817.131.147,39	32,10
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(95.228.424.328,14)	(96.391.146.565,64)	(1.162.722.237,50)	(1,21)
Total Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	**(102.707.193.867,53)**	**(102.052.784.957,64)**	**654.408.909,89**	**0,64**
Nilai Buku Aset Lainnya	**167.234.854.392,09**	**171.983.943.849,57**	**(4.749.089.457,48)**	**(2,76)**

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Saldo Tagihan jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp474.666.514,00, jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp1.472.614.514,65 maka terdapat perubahan penurunan saldo sebesar (Rp997.948.000,65) atau sebesar (67,77%). Saldo tersebut pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sigi adalah saldo tuntutan ganti kerugian daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang badan Pemeriksa Keuangan, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Kerugian ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp10.544.164.540,00 dan Rp11.040.860.760,00 terdapat penurunan sebesar (Rp496.696.220,00) atau turun (4,50%). Selama tahun 2025 mutasi penambahan senilai Rp265.803.780,00 dan mutasi pengurangan senilai (Rp762.500.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**11.040.860.760,00**
Mutasi Tambah:		
1. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025	188.775.600,00	
2. Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat	69.528.180,00	
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Perlatan dan Mesin	7.500.000,00	

Uraian		Nilai
Jumlah Mutasi Tambah		**265.803.780,00**
Mutasi Kurang:		
1. Koreksi Saldo Awal - Tercatat Ganda	(762.500.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(762.500.000,00)**
Saldo Akhir		**10.544.164.540,00**

a. Mutasi Penambahan

1. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025

Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025 yang menjadi Aset Tidak Berwujud yaitu sebesar Rp188.775.600,00 termasuk di dalam nilai tersebut Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berasal dari sumber dana BLUD dengan rincian Perangkat Daerah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

OPD	Nilai
1. Bagian Organisasi	68.775.600,00
2. Dinas Pemuda Dan Olahraga	120.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	**188.775.600,00**

2. **Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat**

Mutasi penambahan Aset Tidak Berwujud disebabkan Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat sebesar Rp69.528.180,00 terdapat pada OPD Sekretariat Daerah atas akun 1.5.3.01.01.06 – Kajian.

3. **Reklasifikasi dari Aset Tetap Perlatan dan Mesin**

Mutasi penambahan Aset Tidak Berwujud disebabkan Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud				
	Asal Aset Tetap		Aset Tetap Tujuan		Nilai
	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	
RSUD Tora Belo	1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	1.5.3.01.01.05	Software	5.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.3.2.08.08.03	Data Accquisition And Analyzing System	1.5.3.01.01.05	Software	2.500.000,00
Jumlah Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin					**7.500.000,00**

b. Mutasi Pengurangan

1. **Koreksi Saldo Awal - Tercatat Ganda**

Mutasi pengurangan Aset Tidak Berwujud disebabkan Koreksi Saldo Awal - Tercatat Ganda sebesar (Rp762.500.000,00) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada akun 1.5.3.01.01.06 – Kajian.

5.3.1.4.3 Aset Lain-Lain

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp258.923.217.205,62 dan Rp261.523.253.532,56 terdapat pennurunan sebesar (Rp2.600.036.326,94) atau turun sebesar (0,99%). Aset Lain-lain terdiri dari Aset Lain-Lain Rusak Berat sebesar Rp256.154.133.755,62 dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp2.769.083.450,00. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai
Saldo Awal		**261.523.253.532,56**
Mutasi Tambah:		
1. Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat	0,05	
2. Reklasifikasi Dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	309.564.186,00	
3. Mutasi Masuk Antar OPD	74.394.000,00	
4. Pindah Rekening Dalam KIB yang sama	8.531.359.290,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**8.915.317.476,05**
Mutasi Kurang:		
1. Koreksi Saldo Awal	(132.040.000,00)	
2. Reklasifikasi Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(2.703.166.513,00)	
3. Pindah Rekening Dalam KIB yang sama	(8.531.359.290,00)	
4. Mutasi Keluar Antar OPD	(74.394.000,00)	
5. Penghapusan	(74.394.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(2.851.954.513,00)**
Saldo Akhir		**259.055.257.205,56**

a. Mutasi Penambahan

1. Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat

Mutasi penambahan Aset Lain-Lain disebabkan Koreksi Saldo Awal - Kurang Catat sebesar Rp0,05 terdapat pada OPD RSUD Tora Belo akun barang milik daerah 1.5.4.01.01.01 - Aset Rusak Berat/Usang.

2. Reklasifikasi Dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Mutasi penambahan Aset Lain-Lain disebabkan Reklasifikasi Dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp309.564.186,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

OPD	Reklasifikasi Aset Lain-Lain				Nilai
	Asal Aset Tetap		Aset Lain-Lain Tujuan		
	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	11.540.000,00
	1.3.02.05.02.0001	Mebel			30.000.000,00
	1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin			22.600.000,00
	1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat			39.400.000,00
	1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat			28.500.000,00
Badan Kepegawaian dan	1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	29.196.700,00

OPD	Reklasifikasi Aset Lain-Lain				Nilai
	Asal Aset Tetap		Aset Lain-Lain Tujuan		
	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	Nomor Rekening BMD	Uraian Rekening BMD	
Pengembangan Sumber Manusia	1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Komputer			19.628.250,00
Kecamatan Gumbasa	1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih			6.157.000,00
	1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Komputer			3.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.3.02.05.02.0001	Mebel			11.533.500,00
	1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih			2.217.600,00
	1.3.02.08.04.0002	*Modular Counting and Scientific Electronic*			4.920.000,00
	1.3.02.10.01.0002	Personal Komputer			60.871.136,00
	1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Komputer			35.000.000,00
	1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Komputer			5.000.000,00
Jumlah Reklasifikasi Dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin					**309.564.186,00**

3. **Mutasi Masuk Antar OPD**

   Mutasi Penambahan Aset Lain-Lain disebabkan Mutasi Masuk Antar OPD sebesar Rp74.394.000,00 pada Dinas Kesehatan dari RSUD Tora Belo pada akun 1.5.04.01.01.0001 - Aset Rusak Berat/Usang.

4. **Pindah Rekening Dalam KIB yang sama**

   Mutasi Penambahan Aset Lain-Lain disebabkan Pindah Rekening Dalam KIB yang sama sebesar Rp8.531.359.290,00 dengan rincian OPD sebagai berikut:

   a) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp889.386.194,00;
   b) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar Rp701.137.288,00;
   c) Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan sebesar Rp 660.759.189,00;
   d) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp256.370.000,00;
   e) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.511.708.200,00;
   f) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp49.699.804,00;
   g) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp350.510.000,00;

h) Dinas Sosial sebesar Rp20.000.000,00;

i) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp80.000.000,00;

j) Inspektorat Daerah sebesar Rp359.842.250,00;

k) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.123.232.715,00; dan

l) Sekretariat DPRD sebesar Rp687.898.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

1. **Koreksi Saldo Awal**

   Mutasi pengurangan Aset Lain-Lain yang disebabkan koreksi saldo awal sebesar Rp132.040.000,00 terdapat pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada akun 1.5.4.01.01.03 - Aset Lain-Lain Lainya.

2. **Reklasifikasi Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

   Mutasi pengurangan Aset Lain-Lain yang disebabkan Reklasifikasi Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.703.166.513,00 dari akun 1.5.04.01.01.0001 - Aset Rusak Berat/Usang terdapat pada perangkat daerah RSUD Torabelo Kabupaten Sigi pada akun 1.3.03.01.01.0006 - Bangunan Kesehatan.

3. **Mutasi Keluar Antar OPD**

   Mutasi Pengurangan Aset Lain-Lain disebabkan Mutasi Keluar Antar OPD sebesar Rp74.394.000,00 pada RSUD Tora Belo ke Dinas Kesehatan pada akun 1.5.04.01.01.0001 - Aset Rusak Berat/Usang.

4. **Penghapusan**

   Mutasi pengurangan Aset Lain-Lain disebabkan Penghapusan sebesar Rp74.394.000,00 pada akun Aset Rusak Berat/Usang sesuai Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor. 400.7-243 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Serta Pemusnahan Bangunan Ruang Tunggu Keluarga Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo dalam rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Penjualan Langsung Berupa Material Bangunan yang Dibongkar.

5. **Pindah Rekening Dalam KIB yang sama**

Mutasi pengurangan Aset Lain-Lain disebabkan Pindah Rekening Dalam KIB yang sama sebesar Rp8.531.359.290,00 dengan rincian yang sama pada penjelasan mutasi penambahan yang disebabkan Pindah Rekening Dalam KIB yang sama.

5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi dilakukan pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas berupa *software*, sistem/aplikasi, dan lisensi. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2025. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Amortisasi atas aset tidak berwujud memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat amortisasi atas aset tidak berwujud sampai dengan tahun 2025, dan beban amortisasi sebagai beban tahun 2025.

Nilai akumulasi amortisasi untuk aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal Akumulasi Amortisasi	**:**	**(Rp5.661.638.392,00)**
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi	:	Rp0,00
Beban Amortisasi Tahun 2025	:	(Rp1.798.300.598,64)
Saldo Akhir akumulasi Amortisasi	**:**	**(Rp7.478.769.539,39)**

5.3.1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar (Rp95.228.424.328,14) jika dibandingkan dengan akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar (Rp96.391.146.565,64) terdapat pengurangan saldo akun yang disebabkan:

a. Penghapusan Aset Lain-Lain Rusak Berat sebesar Rp177.524.186,00;
b. Reklasifikasi Aset Lain-Lain Rusak Berat ke Aset Tetap sebesar Rp2.703.166.513,00.

5.3.1.5 Properti Investasi

Sebagai bentuk penerapan PSAP 17 tentang Properti Investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021, Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Aset Properti Investasi tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, tidak untuk tujuan administratif, dan tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada PSAP 17, Properti Investasi diukur sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

Pemerintah Kabupaten Sigi memiliki aset dikategorikan sebagai properti investasi sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp1,00 berupa Aset Tanah untuk Bangunan Jaringan Lain-Lain yang belum dilakukan penilaian atas aset tanah tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Pengakuan properti investasi ini berdasarkan Naskah Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Sigi dengan PT. Tower Bersama Tentang Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sigi Untuk Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru dengan naskah perjanjian sewa nomor: 600.2.1/170.11/SEK.DPKP/2025 dan nomor: 6127/TBIG-TBE-00/STC/04/XI/2025 tanggal 10 November 2025 dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun terhitung 10 April 2025 sampai dengan 10 April 2030.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024, Pemerintah Kabupaten Sigi hanya memiliki Kewajiban Jangka Pendek. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 69
Rekapitulasi Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2025
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	239.268.325,00	81.374.339.778,52	81.381.061.502,54	232.546.600,98
2. Utang Belanja	20.732.476.888,98	136.919.906.071,00	136.221.463.508,00	20.034.034.325,98
3. Utang Jangka Pendek Lainnya	16.811.424,00	5.625.026,00	0,00	22.436.450,00
Total Kewajiban Jangka Pendek	**20.988.556.637,98**	**153.672.913.528,26**	**152.430.115.314,26**	**20.289.017.376,96**

5.3.2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2024 merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak seperti PPN, Pajak Penghasilan, atau pungutan lainnya. Saldo akhir Utang PFK per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Saldo Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2025
1. Utang PPh 21	0,00	8.113.617.923,00	8.107.573.648,00	6.044.275,00
2. Utang PPh 22	60.706,00	1.567.509.846,00	1.564.196.828,00	3.373.724,00
3. Utang PPh 23	3.992.759,00	1.028.869.296,44	1.031.909.141,44	952.914,00
4. Utang PPh Pasal 4 ayat (2)	0,00	2.164.635.854,00	2.164.635.854,00	0,00
5. Utang PPN Pusat	235.214.860,00	22.618.379.959,08	22.631.419.131,10	222.175.687,98
6. Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	43.514.758.594,00	43.514.758.594,00	0,00
7. Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	591.709.420,00	591.709.420,00	0,00
8. Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	1.774.858.886,00	1.774.858.886,00	0,00
Total Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	**239.268.325,00**	**81.374.339.778,52**	**81.381.061.502,54**	**232.546.600,98**

Penjelasan saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 sebesar Rp 232.546.600,98 sebagai berikut:

a. Utang PPh 21

Utang PPh 22 sebesar Rp60.706,00 merupakan Utang Pajak atas belanja bersumber dana dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Puskesmas Marawola sebesar Rp2.151.934,00;

2. Puskesmas Baluase sebesar Rp3.856.806,00;
3. Puskesmas Banpres sebesar Rp35.535,00.

b. Utang PPh 22

Utang PPh 22 sebesar Rp3.373.724,00 merupakan Utang Pajak atas belanja bersumber dana dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

1. Puskesmas Baluase sebesar Rp 2.340.179,00,00;
2. Puskesmas Lindu sebesar Rp225.942,00;
3. Puskesmas Banpres sebesar Rp746.897,00.

c. Utang PPh 23

Utang PPh 23 sebesar Rp952.914,00 merupakan Utang Pajak atas belanja bersumber dana dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

1. Puskesmas Dolo sebesar Rp217.000,00;
2. Puskesmas Marawola sebesar Rp250.116,00;
3. Puskesmas Baluase sebesar Rp356.000,00;
4. Puskesmas Lindu sebesar Rp96.000,00;
5. Puskesmas Banpres sebesar Rp33.798,00.

d. Utang PPN Pusat

Utang PPN Pusat sebesar Rp222.175.687,98 dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Pajak atas belanja bersumber dana dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kinovaro Tahun 2024 sebesar Rp445.173,00;
2. Utang Pajak atas belanja bersumber dana dari Dana Bantuan Operasional Sekolah pada 268 sekolah diwilayah Kabupaten Sigi sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp 163.579.021,98;
3. Utang Pajak atas belanja bersumber dana dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025 sebesar Rp58.044.327,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a) Puskesmas Marawola sebesar Rp18.672.768,00;
   b) Puskesmas Baluase sebesar Rp21.105.063,00;
   c) Puskesmas Kinovaro sebesar Rp11.355.218,00;

d) Puskesmas Lindu sebesar Rp1.656.905,00;

e) Puskesmas Banpres sebesar Rp5.361.539,00.

5.3.2.2 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja dan Transfer 31 Desember 2025 sebesar Rp21.910.913.327,98. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp20.732.476.888,98 terjadi kenaikan sebesar Rp1.178.436.439,00 atau sebesar 5,68 %.

(dalam rupiah)

Jenis Utang Belanja	Saldo Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2025
1. Utang Belanja Pegawai	858.314.862,00	801.301.357,00	103.159.000,00	1.556.457.219,00
2. Utang Belanja Barang dan Jasa	19.263.063.098,98	15.969.971.886,00	17.357.143.325,00	17.875.891.659,98
3. Utang Belanja Subsidi	2.451.711,00	0,00	1.118.230,00	1.333.481,00
4. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407.660.217,00	152.011.608,00	333.743.750,00	225.928.075,00
5. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	194.903.000,00	194.200.541,00	89.820.000,00	299.283.541,00
6. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.084.000,00	0,00	0,00	6.084.000,00
7. Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	69.056.350,00	0,00	69.056.350,00
Total Utang Belanja	**20.732.476.888,98**	**17.186.541.742,00**	**17.884.984.305,00**	**20.034.034.325,98**

Nilai saldo Utang Belanja dan Transfer per 31 Desember 2025 tersebut secara rinci terdapat pada **lampiran 18**. Penjelasan untuk masing-masing utang belanja tahun 2025 sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.556.457.219,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 910.090.418,00;
2. RSUD Torabelo Kabupaten Sigi sebesar Rp 18.853.721,00;
3. Dinas Kesehatan sebesar Rp144.622.500,00;
4. Inspektorat Kab. Sigi sebesar Rp412.042.946,00;
5. Kecamatan Kulawi Selatan sebesar Rp13.841.015,00;
6. Kecamatan Kulawi sebesar Rp9.272.658,00;

7. Kecamatan Kinovaro sebesar Rp14.878.181,00;
8. Kecamatan Palolo sebesar Rp6.481.530,00;
9. Kecamatan Pipikoro sebesar Rp12.416.085,00;
10. Kecamatan Sigi Kota sebesar Rp13.958.165,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pegawai disajikan dalam **lampiran 18**.

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp17.875.891.659,98 dan Rp19.263.063.098,98. Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 terdapat pada perangkat daerah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.659.758.328,00;
2. Sekretariat DPRD Kab. Sigi sebesar Rp48.700.000,00;
3. Puskesmas Biromaru sebesar Rp44.919.940,00;
4. Puskesmas Dolo sebesar Rp21.103.940,00;
5. Puskesmas Tinggede sebesar Rp16.137.910,00;
6. Puskesmas Marawola sebesar Rp278.259.940,00;
7. Puskesmas Kaleke sebesar Rp89.973.940,00;
8. Puskesmas Baluase sebesar Rp 47.217.970,00;
9. Puskesmas Kinovaro sebesar Rp 25.643.880,00;
10. Puskesmas Dombusoi sebesar Rp 7.815.940,00;
11. Puskesmas Kamaipura sebesar Rp 8.297.970,00;
12. Puskesmas Pandere sebesar Rp 123.837.940,00;
13. Puskesmas Kulawi sebesar Rp 28.269.970,00;
14. Puskesmas Gimpu sebesar Rp 67.209.970,00;
15. Puskesmas Lindu sebesar Rp 13.219.940,00;
16. Puskesmas Kantewu sebesar Rp 11.250.140,00;
17. Puskesmas Towulu sebesar Rp 3.610.770,00;
18. Puskesmas Palolo sebesar Rp 48.207.970,00;
19. Puskesmas Banpres sebesar Rp 9.639.940,00;
20. Puskesmas Nokilalaki sebesar Rp 1.632.348,00;

21. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 4.060.000,00;
22. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebesar Rp 30.620.400,00;
23. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 2.462.793,00;
24. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 25.320.000,00;
25. Inspektorat Kab. Sigi sebesar Rp 704.745.000,00;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 1.285.200.000,00;
27. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp 73.128.000,00;
28. RSUD Torabelo Kabupaten Sigi sebesar Rp13.195.646.720,98.

    Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2025 disajikan dalam **lampiran 2**.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang dan Jasa disajikan dalam **lampiran 18**.

c. Utang Belanja Subsidi

Saldo Utang Belanja Subsidi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.333.481,00 dan Rp2.451.711,00. Utang Belanja Subsidi per 31 Desember 2025 merupakan utang subsidi pada program Pemerintah Kabupaten Sigi kerja sama dengan pihak perbankan atas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sigi.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Subsidi disajikan dalam **lampiran 18**.

d. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp225.928.075,00 dan Rp407.660.217,00. Terdapat penurunan sebesar Rp181.732.142,00 dibandingkan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam **lampiran 18**.

e. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp299.283.541,00 dan Rp194.903.000,00. Terdapat penambahan sebesar Rp104.380.541,00 atau naik 53,56 % dibandingkan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam **lampiran 18**.

f. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.084.000,00, tidak terdapat penambahan maupun pengurangan atas Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan dalam **lampiran 18**.

g. Utang Belanja Bantuan Keuangan

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp69.056.350,00 merupakan utang kepada BPJS Kesehatan terkait kewajiban pembayaran 1% iuran jaminan kesehatan aparat desa.

5.3.2.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.436.450,00 dan Rp16.811.424,00. Terdapat penambahan sebesar Rp5.625.026,00 atau naik 33,46 % dibandingkan Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2024. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

a. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan yang disalurkan oleh PT. PLN (Persero) Kepada Pemerintahan Kabupaten Sigi sebesar Rp 16.811.424,00;
b. Utang kekurangan realisasi atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Sigi yang dialokasikan berupa kegiatan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) Lingkungan Hidup sebesar Rp5.625.026,00.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.921.315.927.810,57 dan Rp1.969.786.578.201,87. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor **5.4.4**.

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Pemerintah Kabupaten Sigi menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 merupakan Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sigi yang disajikan dalam LPE adalah Rp1.969.786.578.201,86.

5.4.2 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional

Surplus/Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp29.352.295.198,39). Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan tersebut sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada poin **5.5.4**.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar	765.370.934,14	(62.864.200,00)
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	(22.345.294.254,19)	0,00
Koreksi Ekuitas atas Lainnya	(1.027.646.165,85)	(2.456.788.913,31)
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	3.489.214.293,00	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif	**(19.118.355.192,90)**	**(2.519.653.113,31)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban di antaranya yaitu:

a. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lancar yang disebabkan adanya Koreksi saldo awal Kas di Bendahara BOSP dan Koreksi saldo awal Persediaan;
b. Koreksi Ekuitas atas Perubahan atas Aset Tetap yang disebabkan adanya koreksi saldo awal aset tetap, Reklasifikasi aset tetap ke aset tetap ekstrakomptabel serta penghapusan aset tetap; dan
c. Koreksi Ekuitas atas Perubahan lainnya yang disebabkan adanya pelunasan utang jangka pendek lainnya.

5.4.4 Ekuitas Akhir

Berdasarkan perhitungan atas perubahan nilai ekuitas akhir yang diperoleh dari ekuitas awal, surplus laporan operasional, dan koreksi ekuitas. Maka nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp1.921.315.927.810,57. Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada poin **5.3.3**.

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang mencerminkan dalam berbagai unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban - LO, Surplus/defisit Kegiatan Operasional, Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional (bila ada), Pos Luar Biasa (bila ada), dan Surplus/defisit – LO suatu entitas pelaporan penyajian disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi Pendapatan – LO dan Beban - LO untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
c. Berdaya guna dalam memprediksi Pendapatan – LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah, dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
d. Kepada para pengguna laporan tentang indikasi efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
e. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sigi diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Penjelasan rinci Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sigi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 Pendapatan Daerah-LO

Pendapatan Daerah – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan tidak perlu dibayar kembali. Hak tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu

pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sigi selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 70
Rekapitulasi Pendapatan Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	112.383.647.982,15	91.306.932.881,52	21.076.715.100,63	23,08
Pendapatan Transfer-LO	946.364.139.768,60	1.097.772.387.805,00	(151.408.248.036,40)	(13,79)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	45.224.651.994,07	26.498.375.783,27	18.726.276.210,80	70,67
Jumlah Pendapatan Daerah-LO	**1.103.972.439.744,82**	**1.215.577.696.469,79**	**(111.605.256.724,97)**	**(9,18)**

Pada kondisi normal pengakuan pendapatan pada Laporan LRA sama dengan pengakuan pendapatan pada Laporan Operasional, namun pada akhir tahun anggaran terjadi kondisi yang menyebabkan transaksi diperlukan penyesuaian bertambah atau berkurang sehingga menyebabkan perbedaan antara Laporan LRA dan LO tersebut. Terhadap perbedaan tersebut akan dijelaskan pada pembahasan tambahan di setiap akun yang terdapat selisih.

5.5.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sigi selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 71
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan	%
Pajak Daerah-LO	46.334.342.633,18	36.624.448.444,50	9.709.894.190,68	26,51
Retribusi Daerah-LO	2.022.512.540,00	3.039.618.382,00	(1.017.105.842,00)	(33,46)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.337.214.390,00	2.092.871.872,00	244.342.518,00	11,67
Lain-lain PAD yang Sah-LO	61.689.578.418,97	49.549.994.185,02	12.139.584.233,95	24,50

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan	%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	112.383.647.982,15	91.306.932.881,52	21.076.715.100,63	23,08

Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp91.775.485.983,52 terjadi kenaikan sebesar Rp21.076.715.100,63 atau 23,08%. Penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut.

5.5.1.1.1 Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah pendapatan yang diakui ketika adanya realisasi kas diterima atau penetapan ketetapan, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau RKUD tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan ketetapan.

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat telah diterbitkannya ketetapan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO.

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp46.334.342.633,18. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp36.624.448.442,50 terjadi kenaikan sebesar Rp9.709.894.190,68 atau 26,51%. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 72
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Hotel-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran–LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Hiburan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame-LO	383.944.831,00	353.807.882,00	30.136.949,00	8,52
Pajak Penerangan Jalan-LO	0,88	0,00	0,88	100
Pajak Parkir-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah-LO	174.930.104,20	150.683.619,00	24.246.485,20	16,0
Pajak Sarang Burung Walet-LO	22.500.000,00	28.200.000,00	(5.700.000,00)	(20,21)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.571.975.865,10	6.271.603.844,50	(4.699.627.979,40)	(74,94)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	4.040.680.348,00	3.950.179.142,00	90.501.206,00	2,29
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	6.015.267.772,00	13.451.071.203,0	(7.435.803.431,00)	(55,28)
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	11.663.233.968,0	12.418.902.752,0	(755.668.784,00)	(6,08)
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	11.174.092.788,0	0,00	11.174.092.788,0	100
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	11.287.716.956,0	0,00	11.287.716.956,0	100
Jumlah Pajak Daerah - LO	**46.334.342.633,18**	**36.624.448.442,5**	**9.709.894.190,68**	**26,51**

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
    1. Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan dan perhitungan kembali atas sumber-sumber potensi pajak daerah diwilayah Kabupaten Sigi;
    2. Badan Pendapatan Daerah selaku perangkat daerah teknis pengelolaan pendapatan daerah melakukan optimalisasi dan secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi dengan pihak-pihak sumber pajak daerah.
b. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.941.123.467,18 (Rp46.334.342.633,18 - Rp44.393.219.166,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai
Selisih LO - LRA		**1.941.123.467,18**
Penjelasan Selisih:		
Pengurangan Pendapatan LO terhadap LRA		13.219.986,00
✓ Pelunasan piutang pajak reklame tahun 2024	13.219.986,00	
Penambahan Pendapatan LO terhadap LRA		1.954.343.452,18
✓ Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	642.939.003,10	
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.192.618.006,00	
✓ PBJT-Tenaga Listrik	118.716.318,00	
✓ Penambahan piutang pajak air tanah tahun 2024	70.125,20	
✓ Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,88	
Jumlah Selisih LO - LRA		**1.941.123.467,18**

5.5.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO diakui apabila SKPD/UKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.022.512.540,00 dan Rp3.039.618.382,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dibandingkan dengan 2024, maka terdapat penurunan sebesar Rp (1.017.105.842,00) atau 33,46%. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 73
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Jasa Umum-LO	**855.012.500,00**	**774.740.000,00**	**80.272.500,00**	**10,36**
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	30.555.000,00	25.441.000,00	5.114.000,00	20,10
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	125.263.000,00	96.190.000,00	29.073.000,00	30,22
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	699.194.500,00	617.359.000,00	81.835.500,00	13,26
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	35.750.000,00	(35.750.000,00)	(100,00)
Retribusi Jasa Usaha-LO	**565.436.541,00**	**691.134.082,00**	**(125.697.541,00)**	**(18,19)**
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	65.480.000,00	65.215.000,00	265.000,00	0,41
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	31.100.000,00	43.200.000,00	(12.100.000,00)	(28,01)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	232.666.541,00	218.619.082,00	14.047.459,00	6,43
Retribusi Penyeberangan di Air-LO	0,00	0,00	0,00	
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	236.190.000,00	364.100.000,00	(127.910.000,00)	(35,13)
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	**602.063.499,00**	**1.573.744.300,00**	**(971.680.801,00)**	**(61,74)**
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	602.063.499,00	1.573.744.300,00	(971.680.801,00)	(61,74)
Jumlah Retribusi Daerah - LO	**2.022.512.540,00**	**3.039.618.382,00**	**(1.017.105.842,00)**	**(33,46)**

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.022.512.540,00.
b. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
    1. Perubahan nilai penerimaan disebabkan tidak dilakukan pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak lagi kewenangan pemerintah daerah;
    2. Perubahan nilai penerimaan disebabkan pada akun Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO karena pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi melaksanakan amanat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri terkait dukungan program nasional 3 juta kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5.5.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.337.214.390,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Kabupaten Sigi (penerimaan dividen) diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca.

Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.337.214.390,00.

Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 berdasarkan penerimaan hak dividen yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sulteng dan telah diterima pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi.

5.5.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Kelompok penerimaan Lain - Lain PAD Yang Sah-LO merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain - Lain PAD Yang Sah-LO meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Lain - Lain PAD Yang Sah-LO pada umumnya berasal dari hasil perikatan.

Lain - Lain PAD Yang Sah-LO secara umum dapat diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya dokumen penagihan atau ketetapan. Dalam hal hak atas pendapatan diterima atau direalisasi tanpa penetapan, maka pendapatan LO diakui ketika hak diterima atau direalisasi.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum diukur sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat Tagihan / dokumen ketetapan lainnya / naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan. Pendapatan LO berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi.

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LO per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp61.689.578.418,97 dan Rp49.549.994.185,02. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp12.139.584.233,95 atau 24,50% Realisasi penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 74
Realisasi penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	173.896.800,00	0,00	173.896.800,00	100,00
Jasa Giro-LO	588.426.393,71	3.800.613.010,00	(3.212.186.616,29)	(84,52)
Pendapatan Bunga-LO	28.176.344,00	1.097.697.476,00	(1.069.521.132,00	(97,43)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	6.955.376.478,26	3.626.747.322,42	3.328.629.155,84	91,78
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	20.638.708,00	20.054.305,00	584.403,00	2,91
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.349.569.737,00	437.596.534,32	911.973.202,68	208,41
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	27.299.255,00	124.890.113,00	(97.590.858,00)	(78,14)
Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.408.896.438,00	739.488.241,28	2.669.408.196,72	360,98
Pendapatan dari BLUD-LO	48.429.449.965,00	39.702.907.183,00	8.726.542.782,00	21,98
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	707.848.300,00	0,00	707.848.300,00	100,00
Jumlah Lain - Lain PAD Yang Sah-LO	**61.689.578.418,97**	**49.549.994.185,02**	**12.139.584.233,95**	**24,50**

Penjelasan lebih lanjut Penerimaan Lain-lain PAD-LO Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

a. Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan terdapat perubahan pencatatan realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO

sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada poin **5.1.1.3.2**.

b. Pengakuan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang dalam LRA TA 2025 sebesar Rp9.497.446.360,59. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	
Selisih LO - LRA		**9.497.446.360,59**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan pada LO		**9.498.567.360,59**
✓ Selisih pencatatan atas penambahan dan pengurangan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.541.985.247,59	
✓ Selisih pencatatan pencatatan atas penambahan dan pengurangan piutang BLUD -LO	5.248.733.813,00	
✓ Pencatatan reklasifikasi Piutang FKTP yang sebelumnya tercatat pada Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LO	707.848.300,00	
Pengurangan pada LO		**(1.121.000,00)**
✓ Pencatatan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain yang menjadi pengurang atas nilai buku aset yang dijual dan tercatat pada Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO	(1.121.000,00)	
Jumlah Selisih LO - LRA		**9.497.446.360,59**

5.5.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Transfer (LO) merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan. Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp946.369.764.794,60. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp1.097.772.387.805,00, maka mengalami

penurunan sebesar (Rp151.402.623.010,40) atau (13,79%). Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 75
Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	887.331.280.710,0	1.035.792.461.163,00	(148.461.180.453,00)	(14,33)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	59.032.859.058,60	61.979.926.642,00	(2.947.067.583,40)	(4,75)
Jumlah Pendapatan Transfer - LO	**946.364.139.768,60**	**1.097.772.387.805,00**	**(151.408.248.036,40)**	**(13,79)**

5.5.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sigi selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
A. Dana Perimbangan-LO	**865.817.145.710,00**	**1.003.950.564.163,00**	**(138.133.418.453,00)**	**(13,76)**
• Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	50.872.068.500,00	(50.872.068.500,00)	(100,00)
• Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	655.819.930.339,00	(655.819.930.339,00)	(100,00)
• Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	144.946.300.321,0	(144.946.300.321,00	(100,00)
• Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	152.312.265.003,0	(69.916.724.021,00	(45,90)
• Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	60.373.769.084,00	0,00	60.373.769.084,00	100,00
• Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	633.151.507.541,00	0,00	633.151.507.541,00	100,00
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	16.091.875.982,00	0,00	16.091.875.982,00	100,00
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	156.199.993.103,00	0,00	156.199.993.103,00	100,00
B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya- LO	**21.514.135.000,00**	**31.841.897.000,00**	**(10.327.762.000,00)**	**(32,43)**
• Insentif Fiskal-LO	0,00	31.841.897.000,00	(31.841.897.000,00)	(100,00)
• Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	21.514.135.000,00	0,00	21.514.135.000,00	100,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO (A+B)	**887.331.280.710,00**	**1.035.792.461.163,00**	**(148.461.180.453,00)**	**(13,79)**

Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

a. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO pada Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2025 dari Tahun 2024 transfer pemerintah pusat mengalami penurunan dibandingkan TA 2024.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2025 sebesar Rp121.221.306.766,00. Hal tersebut disebabkan pencatatan realisasi Piutang TDF sebesar Rp2.186.385.000,00 yang mengurangi realisasi Pendapatan Transfer Pusat - Dana Bagi Hasil (DBH)-LO dan pencatatan penerimaan transfer Dana Desa sebesar Rppp119.034.921.766,00 yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyebutkan transfer pusat Dana Desa tidak dicatat pada Pendapatan Transfer – LO.

5.5.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sigi selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
A. Pendapatan Bagi Hasil-LO				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	20.235.356.808,25	7.637.060.564,00	12.598.296.244,25	164,96
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	161.216.305,00	8.958.150.446,00	(8.796.934.141,00)	(98,20)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	9.452.564.977,06	30.485.488.144,00	(21.032.923.166,94)	(68,99)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	14.313.484.834,29	561.766.087,00	13.751.718.747,29	2.447,94
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	14.675.861.160,00	14.237.461.401,00	438.399.759,00	3,08
B. Bantuan Keuangan				
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	94.374.974,00	100.000.000,00	(5.625.026,00)	(5,63)
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	**59.032.859.058,60**	**61.979.926.642,00**	**(2.947.067.583,40)**	**(4,75)**

Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

a. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan Pemerintah Kabupaten Sigi menerima Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan hadiah sebagai apresiasi atas pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi pada Tahun 2024, sesuai Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 910/17.83/Bid.II tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Biaya Hadiah Hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024.
b. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 untuk Pendapatan Bagi Hasil – LO berdasarkan:
    1. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor 900.1.14.3/27/BAPENDA.ST/2025 tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2025;
    2. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor 900.1.13.1/451/BAPENDA - G.ST/2025 tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2025.
c. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar (Rp1.141.842.550,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	
Selisih LO - LRA		
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LO		**13.418.915.826,00**
✓ Pelunasan Piutang DBH Provinsi TA. 2024	13.418.915.826,00	
Pengurangan Pendapatan LO		**(14.560.758.376,00)**
✓ Pencatatan Piutang DBH Provinsi TA 2025	(14.555.133.350,00)	
✓ Pencatatan Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	(5.625.026,00)	
Jumlah Selisih LO - LRA		**(1.141.842.550,00)**

5.5.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diakui pada saat hak diterima atau terealisasi berdasarkan dokumen penetapan pendapatan-LO terkait. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diukur berdasarkan pada nilai yang tercantum pada dokumen pendapatan-LO terkait.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp45.224.651.994,07. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp26.498.375.783,27, sehingga terdapat kenaikan sebesar 70,67%.

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp25.008.604.443,07 (Rp26.498.375.783,27 - Rp20.216.047.551,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	
Selisih LO - LRA		**25.008.604.443,07**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LO		
✓ Pencatatan Penambahan Piutang dan Penyisihan Piutang FKTP Tahun 2025	565.749.100,00	
✓ Pencatatan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	25.008.604.425,07	
✓ Pencatatan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi	18,00	
Total Penambahan	**25.574.353.543,07**	
Pengurangan Pendapatan LO		
✓ Pencatatan Pelunasan Piutang dan Penyisihan Piutang FKTP TA. 2024	(468.553.100,00)	
✓ Reklasifikasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD-LO ke Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO pada Puskesmas TA. 2024	(97.196.000,00)	
Total Pengurangan	**(565.749.100,00)**	

Uraian		Nilai
Jumlah Total Penambahan + Total Pengurangan		**25.008.604.443,07**

5.5.2 Beban Daerah

Beban Daerah Tahun 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti *listing* pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan Utang, reklasifikasi, kapitalisasi Belanja, Beban Dibayar di Muka, dan akun lainnya.

Beban Daerah Tahun 2025 sebesar Rp1.133.257.413.463,21 terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp947.296.855.896,32, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp106.201.245.201,89, Beban Transfer sebesar Rp74.814.623.965,00 dan Beban Tidak Terduga sebesar Rp4.944.688.400,00. Beban Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 8,07% atau sebesar Rp99.444.172.026,20 dari tahun sebelumnya. Beberapa penurunan Beban Daerah Tahun 2025 yang salah satunya disebabkan oleh penurunan Beban Bantuan Sosial sebesar 96,90% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan adanya mekanisme verifikasi pemberian bantuan sosial yang lebih selektif dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lebih rinci mengenai Beban Daerah Tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 76
Rekapitulasi Beban Daerah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Operasi		**947.296.855.896,32**	**1.001.812.651.416,41**	**(54.515.795.520,09)**	**(5,44)**
1	Beban Pegawai	580.934.465.482,00	547.590.556.019,00	33.343.909.463,00	6,09
2	Beban Barang dan Jasa	335.525.242.047,86	373.954.141.477,92	(38.428.899.430,06)	(10,28)
3	Beban Subsidi	2.199.945.127,00	2.450.817.950,00	(250.872.823,00)	(10,24)
4	Beban Hibah	26.547.165.846,00	70.491.912.244,00	(43.944.746.398,00)	(62,34)
5	Beban Bantuan Sosial	159.000.000,00	5.136.942.200,00	(4.977.942.200,00)	(96,90)
6	Beban Penyisihan Piutang	1.931.037.393,46	2.188.281.525,49	(257.244.132,03)	(11,76)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		**106.201.245.201,89**	**153.707.605.584,0**	**(47.506.360.382,11)**	**(30,91)**
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.902.907.967,41	46.047.058.728,99	(9.144.150.761,58)	(19,86)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.910.003.945,75	20.214.187.758,18	3.695.816.187,57	18,28
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	43.557.123.615,08	85.912.247.036,83	(42.355.123.421,75)	(49,30)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	32.909.075,01	0,00	32.909.075,01	100,00
5	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.798.300.598,64	1.534.112.060,00	264.188.538,64	17,22
Beban Transfer		**74.814.623.965,00**	**73.268.582.580,00**	**1.546.041.385,00**	**1,07**
1	Beban Bagi Hasil	4.977.492.764,00	3.124.684.980,00	1.852.807.784,00	59,30
2	Beban Bantuan Keuangan	69.073.963.308,00	70.143.897.600,00	(1.069.934.292,00)	(1,53)
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	763.167.893,00	0,00	763.167.893,00	100,00
Beban Tidak Terduga		**4.944.688.400,00**	**3.912.745.909,00**	1.031.942.491,00	26,37
1	Beban Tidak Terduga	4.944.688.400,00	3.912.745.909,00	1.031.942.491,00	26,37
Jumlah Beban Daerah		**1.133.257.413.463,21**	**1.232.701.585.489,41**	**(99.444.172.026,20)**	**(8,07)**

5.5.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada Tahun 2025 yang direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2025 dan 2024, Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024, koreksi lebih/kurang catat utang Tahun 2024, reklasifikasi Belanja Modal dan Aset Tetap ke Beban Operasi, kapitalisasi belanja ke Aset Tetap dan akun-akun terkait lainnya.

Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp947.296.855.896,32 terdiri dari beban berikut ini.

5.5.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp580.934.465.482,00 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai Tahun 2025 yang diperhitungkan dengan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024. Apabila dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp547.590.556.019,00, terjadi kenaikan sebesar Rp33.343.909.463,00 atau 6,09%. Lebih rinci mengenai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 77
Rekapitulasi Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	456.886.880.280,00	409.308.135.035,00	47.578.745.245,00	11,62
Beban Tambahan Penghasilan ASN	112.208.345.411,00	35.801.168.342,00	76.407.177.069,00	213,42
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	86.826.745.329,00	(86.826.745.329,00)	(100,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	10.543.708.290,00	12.541.615.684,00	(1.997.907.394,00)	(15,93)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	491.601.501,00	417.488.963,00	74.112.538,00	17,75
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	498.280.000,00	588.266.666,00	(89.986.666,00)	(15,30)
Beban Pegawai BLUD	305.650.000,00	2.107.136.000,00	(1.801.486.000,00)	(85,49)
Jumlah Beban Pegawai	**580.934.465.482,00**	**547.590.556.019,00**	**33.343.909.463,00**	**6,09**

Kenaikan realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2025 apabila dibandingkan dengan Tahun anggaran 2024 disebabkan bertambahnya jumlah Aparatur Sipil Negara dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp159.014.556,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pegawai dalam LO, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pencatatan penambahan Utang Belanja Pegawai atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang belum dibayarkan ke penerima sebesar Rp154.934.556,00;
b. Pencatatan penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD yang belum dibayarkan ke penerima sebesar Rp4.080.000,00.

5.5.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sigi selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 78
Rekapitulasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Barang	76.409.815.261,79	109.381.982.736,89	(32.972.167.475,10)	(30,14)
Beban Jasa	118.705.231.606,06	109.613.722.881,34	9.087.151.870,72	8,29
Beban Pemeliharaan	19.650.621.158,00	17.810.867.306,00	1.839.753.852,00	10,33
Beban Perjalanan Dinas	46.913.143.942,00	57.202.880.779,16	(10.289.736.837,16)	(17,99)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.198.227.134,00	10.661.542.600,00	(2.463.315.466,00)	(23,10)
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	25.023.441.725,00	(25.023.441.725,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BOSP	23.111.097.135,01	0,00	23.111.097.135,01	100,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	42.537.105.811,00	44.259.703.449,53	(1.722.597.638,53)	(3,89)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**335.525.242.047,86**	**373.954.141.477,92**	**(38.433.256.284,06)**	**(10,28)**

Penjelasan lebih rinci perihal realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 sebagai berikut:

c. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   1. Pencatatan saldo persediaan hasil stok opname Tahun 2025;
   2. Peningkatan realisasi atas barang dan jasa bersumber dana BOSP dan BLUD Tahun 2025.

d. Terdapat perubahan nomenklatur rekening Beban Barang dan Jasa BOS - LO menjadi rekening Beban Barang dan Jasa BOSP – LO di Tahun 2025.

e. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp3.772.513.219,36 (Rp335.525.242.047,86 - Rp331.752.728.828,50). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	
Selisih LO - LRA		**3.772.513.219,36**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Beban LO		
✓ Mencatat Jurnal Pemakaian Saldo Awal Persediaan	25.103.329.652,27	
✓ Mencatat Jurnal Penyesuaian atas Penambahan Utang Belanja Barang dan Jasa	16.123.429.442,00	
✓ Pencatatan Reklasifikasi dari Aset Tetap	5.176.309.927,00	
✓ Pencatatan Reklasifikasi dari Aset Tetap Ekstrakomtabel	185.302.114,00	
✓ Pencatatan Penyelesaian Beban dari Sewa Dibayar Dimuka	1.749.099.386,86	
Total Penambahan	**48.337.470.522,13**	
Pengurangan Beban LO		
✓ Pencatatan Saldo Akhir Persediaan	(21.708.947.823,56)	
✓ Pencatatan Pelunasan Utang Belanja	(13.794.894.382,00)	
✓ Pencatatan Reklasifikasi Ke Aset Tetap	(5.309.531.911,00)	
✓ Pencatatan Beban dari Sewa Dibayar Dimuka	(286.344.735,80)	
✓ Pencatatan Reklasifikasi Persediaan Obat Kadaluwarsa	(763.167.893,00)	
Total Pengurangan	**(41.862.886.745,36)**	
Jumlah Total Penambahan + Total Pengurangan		**3.772.513.219,36**

5.5.2.1.3 Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun 2025 sebesar Rp2.199.945.127,00. Nilai tersebut telah direkonsiliasi dengan utang belanja subsidi Tahun 2025 dan 2024. Apabila dibandingkan dengan Beban Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp2.450.817.950,00, terjadi penurunan sebesar (Rp250.872.823,00) atau turun 10,24%. Beban Subsidi Tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 79
Rekapitulasi Beban Subsidi Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Subsidi kepada BUMN	1.999.957.300,00	0,00
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	199.987.827,00	2.450.817.950,00
Jumlah Beban Subsidi	**2.199.945.127,00**	**2.450.817.950,00**

Perubahan nilai Beban Subsidi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

a. Realisasi Beban Subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dalam rangka pemenuhan target realisasi 10 (sepuluh) program unggulan daerah serta pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan sosial ke masyarakat. Pada Tahun 2024 meningkatkan program operasi pasar dalam rangka menjaga daya beli masyarakat Kabupaten Sigi terhadap barang-barang kebutuhan pokok.
b. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sigi merealisasikan Beban Subsidi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan dalam Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sigi sebesar Rp199.987.827,00;
2. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pelaksanaan pasar murah menyambut hari raya keagamaan sebesar Rp1.999.965.500,00.

Pengakuan Beban Subsidi dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Subsidi dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.199.945.127,00.

5.5.2.1.4 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp26.616.412.846,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp70.491.912.244,00, terjadi penurunan sebesar (Rp43.875.499.398,00) atau turun 62,24%.

Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp26.616.412.846,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 80
Rekapitulasi Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.573.574.000,00	59.280.156.428,00	(48.706.582.428,00)	(82,16)
Beban Hibah Dana BOS	0,00	5.186.630.700,00	(5.186.630.700,00)	(100,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	475.548.966,00	416.854.116,00	58.694.850,00	14,08
Beban Hibah Dana BOSP	12.654.442.880,00	5.608.271.000,00	7.046.171.880,00	125,64
Beban Hibah Uang kepada Usaha Mikro	2.843.600.000,00	0,00	2.843.600.000,00	100,00
Jumlah Beban Hibah	**26.547.165.846,00**	**70.491.912.244,00**	**(43.944.746.398,00)**	**(62,34)**

Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

a. Pada Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan penganggaran dan realisasi Beban Hibah disebabkan pada tahun 2024 terdapat realisasi Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD),

Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (BAWASLUDA), TNI dan POLRI dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.

b. Peningkatan realisasi terdapat pula pada Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang merupakan pencatatan atas penerimaan dan belanja bersumber dana BOSP pada sekolah swasta.

c. Pada Tahun Anggaran 2025 terjadi peningkatan penganggaran dan realisasi Beban Hibah Uang kepada Usaha Mikro yang tidak berbadan hukum sebagai pelaksanaan bantuan modal usaha kepada masyarakat untuk usaha mikro diwilayah Kabupaten Sigi.

5.5.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp159.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp5.136.942.200,00, terjadi penurunan sebesar (Rp4.977.942.200,00) atau turun 96,90%. Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 81
Rekapitulasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	159.000.000,00	138.000.000,00	21.000.000,00	15,22
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00	4.998.942.200,00	(4.998.942.200,00)	(100,00)
Jumlah Beban Bantuan Sosial	**159.000.000,00**	**5.136.942.200,00**	**(4.977.942.200,00)**	**(96,90)**

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2025 Rp159.000.000,00.

5.5.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan piutang.

Penentuan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penelitiannya dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp1.931.037.393,46. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp2.188.281.525,49, terjadi penurunan sebesar (Rp257.244.132,03) atau turun 11,76%. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp1.931.037.393,46 dirinci per jenis piutang sebagai berikut.

Tabel 82
Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	954.803.098,21	761.145.472,01
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31.707.515,56	6.237.317,62
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	944.526.779,69	1.420.898.735,86
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	**1.931.037.393,46**	**2.188.281.525,49**

Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

a. Terdapat penambahan nilai penyisihan piutang pada piutang pajak daerah dan Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun 2025;
b. Terdapat pengurangan nilai penyisihan piutang yang disebabkan pelunasan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2025 pada piutang PBBP2, piutang pendapatan BLUD dan piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

5.5.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp106.201.245.201,89 terdiri dari beban berikut ini.

Tabel 83
Rekapitulasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.902.907.967,41	46.047.058.728,99
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.910.003.945,75	20.214.187.758,18
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	43.557.123.615,08	85.912.247.036,83
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	32.909.075,01	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.798.300.598,64	1.534.112.060,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**106.201.245.201,89**	**153.707.605.584,00**

Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2025 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada Poin **5.3.1.3.7** dan rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada Poin **5.3.1.4.5.**

5.5.3 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban transfer berdasarkan klasifikasi ekonomi timbul dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa serta Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD). Pencatatan beban transfer seluruhnya tercatat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sigi selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang bertugas mengelola keuangan daerah dan berfungsi sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah).

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sigi selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 84
Rekapitulasi Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Bagi Hasil	4.977.492.764,00	3.124.684.980,00	1.852.807.784,00	59,30
Beban Bantuan Keuangan	69.073.963.308,00	70.143.897.600,00	(1.069.934.292,00)	(1,53)
Jumlah Beban Transfer	**74.051.456.072,00**	**73.268.582.580,00**	**782.873.492,00**	**1,07**

5.5.3.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sigi selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 85
Rekapitulasi Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.645.979.559,00	2.835.557.175,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	331.513.205,00	289.127.805,00
Jumlah Beban Bagi Hasil	**4.977.492.764,00**	**3.124.684.980,00**

Penjelasan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

a. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan pencapaian realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2025 yang mengalami kenaikan dari Tahun 2024 sehingga berdasarkan pada Peraturan Bupati Sigi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 disalurkan

dalam bentuk Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 176 Pemerintah Desa.

b. Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp4.977.492.764,00.

5.5.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sigi selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 sebesar Rp69.073.963.308,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp70.143.897.600,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.069.934.292,00 atau turun 1,53%. Hal ini disebabkan terdapat penurunan dari dasar perhitungan penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025 berdasarkan nilai 10% dari total pendapatan transfer selain Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025.

Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2025 sebesar (Rp118.965.865.416,00) = (Rp69.073.963.308,00 - Rp188.039.828.724,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, terkait pengakuan pengeluaran Beban Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan bukan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menjelaskan Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.5.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp763.167.893,00 merupakan implementasi pengungkapan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan Paragraf 25 tentang pengungkapan barang persediaan untuk kategori rusak diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah.

5.5.4 Beban Tidak Terduga

Beban Tak Terduga tahun 2025 sebesar Rp4.944.688.400,00 merupakan realisasi atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial dan belanja lainnya yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Beban Tak Terduga tahun 2025 mengalami peningkatan dari Beban Tak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp3.912.745.909,00 sebesar 26,37%.

Pengakuan Beban Tidak Terduga dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2025 sebesar Rp 4.944.688.400,00.

5.5.5 Kegiatan Non Operasional

Kelompok kegiatan non operasional terdiri dari Surplus Non Operasional dan Beban Non Operasional yang dihasilkan dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban Pemerintah Kabupaten Sigi. Pengakuan Surplus Non Operasional merupakan surplus yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih besar daripada nilai bukunya. Sedangkan pengakuan Defisit Non Operasional merupakan defisit yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih kecil daripada nilai bukunya.

5.5.5.1 Defisit Non Operasional-LO

Selama periode tahun 2025 terdapat pencatatan pengakuan Defisit Non Operasional-LO atas Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp67.321.480,00. Nilai realisasi yang disajikan berdasarkan perhitungan Harga Perolehan BMD, Akumulasi Penyusutan dan Pendapatan atas Hasil Penjualan BMD sehingga menghasilkan Defisit Non Operasional-LO.

5.5.6 Pos Luar Biasa

Transaksi atau kejadian luar biasa yang termuat pada Pos Luar Biasa memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
c. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pada Pos Luar Biasa menggambarkan pendapatan luar biasa dan beban luar biasa yang diperhitungkan oleh pemerintah daerah sehingga menghasilkan nilai Surplus/(Defisit) LO, pada tahun 2025 saldo Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Sigi adalah nihil.

5.5.7 Surplus/(Defisit) – LO

Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 adalah sebesar (Rp29.352.295.198,39). Perhitungan Surplus/(Defisit) – LO adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025
Kegiatan Operasional	
➢ **Pendapatan Daerah - LO**	
✓ Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	112.383.647.982,15
✓ Pendapatan Transfer – LO	946.364.139.768,60
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	45.224.651.994,07
➢ **Beban Operasional**	
✓ Beban Operasional	947.296.855.896,32
✓ Beban Penyusutan dan Amortisasi	106.201.245.201,89
✓ Beban Transfer	74.814.623.965,00
✓ Beban Tidak Terduga	4.944.688.400,00
➢ **Surplus/Defisit Dari Operasi**	**(29.284.973.718,39)**
Kegiatan Non Operasional	
➢ **Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional**	**(67.321.480,00)**
Pos Luar Biasa	
✓ **Beban Luar Biasa**	0,00
Surplus/(Defisit) - LO	**(29.352.295.198,39)**

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada Poin **5.4.2**.

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan

Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Sigi untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Sigi mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp1.189.713.396.989,98 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp1.139.408.132.945,50 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.305.264.044,48.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan, Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID), dan Penerimaan Hibah. (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Tak Terduga.

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Sigi selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 86
Arus Kas Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	44.393.219.166,00	35.118.053.979,00
b.	Penerimaan Retribusi Daerah	2.022.512.540,00	3.039.618.382,00
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.337.214.390,00	2.092.871.872,00
d.	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	52.017.114.258,38	44.573.648.045,39
e.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.008.552.587.476,00	1.256.834.631.489,00
f.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.174.701.608,60	52.890.241.457,00
g.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
h.	Dana Darurat	0,00	0,00
i.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.216.047.551,00	15.601.439.455,05
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi (I)		**1.189.713.396.989,98**	**1.410.150.504.679,40**
2	**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi**		
a.	Belanja Pegawai	580.775.450.926,00	547.590.556.019,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	331.752.728.828,50	380.749.475.902,16
c.	Belanja Bunga	0,00	-
d.	Belanja Subsidi	2.199.945.127,00	2.450.817.950,00
e.	Belanja Hibah	26.547.165.846,00	69.417.912.244,00
f.	Belanja Bantuan Sosial	159.000.000,00	5.136.942.200,00
g.	Belanja Imbalan	0,00	-
h.	Belanja Tidak Terduga	4.944.688.400,00	3.912.745.909,00
i.	Belanja Bagi Hasil	4.977.492.764,00	3.124.684.980,00
j.	Belanja Bantuan Keuangan	188.039.828.724,00	224.638.533.926,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi (II)		**1.139.396.300.615,50**	**1.237.021.669.130,16**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (I – II)		**50.317.096.374,48**	**173.128.835.549,28**

5.6.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

5.6.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp44.393.219.166,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.275.165.187,00 atau naik 26,41% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp35.118.053.979,00. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor **5.1.1.1.1**.

5.6.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.022.512.540,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp1.017.105.842,00) atau turun 33,46% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp3.039.618.382,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor **5.1.1.1.2**.

5.6.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.337.214.390,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp244.342.518,00 atau naik 11,67% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.092.871.872,00. Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor **5.1.1.1.3**.

5.6.1.1.4 Penerimaan Lain - lain PAD yang sah

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD yang Sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp52.017.114.258,38. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.443.466.212,99 atau naik 16,70% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp44.573.648.045,39. Rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada CaLK nomor **5.1.1.1.4**.

5.6.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp62.560.154.084,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp54.859.448.416,00) atau turun 46,72% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp117.419.602.500,00.

5.6.1.1.6 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp633.151.507.541,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp22.668.422.798,00) atau turun 3,46% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp655.819.930.339,00.

5.6.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus – Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp16.091.875.982,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp128.854.424.339,00) atau turun 88,90% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus – Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp144.946.300.321,00.

5.6.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus – Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp156.199.993.103,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.887.728.100,00 atau naik 2,55% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus – Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp152.312.265.003,00.

5.6.1.1.9 Penerimaan Dana Desa

Arus kas masuk dari Dana Desa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp119.034.921.766,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp35.459.714.560,00) atau turun 22,95% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Desa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp154.494.636.326,00.

5.6.1.1.10 Penerimaan Insentif Fiskal

Arus kas masuk dari Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp21.514.135.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp10.327.762.000,00) atau turun 32,43% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp31.841.897.000,00.

5.6.1.1.11 Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi

Arus kas masuk dari Bagi Hasil dari Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp59.974.701.608,60. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.184.460.151,60 atau naik 13,61% jika dibandingkan dengan arus kas

masuk dari Bagi Hasil dari Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp52.790.241.457,00. Rincian penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi disajikan pada CaLK nomor **5.1.1.2.3**.

5.6.1.1.12 Penerimaan Bantuan Keuangan

Arus kas masuk dari Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp200.000.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp100.000.000,00 atau naik 100% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp100.000.000,00. Rincian penerimaan Bantuan Keuangan disajikan pada CaLK nomor **5.1.1.2.3**.

5.6.1.1.13 Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Arus kas masuk dari Pendapatan Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp20.216.047.551,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.614.608.095,95 atau naik 29,58% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pendapatan Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp15.601.439.455,05. Rincian penerimaan Pendapatan Lainnya disajikan pada CaLK nomor **5.1.1.3**.

5.6.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

5.6.1.2.1 Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2025.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp580.775.450.926,00. Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp33.184.894.907,00 atau naik 6,06% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp547.590.556.019,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Pegawai disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.1.1**.

5.6.1.2.2 Pembayaran Barang dan Jasa

Pembayaran Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Barang dan Jasa pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp331.752.728.828,50. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp48.996.747.073,66) atau turun 12,87% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Barang dan Jasa pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp380.749.475.902,16. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Barang dan Jasa disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.1.2**.

5.6.1.2.3 Pembayaran Subsidi

Pembayaran Subsidi merupakan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Subsidi pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp2.199.945.127,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp250.872.823,00) atau turun 10,24% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Subsidi pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.450.817.950,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Subsidi disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.1.3**.

5.6.1.2.4 Pembayaran Belanja Hibah

Pembayaran Hibah merupakan jumlah yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp26.547.165.846,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp42.870.746.398,00) atau turun 61,76% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar

Rp69.417.912.244,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Hibah disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.1.4**.

5.6.1.2.5 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2025. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp159.000.000,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp4.977.942.200,00) atau turun 96,90% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp5.136.942.200,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Bantuan Sosial disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.1.5**.

5.6.1.2.6 Pembayaran Tak Terduga

Arus kas keluar untuk Pembayaran Tak Terduga pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp4.944.688.400,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 1.031.942.491,00 atau naik 26,37% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Tak Terduga pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp3.912.745.909,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Tak Terduga disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.3**.

5.6.1.2.7 Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota

Arus kas keluar untuk Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp4.977.492.764,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.852.807.784,00 atau naik 59,30% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp3.124.684.980,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.4.1**.

5.6.1.2.8 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa

Arus kas keluar untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp188.039.828.724,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp36.598.705.202,00) atau turun 16,29% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp224.638.533.926,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.4.2**.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Sigi di masa yang akan datang. Selama periode Tahun 2025 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp175.017.800,00 dan terdapat arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp65.925.778.299,50 sehingga terdapat penurunan arus kas bersih sebesar (Rp65.750.760.499,50). Sedangkan selama periode Tahun 2024 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp0,00 dan terdapat arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp203.993.787.011,00 sehingga terdapat penurunan arus kas bersih sebesar (Rp203.993.787.011,00).

Arus Kas Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Sigi selama tahun 2025 dan 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 87
Arus Kas Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi**		
a.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	173.896.800,00	0,00
b.	Penjualan Aset Lain-lain	1.121.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi (I)		**175.017.800,00**	**0,00**
2	**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi**		
a.	Perolehan Tanah	0,00	982.534.000,00
b.	Perolehan Peralatan dan Mesin	21.994.787.775,00	31.566.114.816,00
c.	Perolehan Gedung dan Bangunan	18.544.762.808,50	67.896.098.558,00
d.	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.453.774.146,00	98.114.695.523,00
e.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.743.677.970,00	5.170.359.809,00
f.	Perolehan Aset Lainnya	188.775.600,00	263.984.305,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi (II)		**65.925.778.299,50**	**203.993.787.011,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (I – II)		**(65.750.760.499,50)**	**(203.993.787.011,00)**

5.6.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

5.6.2.1.1 Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Arus kas masuk dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp173.896.800,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar 100%, hal ini disebabkan pada Tahun 2024 tidak terdapat Arus kas masuk dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin. Rincian penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin disajikan pada CaLK nomor **5.1.1.1.4**.

5.6.2.1.2 Penjualan Aset Lain-lain

Arus kas masuk dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.121.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar 100%, hal ini disebabkan pada Tahun 2024 tidak terdapat Arus kas masuk dari Penjualan atas Aset Lain-Lain. Rincian penerimaan Penjualan atas Aset Lain-Lain disajikan pada CaLK nomor **5.1.1.1.4**.

5.6.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

5.6.2.2.1 Perolehan Tanah

Arus kas keluar untuk Perolehan Tanah pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar 100% jika

dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Perolehan Tanah pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp982.534.000,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi atas Perolehan Tanah disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.2.1**.

5.6.2.2.2 Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus kas keluar untuk Perolehan Peralatan dan Mesin pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp21.994.787.775,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp9.571.327.041,00) atau turun 30,32% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Perolehan Peralatan dan Mesin pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp31.566.114.816,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi atas Perolehan Peralatan dan Mesin disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.2.2**.

5.6.2.2.3 Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus kas keluar untuk Perolehan Gedung dan Bangunan pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp18.544.762.808,50. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp49.351.335.749,50) atau turun 70,69% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Perolehan Gedung dan Bangunan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp67.896.098.558,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi atas Perolehan Gedung dan Bangunan disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.2.3**.

5.6.2.2.4 Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Arus kas keluar untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp19.453.774.146,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp78.660.921.377,00) atau turun 80,17% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp98.114.695.523,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi atas Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.2.4**.

5.6.2.2.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus kas keluar untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.743.677.970,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp573.318.161,00 atau naik 11,09% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk

Perolehan Aset Tetap Lainnya pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp5.170.359.809,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi atas Perolehan Aset Tetap Lainnya disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.2.5**.

5.6.2.2.6 Perolehan Aset Lainnya

Arus kas keluar untuk Perolehan Aset Lainnya pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp188.775.600,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp75.208.705,00) atau turun 28,49% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Perolehan Aset Lainnya pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp263.984.305,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi atas Perolehan Aset Lainnya disajikan pada CaLK nomor **5.1.2.2.6**.

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Selama Tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan maupun arus kas keluar dari aktivitas pendanaan.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening umum Negara/daerah.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten

Sigi untuk Tahun 2025. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Sigi selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 88
Arus Kas Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris**		
a.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	47.316.483.472,00	45.393.706.486,00
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris (I)	**47.316.483.472,00**	**45.393.706.486,00**
2	**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris**		
a.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	47.316.483.472,00	45.393.706.486,00
b.	Koreksi PFK tahun sebelumnya	486.970.036,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris (II)	**47.316.483.472,00**	**45.393.706.486,00**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (I – II)	**(486.970.036,00)**	**0,00**

5.6.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris dalam Laporan Arus Kas (LAK) merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp47.316.483.472,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sementara itu, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp45.393.706.486,00.

Tabel 89
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Kas Di Kas Daerah – Potongan PFK
➢ **Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	
✓PPh Pasal 21	352.474,00
✓PPh Pasal 22	409.284,00
✓PPh Pasal 23	31.030.011,00
✓PPh Pasal 4 ayat (2)	4.792.286,00
✓PPN	1.398.572.517,00
✓Iuran Jaminan Kesehatan	43.514.758.594,00
✓Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	591.709.420,00
✓Iuran Jaminan Kematian	1.774.858.886,00
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	**47.316.483.472,00**

5.6.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris dalam Laporan Arus Kas (LAK) merupakan pengeluaran atas penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp47.803.453.508,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran atas potongan pajak dan potongan-potongan lain serta koreksi atas PFK tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran atas penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp45.393.706.486,00.

Tabel 90
Pengeluaran Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Kas Di Kas Daerah – Potongan PFK
➢ **Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	
✓PPh Pasal 21	352.474,00
✓PPh Pasal 22	409.284,00
✓PPh Pasal 23	31.030.011,00
✓PPh Pasal 4 ayat (2)	4.792.286,00
✓PPN	1.398.572.517,00
✓Iuran Jaminan Kesehatan	43.514.758.594,00
✓Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	591.709.420,00
✓Iuran Jaminan Kematian	1.774.858.886,00
➢ **Koreksi PFK tahun sebelumnya**	486.970.036,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	**47.803.453.508,00**

5.6.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, maka terdapat penurunan kas bersih sebesar (Rp15.920.634.161,02) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025. Dengan total Saldo awal kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD dan Kas Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp39.587.850.026,74, serta terdapat koreksi SILPA tahun lalu sebesar Rp11.139.652,00 maka saldo akhir total kas di akhir kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD, dan Kas Lainnya menjadi sebesar Rp23.678.355.517,72. Penjelasan lebih lanjut terkait kas tersebut disajikan pada CaLK nomor **5.3.1.1.1**.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada Poin **5.1.4** di atas.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Sigi terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Donggala. Dalam masa penjajahan, wilayah Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah pemerintahan raja-raja yang berkuasa di lembah Palu yaitu Kerajaan Sigi Dolo yang pusat pemerintahannya berkedudukan di Bora. Pemerintah Belanda menguasai wilayah ini setelah melakukan peperangan yang dikenal dengan perang Sigi Dolo. Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya aspirasi serta keinginan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Donggala, sebagai konsekuensi atas tuntutan dan nuansa ekonomi daerah maka perjuangan untuk membentuk sebuah kabupaten diawali dengan:

a. Terbentuknya Forum Komunikasi Pemekaran Kabupaten melalui SK pengurus Nomor 09/FKKP/VII/2003 tanggal 26 Juli 2003 yang terdiri dari Ketua Drs. H. Habir Ponulele, MM dibantu 3 orang Wakil Ketua dan Sekretaris Nurzain, SH dibantu 3 orang Wakil serta beberapa bidang;
b. Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0437/Bag.Pem tanggal 11 September 2003; dan
c. Memorandum DPRD Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 29 Oktober 2003.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi dan disahkan pada tanggal 21 Juli 2008, bekas wilayah Kerajaan Sigi Dolo ini resmi menjadi Kabupaten Sigi dengan 16 wilayah kecamatan, 176 desa, dan 1 (satu) Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Domisili kantor Pemerintah Kabupaten Sigi berada di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dikelompokkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pemerintah

Kabupaten Sigi melaksanakan 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 15 (lima belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 3 (tiga) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan kabupaten, dan 1 (satu) urusan pemerintahan umum.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

a. Urusan pemerintahan bidang pendidikan;
b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
d. Urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan pemukiman;
e. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat;
f. Urusan pemerintahan bidang sosial.

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

a. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
b. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
c. Urusan pemerintahan bidang pangan;
d. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
e. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
f. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
g. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
h. Urusan pemerintahan bidang perhubungan;
i. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika:
j. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
k. Urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
l. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
m. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
n. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan;

o. Urusan pemerintahan bidang kearsipan.

Urusan pilihan meliputi:

a. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
b. Urusan pemerintahan bidang pariwisata;
c. Urusan pemerintahan bidang pertanian;
d. Urusan pemerintahan bidang perdagangan;
e. Urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
f. Urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

6.3 Penggunaan Aplikasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan satu aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah digunakan secara penuh dari proses perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tanpa menggunakan aplikasi pendamping. Selain itu, untuk pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Elektronik Barang Milik Daerah (SIPD e-BMD).

6.4 Struktur Organisasi dan Formasi Pegawai

Pada tanggal 14 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Sigi secara serentak bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tertanggal 14 Februari 2025 mengesahkan Bupati dan Wakil Bupati Sigi terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2030, yaitu **Bapak Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si** dan **Bapak Dr. Samuel Yansen Pongi, SE., M.Si**.

Untuk melaksanakan tugas pemerintahan, Bupati/Wakil Bupati dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sampai dengan laporan keuangan ini disampaikan, struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sigi ditetapkan dengan susunan kelembagaan yang terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari 21 (dua puluh satu) Dinas Daerah;
d. Inspektorat Daerah, 6 (enam) Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja;
e. 1 (satu) UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo; dan
f. Kantor Kecamatan, terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan.

Nama OPD dan Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 91
Daftar OPD dan Kepala OPD Se-Kabupaten Sigi Tahun 2025

No.	Nama OPD	Kepala OPD
1	Sekretaris Daerah	Drs. Nuim Hayat, MM
	a. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Panji Prakoso, S.STP., M.Si
	b. Bagian Administrasi Pembangunan	Wahyudin, SE
	c. Bagian Hukum	Rusdin,SH
	d. Bagian Organisasi	Arif, SH., M.Si
	e. Bagian Perlengkapan Umum	Sucianti, S.Sos., M.Si
	f. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Ferdi Rangan, SE
	g. Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Moh. Sudirman Indra Dwi Putra, S.ST
	h. Bagian Perencanaan dan Keuangan	Diah Seftiarina, S.STP.,M.A.P
	i. Bagian Pemerintahan	Andi Rachman Djaini, S.STP., M.AP
	j. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Eko Sugiarto Hanapi, ST., MPWP
2	Sekretariat DPRD	Tony W Ponulele, S.Sos., M.Si
3	Inspektorat Kabupaten	Andi Wulur, SH., M.AP
4	Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo	Dr. Diah Ratnaningsih
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Mohamad Ambar Mahmud, SSTP., M. Si
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hajar Modjo. SE., MM
7	Dinas Kesehatan	Dr. Trieko Stefanus Larope
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	Ma'mun Maragau, S.Sos., MM
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Edy Dwi Saputro, ST
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Amrin, ST., MT
11	Dinas Perhubungan	Andi Ilham, S.Sos., MM
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Samsir, S.Kom., M.Si

No.	Nama OPD	Kepala OPD
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ummi Asnita, S.Sos., M.Si
14	Dinas Sosial	Ariyanto, S.STP
15	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Febrianto, S.STP., M.Si
16	Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Selvy, SH
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Imran Noor, SH
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Mohamad Akib,S.Pt
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Rolly, SE
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Riadin, S.Sos., M.Si
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mamun Maragau, S.Sos., MM
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dodot Tinarso, S.Sos.,MT
23	Dinas Lingkungan Hidup	Heru Murtanto, S.Pd
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ihsan, S.Pt
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Miar Permana Arifiyanto, S.P., M.Si
26	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Mohamad Afit, ST,M.Si
27	Dinas Pariwisata	Jufrin, S.Sos
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Agus Munandar, S.Sos., M.Si
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Syafrudin, SE
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mahmud, SE., MM
31	Badan Pendapatan Daerah	Roland Franklin, S.STP., M.Si
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Henri Kusuma Rombe, ST., MT
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Mohamad Riyadh, SE
34	Kecamatan Sigi Biromaru	Muhaimin, S. Ag
35	Kecamatan Palolo	Syukur, S.Sos., M.Si
36	Kecamatan Dolo	Mohamad Ali, S.Pt
37	Kecamatan Dolo Barat	Alinurdin, S.Sos
38	Kecamatan Dolo Selatan	Yahya, S.Ag
39	Kecamatan Kinovaro	Sudarto,S.Pd
40	Kecamatan Marawola	Mohammad Nur, S.Sos
41	Kecamatan Marawola Barat	Eben, S.Sos
42	Kecamatan Tanambulava	Suaib, S.S., MM
43	Kecamatan Gumbasa	Afif, S.Sos.,MM
44	Kecamatan Nokilalaki	Mikail, S.Sos., M.Si
45	Kecamatan Lindu	Sembulon, SE
46	Kecamatan Pipikoro	Oskar Welsi, S.Sos
47	Kecamatan Kulawi	Guntur Yunius Djiloy,SH

No.	Nama OPD	Kepala OPD
48	Kecamatan Kulawi Selatan	Dedi, SE
49	Kecamatan Sigi Kota	Alex, S.Pdi

Terkait formasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi per 31 Desember 2025 secara keseluruhan berjumlah 10.520 orang. Rincian formasi pegawai negeri sipil berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 92
Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara Per Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	32	5	37
Administrator	136	39	175
Pengawas	128	85	213
Jabatan Fungsional Guru	779	2.201	2.980
Jabatan Fungsional Medis	160	993	1.153
Jabatan Fungsional Teknis	451	483	934
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	2.410	2.618	5.028
TOTAL	**4.096**	**6.424**	**10.520**

Tabel 93
Profil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Per Jenis Kelamin Tahun 2025

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
Jabatan Fungsional Guru	247	942	1.189
Jabatan Fungsional Medis	87	408	495
Jabatan Fungsional Teknis	164	153	317
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	1.290	1.557	2.847
TOTAL	**1.788**	**3.060**	**4.848**

Tabel 94
Profil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Paruh Waktu Per Jenis Kelamin Tahun 2025

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
Jabatan Fungsional Guru	6	34	40
Jabatan Fungsional Medis	5	32	37
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	524	534	1.058
TOTAL	**535**	**600**	**1.135**

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sigi bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai serta mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku. Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.189.888.414.789,98 atau 93,29% dari anggaran sebesar Rp1.275.403.515.672,00, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp1.205.322.078.915,00 atau 91,69% dari anggaran sebesar Rp1.314.504.395.663,00. Dengan demikian terdapat Defisit antara Pendapatan dengan Belanja sebesar (Rp15.433.664.125,02). Selain itu, realisasi Pembiayaan Neto sebesar

Rp39.112.019.642,74, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp23.678.355.517,72;

b. Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun 2025 adalah sebesar Rp39.100.879.990,74. Nilai tersebut merupakan SiLPA tahun 2024 yang diakui sebagai penerimaan Pembiayaan tahun 2025. Pada akhir tahun anggaran 2025 terdapat SiLPA sebesar Rp23.678.355.517,72;

c. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2025 terdapat Pendapatan – LO sebesar Rp1.103.972.439.744,82, Beban sebesar Rp1.133.257.413.463,21, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(67.321.480,00) sehingga Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp29.352.295.198,39);

d. Neraca Pemerintah Kabupaten Sigi per 31 Desember 2025 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp1.941.604.945.187,53, Kewajiban sebesar Rp20.289.017.376,96, dan Ekuitas sebesar Rp1.921.315.927.810,57;

e. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan Ekuitas Awal Tahun 2025 sebesar Rp1.969.786.578.201,87, Surplus/Defisit – LO sebesar (Rp29.352.295.198,39) dan Koreksi Ekuitas Sebesar (Rp19.118.355.192,90) sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp1.921.315.927.810,57;

f. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sigi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp50.317.096.374,48, Aktivitas Investasi sebesar (Rp65.750.760.499,50), Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00, dan Aktivitas Transitoris sebesar (Rp486.970.036,00), sehingga terjadi penurunan bersih kas selama periode Tahun 2025 sebesar (Rp15.920.634.161,02). Total saldo awal Kas sebesar Rp39.587.850.026,74, Koreksi SILPA sebesar Rp11.139.652,00 sehingga saldo akhir Kas adalah sebesar Rp23.678.355.517,72.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi secara keseluruhan.

BUPATI SIGI

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. SIGI
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Pajak Daerah	24.326.696.461,50	6.598.728.843,80	(4.657.605.377,50)	26.267.819.927,80
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14.675.786.039,12	21.133.750.099,71	(15.307.035.458,50)	20.502.500.680,33
		Piutang Transfer Antar Daerah	14.555.133.350,00	13.418.915.826,00	(14.555.133.350,00)	13.418.915.826,00
		Piutang Lainnya	97.000.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00
2	RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	853.618.300,00	0,00	853.618.300,00

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. SIGI
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 - 4**
1	Piutang Pajak Daerah	1.941.123.466,30	954.803.097,33	986.320.368,97
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.680.332.941,21	31.707.515,56	6.648.625.425,65
3	Piutang Transfer Antar Daerah	(1.136.217.524,00)	0,00	(1.136.217.524,00)
4	Piutang Lainnya	0,00	(4.509.204.577,70)	4.509.204.577,70

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DAFTAR REKAPITULASI DAN BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN 2025

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH

NIHIL

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi

Nomor : 4 Tahun 2026

Tanggal : 24 August 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	BENTUK PENYERTAAN MODAL PEMERINYTAH DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN INI	JUMLAH YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2012	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	SAHAM	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00
2	2013	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	SAHAM	3.200.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	3.200.000.000,00	-	2.595.627,65	-	3.200.000.000,00
3	2014	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	SAHAM	4.700.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	4.700.000.000,00	-	189.652.106,33	-	4.700.000.000,00
4	2015	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	SAHAM	5.010.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	5.010.000.000,00	-	329.178.271,52	-	5.010.000.000,00
5	2016	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013	SAHAM	5.795.215.606,00	785.215.606,00	785.215.606,00	5.795.215.606,00	-	785.215.606,00	-	5.795.215.606,00
6	2017	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014	SAHAM	6.695.215.606,00	900.000.000,00	900.000.000,00	6.695.215.606,00	-	811.957.761,00	-	6.695.215.606,00
7	2018	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014	SAHAM	6.695.215.606,00	900.000.000,00		6.695.215.606,00		817.512.643,00	-	6.695.215.606,00
8	2019	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014	SAHAM	6.695.215.606,00	900.000.000,00		6.695.215.606,00		860.103.464,00	-	6.695.215.606,00
9	2020	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019	SAHAM	7.695.215.606,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	7.695.215.606,00	-	865.425.701,00	-	7.695.215.606,00
10	2021	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019	SAHAM	8.695.215.606,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	8.695.215.606,00	-	1.104.070.053,00	-	8.695.215.606,00
11	2022	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019	SAHAM	9.700.000.000,00	1.004.784.394,00	1.004.784.394,00	9.700.000.000,00	-	1.147.119.789,00	-	9.700.000.000,00
12	2023	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019	SAHAM	9.700.000.000,00	-		9.700.000.000,00	-	1.654.363.875,00	-	9.700.000.000,00
13	2024	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019	SAHAM	9.700.000.000,00	-		9.700.000.000,00	-	2.092.871.872,00	-	9.700.000.000,00
14	2025	PT. Bank Sulteng	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019	SAHAM	9.700.000.000,00	-		9.700.000.000,00	-	-	-	9.700.000.000,00

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. SIGI
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	492.633.548.479,81	31.611.084.455,56	12.401.835.980,20	511.842.796.955,17
2	Dinas Kesehatan	166.202.795.310,90	178.550.923.429,90	6.790.002.644,00	337.963.716.096,80
3	RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	180.073.333.535,88	179.057.424.962,16	173.399.413.605,28	185.731.344.892,76
4	Puskesmas Biromaru	12.146.116.743,00	247.086.378,00	12.112.766.743,00	280.436.378,00
5	Puskesmas Dolo	8.656.591.444,79	66.635.000,00	8.656.591.444,79	66.635.000,00
6	Puskesmas Tinggede	2.470.102.905,00	41.653.000,00	2.470.102.905,00	41.653.000,00
7	Puskesmas Marawola	14.363.716.134,98	19.683.600,00	14.363.716.134,99	19.683.599,99
8	Puskesmas Kaleke	7.645.460.118,84	41.800.000,00	7.645.460.118,84	41.800.000,00
9	Puskesmas Baluase	10.513.859.576,31	66.472.000,00	10.513.859.576,31	66.472.000,00
10	Puskesmas Kinovaro	7.687.088.581,98	18.168.000,00	7.687.088.581,98	18.168.000,00
11	Puskesmas Dombusoi	7.597.426.162,81	0,00	7.596.248.062,81	1.178.100,00
12	Puskesmas Kamaipura	4.076.763.390,00	48.059.000,00	4.076.763.390,00	48.059.000,00
13	Puskesmas Panderee	9.676.105.002,20	39.592.824,00	9.676.105.002,20	39.592.824,00
14	Puskesmas Kulawi	9.295.199.090,93	0,00	9.290.704.090,93	4.495.000,00
15	Puskesmas Gimpu	11.431.119.714,00	18.000.000,00	11.423.199.714,00	25.920.000,00
16	Puskesmas Lindu	11.203.254.285,00	0,00	11.203.254.285,00	0,00
17	Puskesmas Kantewu	10.668.582.992,00	0,00	10.668.582.992,00	0,00
18	Puskesmas Banasu	1.766.290.376,28	0,00	1.766.290.376,28	0,00
19	Puskesmas Towulu	4.546.853.902,51	0,00	4.546.853.902,51	0,00
20	Puskesmas Palolo	11.267.137.864,00	3.833.648.124,13	11.261.252.704,00	3.839.533.284,13
21	Puskesmas Banpres	7.218.540.976,85	50.600.000,00	7.218.540.976,85	50.600.000,00
22	Puskesmas Nokilalaki	6.250.165.358,02	22.500.000,00	6.250.165.358,02	22.500.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.522.325.301.114,65	126.060.514.668,15	54.924.320.765,83	1.593.461.495.016,97
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.017.017.729,00	3.658.032.626,00	1.699.033.762,61	9.976.016.592,39
25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.905.813.932,00	107.670.000,00	65.520.000,00	9.947.963.932,00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.302.536.579,00	1.642.810.167,00	420.123.241,00	33.525.223.505,00
27	Dinas Sosial	6.732.992.086,00	163.520.003,00	41.164.000,00	6.855.348.089,00
28	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	10.850.761.431,00	72.614.927,00	62.791.419,00	10.860.584.939,00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	981.885.467,00	83.623.000,00	16.938.000,00	1.048.570.467,00
30	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	21.903.622.611,41	227.980.570,00	71.615.285,00	22.059.987.896,41
31	Dinas Lingkungan Hidup	13.178.525.156,00	5.498.076.344,00	2.160.149.371,00	16.516.452.129,00
32	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.477.901.752,73	12.721.300,00	9.224.800,00	8.481.398.252,73
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.595.324.842,00	106.566.000,00	25.788.000,00	2.676.102.842,00
34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.918.860.536,17	1.503.860.000,00	1.503.860.000,00	16.918.860.536,17
35	Dinas Perhubungan	44.409.378.388,69	379.238.865,00	198.250.000,00	44.590.367.253,69
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.200.235.093,00	384.599.890,00	95.815.000,00	7.489.019.983,00
37	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.348.816.732,00	179.263.411,00	0,00	4.528.080.143,00
38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.041.318.901,00	25.696.900,00	17.716.000,00	6.049.299.801,00
39	Dinas Pemuda Dan Olahraga	7.477.384.681,00	971.515.025,00	403.500.014,50	8.045.399.691,50
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.042.819.012,00	1.061.356.167,00	1.017.733.167,00	7.086.442.012,00
41	Dinas Pariwisata	36.431.769.282,00	833.231.160,00	681.037.460,00	36.583.962.982,00
42	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	19.690.643.627,00	2.566.354.935,03	1.655.426.995,03	20.601.571.567,00
43	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	31.982.786.648,92	350.764.295,00	16.472.199,00	32.317.078.744,92
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	70.037.633.428,02	477.633.914,00	252.672.957,00	70.262.594.385,02
45	Sekretariat Daerah Kab. Sigi	(331.006.939,04)	46.591.309.991,04	713.509.940,00	45.546.793.112,00
46	Bagian Pemerintahan	10.153.573.369,00	4.220.726.015,00	9.226.633.436,90	5.147.665.947,10
47	Bagian Kesejahteraan Rakyat	333.944.700,00	0,00	333.944.700,00	0,00
48	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	140.086.390,00	0,00	140.086.390,00	0,00
49	Bagian Administrasi Pembangunan	390.728.000,00	0,00	390.728.000,00	0,00
50	Bagian Hukum	556.114.800,00	7.695.000,00	556.114.800,00	7.695.000,00
51	Bagian Umum	33.842.039.596,00	4.665.793.495,00	36.122.739.849,00	2.385.093.242,00
52	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	548.220.511,00	63.933.000,00	548.220.511,00	63.933.000,00
53	Bagian Organisasi	276.403.520,00	42.368.000,00	276.403.520,00	42.368.000,00
54	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	346.724.000,00	36.607.800,00	346.724.000,00	36.607.800,00
55	Bagian Perencanaan dan Keuangan	326.784.000,00	0,00	326.784.000,00	0,00
56	Sekretariat DPRD Kab. Sigi	8.990.493.319,00	936.361.876,00	52.152.600,00	9.874.702.595,00
57	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	12.052.446.879,00	636.180.652,00	426.436.547,00	12.262.190.984,00
58	Badan Keuangan dan Aset Daerah	50.053.431.238,00	6.811.132.056,00	799.726.869,00	56.064.836.425,00
59	Badan Pendapatan Daerah	36.786.154.722,97	906.703.859,00	10.500.000,01	37.682.358.581,96
60	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia	5.866.314.710,00	0,00	48.824.950,00	5.817.489.760,00

NO	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
61	Inspektorat Kab. Sigi	7.059.585.633,31	5.459.414.541,31	5.012.728.166,31	7.506.272.008,31
62	Kecamatan Dolo	3.543.557.988,12	0,00	0,00	3.543.557.988,12
63	Kecamatan Dolo Barat	1.203.902.052,35	59.782.000,00	41.190.000,00	1.222.494.052,35
64	Kecamatan Dolo Selatan	2.169.005.787,59	158.500.000,00	147.500.000,00	2.180.005.787,59
65	Kecamatan Kulawi Selatan	1.714.950.660,00	0,00	0,00	1.714.950.660,00
66	Kecamatan Kulawi	2.323.495.177,00	20.600.000,00	0,00	2.344.095.177,00
67	Kecamatan Lindu	1.381.797.186,00	6.800.000,00	0,00	1.388.597.186,00
68	Kecamatan Marawola	2.070.412.702,88	35.500.000,00	10.500.000,00	2.095.412.702,88
69	Kecamatan Marawola Barat	1.778.154.130,24	11.900.000,00	0,00	1.790.054.130,24
70	Kecamatan Kinovaro	2.590.904.491,00	40.168.000,00	0,00	2.631.072.491,00
71	Kecamatan Palolo	1.607.357.289,00	173.851.920,00	72.150.000,00	1.709.059.209,00
72	Kecamatan Nokilalaki	1.551.301.903,55	10.500.000,00	10.500.000,00	1.551.301.903,55
73	Kecamatan Tanambulava	1.851.435.574,00	20.000.000,00	0,00	1.871.435.574,00
74	Kecamatan Gumbasa	1.502.443.674,78	26.285.000,00	35.442.000,00	1.493.286.674,78
75	Kecamatan Pipikoro	1.462.489.100,00	83.260.000,00	28.685.000,00	1.517.064.100,00
76	Kecamatan Sigi Biromaru	973.538.941,00	0,00	0,00	973.538.941,00
77	Kecamatan Sigi Kota	165.274.800,00	25.490.000,00	0,00	190.764.800,00
78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.214.176.170,00	48.286.750,00	3.082.000,00	1.259.380.920,00
TOTAL		**3.082.739.617.053,43**	**611.200.124.896,28**	**472.039.258.305,18**	**3.221.900.483.644,53**

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. SIGI
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.426.783.647,44	1.279.428.571,56	1.279.428.563,57	1.426.783.655,43
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	6.335.701.276,00	190.000.000,00	190.000.000,00	6.335.701.276,00
3	Tanah untuk Bangunan Industri	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	54.979.150.289,11	6.557.017.972,48	6.557.017.967,47	54.979.150.294,12
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	3.060.463.734,00	427.000.000,00	427.000.000,00	3.060.463.734,00
6	Tanah Persil Lainnya	3.276.157.100,00	0,00	0,00	3.276.157.100,00
7	Tanah Basah	474.470.174,00	0,00	0,00	474.470.174,00
8	Tanah Perkebunan	661.747.400,00	0,00	0,00	661.747.400,00
9	Tanah Lapangan Olahraga	1.428.045.000,00	0,00	286.000.000,00	1.142.045.000,00
10	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	750.000.000,00	750.000.000,00	464.000.000,00	1.036.000.000,00
11	Tanah untuk Jalan	51.157.019.404,00	180.000.000,00	180.000.000,00	51.157.019.404,00
12	Tanah untuk Bangunan Air	883.647.728,00	0,00	0,00	883.647.728,00
13	Tanah untuk Bangunan Jaringan	51.067.201,00	1,00	1,00	51.067.201,00
14	Tanah untuk Taman	2.898.722.806,00	80.000.006,00	80.000.000,00	2.898.722.812,00
15	Grader	3.953.160.000,00	0,00	0,00	3.953.160.000,00
16	Excavator	5.957.235.900,00	0,00	0,00	5.957.235.900,00
17	Hauler	957.600.000,00	0,00	0,00	957.600.000,00
18	Asphalt Equipment	6.807.507,00	0,00	0,00	6.807.507,00
19	Compacting Equipment	1.622.660.073,00	0,00	0,00	1.622.660.073,00
20	Aggregate and Concrete Equipment	127.451.063,00	0,00	0,00	127.451.063,00
21	Loader	1.367.500.000,00	679.999.999,00	0,00	2.047.499.999,00
22	Alat Pengangkat	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
23	Mesin Proses	212.767.000,00	1.869.195.378,00	0,00	2.081.962.378,00
24	Amphibi Dredger	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
25	Compressor	7.736.434,00	0,00	6.270.000,00	1.466.434,00
26	Electric Generating Set	814.550.000,00	24.720.000,00	24.720.000,00	814.550.000,00
27	Pompa	338.317.799,00	27.565.500,00	19.005.500,00	346.877.799,00
28	Mesin Bor	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
29	Peralatan SAR Mountenering	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
30	Peralatan Intelijen	17.849.000,00	0,00	0,00	17.849.000,00
31	Alat Bantu Lainnya	2.039.000,00	0,00	0,00	2.039.000,00
32	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.192.847.001,00	19.009.765.335,00	16.359.556.169,00	44.843.056.167,00
33	Kendaraan Bermotor Penumpang	11.254.644.600,00	3.275.449.434,00	2.282.149.600,00	12.247.944.434,00
34	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.273.542.750,00	2.418.027.467,00	1.353.397.570,00	9.338.172.647,00
35	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	31.062.613.951,03	5.202.050.108,00	5.121.486.808,03	31.143.177.251,00
36	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	43.702.809,00	0,00	43.702.809,00
37	Kendaraan Bermotor Khusus	30.962.487.696,00	10.535.714.571,00	9.835.715.001,00	31.662.487.266,00
38	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	74.333.559,00	1.036.025.000,00	569.940.000,00	540.418.559,00
39	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	365.012.505,00	22.630.000,00	81.930.000,00	305.712.505,00
40	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	2.574.000,00	0,00	0,00	2.574.000,00
41	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00	349.999.870,00	279.999.896,00	69.999.974,00
42	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	390.615.000,00	0,00	0,00	390.615.000,00
43	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.228.440.000,00	439.500.000,00	439.500.000,00	1.228.440.000,00
44	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1.282.301.819,85	0,00	0,00	1.282.301.819,85
45	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	508.879.000,00	0,00	0,00	508.879.000,00
46	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	39.670.000,00	39.670.000,00	39.670.000,00	39.670.000,00
47	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	108.971.500,00	17.800.000,00	17.800.000,00	108.971.500,00
48	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	17.186.000,00	275.000,00	275.000,00	17.186.000,00
49	Perkakas Bengkel Listrik	11.235.000,00	0,00	0,00	11.235.000,00
50	Perkakas Bengkel Service	1.178.100,00	111.118.951,00	4.500.000,00	107.797.051,00
51	Perkakas Bengkel Kayu	731.154.007,00	0,00	0,00	731.154.007,00
52	Peralatan Las	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00
53	Perkakas Pabrik Es	8.049.000,00	0,00	0,00	8.049.000,00
54	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	261.381.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	261.381.000,00
55	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	29.425.000,00	0,00	0,00	29.425.000,00
56	Perkakas Bengkel Service	111.118.951,00	0,00	106.618.951,00	4.500.000,00
57	Perkakas Pengangkat	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00
58	Perkakas Standard (Standard Tools)	95.023.650,00	920.150,00	920.150,00	95.023.650,00
59	Perkakas Khusus (Special Tools)	284.874.669,00	23.587.500,00	11.793.750,00	296.668.419,00
60	Perkakas Bengkel Kerja	37.729.898,12	750.000,00	0,00	38.479.898,12

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
61	Peralatan Tukang Besi	6.737.500,00	0,00	0,00	6.737.500,00
62	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	5.275.001,00	0,00	0,00	5.275.001,00
63	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	46.252.100,00	7.520.000,00	3.800.000,00	49.972.100,00
64	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	560.500,00	0,00	0,00	560.500,00
65	Alat Ukur Universal	1.142.704.469,00	244.443.800,00	30.760.800,00	1.356.387.469,00
66	Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	0,00	512.675.000,00	9.300.000,00	503.375.000,00
67	Universal Tester	64.417.000,00	18.287.000,00	18.287.000,00	64.417.000,00
68	Alat Ukur/Pembanding	559.794.543,61	107.707.800,00	107.757.800,00	559.744.543,61
69	Alat Ukur Lain-Lain	781.345.421,66	19.786.030,00	10.736.030,00	790.395.421,66
70	Alat Timbangan/Biara	724.000.666,37	25.178.863,00	25.178.863,00	724.000.666,37
71	Anak Timbangan/Biara	213.853.948,34	0,00	0,00	213.853.948,34
72	Alat Ukur Lainnya	45.000.000,00	20.000.000,00	0,00	65.000.000,00
73	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	398.387.750,00	0,00	110.750,00	398.277.000,00
74	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	173.517.083,00	3.950.000,00	1.050.000,00	176.417.083,00
75	Alat Panen	221.500.000,00	0,00	0,00	221.500.000,00
76	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	1.334.884.229,00	85.540.408,00	79.760.408,00	1.340.664.229,00
77	Alat Laboratorium Pertanian	259.099.850,00	5.844.233.350,40	0,00	6.103.333.200,40
78	Alat Pasca Panen	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
79	Alat Produksi Perikanan	126.605.000,00	0,00	0,00	126.605.000,00
80	Alat-Alat Peternakan	1.515.421.668,00	3.000.000,00	1.134.925.000,00	383.496.668,00
81	Alat Pengolahan Lainnya	140.760.850,00	1.131.925.000,00	0,00	1.272.685.850,00
82	Mesin Ketik	196.090.724,00	8.446.000,00	8.446.000,00	196.090.724,00
83	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	185.843.834,00	23.357.000,00	2.600.000,00	206.600.834,00
84	Alat Reproduksi (Penggandaan)	131.450.000,00	0,00	2.250.000,00	129.200.000,00
85	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8.455.243.705,00	1.605.157.373,00	1.123.302.273,00	8.937.098.805,00
86	Alat Kantor Lainnya	15.836.209.005,80	7.232.871.218,23	3.640.061.978,20	19.429.018.245,83
87	Mebel	28.173.474.322,02	8.152.128.323,00	6.403.191.084,00	29.922.411.561,02
88	Alat Pengukur Waktu	28.110.000,00	143.726.023,00	2.207.500,00	169.628.523,00
89	Alat Pembersih	1.448.139.723,00	182.146.100,00	167.505.200,00	1.462.780.623,00
90	Alat Pendingin	10.837.649.423,63	4.063.443.221,00	3.532.699.261,00	11.368.393.383,63
91	Alat Dapur	1.022.721.363,67	67.530.413,00	26.162.413,00	1.064.089.363,67
92	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.916.938.690,27	3.489.143.869,00	2.708.256.171,00	13.697.826.388,27
93	Alat Pemadam Kebakaran	545.347.617,73	459.593.647,00	392.030.647,00	612.910.617,73
94	Meja Kerja Pejabat	1.428.669.381,00	633.536.000,00	480.431.000,00	1.581.774.381,00
95	Meja Rapat Pejabat	300.241.102,00	186.124.000,00	188.581.100,00	297.784.002,00
96	Kursi Kerja Pejabat	3.162.962.648,00	1.248.707.461,00	595.266.896,00	3.816.403.213,00
97	Kursi Rapat Pejabat	352.843.500,00	130.260.000,00	114.260.000,00	368.843.500,00
98	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	53.100.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00	53.100.000,00
99	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	390.883.700,00	304.406.000,00	390.237.200,00	305.052.500,00
100	Lemari dan Arsip Pejabat	5.559.790.766,00	958.688.773,00	885.438.639,00	5.633.040.900,00
101	Peralatan Studio Audio	1.744.990.378,55	596.018.850,00	345.739.400,00	1.995.269.828,55
102	Peralatan Studio Video dan Film	1.614.505.201,90	318.257.481,00	139.380.982,00	1.793.381.700,90
103	Peralatan Studio Gambar	2.850.000,00	21.272.000,00	6.840.000,00	17.282.000,00
104	Peralatan Cetak	503.738.211,00	44.684.000,00	36.804.000,00	511.618.211,00
105	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	427.977.500,00	9.300.000,00	0,00	437.277.500,00
106	Alat Studio Lainnya	4.000.000,00	765.058.000,00	751.018.000,00	18.040.000,00
107	Alat Komunikasi Telephone	1.860.887.905,00	71.234.004,00	24.010.000,00	1.908.111.909,00
108	Alat Komunikasi Radio SSB	373.658.000,00	7.199.904,00	7.199.904,00	373.658.000,00
109	Alat Komunikasi Radio HF/FM	77.487.392,00	0,00	0,00	77.487.392,00
110	Alat Komunikasi Radio VHF	45.386.000,00	0,00	0,00	45.386.000,00
111	Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	29.954.100,00	29.954.100,00	0,00
112	Alat Komunikasi Sosial	447.977.060,00	7.181.250,00	7.181.250,00	447.977.060,00
113	Alat Komunikasi Khusus	0,00	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
114	Alat Komunikasi Lainnya	217.952.415,00	256.802.415,00	256.802.415,00	217.952.415,00
115	Peralatan Antena HF/SW	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
116	Peralatan Antena UHF	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00
117	Peralatan Antena SHF/Parabola	27.550.893,00	0,00	0,00	27.550.893,00
118	Switcher Antena	17.820.000,00	0,00	0,00	17.820.000,00
119	Switcher/Menara Antena	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00
120	Humidity Control	22.550.000,00	0,00	0,00	22.550.000,00
121	Program Input Equipment	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
122	Sumber Tenaga	5.874.584.328,12	2.961.979.000,00	2.943.629.000,00	5.892.934.328,12
123	Alat Kedokteran Umum	70.841.439.996,42	56.169.764.681,01	56.345.248.744,42	70.665.955.933,01
124	Alat Kedokteran Gigi	5.683.587.583,64	4.746.464.763,64	4.742.293.585,64	5.687.758.761,64
125	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	2.696.835.153,26	2.574.780.070,26	2.156.820.070,26	3.114.795.153,26
126	Alat Kedokteran Bedah	12.906.348.523,34	12.015.532.376,34	11.973.908.376,34	12.947.972.523,34
127	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	11.970.752.005,64	7.685.487.260,64	7.669.669.760,64	11.986.569.505,64
128	Alat Kedokteran THT	2.153.600.473,00	1.981.613.073,00	1.981.613.073,00	2.153.600.473,00

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
129	Alat Kedokteran Mata	3.426.560.509,78	3.393.525.259,78	3.393.525.259,78	3.426.560.509,78
130	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	13.091.311.388,80	9.668.188.282,80	9.661.894.834,80	13.097.604.836,80
131	Alat Kedokteran Anak	12.204.701.381,00	11.114.611.155,00	11.114.611.155,00	12.204.701.381,00
132	Alat Kedokteran Poliklinik	987.195.954,70	704.950.373,70	704.950.373,70	987.195.954,70
133	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.826.369.590,60	165.335.500,00	165.335.500,00	1.826.369.590,60
134	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	4.922.114.684,20	4.217.919.434,20	4.217.919.434,20	4.922.114.684,20
135	Alat Kedokteran Jantung	2.280.442.582,19	1.176.387.188,19	1.176.387.188,19	2.280.442.582,19
136	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5.959.265.911,00	3.467.592.441,00	3.467.592.441,00	5.959.265.911,00
137	Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
138	Alat Kedokteran Transfusi Darah	384.220.000,00	384.220.000,00	384.220.000,00	384.220.000,00
139	Alat Kedokteran Radioterapi	1.112.811.080,00	0,00	0,00	1.112.811.080,00
140	Alat Kedokteran Nuklir	4.011.286.361,13	3.987.241.201,13	3.987.241.201,13	4.011.286.361,13
141	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	824.863.574,00	607.634.000,00	607.634.000,00	824.863.574,00
142	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5.077.581.093,00	3.275.995.408,00	3.275.995.408,00	5.077.581.093,00
143	Alat Kedokteran ICU	745.185.000,00	127.000.000,00	127.000.000,00	745.185.000,00
144	Alat Kedokteran ICCU	1.118.076.350,00	1.125.838.946,00	1.118.076.350,00	1.125.838.946,00
145	Alat Kedokteran Anestesi	831.433.000,00	0,00	0,00	831.433.000,00
146	Alat Kedokteran Lainnya	66.925.583,00	844.859.734,00	323.117.555,00	588.667.762,00
147	Alat Kesehatan Matra Laut	868.144.200,00	0,00	0,00	868.144.200,00
148	Alat Kesehatan Kepolisian	62.292.500,00	0,00	0,00	62.292.500,00
149	Alat Kesehatan Olahraga	16.108.701,00	0,00	0,00	16.108.701,00
150	Alat Kesehatan Umum Lainnya	846.799.065,83	53.168.091,67	767.164.600,83	132.802.556,67
151	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	331.911.160,73	3.630.000,00	3.630.000,00	331.911.160,73
152	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	35.650.000,00	94.819.500,00	0,00	130.469.500,00
153	Alat Laboratorium Hidrokimia	150.819.500,00	0,00	94.819.500,00	56.000.000,00
154	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	5.742.765,00	0,00	0,00	5.742.765,00
155	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	315.910.852,37	263.260.565,00	263.460.565,00	315.710.852,37
156	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	871.741.113,30	6.000.000,00	6.000.000,00	871.741.113,30
157	Alat Laboratorium Umum	9.248.079.096,18	6.921.951.443,18	7.096.795.843,18	9.073.234.696,18
158	Alat Laboratorium Mikrobiologi	921.249.128,00	326.786.000,00	326.786.000,00	921.249.128,00
159	Alat Laboratorium Kimia	1.055.098.250,00	499.980.000,00	490.000.000,00	1.065.078.250,00
160	Alat Laboratorium Patologi	5.075.876.080,00	2.572.085.355,00	2.572.085.355,00	5.075.876.080,00
161	Alat Laboratorium Immunologi	459.832.200,00	450.432.200,00	450.432.200,00	459.832.200,00
162	Alat Laboratorium Hematologi	562.327.547,00	29.319.150,00	29.319.150,00	562.327.547,00
163	Alat Laboratorium Film	163.861.002,00	90.162.000,00	90.162.000,00	163.861.002,00
164	Alat Laboratorium Makanan	327.331.457,99	266.035.957,99	266.035.957,99	327.331.457,99
165	Alat Laboratorium Farmasi	961.151.500,00	916.449.000,00	918.249.000,00	959.351.500,00
166	Alat Laboratorium Fisika	352.613.001,00	72.966.100,00	83.746.100,00	341.833.001,00
167	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
168	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	0,00	5.102.000,00	0,00	5.102.000,00
169	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	2.374.724,00	0,00	0,00	2.374.724,00
170	Alat Laboratorium Metrologi	9.950.000,00	0,00	0,00	9.950.000,00
171	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
172	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	4.425.440,00	10.300.000,00	1.800.000,00	12.925.440,00
173	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	16.178.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	16.178.000,00
174	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
175	Alat Laboratorium Pertanian	5.830.133.350,40	0,00	5.830.133.350,40	0,00
176	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	8.570.301,00	0,00	0,00	8.570.301,00
177	Alat Laboratorium Energi Surya	58.510.000,00	1.393.300,00	0,00	59.903.300,00
178	Alat Laboratorium Oseanografi	3.000.002,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.002,00
179	Alat Laboratorium Biologi Perairan	389.205.000,00	0,00	0,00	389.205.000,00
180	Alat Laboratorium Biologi	43.297.000,00	0,00	0,00	43.297.000,00
181	Alat Laboratorium Geofisika	22.399.900,00	0,00	0,00	22.399.900,00
182	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	21.513.140,00	21.513.140,00	21.513.140,00	21.513.140,00
183	Laboratorium Kearsipan	48.259.011,00	40.896.400,00	40.896.400,00	48.259.011,00
184	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	2.064.851.641,00	1.228.695.796,00	1.228.695.796,00	2.064.851.641,00
185	Alat Laboratorium Lain	4.986.103.333,44	4.307.411.633,44	4.307.661.633,44	4.985.853.333,44
186	Analytical Instrument	40.468.700,00	554.700,00	554.700,00	40.468.700,00
187	Instrument Probe/Sensor	4.269.000,00	0,00	0,00	4.269.000,00
188	General Laboratory Tool	32.832.000,00	29.832.000,00	29.832.000,00	32.832.000,00
189	Laboratory Safety Equipment	314.649.997,00	78.720.000,00	78.720.000,00	314.649.997,00
190	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	3.032.212.154,00	0,00	12.000.000,00	3.020.212.154,00
191	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	1.245.072.446,00	8.750.000,00	0,00	1.253.822.446,00
192	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.427.105.789,71	175.704.400,00	0,00	1.602.810.189,71
193	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	1.388.684.768,68	11.107.842,80	109.421.442,80	1.290.371.168,68
194	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	1.107.364.651,78	234.237.826,78	128.201.826,78	1.213.400.651,78
195	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	4.133.000,00	885.000,00	885.000,00	4.133.000,00
196	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	628.014.623,00	0,00	0,00	628.014.623,00

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
197	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama	35.838.600,00	0,00	0,00	35.838.600,00
198	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	2.998.151.073,00	69.750.000,00	0,00	3.067.901.073,00
199	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	3.376.288.653,00	16.853.700,00	62.000.000,00	3.331.142.353,00
200	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	3.653.783.922,00	0,00	6.861.000,00	3.646.922.922,00
201	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	8.949.000,00	3.250.000,00	3.625.000,00	8.574.000,00
202	Alat Peraga Kejuruan	2.608.050.162,60	0,00	0,00	2.608.050.162,60
203	Alat Peraga PAUD/TK	165.526.000,00	0,00	0,00	165.526.000,00
204	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.791.000,00	2.800.000,00	200.000,00	5.391.000,00
205	Modular Counting and Scientific Electronic	330.945.150,00	291.285.150,00	296.205.150,00	326.025.150,00
206	Recorder Display	11.765.000,00	0,00	0,00	11.765.000,00
207	System/Power Supply	46.352.000,00	2.749.500,00	0,00	49.101.500,00
208	Measuring/Testing Device	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
209	Alat Ukur Fisika Kesehatan	53.900.000,00	0,00	0,00	53.900.000,00
210	Alat Kesehatan Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
211	Proteksi Lingkungan	929.200.000,00	0,00	0,00	929.200.000,00
212	Meteorological Equipment	4.594.668,56	0,00	0,00	4.594.668,56
213	Peralatan Hidrologi	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
214	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	184.607.500,00	0,00	0,00	184.607.500,00
215	Alat Laboratorium Kualitas Udara	109.732.256,00	2.860.000,00	2.860.000,00	109.732.256,00
216	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	17.744.000,00	0,00	0,00	17.744.000,00
217	Alat Laboratorium Penunjang	329.445.000,00	20.405.000,00	20.405.000,00	329.445.000,00
218	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	599.700.000,00	0,00	0,00	599.700.000,00
219	Data Accquisition and Analyzing System	406.992.505,00	0,00	2.500.000,00	404.492.505,00
220	Cavitation Tunnel	55.785.000,00	55.785.000,00	55.785.000,00	55.785.000,00
221	Peralatan Umum	16.096.000,00	0,00	4.150.000,00	11.946.000,00
222	Pemesinan:Model Ship Workshop	74.200.000,00	0,00	0,00	74.200.000,00
223	MOB	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
224	Photo and Film Equipment	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
225	Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	316.944.674,00	58.340.000,00	58.340.000,00	316.944.674,00
226	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	2.600.000,00	23.085.000,00	0,00	25.685.000,00
227	Senjata Lain-Lain	3.695.237,00	0,00	850.000,00	2.845.237,00
228	Alat Keamanan	7.920.000,00	0,00	5.608.000,00	2.312.000,00
229	Non Senjata Api	1.711.406,00	511.406,00	511.406,00	1.711.406,00
230	Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
231	Alat Dalmas/Alat Dakhura	86.600.000,00	0,00	0,00	86.600.000,00
232	Alsus Fotografi Kepolisian	45.495.000,00	3.108.000,00	0,00	48.603.000,00
233	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00
234	Komputer Jaringan	1.500.567.451,00	58.500.000,00	3.500.000,00	1.555.567.451,00
235	Personal Computer	69.418.417.680,84	8.963.899.252,00	6.299.359.452,00	72.082.957.480,84
236	Komputer Unit Lainnya	67.700.965,00	41.163.035,00	49.590.000,00	59.274.000,00
237	Peralatan Mainframe	455.146.902,00	318.550.421,00	326.029.721,00	447.667.602,00
238	Peralatan Mini Computer	758.053.780,00	119.427.000,00	202.246.000,00	675.234.780,00
239	Peralatan Personal Computer	14.366.653.535,96	3.027.305.926,00	2.425.720.542,00	14.968.238.919,96
240	Peralatan Jaringan	4.520.631.371,28	619.508.971,00	320.914.850,00	4.819.225.492,28
241	Peralatan Komputer Lainnya	319.266.000,00	170.972.250,00	185.407.950,00	304.830.300,00
242	Mekanik	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00
243	Sumur Pemboran	59.900.000,00	71.615.285,00	71.615.285,00	59.900.000,00
244	Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Masker	5.358.100,00	5.358.100,00	5.358.100,00	5.358.100,00
247	Alat Penolong	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
248	Alat Pendukung Pencarian	2.162.077.500,00	1.578.372.500,00	1.448.140.500,00	2.292.309.500,00
249	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00
250	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	43.237.500,00	0,00	0,00	43.237.500,00
251	Alat Peraga Pelatihan	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
252	Solid Material Handling Equipment	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
253	Rambu Bersuar	1.269.304.273,00	149.647.800,00	38.989.000,00	1.379.963.073,00
254	Rambu Tidak Bersuar	1.990.208.909,00	0,00	0,00	1.990.208.909,00
255	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	16.746.600,00	67.575.065,00	0,00	84.321.665,00
256	Peralatan Permainan	296.781.441,00	43.860.000,00	33.400.000,00	307.241.441,00
257	Peralatan Senam	196.235.500,00	5.000.000,00	400.000,00	200.835.500,00
258	Peralatan Olahraga Udara	35.520.000,00	0,00	0,00	35.520.000,00
259	Peralatan Olahraga Lainnya	212.743.900,00	12.500.000,00	6.500.000,00	218.743.900,00
260	Bangunan Gedung Kantor	155.359.151.591,66	5.854.116.657,00	5.032.068.011,91	156.181.200.236,75
261	Bangunan Gudang	16.467.256.280,50	1.622.365.758,00	1.396.671.987,00	16.692.950.051,50
262	Bangunan Gedung Instalasi	7.966.957.960,71	1.230.300.001,33	1.180.400.000,00	8.016.857.962,04
263	Bangunan Gedung Laboratorium	13.544.768.934,20	3.659.370.031,00	3.267.645.761,00	13.936.493.204,20
264	Bangunan Kesehatan	136.924.026.938,58	114.727.482.504,00	104.126.987.945,00	147.524.521.497,58

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
265	Bangunan Oseanarium/Observatorium	2.107.096.468,00	0,00	0,00	2.107.096.468,00
266	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.375.940.020,00	833.352.386,50	75.070.524,60	5.134.221.881,90
267	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.416.652.222,26	3.537.338.110,31	3.784.448.535,31	12.169.541.797,26
268	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	234.397.510.287,80	5.587.615.416,07	87.346.225,71	239.897.779.478,16
269	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.148.207.261,72	912.415.025,00	403.500.014,50	3.657.122.272,22
270	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	51.309.969.721,12	554.959.325,00	217.847.957,00	51.647.081.089,12
271	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.997.434.211,00	187.969.620,00	9.234.490,00	2.176.169.341,00
272	Bangunan Gedung Garasi/Pool	2.335.490.304,15	1.007.730.000,00	1.007.730.000,00	2.335.490.304,15
273	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	2.571.694.164,76	0,00	0,00	2.571.694.164,76
274	Bangunan Gedung Perpustakaan	19.401.487.949,23	0,00	0,00	19.401.487.949,23
275	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	14.261.567.002,59	0,00	0,00	14.261.567.002,59
276	Bangunan Pengujian Kelaikan	2.155.967.800,00	0,00	0,00	2.155.967.800,00
277	Bangunan Terbuka	2.724.140.113,00	10.589.055.156,27	2.565.071.966,00	10.748.123.303,27
278	Bangunan Peternakan/Perikanan	2.205.116.797,05	0,00	0,00	2.205.116.797,05
279	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25.867.958.186,55	51.541.217.324,47	7.962.698.708,00	69.446.476.803,02
280	Bangunan Fasilitas Umum	158.205.783,00	4.796.078.668,73	88.400.000,00	4.865.884.451,73
281	Bangunan Parkir	234.482.612,00	339.378.749,00	199.482.612,00	374.378.749,00
282	Bangunan Gedung Pabrik	692.125.480,05	0,00	0,00	692.125.480,05
283	Bangunan Stasiun Bus	178.529.600,00	0,00	0,00	178.529.600,00
284	Taman	649.010.001,33	12.342.790.353,67	2.290.495.787,00	10.701.304.568,00
285	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	23.898.717.332,15	0,00	23.898.717.332,15	0,00
286	Rumah Negara Golongan I	668.850.788,00	298.380.000,00	298.380.000,00	668.850.788,00
287	Rumah Negara Golongan II	19.972.903.193,78	6.553.456.887,00	6.553.456.887,00	19.972.903.193,78
288	Rumah Negara Golongan III	33.047.310.126,21	7.413.156.347,00	7.413.156.348,89	33.047.310.124,32
289	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.974.262.584,00	3.903.104.651,68	0,00	5.877.367.235,68
290	Asrama	489.845.000,00	0,00	0,00	489.845.000,00
291	Motel	109.560.000,00	0,00	0,00	109.560.000,00
292	Tugu	10.225.943.576,00	138.912.000,00	138.912.000,00	10.225.943.576,00
293	Bangunan Peninggalan	1.170.810.499,00	0,00	0,00	1.170.810.499,00
294	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	193.575.501,00	0,00	0,00	193.575.501,00
295	Bangunan Menara Telekomunikasi	587.040.000,00	0,00	0,00	587.040.000,00
296	Tugu/Tanda Batas Administrasi	350.999.785,00	312.109.785,00	350.999.785,00	312.109.785,00
297	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
298	Pagar	31.136.717.926,54	11.714.667.888,00	8.351.979.188,00	34.499.406.626,54
299	Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	368.174.875,00	0,00	368.174.875,00
300	Jalan Kabupaten	297.862.614.227,34	19.498.513.569,00	10.711.297.668,00	306.649.830.128,34
301	Jalan Desa	550.083.202.650,52	26.614.361.039,00	3.318.400.049,27	573.379.163.640,25
302	Jalan Khusus	26.503.758.293,74	744.296.068,03	175.524.000,00	27.072.530.361,77
303	Jalan Lainnya	11.025.856.551,03	1.196.181.411,00	1.117.297.764,03	11.104.740.198,00
304	Jembatan pada Jalan Kabupaten	59.484.664.834,35	2.316.951.551,00	10.474.109.652,00	51.327.506.733,35
305	Jembatan pada Jalan Desa	56.753.151.609,57	0,00	0,00	56.753.151.609,57
306	Jembatan pada Jalan Khusus	987.627.659,81	0,00	0,00	987.627.659,81
307	Jembatan Penyeberangan	6.218.546.215,00	0,00	0,00	6.218.546.215,00
308	Bangunan Waduk Irigasi	960.806.776,00	0,00	108.960.000,00	851.846.776,00
309	Bangunan Pengambilan Irigasi	71.626.485.652,00	0,00	0,00	71.626.485.652,00
310	Bangunan Pembawa Irigasi	150.945.268.056,00	0,00	0,00	150.945.268.056,00
311	Bangunan Pengaman Irigasi	1.356.165.753,00	0,00	0,00	1.356.165.753,00
312	Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.716.142.800,00	0,00	630.057.800,00	2.086.085.000,00
313	Bangunan Waduk Pasang Surut	49.208.000,00	0,00	0,00	49.208.000,00
314	Saluran Pembuang Pasang Surut	19.940.000,00	0,00	0,00	19.940.000,00
315	Bangunan Pengaman Pasang Surut	3.114.578.517,20	0,00	0,00	3.114.578.517,20
316	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	208.700.000,00	108.960.000,00	0,00	317.660.000,00
317	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	49.555.000,00	0,00	0,00	49.555.000,00
318	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	11.955.770.809,93	451.661.960,00	251.661.960,00	12.155.770.809,93
319	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	99.796.061,00	0,00	0,00	99.796.061,00
320	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	28.084.445.911,65	3.561.873.013,00	179.000.000,00	31.467.318.924,65
321	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	34.939.514.046,00	1.028.520.000,00	1.028.520.000,00	34.939.514.046,00
322	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	5.863.364.771,10	0,00	0,00	5.863.364.771,10
323	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	227.691.500,00	260.917.285,00	189.302.000,00	299.306.785,00
324	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	2.301.880.766,00	80.027.500,00	80.027.500,00	2.301.880.766,00
325	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	134.290.000,00	0,00	0,00	134.290.000,00
326	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	11.680.737.533,15	119.900.000,00	119.900.000,00	11.680.737.533,15
327	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	5.736.755.326,00	0,00	0,00	5.736.755.326,00
328	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	651.982.988,00	124.922.500,00	99.922.500,00	676.982.988,00
329	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	31.197.195.958,00	7.774.014.603,00	104.314.949,09	38.866.895.611,91
330	Bangunan Pembawa Air Kotor	1.203.940.404,00	218.060.000,00	417.145.000,00	1.004.855.404,00
331	Bangunan Pembuang Air Kotor	3.702.278.259,00	0,00	0,00	3.702.278.259,00
332	Bangunan Pelengkap Air Kotor	2.344.053.240,00	199.085.000,00	0,00	2.543.138.240,00

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
333	Instalasi Air Permukaan	29.014.000,00	0,00	0,00	29.014.000,00
334	Instalasi Air Sumber/Mata Air	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
335	Instalasi Air Tanah Dalam	300.862.245,00	146.108.000,00	146.108.000,00	300.862.245,00
336	Instalasi Air Tanah Dangkal	71.272.800,00	0,00	0,00	71.272.800,00
337	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	22.772.121.612,43	6.431.496.265,00	4.513.839.657,32	24.689.778.220,11
338	Instalasi Air Buangan Domestik	11.969.794.996,00	2.357.853.407,00	2.357.853.407,00	11.969.794.996,00
339	Instalasi Air Buangan Industri	9.513.000,00	9.513.000,00	9.513.000,00	9.513.000,00
340	Instalasi Air Kotor Lainnya	1.281.393.921,15	548.238.472,00	359.964.171,61	1.469.668.221,54
341	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	2.490.758.529,00	0,00	0,00	2.490.758.529,00
342	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
343	Bangunan Penampung Sampah	636.822.810,00	0,00	0,00	636.822.810,00
344	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	49.800.000,00	0,00	0,00	49.800.000,00
345	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	617.237.242,00	149.690.000,00	307.700.442,00	459.226.800,00
346	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	33.302.550,00	0,00	0,00	33.302.550,00
347	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	49.800.000,00	0,00	0,00	49.800.000,00
348	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2.936.727.248,00	787.318.248,00	787.318.248,00	2.936.727.248,00
349	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	65.145.315,00	0,00	65.145.315,00
350	Instalasi Gardu Listrik Induk	2.495.822.530,00	2.319.944.157,00	1.880.589.075,00	2.935.177.612,00
351	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1.054.039.165,00	102.577.000,00	279.931.640,00	876.684.525,00
352	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	332.093.340,00	12.000.000,00	7.000.000,00	337.093.340,00
353	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
354	Instalasi Pertahanan di Darat	213.924.000,00	0,00	0,00	213.924.000,00
355	Instalasi Gas Lainnya	1.855.902.500,00	2.435.412.500,00	1.855.902.500,00	2.435.412.500,00
356	Instalasi Lain	0,00	123.489.002,00	0,00	123.489.002,00
357	Jaringan Pembawa	28.092.336.867,00	0,00	0,00	28.092.336.867,00
358	Jaringan Induk Distribusi	1.716.105.172,00	175.239.000,00	175.239.000,00	1.716.105.172,00
359	Jaringan Cabang Distribusi	1.852.475.096,00	0,00	0,00	1.852.475.096,00
360	Jaringan Sambungan ke Rumah	9.576.972.370,00	0,00	0,00	9.576.972.370,00
361	Jaringan Air Minum Lainnya	171.075.061,00	0,00	0,00	171.075.061,00
362	Jaringan Transmisi	1.179.071.090,00	192.867.000,00	192.867.000,00	1.179.071.090,00
363	Jaringan Distribusi	22.312.633.450,00	2.675.048.568,00	235.805.950,00	24.751.876.068,00
364	Jaringan Listrik Lainnya	1.860.209.625,00	3.348.163.648,00	2.629.624.549,00	2.578.748.724,00
365	Jaringan Telepon di atas Tanah	33.527.500,00	0,00	0,00	33.527.500,00
366	Jaringan Pipa Gas Transmisi	5.445.000,00	0,00	0,00	5.445.000,00
367	Jaringan Pipa Dinas	54.819.000,00	0,00	0,00	54.819.000,00
368	Buku Umum	17.093.300.109,94	12.362.082.091,00	6.593.555.401,00	22.861.826.799,94
369	Buku Filsafat	216.885.600,00	0,00	0,00	216.885.600,00
370	Buku Agama	740.006.844,00	5.006.500,00	19.346.900,00	725.666.444,00
371	Buku Ilmu Sosial	1.322.262.306,00	32.933.200,00	44.427.300,00	1.310.768.206,00
372	Buku Ilmu Bahasa	1.117.295.918,00	12.077.000,00	45.918.400,00	1.083.454.518,00
373	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.925.703.756,00	8.033.500,00	27.095.900,00	1.906.641.356,00
374	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	533.798.895,00	0,00	0,00	533.798.895,00
375	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	2.203.818.541,00	32.908.900,00	64.278.500,00	2.172.448.941,00
376	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	1.809.185.650,00	502.864.613,00	950.323.800,00	1.361.726.463,00
377	Serial	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
378	Buku Laporan	2.153.310.450,00	60.000,00	120.000,00	2.153.250.450,00
379	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	274.300,00	0,00	274.300,00	0,00
380	Audio Visual	276.183.000,00	0,00	14.400.000,00	261.783.000,00
381	Bahan Kartografi	268.547.256,00	45.000.000,00	45.000.000,00	268.547.256,00
382	Naskah (Manuskrip)/Asli	6.726.000,00	0,00	0,00	6.726.000,00
383	Karya Musik	15.760.000,00	0,00	0,00	15.760.000,00
384	Karya Grafika (Graphic Material)	10.137.570,00	0,00	0,00	10.137.570,00
385	Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	5.005.000,00	0,00	0,00	5.005.000,00
386	Alat Musik	814.803.558,00	151.150.000,00	10.623.096,00	955.330.462,00
387	Lukisan	72.541.000,00	59.941.000,00	61.201.000,00	71.281.000,00
388	Alat Peraga Kesenian	61.200.000,00	0,00	6.492.000,00	54.708.000,00
389	Pahatan	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
390	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	141.651.211,00	12.500.000,00	12.910.000,00	141.241.211,00
391	Barang Kerajinan	30.904.892,00	5.000.000,00	10.733.700,00	25.171.192,00
392	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	9.750.000,00	0,00	4.750.000,00	5.000.000,00
393	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	293.070,00	0,00	0,00	293.070,00
394	Ternak Potong	1.212.940.000,00	177.442.640,00	0,00	1.390.382.640,00
395	Hewan Lainnya	0,00	862.942.640,00	177.442.640,00	685.500.000,00
396	Ikan Budidaya	51.551.600,00	0,00	0,00	51.551.600,00
397	Tanaman	108.598.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	108.598.000,00
398	Aset Tetap Dalam Renovasi	7.795.934.983,01	15.000.000,00	15.000.000,00	7.795.934.983,01
399	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.657.841.000,00	0,00	0,00	3.657.841.000,00
400	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	179.000.000,00	0,00	0,00	179.000.000,00

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
401	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	12.049.326.541,00	0,00	6.725.105.788,99	5.324.220.752,01
402	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.622.853.937,79	899.079.070,00	899.079.070,00	14.622.853.937,79
403	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.672.833.025,00	0,00	0,00	2.672.833.025,00
404	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	782.304.261,00	267.251.357,00	267.251.357,00	782.304.261,00
405	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	84.493.072,00	0,00	0,00	84.493.072,00
406	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	4.524.203.094,73	0,00	4.524.203.094,73	0,00
408	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	8.313.308.779,67	1.738.985.788,99	10.052.294.568,66	0,00
409	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.508.434.236,00	0,00	14.508.434.236,00	0,00
410	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	47.900.305,00	0,00	0,00	47.900.305,00
411	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	1.338.872.526,00	0,00	0,00	1.338.872.526,00
412	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	117.878.000,00	0,00	0,00	117.878.000,00
413	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	198.094.000,00	3.391.415.098,00	0,00	3.589.509.098,00
414	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	249.323.932,07	0,00	249.323.932,07	0,00
415	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten	22.285.914.166,00	6.418.400.668,00	6.418.400.668,00	22.285.914.166,00
416	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Desa	2.142.232.099,24	0,00	0,00	2.142.232.099,24
417	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Khusus	129.880.194,00	0,00	0,00	129.880.194,00
418	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	27.132.594.268,94	2.316.951.551,00	2.316.951.551,00	27.132.594.268,94
419	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	12.389.962.399,00	0,00	0,00	12.389.962.399,00
420	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00
421	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	23.750.000,00	0,00	0,00	23.750.000,00
422	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	71.485.000,00	0,00	0,00	71.485.000,00
423	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	71.468.800,00	0,00	0,00	71.468.800,00
424	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	45.222.580,00	0,00	0,00	45.222.580,00
425	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	207.470.300,00	0,00	0,00	207.470.300,00
426	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	199.085.000,00	0,00	0,00	199.085.000,00
427	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	158.620.000,00	1.010.357.192,00	0,00	1.168.977.192,00
428	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	810.000.000,00	0,00	0,00	810.000.000,00
429	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	2.319.697.686,00	0,00	0,00	2.319.697.686,00
430	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan	3.550.076.105,00	0,00	0,00	3.550.076.105,00
431	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2.740.694.373,00	0,00	0,00	2.740.694.373,00
432	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	77.100.000,00	0,00	0,00	77.100.000,00
433	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.331.275.500,00	0,00	0,00	5.331.275.500,00
435	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	278.402.450,92	0,00	0,00	278.402.450,92
436	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	552.284.581,00	0,00	0,00	552.284.581,00
437	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	179.000.000,00	0,00	0,00	179.000.000,00
438	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	3.010.087.659,00	0,00	0,00	3.010.087.659,00
439	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	5.409.144.250,00	0,00	0,00	5.409.144.250,00
440	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00
441	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
442	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	2.047.808.800,00	0,00	0,00	2.047.808.800,00
443	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	(3.896.077.622,00)	(8.443.711,00)	0,00	(3.904.521.333,00)
444	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	(4.505.727.253,00)	(28.333,58)	(4.603.553.054,75)	97.797.468,17
445	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	(957.600.000,00)	0,00	0,00	(957.600.000,00)
446	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	(4.141.232,00)	0,00	0,00	(4.141.232,00)
447	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	(1.511.027.129,00)	0,00	0,00	(1.511.027.129,00)
448	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	(77.532.730,00)	0,00	0,00	(77.532.730,00)
449	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	(1.367.500.000,00)	0,00	0,00	(1.367.500.000,00)
450	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	(4.080.000,00)	0,00	0,00	(4.080.000,00)
451	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	(73.844.225,00)	0,00	0,00	(73.844.225,00)
452	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	(1.933.854,00)	0,00	0,00	(1.933.854,00)
453	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	(2.426.222,00)	0,00	0,00	(2.426.222,00)
454	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(266.330.952,00)	0,00	0,00	(266.330.952,00)
455	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(239.085.828,00)	(1.605.499,00)	(1.803.606,00)	(238.887.721,00)
456	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	(3.400.000,00)	0,00	0,00	(3.400.000,00)
457	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	(1.071.429,00)	0,00	0,00	(1.071.429,00)
458	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen	(5.099.715,00)	0,00	0,00	(5.099.715,00)
459	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	(655.392,00)	0,00	0,00	(655.392,00)
460	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(34.252.856.547,00)	(7.523.152.564,00)	(7.523.152.564,00)	(34.252.856.547,00)
461	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(9.447.310.077,00)	(124.314.286,00)	(124.314.286,00)	(9.447.310.077,00)
462	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(6.850.337.875,00)	(14.582.024,00)	(29.082.024,00)	(6.835.837.875,00)
463	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(27.305.488.573,00)	(1.191.252.604,00)	(1.729.745.068,00)	(26.766.996.109,00)
464	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(21.938.998.992,00)	(921.083.545,00)	(376.464.295,00)	(22.483.618.242,00)
465	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(403.513.844,00)	0,00	0,00	(403.513.844,00)
466	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(295.324.589,00)	(12.000.000,00)	(12.000.000,00)	(295.324.589,00)
467	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	(2.574.000,00)	0,00	0,00	(2.574.000,00)

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
468	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	(390.615.000,00)	0,00	0,00	(390.615.000,00)
469	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	(656.104.667,00)	(43.950.000,00)	(43.950.000,00)	(656.104.667,00)
470	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	(149.601.879,00)	0,00	0,00	(149.601.879,00)
471	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	(508.879.000,00)	0,00	0,00	(508.879.000,00)
472	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	(39.670.000,00)	0,00	0,00	(39.670.000,00)
473	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(45.970.480,00)	(5.886.250,00)	(5.886.250,00)	(45.970.480,00)
474	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	(6.059.149,00)	0,00	0,00	(6.059.149,00)
475	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(11.235.000,00)	0,00	(117.810,00)	(11.117.190,00)
476	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(3.959.115,00)	(117.810,00)	(3.203.500,00)	(873.425,00)
477	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	(206.500,00)	0,00	0,00	(206.500,00)
478	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(305.086.055,00)	0,00	0,00	(305.086.055,00)
479	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	(4.395.833,00)	0,00	0,00	(4.395.833,00)
480	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(5.305.667,00)	0,00	0,00	(5.305.667,00)
481	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	(58.704.525,00)	0,00	0,00	(58.704.525,00)
482	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	(24.030.406,00)	0,00	0,00	(24.030.406,00)
483	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(99.380.701,00)	(3.203.500,00)	0,00	(102.584.201,00)
484	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(67.572.191,00)	0,00	0,00	(67.572.191,00)
485	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	(283.921.819,00)	(12.500,00)	0,00	(283.934.319,00)
486	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	(37.729.898,12)	0,00	0,00	(37.729.898,12)
487	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	(6.737.500,00)	0,00	0,00	(6.737.500,00)
488	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	(5.275.001,00)	0,00	0,00	(5.275.001,00)
489	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	(21.889.140,00)	0,00	0,00	(21.889.140,00)
490	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	(28.025,00)	0,00	0,00	(28.025,00)
491	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(896.562.079,00)	0,00	0,00	(896.562.079,00)
492	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(64.417.000,00)	0,00	0,00	(64.417.000,00)
493	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(499.401.257,61)	(11.492.560,00)	(11.492.560,00)	(499.401.257,61)
494	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(675.567.514,66)	(1.800.000,00)	(2.566.666,00)	(674.800.848,66)
495	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(565.816.082,37)	(766.666,00)	0,00	(566.582.748,37)
496	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	(125.253.867,34)	0,00	0,00	(125.253.867,34)
497	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(4.500.000,00)	0,00	0,00	(4.500.000,00)
498	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(348.264.498,00)	0,00	0,00	(348.264.498,00)
499	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(160.197.995,00)	(38.542,00)	0,00	(160.236.537,00)
500	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen	(147.597.920,00)	0,00	0,00	(147.597.920,00)
501	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(1.285.682.276,00)	(7.734.965,00)	(25.763.678,00)	(1.267.653.563,00)
502	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	(743.679.742,00)	0,00	(467.009.513,00)	(276.670.229,00)
503	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	(25.062.500,00)	0,00	0,00	(25.062.500,00)
504	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	(126.605.000,00)	0,00	(750.000,00)	(125.855.000,00)
505	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	(312.255.830,00)	(750.000,00)	0,00	(313.005.830,00)
506	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	(352.550.426,00)	0,00	0,00	(352.550.426,00)
507	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(196.090.724,00)	(605.000,00)	(605.000,00)	(196.090.724,00)
508	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(184.673.834,00)	(520.000,00)	(520.000,00)	(184.673.834,00)
509	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(121.033.333,00)	0,00	0,00	(121.033.333,00)
510	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(7.251.956.641,00)	(158.059.133,00)	(153.886.611,00)	(7.256.129.163,00)
511	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(12.867.582.369,84)	(419.706.604,97)	(419.056.481,00)	(12.868.232.493,81)
512	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(23.107.914.108,02)	(1.293.352.922,00)	(1.295.391.661,00)	(23.105.875.369,02)
513	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(26.191.667,00)	0,00	0,00	(26.191.667,00)
514	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(1.266.650.520,00)	(104.573.087,00)	(104.573.087,00)	(1.266.650.520,00)
515	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(7.294.197.208,63)	(434.172.371,00)	(434.287.660,00)	(7.294.081.919,63)
516	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(801.873.810,67)	(5.296.666,00)	(5.233.333,00)	(801.937.143,67)
517	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(11.519.343.873,27)	(1.374.154.728,01)	(1.373.670.561,00)	(11.519.828.040,28)
518	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(334.745.186,73)	(11.405.000,00)	(11.405.000,00)	(334.745.186,73)
519	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(828.202.709,00)	(123.790.000,00)	(123.790.000,00)	(828.202.709,00)
520	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(221.883.503,00)	(180.000,00)	(180.000,00)	(221.883.503,00)
521	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(2.641.850.233,00)	(261.898.414,00)	(261.898.414,00)	(2.641.850.233,00)
522	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(272.241.193,00)	(55.193.300,00)	(55.193.300,00)	(272.241.193,00)
523	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(32.468.329,00)	(20.400.000,00)	(20.400.000,00)	(32.468.329,00)
524	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(264.855.567,00)	(98.390.500,00)	(98.390.500,00)	(264.855.567,00)
525	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(4.993.609.387,00)	(230.751.476,00)	(230.695.226,00)	(4.993.665.637,00)
526	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(1.499.852.127,55)	(67.640.817,00)	(67.614.149,99)	(1.499.878.794,56)
527	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(1.214.196.783,90)	(46.302.628,00)	(46.302.628,00)	(1.214.196.783,90)
528	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	(712.500,00)	0,00	0,00	(712.500,00)
529	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(460.803.544,00)	0,00	0,00	(460.803.544,00)
530	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(278.000.250,00)	0,00	0,00	(278.000.250,00)
531	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(866.667,00)	0,00	0,00	(866.667,00)
532	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(1.770.057.506,00)	(15.195.997,00)	(15.195.997,00)	(1.770.057.506,00)
533	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(373.658.000,00)	0,00	0,00	(373.658.000,00)
534	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	(77.487.392,00)	0,00	0,00	(77.487.392,00)
535	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	(37.978.666,66)	(1.916.667,34)	(1.916.667,00)	(37.978.667,00)

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
536	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(444.929.537,00)	(900.000,00)	(900.000,00)	(444.929.537,00)
537	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	(487.500,00)	0,00	0,00	(487.500,00)
538	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	(90.301.510,00)	0,00	0,00	(90.301.510,00)
539	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW	(2.300.000,00)	0,00	0,00	(2.300.000,00)
540	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	(3.908.750,00)	0,00	0,00	(3.908.750,00)
541	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	(22.496.727,00)	0,00	0,00	(22.496.727,00)
542	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	(17.820.000,00)	0,00	0,00	(17.820.000,00)
543	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	(46.000.000,00)	0,00	0,00	(46.000.000,00)
544	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	(1.315.417,00)	0,00	0,00	(1.315.417,00)
545	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	(1.291.667,00)	0,00	0,00	(1.291.667,00)
546	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	(3.592.141.726,00)	(227.377.900,00)	(227.315.400,00)	(3.592.204.226,00)
547	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(63.867.394.780,38)	(40.597.891.771,45)	(232.580.907,00)	(104.232.705.644,83)
548	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	(5.362.615.227,00)	(4.552.388,00)	(11.208.388,00)	(5.355.959.227,00)
549	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	(2.191.748.742,26)	(18.083.550,00)	(11.427.550,00)	(2.198.404.742,26)
550	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	(10.852.975.947,34)	0,00	(5.290.000,00)	(10.847.685.947,34)
551	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	(9.932.922.678,64)	(206.350.574,00)	(201.802.240,00)	(9.937.471.012,64)
552	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	(2.089.709.839,00)	(741.666,00)	0,00	(2.090.451.505,00)
553	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	(2.776.831.951,78)	0,00	(170.625,00)	(2.776.661.326,78)
554	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(10.297.535.922,30)	(170.625,00)	(2.360.832,00)	(10.295.345.715,30)
555	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	(6.701.875.963,00)	(3.860.832,00)	(1.500.000,00)	(6.704.236.795,00)
556	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	(950.573.843,70)	(412.999,00)	(412.999,00)	(950.573.843,70)
557	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(1.677.983.488,60)	(1.395.000,00)	(1.395.000,00)	(1.677.983.488,60)
558	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	(4.109.246.465,20)	0,00	0,00	(4.109.246.465,20)
559	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	(1.780.737.046,19)	0,00	0,00	(1.780.737.046,19)
560	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	(3.823.122.759,00)	0,00	0,00	(3.823.122.759,00)
561	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	(10.666.666,00)	0,00	0,00	(10.666.666,00)
562	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	(14.749.834,00)	0,00	0,00	(14.749.834,00)
563	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	(1.089.108.346,00)	0,00	(6.196.313,00)	(1.082.912.033,00)
564	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	(2.850.341.301,00)	(6.196.313,00)	0,00	(2.856.537.614,00)
565	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	(817.608.090,00)	0,00	(1.870.000,00)	(815.738.090,00)
566	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	(4.206.705.394,00)	(62.231.024,00)	(60.361.024,00)	(4.208.575.394,00)
567	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	(300.906.084,00)	0,00	0,00	(300.906.084,00)
568	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	(663.096.455,00)	0,00	0,00	(663.096.455,00)
569	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	(401.859.283,00)	0,00	0,00	(401.859.283,00)
570	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	(24.780.672,00)	0,00	0,00	(24.780.672,00)
571	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	(868.144.200,00)	0,00	0,00	(868.144.200,00)
572	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	(62.292.500,00)	0,00	0,00	(62.292.500,00)
573	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	(16.108.701,00)	0,00	(1.036.800,00)	(15.071.901,00)
574	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	(54.365.297,00)	(1.036.800,00)	0,00	(55.402.097,00)
575	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(192.187.550,00)	0,00	0,00	(192.187.550,00)
576	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	(35.650.000,00)	0,00	0,00	(35.650.000,00)
577	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	(104.152.834,00)	0,00	0,00	(104.152.834,00)
578	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(5.253.181,00)	0,00	0,00	(5.253.181,00)
579	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	(236.328.248,00)	0,00	(750.000,00)	(235.578.248,00)
580	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	(818.572.943,00)	(750.000,00)	0,00	(819.322.943,00)
581	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(6.552.961.623,03)	(175.967.620,00)	(175.967.620,00)	(6.552.961.623,03)
582	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(662.744.057,00)	0,00	0,00	(662.744.057,00)
583	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(748.613.220,00)	0,00	(158.346,00)	(748.454.874,00)
584	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	(2.004.575.540,00)	(158.346,00)	0,00	(2.004.733.886,00)
585	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	(330.540.534,00)	0,00	0,00	(330.540.534,00)
586	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	(296.332.586,00)	0,00	0,00	(296.332.586,00)
587	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(105.915.460,00)	0,00	0,00	(105.915.460,00)
588	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	(284.048.157,99)	0,00	0,00	(284.048.157,99)
589	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	(950.552.708,00)	0,00	(7.912.827,00)	(942.639.881,00)
590	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	(348.421.940,00)	(7.912.827,00)	0,00	(356.334.767,00)
591	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	(12.000.000,00)	0,00	0,00	(12.000.000,00)
592	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	(159.438,00)	0,00	0,00	(159.438,00)
593	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	(1.805.779,00)	0,00	0,00	(1.805.779,00)
594	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	(725.521,00)	0,00	0,00	(725.521,00)
595	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam	(1.650.000,00)	0,00	0,00	(1.650.000,00)
596	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	(2.906.690,00)	0,00	0,00	(2.906.690,00)
597	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	(13.065.500,00)	0,00	0,00	(13.065.500,00)
598	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	(1.770.833,00)	(5.301.265,00)	0,00	(7.072.098,00)
599	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(3.128.835.423,00)	(479.736.961,00)	0,00	(3.608.572.384,00)
600	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	(8.570.301,00)	0,00	0,00	(8.570.301,00)
601	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	(43.835.938,00)	0,00	0,00	(43.835.938,00)
602	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	(3.000.002,00)	0,00	0,00	(3.000.002,00)
603	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	(389.205.000,00)	0,00	0,00	(389.205.000,00)

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
604	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	(43.297.000,00)	0,00	0,00	(43.297.000,00)
605	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	(10.392.885,00)	0,00	0,00	(10.392.885,00)
606	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	(21.513.140,00)	0,00	(226.188,00)	(21.286.952,00)
607	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	(46.267.164,00)	(2.401.188,00)	(2.175.000,00)	(46.493.352,00)
608	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	(1.431.735.235,00)	0,00	(432.737.332,00)	(998.997.903,00)
609	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(4.636.952.855,00)	(432.737.332,00)	(36.980,00)	(5.069.653.207,00)
610	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument	(29.938.854,00)	(36.980,00)	0,00	(29.975.834,00)
611	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor	(1.162.134,00)	0,00	(1.988.800,00)	826.666,00
612	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	(16.319.466,00)	(1.988.800,00)	(4.048.000,00)	(14.260.266,00)
613	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	(157.100.125,00)	(4.048.000,00)	0,00	(161.148.125,00)
614	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	(2.978.938.433,00)	0,00	0,00	(2.978.938.433,00)
615	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	(1.170.646.033,00)	0,00	0,00	(1.170.646.033,00)
616	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	(1.149.226.972,00)	(15.000,00)	(169.470,00)	(1.149.072.502,00)
617	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	(1.063.611.221,80)	(174.138,00)	(5.754.375,00)	(1.058.030.984,80)
618	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	(1.085.043.862,78)	(5.754.375,00)	0,00	(1.090.798.237,78)
619	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	(4.133.000,00)	0,00	0,00	(4.133.000,00)
620	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	(604.912.018,00)	0,00	0,00	(604.912.018,00)
621	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	(32.358.407,00)	0,00	0,00	(32.358.407,00)
622	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	(2.530.752.395,00)	0,00	0,00	(2.530.752.395,00)
623	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	(2.987.768.651,00)	(25.000,00)	0,00	(2.987.793.651,00)
624	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	(3.590.342.925,00)	0,00	(3.006.250,00)	(3.587.336.675,00)
625	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	(7.856.691,00)	(3.006.250,00)	0,00	(10.862.941,00)
626	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	(2.336.770.036,00)	0,00	0,00	(2.336.770.036,00)
627	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	(43.920.358,00)	0,00	0,00	(43.920.358,00)
628	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	(280.692,00)	0,00	0,00	(280.692,00)
629	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	(179.743.277,00)	(19.419.059,00)	(19.419.059,00)	(179.743.277,00)
630	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	(4.800.467,00)	0,00	0,00	(4.800.467,00)
631	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	(5.457.201,00)	0,00	0,00	(5.457.201,00)
632	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	(1.034.442,00)	0,00	0,00	(1.034.442,00)
633	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	(53.900.000,00)	0,00	(400.000,00)	(53.500.000,00)
634	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	(2.433.336,00)	(400.000,00)	0,00	(2.833.336,00)
635	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan	(408.971.680,00)	0,00	0,00	(408.971.680,00)
636	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment	(3.059.464,00)	0,00	0,00	(3.059.464,00)
637	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Peralatan Hidrologi	(2.420.000,00)	0,00	0,00	(2.420.000,00)
638	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	(184.607.500,00)	0,00	0,00	(184.607.500,00)
639	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	(109.732.256,00)	0,00	0,00	(109.732.256,00)
640	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	(17.162.559,00)	0,00	0,00	(17.162.559,00)
641	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	(157.534.046,00)	0,00	0,00	(157.534.046,00)
642	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	(114.228.576,00)	0,00	0,00	(114.228.576,00)
643	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System	(225.916.831,00)	0,00	0,00	(225.916.831,00)
644	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel	(55.785.000,00)	0,00	0,00	(55.785.000,00)
645	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	(10.005.445,00)	0,00	0,00	(10.005.445,00)
646	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop	(35.038.912,00)	0,00	0,00	(35.038.912,00)
647	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB	(1.111.108,00)	0,00	0,00	(1.111.108,00)
648	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment	(387.500,00)	0,00	0,00	(387.500,00)
649	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	(190.336.133,00)	0,00	0,00	(190.336.133,00)
650	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	(2.344.013,00)	0,00	0,00	(2.344.013,00)
651	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	(2.937.320,00)	(1.516.406,00)	0,00	(4.453.726,00)
652	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(7.920.000,00)	0,00	(120.000,00)	(7.800.000,00)
653	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Non Senjata Api	(1.241.406,00)	0,00	(1.396.406,00)	155.000,00
654	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	(275.000,00)	0,00	0,00	(275.000,00)
655	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dakhura	(19.332.167,00)	0,00	0,00	(19.332.167,00)
656	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Fotografi Kepolisian	(9.285.836,00)	0,00	0,00	(9.285.836,00)
657	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	(1.613.750,00)	0,00	0,00	(1.613.750,00)
658	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(1.489.348.534,00)	0,00	0,00	(1.489.348.534,00)
659	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(59.197.146.443,19)	(1.642.033.887,00)	(1.648.122.429,01)	(59.191.057.901,18)
660	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(6.174.376,00)	0,00	0,00	(6.174.376,00)
661	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(418.727.318,00)	0,00	0,00	(418.727.318,00)
662	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(629.596.802,00)	(12.660.000,00)	(12.660.000,00)	(629.596.802,00)
663	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(11.258.012.205,89)	(410.986.220,00)	(408.402.521,99)	(11.260.595.903,90)
664	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(4.045.295.615,00)	(60.392.500,00)	(60.042.500,00)	(4.045.645.615,00)
665	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(7.394.792,00)	0,00	0,00	(7.394.792,00)
666	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik	(2.438.542,00)	0,00	0,00	(2.438.542,00)
667	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran	(31.197.917,00)	0,00	0,00	(31.197.917,00)
668	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Masker	(5.358.100,00)	0,00	0,00	(5.358.100,00)
669	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong	(1.125.000,00)	0,00	0,00	(1.125.000,00)
670	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	(1.723.768.409,00)	(994.071.576,00)	(994.071.576,00)	(1.723.768.409,00)
671	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	(14.300.000,00)	0,00	0,00	(14.300.000,00)

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
672	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	(18.089.063,00)	0,00	0,00	(18.089.063,00)
673	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	(16.666.660,00)	0,00	0,00	(16.666.660,00)
674	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	(1.255.257.356,00)	0,00	0,00	(1.255.257.356,00)
675	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(1.849.657.380,00)	0,00	0,00	(1.849.657.380,00)
676	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	(1.794.273,00)	0,00	0,00	(1.794.273,00)
677	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	(225.889.982,00)	0,00	0,00	(225.889.982,00)
678	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	(182.909.458,00)	0,00	(203.125,00)	(182.706.333,00)
679	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara	(35.520.000,00)	0,00	0,00	(35.520.000,00)
680	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	(209.742.858,00)	0,00	0,00	(209.742.858,00)
681	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(26.527.635.527,99)	(4.231.247.728,96)	0,00	(30.758.883.256,95)
682	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(3.185.667.752,00)	0,00	0,00	(3.185.667.752,00)
683	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(1.066.455.560,00)	0,00	0,00	(1.066.455.560,00)
684	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(1.684.812.680,00)	0,00	0,00	(1.684.812.680,00)
685	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(21.802.766.943,00)	0,00	0,00	(21.802.766.943,00)
686	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	(244.920.380,00)	0,00	0,00	(244.920.380,00)
687	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(717.710.439,00)	0,00	0,00	(717.710.439,00)
688	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(2.063.577.801,00)	0,00	0,00	(2.063.577.801,00)
689	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(83.673.610.731,72)	(21.740.221.782,13)	0,00	(105.413.832.513,85)
690	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(516.851.303,00)	0,00	0,00	(516.851.303,00)
691	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(8.371.453.747,00)	0,00	0,00	(8.371.453.747,00)
692	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(258.467.863,00)	0,00	0,00	(258.467.863,00)
693	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(396.530.463,00)	0,00	0,00	(396.530.463,00)
694	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	(1.787.120.194,46)	0,00	0,00	(1.787.120.194,46)
695	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	(4.401.614.672,00)	0,00	0,00	(4.401.614.672,00)
696	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	(2.107.803.594,00)	0,00	0,00	(2.107.803.594,00)
697	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	(487.703.996,00)	0,00	0,00	(487.703.996,00)
698	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(8.864.276,00)	0,00	0,00	(8.864.276,00)
699	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	(284.188.082,00)	0,00	0,00	(284.188.082,00)
700	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(3.853.920.448,00)	0,00	0,00	(3.853.920.448,00)
701	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(8.515.377,00)	0,00	0,00	(8.515.377,00)
702	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(682.471,00)	0,00	0,00	(682.471,00)
703	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	(153.492.513,00)	0,00	0,00	(153.492.513,00)
704	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	(38.548.358,00)	0,00	0,00	(38.548.358,00)
705	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(43.598.283,00)	0,00	0,00	(43.598.283,00)
706	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(129.700.035,89)	0,00	0,00	(129.700.035,89)
707	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(251.936.263,00)	0,00	0,00	(251.936.263,00)
708	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(6.697.911.464,00)	0,00	0,00	(6.697.911.464,00)
709	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(9.804.651.824,53)	0,00	0,00	(9.804.651.824,53)
710	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(505.911.512,00)	0,00	0,00	(505.911.512,00)
711	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	(235.942.008,00)	0,00	0,00	(235.942.008,00)
712	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	(24.285.800,00)	0,00	0,00	(24.285.800,00)
713	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	(6.916.858,00)	0,00	0,00	(6.916.858,00)
714	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(1.584.960.281,00)	0,00	0,00	(1.584.960.281,00)
715	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	(204.507.896,00)	0,00	0,00	(204.507.896,00)
716	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	(39.682.978,00)	0,00	0,00	(39.682.978,00)
717	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	(152.204.374,00)	0,00	0,00	(152.204.374,00)
718	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(43.204.947,00)	0,00	0,00	(43.204.947,00)
719	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(5.217.707.252,00)	0,00	0,00	(5.217.707.252,00)
720	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(241.943.625.584,93)	(12.400.652.918,15)	(9.591.958.929,48)	(244.752.319.573,60)
721	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(473.886.237.019,01)	(53.149.082.544,56)	0,00	(527.035.319.563,57)
722	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(15.263.876.857,00)	0,00	0,00	(15.263.876.857,00)
723	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(1.627.004.279,00)	0,00	0,00	(1.627.004.279,00)
724	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	(16.914.809.036,00)	0,00	0,00	(16.914.809.036,00)
725	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	(8.298.089.282,00)	0,00	0,00	(8.298.089.282,00)
726	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	(83.449.235,00)	0,00	0,00	(83.449.235,00)
727	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	(662.770.887,00)	0,00	0,00	(662.770.887,00)
728	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	(150.460.240,00)	0,00	0,00	(150.460.240,00)
729	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	(11.486.735.759,00)	0,00	0,00	(11.486.735.759,00)
730	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	(28.666.222.230,40)	0,00	0,00	(28.666.222.230,40)
731	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	(217.888.860,00)	0,00	0,00	(217.888.860,00)
732	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	(108.650.262,00)	0,00	0,00	(108.650.262,00)
733	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	(13.860.253,00)	0,00	0,00	(13.860.253,00)
734	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	(5.616.433,00)	0,00	0,00	(5.616.433,00)
735	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	(956.925.792,00)	0,00	0,00	(956.925.792,00)
736	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	(89.741.000,00)	0,00	0,00	(89.741.000,00)
737	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	(12.719.117,00)	0,00	0,00	(12.719.117,00)
738	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	(6.338.193.793,00)	0,00	0,00	(6.338.193.793,00)

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
739	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	(30.770.452,00)	0,00	0,00	(30.770.452,00)
740	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(21.357.106.008,00)	0,00	0,00	(21.357.106.008,00)
741	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	(25.028.181.241,00)	0,00	0,00	(25.028.181.241,00)
742	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	(3.410.424.386,00)	0,00	0,00	(3.410.424.386,00)
743	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	(79.924.907,00)	0,00	0,00	(79.924.907,00)
744	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	(890.562.325,00)	0,00	0,00	(890.562.325,00)
745	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	(19.391.332,00)	0,00	0,00	(19.391.332,00)
746	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	(2.725.404.704,00)	0,00	0,00	(2.725.404.704,00)
747	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	(346.696.729,00)	0,00	0,00	(346.696.729,00)
748	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(124.431.590,00)	0,00	0,00	(124.431.590,00)
749	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	(2.112.016.409,00)	0,00	0,00	(2.112.016.409,00)
750	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	(149.897.240,00)	0,00	0,00	(149.897.240,00)
751	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	(405.816.525,00)	0,00	0,00	(405.816.525,00)
752	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	(267.591.653,00)	0,00	0,00	(267.591.653,00)
753	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	(2.417.835,00)	0,00	0,00	(2.417.835,00)
754	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	(2.569.440,00)	0,00	0,00	(2.569.440,00)
755	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	(49.990.670,00)	0,00	0,00	(49.990.670,00)
756	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	(22.947.265,00)	0,00	0,00	(22.947.265,00)
757	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(5.620.539.408,80)	0,00	0,00	(5.620.539.408,80)
758	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	(2.113.762.802,00)	0,00	0,00	(2.113.762.802,00)
759	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	(1.611.925,00)	0,00	0,00	(1.611.925,00)
760	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	(56.892.759,00)	0,00	0,00	(56.892.759,00)
761	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	(890.847.719,00)	0,00	0,00	(890.847.719,00)
762	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	(4.600.000,00)	0,00	0,00	(4.600.000,00)
763	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	(201.059.201,00)	0,00	0,00	(201.059.201,00)
764	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	(46.480.000,00)	0,00	0,00	(46.480.000,00)
765	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	(137.840.345,00)	0,00	0,00	(137.840.345,00)
766	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	(8.624.572,00)	0,00	0,00	(8.624.572,00)
767	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	(17.533.750,00)	0,00	0,00	(17.533.750,00)
768	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	(403.345.876,00)	0,00	0,00	(403.345.876,00)
769	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	(334.755.237,00)	0,00	0,00	(334.755.237,00)
770	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(262.348.997,00)	0,00	0,00	(262.348.997,00)
771	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(42.080.617,00)	0,00	0,00	(42.080.617,00)
772	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	(520.833,00)	0,00	0,00	(520.833,00)
773	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	(60.161.586,00)	0,00	0,00	(60.161.586,00)
774	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	(56.535.271,00)	0,00	0,00	(56.535.271,00)
775	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	(5.103.710.733,00)	0,00	0,00	(5.103.710.733,00)
776	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	(326.291.067,00)	0,00	0,00	(326.291.067,00)
777	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	(378.633.675,00)	0,00	0,00	(378.633.675,00)
778	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	(2.229.760.327,00)	0,00	0,00	(2.229.760.327,00)
779	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	(6.652.919,00)	0,00	0,00	(6.652.919,00)
780	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(292.840.185,00)	0,00	0,00	(292.840.185,00)
781	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(3.794.618.788,00)	0,00	0,00	(3.794.618.788,00)
782	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	(61.688.663,00)	0,00	0,00	(61.688.663,00)
783	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	(22.584.145,00)	0,00	0,00	(22.584.145,00)
784	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	(1.119.249,00)	0,00	0,00	(1.119.249,00)
785	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	(18.156.172,00)	0,00	0,00	(18.156.172,00)
786	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	(3.201.322.524,31)	(2.288.941.412,33)	(912.381.111,98)
TOTAL		**1.690.929.554.140,62**	**472.531.622.279,81**	**481.892.744.196,08**	**1.681.568.432.224,35**

Lampiran XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI / PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR
			TAMBAH				KURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.677.688.034,79	0,00	899.079.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(899.079.070,00)	17.677.688.034,79
2	Dinas Kesehatan	16.913.703.195,59	0,00	1.738.985.787,00	0,00	0,00	0,00	8.961.880.000,00	0,00	0,00	1.345.989.999,34	11.036.798.981,93
3	RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	355.177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.177.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	116.154.181.105,98	0,00	0,00	9.745.709.411,00	0,00	0,00	25.358.495.830,80	0,00	0,00	(8.735.352.219,00)	91.806.042.467,18
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	198.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.094.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	17.957.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.957.500,00
7	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemuda Dan Olahraga	782.304.261,00	0,00	267.251.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(267.251.357,00)	782.304.261,00
9	Dinas Pariwisata	68.593.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.593.725,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	71.468.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.468.800,00
11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan	2.143.043.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.043.800,00
12	Sekretariat DPRD Kab. Sigi	747.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.011.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	306.439.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.439.311,00
14	Badan Pendapatan Daerah	34.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700.000,00
TOTAL		**155.163.922.922,36**	**0,00**	**3.211.755.525,00**	**9.745.709.411,00**	**0,00**	**0,00**	**34.320.375.830,80**	**0,00**	**0,00**	**(8.555.692.646,66)**	**125.245.319.380,90**

Lampiran XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 August 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.784.220.575,46	24.214.043,66	762.500.000,00	31.045.934.619,12
2	Dinas Kesehatan	92.700.304,16	4.056.043.658,00	74.394.000,00	4.074.349.962,16
3	RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	21.089.345.599,00	62.134.830.091,71	63.727.789.527,00	19.496.386.163,71
4	Puskesmas Biromaru	1.317.797.387,00	0,00	1.317.797.387,00	0,00
5	Puskesmas Dolo	593.669.154,00	0,00	593.669.154,00	0,00
6	Puskesmas Marawola	923.602.487,00	0,00	923.602.487,00	0,00
7	Puskesmas Baluase	333.594.239,00	0,00	333.594.239,00	0,00
8	Puskesmas Dombusoi	17.066.000,00	0,00	17.066.000,00	0,00
9	Puskesmas Kamaipura	7.625.824,00	0,00	7.625.824,00	0,00
10	Puskesmas Panderee	71.691.400,00	0,00	71.691.400,00	0,00
11	Puskesmas Kulawi	478.091.347,00	0,00	478.091.347,00	0,00
12	Puskesmas Gimpu	54.192.300,00	0,00	54.192.300,00	0,00
13	Puskesmas Kantewu	65.800.000,00	0,00	65.800.000,00	0,00
14	Puskesmas Towulu	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
15	Puskesmas Palolo	14.785.000,00	0,00	14.785.000,00	0,00
16	Puskesmas Banpres	5.983.000,00	0,00	5.983.000,00	0,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	18.688.406.174,88	6.760.903.101,52	6.364.944.673,00	19.084.364.603,40
18	Dinas Perumahan dan Kawasan	543.974.584,00	11.285.531,61	0,00	555.260.115,61
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	227.492.629,33	132.040.000,00	132.040.001,00	227.492.628,33
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.652.626.730,00	762.466.950,00	762.466.950,00	1.652.626.730,00
21	Dinas Pemuda Dan Olahraga	81.882.999,00	122.070.683,50	0,00	203.953.682,50
22	Sekretariat Daerah Kab. Sigi	36.930.879.968,00	440.811.981,00	297.120.000,00	37.074.571.949,00
23	Bagian Pemerintahan	74.163.801,00	20.807.467,90	74.163.801,00	20.807.467,90
24	Bagian Organisasi	0,00	68.775.600,00	0,00	68.775.600,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.372.073.602,00	1.257.482.404,75	2.955.071.316,14	(325.515.309,39)
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.076.025.822,10	0,00	1.534.414.515,00	18.541.611.307,10
27	Badan Pendapatan Daerah	588.992.273,56	0,01	0,00	588.992.273,57
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	174.931.920,00	48.824.950,00	0,00	223.756.870,00
29	Inspektorat Kab. Sigi	735.592.059,00	1.487.317.876,00	1.487.317.876,00	735.592.059,00
30	Kecamatan Gumbasa	65.231.000,00	9.157.000,00	0,00	74.388.000,00
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	232.219.624,00	0,00	0,00	232.219.624,00
32	Dinas Sosial	75.445.188,00	0,00	0,00	75.445.188,00
33	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	78.863.418,00	0,00	0,00	78.863.418,00
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	96.859.165,00	0,00	0,00	96.859.165,00
35	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	2.501.172.577,00	0,00	0,00	2.501.172.577,00
36	Dinas Lingkungan Hidup	3.017.491.623,00	0,00	0,00	3.017.491.623,00
37	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	933.305.106,00	0,00	0,00	933.305.106,00
38	Dinas Pengendalian Penduduk dan	133.738.384,00	0,00	0,00	133.738.384,00
39	Dinas Perhubungan	1.406.766.079,08	0,00	0,00	1.406.766.079,08
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.441.701.505,00	0,00	0,00	1.441.701.505,00
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	177.811.110,00	0,00	0,00	177.811.110,00
42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	329.661.614,00	0,00	0,00	329.661.614,00
43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	103.778.750,00	0,00	0,00	103.778.750,00
44	Dinas Pariwisata	3.093.165.003,00	0,00	0,00	3.093.165.003,00
45	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	870.360.644,00	0,00	0,00	870.360.644,00
46	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan	26.692.013.594,00	0,00	0,00	26.692.013.594,00
47	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	815.503.504,00	0,00	0,00	815.503.504,00
48	Bagian Umum	(10.377.331.737,00)	0,00	0,00	(10.377.331.737,00)
49	Sekretariat DPRD Kab. Sigi	1.828.570.497,00	0,00	0,00	1.828.570.497,00
50	Kecamatan Dolo	15.886.281,00	0,00	0,00	15.886.281,00
51	Kecamatan Dolo Barat	17.452.000,00	0,00	0,00	17.452.000,00
52	Kecamatan Dolo Selatan	22.605.228,00	0,00	0,00	22.605.228,00
53	Kecamatan Kulawi Selatan	22.661.667,00	0,00	0,00	22.661.667,00
54	Kecamatan Kulawi	8.997.100,00	0,00	0,00	8.997.100,00
55	Kecamatan Lindu	20.766.000,00	0,00	0,00	20.766.000,00
56	Kecamatan Marawola	15.357.000,00	0,00	0,00	15.357.000,00
57	Kecamatan Marawola Barat	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
58	Kecamatan Kinovaro	33.085.054,00	0,00	0,00	33.085.054,00
59	Kecamatan Palolo	21.539.858,00	0,00	0,00	21.539.858,00
60	Kecamatan Nokilalaki	2.762.500,00	0,00	0,00	2.762.500,00
61	Kecamatan Tanambulava	20.756.500,00	0,00	0,00	20.756.500,00
62	Kecamatan Sigi Biromaru	57.662.048,00	0,00	0,00	57.662.048,00
63	Kecamatan Sigi Kota	4.138.130,00	0,00	0,00	4.138.130,00
64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	176.020.656,00	0,00	0,00	176.020.656,00
TOTAL		**171.983.943.849,57**	**77.337.031.339,66**	**82.086.120.797,14**	**167.234.854.392,09**

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN

NIHIL

Lampiran XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Utang Beban PegawaiKekurangan Pemb. Tunjangan Beras (temuan BPK tahun 2017)	298.613.640,00	-		298.613.640,00
2	Utang TPG (temuan BPK tahun 2012)	10.300.300,00	-		10.300.300,00
3	Utang Beban PegawaiJKM PNS dan JKM DPRD (temuan Inspekorat tahun 2014)	446.241.922,00	-		446.241.922,00
4	Utang Tagihan 4% BPJS bulan Nov dan Des 2025 (TPP)		154.934.556,00		154.934.556,00
5	Utang Beban PegawaiGaji Pokok	103.159.000,00	-	(103.159.000,00)	-
6	Utang Beban PegawaiHonorarium thn 2025		4.080.000,00		4.080.000,00
7	Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Selang Bulan Desember		14.773.721,00		14.773.721,00
8	Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Selang Bulan Desember		144.622.500,00		144.622.500,00
9	Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Selang Bulan Desember		412.042.946,00		412.042.946,00
10	Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Selang Bulan Desember		13.841.015,00		13.841.015,00
11	Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Selang Bulan Desember		9.272.658,00		9.272.658,00
12	Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Selang Bulan Desember		14.878.181,00		14.878.181,00
13	Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Selang Bulan Desember		6.481.530,00		6.481.530,00
14	Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Selang Bulan Desember		12.416.085,00		12.416.085,00
15	Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Selang Bulan Desember		13.958.165,00		13.958.165,00
16	Utang Jampersal	455.761.564,00			455.761.564,00
17	Utang Jamkesda	1.198.585.950,00		(1.198.585.950,00)	-
18	Utang Belanja Barang dan Jasa	239.910.073,00			239.910.073,00
19	Utang Belanja Barang dan Jasa BOK	838.378,00			838.378,00
20	Utang Masagena	1.301.668.300,00	13.656.000,00	(828.893.889,00)	486.430.411,00
21	Utang Belanja Barang dan Jasa Thn 2025	-	477.656.280,00		477.656.280,00
22	Untuk Pembayaran belanja yang belum dibayarkan:	-	5.557.000,00		5.557.000,00
23	Utang Jasa Medik dari Piutang Klaim BPJS :	-	-	839.855.040,00	839.855.040,00
24	Utang Beban Barang dan Jasa Tahun 2018	2.366.076,00	-	-	2.366.076,00
25	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020	1.168.842,98	-	-	1.168.842,98
26	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021	1.766.871,00	-	-	1.766.871,00
27	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	2.035.585.876,00	-	(2.029.080.250,00)	6.505.626,00
28	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023	50.560.722,00	-	(50.560.722,00)	-
29	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024	11.895.164.602,00	-	(11.889.710.878,00)	5.453.724,00
30	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025		13.866.039.373,00	(687.653.792,00)	13.178.385.581,00
31	Utang Belanja Pemeliharaan Sungai	1.459.297.983,00			1.459.297.983,00
32	Koreksi atas jumlah utang berdasarkan temuan BPK RI, dipotong secara langsung pada SP2D Nomor 02355/SP2DLS/DPPKAD/2016	(174.097.983,00)			(174.097.983,00)
33	Utang Barang Yang Diserahkan Ke masyarakat	73.128.000,00			73.128.000,00
34	Utang/Pinjaman kepada Pihak Lain atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Temuan Inspektorat atas LHP BPK Thn 2019)	48.700.000,00			48.700.000,00
35	Utang Penerangan Jalan Umum Thn 2024	530.566.844,00	-	(530.566.844,00)	-
36	Utang Uang diserahkan ke Masyarakat (AlQolam)	142.091.000,00		(142.091.000,00)	-

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
37	Utang Belanja Barang dan Jasa Thn 2025		704.745.000,00		704.745.000,00
38	Utang Belanja Honorarium thn 2025		25.320.000,00		25.320.000,00
39	Utang Belanja Barang dan Jasa Thn 2025Bag. Prokopim		30.620.400,00		30.620.400,00
40	Utang Belanja Barang dan Jasa Thn 2025Bag. Pengadaan Brg dan Jasa		2.462.793,00		2.462.793,00
41	Utang Belanja Barang dan Jasa Thn 2025		4.060.000,00		4.060.000,00
42	Utang Belanja Modal Peralatan & Mesin Pengadaan Nurscall Thn 2019	68.281.950,00	-		68.281.950,00
43	Utang Belanja Modal Tahun 2024 :				-
44	Peralatan Mesin	339.378.267,00	-	(333.743.750,00)	5.634.517,00
45	Gedung dan Bangunan	89.820.000,00	-	(89.820.000,00)	-
46	Utang Belanja Modal Tahun 2025 :				-
47	Peralatan Mesin		152.011.608,00		152.011.608,00
48	Gedung dan Bangunan		104.741.000,00		104.741.000,00
49	Utang Belanja Modal JIJ Pembukaan Jalan Kantong Produksi Desa Kanuna Kec. Kinovaro	6.084.000,00			6.084.000,00
50	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Gedung Kantor	105.083.000,00	-	-	105.083.000,00
51	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Thn 2025 (Pagar dan Tembok Pengaman Tanah Kantor		89.459.541,00		89.459.541,00
52	Utang Belanja Subsidi (Bunga Pinjaman Dana KUR di BNI)	1.012.970,00	-	-	1.012.970,00
53	Utang Belanja Subsidi (Bunga Pinjaman Dana KUR di BTN)	1.438.741,00	-	(1.118.230,00)	320.511,00
54	Utang Potongan 1% BPJS thn 2025		69.056.350,00		69.056.350,00
55	Utang Pajak Dana BOS 2022	64.716.515,00		(64.716.515,00)	-
56	Koreksi Pajak Dana BOS 2022	5.450.294,00	-	(5.450.294,00)	-
57	Utang Pajak Dana BOS 2023	86.904.679,90	-	(8.597.404,00)	78.307.275,90
58	Utang Pajak Dana BOS 2024	77.591.032,10	-		77.591.032,10
59	Utang Pajak Dana BOS 2025		403.710.823,00	(396.030.109,02)	7.680.713,98
60	Utang PFK BOK 2023	2.478.129,00	-	(2.478.129,00)	-
61	Utang PFK JKN Kapitasi 2023	107.166,00	-	(107.166,00)	-
62	Utang PFK BOK 2024	1.514.630,00	-	(1.297.630,00)	217.000,00
63	Utang PFK JKN Kapitasi 2024	505.879,00	-		505.879,00
64	Utang PFK JKN Kapitasi 2025 :	-	*68.244.700,00*		68.244.700,00
65	Lebih Salur PPJ (temuan BPK Thn 2014)	16.811.424,00			16.811.424,00
66	Sisa Bantuan Keuangan Khusus TAPE 2025		5.625.026,00		5.625.026,00
	Jumlah Utang Jangka pendek	20.988.556.637,98	16.824.267.251,00	(17.523.806.512,02)	20.289.017.376,96

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	

NIHIL

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2025 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN *ANGGARAN BERIKUTNYA*

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALIASASI	TAMBAH (KURANG)	%		

NIHIL

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	BUMD/PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER	STATUS	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANKANG	TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH

NIHIL

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	BUMD/PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN	BEBAN	LABA (RUGI) KOTOR	PENDAPATAN DILUAR USAHA	BEBAN DILUAR USAHA	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

NIHIL